



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TANGGAL 16 MARET 2012

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
PULAU JAWA-BALI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SUMBER PETA :

1. Peta Rupabumi Indonesia, skala 1 : 250.000, BAKOSURTANAL, 2000.
2. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, BAKOSURTANAL, 2009.
3. Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional, Kementerian Pekerjaan Umum, 2006.
4. Rencana Induk Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, 2010.
5. Permen PU No. 11A Tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai, 2006.
6. Peta Batimetri skala 1 : 1.000.000, BAKOSURTANAL, 2004.

RIWAYAT PETA :

1. Kedalaman informasi peta adalah skala 1 : 500.000.
2. Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaaahan mikro.
3. Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional.
4. Hasil kajian Tim Teknis Rencana Tata Ruang Pulau dan hasil analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU JAWA-BALI
KETERANGAN GAMBAR

Skala 1 : 500.000



BATAS ADMINISTRASI

- Isthmus Persepsi
- Isthmus Kepulauan/Kota
- Isthmus Kecamatan/Kota Lainnya
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Lintas Kotines (Koridor), telah ditatibahas (BLK)
- Batas Lari Terrestrial (BLT)
- Garis Pantai
- Daratan Sungai

JARINGAN PRASARANA TRANSPORTASI

- Alur Lari Kepulauan Indonesia (ALLEI)
- Lintas Perhubungan Antarprovinsi Di Pulau Jawa-Bali Dengan Persepsi Di Luar Pulau Jawa-Bali
- Lintas Perhubungan Antarprovinsi Di Pulau Jawa-Bali
- Lintas Perhubungan Sabuk Selatan
- Lintas Perhubungan Penghubung Sabuk
- Jaringan Jalan Arteri Primer
- Jaringan Jalan Kolektor Primer
- Jaringan Jalan Strategis Nasional
- Jaringan Jalan Bebas Hambatan
- Jaringan Jalur Kereta Api

- Jaringan Jalan Lintas Utama
- Jaringan Jalan Lintas Tengah
- Jaringan Jalan Lintas Selatan
- Jaringan Jalan Pengumpulan
- Jaringan Jalan P. Madura
- Jaringan Jalan P. Bali

BANDAR UDARA

- Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Primer
- Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder
- Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Terseier

PELABUHAN LAUT

- Pelabuhan Utama
- Pelabuhan Pengumpul

SISTEM PERCOBAAN

- Pasisi Magister (Nasional/PLN)
- Pasisi Magister Wilayah (PLN)
- Kemondak Perkotaan

JARINGAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL

- Jaringan Telekomunikasi Antariksa

JARINGAN ENERGI NASIONAL (JARINGAN TRANSMISI TENAGA LISTRIK DAN JARINGAN TPA GAS FOMD)

- Jaringan listrik Saluran transmisi Tegangan Extra Tinggi (JETET)
- Jaringan transmisi tenaga listrik dengan tegangan Tinggi (JLIT)
- Jaringan Pipa Minyak dan Gas Bumi

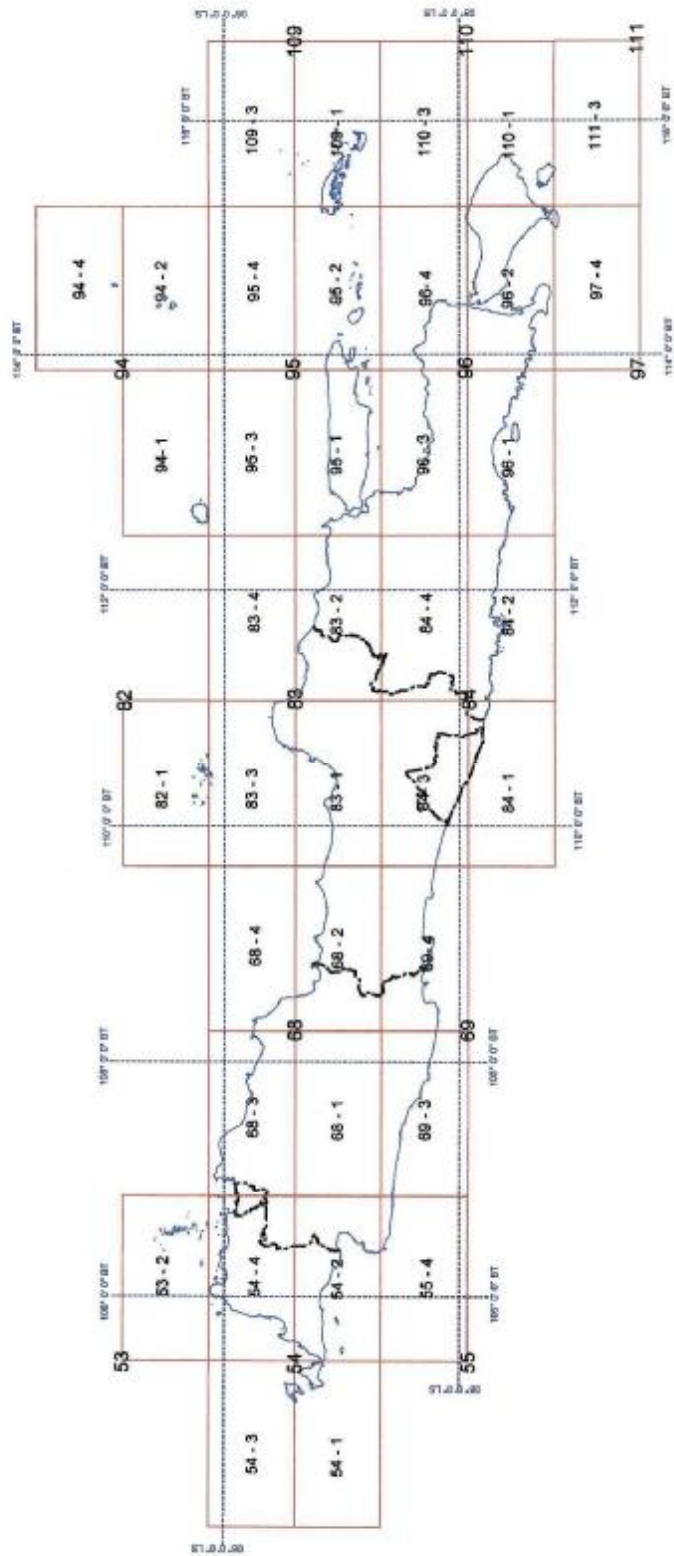
- Pemadatan/tepatan Listrik
- Kilang Minyak

SARANA DAN PRASARANA AIR BAKU NASIONAL

- Bendungan / Wehrit
- Wilayah Sungai Nasional (WSN)

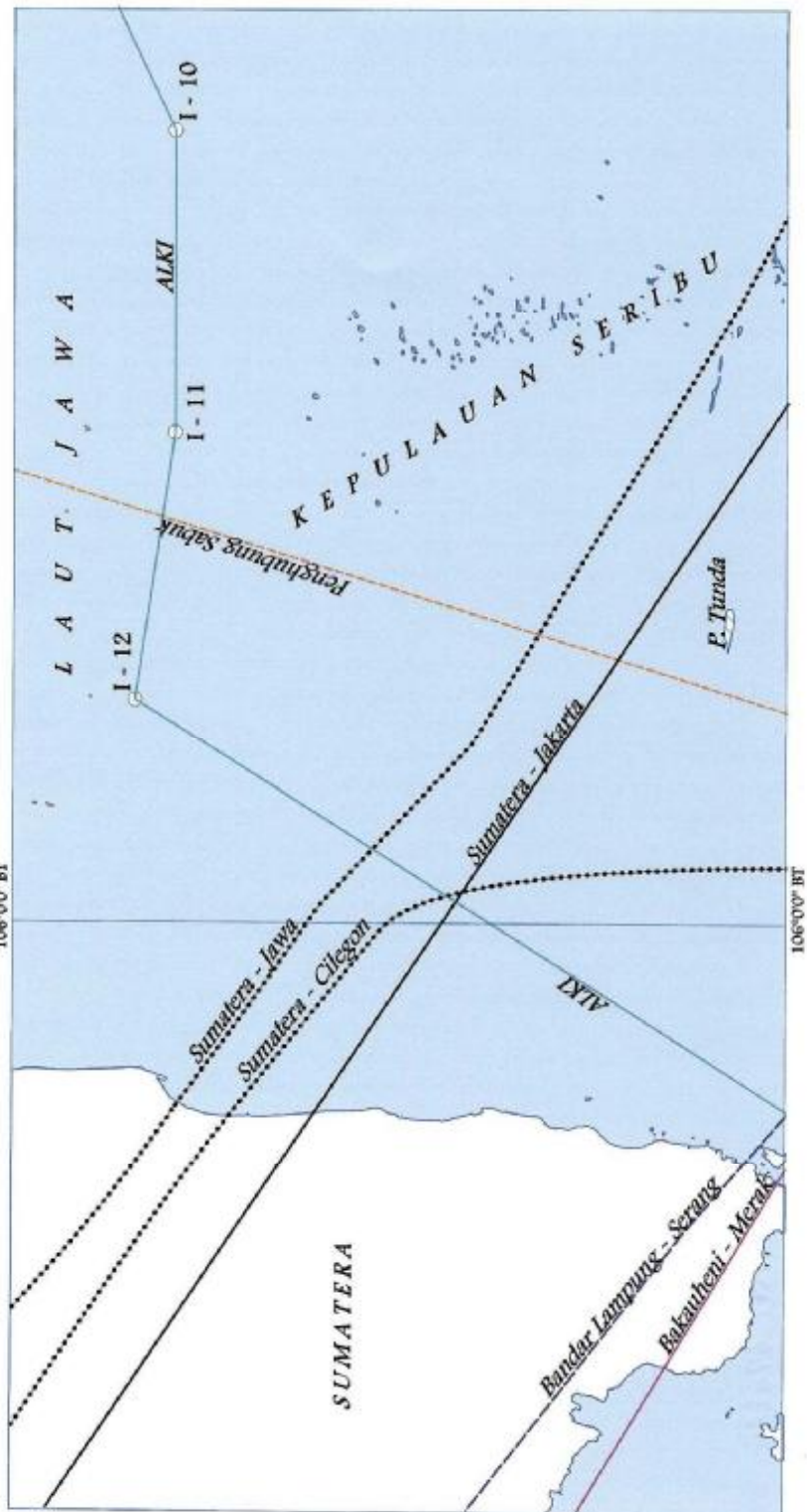


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
INDEKS PETA



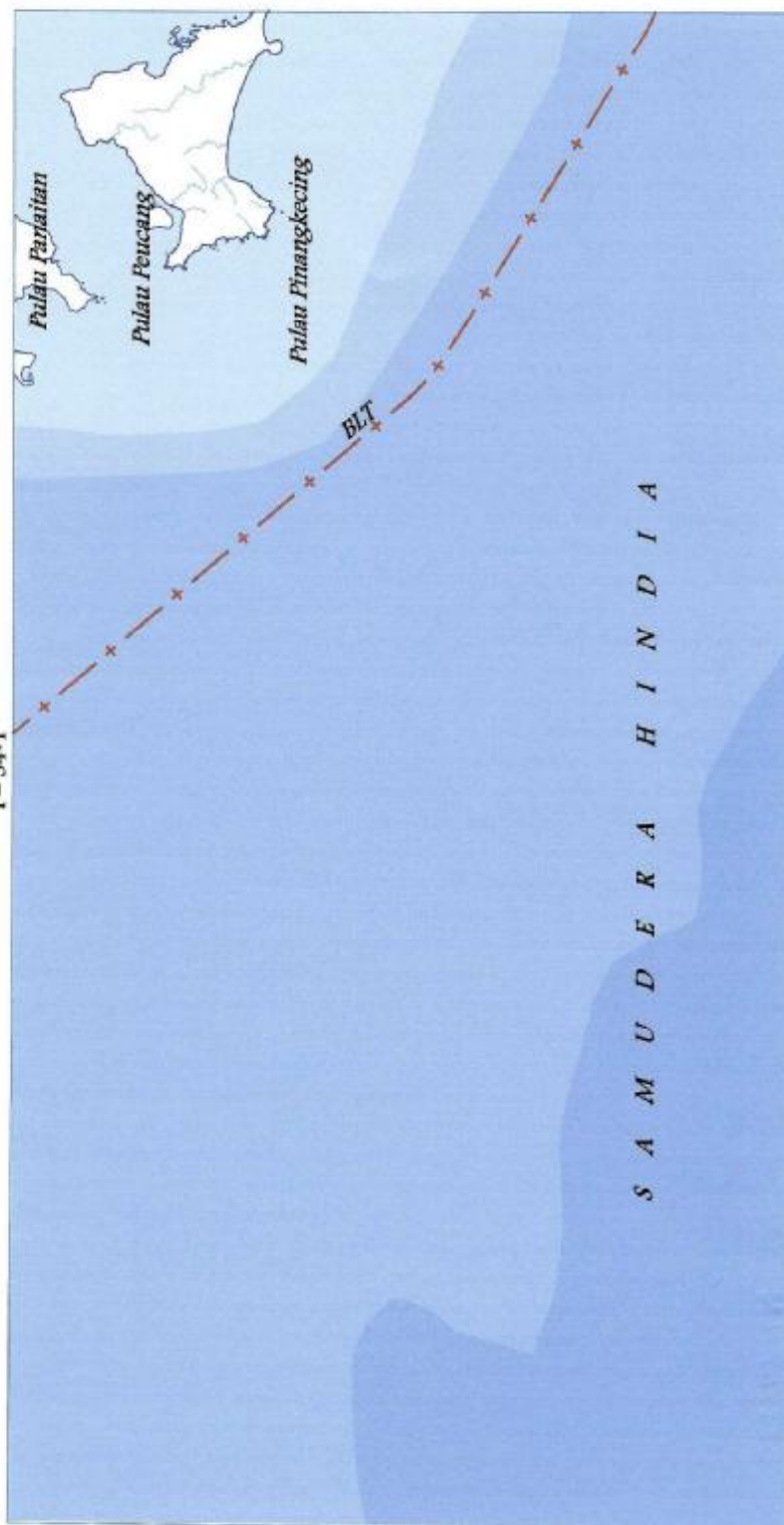


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I - 53-2



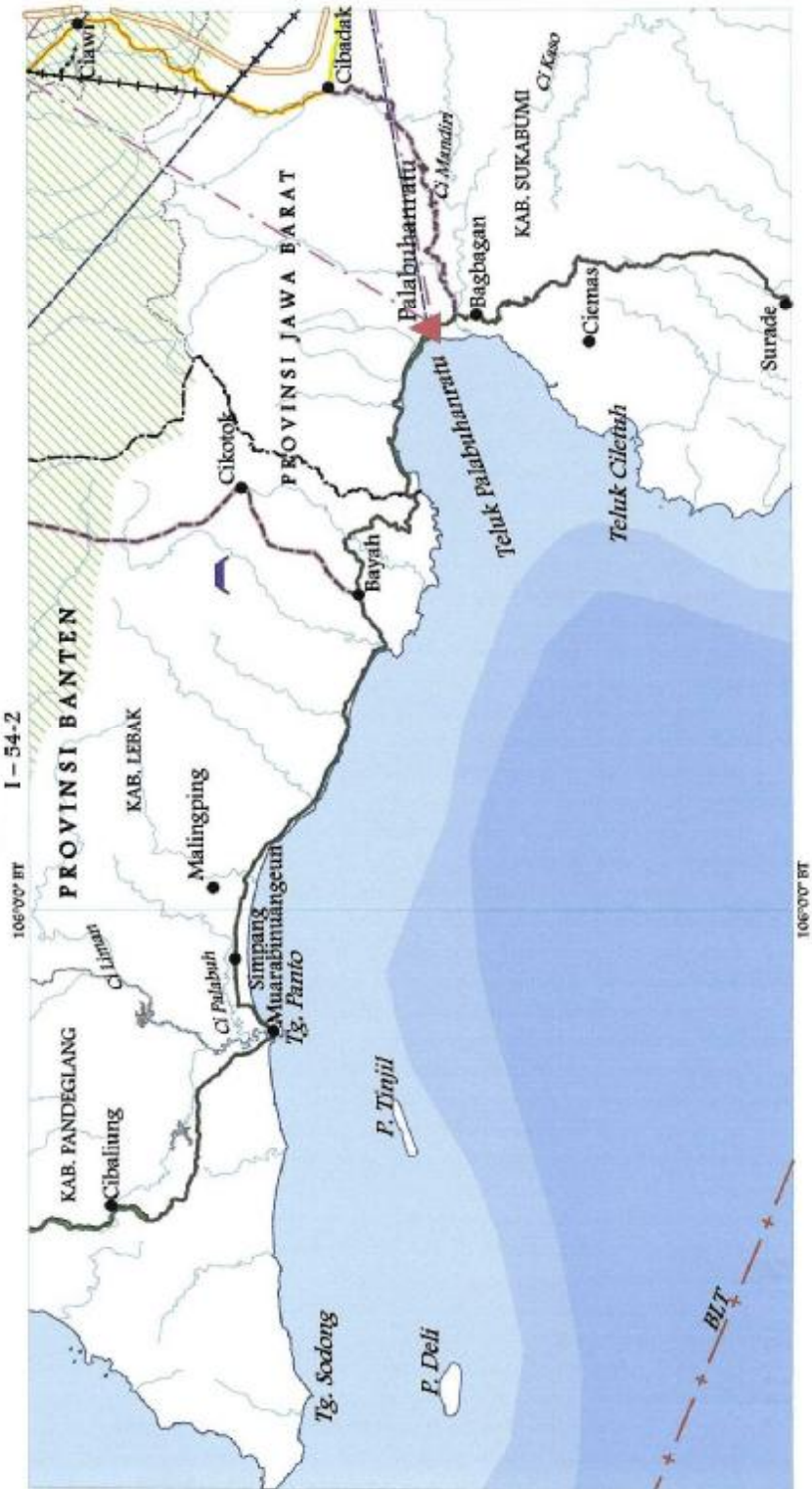


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I - 54 - 1



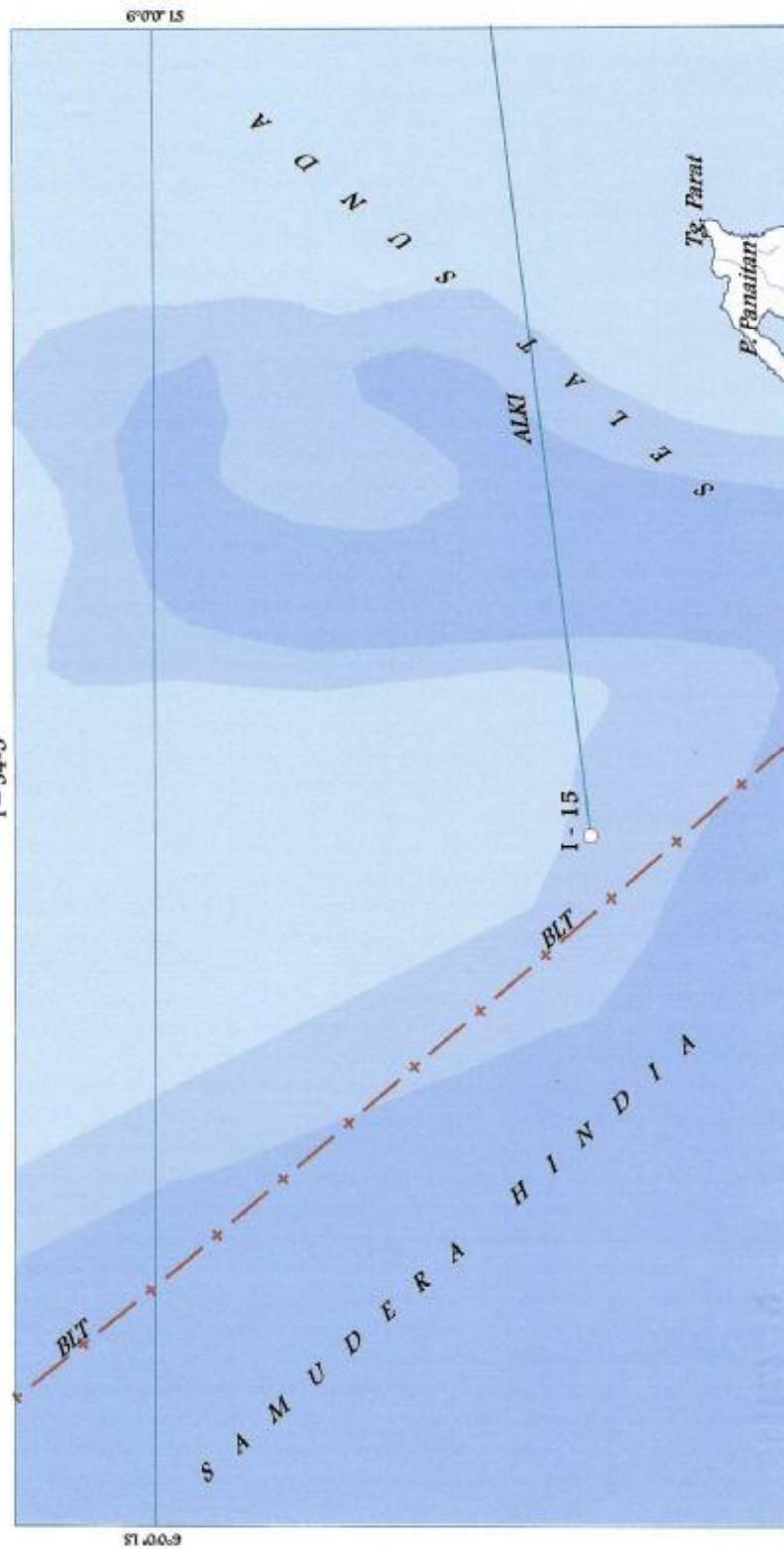


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I - 54-2



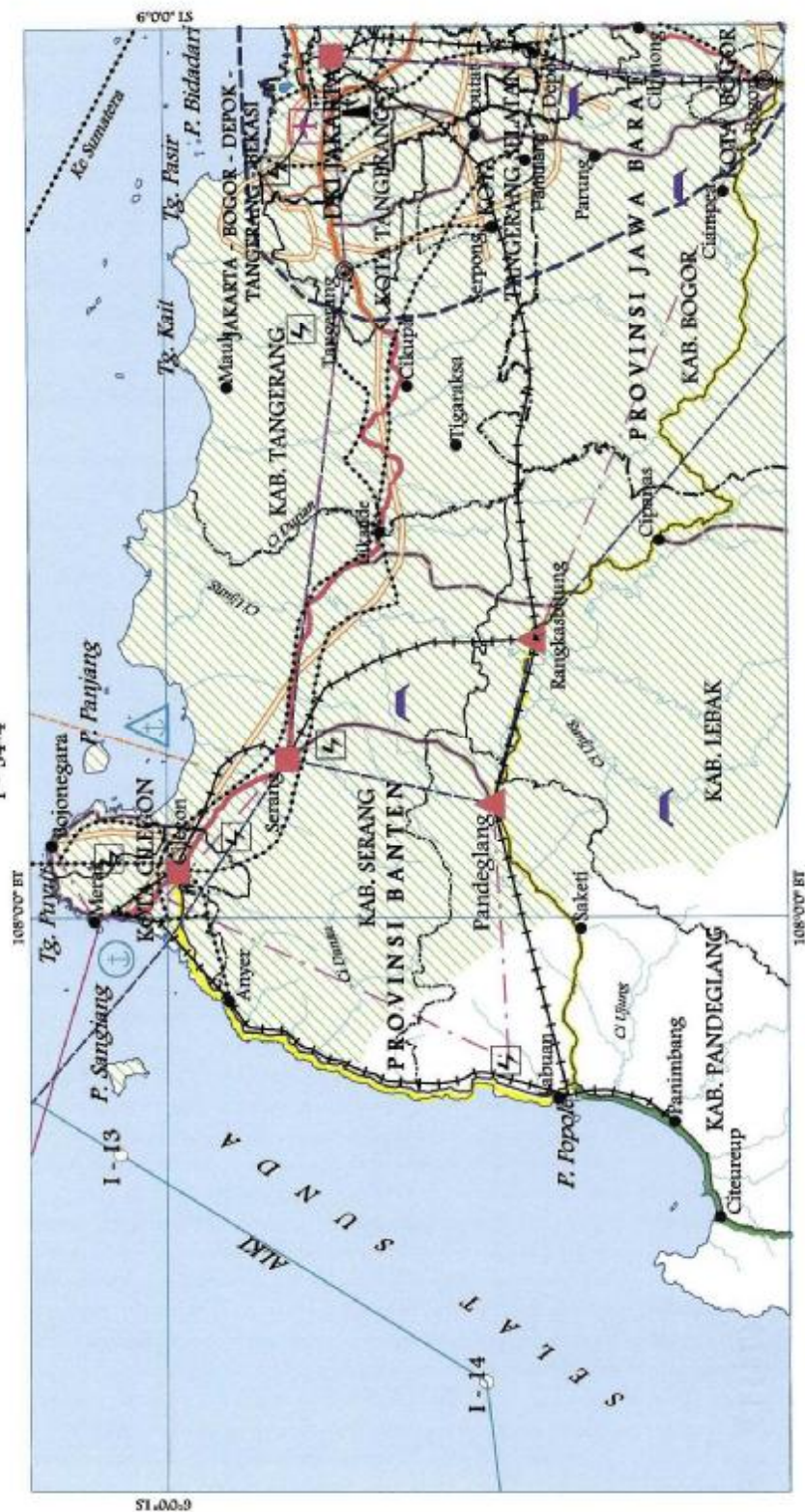


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I-54-3





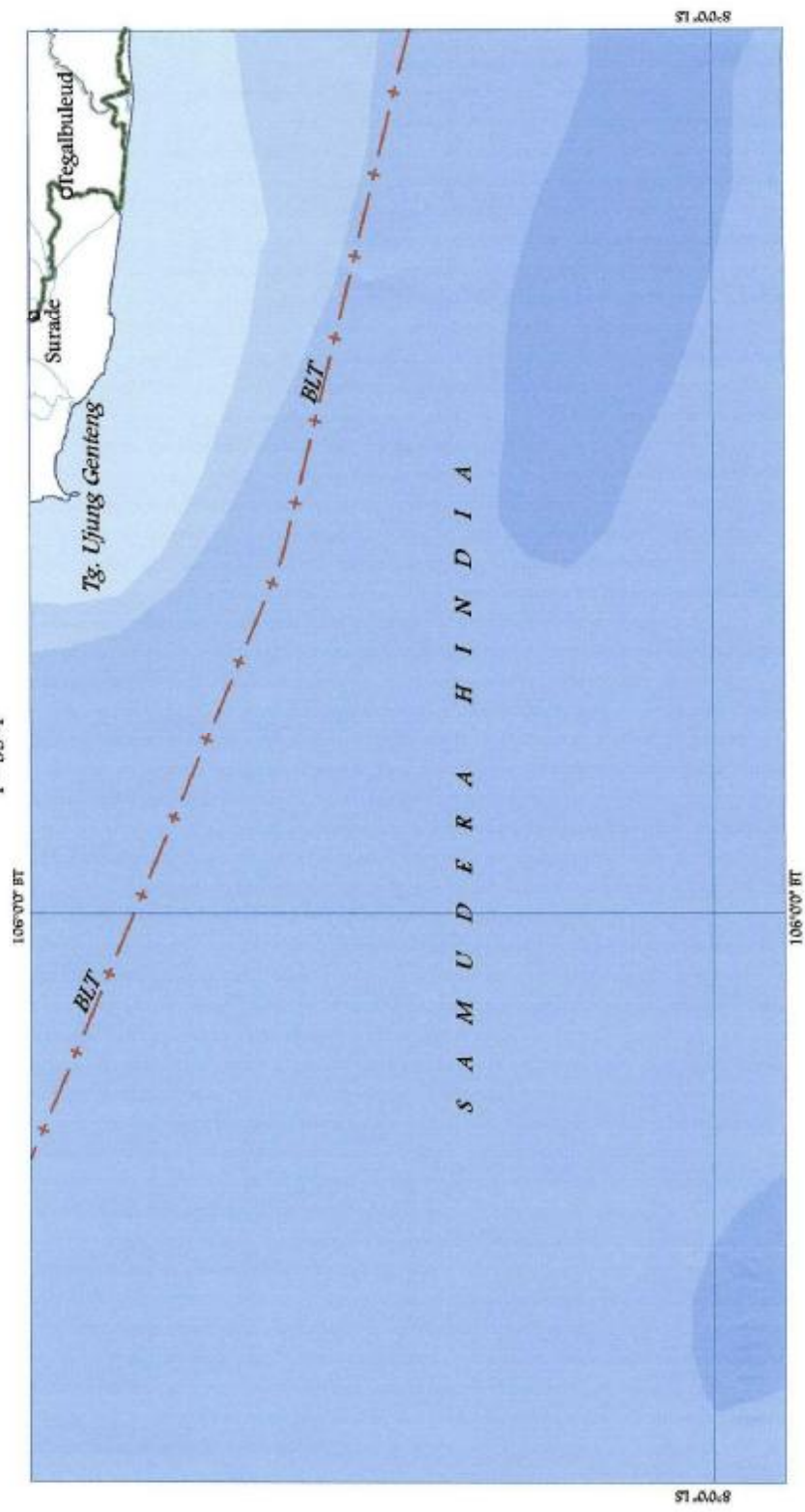
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I - 54-4



SI.00.9



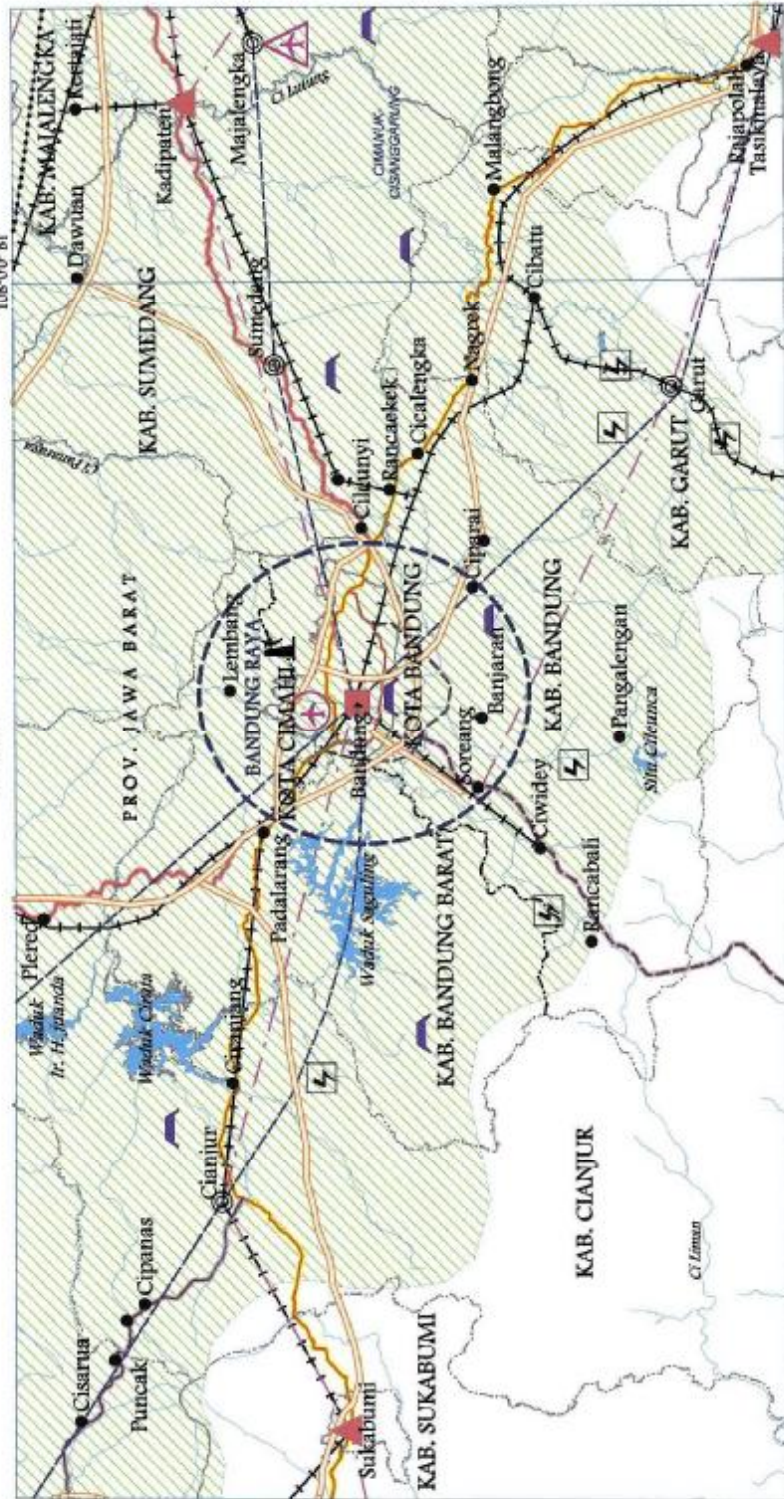
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I - 55 - 4





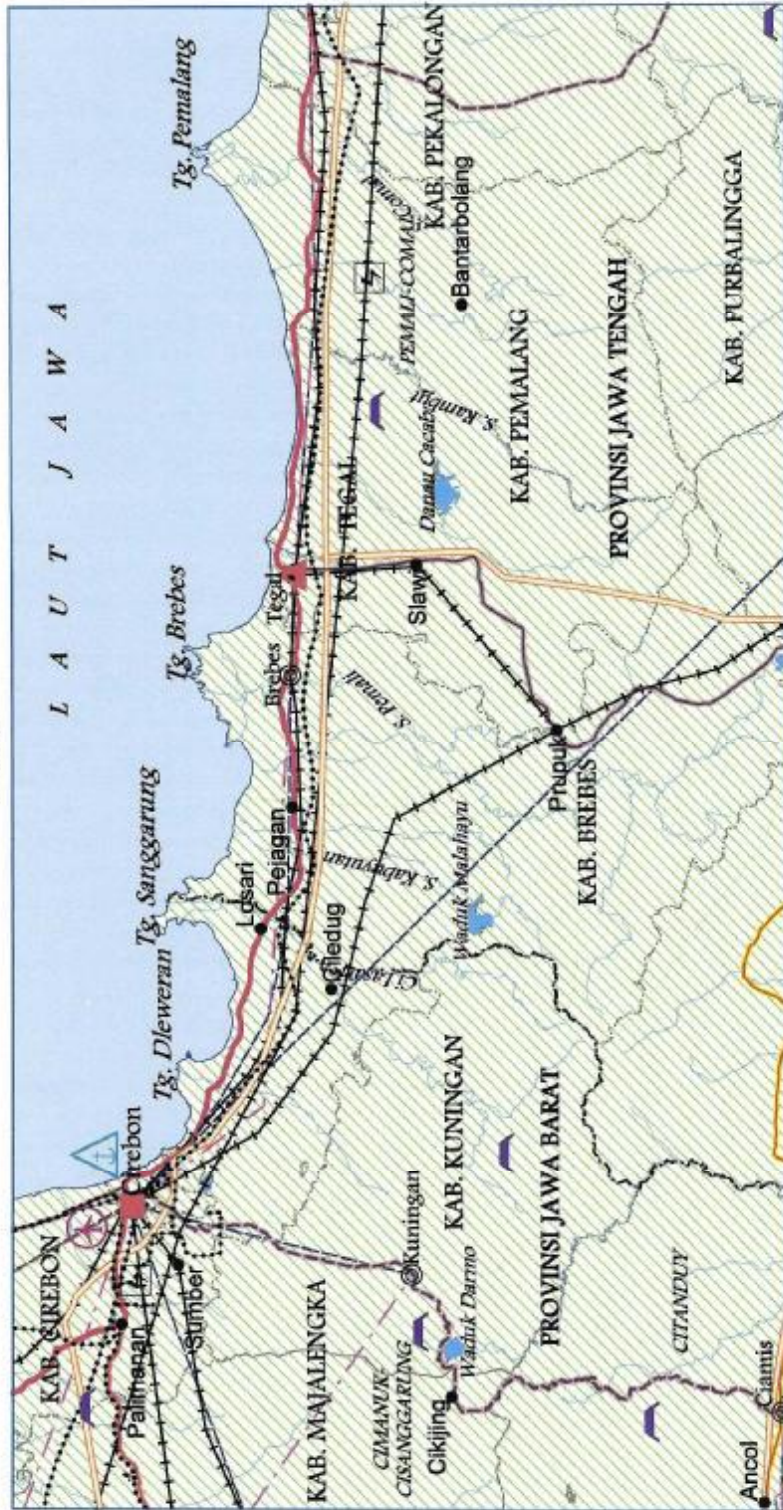
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 68-1



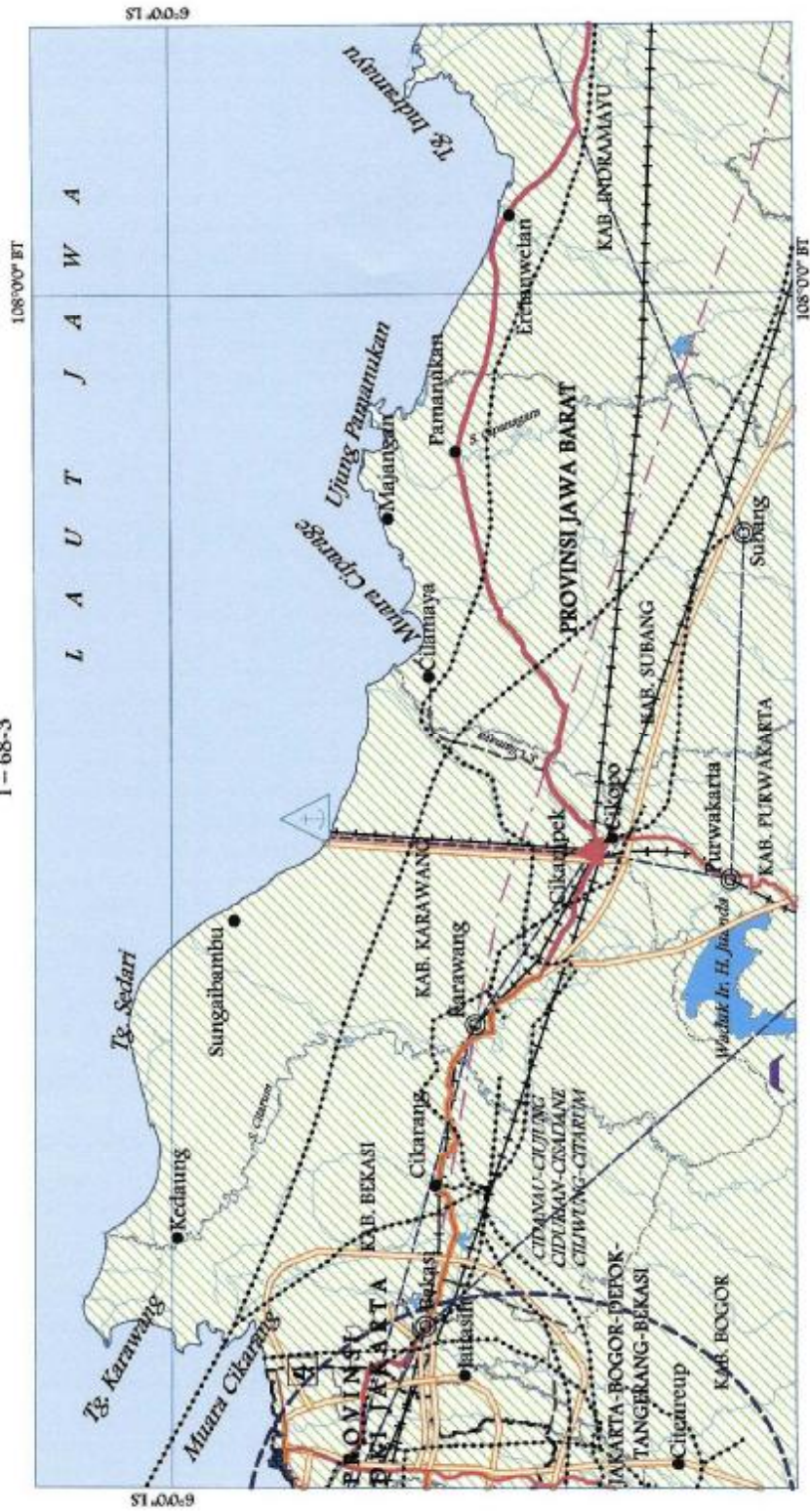


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I-68-2



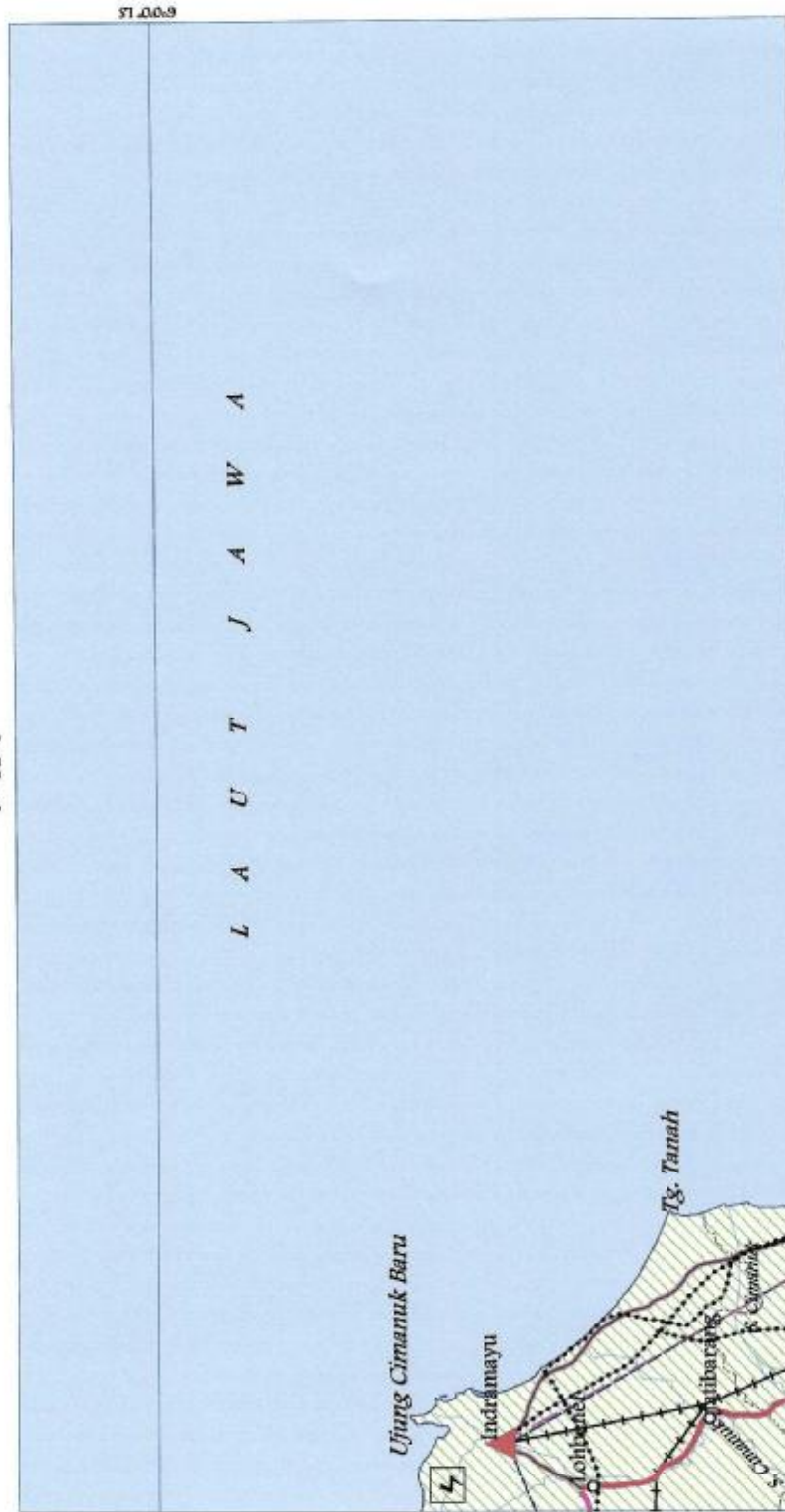


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I-68-3



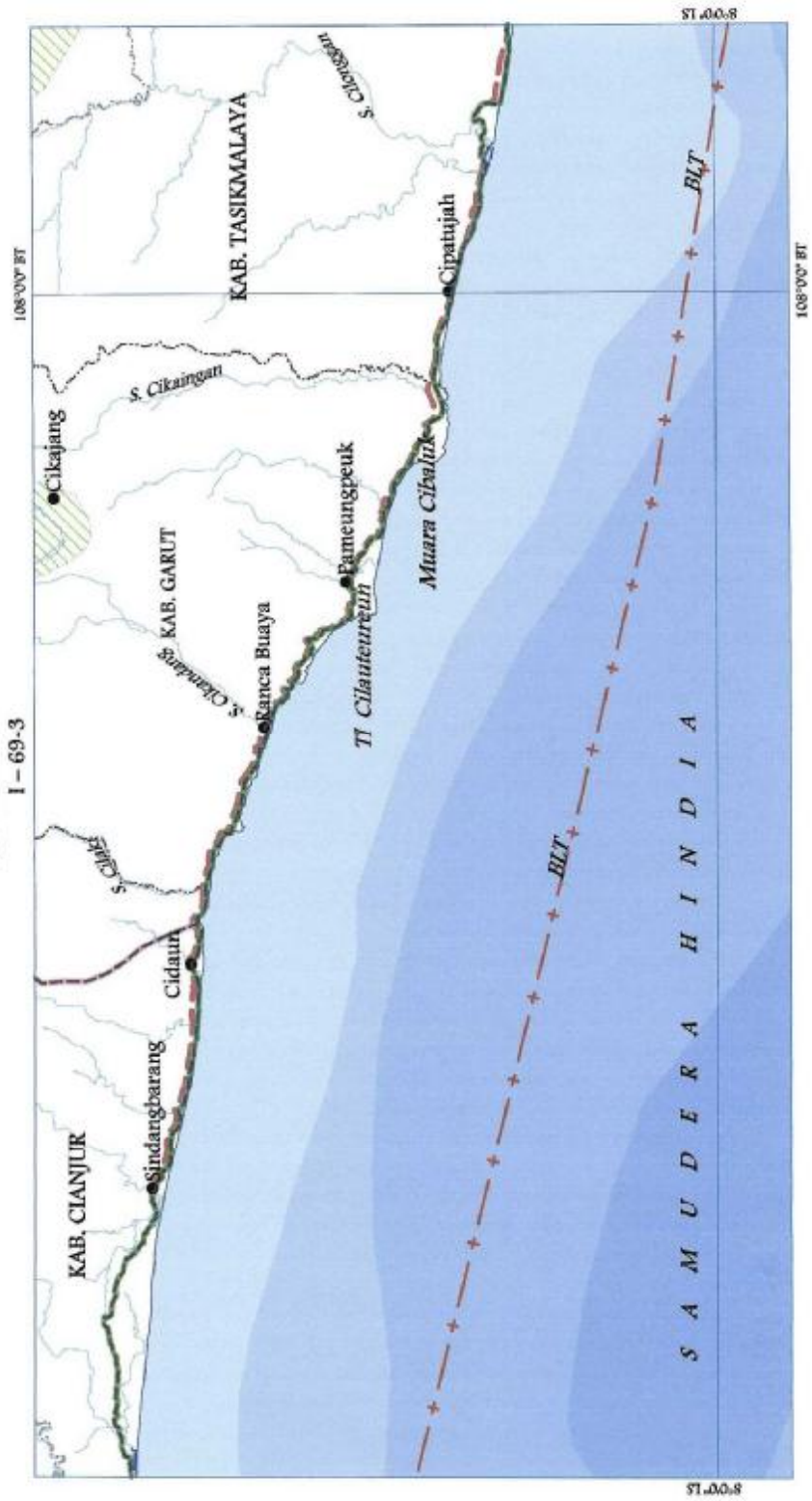


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I-68-4



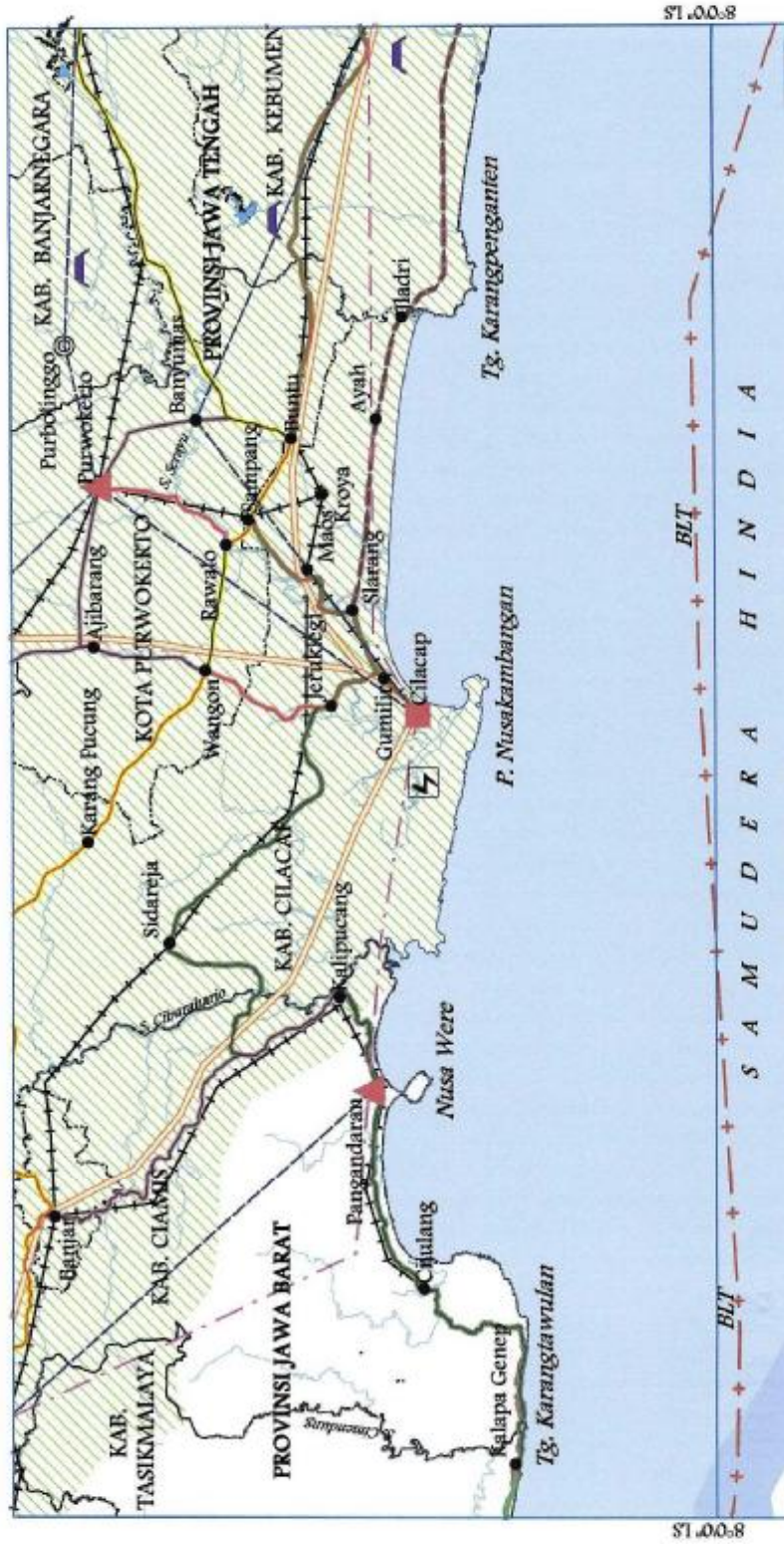


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I-69-3



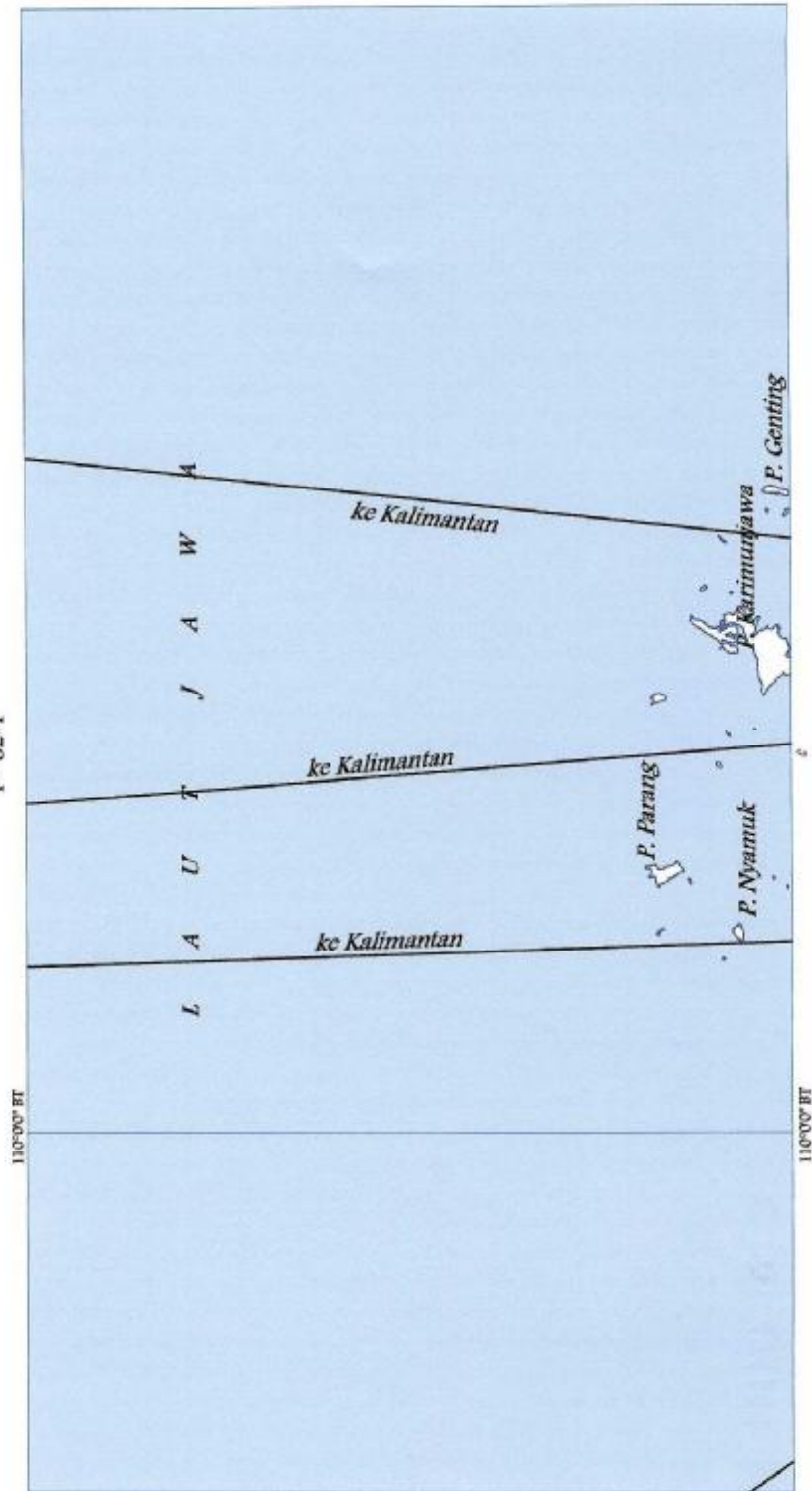


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I-69-4



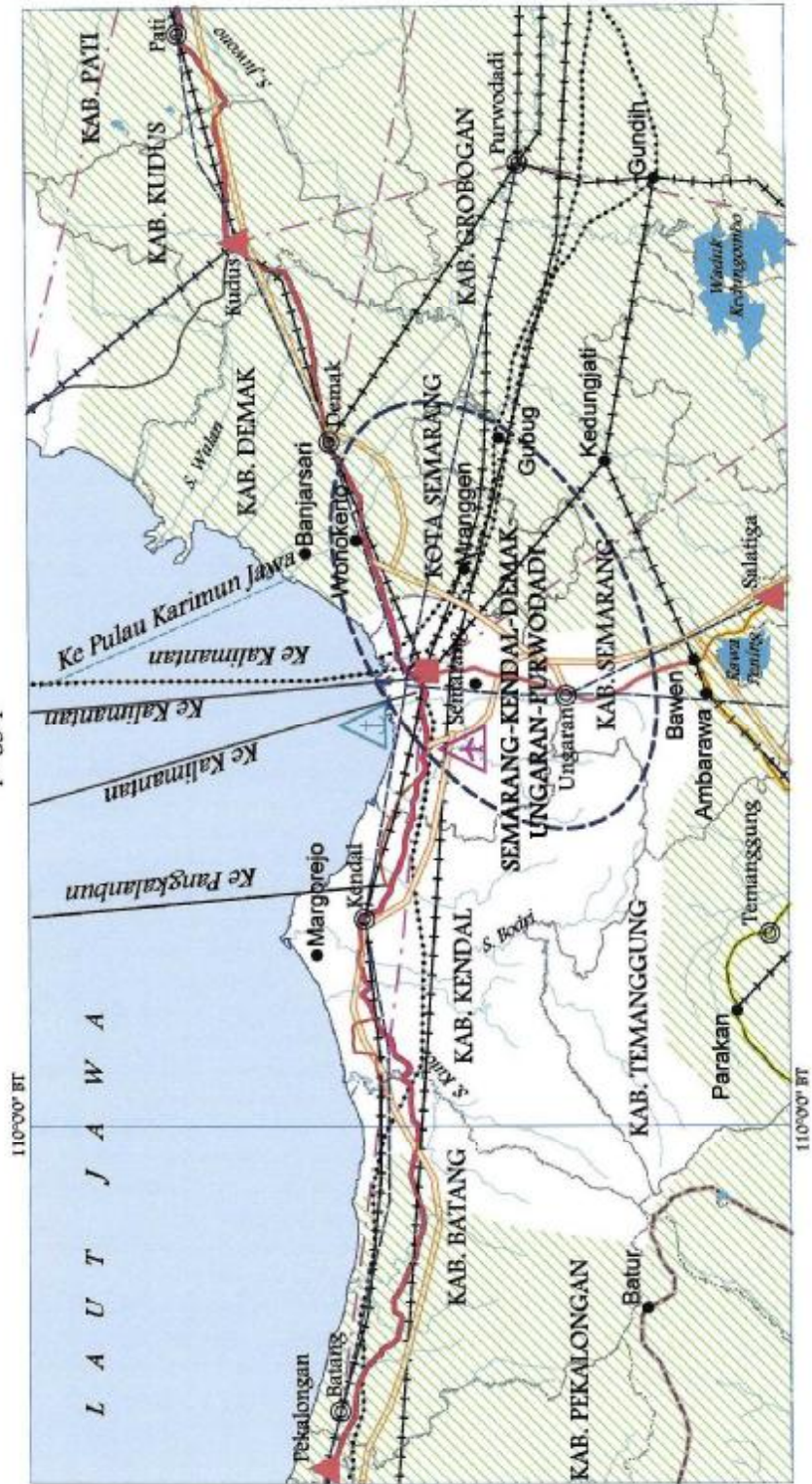


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I-82-1



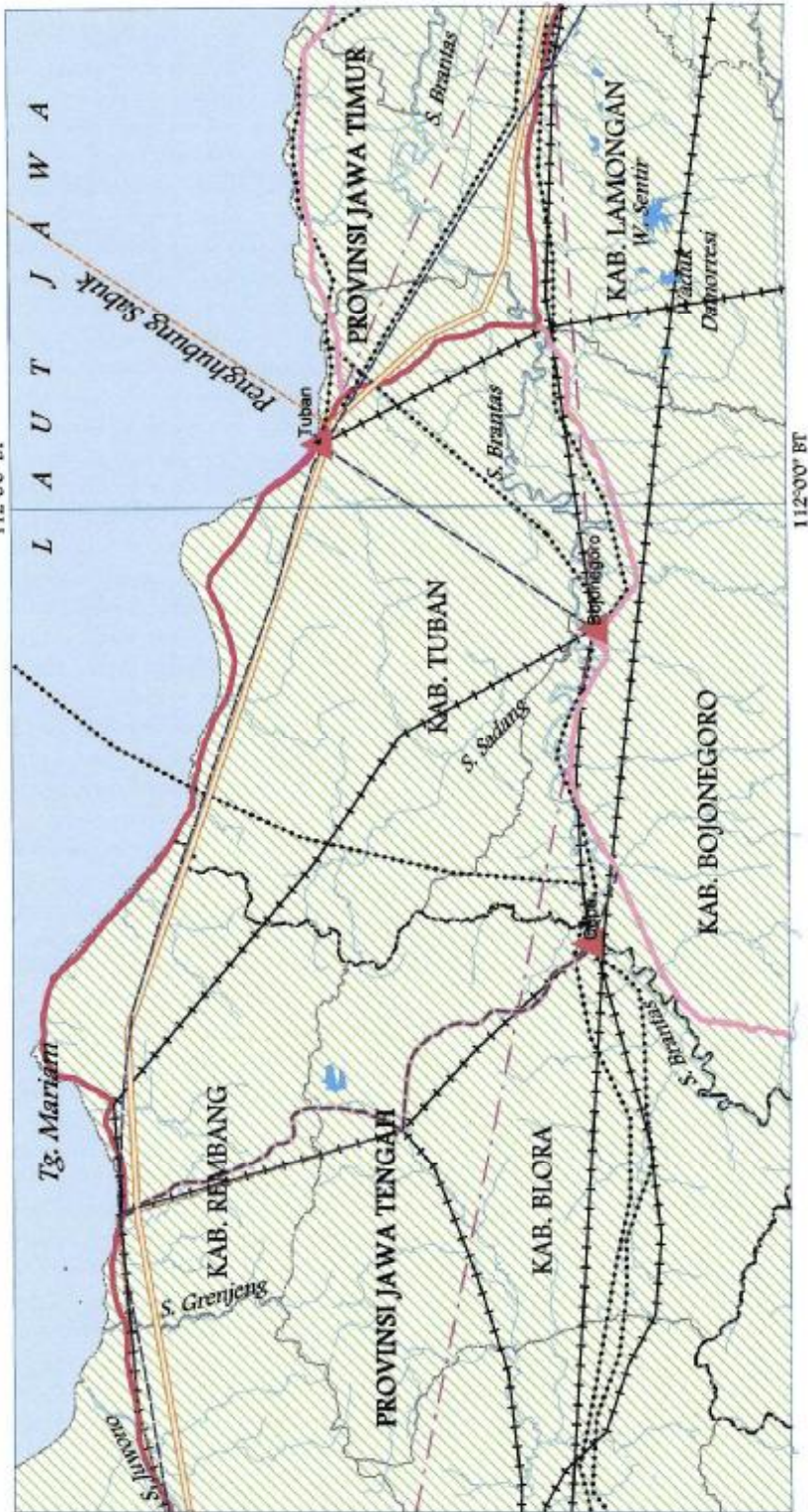


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I-83-1



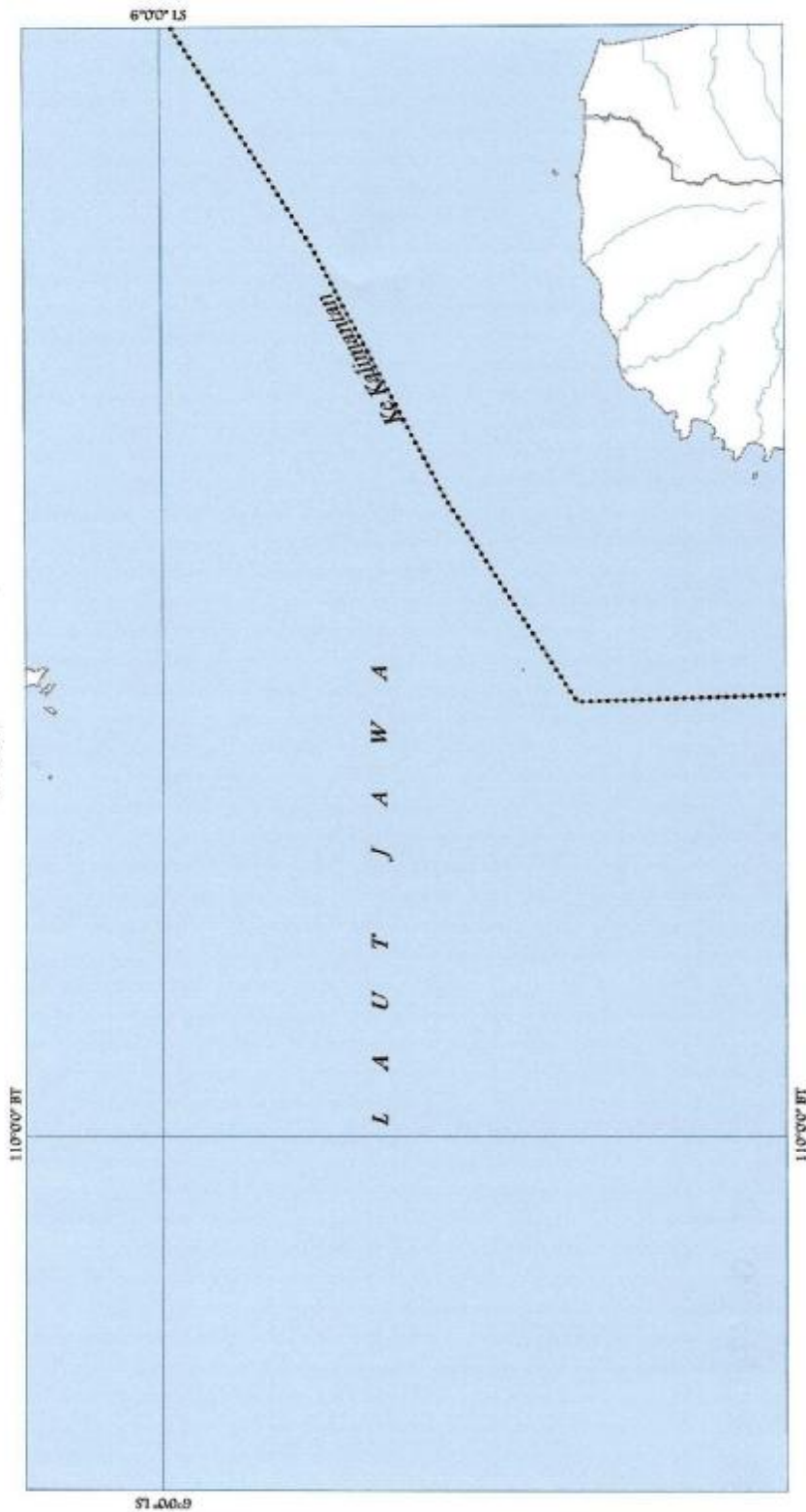


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I-83-2





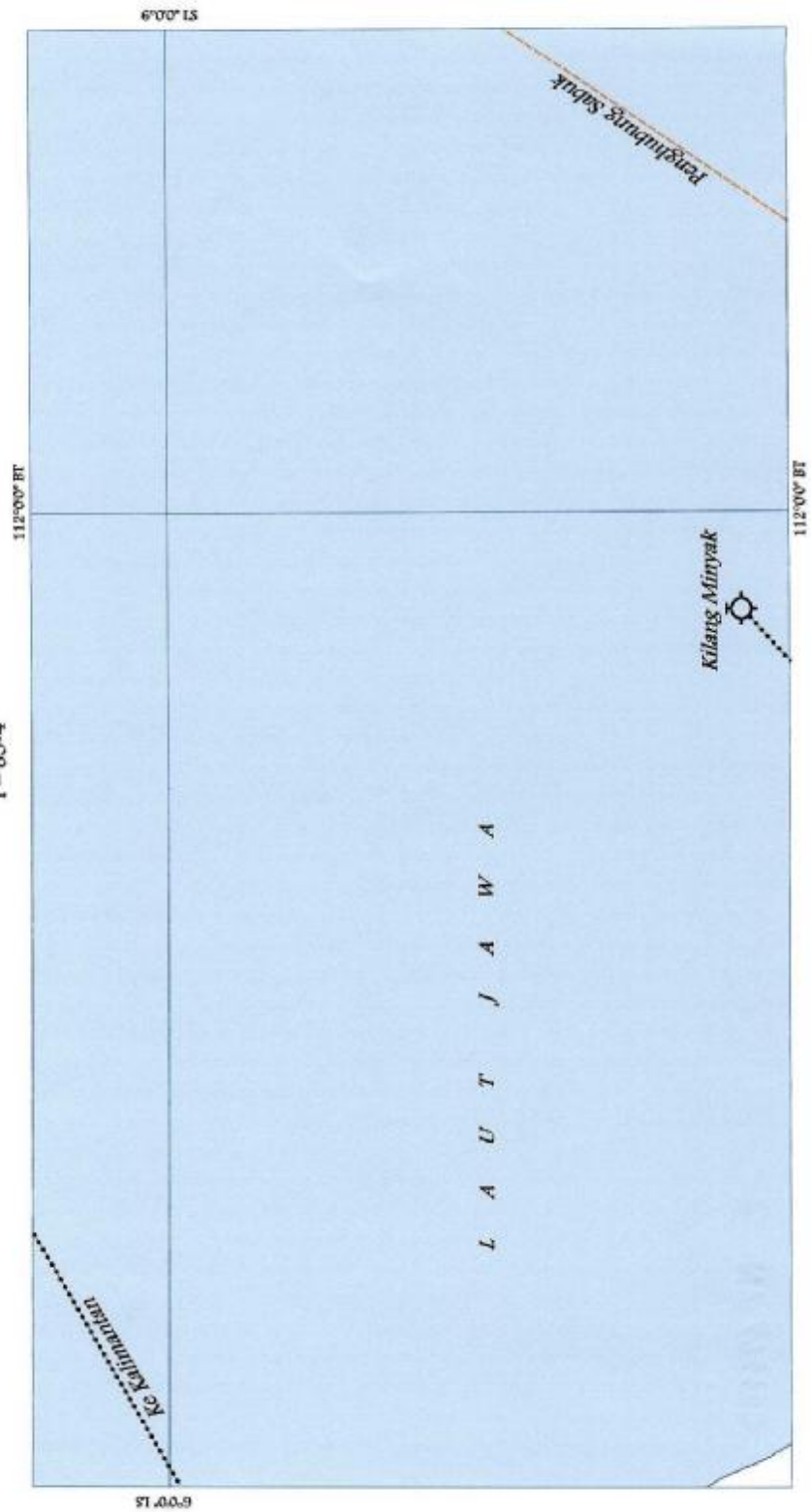
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I-83-3



51.400.9



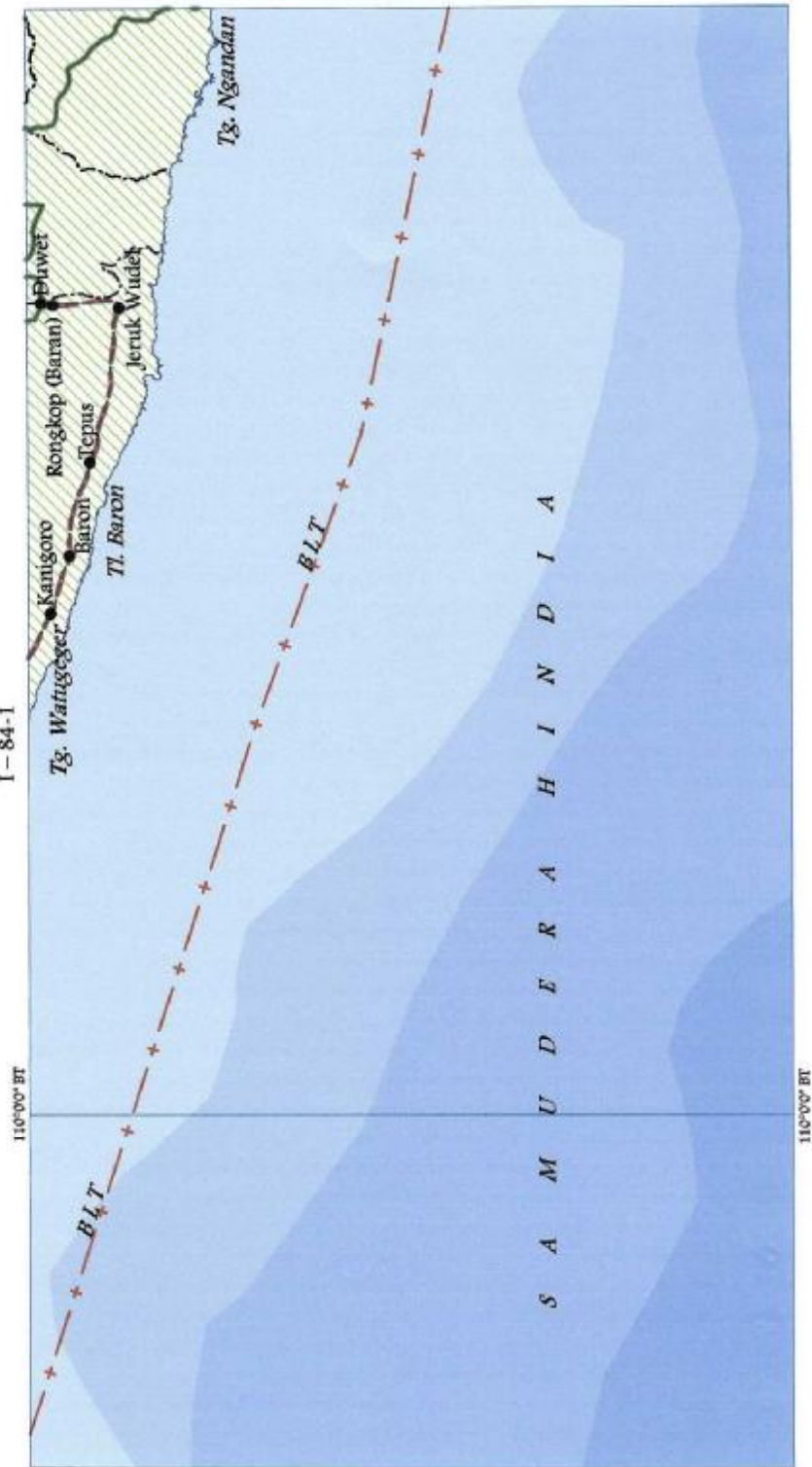
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I - 83-4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

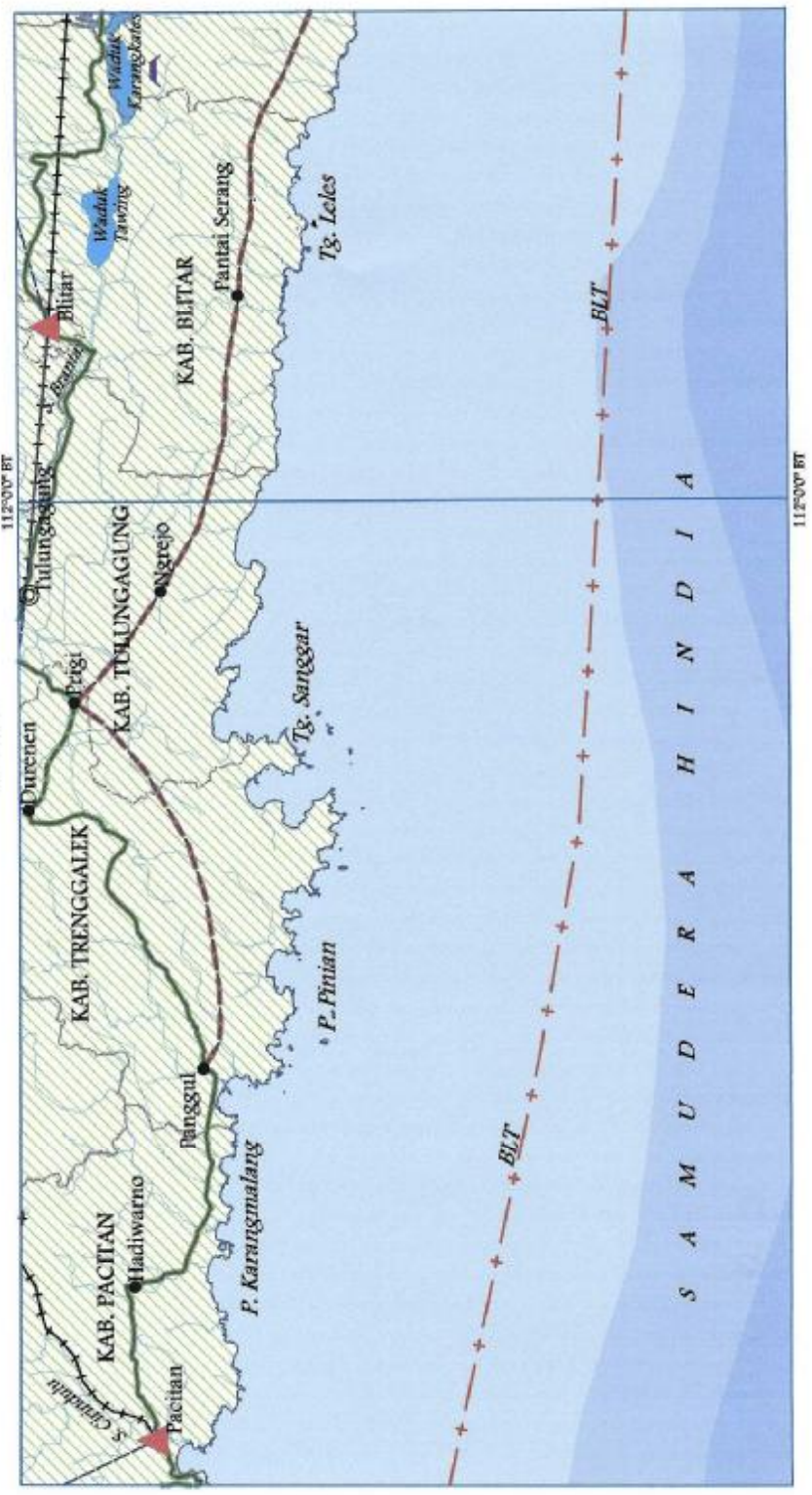
I - 84 - 1





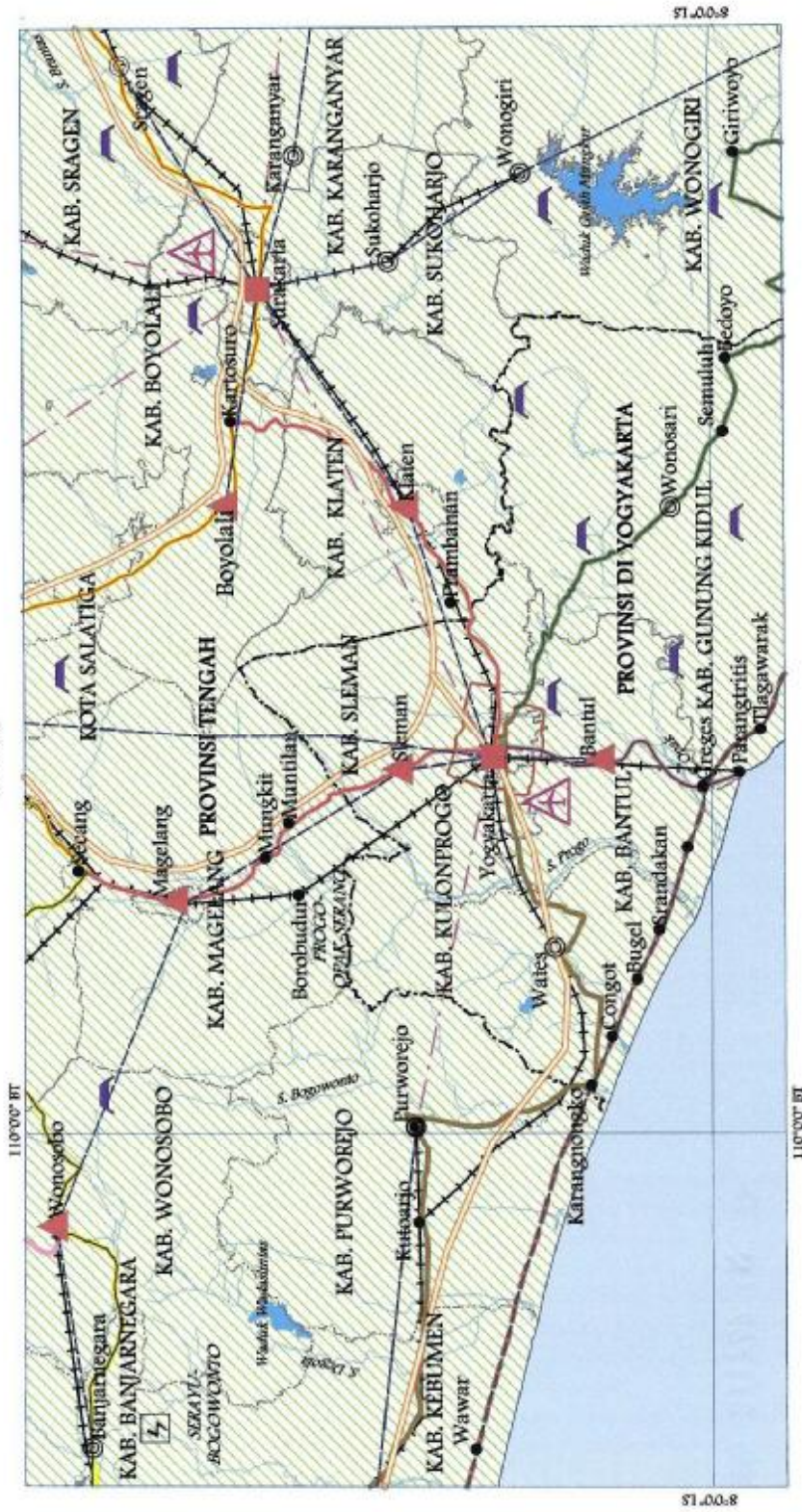
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

I - 84-2



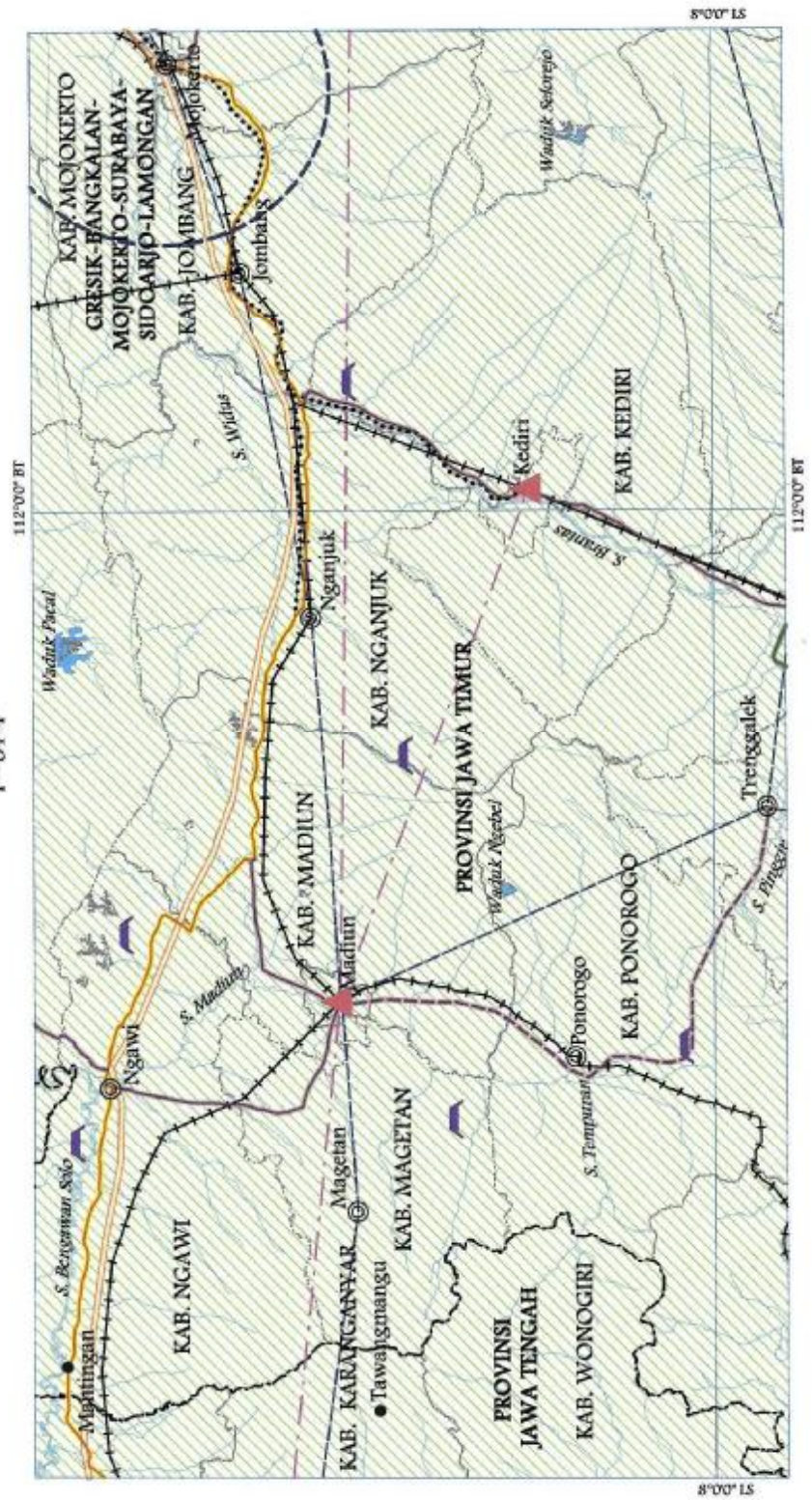


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I-84-3



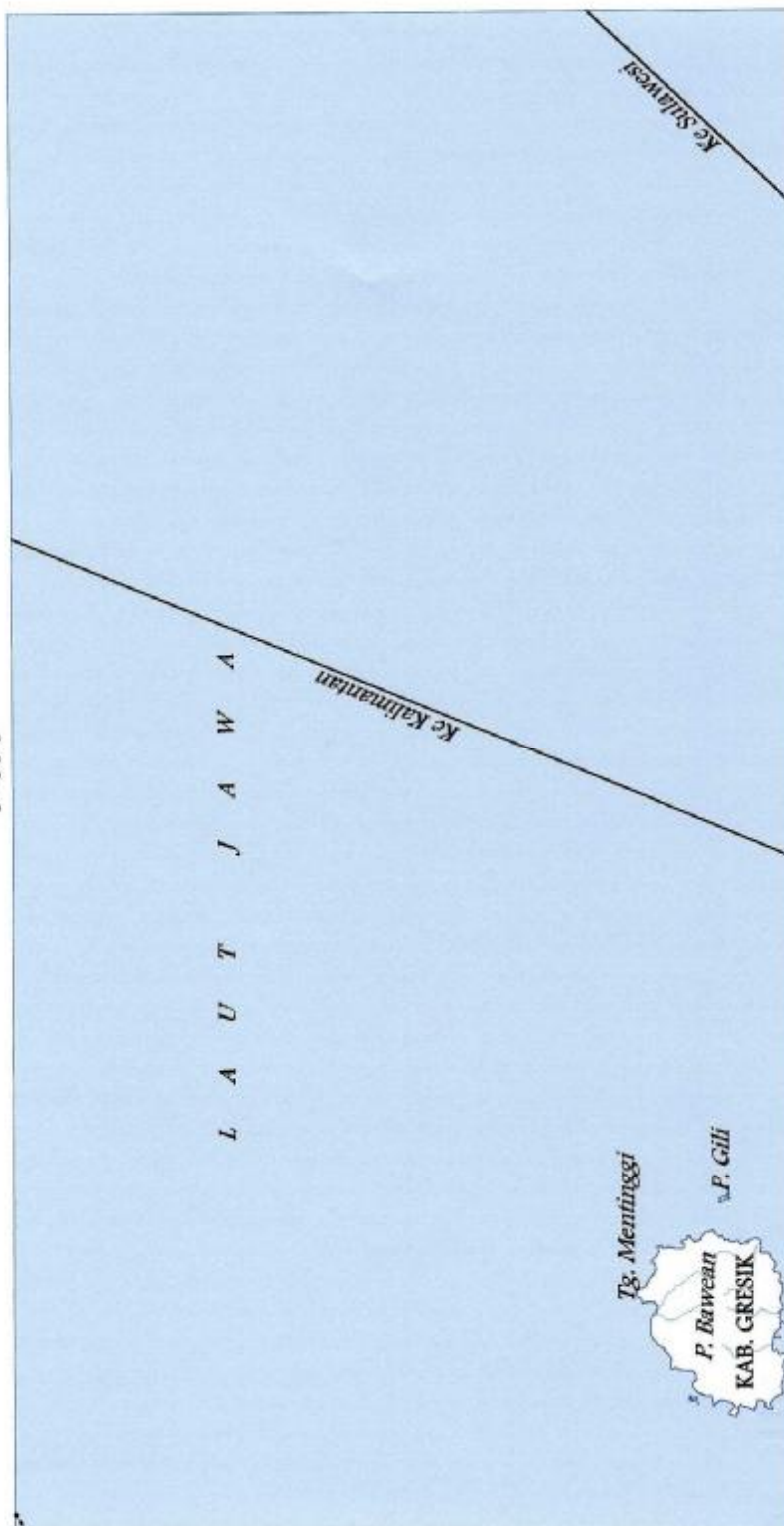


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I - 84-4



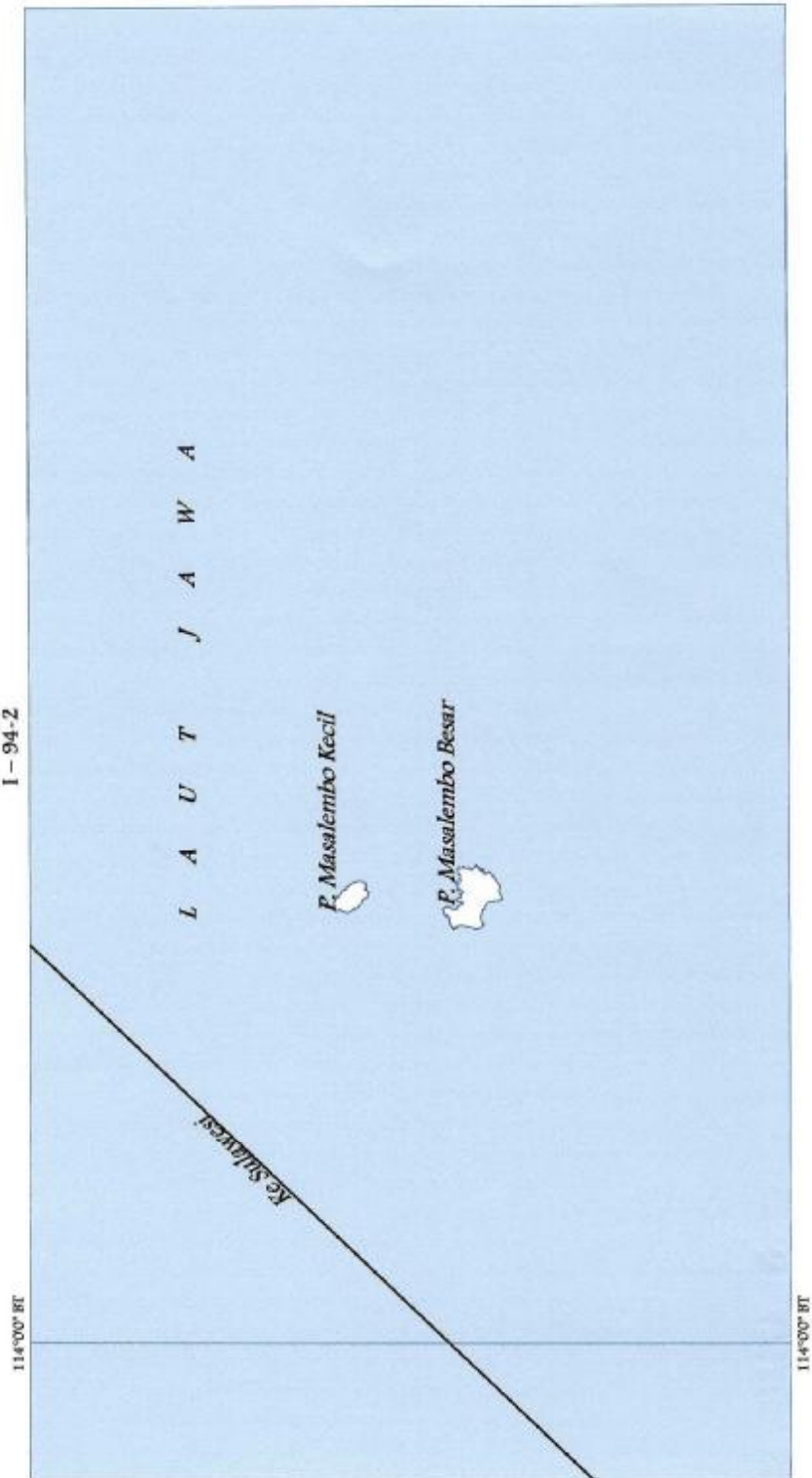


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I-94-1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I - 94-2

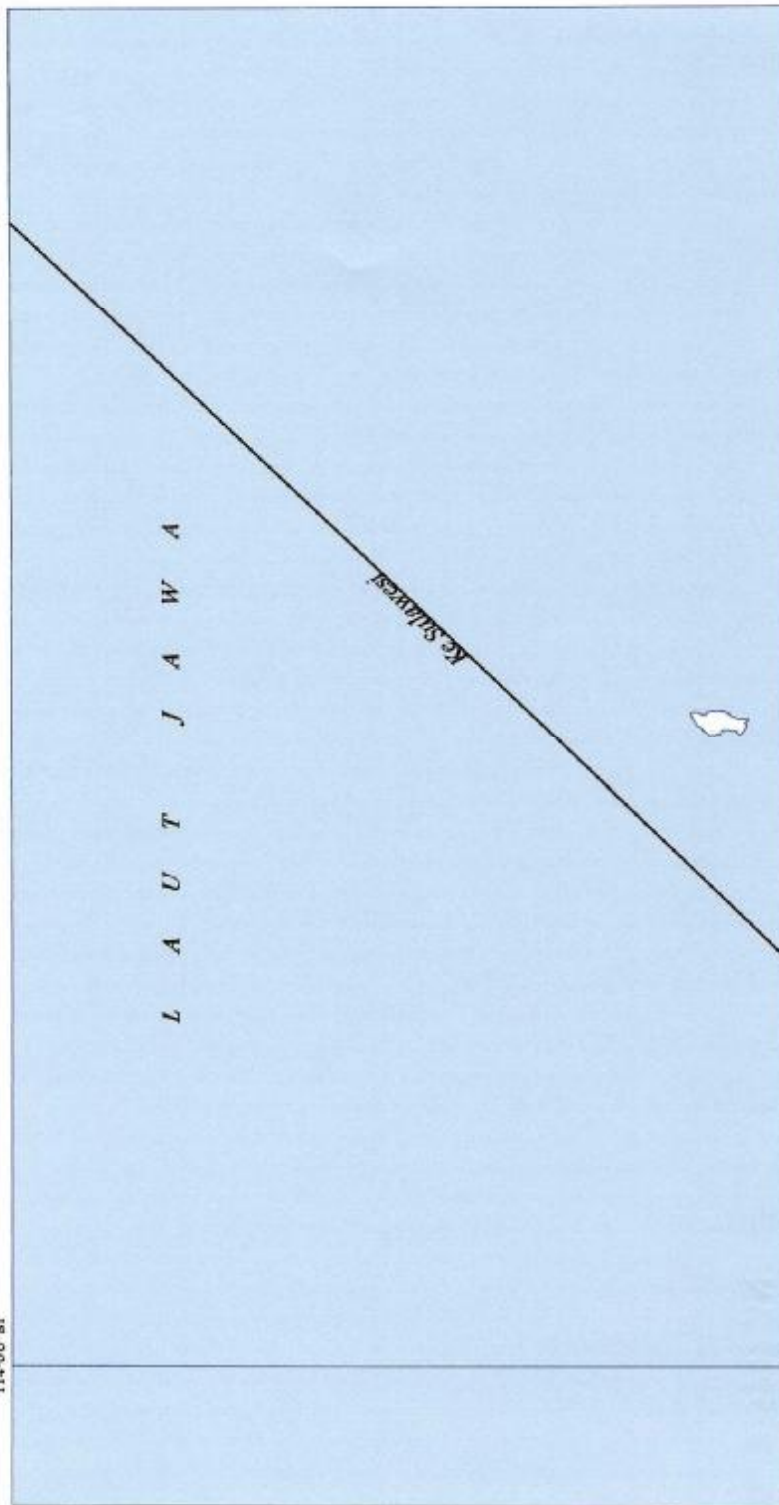




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I - 94-4



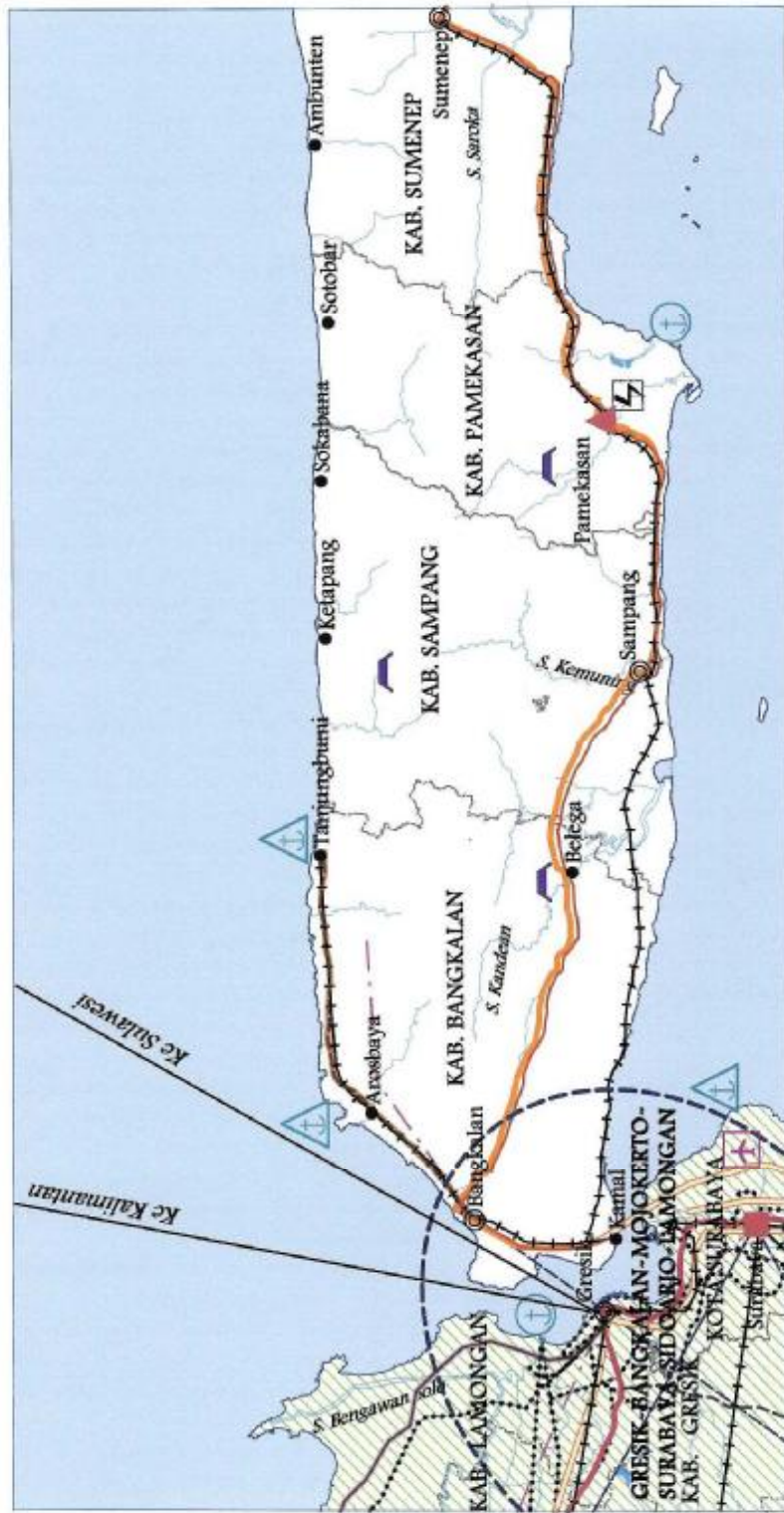
114°00' BT



114°00' BT



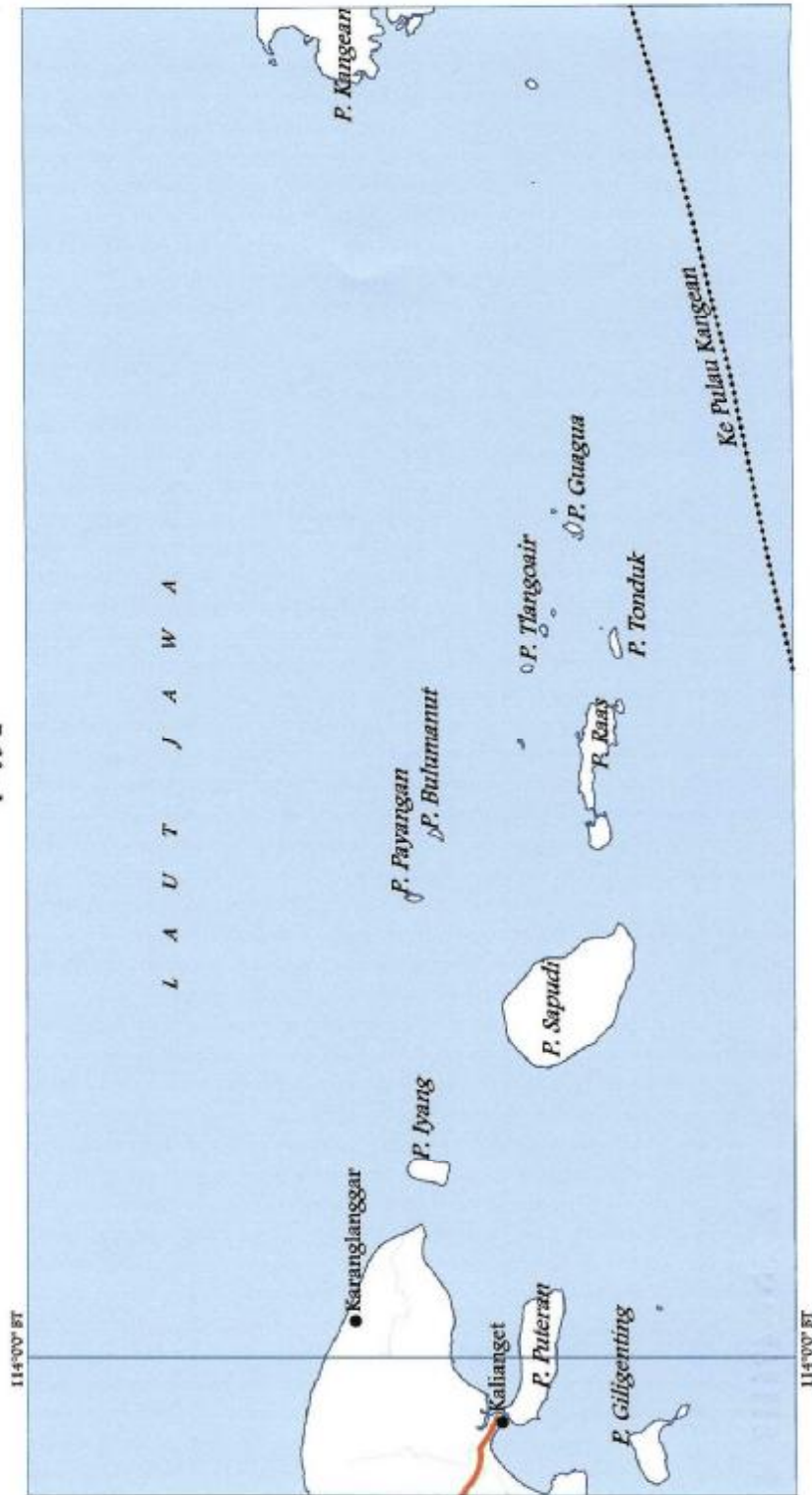
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I - 95-1





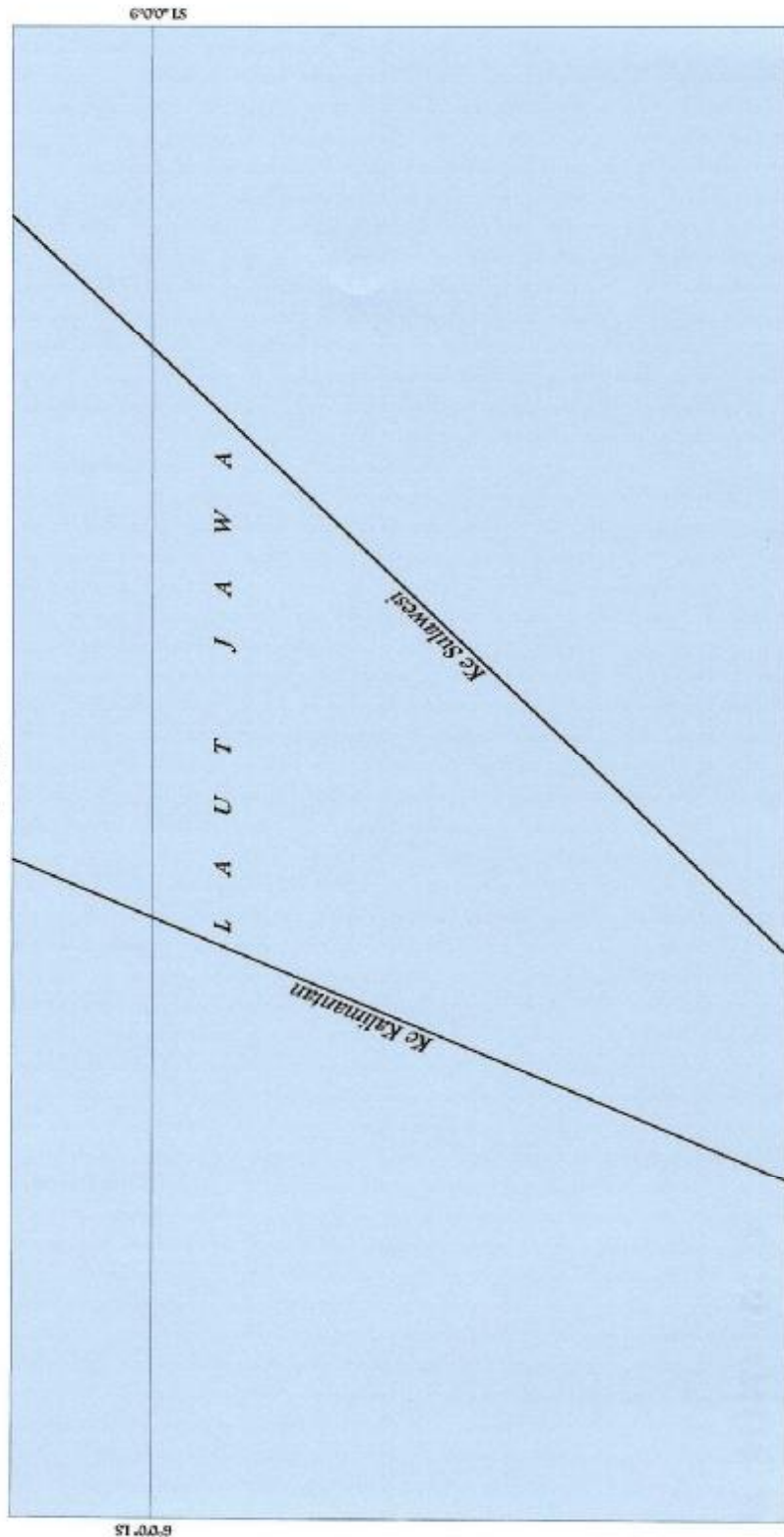
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I-95-2

L A U T J A W A



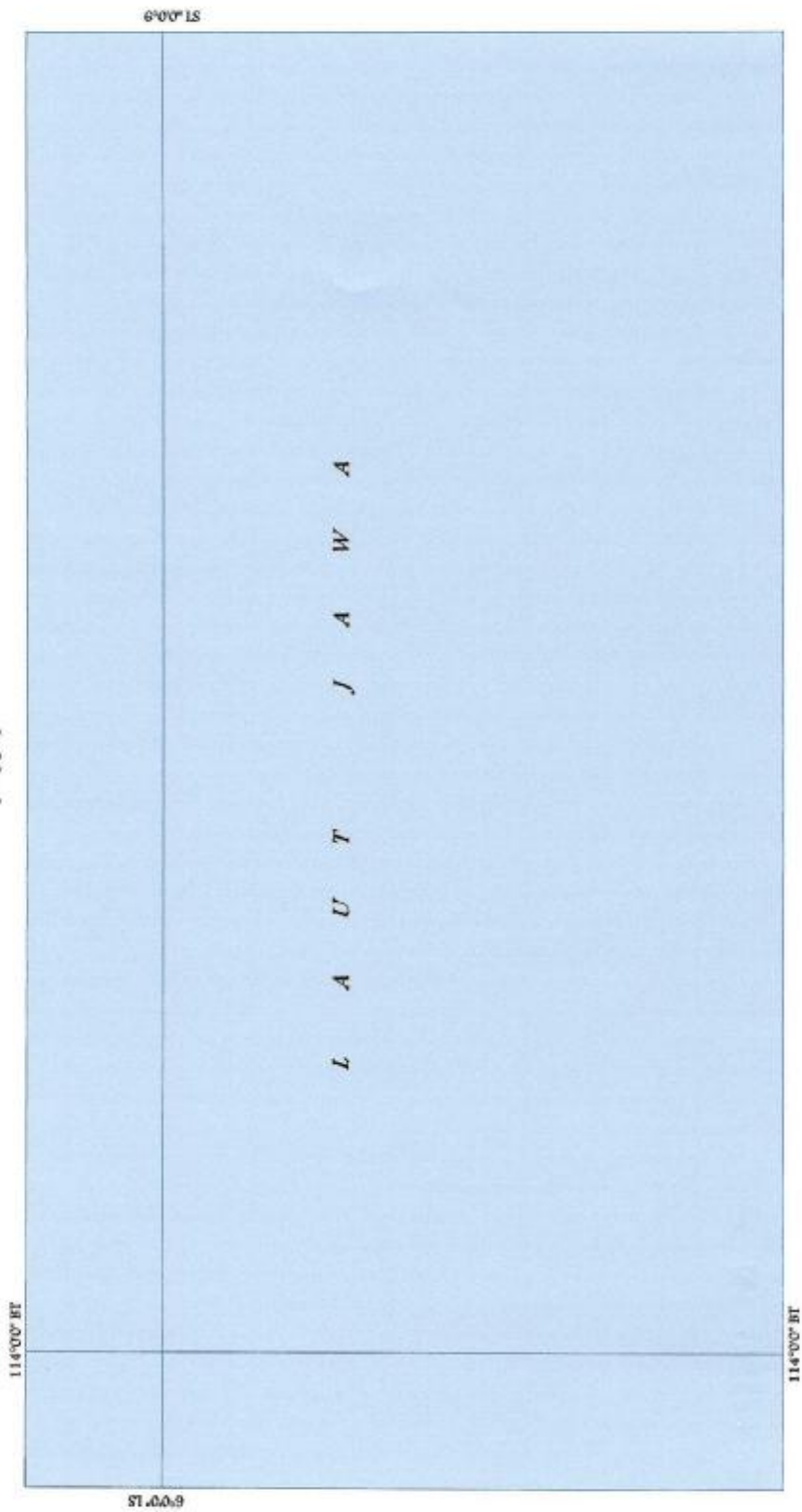


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I-95-3



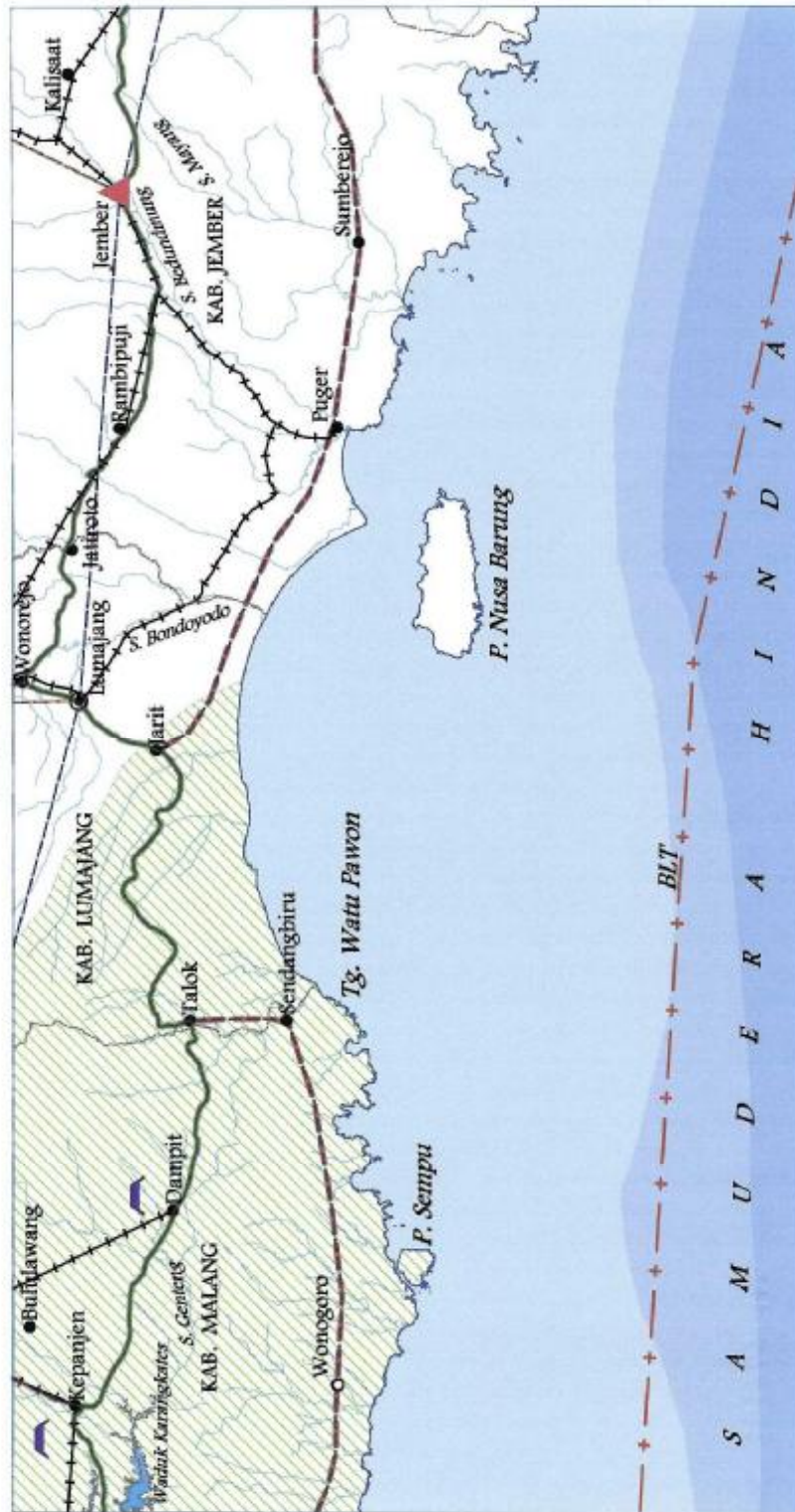


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I-95-4



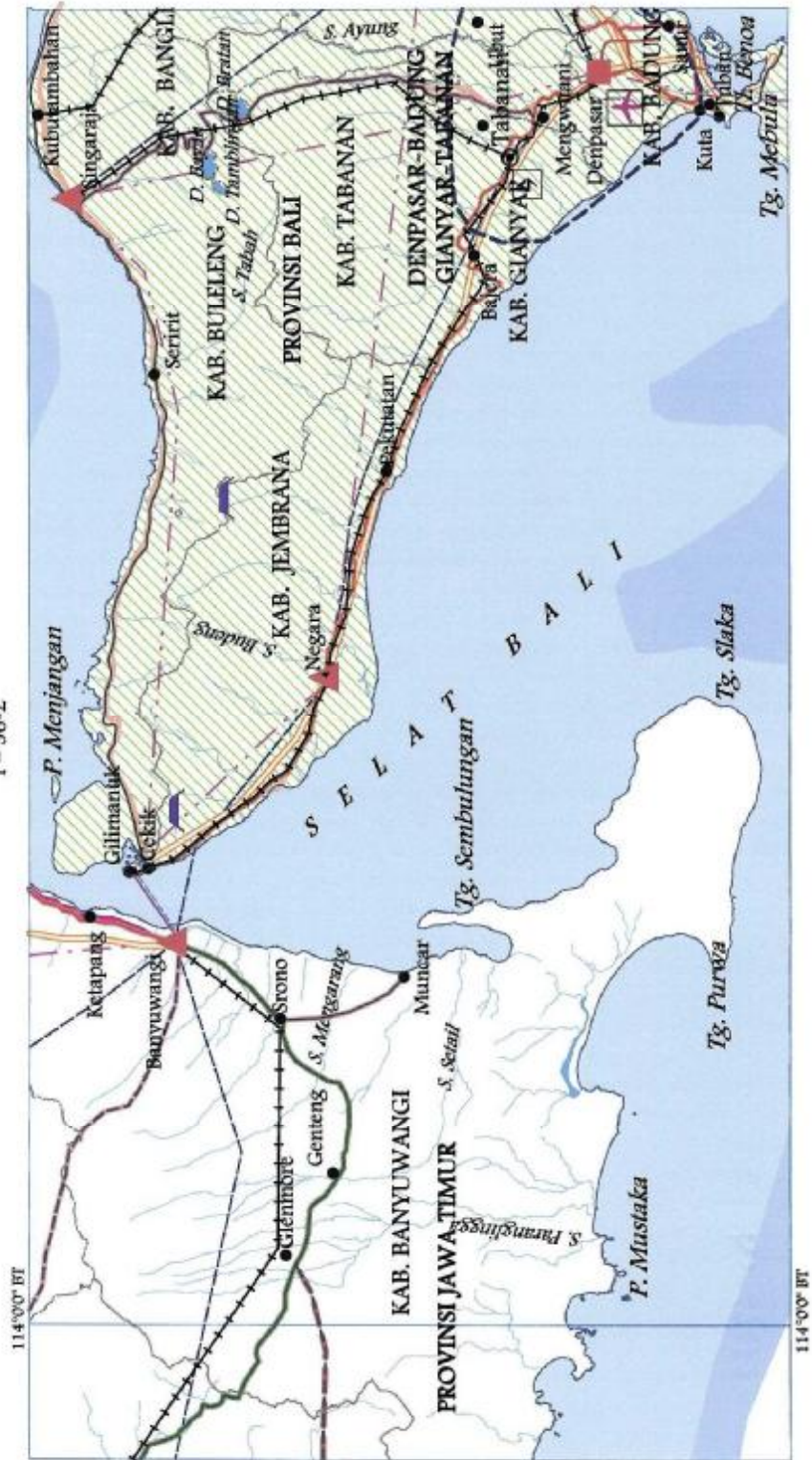


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I-96-1



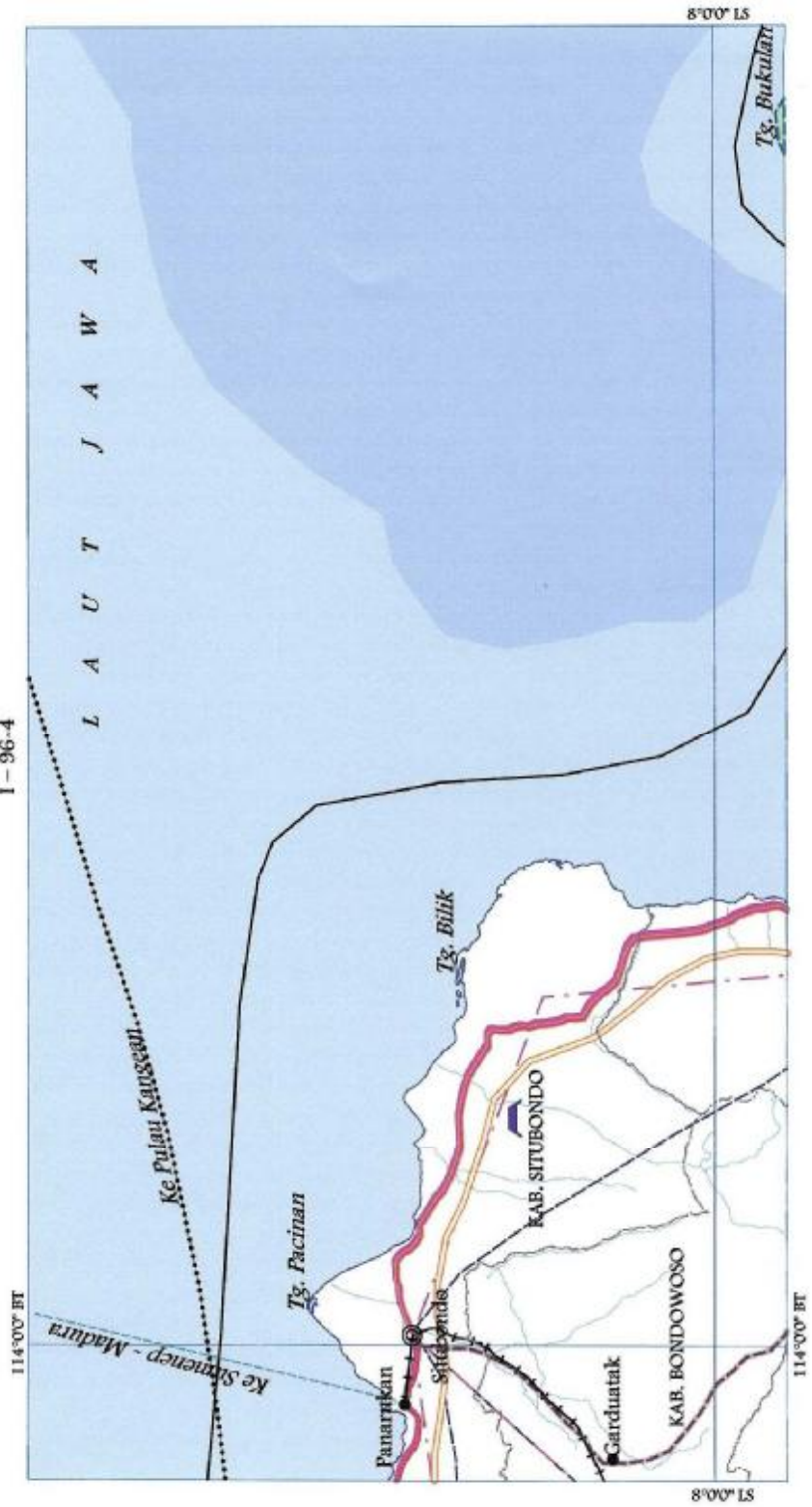


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I - 96-2



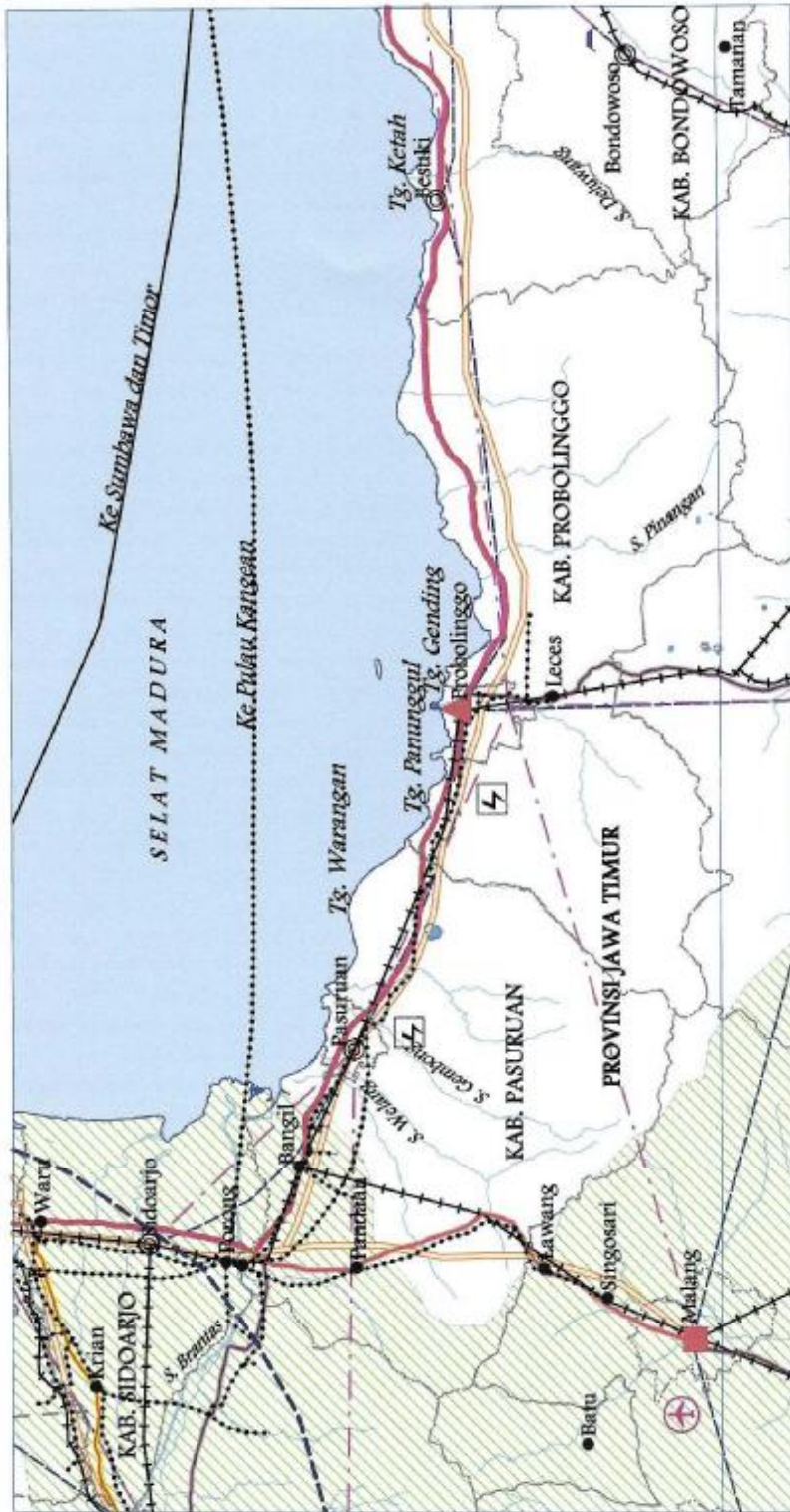


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I - 96-4



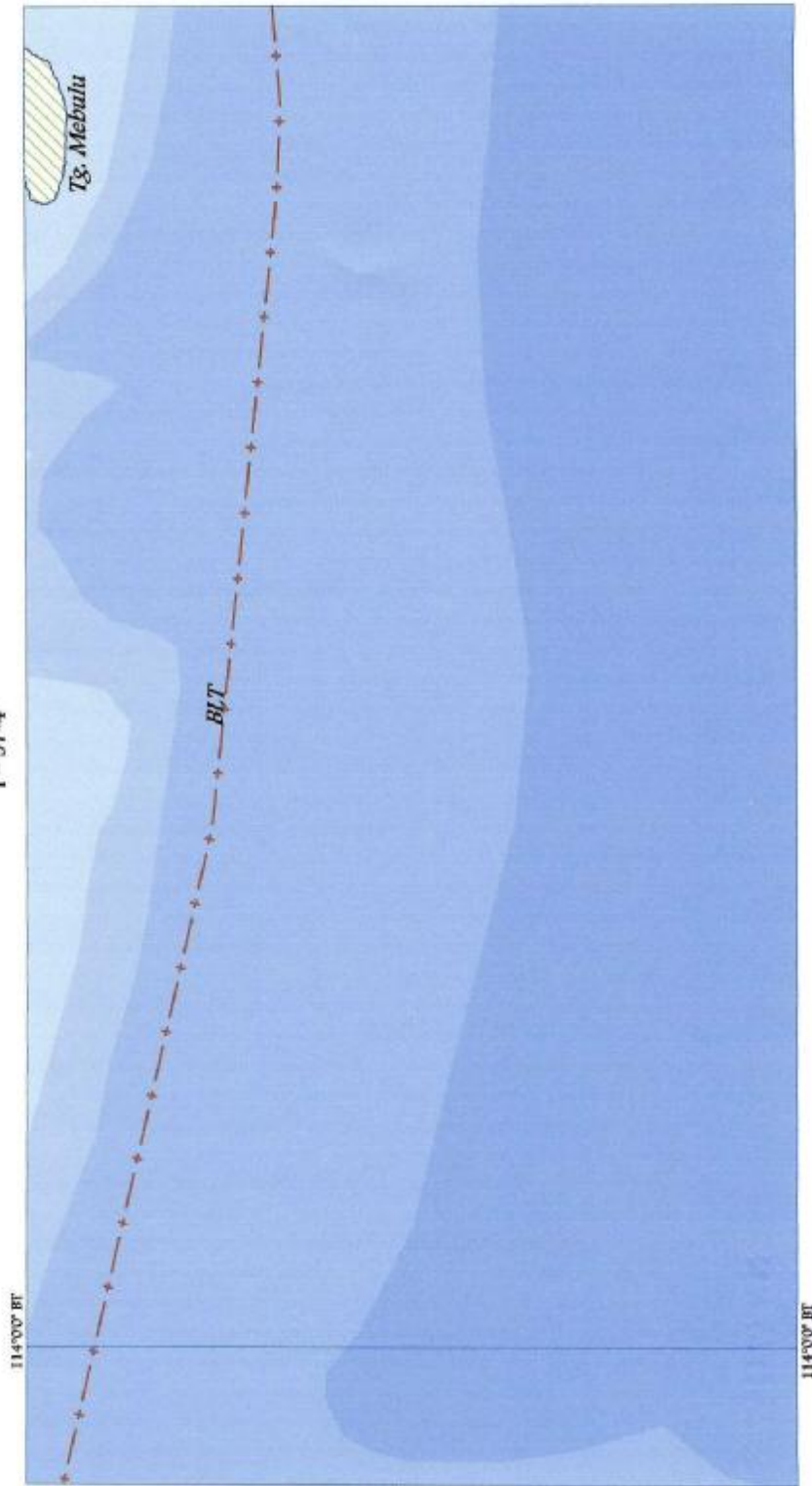


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I - 96-3



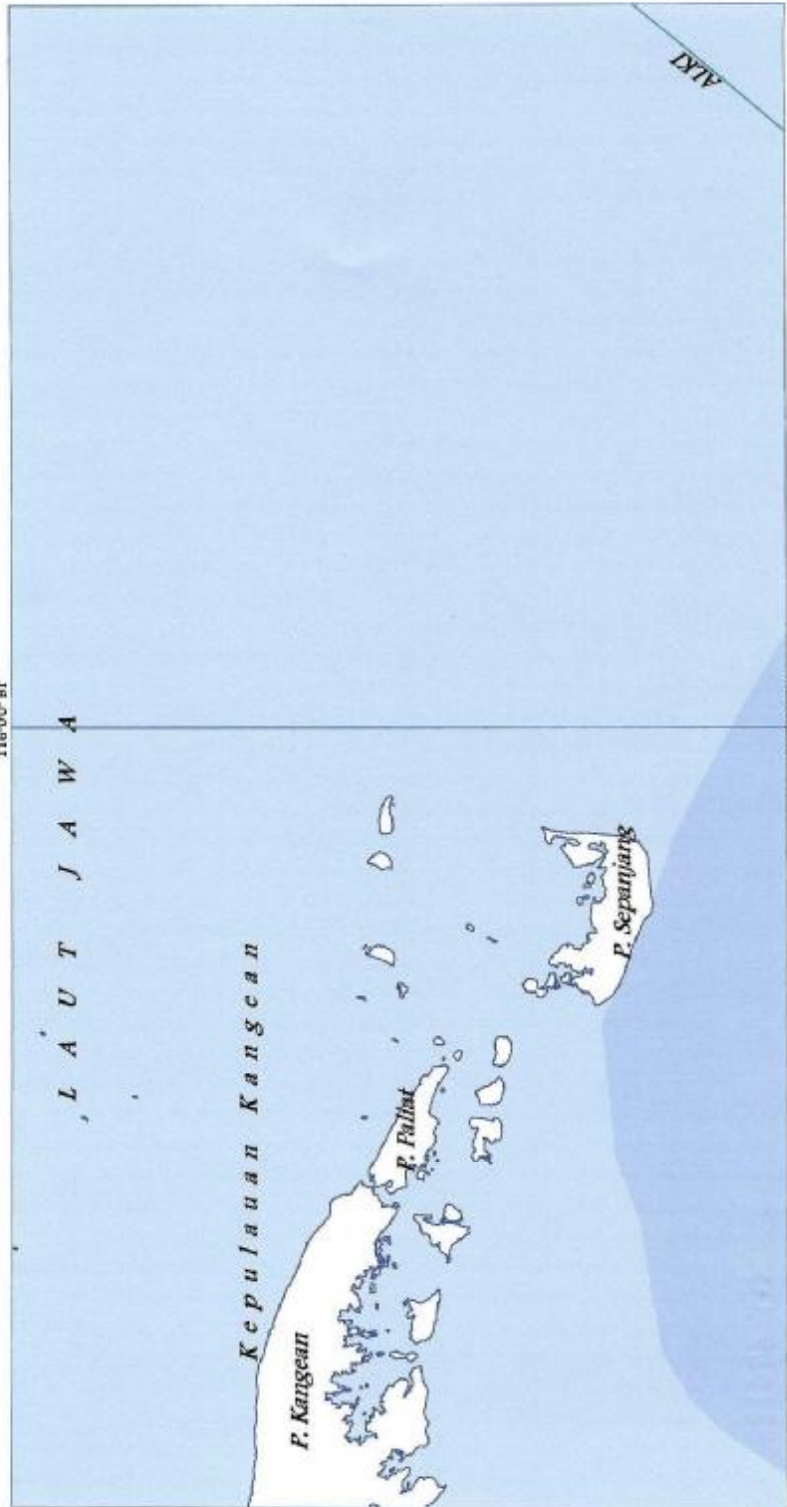


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
1-97-4



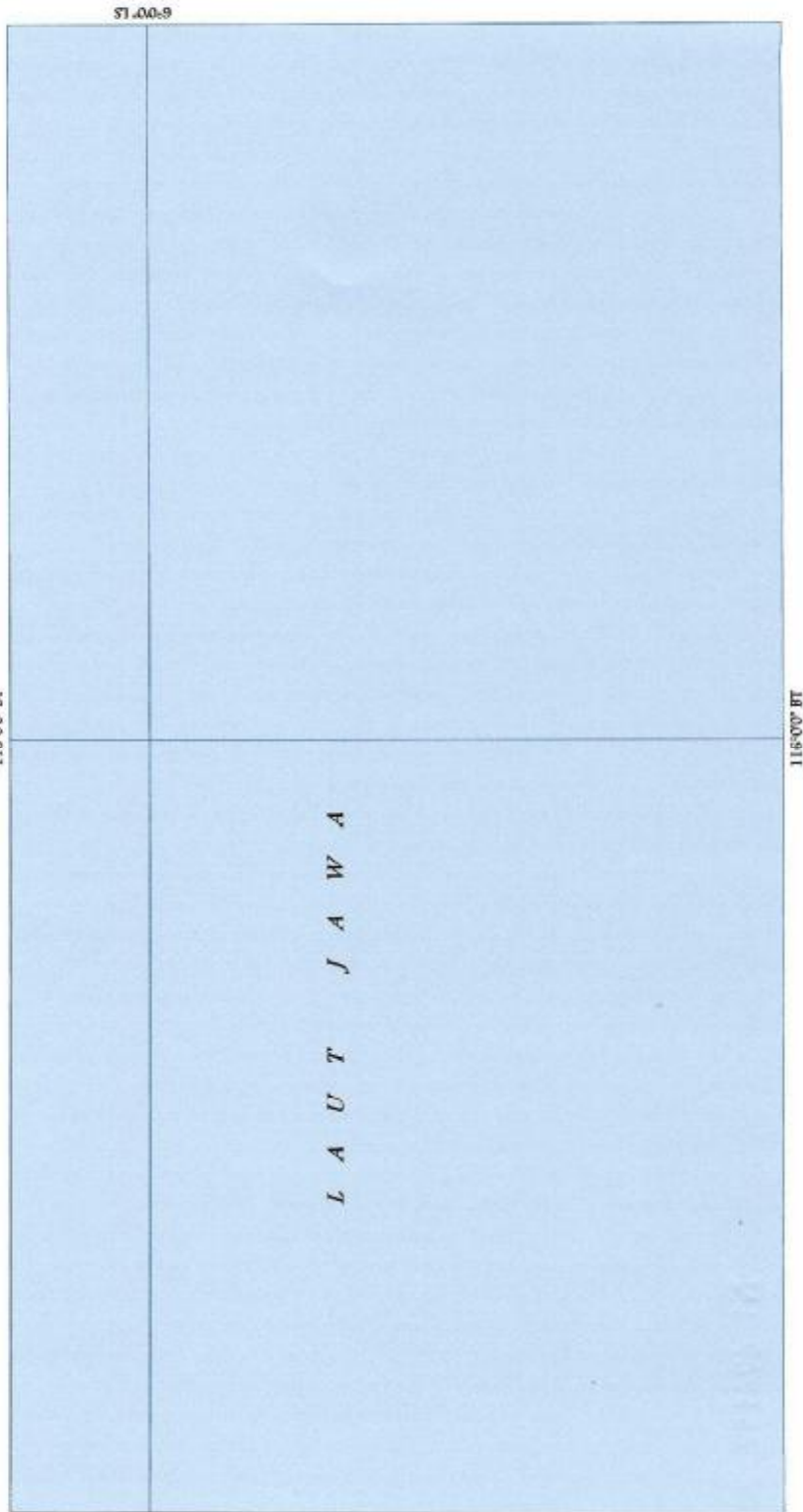


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I - 109-1
116°00' BT



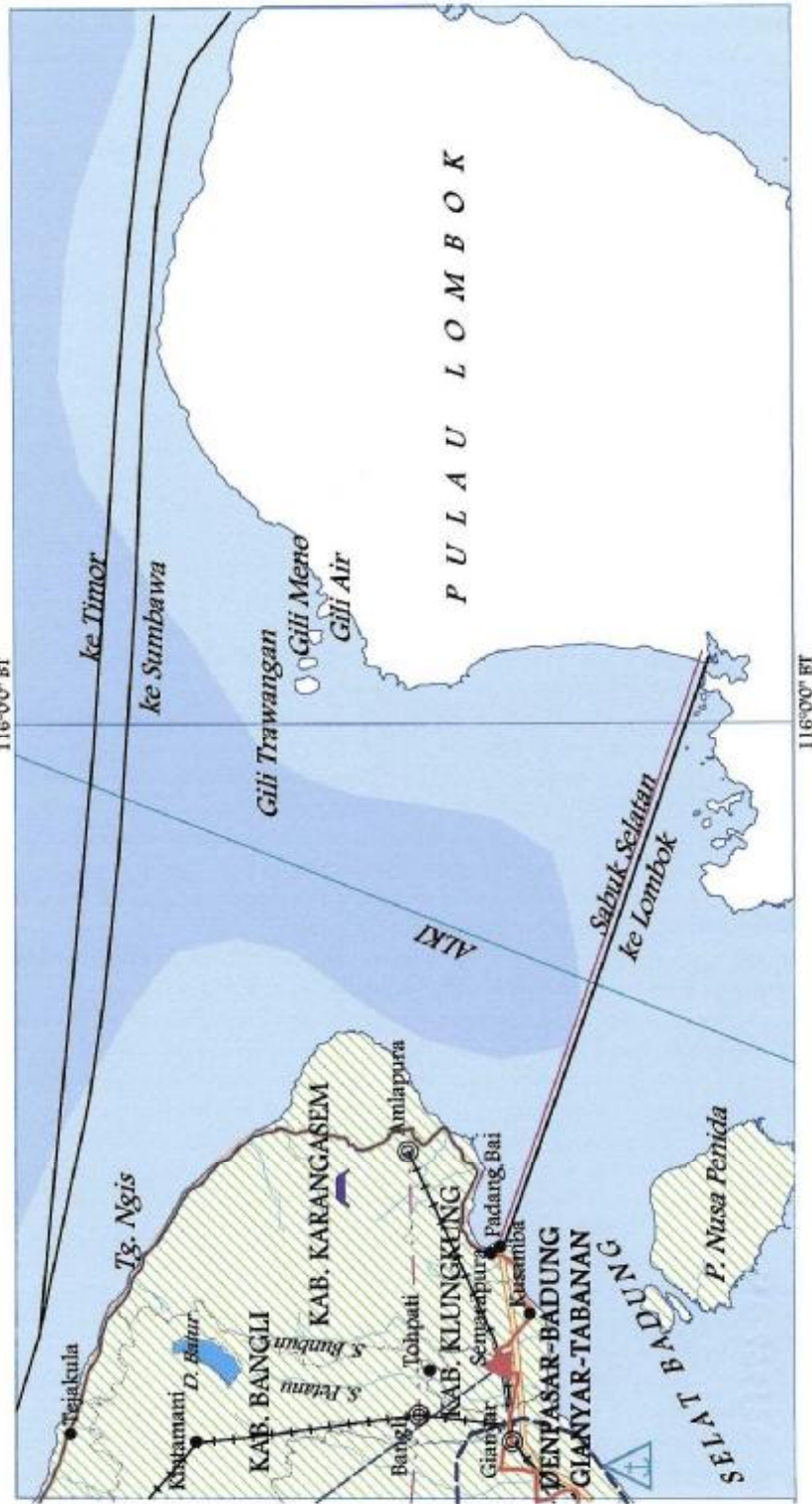


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I - 109-3
115°00' BT



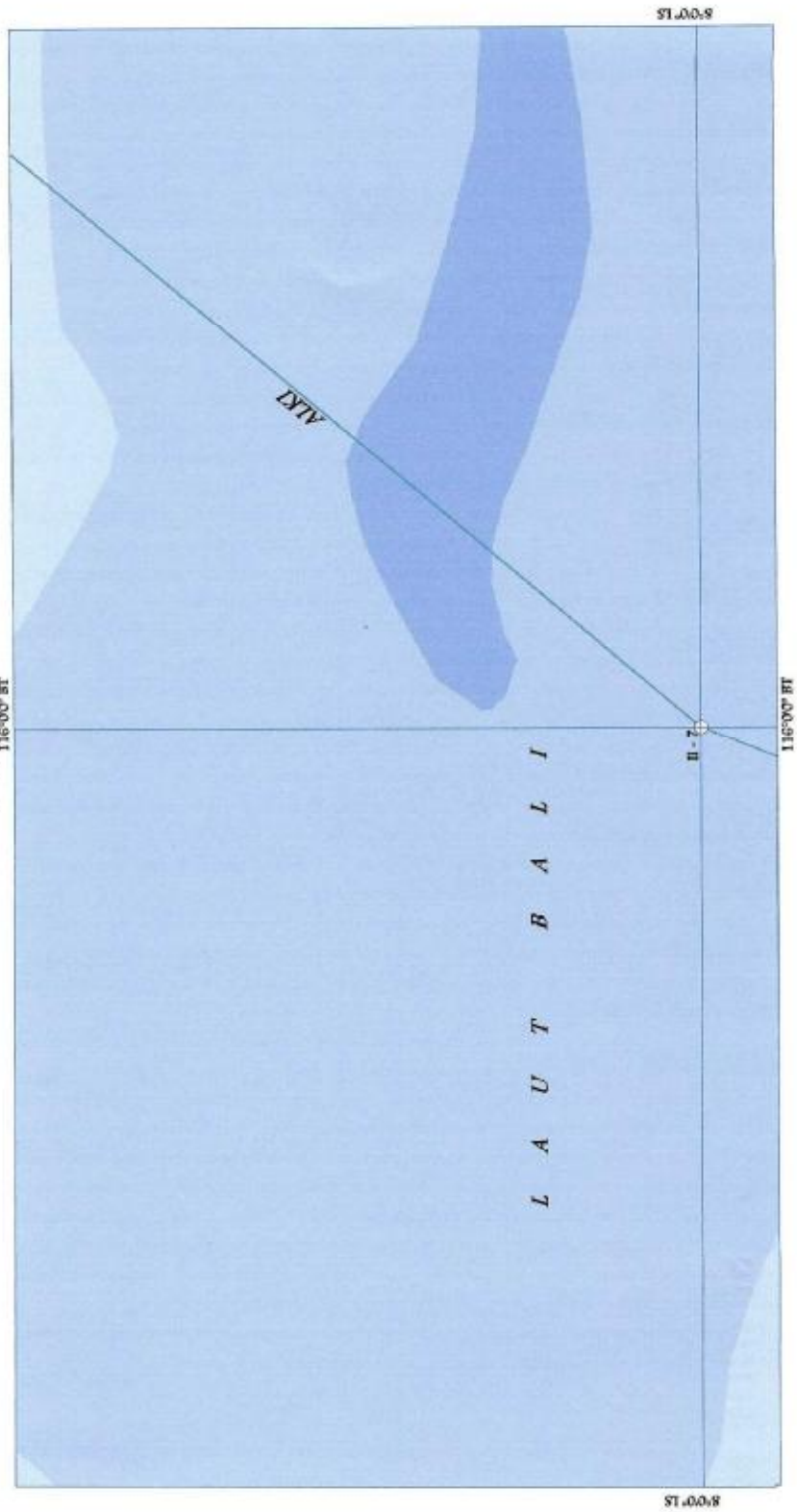


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I - 110-1
116°00' BT



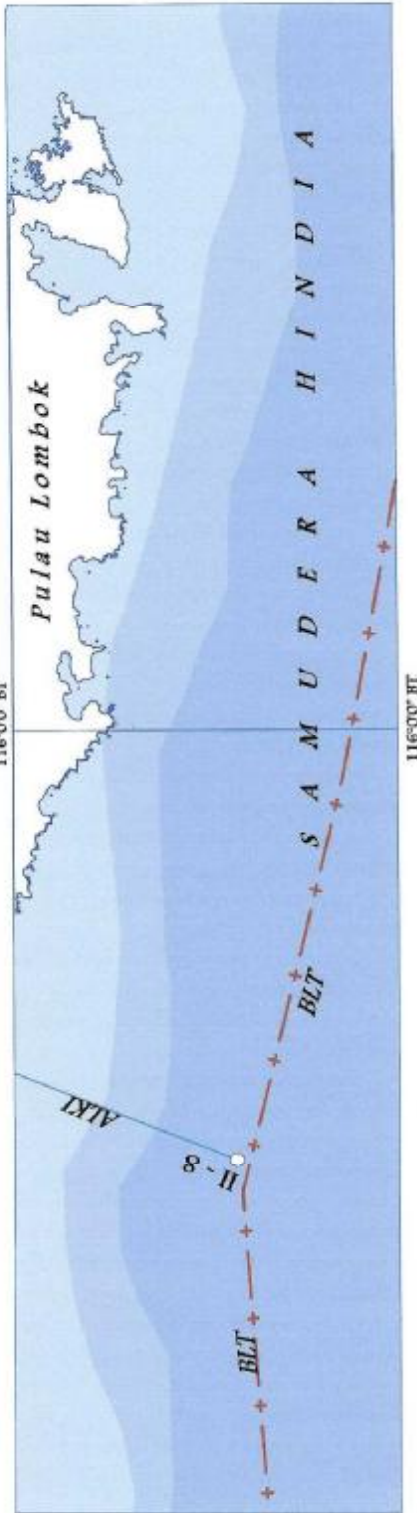


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I - 110-3
116°00' BT





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
I - 111-3
116°00' BT



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TANGGAL 16 MARET 2012

PETA RENCANA POLA RUANG
PULAU JAWA-BALI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SUMBER PETA :

1. Peta Rupabumi Indonesia, skala 1 : 250.000, BAKOSURTANAL, 2000.
2. Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia, BAKOSURTANAL, 2009.
3. Peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan, skala 1 : 250.000, Kementerian Kehutanan, 1999/2000, telah diperbaharui berdasarkan SK Pelepasan Parsial dan Hasil Rekomendasi Tim Terpadu tahun 2010.
4. Peta Kawasan Pertanian, skala 1 : 1.000.000, Kementerian Pertanian.
5. Peta Kawasan Peruntukan Pertambangan (KKP), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2008.
6. Peta Batimetri skala 1 : 1.000.000, BAKOSURTANAL, 2004.

RIWAYAT PETA :

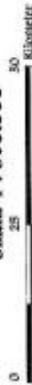
1. Kedalaman informasi peta adalah skala 1 : 500.000.
2. Peta ini bersifat indikatif dan tidak dapat digunakan untuk telaahan mikro.
3. Peta ini bukan merupakan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi nasional dan internasional.
4. Hasil kajian Tim Teknis Rencana Tata Ruang Pulau dan hasil analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
RENCANA POLA RUANG PULAU JAWA-BALI
KETERANGAN GAMBAR

Skala 1 : 500.000



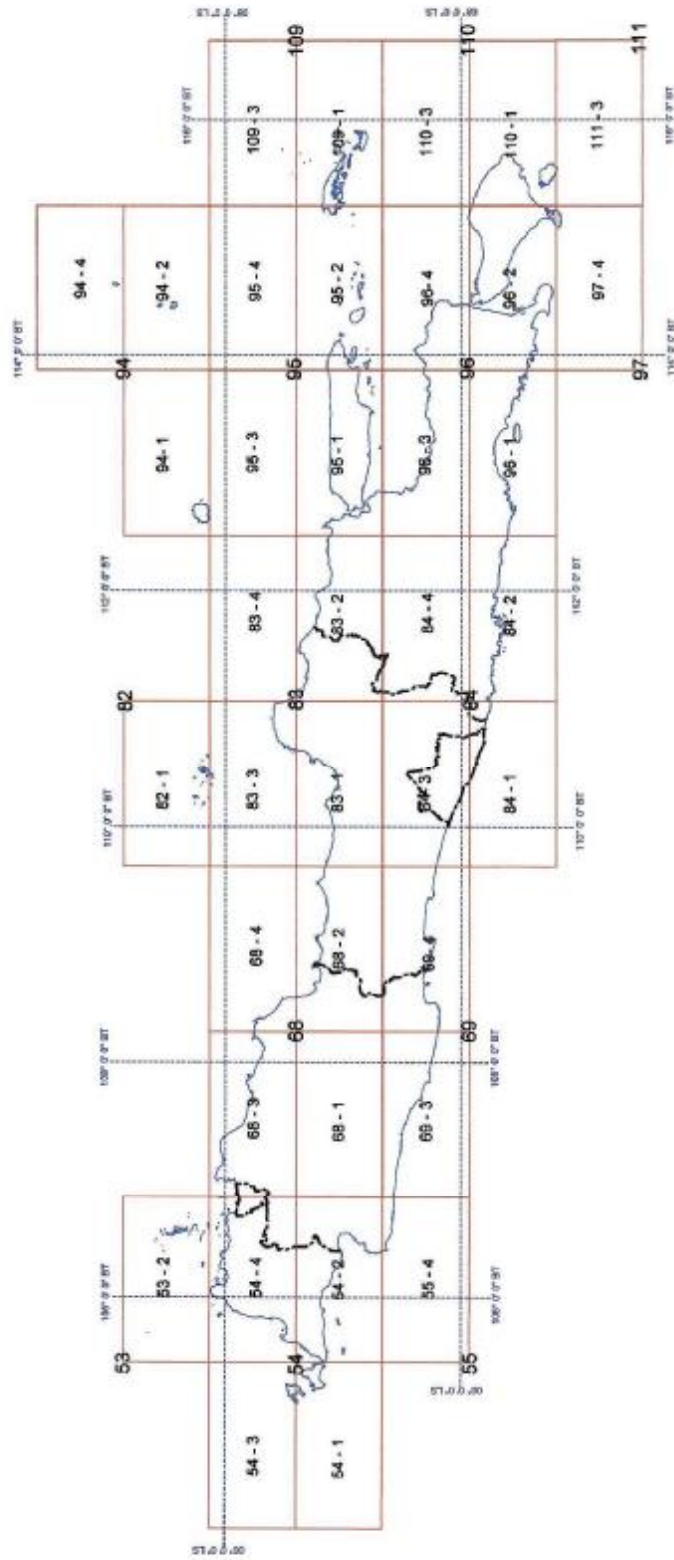
- BATAS ADMINISTRASI**
- Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Lada Kotabaru sempadan, serta diaktifkan
 - Batas Lada Kotabaru (BLK)
 - Batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE)
 - Batas Laut Teritorial (BLT)
 - Batas Laut Teritorial, perlu sempadan
 - Jerapan Air
 - Canal Pantai
 - Duna
 - Sungai
- KAWASAN LINDUNG**
- HL
 - ML
 - CA
 - TL
 - Teras Ekstra Raps
 - Teras Utama Raps
 - Teras Baru
 - Teras Nelayan Laut
 - Teras Wisata Alam Laut
 - Cagar Alam Laut
- KAWASAN BUDI BAYA**
- Kawasan Perikanan Hutan
 - Kawasan Perikanan Pelairan
 - Kawasan Perikanan Perikanan Murni dan/atau Benih
 - Muti diunggulkan Kawasan Perikanan Lainnya dalam Rencana Tata Ruang yang Lebih Detail
 - Kawasan Perikanan Perikanan Murni dan/atau Benih, Muti diunggulkan Kawasan Perikanan Lainnya dalam Rencana Tata Ruang yang Lebih Detail
 - Kawasan Perikanan Perikanan
 - Kawasan Budi Daya Lainnya

- KAWASAN ANDALAN LAUT**
- Kawasan Andalan Laut P.aku. Maru
 - Kawasan Andalan Laut Kawasan Sekeloa
 - Kawasan Andalan Laut Kawasan Sekeloa
 - Kawasan Andalan Laut Kawasan Sekeloa
 - Kawasan Andalan Laut Kawasan Sekeloa
 - Kawasan Andalan Laut Kawasan Sekeloa
- PUSAT PERBAGTIAN**
- Budaya Nelayan
 - Budaya Kelapa Kelapa
 - Budaya Kelapa Kelapa Lainnya

- KAWASAN ANDALAN DARAT**
- 1 Kawasan Andalan Perikanan Jambak
 - 2 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur
 - 3 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 4 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 5 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 6 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 7 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 8 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 9 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 10 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 11 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 12 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 13 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 14 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 15 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 16 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 17 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 18 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 19 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 20 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 21 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 22 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 23 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 24 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 25 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa
 - 26 Kawasan Andalan Perikanan Merak-Cigugur dan Sekeloa

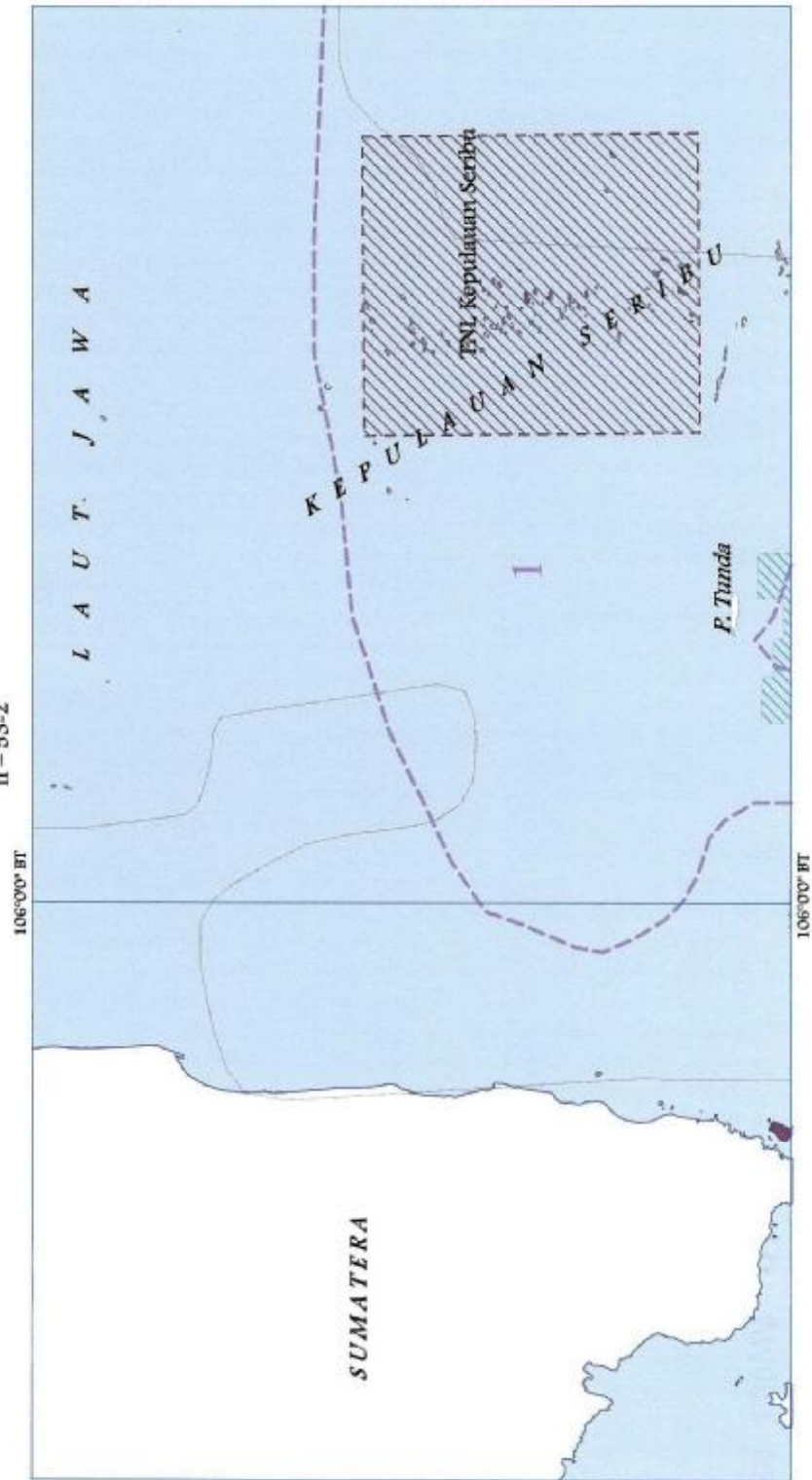


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
INDEKS PETA



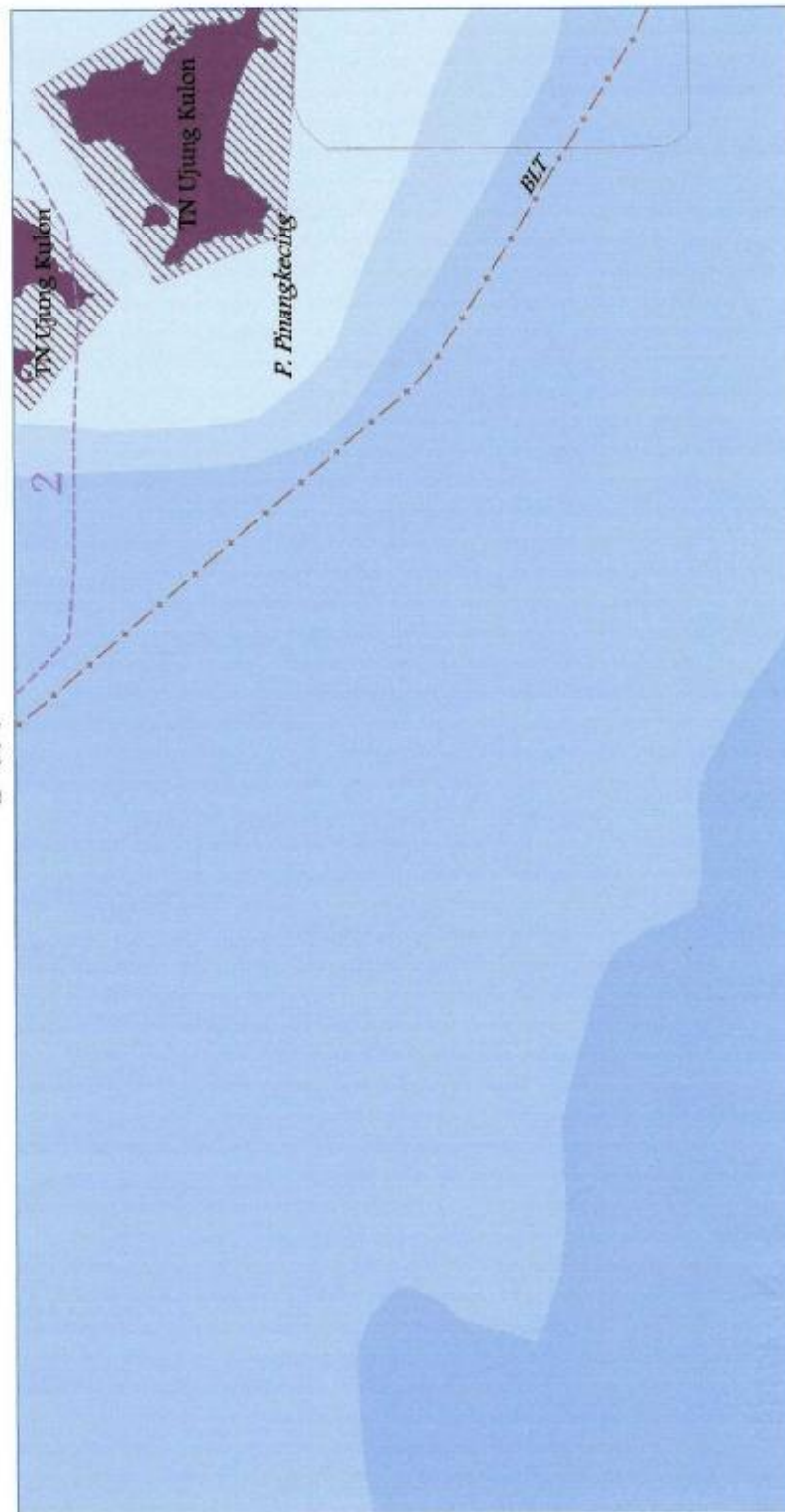


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 53-2



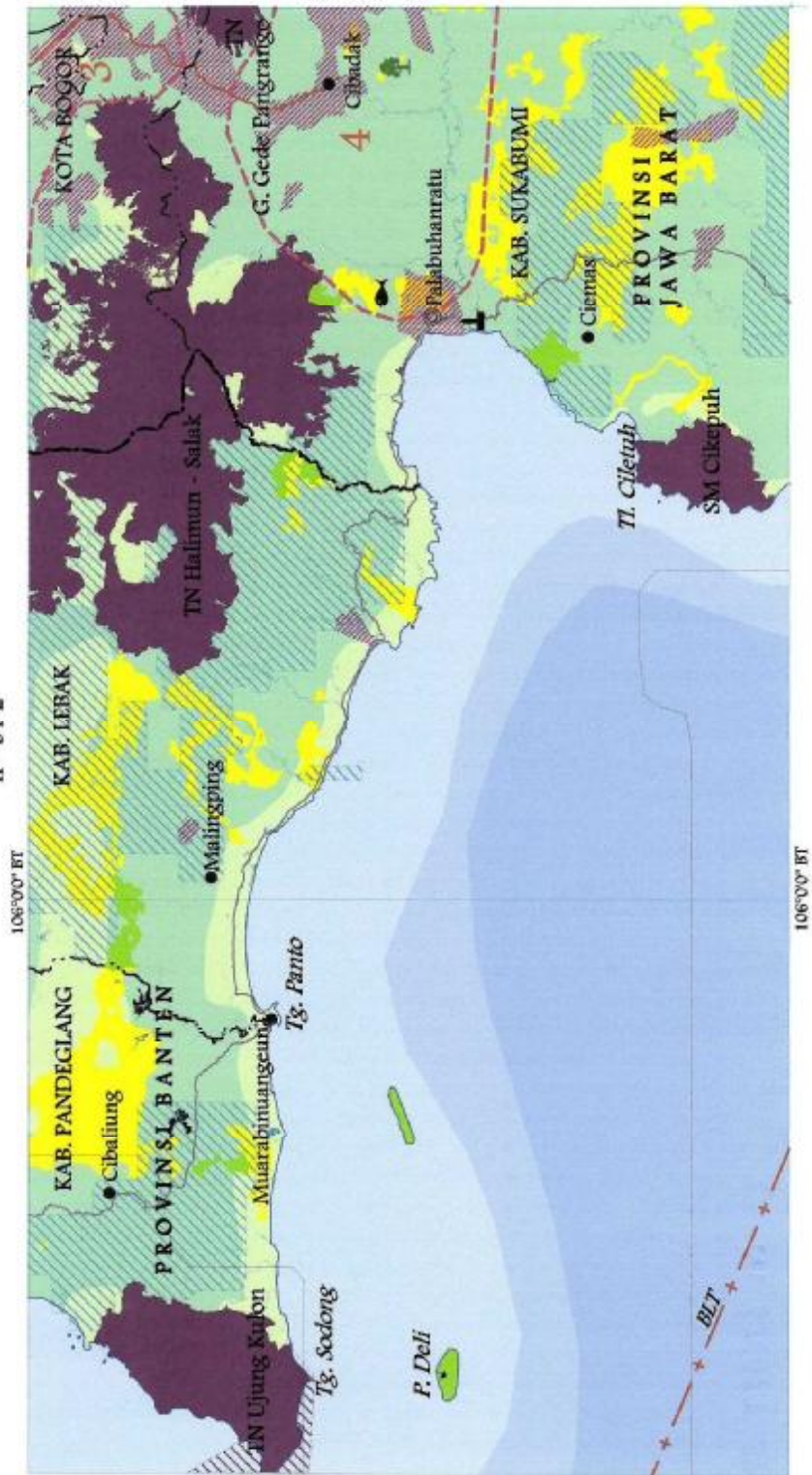


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 54-1



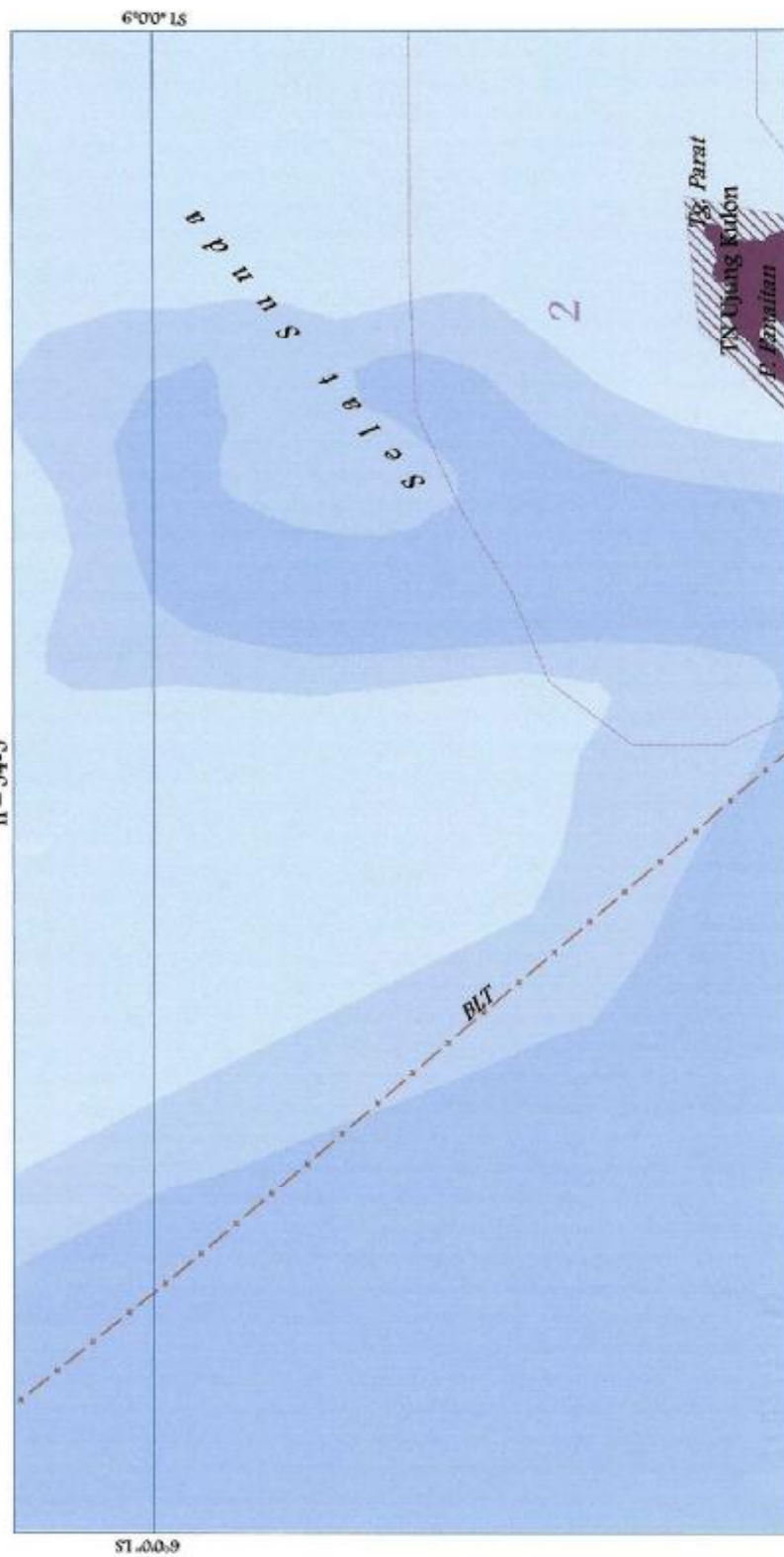


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 54-2



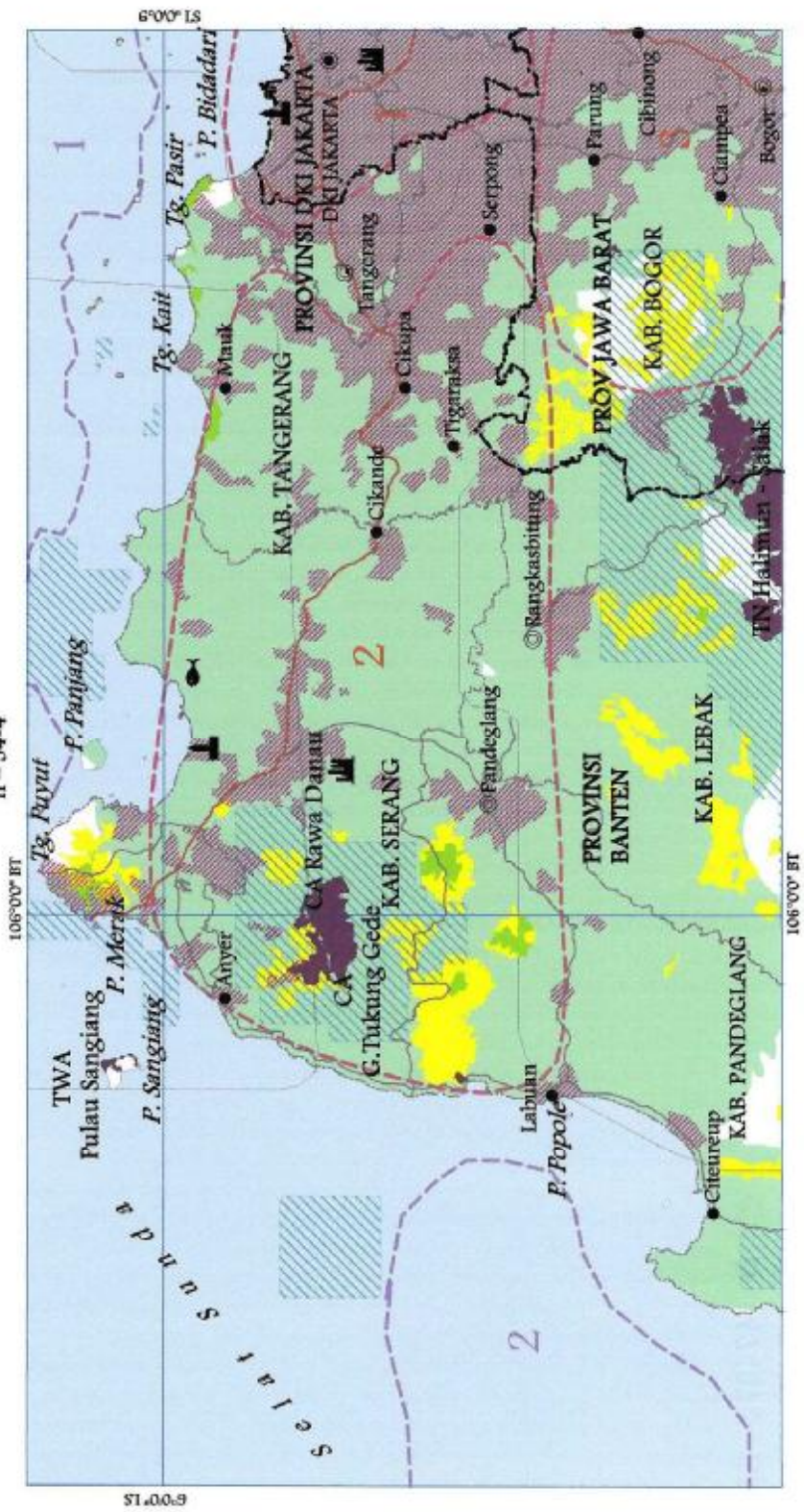


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II-54-3



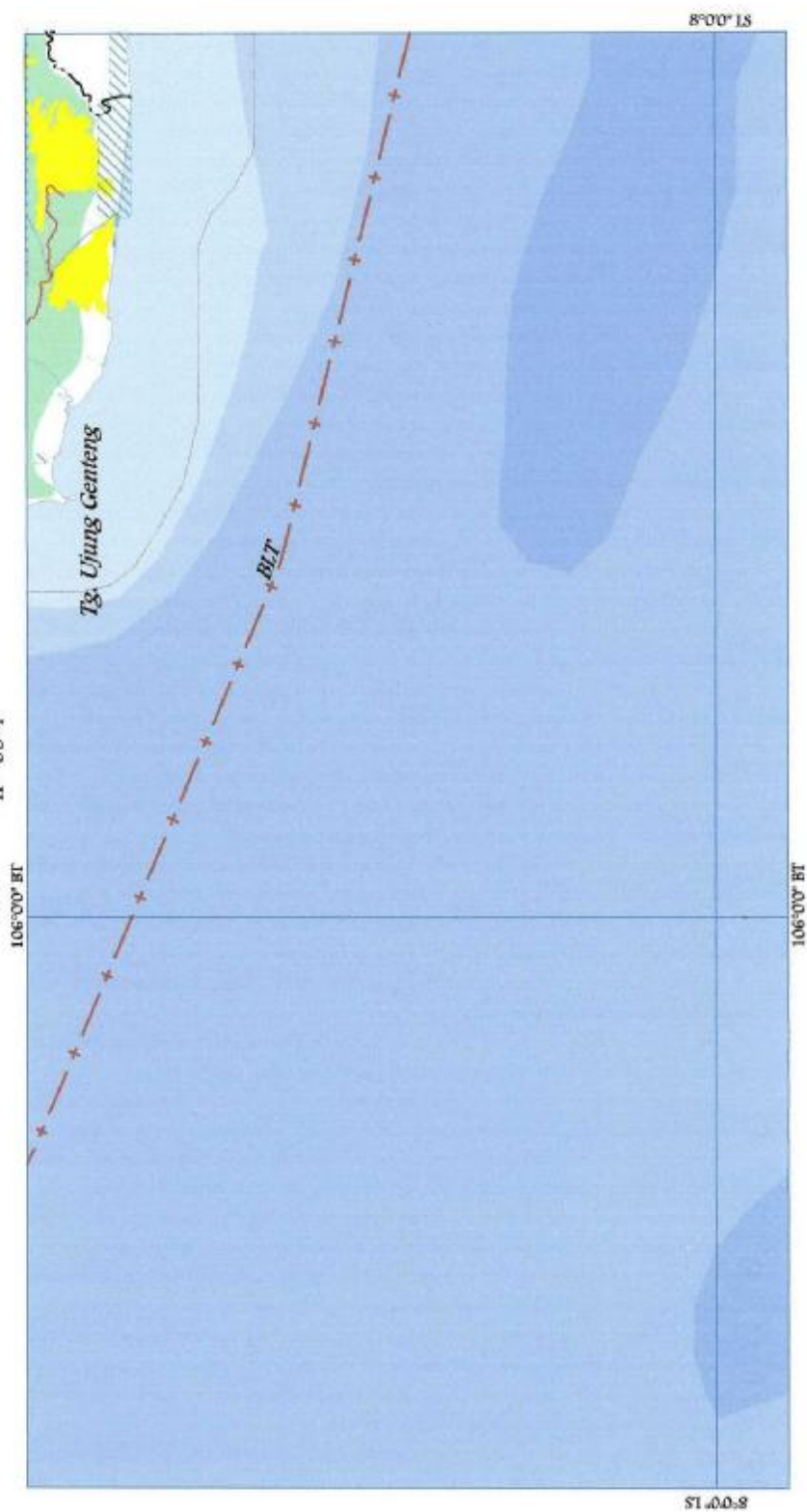


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 54-4



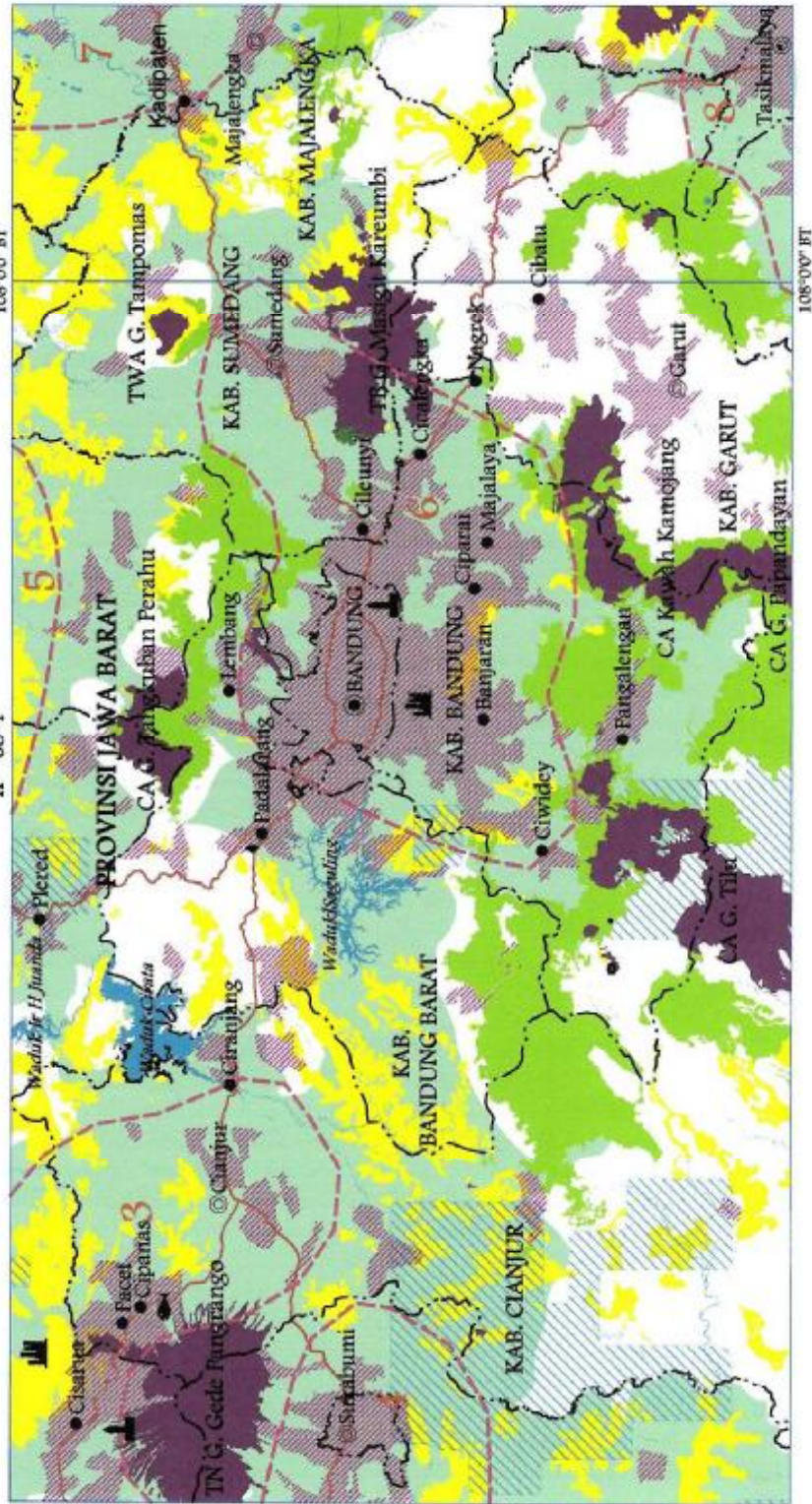


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 55-4



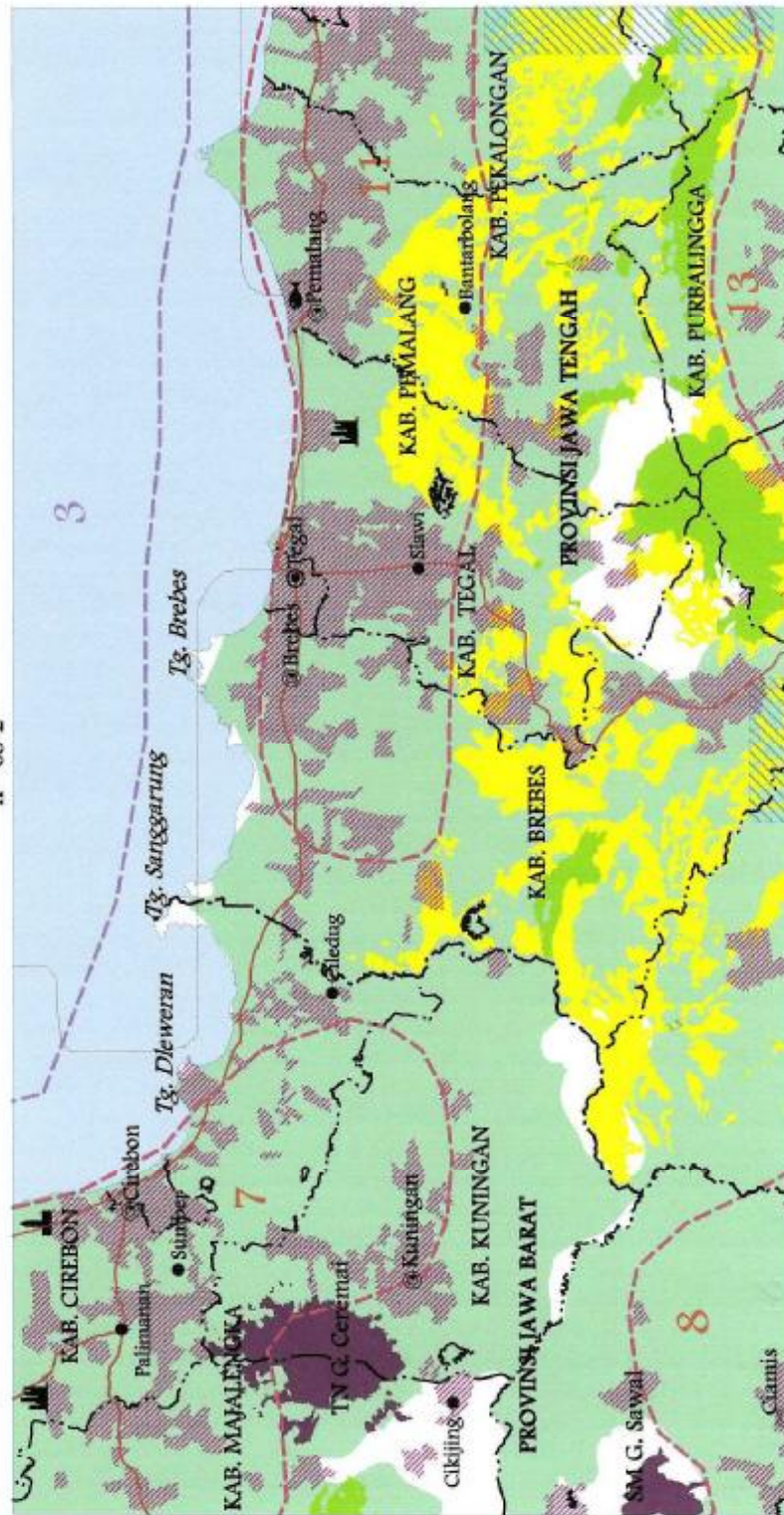


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 68-1



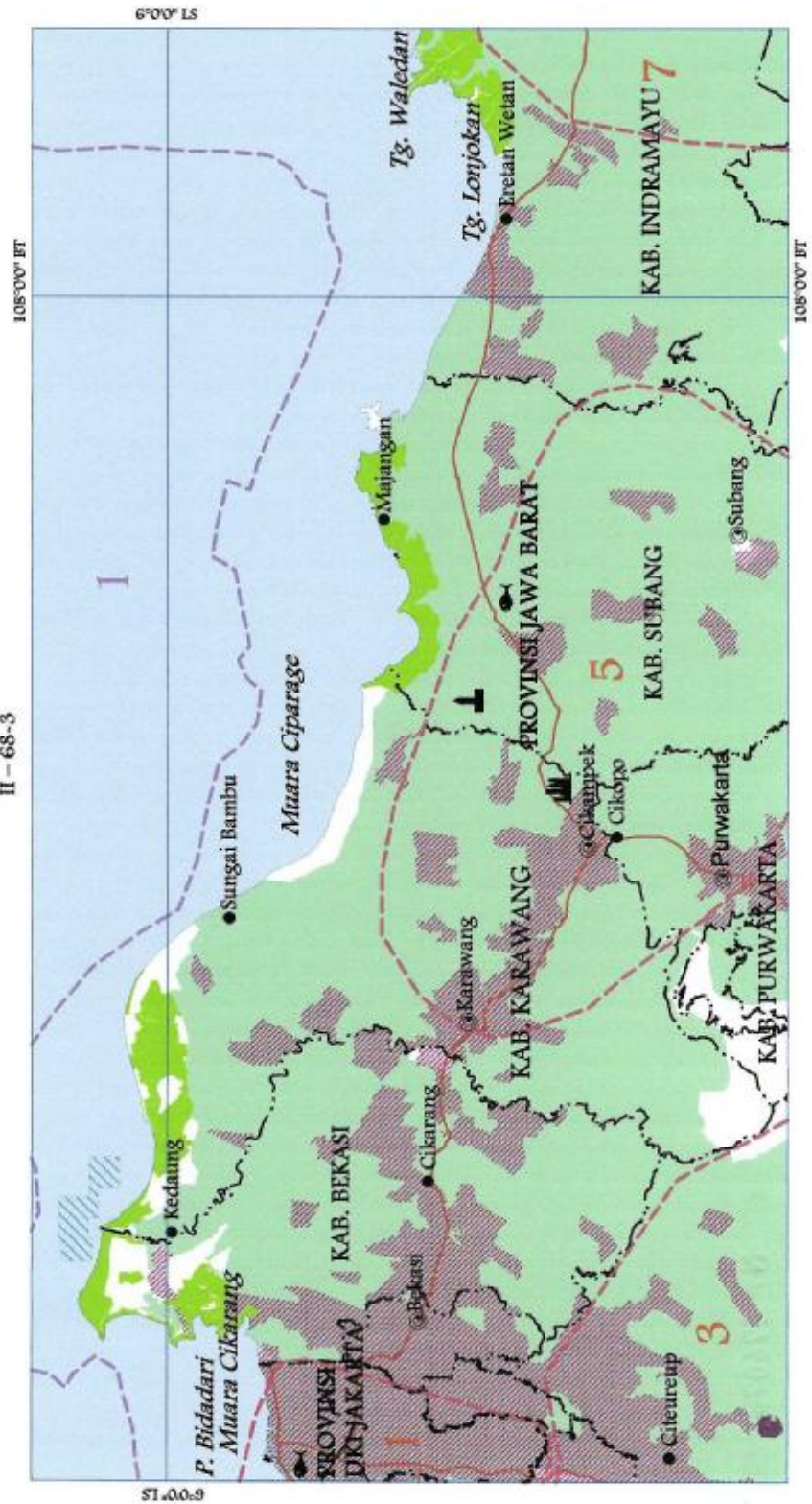


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 68-2





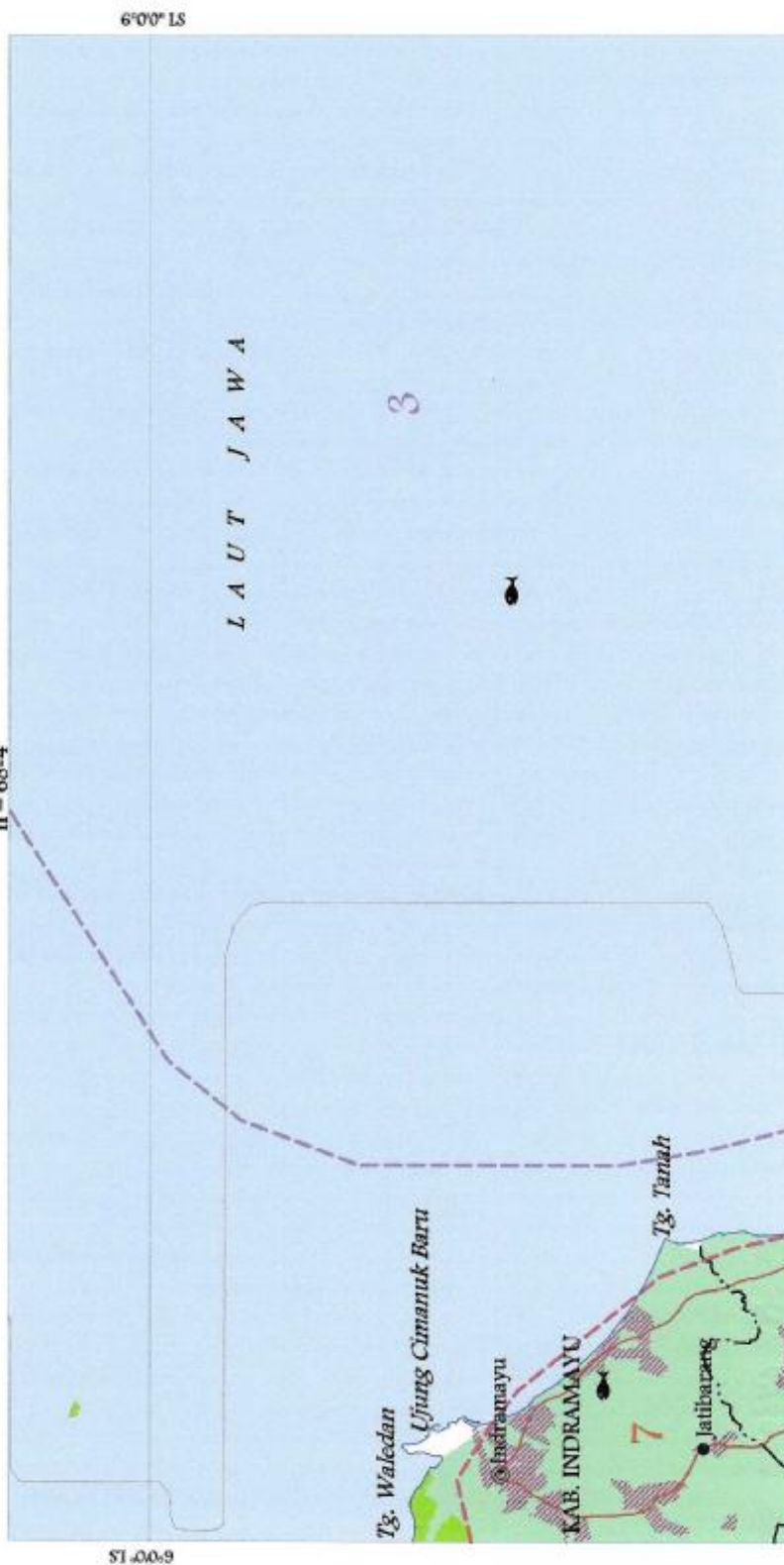
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 68-3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

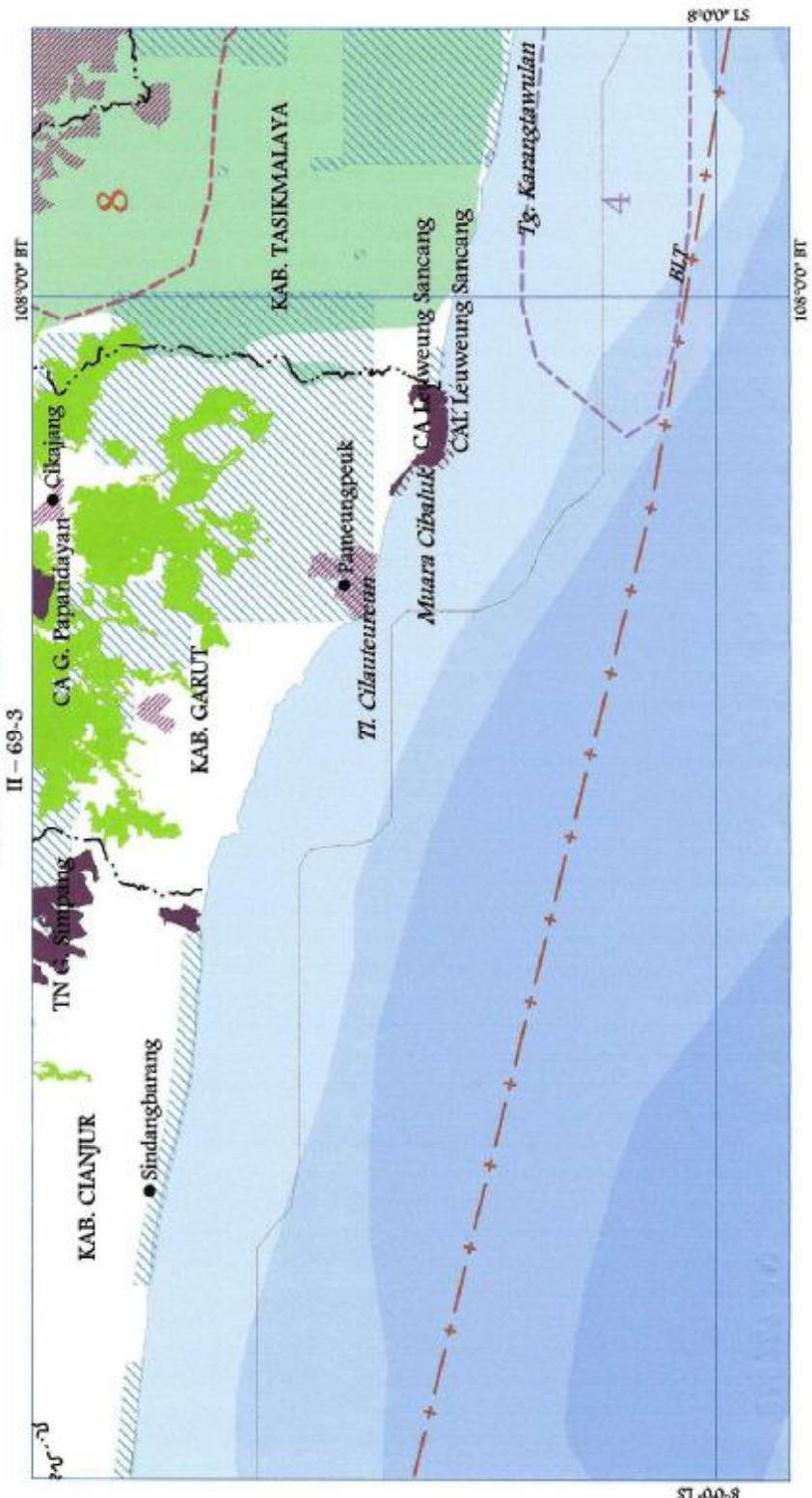
II - 68-4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

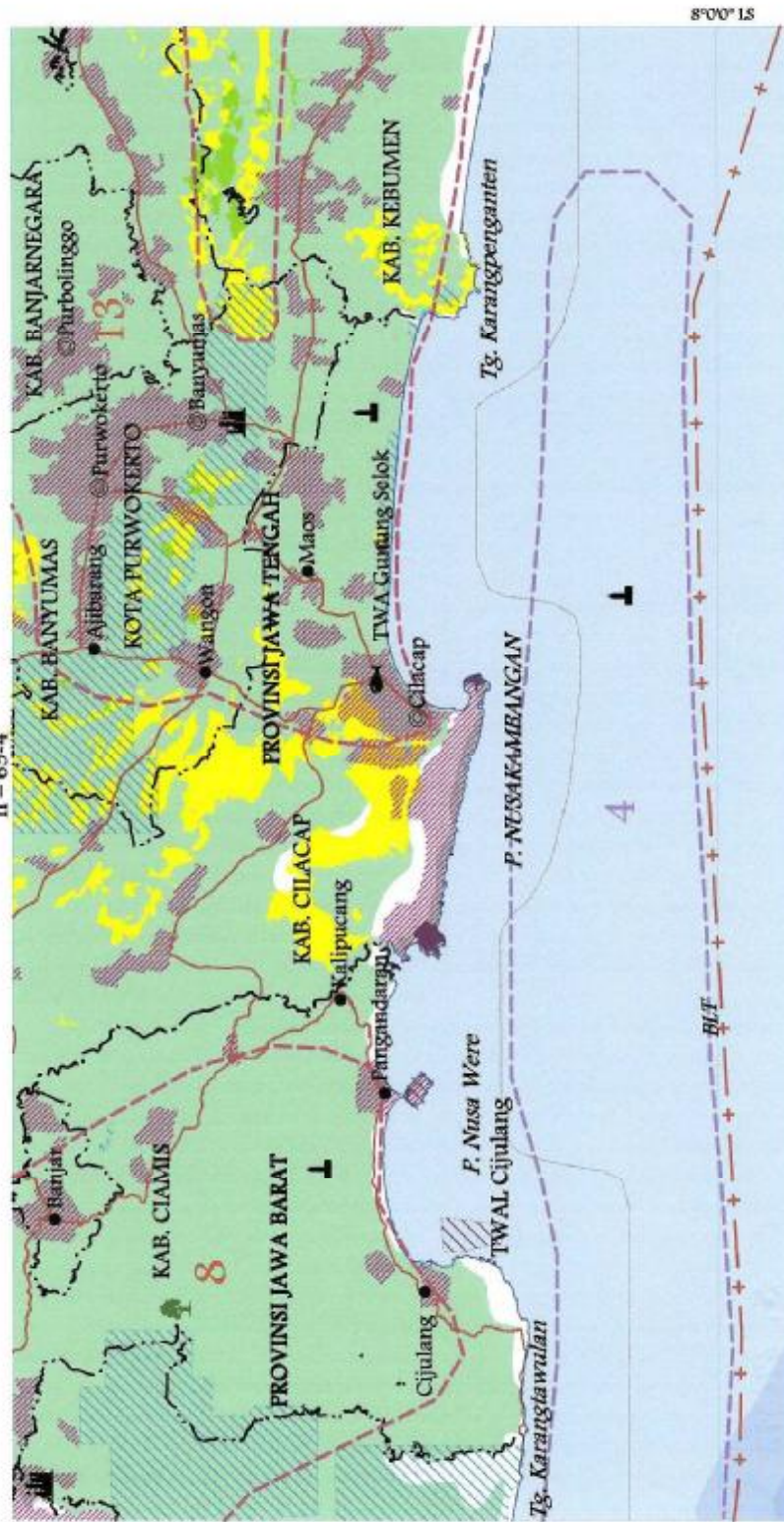
II - 69-3





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 69-4



SI.00:8

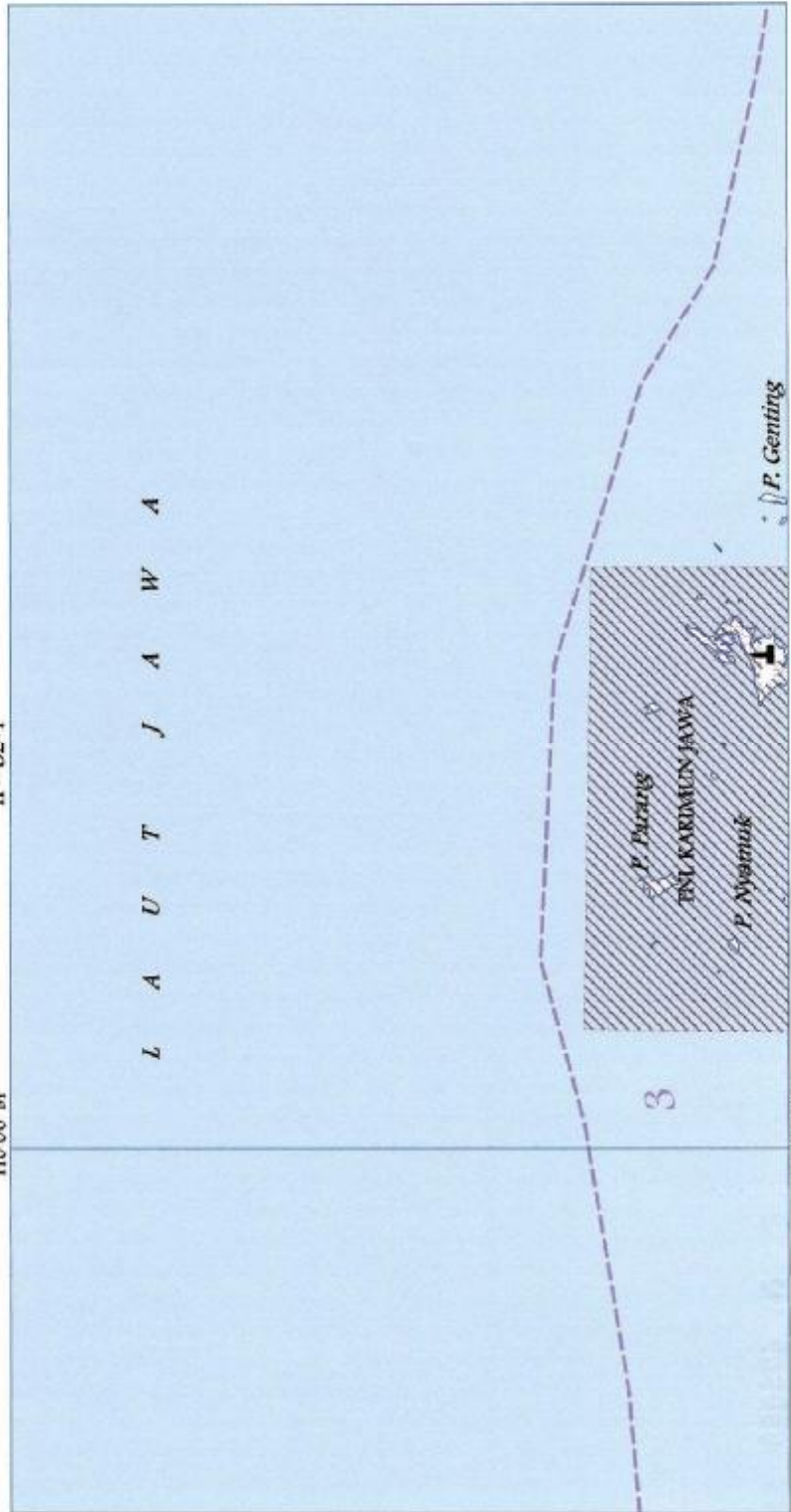


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 82-1

L A U T J A W A

110°00' BT



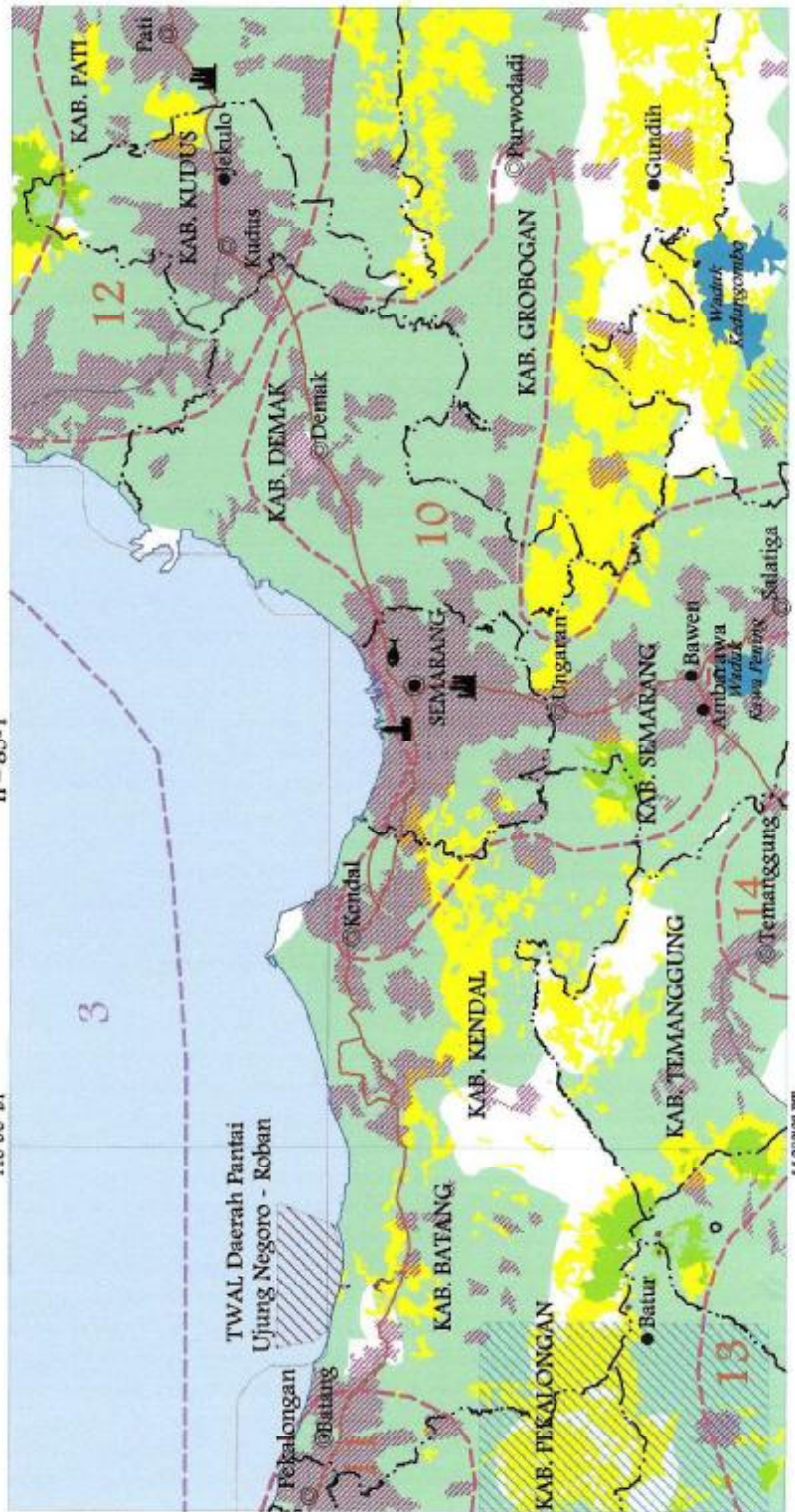


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 83-1



110°00' BT

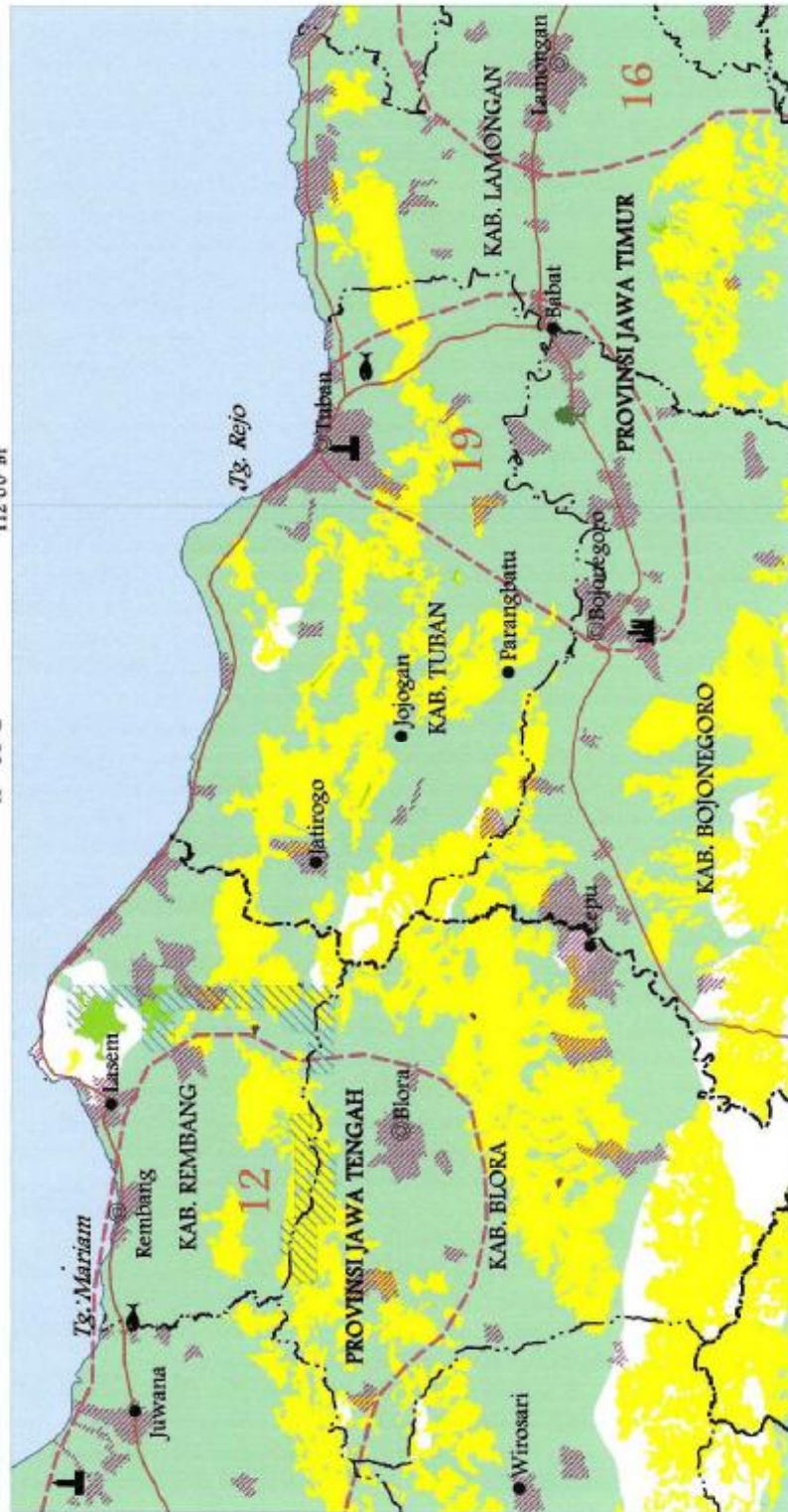


110°00' BT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 83-2

112°00' BT



112°00' BT

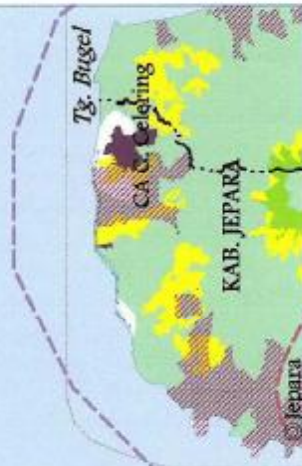
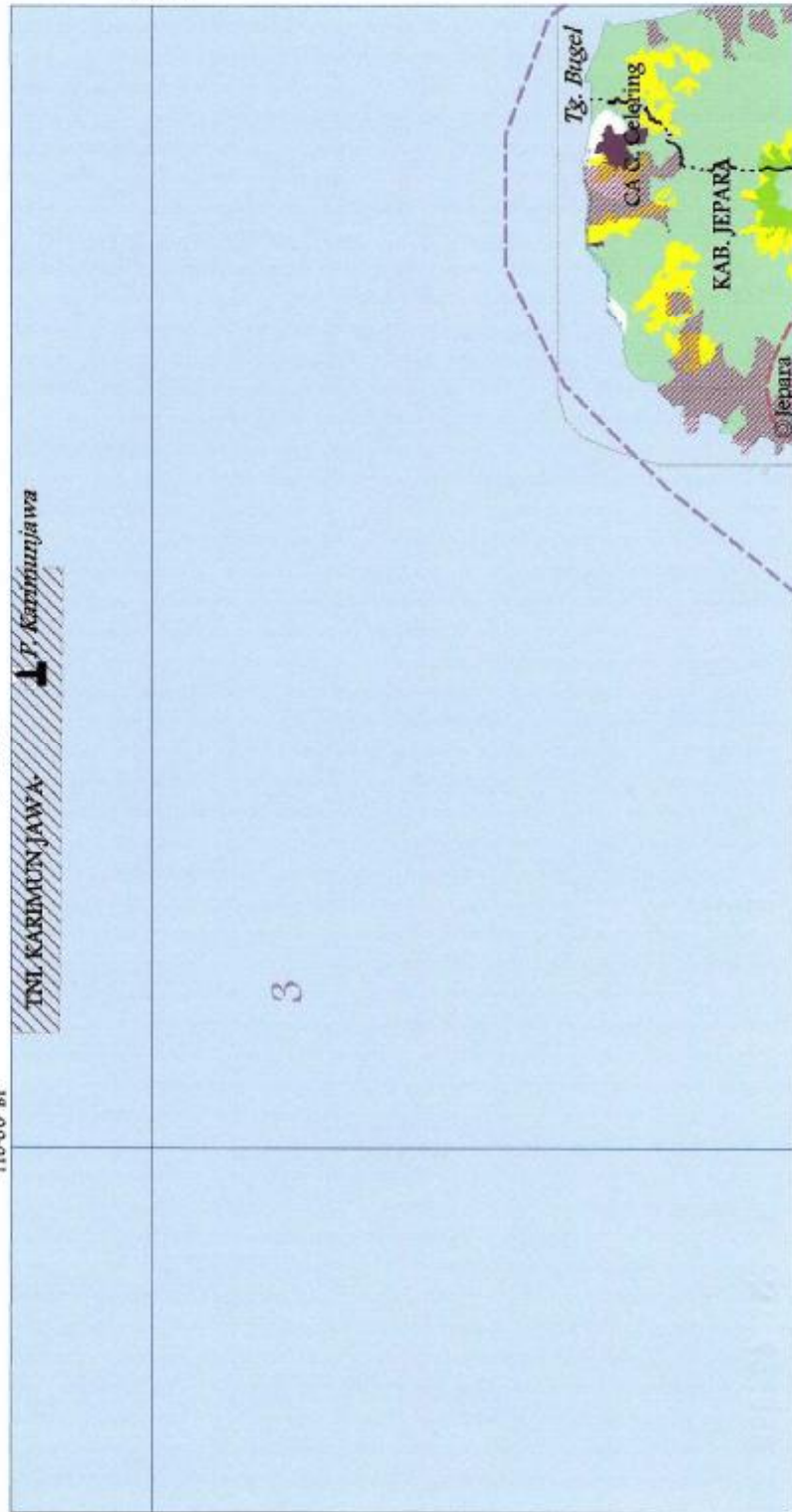




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 83-3

TM. KARIMUN JAWA  **Kabupaten Jawa**

110°00' BT



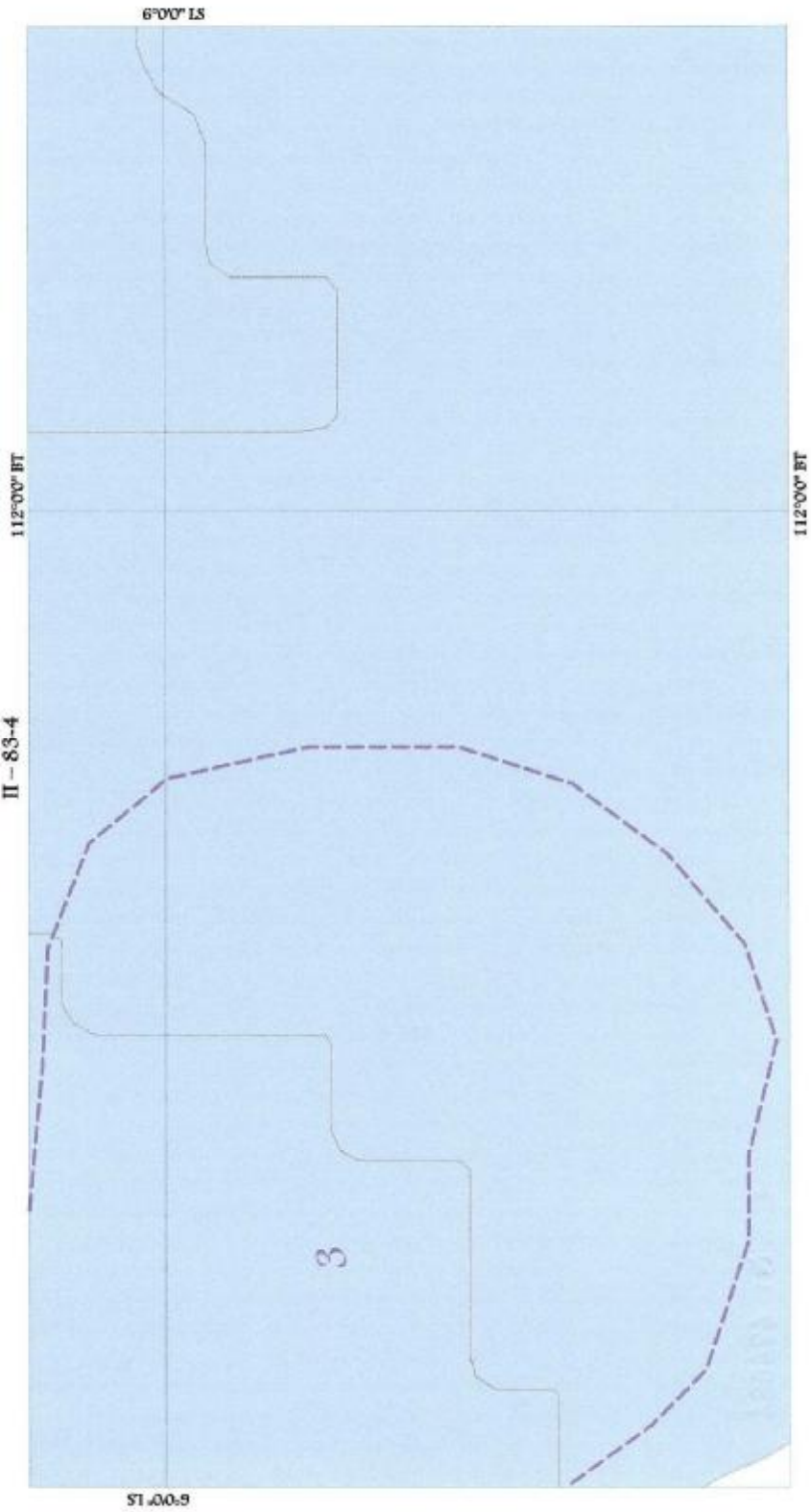
110°00' BT

6°00' LS



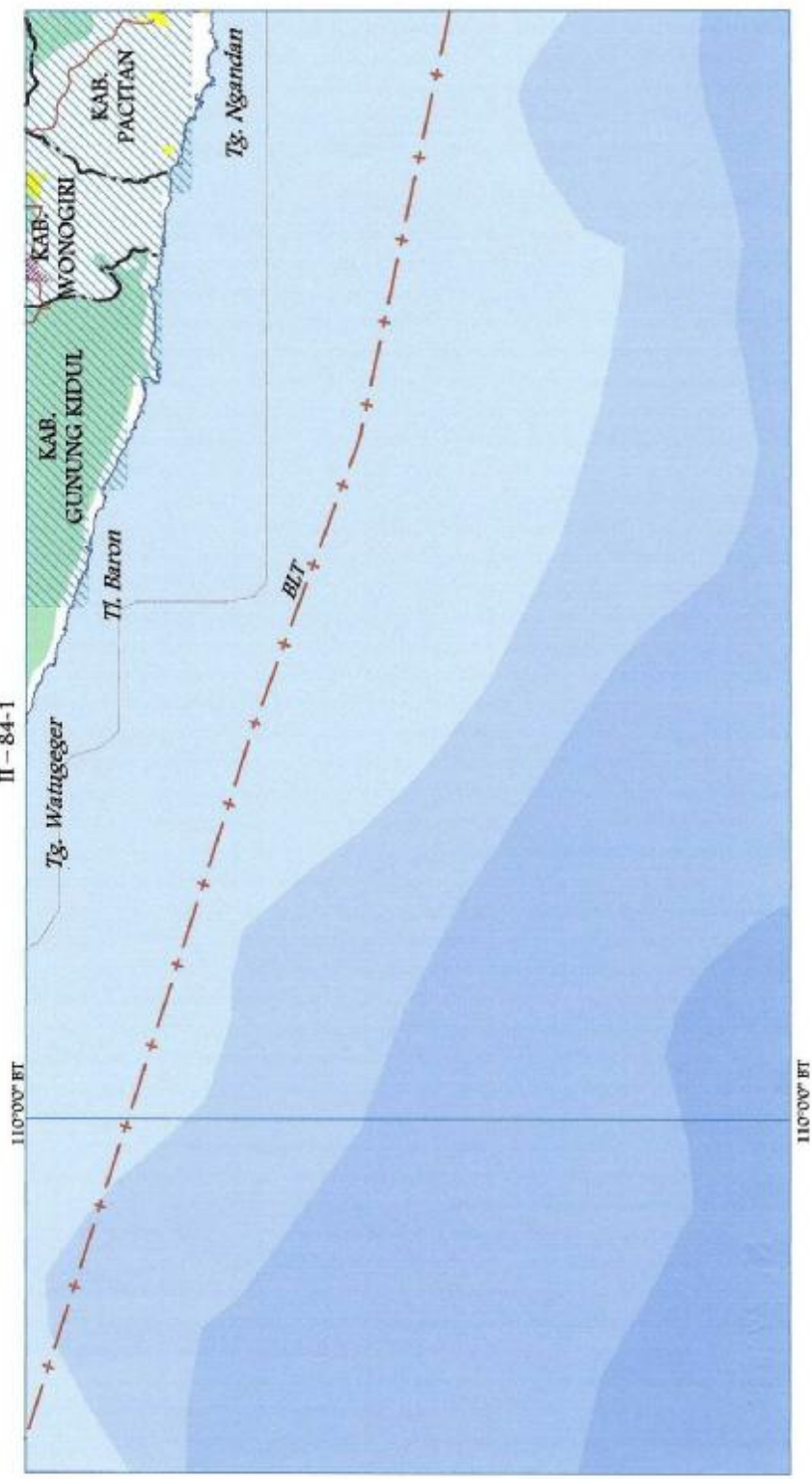


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 83-4



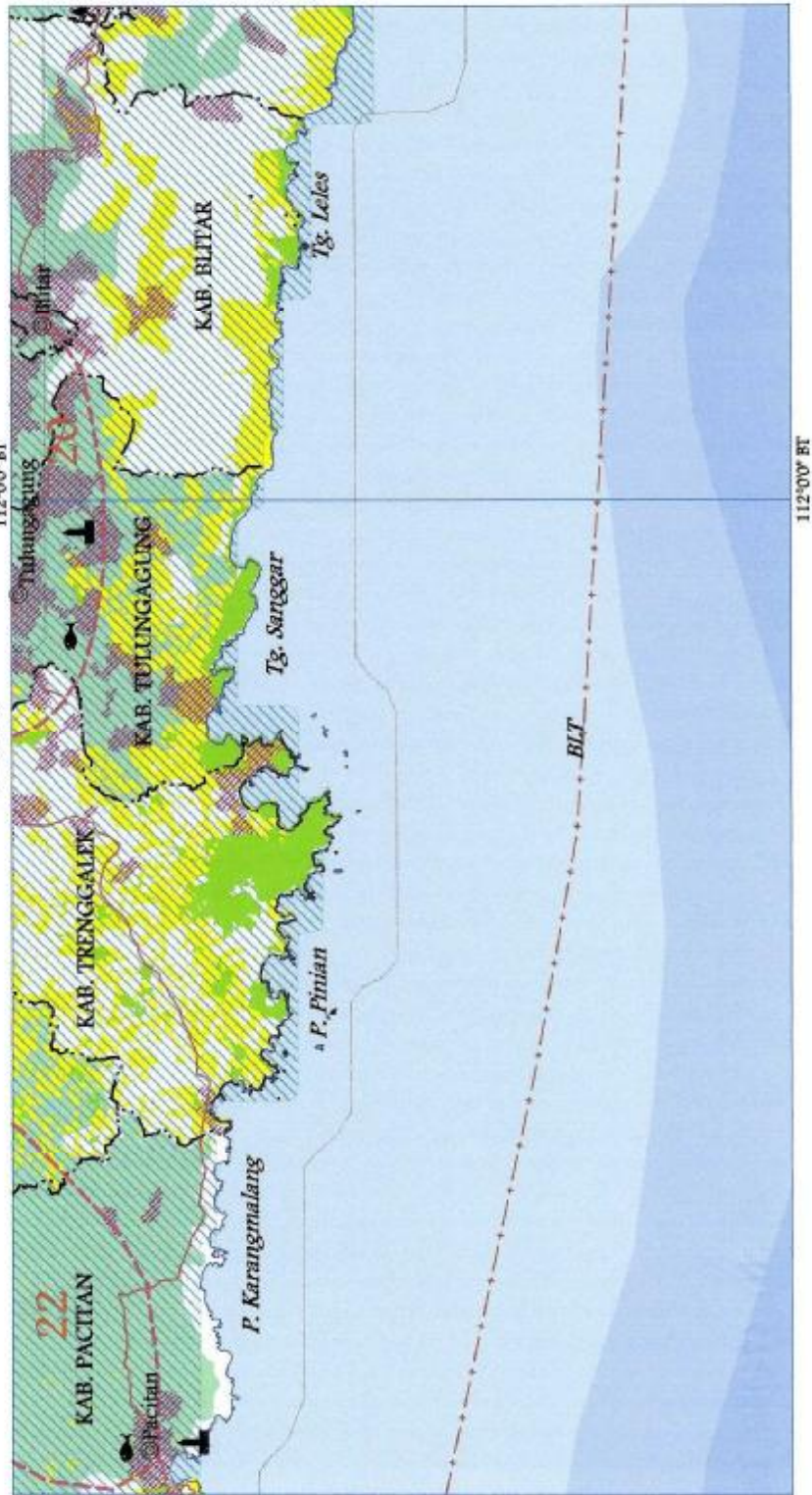


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 84-1



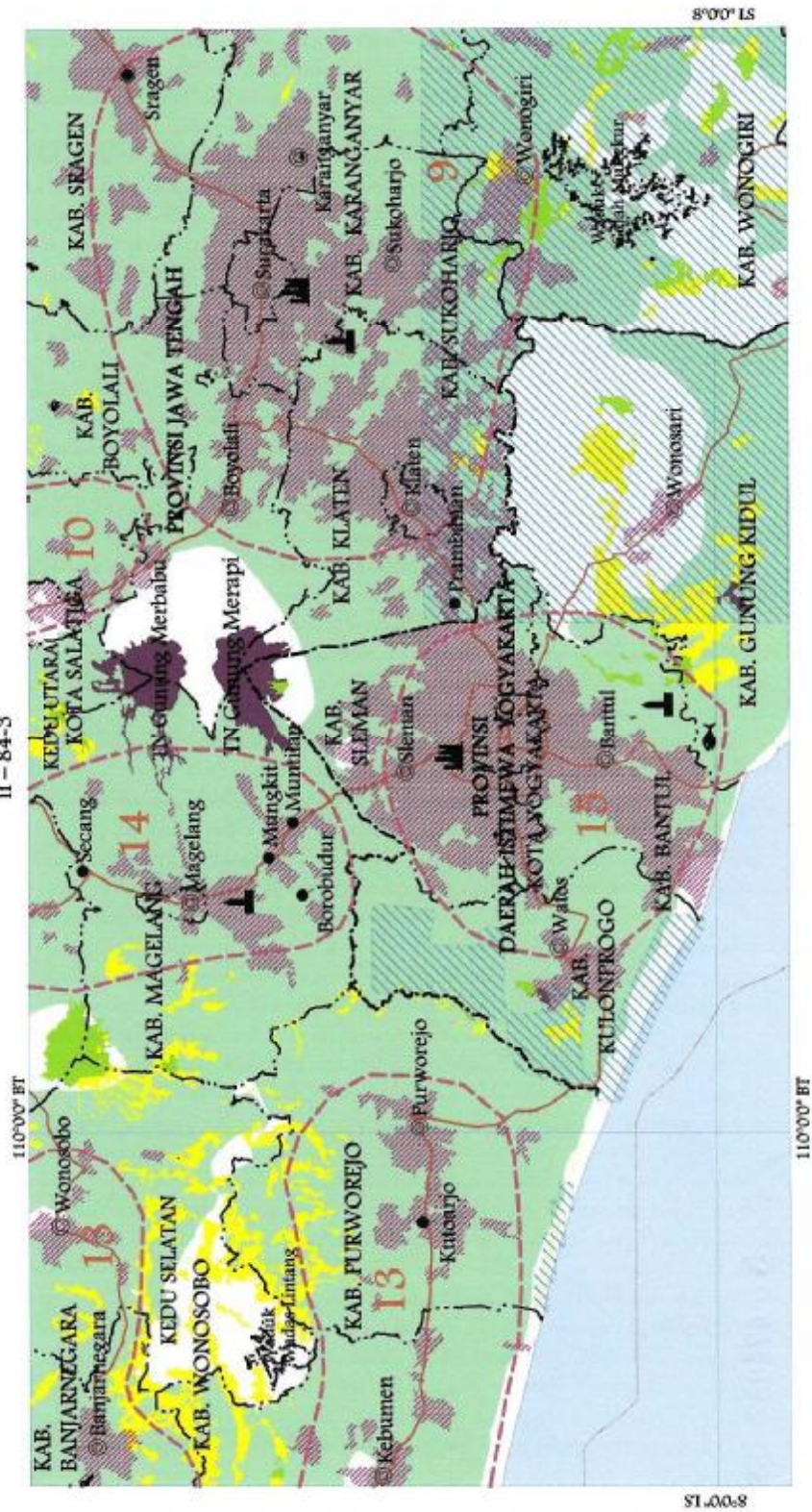


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 84-2





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 84-3

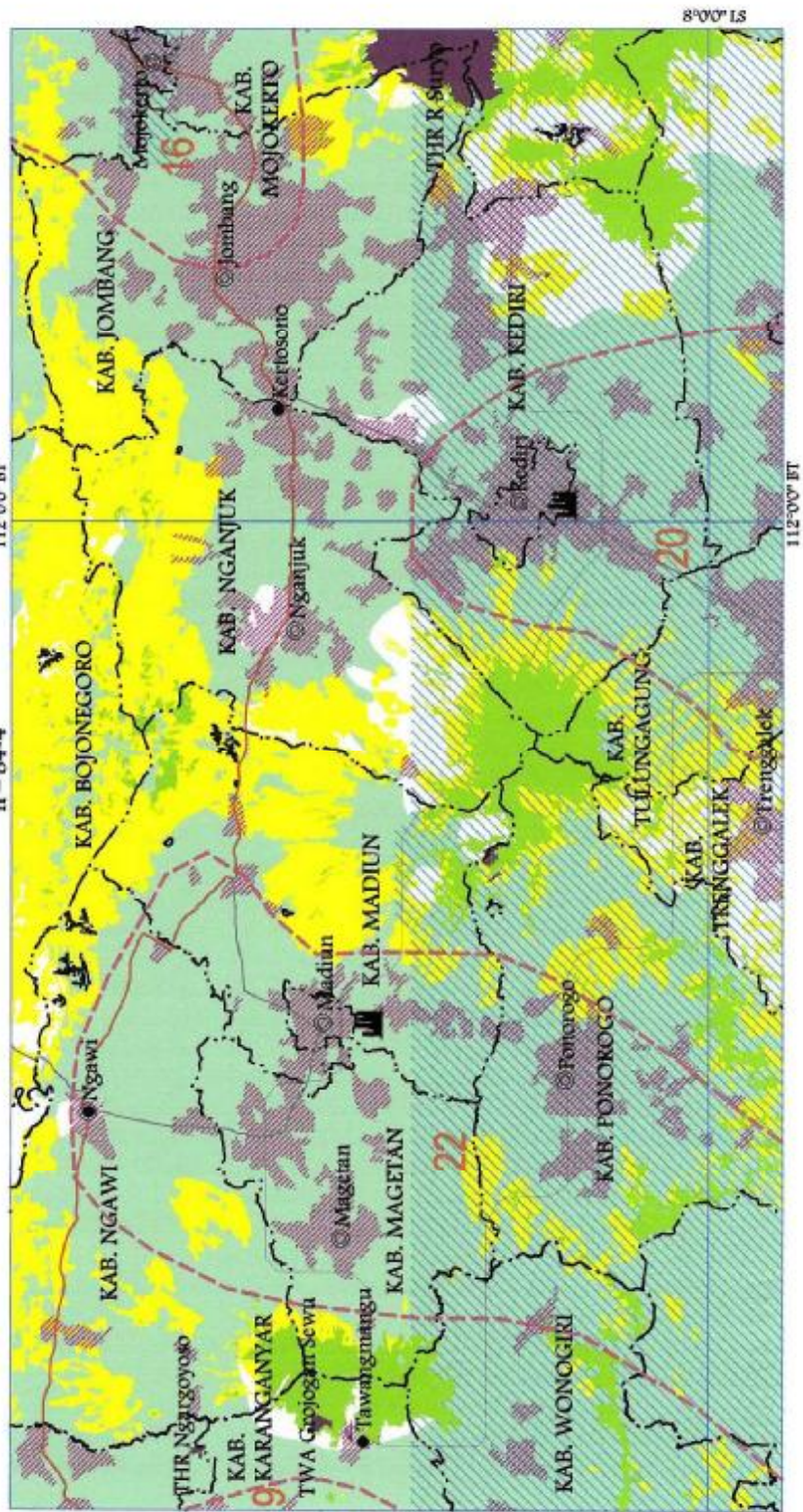


SI.00-8



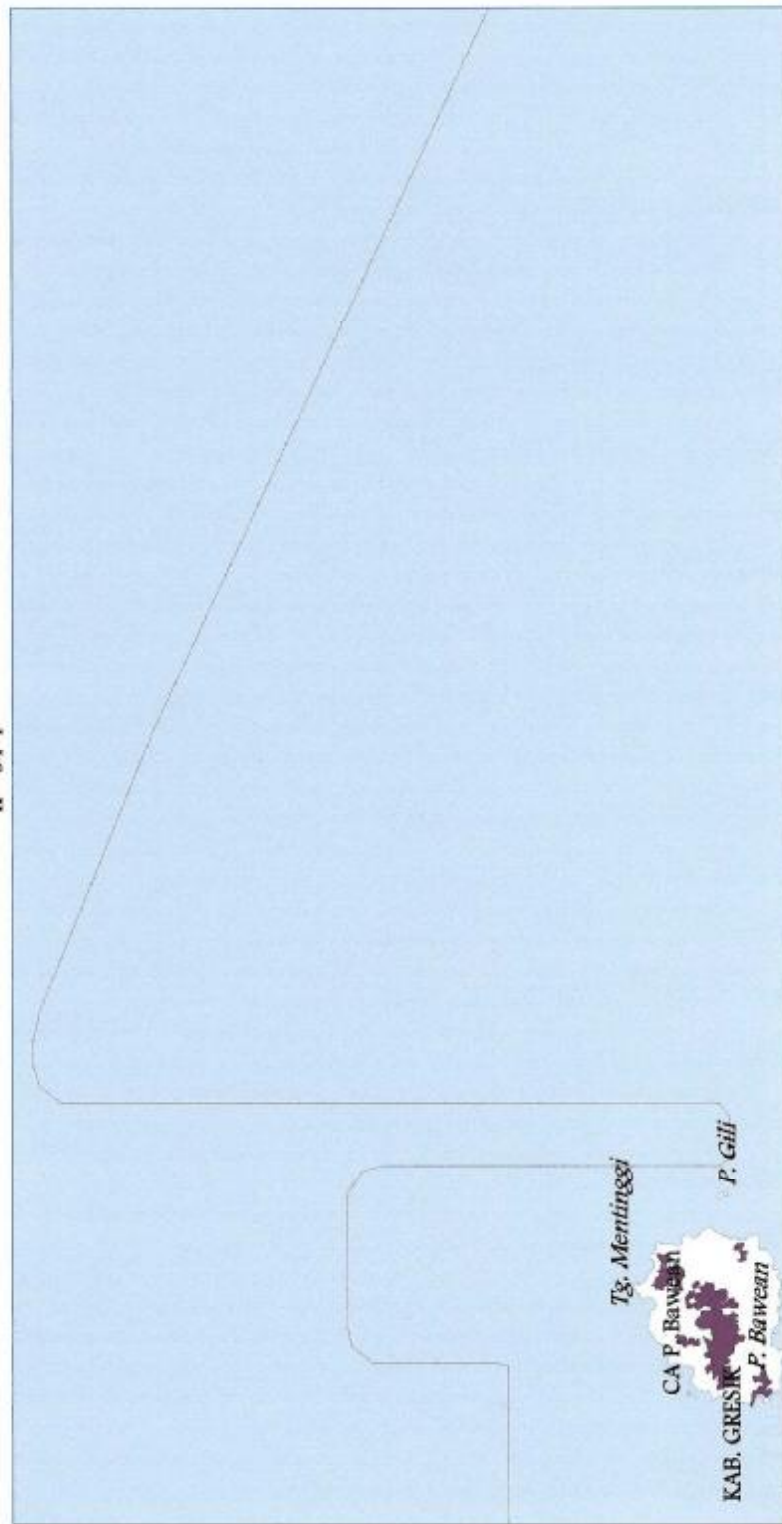
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

II - 84-4





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 94-1



Tg. Mentinggi

P. Gili



CA P. Bawean

P. Bawean

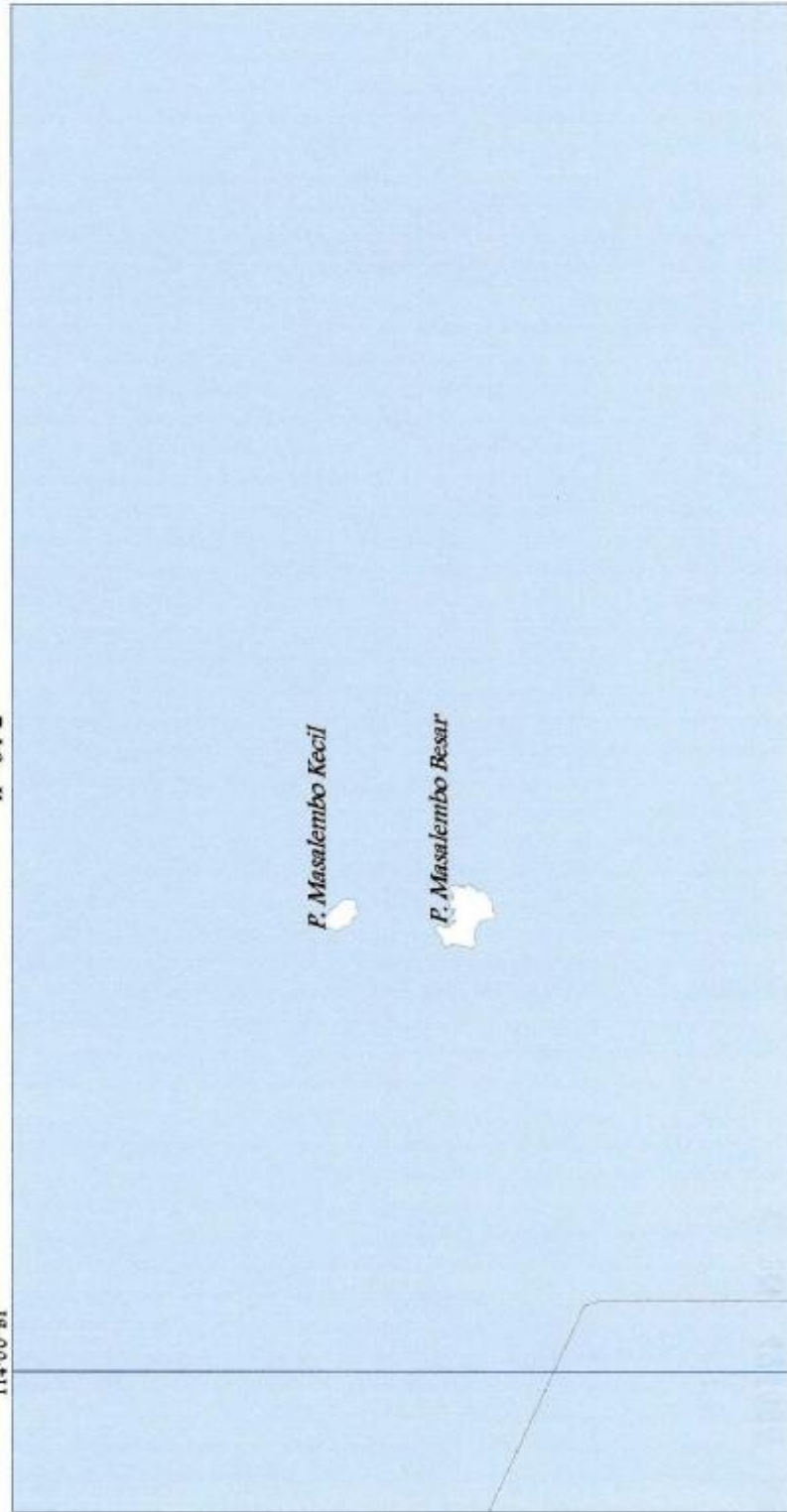
KAB. GRESIK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 94-2



114°00' BT



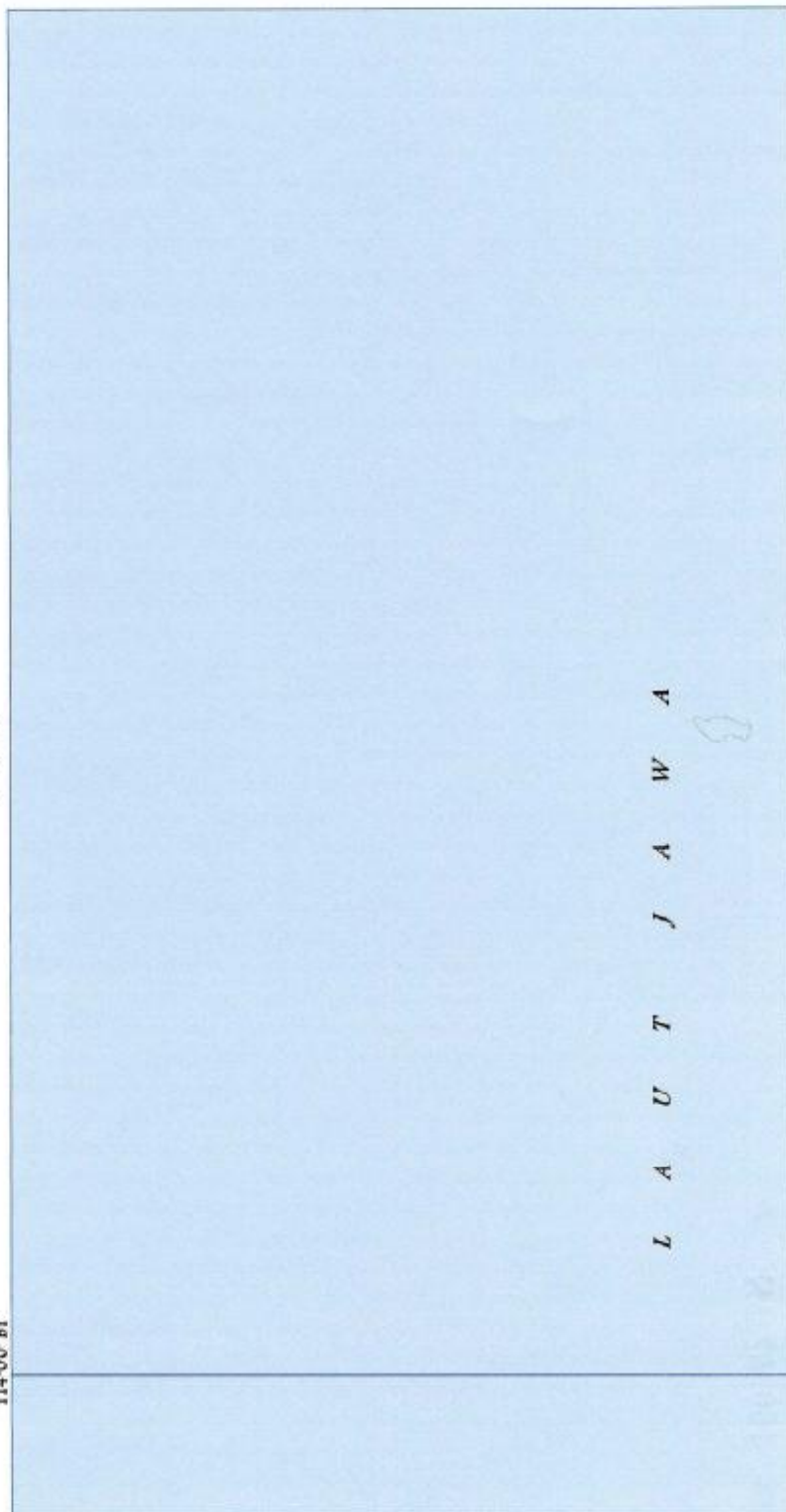
114°00' BT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 94-4



114°00' BT



L
A
U
T
J
A
W
A

114°00' BT

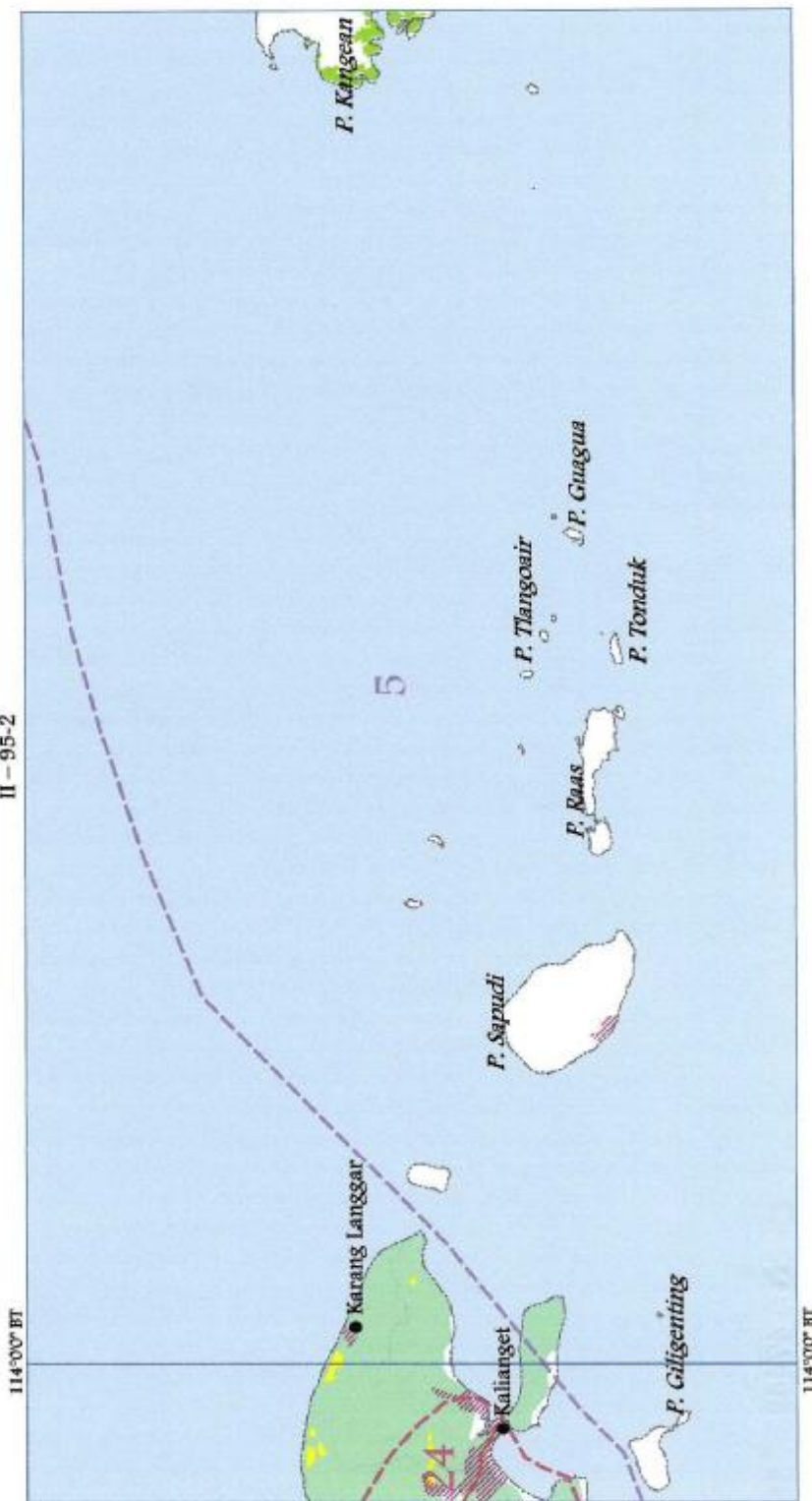


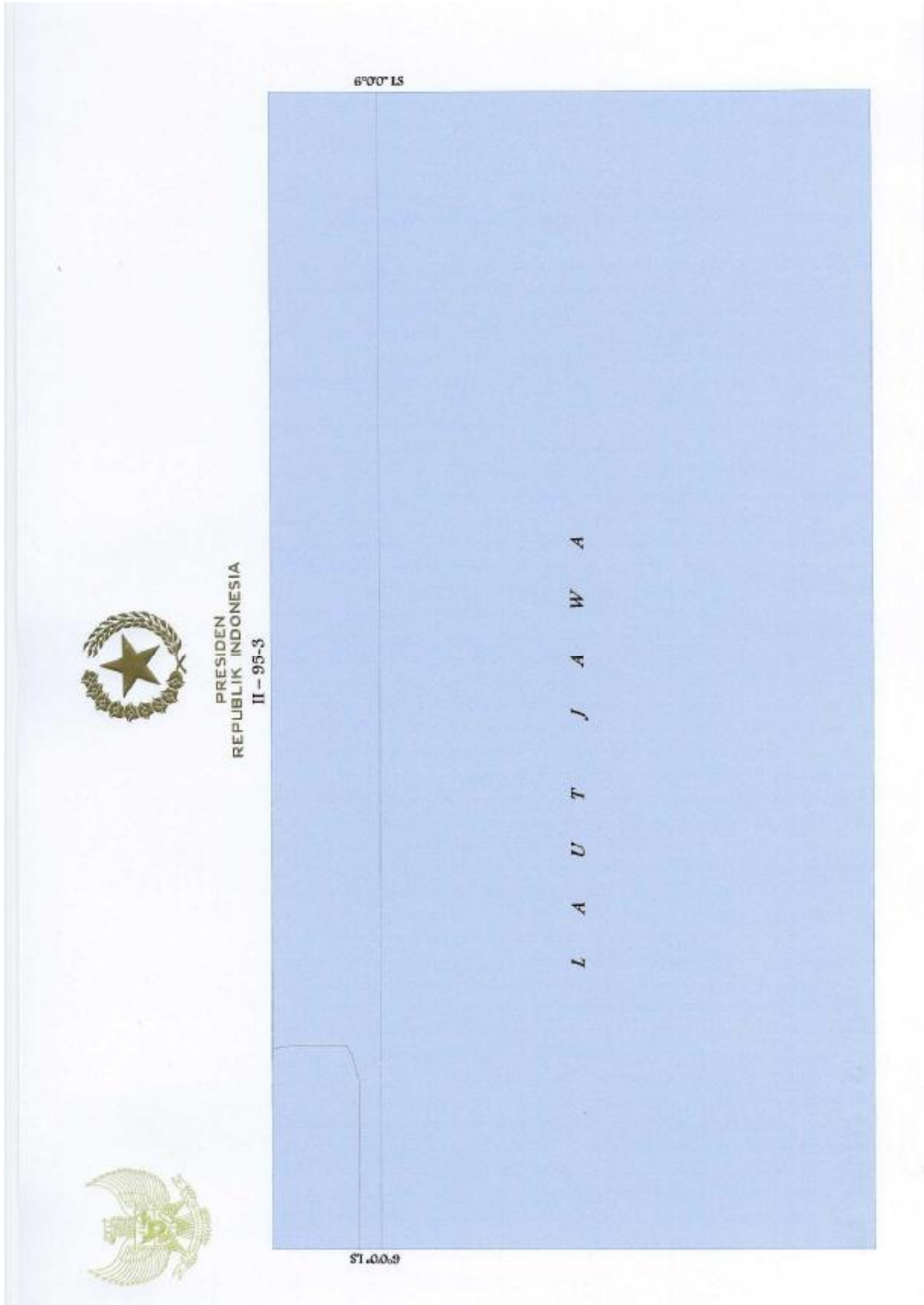
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 95-1





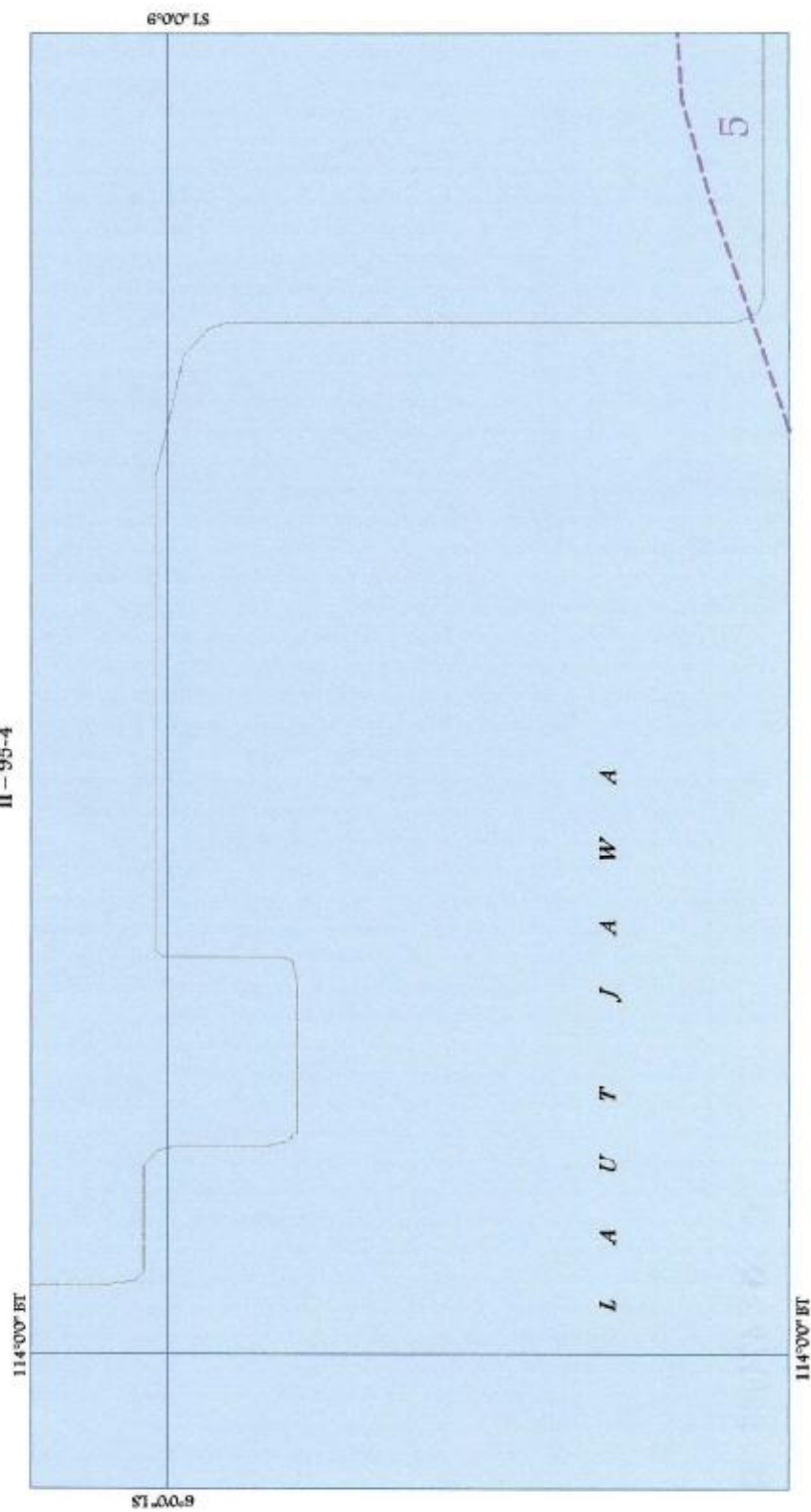
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 95-2







PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 95-4



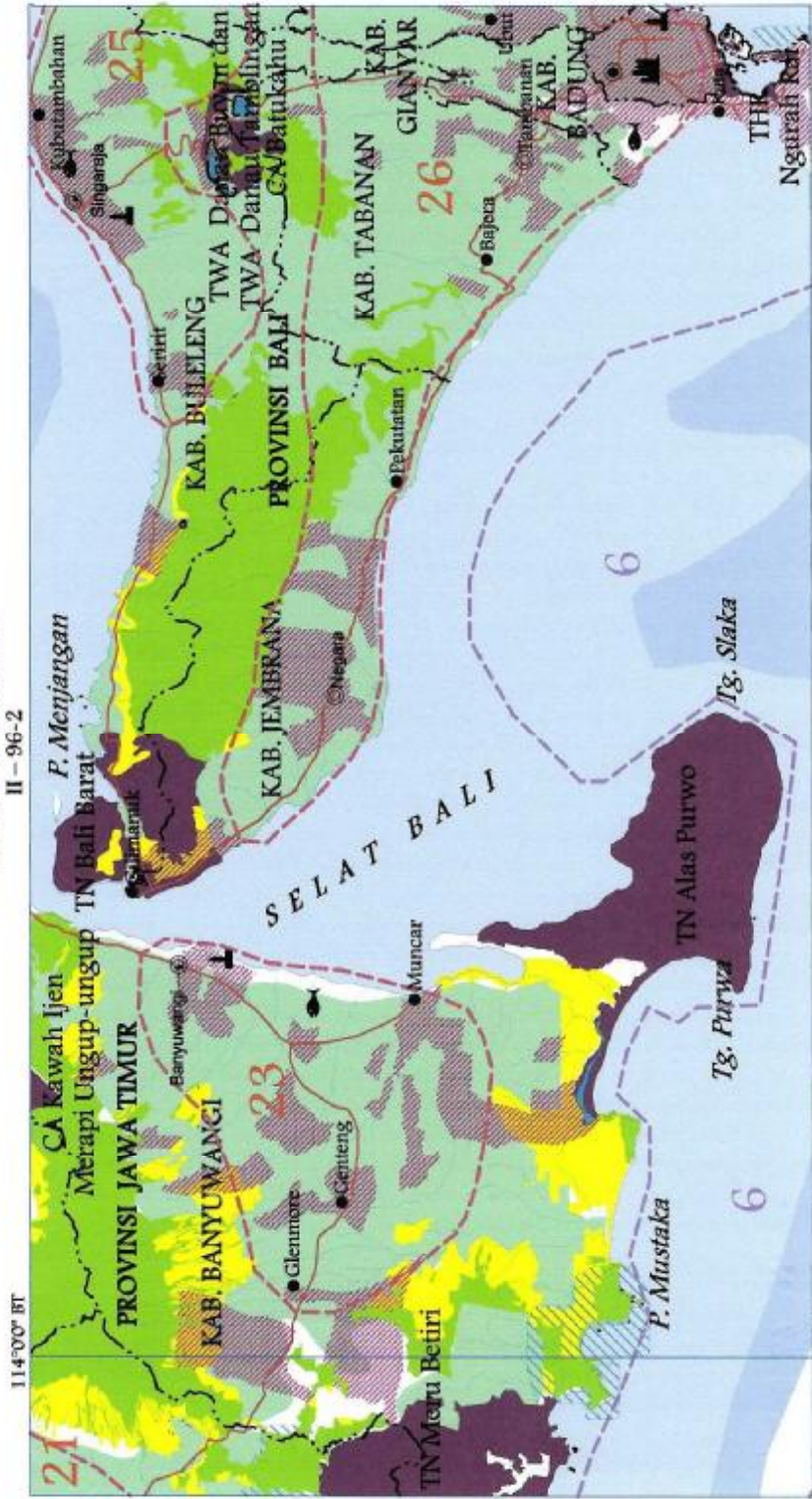


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 96-1





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 96-2



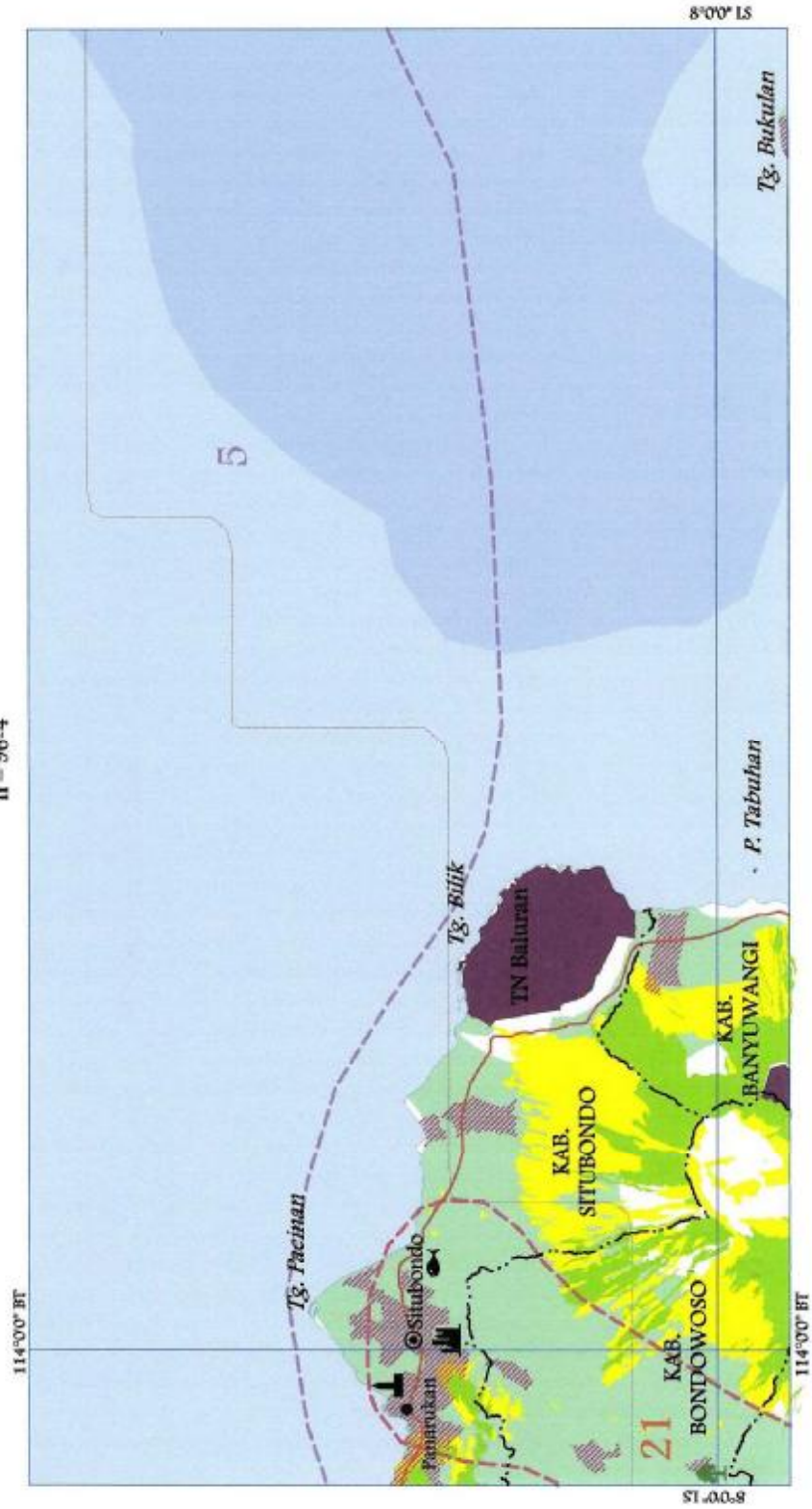


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 96-3



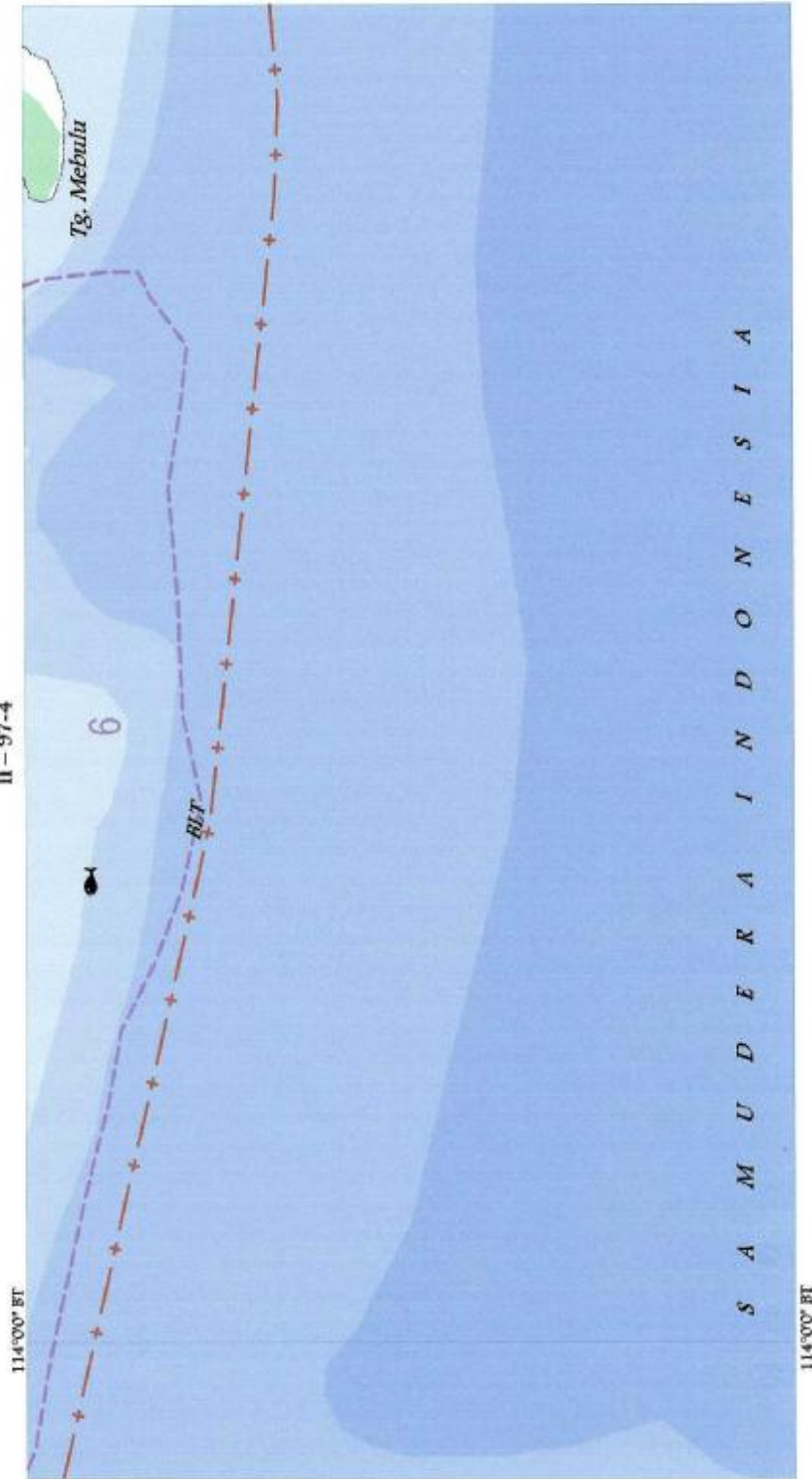


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 96-4



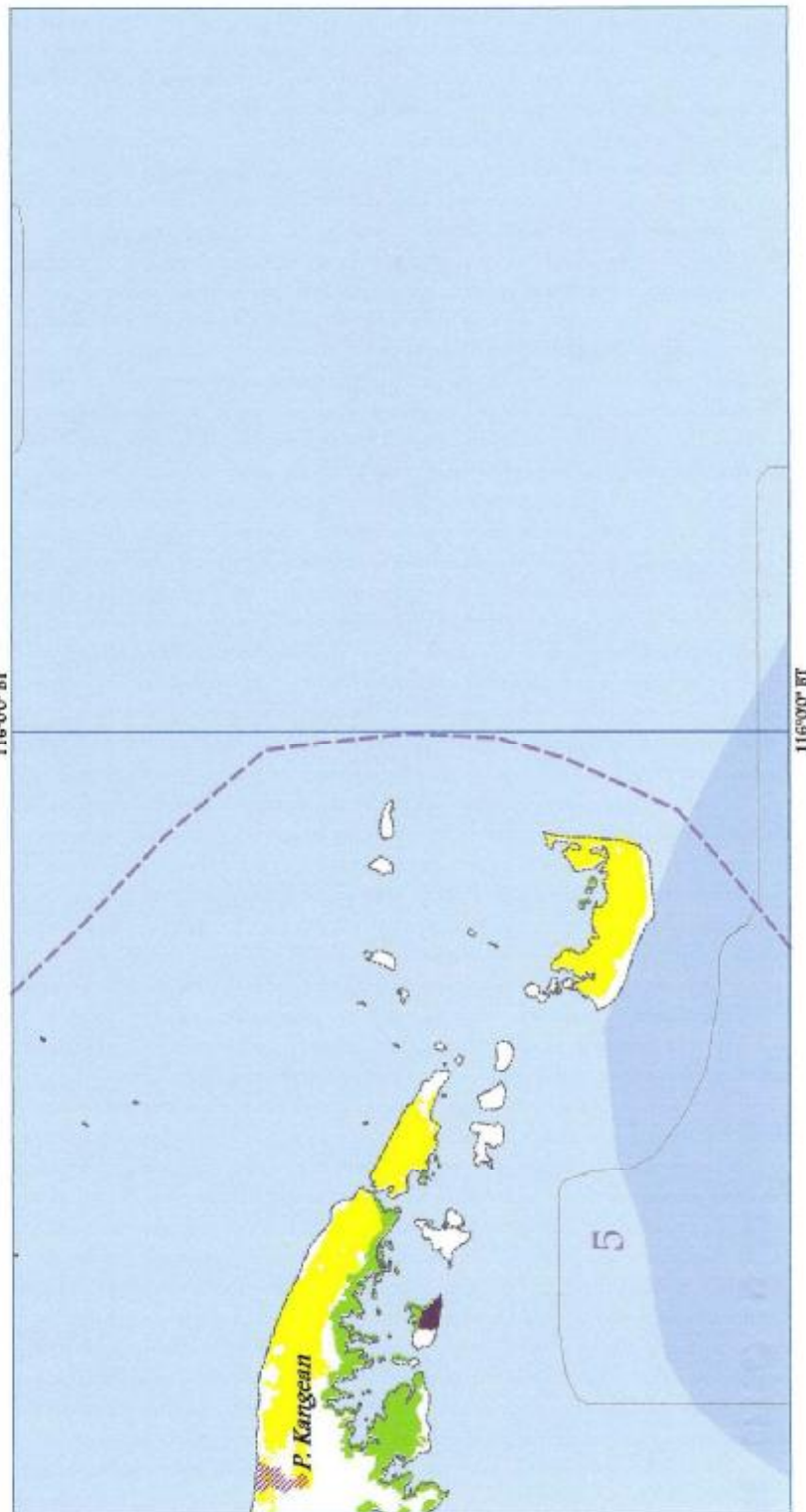


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 97-4



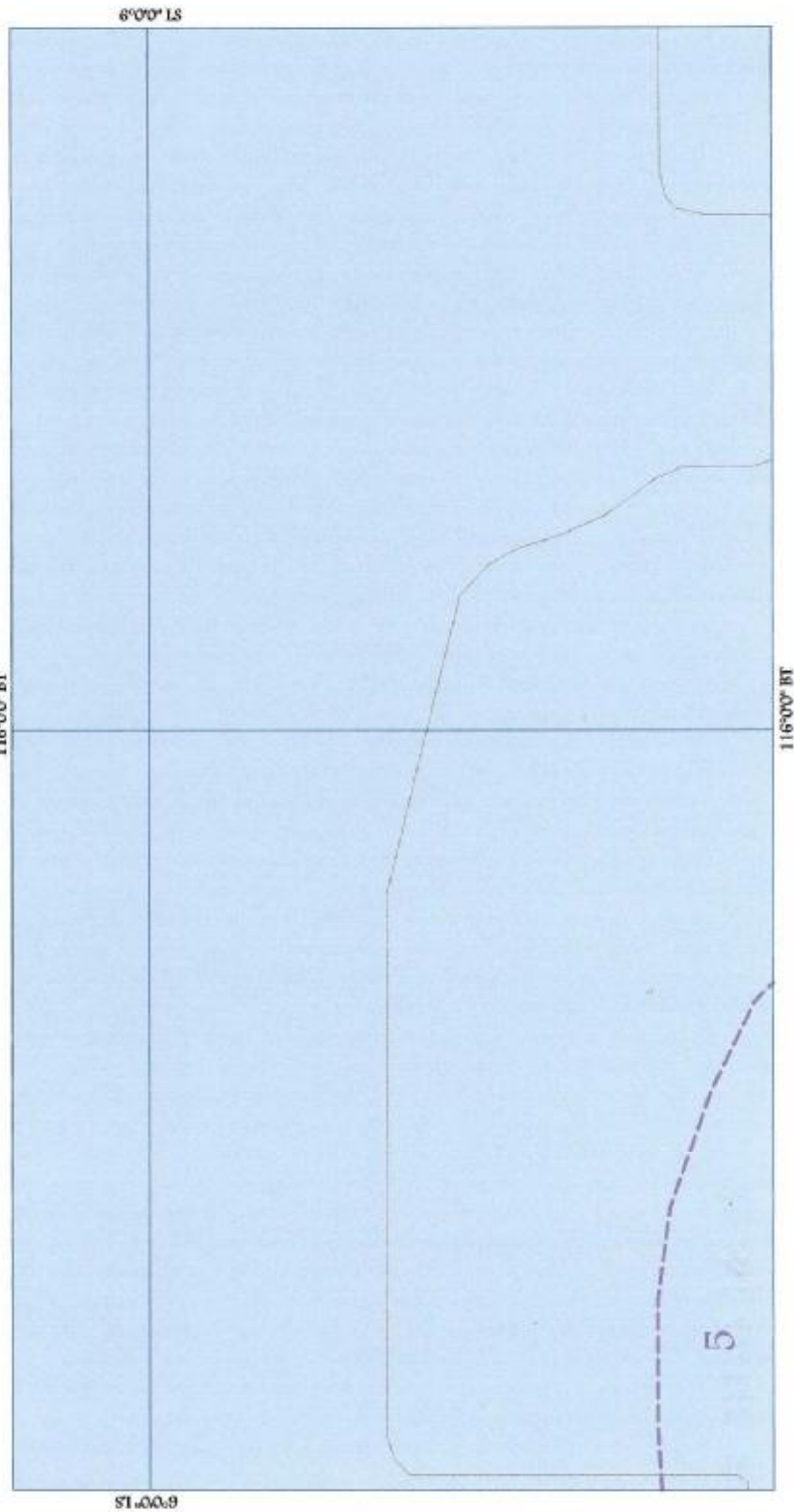


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 109-1
116°00' BT



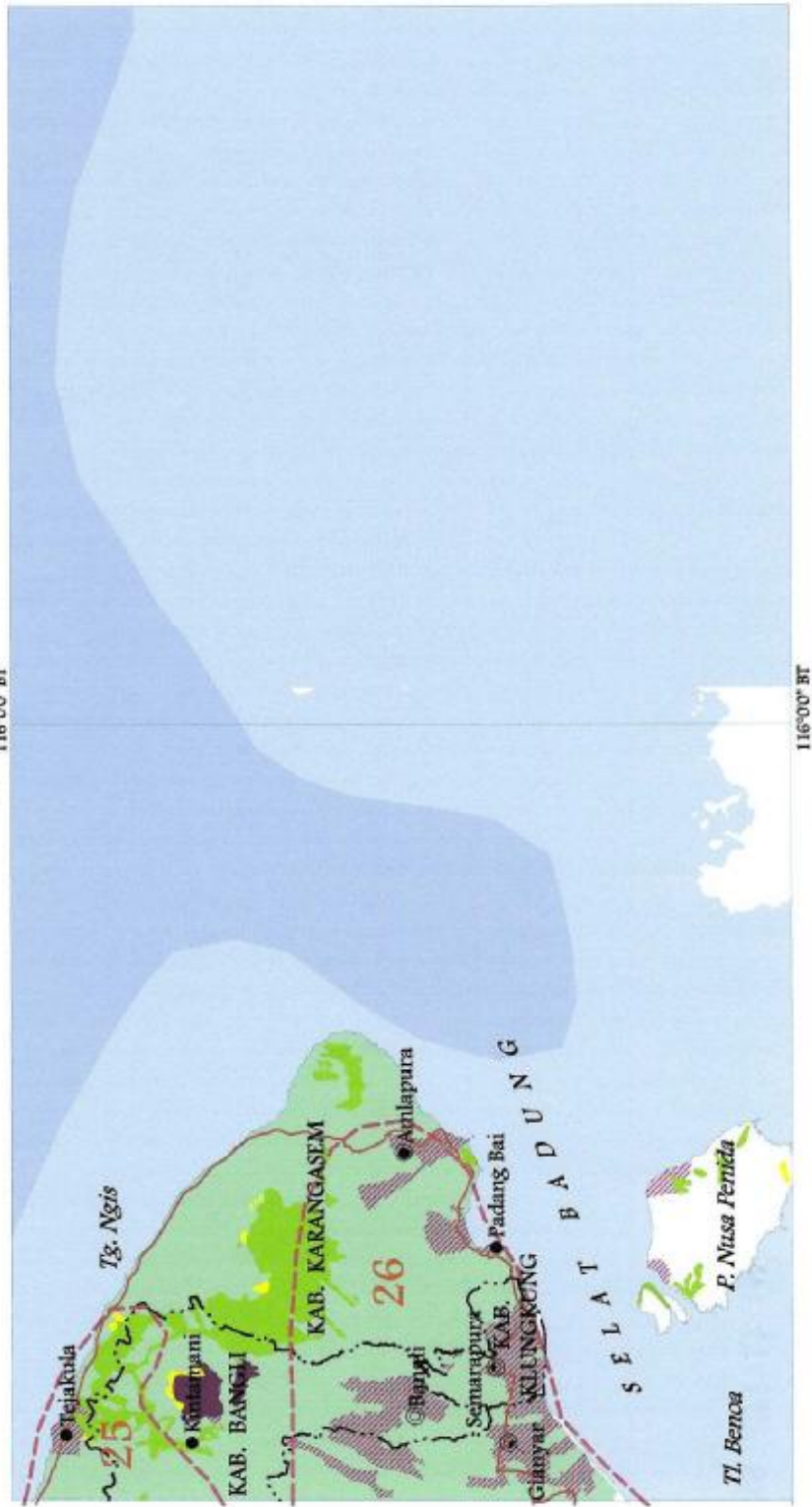


PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 109-3
116°00' BT

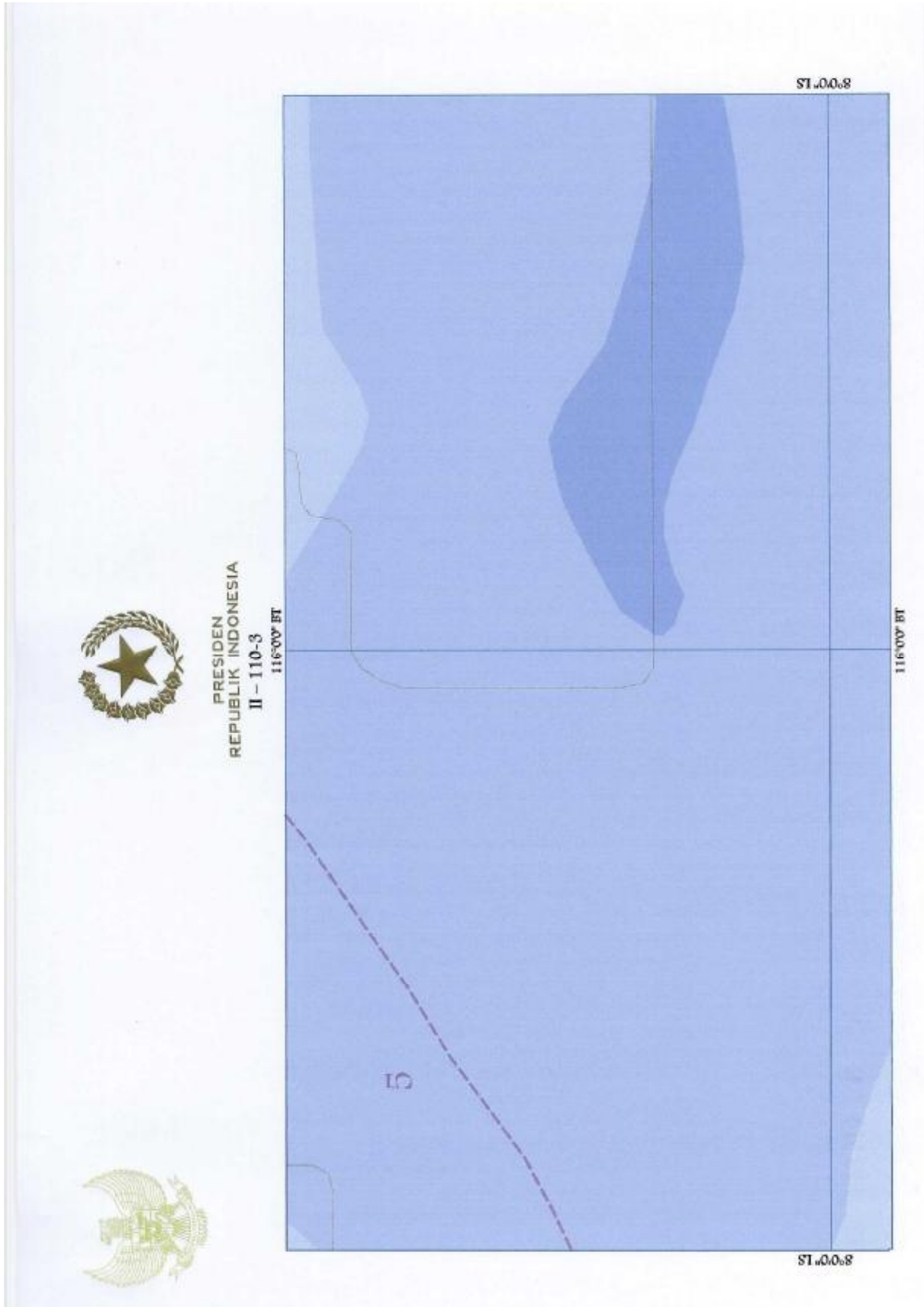




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 110-1
116°00' BT

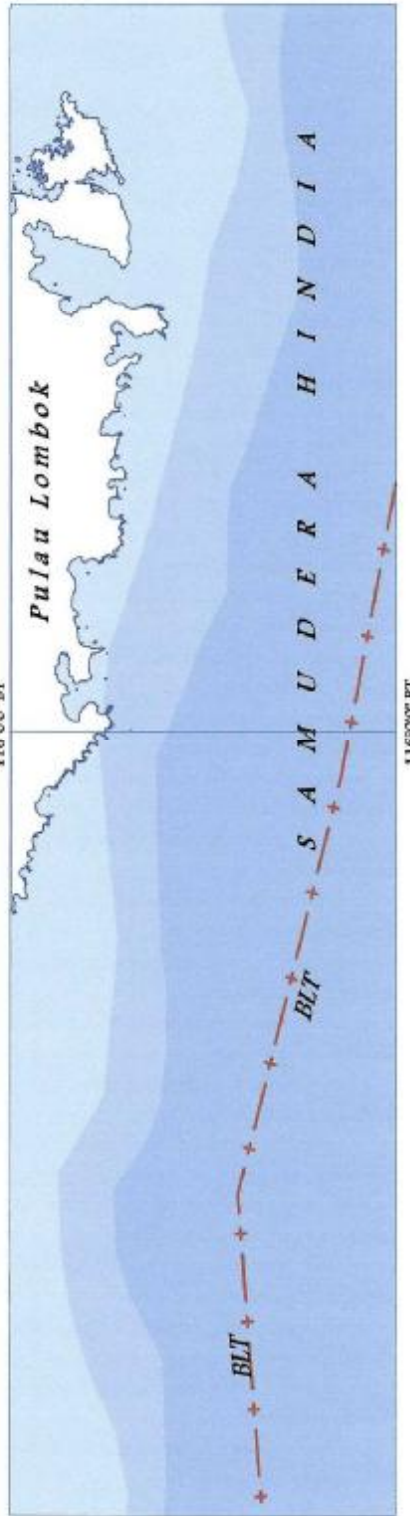


116°00' BT





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
II - 111-3
116°00' BT



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TANGGAL 16 MARET 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL
DI PULAU JAWA-BALI

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYAWAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Provinsi Jakarta	Provinsi Jawa Barat	Provinsi Banten
I.1.	Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor Depok-Jangerang-Bekasi (Jabodetabek)	PKV	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Pariwisata - Perikanan - Perdagangan dan Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan perkembangan filial PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek untuk meningkatkan kemegahan lahan pertanian tanaman pangan b. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan c. mengembangkan PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan d. mengembangkan perkembangan PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup e. mengendalikan perkembangan PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek yang berdekatan dengan kawasan budidaya f. mengendalikan perkembangan PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek di kawasan rawan bencana gempa tanah atau tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan abrasi di sepanjang wilayah pesisir

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>g. mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>h. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>i. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berkelas internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>j. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek sebagai pusat partisipasi cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, pelaksanaan insentif, konferensi, dan pameran</p> <p>k. meningkatkan keterkaitan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Yogyakarta-PKN Surakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gresik Danjokoh Mojokerto Surabaya Sidoarjo Larronggen (Gerbang Kertusuailla), dan PKN Kawasan Perkotaan Denpasar Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagila) sebagai pusat partisipasi di Pulau Jawa Tiali dalam kesatuan nufun partwianra</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>l. mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan meminim limbah</p> <p>ii. mengembangkan dan mempertahankan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Udara Soekarno-Hatta</p> <p>ii. mempertahankan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Jatibarang-Cirebon-Legal-Pekalongan Semarang Kudus Rembang Bojonegara Surabaya yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan PKW Cikampek-Cikopo, PKN Cirebon, PKW Legal, PKW Pekalongan, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKW Kudus, PKW Bojonegara, dan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>o. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Purwakartadundung Casikmalaya Banjar Kroya Kebumen Kulogarjo Yogyakarta-Klaten-Surakarta-Madiun-Kertosono-Jombang-Surabaya yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan PKW Cikampek-Cikopo, PKN Kawasan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>Pertoraan Pandung Raya, PKW Casikmalaya, PKW Keburen, PKN Yogyakarta, PKW Klaten, PKN Surakarta, PKW Madhu, dan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>2. memanfaatkan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (penumpang) Pulau Jawa pada lintas Merak-Cilegon-Senang-Rangkas Bitung Jakarta yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan PKW Rangkas Bitung, PKN Serang, dan PKN Cilegon serta pada lintas Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan PKW Sukabumi dan PKN Kawasan Perkotaan Pandung Raya</p> <p>4. mengembangkan jaringan jalur kereta api cepat antar kota yang menghubungkan Jakarta Semarang Surabaya untuk meningkatkan keterkaitan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila serta meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa</p> <p>5. mengembangkan dan memunculkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>s. mengembangkan prasarana pemertajangan fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek berupa perubahan penyesuaian di Kota Jakarta Utara, Pelabuhan Tanjung Priuk, dan Dandar Udara Soekarno Hatta</p> <p>t. mengembangkan dan menetapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali pada jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi legal Cede-Titumg, Nagrak Bogor Gunung Putri, Rogor Cibinong, dan Laut Jawa-Layang L'lok untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek</p> <p>u. mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik pada Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa, Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa, dan Jaringan transmisi pengumpulan selatan-utara Jawa yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek</p> <p>v. mengembangkan prasarana telekomunikasi berupa jaringan listrik yang meliputi Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa, Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>di Wilayah Tengah Jawa, dan jaringan pelayanan pengumpulan [feeder] di Pulau Jawa yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek</p> <p>w. mengembangkan prasarana telekomunikasi berupa jaringan satelit yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek</p> <p>x. mendayagunakan sumber air pada WS Cidanau Ciujung Cidurian Clandane Ciliwung Citurum (Provinsi Banten Provinsi DKI Jakarta-Provinsi Jawa Barat) untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek</p> <p>y. mengondalikan pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah pada CAC Serang Cikeurug dan CAC Jakarta untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek</p> <p>z. mengorganiskan dan memelihara bondungan beserta waduknya (Waduk Juanda, Waduk Pongkor, dan Waduk Situ Kemang) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai perasuk air baku bagi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek</p> <p>aa. meningkatkan keterkaitan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek sebagai pusat pengembangan Kawasan Ancalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perlagangan, dan jasa, Kawasan Ancalan Bogor-Puncak Cibiru (Dopunir dan Sekumnyu) dengan sektor</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>unggulan pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan, serta Kawasan Ancalan Laut Pulau Scrub dengan sektor unggulan perikanan, pertanian, dan pariwisata</p> <p>bb. mengembangkan fungsi PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya mengarah ke arah vertikal</p> <p>cc. merevitalisasi PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional</p> <p>dd. merevitalisasi PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</p> <p>ee. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek</p> <p>ff. mencurahkan keteluhan mengenai pelatihan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek</p> <p>gg. menetapkan RDCR kota dan peraturan zonasi kota</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
II. II.1.	Provinsi Banten Serang	PKV	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Pariwisata - Pertanian - Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. mengendalikan perkembangan fisik PKV Serang untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan b. mengembang/meningkatkan fungsi PKV Serang sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan c. mengendalikan perkembangan PKV Serang melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup d. mengendalikan perkembangan PKV Serang di kawasan rawan bencana banjir, letusan gunung berapi, dan gempa bumi e. mengembang/meningkatkan fungsi PKV Serang sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan f. mengembang/meningkatkan fungsi PKV Serang melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan g. mengembang/meningkatkan fungsi PKV Serang sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pertemuan h. mengembang PKV Serang dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minum limbah

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>i. merencanakan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpulan) Pulau Jawa pada lintas Merak-Cilegon-Sarangreng-Jakarta yang menghubungkan PKN Serang dengan PKN Cilegon, PKW Rongkas Ninung, dan PKN Kawasan Perkotaan Jaldelabek</p> <p>ii. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahab, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Serang dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali pada jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Labuan Maringgai (Pulau Sumatera) ke Cilegon</p> <p>iii. Cikaade untuk meningkatkan pelayanan wilayah atangan distribusi PKN Serang</p> <p>iv. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahab, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Serang dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa Bali pada jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Serang-Cikarpekdandun untuk meningkatkan pelayanan wilayah atangan distribusi PKN Serang</p> <p>v. merhabilitasi atangan transmisi tenaga listrik pada Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa yang melayani PKN Serang</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>m. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi prasarana telekomunikasi berupa jaringan terrestrial yang meliputi Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa dan jaringan pelayanan pengumpan (<i>feeder</i>) di Pulau Jawa yang melayani PKN Serang</p> <p>n. mengembangkan prasarana telekomunikasi berupa jaringan satelit yang melayani PKN Serang</p> <p>o. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Cidahu Ciurung Cidurian Ciasadane Ciliwung Citarum untuk melayani PKN Serang</p> <p>p. meningkatkan kelerakitan PKN Serang dengan Kawasan Andalan Bojonegara-Mezak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan</p> <p>q. mengembangkan fungsi PKV Serang sebagai pusat pertumbuhan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang mendorong pengembangan ruangannya ke arah vertikal</p> <p>r. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Serang sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</p> <p>s. menciptakan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN Serang</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.	Cilegon	PKN	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Pariwisata - Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> c. menetapkan kerennuan mengenai pelayanan pemerintahan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Serang u. menerapkan RDR kota dan perumahan zonaal kota a. mengundulikan perkembangan fisik PKN Cilegon untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan b. mengandalikan perkembangan PKN Cilegon melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hilir c. mengundulikan perkembangan PKN Cilegon di kawasan rawan bencana gelombang pasang, gempa bumi, tsunami, dan abrasi d. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cilegon sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cilegon melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cilegon sebagai pusat pariwisata bahari g. mengembangkan PKN Cilegon dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>h. merencanakan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Cilegon dengan Pelabuhan Merak dan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKN Cilegon dengan Pelabuhan Djoenegara</p> <p>i. merencanakan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpul) Pulau Jawa pada lintas Merak Cilegon Serang-Kangkas Biring Jakarta yang menghubungkan PKN Cilegon dengan PKN Serang, PKW Rangkas Bitung, dan PKN Kawasan Pertinaan Jabodetabek</p> <p>j. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpul) Pulau Jawa pada lintas Cilegon Djoenegara yang menghubungkan PKN Cilegon dengan Pelabuhan Bocongara</p> <p>k. mengembangkan prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Cilegon berupa Pelabuhan Djoenegara dan Pelabuhan Merak</p> <p>l. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Cilegon dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali pada jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Labuan Maringgai (Pulau Sumatera) Bocongara Cilegon Anyer-Cikande untuk meningkatkan pelayanan wilayah arungan distribusi PKN Cilegon</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>m. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Cillegon dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali pada jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Serang-Cillegon Cikampek-Bandung untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKN Cillegon</p> <p>n. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik pada Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa yang melayani PKN Cillegon</p> <p>o. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi prasarana telekomunikasi berupa jaringan terestrial yang meliputi Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa yang melayani PKN Cillegon</p> <p>p. mengembangkan prasarana telekomunikasi berupa jaringan serat optik yang melayani PKN Cillegon</p> <p>q. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Cidanau Ciujung, Cidurian Ciasadane Cihwang Citarum untuk melayani PKN Cillegon</p> <p>r. meningkatkan keterkaitan PKN Cillegon dengan Kawasan Andalan Bo'onegara Merak Cillegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan,</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.3.	Pandeglang	PKW	- Pertanian	<p>serta Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata</p> <p>mengembangkan fungsi PKW Cilegon sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya ke arah vertikal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Cilegon sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional u. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Cilegon sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional v. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Cilegon w. menetapkan ketentuan mengenai pelanggaran pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsinya PKW Cilegon x. menetapkan RDBR kota dan peraturan zonasi kota
				<ul style="list-style-type: none"> a. mengudatikan perkembangan fisik PKW Pandeglang untuk menjaga ketahanan lahan pertanian tanaman pangan

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>b. mendorong pengembangan PKW Pandeglang melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p> <p>c. mengembangkan PKW Pandeglang sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan</p> <p>d. mengendalikn perkembangan PKW Pandeglang di kawasan rawan bencana banjir, letusan gunung berapi, dan gempa bumi</p> <p>e. mengembangkan PKW Pandeglang dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan limbah</p> <p>f. mengamankan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (perumahan) Pulau Jawa pada lintas Labuan Pandeglang-Kangkas Bitung yang menghubungkan PKW Pandeglang dengan PKW Kangkas Bitung</p> <p>g. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa</p> <p>h. Tali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKW Pandeglang</p> <p>i. mengembangkan jaringan resesrial pada jaringan pelayanan pengurupan (feeder) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Serang-PKW Pandeglang-PKW Rangkas Dimuang-PKW Sukabungri</p> <p>j. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Pandeglang</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>j. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS linras provinsi pada WS Cilacap-Ciurung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum untuk melayani PKW Pandeglang</p> <p>k. meningkatkan keterkaitan PKW Pandeglang dengan Kawasan Andalan Banyuwangi-Murak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan</p> <p>l. mengembangkan fungsi PKW Pandeglang sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horisontal/dikendalikan</p> <p>m. mendorong perkembangan fungsi PKW Pandeglang sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>n. mendorong pengembangan fungsi atau potensi PKW Pandeglang sebagai air-pul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>o. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Pandeglang sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>p. memperbaiki intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Pandeglang</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.6.	Rangkas Bitung	PKW	- Pertanian	<p>a. menetapkan kerennuan mengenai pelayanan pemerintahan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Pandeglang</p>
				<p>a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Rangkas Bitung untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. mengendalikan perkembangan fisik PKW Rangkas Bitung untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>c. mendorong pengembangan PKW Rangkas Bitung melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p> <p>d. mengembangkan PKW Rangkas Bitung dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah</p> <p>e. mempertahankan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpang) Pulau Jawa pada lintas Merak-Ciklegon-Sorang-Rangkas Bitung Jakarta dan Labuan Pandeglang Rangkas Bitung yang melayani PKW Rangkas Bitung</p> <p>f. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKW Rangkas Bitung</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>g. mengembangkan jaringan retail pada jaringan pelayanan pengumpulan (feeder) di Pulau Jawa yang mencakup lingkup PKN Serang PKW Pandeglang PKW Rangkas Bitung PKW Sukabumi</p> <p>h. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Rangkas Bitung.</p> <p>i. memanfaatkan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Cidurian Ciyung Cidurian Cisadane Ciliwung Citarum untuk melayani PKW Rangkas Bitung</p> <p>j. meningkatkan keterkaitan PKW Rangkas Bitung dengan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan</p> <p>k. mengembangkan fungsi PKW Rangkas Bitung sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal/dikendalikan</p> <p>l. mendorong pengembangan fungsi PKW Rangkas Bitung sebagai pusat pertumbuhan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>m. mendorong pengembangan fungsi atau potensi PKW Rangkas Bitung sebagai suripul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>n. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Rangka Biting sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>o. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Rangka Biting</p> <p>p. menetapkan ketentuan mengenai pelayanan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Rangka Biting</p>
III.	Provinsi Jawa Barat			
III.1.	Kawasan Perkotaan Bandung Raya	PKV	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Pertanian - Perikanan - Perdagangan dan Jasa 	<p>a. mengendalikn perkembangan fisik PKV Kawasan Perkotaan Bandung Raya untuk menjaga ketubuhan lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. merevitalisasi PKM Kawasan Perkotaan Bandung Raya melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa basis pertanian tanaman pangan</p> <p>c. mengendalikn perkembangan PKV Kawasan Perkotaan Bandung Raya melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>d. mengendalikn perkembangan PKV Kawasan Perkotaan Bandung Raya yang berdekatan dengan kawasan hijau</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>e. mengendalikan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya di kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan gerakan tanah</p> <p>f. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Dandung Raya sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>g. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan</p> <p>h. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>i. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran</p> <p>j. meningkatkan kerjasama antara PKN sebagai pusat pariwisata di Pulau Jawa Bali dalam kesatuan tujuan pariwisata di PKN Kawasan Perkotaan Dandung Raya</p> <p>k. mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>i. merencanakan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa dan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya</p> <p>ii. merencanakan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan Bandar Udara Husein Sastranegara</p> <p>iii. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta Cikampek Purwakarta Bandung Tasikmalaya-Banjir-Kroya-Kebumeh-Kutoarjo-Yogyakarta-Klaten-Surakarta Medium Kerjasama Jurbang Surabaya yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya</p> <p>o. merencanakan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Bogor Sukabumi Cianjur Padalarang yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya</p> <p>p. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Kiaracondong Rancaekek Tanjungasari-Kertajati-Kadipaten yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan ruwan hiranu</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>q. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien</p> <p>r. mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Serang Cilgoni Cibantepet Bandung untuk pelayanan wilayah jaringan distribusi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya</p> <p>s. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali pada Jaringan Transmisi Pantar Selatan Jawa yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya</p> <p>t. mengidentifikasi perkembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan pemukiman tingkat kepadatan tinggi di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya</p> <p>u. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan reclearing pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya PKW Kadipaten-PKN Cirebon-PKW Purwokerto-PKW Wonosobo-PKW Magelang PKW Sleman PKN Yogyakarta PKW Klaten PKN Surakarta-PKW Madun-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>v. mengembangkan jaringan <i>recrearial</i> pada jaringan pelayanan pengumpan (<i> feeder</i>) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya PKW Casikmalaya PKW Pangandaran</p> <p>w. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya</p> <p>x. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Cidanau-Ciujung-Ciurisan-Cisadane-Ciliwung-Citarum untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya</p> <p>y. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Waduk Cikeunca, Waduk Cipanurang, Waduk Saguling, Waduk Situ Ciburuy, Waduk Situ Gede, dan Waduk Situ Lembang) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya</p> <p>z. meningkatkan keterkaitan PKV Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan Kawasan Andalan Celingan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.	Cirebon	PKN	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Industri - Perikanan - Perambangan - Perdagangan 	<p>aa. mengembangkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya tuangnya ke arah vertikal</p> <p>bb. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai simpul utama kegiatan ekspor impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional</p> <p>cc. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</p> <p>dd. memperbaiki intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya</p> <p>ee. menciptakan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya</p> <p>ff. menetapkan RDK kota dan peraturan zonasi kota</p>
			<ul style="list-style-type: none"> a. Perdagangan b. Industri c. Perikanan d. Perambangan e. Perdagangan 	<p>a. mengendalikan perkembangan fisik PKN Cirebon untuk menjaga kearahannya pemanfaatan lahan pertanian pangan</p> <p>b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cirebon melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian taunaman pangan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN dan Jasa	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>c. mengendalikan perkembangan PKV Cirebon melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan dayaampung lingkungan hidup</p> <p>d. mengendalikan perkembangan PKV Cirebon di kawasan rawan bencana selombang pasang, lajur, dan abrasi di sepanjang wilayah pesisir</p> <p>e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKV Cirebon sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKV Cirebon melalui peningkatan fungsi industri pengolahan hasil pertanian, ikan, kayuak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</p> <p>g. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKV Cirebon melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa baik perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>h. mengembangkan PKV Cirebon dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan limbah</p> <p>i. merencanakan jaringan arteri primer yang menghubungkan PKV Cirebon dengan Pelabuhan Ajuna (Cirebon), dan Bandara Udara Cakrabuwana</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>f. merencanakan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Jatibarang-Cirebon-Legal-Pekalongan Semarang Kudus Rembang Bojonegara Surabaya yang melayani PKV Cirebon</p> <p>g. merencanakan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa pada lintas Cirebon Prupuk Purwokerto Kroya dan Kadipaten Cirebon yang melayani PKN Cirebon</p> <p>h. merencanakan Pelabuhan Agung (Cirebon) sebagai pelabuhan utama yang merupakan bagian dari pasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Cirebon</p> <p>i. merencanakan dan mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Jatibarang-Cirebon, Jatibarang-Palimanan, dan Cirebon Muara Bekasi untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKN Cirebon</p> <p>j. merencanakan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Kadipaten Cirebon dan Semarang Cirebon untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKN Cirebon</p> <p>k. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa dan Jaringan Transmisi Pengumpan Selatan-Utara Jawa yang melayani PKN Cirebon</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>p. mengendalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan permukiman tingkat kepadatan tinggi di PKN Cirebon</p> <p>q. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan distribusi pada Jaringan Pelayanan Pusat Perumahan di Pantaj Utara Jawa yang menghubungkan PKN Cilegon PKN Serang PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKW Cikampek-Cikopo-PKW Indramayu PKN Cirebon PKW Legat PKW Pekalongan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepuh-PKW Kudus-PKW Tuban-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila PKW Probolinggo PKW Banyuwangi serta pada Jaringan Pelayanan Pusat Perumahan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jember PKN Kawasan Perkotaan Nandung Raya PKW Kadipaten PKN Cirebon PKW Purwokerto PKW Wonosobo-PKW Magelang-PKW Sleman-PKN Yogyakarta-PKW Klaten PKN Surakarta PKW Madiun PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>r. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Cirebon</p> <p>s. mendayagunakan sumber air bebas pada WS strategis nasional pada WS Curanuk-Cisanggarung (Provinsi Jawa Barat- Provinsi Jawa Tengah yang melayani PKN Cirebon</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>r. mengembangkan dan memelihara hubungan besera waduhinya (Waduk Cipancuh, Waduk Daura, Waduk Situ Anggrahan, Waduk Situ Tolang, Waduk Situ Parok, Waduk Situ Ranco Deureum, dan Waduk Situ Sadang) untuk mempertahankan dayaampung air sehingga berfungsi sebagai pemasuk air baku bagi PKN Cirebon</p> <p>u. meningkatkan keterkaitan PKN Cirebon dengan Kawasan Andalan Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Clay-umaja Kuning) dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan</p> <p>v. mengembangkan fungsi PKN Cirebon sebagai pusat perukiman dengan tingkat utilisasi pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kondiderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal</p> <p>w. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cirebon sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional</p> <p>x. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cirebon sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</p> <p>y. menciptakan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN Cirebon</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.	Sukabumi	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Perkebunan - Industri 	<p>z. menerapkan ketentuan mengenai pelanggaran pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Cirebon</p> <p>aa. menerapkan RDR kota dan perumahan zonasi kota</p>
				<p>a. mengondalikan perkembangan fisik PKW Sukabumi untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Sukabumi melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p> <p>c. mengondalikan perkembangan PKW Sukabumi melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>d. mengondalikan perkembangan PKW Sukabumi di kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan gerakan tanah</p> <p>e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Sukabumi melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang berbidai tambah tinggi dan ramah lingkungan</p> <p>f. mengembangkan PKW Sukabumi dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minum limbah</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>a. merencanakan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpang) Pulau Jawa pada lintas Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang yang melayani PKW Sukabumi</p> <p>b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKW Sukabumi</p> <p>c. mengembangkan jaringan televisual pada jaringan pelayanan pengurupan (feeder) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Serang PKW Pandeglang PKW Mangrove Binung PKW Sukabumi</p> <p>d. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Sukabumi</p> <p>e. meningkatkan keterkaitan PKW Sukabumi dengan Kawasan Adirlan Sukabumi dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertanian, pariwisata, dan perkebunan</p> <p>f. mengembangkan fungsi PKW Sukabumi sebagai pusat perumukiman dengan tingkat kualitas pemanfaatan ruang menengah yang kerendahan pengembangan ruangnya ke arah horizontal diperhaluskan</p> <p>g. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Sukabumi sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>n. mengembangkan/meningkatkan fungsi orang perorangan PKW Sukabumi sebagai suripul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>o. mengembangkan fungsi orang perorangan PKW Sukabumi sebagai suripul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>p. menetapkan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Sukabumi</p> <p>q. menerapkan ketentuan mengenai peraturan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Sukabumi</p>
III.4.	Cikampek-Cikopo	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Industri - Pariwisata - Perikanan 	<p>a. mengondisikan perkembangan fisik PKW Cikampek-Cikopo untuk menyerap kebutuhan lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Cikampek-Cikopo melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p> <p>c. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Cikampek-Cikopo sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan</p> <p>d. mengondisikan perkembangan PKW Cikampek-Cikopo melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Cikampek Cikopo sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Cikampek Cikopo melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian yang ramah lingkungan</p> <p>g. mengembangkan PKW Cikampek Cikopo dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah</p> <p>h. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional dan jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan PKW Cikampek-Cikopo dengan Pelabuhan Cilamaya</p> <p>i. memantapkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Jatibarang-Cirebon-Tegal-Pekalongan Semarang Kudus Rembang Bojonegara Surabaya yang melayani PKW Cikampek Cikopo</p> <p>j. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek Purwokerto-Bandung Tasikmalaya Banjar Kroya Kebunren Kutoarjo Yogyakarta-Klaten-Surakarta-Madiun-Kertosono-Jombang-Surabaya dan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpang) Pulau Jawa pada lintas Cikampek-Pelabuhan Cilamaya yang melayani PKW Cikampek Cikopo</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>k. mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Serang-Cilegon-Cikampek-Bandung untuk pelayanan wilayah jaringan distribusi PKW Cikampek Cikoppo</p> <p>l. memanfaatkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Cilamaya-Cede Cede dan Subang-Cikampek untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKW Cikampek Cikoppo</p> <p>m. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali pada Jaringan Transmisi Pantau Utara Jawa yang melayani PKW Cikampek-Cikoppo</p> <p>n. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan transmisi pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional yang meliputi PKW Cilegon PKW Serang PKW Kawasan Perkotaan Jabodetabek PKW Cikampek Cikoppo PKW Indramayu PKW Cirebon-PKW Tegal-PKW Pekalongan-PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur PKW Kudus PKW Tuban PKW Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila PKW Probolinggo PKW Banyuwangi</p> <p>o. mengembangkan jaringan satele untuk melayani PKW Cikampek Cikoppo</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>p. menyediakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Cilacap-Ciurug-Cidurian-Cisadane-Cililung-Citarum (Provinsi Banten Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat) untuk melayani PKW Cikampek Cikopo</p> <p>q. meningkatkan keterkaitan PKW Cikampek-Cikopo dengan Kawasan Andalan Purwakarna, Subang, Karawang (Purwasuka) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan</p> <p>r. mengembangkan fungsi PKW Cikampek Cikopo sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang memerlukan pengendalian ruang ke arah horizontal dikendalikan</p> <p>s. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Cikampek-Cikopo sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>t. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Cikampek Cikopo sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>u. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Cikampek-Cikopo sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.	Palabuharatu	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan - Pariwisata - Industri 	<ul style="list-style-type: none"> u. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Cikampek-Cikopo v. menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsinya PKW Cikampek-Cikopo
				<ul style="list-style-type: none"> a. mengudalikan perkembangan PKW Palabuharatu yang berdekatan dengan kawasan lindung b. mengendalikn perkembangan PKW Palabuharatu di kawasan rawan tsunami c. mengembangkan baru PKW Palabuharatu melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan d. mengembangkan baru PKW Palabuharatu sebagai pusat pariwisata bahari dan ekowisata e. mengembangkan PKW Palabuharatu dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahat, dan minim limbah f. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Rali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKW Palabuharatu g. mengembangkan jaringan saati untuk melayani PKW Palabuharatu

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>h. meningkatkan keterkaitan PKW Palabuhanratu dengan Kawasan Adalain Sukabumi dan Suktanya dengan sektor unggulan perikanan, pertanian, pariwisata, dan perkebunan</p> <p>i. mengembangkan fungsi PKW Palabuhanratu sebagai pusat pertumbuhan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horisontal ditendahkan</p> <p>j. mengembangkan baru fungsi PKW Palabuhanratu sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>k. mengembangkan baru fungsi atau jenis PKW Palabuhanratu sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>l. mengembangkan fungsi area perensi PKW Palabuhanratu sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>m. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Palabuhanratu</p> <p>n. menetapkan ketentuan mengenai pelatihan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsinya PKW Palabuhanratu</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.6.	Indramayu	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Industri - Perikanan - Pertambangan 	<p>a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Indramayu untuk irigasi kebun lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Indramayu melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p> <p>c. mengembangkan PKW Indramayu sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan</p> <p>d. mengendalikan perkembangan PKW Indramayu di kawasan rawan bencana gelombang pasang, banjir, dan abrasi di sepanjang wilayah pesisir</p> <p>e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Indramayu melalui peningkatan fungsi industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri rumah</p> <p>f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Indramayu melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>g. mengembangkan PKW Indramayu dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah</p> <p>h. menciptakan angkutan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpang) Pulau Jawa pada lintas Indramayu-Jatibarang yang melayani PKW Indramayu</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>i. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantar Utara Jawa yang melayani PKW Indramayu</p> <p>ii. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan transmisi pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional yang meliputi PKN Cillegon PKN Serang PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKW Cikampek-Cikopo-PKW Indramayu-PKN Cirebon PKW Tegay PKW Pekalongan PKN Kawasan Perkotaan Kochungsipur-PKW Kudus-PKW Tuban-PKN Kawasan Perkotaan GerbangKertosusila PKW Probolinggo PKW Banyuwangi</p> <p>k. mengembangkan jaringan sateelit untuk melayani PKW Indramayu</p> <p>l. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS strategi nasional pada WS Cimamuk Cisanggrung (Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Indramayu</p> <p>m. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Waduk Cipancub, Waduk Darma, Waduk Situ Anggrahan, Waduk Situ Dolang, Waduk Situ Patok, Waduk Situ Ranca Beureum, dan Waduk Situ Sedong) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKW Indramayu</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>n. meningkatkan kerekatan PKW Indramayu dengan Kawasan Andalas Ciayurata kuning dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan</p> <p>o. mengembangkan fungsi PKW Indramayu sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horisontal diterdulikan</p> <p>p. mengembangkan/meningkalkan fungsi PKW Indramayu sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>q. mengembangkan/meningkalkan fungsi atau potensi PKW Indramayu sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>r. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Indramayu sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>s. membalas intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Indramayu</p> <p>t. menetapkan ketentuan mengenai pelayanan pemanfaatan ruang yang menyebabkan kemampuan terhadap berfungsinya PKW Indramayu</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.7.	Kadipaten	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Industri - Perikanan 	<p>a. mengendalikn perkembangan PKW Kadipaten melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>b. mengembangkan PKW Kadipaten dengan konsep kaku hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minum limbah</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKW Kadipaten dengan Bandar Udara Kertajati (Majalengka)</p> <p>d. memanfaatkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpul) Pulau Jawa pada lintas Kadipaten Cirebon yang melayani PKW Kadipaten</p> <p>e. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpul) Pulau Jawa pada lintas Kiaracandung Rancakkek Tanjungati Kertajati Kadipaten yang melayani PKW Kadipaten dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>f. memanfaatkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Kadipaten-Cirebon untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKW Kadipaten</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>g. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali pada Jaringan Transmisi Pengumpan Selaran Utara Jawa yang melayani PKW Kadipaten</p> <p>h. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan transmisi pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek PKW Kawasan Perkotaan Bandung Raya PKW Kadipaten-PKN Cirebon-PKW Purwokerto-PKW Wonosobo-PKW Magelang-PKW Sleman-PKN Yogyakarta-PKW KlATEN-PKN Surakarta PKW Madun PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>i. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Kadipaten</p> <p>j. mandayagunakan sumber air herbasis pada WS linras provinsi pada WS Citanduy (Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Kadipaten</p> <p>kc. meningkatkan keterkaitan PKW Kadipaten dengan Kawasan Andalan Ciayuruga Kuning dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.8.	Tasikmalaya	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Industri - Perkeluarga 	<ul style="list-style-type: none"> l. mengembangkan fungsi PKW Kadipaten sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal/dikendalikan m. mengembangkan baru fungsi PKW Kadipaten sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah n. menyertakan baru fungsi atau potensi PKW Kadipaten sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi o. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Kadipaten sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten p. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Kadipaten q. menerapkan ketentuan mengenai pelanggaran pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Kadipaten
	Tasikmalaya	PKW	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertanian b. Industri c. Perkeluarga 	<ul style="list-style-type: none"> a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Tasikmalaya untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tasikmalaya melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>c. mengendalikan perkembangan PKW Tasikmalaya melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>d. mengundalkan perkembangan PKW Tasikmalaya di kawasan rawan bencana tanah longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan gerakan tanah</p> <p>e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tasikmalaya sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tasikmalaya melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan</p> <p>g. mengembangkan PKW Tasikmalaya dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah</p> <p>h. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek Purwokarta Bandung-Tasikmalaya-Banjarnegara-Kroya-Kebunren-Kutoarjo-Yogyakarta Klaten Surakarta Magelang Kertosono Jombang Surabaya yang melayani PKW Tasikmalaya</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>i. merencanakan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpulan) Pulau Jawa pada lintas Galunggung-Tasikmalaya yang melayani PKW Tasikmalaya</p> <p>ii. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantul Selatan Jawa yang melayani PKW Tasikmalaya</p> <p>iii. mengembangkan arangan telearteri pada jaringan pelayanan pengumpulan (feeder) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya-PKW Tasikmalaya-PKW Pangandaran</p> <p>iv. mengembangkan jaringan seleh untuk melayani PKW Tasikmalaya</p> <p>v. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Citanduy (Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Tasikmalaya</p> <p>vi. Andalan Pelangan Timur Pangandaran dengan kawasan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan</p> <p>vii. mengembangkan lokasi PKW Tasikmalaya sebagai pusat perumukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kondusif untuk pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikembangkan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>p. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tasikmalaya sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>q. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Tasikmalaya sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>r. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Tasikmalaya sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>s. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Tasikmalaya</p> <p>t. menertipkan kelenturan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Tasikmalaya</p>
III.9.	Pangandaran	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Pariwisata - Perikanan 	<p>a. mengondalikan perkembangan PKW Pangandaran yang berdekatan dengan kawasan lindung</p> <p>b. mengondalikan perkembangan PKW Pangandaran di kawasan rawan bencana tsunami dan abrasi di sepanjang wilayah pesisir</p> <p>c. mengembangkan baru PKW Pangandaran melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>d. mengembangkan baru PKW Pangandaran sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, babari, serta ekowisata</p> <p>a. mengembangkan PKW Pangandaran dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahat, dan minim limbah</p> <p>f. memanfaatkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpang) Pulau Jawa pada lintas Cijulang Pangandaran Banjar yang melayani PKW Pangandaran</p> <p>g. merehabilitasi saluran transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantar Selatan Jawa yang melayani PKW Pangandaran</p> <p>h. mengembangkan jaringan teestrial pada jaringan pelayanan pengumpan (feeder) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya-PKW Tasikmalaya-PKW Pangandaran</p> <p>l. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Pangandaran</p> <p>3. meningkatkan keterkaitan PKW Pangandaran dengan Kawasan Andalan Priangan Turur-Pangandaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>k. mengembangkan fungsi PKW Pangandaran sebagai pusat perumukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kerendahan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan</p> <p>l. mengembangkan baru fungsi PKW Pangandaran sebagai pusat perumukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>m. mengembangkan baru fungsi dan potensi PKW Pangandaran sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>n. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Pangandaran sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>o. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Pangandaran</p> <p>p. menetapkan kerennan mengenai pelayanan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Pangandaran</p>
IV.1	Provinsi Jawa Tengah Surakarta	PKN	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Pariwisata - Perdagangan dan Jasa 	<p>h. mengendalikan perkembangan PKN Surakarta melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Surakarta sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>c. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Surakarta sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berakala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya raih pang lingkungan hidup</p> <p>d. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Surakarta sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perijanaan insentif, konferensi, dan pameran</p> <p>e. meningkatkan keterkaitan antar-PKN sebagai pusat pariwisata di Pulau Jawa-Bali dalam kesatuan tujuan pariwisata di PKN Yogyakarta-JKN Surakarta</p> <p>f. mengembangkan PKN Surakarta dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah</p> <p>g. merencanakan Jaringan Jalan Lintas 'ongah Pulau Jawa yang terpadu dengan jaringan Jalu kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta PKN Surakarta</p> <p>h. merencanakan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Surakarta dengan Bandara Udanu Adi Sunaruo</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>i. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Linraa Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Purwakarta-Bandung-Caikmalaya-Banyar Kroya Kebumen-Kutoarjo-Yogyakarta-Klaten-Surakarta-Madiun-Kertosono-Jombang-Surabaya yang melayani PKN Surakarta</p> <p>ii. memanfaatkan pemanfaatan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpulan) Pulau Jawa pada lintas Wokoogiri-Surakarta dan Garbringan-Surakarta yang melayani PKN Surakarta</p> <p>iii. mengembangkan dan memanfaatkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta PKN Surakarta untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien</p> <p>iv. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Tali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa dan Jaringan Transmisi Pengumpulan Selatan-Ubara Jawa yang melayani PKN Surakarta</p> <p>v. mengendalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan pemukiman tingkat kepadatan tinggi di PKN Surakarta</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>n. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jember-Blitar-PKN Kawasan Perkotaan Dandong Raya PKW Kediri-PKN Cirebon-PKW Purwokerto-PKW Wonosobo-PKW Magelang-PKW Sleman-PKN Yogyakarta PKW Klaten PKN Surakarta PKW Madura PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>o. mengembangkan jaringan terestrial pada jaringan pelayanan pengumpan (feeder) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Surakarta-PKW Paciran</p> <p>p. mengembangkan jaringan untuk melayani PKN Surakarta</p> <p>q. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKN Surakarta</p> <p>r. meningkatkan keterkaitan PKN Surakarta dengan Kawasan Andalan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten (Subsistem Wonsanatan) dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian</p> <p>s. mengembangkan fungsi PKN Surakarta sebagai pusat perumukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.2.	Kawasan Perkotaan Kendal- Demak Ungaran Semarang- Purwodadi (Kedungsepur)	PKN	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Industri - Pariwisata - Perikanan - Perdagangan dan Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> r. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Surakarta sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu ecibaang menuju kawasan internasional u. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Surakarta sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional v. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengesampingkan fungsi PKN Surakarta w. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Surakarta x. menetapkan RDK kota dan peraturan zonasi kota
			<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Industri - Pariwisata - Perikanan - Perdagangan dan Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> a. mengendalikan perkembangan fisik PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur untuk menjaga ketubuhan lahan pertanian tanaman pangan b. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan c. mengendalikan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>d. mengendalikan perkembangan PKV Kawasan Perkotaan Kedungsepur di kawasan rawan bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, gerakan tanah, dan abrasi di sepanjang wilayah pesisir</p> <p>e. merevitalisasi PKV Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>f. merevitalisasi PKV Kawasan Perkotaan Kedungsepur melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>g. merevitalisasi PKV Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>h. merevitalisasi PKV Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, olahraga, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perijinan insentif, konferensi, dan pameran</p> <p>i. mengembangkan PKV Kawasan Perkotaan Kedungsepur dengan konsep kota hijau yang bernilai energi, air, lahan, dan limbah</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>f. merencanakan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa dan jaringan jalan pengurupan Pulau Jawa yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur</p> <p>g. merencanakan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dengan Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani</p> <p>h. merencanakan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa pada Lintas Jakarta Cikampek Jember Cirebon Tegal Pekalongan-Semarang-Kudus-Kembang-Bojonegoro-Surabaya yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur</p> <p>i. mengembangkan dan merencanakan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara masal, cepat, aman, dan efisien</p> <p>j. mengembangkan jaringan jalur kereta api cepat antar kota yang menghubungkan Jakarta Semarang Surabaya untuk meningkatkan keterkaitan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dengan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dan PKN Kawasan Perkotaan Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Cibangkitosusila) serta meningkatkan daya tarik perkotaan Pulau Jawa</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>a. merencanakan pelaksanaan penyeberangan di Kabupaten Kendal dan Kota Semarang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKK Kawasan Perkotaan Kedungsepur</p> <p>b. merencanakan lintas penyeberangan Kendal Kuntai (Pulau Kalimantan), Semarang Banjarmasin (Pulau Kalimantan), Semarang-Suripi (Pulau Kalimantan), serta Semarang-Pondianak (Pulau Kalimantan) yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKK Kawasan Perkotaan Kedungsepur</p> <p>c. merencanakan Pelabuhan Tanjung Emas untuk meningkatkan kegiatan ekspor impor yang mendukung perkembangan PKK Kawasan Perkotaan Kedungsepur</p> <p>d. merencanakan Pelabuhan Tanjung Emas yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKK Kawasan Perkotaan Kedungsepur</p> <p>e. merencanakan Bandara Udara Ahmad Yani yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan perkotaan Pulau Jawa yang menghubungkan Semarang</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>Ungaran, jaringan jalan bebas hambatan, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur</p> <p>t. memanfaatkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang Cirebon untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur</p> <p>u. mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang Gresik dan Kalimantan Timur Semarang untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur</p> <p>v. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Tali pada Jaringan Transmisi Pulau Utara Jawa dan Jaringan Transmisi Pengumpulan Selatan-Utara Jawa yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur</p> <p>w. mengendalikan perkembangan jaringan transmisi tenaga listrik hertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan permukiman tingkat kepadatan tinggi di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur</p> <p>x. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan transmisi pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pulau Utara Jawa untuk mengembangkan ancarpusat perkotaan nasional yang meliputi PKN Cillegon-PKN Serang-PKN kawasan Perkotaan Tubodelabek PKW Cikampek Cikopi PKW Indramayu PKN</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>Cirebon PKW Tegol PKW Pekalongan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur-PKW Kudus-PKW Tuban-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosuilo PKW Probolinggo PKW Banyuwangi</p> <p>y. mengembangkan jaringan terminal pada jaringan pelayanan pengumpulan (feedej) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur-PKN Yogyakarta</p> <p>z. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur</p> <p>aa. mengdayakan sumber air bebas pada WS strategis nasional pada WS Pemunseluna (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur</p> <p>bb. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Waduk Burak, Waduk Kalourbo, Waduk Kenteng, Waduk Nglungu, Waduk Ruwa Pening, Waduk Sanggeh, dan Waduk Simo) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur</p> <p>cc. meningkatkan ketersediaan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dengan Kawasan Andalan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi (Kedungsepur) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.3. Cilacap	PKN		<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Pariwisata - Pertambangan 	<p>serta Kawasan Andalan Karimun Jawa dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata</p> <p>dd. mengembangkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya ke arah vertikal</p> <p>ee. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu kerbang menuju kawasan internasional</p> <p>ff. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</p> <p>gg. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur</p> <p>hh. menetapkan ketentuan mengenai pelanggaran pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap bertungstinya PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur</p> <p>ii. menetapkan RDBR kota dan peraturan zonasi kota</p>
IV.3. Cilacap	PKN			<p>a. mengudatikan perkembangan fisik PKN Cilacap untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
		<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Perikanan 		<p>b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cilacap sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>c. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cilacap melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p> <p>d. mengendalikankan perkembangan PKN Cilacap melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>e. mengendalikankan perkembangan PKN Cilacap di kawasan rawan bencana banjir, gempa bumi, dan tsunami</p> <p>f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cilacap melalui peningkatan fungsi industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</p> <p>g. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cilacap melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>h. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cilacap sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>i. mengembangkan PKW Cilacap dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minum limbah</p> <p>ii. memanfaatkan jaringan energi primer yang menghubungkan PKN Cilacap dengan Pelabuhan Tanjung Inan</p> <p>iii. merencanakan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpul) Pulau Jawa pada lintas Cilacap Maca yang melayani PKN Cilacap</p> <p>iv. merencanakan Pelabuhan Tanjung Inan untuk meningkatkan kegiatan ekspor impor yang mendukung perkembangan PKN Cilacap</p> <p>v. rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa</p> <p>vi. Bali pada Jaringan Transmisi Pantar Selatan Jawa yang melayani PKN Cilacap</p> <p>vii. mengembangkan jaringan regional pada jaringan pelayanan pengumpulan (feeder) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Purwokerto-PKN Cilacap-PKW Kebumen</p> <p>viii. mengembangkan jaringan energi untuk melayani PKN Cilacap</p> <p>ix. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Cilanduy (Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKN Cilacap</p> <p>x. meningkatkan koneksi PKN Cilacap dengan kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap,</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>dan sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan pertanian serta Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan laut, pertambangan, dan pariwisata</p> <p>r. mengembangkan fungsi PKN Cilacap sebagai pusat pertumbuhan dengan lingkor intensifras pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya ruangnya ke arah vertikal</p> <p>s. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cilacap sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional</p> <p>t. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Cilacap sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</p> <p>u. membatasi intensifras pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN Cilacap</p> <p>v. menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Cilacap</p> <p>w. menetapkan RZ. K kota dan peraturan zonasi kota</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.1.	Troyolali	PKW	- Industri - Pertanian	<p>a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Troyolali untuk rencana kutuban lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. mendorong pengembangan PKW Troyolali melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p> <p>c. mengembangkan PKW Boyolali sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan</p> <p>d. mengendalikan perkembangan PKW Doyolali di kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor dan letusan gunung berapi</p> <p>e. mengembangkan PKW Troyolali dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan limbah limbah</p> <p>f. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Dali pada Jaringan Transmisi Pengumpulan Selaran Utara Jawa yang melayani PKW Troyolali</p> <p>g. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Boyolali</p> <p>h. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS linras provinsi pada WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Doyolali</p> <p>i. meningkatkan keterampilan PKW Boyolali dengan kawasan Andalan Subosuka-Wonosatan dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.5.	Klaren	PKW	- Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="560 304 657 1165">f. mengembangkan fungsi PKW Boyolali sebagai pusat perumukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kerendahan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan <li data-bbox="665 304 755 1165">k. mendorong pengembangan fungsi PKW Boyolali sebagai pusat perumukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah <li data-bbox="763 304 836 1165">l. mendorong pengembangan fungsi atau potensi PKW Boyolali sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi <li data-bbox="844 304 901 1165">m. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Boyolali sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten <li data-bbox="909 304 966 1165">n. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Boyolali <li data-bbox="974 304 1047 1165">o. menetapkan ketentuan mengenai pelayanan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Boyolali
IV.5.	Klaren	PKW	- Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1071 304 1128 1165">a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Klaren untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan <li data-bbox="1136 304 1169 1165">b. mengendalikan perkembangan PKW Klaren di kawasan rawan bencana letusan gunung berapi

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>c. mengembangkan PKW Klaten sebagai pusat pariwisata nagar budaya dan ilmu pengetahuan</p> <p>d. mengembangkan PKW Klaten dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah</p> <p>e. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta Gilibempok Purwokerto Bandung -askumalaya Banjar Kroya Kebumen Kutoarjo Yogyakarta-Klaten-Surakarta-Madiun-Kertosono-Jombang-Surabaya yang melayani PKW Klaten</p> <p>f. merchabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKW Klaten</p> <p>g. merchabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan teeristrial pada Jaringan Pelayanan Pusat. Peninghuan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkonton Jabodetabek-PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya-PKW Kodipaten PKN Cirahan PKW Purwokerto PKW Wonosobo PKW Magelang PKW Sleman PKN Yogyakarta PKW Klaten PKN Surakarta-PKW Madiun-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosuata</p> <p>h. mengombangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Klaten</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>i. mengdayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur-Provinsi Jawa Tengah; yang melayani PKW Klaten</p> <p>ii. meningkatkan keterampilan PKW Klaten dengan Kawasan Andalan Subosuka-Wunusralen dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian</p> <p>iii. mengembangkan fungsi PKW Klaten sebagai pusat pemukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan</p> <p>iv. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Klaten sebagai pusat pemukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>v. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Klaten sebagai air portal kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>vi. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Klaten sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>vii. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Klaten</p> <p>viii. menetapkan ketentuan mengenai pelayanan pemanfaatan ruang yang mencycabbkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Klaten</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.6.	Salatiga	PKW	- Industri	<p>a. mengendalikn perkembangan PKW Salatiga melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya rampung lingkungan hidup</p> <p>b. mengur-bangkan/meningkatkan fungsi PKW Salatiga sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>c. mengembangkann PKW Salatiga dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan limbah</p> <p>d. mengembangkann jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang Gresik dan Kalimantan Timur-Serang untuk meningkatkan pelayanan wilayah aringan distribusi PKW Salatiga</p> <p>e. mengembangkann jaringan anelit untuk melayani PKW Salatiga</p> <p>f. mandayagimalkann sumber air berbasis pada WS strategi nasional pada WS Jratunscluna (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Salatiga</p> <p>g. meningkatkan keterkaitan PKW Salatiga dengan Kawasan Andalan Kedungsepuh dengan sektor unggulan pertanian; industri, pariwisata, dan perikanan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.7.	Tegal	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Industri - Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> h. mengembangkan fungsi PKW Salatiga sebagai pusat perukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kerendahan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan i. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Salatiga sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah j. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Salatiga sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi k. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Salatiga sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten l. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Salatiga m. menetapkan kerennan mengenai pelayanan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Salatiga
IV.7.	Tegal	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Industri - Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Tegal untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tegal melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>c. mengembangkan PKW Tegal sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan</p> <p>d. mengendalikan perkembangan PKW Tegal melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>e. mengendalikan perkembangan PKW Tegal di kawasan rawan bencana gelombang pasang, banjir, letusan gunung berapi, dan abrasi di sepanjang wilayah pesisir</p> <p>f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tegal sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>g. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tegal melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian yang ramah lingkungan</p> <p>h. mengembangkan PKW Tegal dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan limbah</p> <p>i. memanfaatkan Jalur Kereta Api Lintas Uraa Pulau Jawa pada Lintas Jakarta Cikampek Jember Cirebon Tegal Pekalongan-Semarang-Kudus-Rembang-Bojonegara-Surabaya yang melayani PKW Tegal</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>j. merencanakan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpulan) Pulau Jawa pada lintas Tegal-Purwok yang melayani PKW Tegal</p> <p>k. merencanakan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang-Cirebon untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKW Tegal</p> <p>l. merehabilitasi anggaran transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa</p> <p>m. Dali pada Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa yang melayani PKW Tegal</p> <p>n. mengorganiskan jaringan sadat untuk melayani PKW Tegal</p> <p>o. menduyakumkan sumber air berbasis pada WS strategis nasional pada WS Pemali-Corai (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Tegal</p> <p>p. mengorganiskan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Waduk Cacaban, Waduk Malahayu, dan Waduk Penjalin) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKW Tegal</p> <p>q. meningkatkan keterkaitan PKW Tegal dengan Kawasan Andalan Brebes-Slawi (Drevas), Jember sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan peternakan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.8.	Pekalongan	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Industri - Perikanan 	<p>q. mengembangkan fungsi PKW Tegal sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemantauan ruang terbuka yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan</p> <p>r. mengur-bangkan/meningkatkan fungsi PKW Tegal sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>s. menyebarkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Tegal sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>t. mengur-bangkan fungsi atau potensi PKW Tegal sebagai simpul transmigrasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>u. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Tegal</p> <p>v. menetapkan kerennuan mengenai pelayanan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Tegal</p> <p>a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Pekalongan untuk menjaga kearahannya lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. mengur-bangkan/meningkatkan fungsi PKW Pekalongan sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya sang dan raurab lingkungan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>c. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Pekalongan melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p> <p>d. mengendalikan perkembangan PKW Pekalongan melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>e. mengendalikn perkembangan PKW Pekalongan di kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor, gelombang pasang, banjir, dan abrasi di sepanjang wilayah pesisir</p> <p>f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Pekalongan melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian yang subur lingkungan</p> <p>g. mengembangkan PKW Pekalongan dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah</p> <p>h. memanfaatkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa pada lintas Jalara Cikampek-Jarharang Cirebon Tegal Pekalongan Semarang Kudus Rembang Bojonegoro Surabaya yang melayani PKW Pekalongan</p> <p>i. merencanakan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang-Cirebon untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKW Pekalongan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>j. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantar Utara Jawa yang melayani PKW Pekalongan</p> <p>k. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan transmisi pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional yang meliputi PKN Cillegon-PKN Serang-PKN Kawasan Perkotaan Jember-PKN Cikampek-Cikopo-PKW Indramayu-PKN Cirebon-PKW Tegay-PKW Pekalongan-PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur-PKW Kudus-PKW Tuban-PKN Kawasan Perkotaan GebangKeramasila PKW Probolinggo PKW Banyuwangi</p> <p>l. mengembangkan jaringan selulit untuk melayani PKW Pekalongan</p> <p>m. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS strategis nasional pada WS Pesisir-Corral (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Pekalongan</p> <p>n. meningkatkan keterampilan PKW Pekalongan dengan Kawasan Andalan Brebes dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.9.	Kudus	PKW	- Pertanian - Industri	<p>a. mengembangkan fungsi PKW Pekalongan sebagai pusat perumukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kerendahan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan</p> <p>b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Pekalongan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>c. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Pekalongan sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>d. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Pekalongan sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>e. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Pekalongan</p> <p>f. menetapkan kerennan mengenai pelayanan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Pekalongan</p>
IV.9.	Kudus	PKW	- Pertanian - Industri	<p>a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Kudus untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Kudus melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>c. mengembangkan PKW Kudus sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan</p> <p>d. mengendalikan perkembangan PKW Kudus melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>e. mengendalikan perkembangan PKW Kudus di kawasan rawan bencana banjir</p> <p>f. mengembangkan PKW Kudus dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan limbah</p> <p>g. merencanakan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Kumpang-Jember-Cirelum Tegul Pecalongan-Samarang-Kudus-Kembang-Bojonegoro-Surabaya yang melayani PKW Kudus</p> <p>h. merencanakan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpulan) Pulau Jawa pada lintas Cepu Blora Purwodadi Demak-Kudus-Juwana-Kembang yang melayani PKW Kudus</p> <p>i. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpulan) Pulau Jawa pada lintas Kudus Balcian yang melayani PKW Kudus dengan memperbaiki fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan ladang, dan kawasan rawan bencana</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>f. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pengumpulan Selatan-Utara Jawa yang melayani PKW Kudus</p> <p>g. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan transmisi pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pulau Utara Jawa untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional yang meliputi PKY Ciligon-PKN Serang-PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKW Cikampek-Cikopi-PKW Indramayu-PKN Cirebon-PKW Tegal-PKW Pekalongan-PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur-PKW Kudus-PKW Tuban-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosuilo PKW Probolinggo PKW Banyuwangi</p> <p>h. mengembangkan jaringan untuk melayani PKW Kudus</p> <p>i. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS strategi nasional pada WS Jatumseluna (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Kudus</p> <p>j. meningkatkan keterkaitan PKW Kudus dengan Kawasan Andalan Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Dluwu (Wanarakum) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, dan perikanan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.10. Cepu	PKW	- Pertambangan - Industri	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="565 1129 670 1159">o. mengembangkan fungsi PKW Kudus sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal ditetudalikan <li data-bbox="678 1129 768 1159">p. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Kudus sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah <li data-bbox="776 1129 833 1159">q. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Kudus sebagai simpul kegiatan kegiatan perdagangan provinsi <li data-bbox="841 1129 898 1159">r. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Kudus sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten <li data-bbox="906 1129 963 1159">s. memperbaiki intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Kudus <li data-bbox="971 1129 1044 1159">t. menetapkan ketentuan mengenai pelayanan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Kudus 	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1068 1129 1174 1159">a. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Cepu melalui peningkatan fungsi industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>b. mengembangkan PKW Cepu dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan limbah limbah</p> <p>c. menciptakan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpul) Pulau Jawa pada lintas Cepu-Blora-Purwodadi-Demak-Kudus-Juwana-Rembang yang melayani PKW Cepu</p> <p>d. mengembangkan arungan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpul) Pulau Jawa pada lintas Rembang-Dhura-Cepu yang melayani PKW Cepu dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang-Gresik dan Laut Jawa-Cepu untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKW Cepu</p> <p>f. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Dali pada Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa yang melayani PKW Cepu</p> <p>g. mengembangkan jaringan aralin untuk melayani PKW Cepu</p> <p>h. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Cepu</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>l. meningkatkan keterkaitan PKW Cepu dengan Kawasan Andalan Warkarekulti dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, dan perikanan</p> <p>j. mengembangkan fungsi PKW Cepu sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ruangnya ke arah horizontal dikendalikan</p> <p>k. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Cepu sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>l. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Cepu sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>m. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Cepu sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>n. memperbaiki intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Cepu</p> <p>o. menerapkan ketentuan mengenai pelatihan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Cepu</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.11.	Magelang	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Pariwisata - Industri 	<ul style="list-style-type: none"> a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Magelang untuk menjaga ketubuhan lahan pertanian tanaman pangan b. mengendalikan perkembangan PKW Magelang di kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor dan lerasan gunung berapi c. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Magelang sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan d. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Magelang sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, pelaksanaan insentif, konferensi, dan pameran e. mengembangkan PKW Magelang dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah f. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pungutpanti Pulau Jawa pada lintas Kodungjadi-Ambarawa-Magelang Yogyakarta yang melayani PKW Magelang dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan budung, dan kawasan rawan bencana g. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi arungan esesial pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p data-bbox="552 325 690 1102">Jabodetabek PKW Kawasan Perkotaan Tandung Raya PKW Kadipatan-PKN Cirebon-PKW Purwokerto-PKW Wonosobo-PKW Magelang PKW Sleman PKN Yogyakarta PKW Klaten PKN Surakarta PKW Madiun PKN Kawasan Perkotaan Garbangkerlusuda</p> <p data-bbox="690 325 812 1102">h. mengembangkan jaringan antar untuk melayani PKW Magelang</p> <p data-bbox="812 325 893 1102">i. mengdayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Progo-Opak-Serang (Provinsi DI Yogyakarta-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Magelang</p> <p data-bbox="893 325 966 1102">j. meningkatkan keterkaitan PKW Magelang dengan Kawasan Andalan Terabudur dan Sekitarnya dengan sektor angkutan pariwisata</p> <p data-bbox="966 325 1079 1102">k. mengembangkan fungsi PKW Magelang sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal/dikendalikan</p> <p data-bbox="1079 325 1161 1102">l. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Magelang sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p data-bbox="1161 325 1169 1102">m. mengembangkan/meningkatkan fungsi akan potensi PKW Magelang sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.12.	Wonosobo	PKW	- Industri - Perikanan	<p>n. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Magelang sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>o. membarasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Magelang</p> <p>p. menciptakan kelenturan kebijakan pelayanan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Magelang</p>
				<p>a. mengendalikn perkembangan fisik PKW Wonosobo untuk menjaga kebutuhan lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Wonosobo melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p> <p>c. mengembangkan PKW Wonosobo sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan</p> <p>d. mengendalikn perkembangan PKW Wonosobo di kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor dan letusan gunung berapi</p> <p>e. mengembangkan PKW Wonosobo dengan konsep kota hijau yang berat energi, air, lahan, dan minum limbah</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>f. merencanakan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (penuhmpat) Pulau Jawa pada lintas Wonosobo-Purwokerto yang melayani PKW Wonosobo</p> <p>g. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (penuhmpat) Pulau Jawa pada lintas Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta yang melayani PKW Wonosobo</p> <p>h. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi angkutan regional pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya-PKW Kudipaten PKN Giriluh PKW Purwokerto PKW Wonosobo PKW Magelang-PKW Sleman-PKN Yogyakarta-PKW Klaten-PKN Surakarta-PKW Madiun-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosuila</p> <p>i. mengembangkan jaringan arealitik untuk melayani PKW Wonosobo</p> <p>j. memanfaatkan sumber air berbasis pada WS strategis nasional pada WS Serayu Bogowonto (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Wonosobo</p> <p>k. meningkatkan keterkaitan PKW Wonosobo dengan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.13.	Kebumen	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Pertanian - Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> l. mengembangkan fungsi PKW Wonosobo sebagai pusat perukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kerendahan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan ii. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Wonosobo sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah iii. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Wonosobo sebagai simpul ke tua mendukung kegiatan perdagangan provinsi iv. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Wonosobo sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten v. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Wonosobo vi. menetapkan kerennan mengenai pelayanan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Wonosobo
IV.13.	Kebumen	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Pertanian - Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Kebumen untuk menjaga keucuhan lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Kebumen melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>c. mengembangkan PKW Kebumen sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan</p> <p>d. mengendalikn perkembangan PKW Kebumen di kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor, banjir, dan gempa bumi</p> <p>e. mengembangkan PKW Kebumen dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan limbah</p> <p>f. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek Purwokarta-Bandung-Asutmalaya-Banjar-Kroya-Kebumen-Kutoarjo-Yogyakarta Klanten Surakarta Madun Ketusono Jemberang</p> <p>g. Surabaya yang melayani PKW Kebumen</p> <p>h. meningkatkan jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa</p> <p>i. Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKW Kebumen</p> <p>h. mengembangkan jaringan terrestrial pada jaringan pelayanan penumpang (<i> feeder </i>) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Purwokerto PKW Cilacap PKW Kebumen</p> <p>l. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Kebumen</p> <p>m. mendayagunakan sumber air bebas pada WS strategis nasional pada WS Srayu-Bogowonto (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Kebumen</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>k. meningkatkan keterkaitan PKW Kebumen dengan Kawasan Aduklau Jawa Tengah Selatan dengan actor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan</p> <p>l. mengembangkan fungsi PKW Kebumen sebagai pusat pertumbuhan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horisontal ditendulikan</p> <p>m. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Kebumen sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>n. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Kebumen sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>o. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Kebumen sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>p. membalasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Kebumen</p> <p>q. menetapkan ketentuan mengenai pelayanan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Kebumen</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.14.	Purwokerto	PKW	- Industri	<p>a. mengendalikan perkembangan PKW Purwokerto di kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor dan banjir</p> <p>b. mengembangkan PKW Purwokerto dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah</p> <p>c. memanfaatkan jaringan jalur kereta api antarkota pada jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (penguripan) Pulau Jawa pada lintas Wonosobo Purwokerto yang melayani PKW Purwokerto</p> <p>d. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan vertikal pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Pekalongan, Tulungagung, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya PKW Kadipaten-PKN Cirebon-PKW Purwokerto-PKW Wonosobo-PKW Magelang-PKW Sleman-PKN Yogyakarta-PKW Klaten-PKN Surakarta PKW Modum PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosela</p> <p>e. mengembangkan jaringan regional pada jaringan pelayanan penguripan (<i>feeder</i>) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Purwokerto PKN Cilacap PKW Rejimen</p> <p>f. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Purwokerto</p> <p>g. mendayagunakan sumber air bebas pada WS strategis nasional pada WS Srayu-Bogowonto (Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Purwokerto</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>h. meningkatkan keterampilan PKW Purwokerto dengan Kawasan Amlalan Jawa Tengah Selatan dengan actor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan</p> <p>i. mengembangkan fungsi PKW Purwokerto sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horisontal ditendulikan</p> <p>j. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Purwokerto sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>k. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Purwokerto sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>l. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Purwokerto sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>m. menubalasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Purwokerto</p> <p>n. menetapkan ketentuan mengenai pelayanan pemanfaatan ruang yang menyebabkan kemampuan terhadap berfungsinya PKW Purwokerto</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	PKV	<ul style="list-style-type: none"> - Pariwisata - Industri - Perdagangan dan Jasa 	<ul style="list-style-type: none"> a. mengandalkan perkembangan PKN Yogyakarta melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup b. mengandalkan perkembangan PKN Yogyakarta di kawasan rawan bencana gunung berapi c. merevitalisasi PKN Yogyakarta sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan d. merevitalisasi PKN Yogyakarta sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup e. merevitalisasi PKN Yogyakarta sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran f. meningkatkan keterkaitan antar-PKN sebagai pusat pariwisata di Pulau Jawa-Dal dalam kesatuan tujuan pariwisata di PKN Yogyakarta PKN Surakarta g. mengembangkan PKN Yogyakarta dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah h. merencanakan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Pengumpan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>Selatan Pulau Jawa, serta Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKV Yogyakarta-PKN Surakarta</p> <p>i. menerapkan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Yogyakarta dengan Bandar Udara Adisutjipto</p> <p>j. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Purwakarta-Bandung Pasundan-Banjir Kroya Kebumen Kutoarjo Yogyakarta-Klaten-Surakarta-Madiun-Kertosono-Jombang-Surabaya yang melayani PKN Yogyakarta</p> <p>k. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpang) Pulau Jawa pada lintas Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta dan Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis yang melayani PKN Yogyakarta dengan memperhatikan fungsi kawasan perantara pangen berkelanjutan, kawasan lindung dan kawasan rawan bencana</p> <p>l. mengembangkan dan memanfaatkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>m. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantar Selatan Jawa yang melayani PKN Yogyakarta</p> <p>n. mengendalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan pemukiman di sekitar kepadatan tinggi di PKN Yogyakarta</p> <p>o. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan transmisi pada Jaringan Pelayanan Pusat Perumahan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKN Kawasan Perumahan Dandung Raya PKN Kadipaten PKN Cirebon PKN Purwokerto-PKN Wonosobo-PKN Magelang-PKN Sleman-PKN Yogyakarta-PKN Klaten-PKN Surakarta-PKN Madura-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>p. mengembangkan jaringan transmisi pada jaringan pelayanan pengurupan (feeder) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur PKN Yogyakarta</p> <p>q. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Yogyakarta</p> <p>r. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Progo-Opak-Sarang (Provinsi DI Yogyakarta-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKN Yogyakarta</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>s. meningkatkan keterkaitan PKN Yogyakarta dengan Kawasan Ancalan Yogyakarta dan sekitarnya dengan aktor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan pertambangan</p> <p>t. mengembangkan fungsi PKV Yogyakarta sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal</p> <p>u. merevitalisasi PKN Yogyakarta sebagai simpul utama kegiatan ekspor impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional</p> <p>v. merevitalisasi PKN Yogyakarta sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</p> <p>w. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN Yogyakarta</p> <p>x. menetapkan ketentuan mengenai pelanggaran pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsi PKN Yogyakarta</p> <p>y. menerapkan RDR kota dan peraturan zonasi kota</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.2.	Banjul	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Pariwisata - Pertanian - Industri - Perikanan 	<p>a. mengembangkan perkembangan fisik PKW Banjul untuk menjaga kestabilan lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Banjul melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p> <p>c. mengembangkan PKW Banjul sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan</p> <p>d. merehabilitasi PKW Banjul di kawasan rawan bencana gempa bumi dan banjir</p> <p>e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Banjul melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Banjul sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran</p> <p>g. mengembangkan PKW Banjul dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan limbah limbah</p> <p>h. mengembangkan arungan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpang) Pulau Jawa pada Lintas Boxobuchi-Yogyakarta-Panungtebis yang melayani PKW Banjul dengan tetap mempertahankan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>fungsi kawasan perranian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>i. rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantol Selatan Jawa yang melayani PKW Bantul</p> <p>ii. mengembangkan jaringan serat untuk melayani PKW Bantul</p> <p>iii. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Progo-Opak-Serang (Provinsi DI Yogyakarta-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Bantul</p> <p>l. meningkatkan keterkaitan PKW Bantul dengan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan unggul pariwisata, pertanian, industri, dan peternakan</p> <p>iii. mengembangkan fungsi PKW Bantul sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikedudalkan</p> <p>n. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Bantul sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>o. mengembangkan/meningkatkan fungsi area potensi PKW Bantul sebagai simpul kedua untukukung kegiatan perdagangan provinsi</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.3.	Sleman	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Pariwisata - Perikanan - Industri 	<p>p. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Bantul sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>q. membarasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Dantul</p> <p>r. menciptakan kelenturan terhadap pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsinya PKW Bantul</p>
				<p>a. mengendalikn perkembangan fisik PKW Sleman untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Sleman melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p> <p>c. mengendalikn perkembangan PKW Sleman di kawasan rawan bencana letusan gunung berapi</p> <p>d. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Sleman sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan</p> <p>e. mengembangkan PKW Sleman dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah</p> <p>f. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Tali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKW Sleman</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>g. meningkatkan dan meningkatkan fungsi jaringan regional pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jember-Bek PKW Kawasan Perkotaan Dandung Raya PKW Kadiporan PKW Cirebon-PKW Purwokerto-PKW Wonosobo-PKW Magelang-PKW Sleman-PKN Yogyakarta PKW Klaten PKN Surakarta PKW Madura PKW Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>h. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Sleman</p> <p>i. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Progo-Opak-Sarang (Provinsi DI Yogyakarta-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Sleman</p> <p>j. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Waduk Suro dan Waduk Tombak Boyo) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air bagi PKW Sleman</p> <p>k. meningkatkan keterkaitan PKW Sleman dengan kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan aktor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan</p> <p>l. mengembangkan fungsi PKW Sleman sebagai pusat perumukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang mendorong pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikannya</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>m. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Sleman sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>n. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Sleman sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>o. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Sleman sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>p. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Sleman</p> <p>q. menampung kelebihan tenaga pelatungan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Sleman</p>
VI.	Provinsi Jawa Timur:			
VI.1.	Kawasan Perkotaan Gresik-Rongkolan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila)	PKN	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Perikanan - Industri - Pariwisata - Perdagangan dan Jasa 	<p>a. mengendalikan perkembangan fisik PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila untuk menjaga keutuhan lahan pertanian lahan pangan</p> <p>b. revitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>c. mengendalikan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkeertosusila melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>d. mengundalkan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkeertosusila di kawasan zona bernana gelombang pasang, baru, ut, tsunami, abrasi di sepanjang wilayah pesisir, dan was beracun</p> <p>e. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkeertosusila sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>f. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkeertosusila melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>g. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkeertosusila sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>h. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkeertosusila sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>i. meningkatkan keretakan antara PKN sebagai pusat pariwisata di Pulau Jawa-Bali dalam keastuan tujuan pariwisata di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>ii. mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah</p> <p>iii. mengamankan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda</p> <p>iv. mengembangkan jaringan jalan strategis nasional yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan Pelabuhan Tanjung Bumi, Tanjung Buh Pelandan</p> <p>v. memanfaatkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpulan) Pulau Jawa pada lintas Surabaya Bangil- Probolinggo-Jember-Banyuwangi dan Karat-Bangkalan-Parekasan Surenep yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>vi. memanfaatkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa pada lintas Jakarta Cikampek Jember Cirebon Tegay Pekalongan-Samarang-Kudus-Kombang-Bojonegoro-Surabaya yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>a. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Purwakarta-Bandung-Caikmalaya Banyar Kroya Kebumen Kutoarjo Yogyakarta Klatan Surakarta Madiun Kertosono Jombang Surabaya yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>b. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api cepat antar kota yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya untuk meningkatkan keterkaitan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa</p> <p>d. merencanakan pelebaran penyeberangan di Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, dan Kabupaten Lamongan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>s. menciptakan lintas penyeberangan Gerbangkertosusila Banjaruas (Pulau Kalimantan), Gerbangkertosusila-Sempit (Pulau Kalimantan), Lamongan (Gerbangkertosusila) Balikpapan (Pulau Kalimantan), Lamongan (Gerbangkertosusila), Dekalar (Pulau Sulawesi), dan Lamongan-Garungkong (Pulau Sulawesi) yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan, dan Jaringan Jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila.</p> <p>t. merencanakan Pelabuhan Tanjung Perak dalam satu sistem dengan Pelabuhan Tanjung Bumi Tanjung Batu Pundak untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor yang mendukung perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>u. merencanakan Pelabuhan Gresik sebagai pelabuhan pengumpul yang merupakan bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>v. merencanakan Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandar Udara Juanda yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>w. mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang-Gresik, Pagarungan-Porong, Porong-Surabaya, Laut Jawa Gresik, Tuban Gresik, Surabaya Kertosono Kediri, serta Kertosono Madiun untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKA Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>x. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantau Utara Jawa yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>y. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pengumpulan Selatan-Utara Jawa yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila (Surabaya)</p> <p>z. mengondalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik hertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan permukiman sekitar kepadatan tinggi di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>aa. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan transmisi pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional yang meliputi PKN Cillegon PKN Serang PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKW Cikampek-Cikopo-PKW Indramayu-PKN Cirebon PKW Tepal PKW Pekalongan PKN Kawasan Perkotaan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>Kedungsepur PKW Kudus PKW Cuhun PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila-PKW Probolinggo-PKW Banyuwangi serta pada Larangan Pelayanan Pusat. Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya-PKW Kodjopaten PKN Cirebon PKW Purwokerto PKW Wonosobo PKW Magelang PKW Sleman PKN Yogyakarta PKW Klaten PKN Surakarta-PKW Madiun-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>bb. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>cc. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur-Provinsi Jawa Tengah) dan WS strategis nasional pada WS Perantas (Provinsi Jawa Timur); yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>dd. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Waduk Balong Ganggang, Waduk Banjarnayar, Waduk Bono, Waduk Bowo, Waduk Bulu, Waduk Cangah, Waduk Cungkup, Waduk Gedung Kuluat, Waduk German, Waduk Gondang, Waduk Grojokan, Waduk Jabung, Waduk Jayung, Waduk Jutesamur, Waduk Kalibombo II, Waduk Kwarun, Waduk Leguk,</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>Waduk Maduran, Waduk Makam Satri, Waduk Manyar, Waduk Palongan, Waduk Papat, Waduk Kancab, Waduk Dhoro, Waduk Rande, Waduk Sekaran, Waduk Semendo, Waduk Sendir, Waduk Sentul, Waduk Sepanji, Waduk Sogo, Waduk Suncungko, Waduk Takuran, Waduk Tulung, Waduk Tuwiri, dan Waduk Wringin Jenggol; untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>cc. meningkatkan keterkaitan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan kawasan Andalan Gresik, Tangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusila) dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata</p> <p>ff. mengembangkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya ke arah vertikal</p> <p>gg. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai sumber utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.2.	Malang	PKN	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Perikanan - Industri - Perkebunan - Pariwisata - Perdagangan dan Jasa 	<p>hh. merevitalisasi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</p> <p>ii. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>jj. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsinya PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>ldc. menetapkan RDK kota dan peraturan zonasi kota</p>
				<p>a. mengondisikan perkembangan fisik PKN Malang untuk menjaga ketubuhan lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. mengendalikan perkembangan fisik PKN Malang untuk menjaga ketubuhan lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>c. mengorbankan/meningkatkan fungsi PKN Malang melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p> <p>d. mengondisikan perkembangan PKN Malang melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>e. mengondisikan perkembangan PKN Malang yang berlekatan dengan kawasan lindung</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>f. mengendalikan perkembangan PKK Malang di kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan gerakan tanah</p> <p>g. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKK Malang sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>h. memperbaharui/meningkatkan fungsi PKK Malang melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>i. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKK Malang melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah dan ramah lingkungan</p> <p>j. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKK Malang sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berskala internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>k. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKK Malang sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, seni, penyelenggaraan pertemuan, perkelahan insentif, konferensi, dan pameran</p> <p>l. mengembangkan PKK Malang dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan limbah limbah</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>m. mempertahankan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Malang dengan Bandar Udara Abdulrachman Saleh</p> <p>n. mempertahankan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpul) Pulau Jawa pada lintas Keresoone-Kediri-Tulungagung Filirar Malang Bangil dan Malang Dampit, yang melayani PKN Malang</p> <p>o. mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Porong Malang untuk pelayanan wilayah, ariangan distribuisi PKN Malang</p> <p>p. mengundulikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan pemukiman tingkat kepadatan tinggi di PKN Malang</p> <p>q. mengembangkan jaringan recarnial pada jaringan pelayanan pengumpulan (feeder) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Madhu PKW Rlimo PKW Malang PKW Jember PKW Ranyuwangi</p> <p>r. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Malang</p> <p>s. mendayakunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Tengah) dan WS straccis nasional pada WS Brantas (Provinsi Jawa Timur) yang melayani PKN Malang</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>r. mengembangkan dan memelihara hubungan besera waduhmya (Waduk Lahor, Waduk Lowok Jati, Waduk Segaran, Waduk Selorejo, Waduk Sengguruh, dan Waduk Karang Kares/Suram) untuk memperarahkan daya rampung air sehingga berfungsi sebagai pemasuk air baku bagi PKN Malang</p> <p>u. meningkatkan keterkaitan PKN Malang dengan Kawasan Amdan Malang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, perkeluarga, dan pariwisata</p> <p>v. menecembatkan fungsi PKN Malang sebagai pusat pertumbuhan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengarahannya ruangnya ke arah vertikal</p> <p>w. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Malang sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu kerbang menuju kawasan internasional</p> <p>x. menecembatkan/meningkatkan fungsi PKN Malang sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/orau regional</p> <p>y. membuatasi inisiasias pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKN Malang</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
V1.3.	Probolinggo	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Industri - Perumahan - Periswasta - Perikanan 	<p>z. menetapkan ketentuan mengenai pelayanan pelanggan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKN Malang</p> <p>aa. menetapkan RDT/R kota dan peraturan zonasi kota</p> <p>a. mengundutkan perkembangan fisik PKW Probolinggo untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Probolinggo melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p> <p>c. mengembangkan PKW Probolinggo sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan</p> <p>d. mengundutkan perkembangan PKW Probolinggo melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>e. mengundutkan perkembangan PKW Probolinggo di kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi, serta gempa bumi</p> <p>f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Probolinggo sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya sang dan ramah lingkungan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>g. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Probolinggo melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang masih lingkungan</p> <p>h. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Probolinggo melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang memiliki tanah tinggi dan tanah lingkungan</p> <p>i. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Probolinggo sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, pejalanan insentif, konferensi, dan pameran</p> <p>j. mengembangkan PKW Probolinggo dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan limbah</p> <p>k. merencanakan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpulan) Pulau Jawa pada lintas Surabaya Bangil Probolinggo-Jember-Banyuwangi yang melayani PKW Probolinggo</p> <p>l. mengembangkan pengembangan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Porung-Pasuruan-Probolinggo dan Setlat Madura-Pasuruan untuk pelayanan wilayah juringan disekitar PKW Probolinggo</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>m. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa yang melayani PKW Probolinggo</p> <p>n. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan transmisi pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional yang meliputi PKN Cillegon PKN Serang PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKW Cikampek-Cikopo-PKW Indramayu-PKN Cirebon PKW Tegal PKW Pekalongan PKN Kawasan Perkotaan Kochungcupur-PKW Kudus-PKW Tuban-PKN Kawasan Perkotaan GerbangKertosusila PKW Probolinggo PKW Banyuwangi</p> <p>o. mengembangkan rencana terestrial pada jaringan pelayanan pengumpulan (feeder) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Probolinggo PKW Jambi</p> <p>p. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Probolinggo</p> <p>q. meningkatkan keterkaitan PKW Probolinggo dengan Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan perikanan</p> <p>r. mengembangkan fungsi PKW Probolinggo sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.4.	Tuban	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Pariwisata - Perumahan - Perikanan - Perambangan 	<p>menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dilakukan</p> <ul style="list-style-type: none"> s. mengembang/meningkatkan fungsi PKW Probolinggo sebagai pusat permukiman dengan ringkar inrensiaa peralanaan ruang menengah t. mengembang/meningkatkan fungsi atau porenasi PKW Probolinggo sebagai simpul kedua meodukung kegiatan perdagangan provinsi u. mengembang fungsi atau potensi PKW Probolinggo sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten v. merelasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Probolinggo w. menciptakan ketertuan mengenai pelajaran pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsinya PKW Probolinggo <ul style="list-style-type: none"> a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Tuban untuk menjaga keubahan lahan pertanian tanaman pangan b. mengendalikan perkembangan PKW Tuban melalui optimalisasi peralanaan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan binaan

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>c. mengendalikan perkembangan PKW Tuban di kawasan rawan bencana gerakan tanah atau tanah longsor, gelombang pasang, banjir, dan abrasi di sepanjang wilayah pantai</p> <p>d. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tuban melalui peningkatan fungsi industri pengolahan hasil pertambangan minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri tepercaya</p> <p>e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tuban melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian yang ramah lingkungan</p> <p>f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tuban melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan</p> <p>g. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tuban sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, olahraga, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjamuan insentif, konferensi, dan pameran</p> <p>h. mengembangkan PKW Tuban dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan limbah</p> <p>i. mengembangkan angkutan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpang) Pulau Jawa pada lintas Tuban-Babat-Jombang yang melayani PKW Tuban dengan memperhatikan fungsi</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="609 1123 690 1165">j. <li data-bbox="690 1123 771 1165">k. <li data-bbox="917 1123 998 1165">l. <li data-bbox="998 1123 1079 1165">m. <li data-bbox="1079 1123 1161 1165">n. <li data-bbox="1161 1123 1242 1165">o. 	<p>kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa</p> <p>Dali pada Jaringan Transmisi Pengumpulan Selaran Utara Jawa yang melayani PKW Tuban</p> <p>merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan recerial pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional yang meliputi PKN Cillegon PKN Serang PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKW Cikampek-Cikopo-PKW Indramayu-PKN Cirebon PKW Tegal PKW Pekalongan PKN Kuwasan Perkotaan Kclungsepur-PKW Kudus-PKW Tuban-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila-PKW Probolinggo-PKW Banyuwangi</p> <p>mengembangkan jaringan recerial pada jaringan pelayanan pengumpulan <i>feeder</i> di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Tuban-PKW Bujanegara</p> <p>mengembangkan jaringan arerlit untuk melayani PKW Tuban</p> <p>mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Tuban</p> <p>mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Waduk Geripol, Waduk Pacul, Waduk Prielan, Waduk Clogo</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>Pucangan, dan Waduk Melambongan) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKW Tuban</p> <p>p. meningkatkan keterampilan PKW Tuban dengan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan, dan perambangan</p> <p>q. mengembangkan fungsi PKW Tuban sebagai pusat pemukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan</p> <p>r. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Tuban sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>s. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Tuban sebagai atraksi kedua mendukung kegiatan perdagangan pariwisata</p> <p>t. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Tuban sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>u. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Tuban</p> <p>v. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Tuban</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.5.	Kediri	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Pertanian - Perumahan - Partisipasi 	<p>a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Kediri untuk menjaga kestabilan lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. mengembangkan/reorganisasi fungsi PKW Kediri melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan PKW Kediri melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>d. meniadakan perkembangan PKW Kediri di kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan gerakan tanah</p> <p>e. mengembangkan/reorganisasi fungsi PKW Kediri sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>f. mengembangkan/reorganisasi fungsi PKW Kediri melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan</p> <p>g. mengembangkan/reorganisasi fungsi PKW Kediri sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertanian, perikanan insentif, konferensi, dan pameran</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>h. mengembangkan PKW Kediri dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minor limbah</p> <p>i. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (penyempurnaan) Pulau Jawa pada lintas Kerjasama-Kediri-Tulungagung Blitar Malang Bangil yang melayani PKW Kediri</p> <p>j. mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Surabaya Kerinci Kediri dan Kerinci-Madiun untuk pelayanan wilayah jaringan distribusi PKW Kediri</p> <p>k. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Dali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKW Kediri</p> <p>l. mengembangkan arungan telestrai pada jaringan pelayanan pengumpulan (feed) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Madiun PKW Kediri</p> <p>ll. mengembangkan jaringan salaku untuk melayani PKW Kediri</p> <p>d. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS strategis nasional pada WS Brantas (Provinsi Jawa Timur) yang melayani PKW Kediri</p> <p>o. meningkatkan keterkaitan PKW Kediri dengan kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Blitar dengan sektor unggulan pertanian, perkeluarga, industri, perikanan, dan pariwisata</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.1.6.	Medium	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Pertanian - Perkuburan - Pariwisata 	<p>p. mengembangkan fungsi PKW Kediri sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan</p> <p>q. mengur-bangkan/meningkatkan fungsi PKW Kediri sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>r. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Kediri sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>s. mengur-bangkan fungsi atau potensi PKW Kediri sebagai simpul l-musturiati skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>t. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Kediri</p> <p>u. menetapkan kerennuan mengenai pelayanan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Kediri</p> <p>a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Medium untuk menjaga kearahhan lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. mengur-bangkan/meningkatkan fungsi PKW Medium melalui peningkatan fungsi industri perkebunan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>c. mengendalikan perkembangan PKW Madium di kawasan rawan bencana tanah longsor; banjir; letusan gunung berapi, dan gerakan tanah</p> <p>d. meningkatkan/meningkatkan fungsi PKW Madium sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>e. memperbaharui/meningkatkan fungsi PKW Madium melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan</p> <p>f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Madium sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perijinan insentif, konferensi, dan pameran</p> <p>g. memperbaharui PKW Madium dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan limbah limbah</p> <p>h. meningkatkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa pada lintas Jakarta Cikampek Purwakarta Bandung Tasikmalaya-Banjur-Kroya-Kebumen-Kutoarjo-Yogyakarta-Klaten-Surakarta-Madiun-Kertosono-Jombang-Surabaya yang melayani PKW Madium</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>i. mempertahankan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpulan) Pulau Jawa pada lintas Slabung-Madison yang melayani PKW Madium</p> <p>ii. mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Surabaya-Kertosono-Kediri dan Kertosono-Madison untuk pelayanan wilayah jaringan transmisi PKW Madium</p> <p>iii. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa</p> <p>iv. Dali pada Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa yang melayani PKW Madium</p> <p>v. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan transmisi pada Jaringan Pelayanan Pusat, Perumahan di Wilayah Tengah Jawa yang menghubungkan PKN kawasan Perkotaan Jabodetabek-PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya-PKW Kabupaten PKN Girahon PKW Purwokerto PKW Wonosobo PKW Magelang PKW Sleman PKN Yogyakarta PKW Klaten PKN Surakarta-PKW Madium-PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>vi. mengembangkan jaringan transmisi pada jaringan pelayanan pengumpulan <i>(feeder)</i> di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Madium PKW Kediri dan PKW Madium PKW Blitar PKN Malang PKW Jember-PKW Banyuwangi</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>n. mengembangkan jaringan anelit untuk melayani PKW Madiun</p> <p>o. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Madiun</p> <p>p. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Waduk Dawuhan, Waduk Gonggang, Waduk Kedung Rendu, Waduk Keting Birus, Waduk Notojuro, Waduk Pondok, Waduk Sanjiran, Waduk Saradan, Waduk Sempu, Waduk Tlogu Ngabel, dan Waduk Selaga Pasir/Sarangani) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKW Madiun</p> <p>q. meningkatkan keterkaitan PKW Madiun dengan Kawasan Adlalan Madiun dan sekitarnya dengan skto: unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata</p> <p>r. mengembangkan fungsi PKW Madiun sebagai pusat perumukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecondongan pengembangan ruangnya ke arah horizontal diperndalikan</p> <p>s. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Madiun sebagai pusat perumukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<ul style="list-style-type: none"> r. mengerbangkan/meningkatkan fungsi atau porenasi PKW Madura sebagai surplus kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi u. mengerbangkan fungsi atau porenasi PKW Madura sebagai surplus transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten v. menetapkan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Madura w. menerapkan ketentuan mengenai perencanaan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Madura
VI.7.	Banyuwangi	PKW	<ul style="list-style-type: none"> ~ Industri ~ Perikanan ~ Perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. mengondalikan perkembangan fisik PKW Banyuwangi untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Banyuwangi melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan c. mengembangkan PKW Banyuwangi sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan d. mengondalikan perkembangan PKW Banyuwangi di kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan gerakan tanah

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Banyuwangi melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang masih lingkungan</p> <p>f. mengembangkan PKW Banyuwangi dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan limbah limbah</p> <p>g. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pempurpan) Pulau Jawa pada lintas Surabaya-Banyuwangi-Probolinggo Jember Banyuwangi yang melayani PKW Banyuwangi</p> <p>h. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali pada Jaringan Transmisi Pantar Utara Jawa yang melayani PKW Banyuwangi</p> <p>i. merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan cestrial pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa untuk menghimpunkan dan pusat perkotaan nasional yang meliputi PKN Cilong-PKN Serang-PKN Kawasan Perkotaan Jember-PKN Cilempuk Cilegon-PKW Indramayu PKN Cirebon PKW Tegol PKW Pekalongan PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur-PKW Kudus-PKW Tuban-PKN Kawasan Perkotaan Gebang-Kertosuli PKW Probolinggo PKW Banyuwangi serta pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pulau Bali</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>yang menghubungkan PKW Banyuwangi (Pulau Jawa) PKW Negara-PKN kawasan Perkotaan Sarbagita-PKW Samarapura-PKW Singaraja</p> <p>j. mengembangkan jaringan kerensial pada jaringan pelayanan penumpang /<i>feeder</i> di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Madani PKW Blitar PKN Malang PKW Jember PKW Banyuwangi</p> <p>k. memperluas jaringan selah untuk melayani PKW Banyuwangi</p> <p>l. meningkatkan keaktifan PKW Banyuwangi dengan kawasan Andalan Banyuwangi dan sekitarnya dengan aktor unggulan perikanan dan pertanian</p> <p>m. mengembangkan fungsi PKW Banyuwangi sebagai pusat perikanan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang memerlukan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan</p> <p>n. mengembangkan/ meningkatkan fungsi PKW Banyuwangi sebagai pusat perbukitan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>o. mengembangkan/ meningkatkan fungsi atau potensi PKW Banyuwangi sebagai simpul kedua pendukung kegiatan perdagangan provinsi</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.8.	Jember	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Perkeluarga - Pertanian - Partisipasi 	<p>p. mengembangkan fungsi atau peran PKW Banyuwangi sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>q. membarasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Banyuwangi</p> <p>r. menciptakan kelenturan kebijakan pelayanan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Banyuwangi</p> <p>a. mengendalikn perkembangan fisik PKW Jember untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. mengembangkan PKW Jember melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p> <p>c. mengembangkan PKW Jember sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan</p> <p>d. mengendalikan perkembangan PKW Jember di kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan gerakan tanah</p> <p>e. mengembangkan PKW Jember melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang memiliki tarulrah tinggi dan ramah lingkungan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>f. mengembangkan PKW Jember sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, acara penyelenggaraan pertemuan, pagelaran insentif, konferensi, dan pameran</p> <p>g. mengembangkan PKW Jember dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan limbah limbah</p> <p>h. memanfaatkan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (penguripan) Pulau Jawa pada lintas Surabaya-Banjir Probolinggo-Jember-Banyuwangi yang melayani PKW Jember</p> <p>i. mengembangkan jaringan terminal pada jaringan pelayanan pengumpulan <i>(feeder)</i> di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Madura-PKW Blitar-PKN Malang-PKW Jember-PKW Banyuwangi dan PKW Probolinggo PKW Jember</p> <p>j. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Jember</p> <p>k. meningkatkan keterkaitan PKW Jember dengan Kawasan Adakan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan lain</p> <p>l. mengembangkan fungsi PKW Jember sebagai pusat pertumbuhan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.9.	Blitar	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Pertanian - Perkehutanan - Perikanan - Pariwisata 	<p>m. mengembangkan baru fungsi PKW Jember sebagai pusat perumukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>n. mengembangkan baru fungsi aram porensi PKW Jember sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>o. mengembangkan fungsi aram porensi PKW Jember sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>p. meribulasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Jember</p> <p>q. menciptakan kawasan khusus pelatihan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Jember</p> <p>a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Blitar untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. mengembangkan PKW Blitar melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian pertanian pangan</p> <p>c. mengembangkan PKW Blitar sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan</p> <p>d. mengidentifikasi perkembangan PKW Blitar di kawasan rawan bencana tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, dan erakan tanah</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>e. mengembangkan PKW Blitar sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>f. mengembangkan PKW Blitar melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>g. mengembangkan PKW Blitar melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan</p> <p>h. mengembangkan PKW Blitar sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran</p> <p>i. mengembangkan PKW Blitar dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan limbah limbah</p> <p>j. memanfaatkan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpang) Pulau Jawa pada lintas Kertosono Kediri Tulungagung Blitar Malang Bangil yang melayani PKW Blitar</p> <p>k. mengembangkan jaringan terminal pada jaringan pelayanan pengangkutan <i>feeder</i> di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Madhu PKW Nilar PKW Malang PKW Jember PKW Nanyuwangi</p> <p>l. mengembangkan jaringan untuk melayani PKW Blitar</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>m. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS strategis nasional pada WS Brantas (Provinsi Jawa Timur) yang melayani PKW Dilar;</p> <p>n. meningkatkan keretakan PKW Dilar dengan Kawasan Andalan Kediri-Lutung Agung-Blitar dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata</p> <p>o. mengembangkan fungsi PKW Dilar sebagai pusat pemukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan</p> <p>p. mengembangkan baru fungsi PKW Dilar sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>q. mengembangkan baru fungsi atau potensi PKW Dilar sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>r. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Dilar sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>s. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Dilar</p> <p>t. menetapkan ketentuan mengenai pelayanan pemanfaatan ruang yang mencabutkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Dilar</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.10.	Pamekasan	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Pertanian - Pariwisata - Perikanan - Perkotaanan 	<p>a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Pamekasan untuk menjaga ketubuhan lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. mengembangkan PKW Pamekasan melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian pertanian pangan</p> <p>c. mengembangkan PKW Pamekasan sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan</p> <p>d. mengabdikan perkembangan PKW Pamekasan di kawasan rawan bencana abrasi di sepanjang wilayah pesisir</p> <p>e. mengembangkan PKW Pamekasan melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian yang rawan lingkungan</p> <p>f. mengembangkan PKW Pamekasan melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan</p> <p>g. mengembangkan PKW Pamekasan sebagai pusat partisipasi capur mudiya dan ilmu pengetahuan, budaya, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, pelayanan insentif, konferensi, dan pameran</p> <p>h. mengembangkan PKW Pamekasan dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>i. menciptakan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpulan) Pulau Jawa pada lintas Kaural-Bangkalan-Pamekasan Surabep yang melayani PKW Pamekasan</p> <p>ii. mengembangkan jaringan antaric untuk melayani PKW Pamekasan</p> <p>iii. meningkatkan keterkaitan PKW Pamekasan dengan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, dan perikanan serta Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, peternakan, dan pariwisata</p> <p>iv. mengembangkan fungsi PKW Pamekasan selaku pusat perumukiman dengan tingkat utilitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dikendalikan</p> <p>v. mengembangkan baru fungsi PKW Pamekasan sebagai pusat perumukiman dengan tingkat utilitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>vi. mengembangkan baru fungsi atau potensi PKW Pamekasan sebagai pusat perumukiman kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>vii. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Pamekasan sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.11.	Bojonegoro	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Pertanian - Perkebunan - Pariwisata - Pertambangan 	<p>p. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW kawasan</p> <p>q. menempatkan ketentuan mengenai pelanggaran pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap fungsinya PKW kawasan</p>
				<p>a. mengudalikan perkembangan fisik PKW Bojonegoro untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. mengembangkan PKW Bojonegoro melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p> <p>c. mengembangkan PKW Bojonegoro sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan</p> <p>d. mengudalikan perkembangan PKW Bojonegoro di kawasan rawan bencana gempa atau tanah longsor dan banjir</p> <p>e. mengembangkan PKW Bojonegoro melalui peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perkebunan minyak dan gas bumi yang didukung oleh pengelolaan limbah industri terpadu</p> <p>f. mengembangkan PKW Bojonegoro melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang bernilai tambah tinggi dan ramah lingkungan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>g. mengembangkan PKW Bojonegoro sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, babat, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, pagelaran insentif, konferensi, dan pameran</p> <p>h. mengembangkan PKW Bojonegoro dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan minim limbah</p> <p>i. memanfaatkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa pada lintas Jakarta-Cikampek-Jatibarang-Cirebon-Tegal-Pekalongan Semarang Kudus Rembang Bojonegoro Surabaya dan Lasur-Jatiroto-Bojonegoro yang melayani PKW Bojonegoro</p> <p>f. mengembangkan jaringan pipa transmisi minyak dan gas bumi Semarang-Gresik untuk meningkatkan pelayanan wilayah jaringan distribusi PKW Bojonegoro</p> <p>ke. rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Tali pada Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa yang melayani PKW Bojonegoro</p> <p>l. mengembangkan jaringan telestrat pada jaringan pelayanan pengumpulan <i>freight</i> di Pulau Jawa yang menghubungkan PKW Tuban-PKW Bojonegoro</p> <p>m. mengembangkan jaringan anelit untuk melayani PKW Bojonegoro</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>n. mengdayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Dijonogoro</p> <p>o. meningkatkan keterkaitan PKW Dijonogoro dengan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, kebudayaan, pertanian, perikanan, dan perambangan</p> <p>p. mengembangkan fungsi PKW Bojonegoro sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horisontal/dikondalikan</p> <p>q. mengembangkan baru fungsi PKW Dijonogoro sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>r. mengembangkan baru fungsi atau potensi PKW Dijonogoro sebagai air pel kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>s. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Bojonegoro sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>t. menetapkan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Dijonogoro</p> <p>u. menetapkan ketentuan mengenai pelayanan pemanfaatan ruang yang mencycabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Dijonogoro</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.12.	Pacitan	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Pertanian - Perikanan - Pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Pacitan untuk menjaga kestabilan lahan pertanian tanaman pangan b. mengembangkan PKW Pacitan melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan c. menyalakan pekerbang PKW Pacitan di kawasan kawasan bencana gerakan tanah atau tanah longsor, banjir, gempa bumi, serta tsunami d. mengembangkan PKW Pacitan melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian yang ramah lingkungan e. mengembangkan PKW Pacitan sebagai pusat pariwisata, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, peralanan insentif, konferensi, dan pameran f. mengembangkan PKW Pacitan dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan limbah limbah g. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan penghubung Pulau Jawa pada lintas Slabung-Madiun yang melayani PKW Pacitan

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>h. mengembangkan jaringan <i>recrearial</i> pada jaringan pelayanan pengumpulan (<i>feeder</i>) di Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Surakarta PKW Pacitan</p> <p>i. mengembangkan jaringan salaku untuk melayani PKW Pacitan</p> <p>j. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS lintas provinsi pada WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur-Provinsi Jawa Tengah) yang melayani PKW Pacitan</p> <p>k. meningkatkan keterkaitan PKW Pacitan dengan Kawasan Amdakam Medium dan Sekelarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata</p> <p>l. mengembangkan fungsi PKW Pacitan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan</p> <p>m. mengembangkan baru fungsi PKW Pacitan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>n. mengembangkan baru fungsi atau potensi PKW Pacitan sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>o. memperluas fungsi atau potensi PKW Pacitan sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
VII.	Provinsi Bali			<p>b. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Pacitan</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Pacitan</p>
VII.1.	Kawasan Perkotaan Denpasar Badung Gianyar- tabanan (Sarbagita)	PKN	<ul style="list-style-type: none"> - Pariwisata - Pertanian - Industri - Perikanan - Perdagangan dan Jasa 	<p>a. mengendalikan perkembangan fisik PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita melalui optimalisasi pemanfaatan ruang secara kompak dan vertikal sesuai dengan daya dukung dan dayaampung lingkungan hidup</p> <p>d. mengendalikan perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita di kawasan rawan bencana gelombang pasang, banjir, gempa bumi, tsunami, dan abrasi di sepanjang wilayah pesisir</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>e. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai pusat kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan <i>main</i> lingkungan</p> <p>f. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>g. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai pusat perdagangan dan jasa yang berkelas internasional sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>h. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran</p> <p>i. meningkatkan keragaman antara PKN sebagai pusat pariwisata di Pulau Jawa-Bali dalam kesatuan tujuan pariwisata di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita</p> <p>j. mengembangkan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan limbah</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>k. merencanakan jaringan jalan pengumpan Pulau Tali yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita</p> <p>l. merencanakan jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan Pelabuhan Rencas dan Bandara Udara Muwah Rai</p> <p>m. mengembangkan dan memanfaatkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien</p> <p>n. mengembangkan jaringan jalur kereta api antar-kota di Pulau Bali pada lintas Ciliratik-Negara-Jabanan-Donpasar-Amlapura, lintas Singaraja-Jabanan, dan lintas Kutubambahan-Nangli Gianyar yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita</p> <p>o. memanfaatkan pelabuhan penyeberangan di Kota Denpasar yang terpadu dengan jaringan jalan bebas hambatan dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita</p> <p>p. memanfaatkan lintas penyeberangan Dewa-Senggigi (Pulau Lombok) yang terpadu dengan jaringan jalan bebas hambatan dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>1. mengembangkan Pelabuhan Tenna untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor yang mendukung perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita</p> <p>2. mengembangkan Pelabuhan Tenna yang terpadu dengan jaringan jalan bebas hambatan dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita</p> <p>3. mengamankan Bandara Udara Ngurah Rai yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Bali Selatan, jalan bebas hambatan, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita</p> <p>4. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik pada Jaringan Transmisi Bali yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita</p> <p>5. mengendalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan permukiman tingkat kepadatan tinggi di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita</p> <p>6. merehabilitasi jaringan terrestrial pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pulau Bali yang menghubungkan PKW Babuwangi (Pulau Jawa), PKW Negara PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita-PKW Semarang-PKW Singaraja</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>w. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita</p> <p>x. memanfaatkan sumber air berbasis pada WS at-aregia nasional pada WS Bali Penida (Provinsi Bali) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita</p> <p>y. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Waduk Benet, Waduk Muara, Waduk Palasari, dan Waduk Telaga Curug) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai penasok air baku bagi PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita</p> <p>z. meningkatkan keterampilan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta Kawasan Andalan Laut Bali dan Selatannya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata</p> <p>aa. mengembangkan fungsi PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai pusat pertumbuhan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya mengarah ke arah vertikal</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
VII.2.	Singaraja	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Pariwisata - Pertanian - Perikanan - Industri 	<p>bb. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai suripul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu perbang menuju kawasan internasional</p> <p>cc. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai simpul utama transportasi skala internasional, nasional, dan/atau regional</p> <p>ddd. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengesampingkan fungsi PKW Kawasan Perkotaan Sarbagita</p> <p>gg. menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Kawasan Perkotaan Sarbagita</p> <p>hh. menetapkan RDK kota dan peraturan zonasi kota</p>
				<p>a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Singaraja untuk menjaga ketubuhan lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Singaraja melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan PKW Singaraja di kawasan rawan bencana kerakan tanah atau tanah longsor, gempa bumi dan banjir</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>d. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Singaraja melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan yang ramah lingkungan</p> <p>a. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Singaraja sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran</p> <p>c. mengembangkan PKW Singaraja dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan limbah</p> <p>g. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota di Pulau Bali pada lintas Singaraja-Culungan yang melayani PKW Singaraja</p> <p>h. merchabilitasi jaringan terestrial pada Jaringan Pelayanan Pasar Pertumbuhan di Pulau Bali yang menghubungkan PKW Banyuwangi (Pulau Jawa) PKW Negara PKN Kawasan Perikanan Sarbagila-PKW Samarapura-PKW Singaraja</p> <p>i. mengembangkan jaringan aerir untuk melayani PKW Singaraja</p> <p>k. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS strategis nasional pada WS Bali-Petuda (Provinsi Bali) yang melayani PKW Singaraja</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>k. mengembangkan dan memelihara bendungan beserta waduknya (Waduk Groksak) untuk mempertahankan daya tampung air sehingga berfungsi sebagai pemasok air baku bagi PKW Singaraja</p> <p>l. meningkatkan keterkaitan PKW Singaraja dengan Kawasan Andalan Singaraja dan Sekitarnya (Bali Utram; dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, dan perikanan</p> <p>m. mengembangkan fungsi PKW Singaraja sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah bertumbuh dikendalikan</p> <p>n. mengembangkan/meningkatkan fungsi PKW Singaraja sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>o. mengembangkan/meningkatkan fungsi atau potensi PKW Singaraja sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>p. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Singaraja sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>q. merencanakan pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Singaraja</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
VII.3.	Semarang	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Pariwisata - Pertanian - Industri 	<p>5. menetapkan kerentanan mengenai pelanggaran pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Singaperaja</p>
				<ul style="list-style-type: none"> a. mengendalikn perkembangan fisik PKW Semarang untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan b. mendorong pengembangan PKW Semarang melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan c. mengembangkan PKW Semarang sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan d. mengendalikn perkembangan PKW Semarang di kawasan rawan bencana gempa bumi, tsunami, dan abrasi di sepanjang wilayah pesisir e. mendorong pengembangan PKW Semarang sebagai pusat pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, peralanan insentif, konferensi, dan pameran f. mengembangkan PKW Semarang dengan konsep kota hijau yang berlatar energi, air, labat, dan minim limbah

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api antara-kota di Pulau Bali pada lintas Culumatuk-Negara-Tabanan-Dempasat-Amlapura yang melayani PKW Samarapura</p> <p>b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik pada Jaringan Transmisi Bali yang melayani PKW Samarapura</p> <p>c. merehabilitasi jaringan tenaga listrik pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pulau Bali yang menghubungkan PKW Banyuwangi (Pulau Jawa)-PKW Negara-PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita PKW Samarapura PKW Singaraja</p> <p>d. mengembangkan jaringan saclit untuk melayani PKW Samarapura</p> <p>e. mendayagunakan sumber air bebas pada WS strategis nasional pada WS Bali-Pemuda (Provinsi Bali) yang melayani PKW Samarapura</p> <p>f. meningkatkan keterkaitan PKW Samarapura dengan Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan</p> <p>g. mengembangkan fungsi PKW Samarapura sebagai pusat pertumbuhan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>n. mendorong pengembangan fungsi PKW Semarang sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>o. mendorong pengembangan fungsi aram potensi PKW Semarang sebagai saripul kedua pendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>p. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Semarang sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p> <p>q. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Semarang</p> <p>r. menampung kelebihan tenaga pelatung pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Semarang</p>
VII.4. Negara	PKW	<ul style="list-style-type: none"> - Perbisata - Pertanian - Industri 		<p>a. mengendalikan perkembangan fisik PKW Negara untuk menjaga keutuhan lahan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. mendorong pengembangan PKW Negara melalui peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian tanaman pangan</p> <p>c. mengembangkan PKW Negara sebagai pusat penelitian dan pengembangan pertanian tanaman pangan</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>d. mengondalikan perkembangan PKW Negara di kawasan rawan bencana gempa bumi dan tsunami</p> <p>e. mendorong pengembangan PKW Negara sebagai pusat pariwisata, cogas budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran</p> <p>f. mengembangkan PKW Negara dengan konsep kota hijau yang hemat energi, air, lahan, dan limbah</p> <p>g. mengembangkan jaringan jalur kereta api antar-kota di Pulau Bali pada lintas Gilimanuk Negara Cabanan Denpasar - Amlapura yang melayani PKW Negara</p> <p>h. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik pada Jaringan Transmisi Bali yang melayani PKW Negara</p> <p>i. merehabilitasi jaringan tenaga listrik pada Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan Pulau Bali yang menghubungkan PKW Banyuwangi (Pulau Jawa) PKW Negara PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita PKW Semarang PKW Singaperbangsa</p> <p>j. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKW Negara</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>k. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS strategis nasional pada WS Bali-Nusa Tenggara (Provinsi Bali) yang melayani PKW Negara</p> <p>l. meningkatkan keterkaitan PKW Negara dengan Kawasan Andalan Tali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan</p> <p>m. mengembangkan fungsi PKW Negara sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ruangnya ke arah horizontal dikendalikan</p> <p>n. mendorong pengembangan fungsi PKW Negara sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah</p> <p>o. mendorong pengembangan fungsi atau potensi PKW Negara sebagai simpul kedua mendukung kegiatan perdagangan provinsi</p> <p>p. mengembangkan fungsi atau potensi PKW Negara sebagai simpul transportasi skala provinsi atau beberapa kabupaten</p>

NO.	KAWASAN PERKOTAAN	FUNGSI KOTA	FUNGSI PELAYANAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
				<p>q. membatasi intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi PKW Negara</p> <p>r. menerapkan ketentuan mengenai pelayanan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya PKW Negara</p>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TANGGAL 16 MARET 2012**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN
JALAN NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI**

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN JALAN KASIO NAT. DI PULAU JAWA BALI

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa	Aktor Primer	
I.1.	Merak-Cilegon-Srang-Tangerang-Jakarta Bekasi Karawang-Cikaupok-Pamanukan-Lohbener-Palimanan-Cirebon-Losari-Parabatu-Pematang-Siantan-Kendal-Semarang-Demak-Kudus-Pari Rembang-Bulu-Tuban-Widang-Lamongan-Gresik-Surabaya-Waru Sidoarjo Pasuruan Probolinggo-Surabaya-Ketapang-Banyuwangi	Aktor Primer	<p>a. memantapkan jaringan jalan aktor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa (Merak Cilegon Serang Tangerang Jakarta Bekasi Karawang-Cikaupok-Pamanukan-Lohbener-Palimanan-Cirebon-Losari-Brebes-Tegal-Pematang-Siantan-Kendal-Semarang-Demak-Kudus-Pari Rembang-Bulu Tuban Widang Lamongan Gresik Surabaya Waru Sidoarjo Pasuruan Probolinggo Sitinggondo Ketapang Banyuwangi) untuk meningkatkan keterkaitan PKY Cilegon, PKN Semarang, PKN Kawasan Perumahan Jakarta Bogor Depok Cangerang Bekasi (Jabodetabek), PKW Cikampek-Cikupe, PKY Cirebon, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKN Kawasan Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Semarang Purwodadi (Kedungsepuh), PKW Kudus, PKW Tuban, PKN Kawasan Perkotaan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkerlusaila), dan PKW Banyuwangi serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalan aktor primer pada Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa yang melayani Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan, Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa, Kawasan Andalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Cirebon, Indragayuh, Majalengka, Kuningan (Ciyumaja Kuning) dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan perikanan, Kawasan Andalan Brebes Cegal Blawi (Bregus) dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi (Kedungsepur) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pengembangan, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora (Wanarakuti) dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan perikanan, Kawasan Andalan Luban Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan, dan perikanan, Kawasan Andalan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkeiritosula) dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata, Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang dengan sektor unggulan pertanian, industri, pengembangan, perikanan, perkebunan, pariwisata, Kawasan Andalan Situhondo Bondowoso Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan laut, dan Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekelannya dengan sektor unggulan pertanian dan perikanan untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan Jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpulan) Pulau Jawa, jaringan Jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, Jaringan Jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, jaringan kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, dan pelabuhan penyeberangan (Kota Cilong dan Kula Jakarta Utara)</p> <p>d. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Cilong dengan Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Doyoregara, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno Hatta, PKN Cirebon dengan Pelabuhan Arjuna (Cirelum) dan Bandar Udara Cakrabuwana, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dengan Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani, serta PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Tanjung Perak, dan Bandar Udara Juanda</p> <p>e. mengundalkan perkembangan pertumbuhan di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa yang mengindikasiakan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>f. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang mendukung pengembangan ruangnya dibatasi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.	Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa		<p>g. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan <i>Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa</i></p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p>
II.1.	Jorong Ciawi Cihadak Sukabumi Cianjur Padalarang Bandung Cileunyi -Rajapolah-Ancol- Ciamis Banjar Wangon	Arteri primer	<p>a. memantapkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa (Jorong Ciawi Cihadak Sukabumi Cianjur Padalarang-Bandung-Cileunyi-Rajapolah-Ancol-Ciamis-Banjar-Wangon) untuk meningkatkan keberfektan PKY Kawasan Perloaman Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKW Sukabumi, dan PKW Tasikmalaya serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang melayani Kawasan Andalan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopunjur dan Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, perikanan, dan perambangan, Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertanian, pariwisata, perkebunan, dan perambangan, Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, perikanan, pariwisata, dan perkebunan, Kawasan Andalan Priangan Tirur-Pangkajene dengan sektor unggulan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan peternakan, serta Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Putukerlu, Kebunro, Cilacap, dan Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan peternakan untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (penguripan) Pulau Jawa, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKK Kawasan Perkotaan Jabodetabek</p> <p>d. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan PKK Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan Bandar Udara Husein Sastranegara</p> <p>e. memperhaluskan perkembangan pertumbuhan di sepanjang Jaringan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkubuan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>f. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya diharasi</p> <p>g. memantapkan kerentanan mengenai pelorongan elih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.	<p>Secang-Bawen-Salatiga-Diyolali-Kartasura Surakarta-Sragen Ngawi -Caruban-Angajuk-Kertosono-Jombang Mojokerto Krian Waru Surakarta, PKK Kawasan Perkotaan GerbangKertosusila, PKW Salatiga, dan PKW Boyolali acita mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Teli</p>	Arteri primer	<p>b. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan rupa; perijayawasan jalan</p> <p>a. memanfaatkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa (Secang-Bawen-Salatiga-Boyolali-Kartasura-Surakarta-Sragen-Ngawi-Caruban-Angajuk-Kertosono-Jombang-Mojokerto Krian Waru) untuk meningkatkan kelengkapan PKK Surakarta, PKK Kawasan Perkotaan GerbangKertosusila, PKW Salatiga, dan PKW Boyolali acita mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Teli</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang melayani Kawasan Andalan Burubudur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, Kawasan Andalan Kedungsepuh dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Surakarta-Diyolali-Sukoharjo-Karanganyar-Wonogiri-Sragen-Klaten (Subosuka-Wonosaran) dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata, serta Kawasan Andalan GerbangKertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
11.3.	Rawalo Sampang Buritu	A-teri p-turor	<p>c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa dan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengurupan) Pulau Jawa</p> <p>d. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang membutuhkan PKN Surakarta dengan Bundar Utara Adi Sumarmo</p> <p>e. mengendalikn perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menialar <i>(urban sprawl)</i></p> <p>f. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan ringkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya diarahasi</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang perijayawasan jalan</p> <p>ii. memantapkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa (Kawalo-Sempang-Buritu) yang melibatkan kawasan Adalau Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perkebangan, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.4.	Cilegon-Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung-Ciomas-Bogor	Kolektor primer	<p>b. memantapkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa</p> <p>c. memunculkan perkembangan perukiman di sepanjang Jaringan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang merambat (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya diarahkan</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa</p> <p>f. menetapkan garis serpadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang perizinan jalan</p> <p>a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa (Cilegon-Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung-Ciomas-Bogor) untuk meningkatkan keterkaitan PKN Cilegon, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Pandeglang, dan PKW Rangkas Bitung serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Teli</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang melayani Kawasan Abdalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Boonagara Merak Cillegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan perkebunan, Kawasan Audalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, peternakan, perdagangan, dan jasa, serta Kawasan Abdalan Pupunjur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, perikanan, dan pertambangan untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek</p> <p>d. memperlakukan perkembangan pertumbuhan di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya diluarisi</p> <p>f. menerapkan kerentanan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa</p> <p>g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang perawasan jalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.5.	Wangon Kawalo	Kolektor primer	<p>a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa (Wangon-Kawalo) yang melayani Kawasan Audalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>b. mengendalikan perkembangan pertumbuhan di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi Jalinan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa dengan ringkasan intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>d. menetapkan ketentuan mengenai peraturan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa</p> <p>e. menetapkan garis serpadun lingkungan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengembangan jalan</p>
II.6.	Buntu-Banyumas-Banjarnegara-Wonosobo-Teranggung-Secang	Kolektor primer	<p>a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa (Buntu-Banyumas-Banjarnegara-Wonosobo-Teranggung-Secang) yang melayani PKW Wonosobo serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III. III.1.	Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa Jeruklegi-Cilacap-Sarang-Sampang-Danau-Kebond- Sampang-Danau-Kebond-	Arteri primer	<p>b. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang melayani Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan serta Kawasan Borobudur dan Sekeloa dengan sektor unggulan pariwisata untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Dali</p> <p>c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang terpadu dengan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengurupan) Pulau Jawa</p> <p>d. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya ruangnya diluarasi</p> <p>f. menciptakan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan perliman pungan dan lahan yang berlimsi lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa</p> <p>g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p>
III. III.1.	Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa Jeruklegi-Cilacap-Sarang-Sampang-Danau-Kebond-	Arteri primer	<p>a. memantapkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa Jeruklegi-Cilacap-Sarang-Sampang-Danau-</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	<p>Purworejo Karangnunglo Wates Yogyakarta</p>		<p>Kebumen Purworejo Karangnunglo Wates Yogyakarta) untuk meningkatkan keterkaitan PKV Cilacap, PKV Yogyakarta, dan PKW Kebumen serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang melayani Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan serta kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan, industri, dan perikanan untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Dali</p> <p>c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang terpedu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa dan jaringan Jalur Kereta Api Lintas utara-selatan (penumpang) Pulau Jawa</p> <p>d. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan kawasan perkotaan musimal dengan Pelabuhan Tanjung Intan dan Bandar Udara Adisuarjipro</p> <p>e. mengundalkan perkembangan perukiman di sepanjang Jaringan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menular (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>f. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>g. menerapkan ketentuan mengenai pelatangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p>
III.2.	Luhur Cibitung; Simpang Bayah Palabuhanratu Baghagon Surade-Cegalbulud	Kolektor primer	<p>a. mempertahankan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa (Luhur Cibitung, Simpang Bayah Palabuhanratu-Baghagon-Surade-Cegalbulud) yang melayani PKW Palabuhanratu serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>b. mempertahankan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang melayani kawasan Adelan Sukabungri dan Sekelarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, dan pertambangan untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>c. memperdalam perkembangan pertumbuhan di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang nyata (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.	Kelapangcep-Pangandaran-Kalipucang, Jenuklegi	Kolektor primer	<p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang perkuasaan jalan</p> <p>a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa (Kelepagcep-Pangandaran-Kalipucang, Jenuklegi) yang melayani PKW Pangandaran serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang melayani Kawasan Andalan Priangan Turur-Pangandaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan peternakan untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa dan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (penguripan) Pulau Jawa</p> <p>d. memperdalikan perkembangan pertumbuhan di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang normal (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>a. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.4.	<p>Yogyakarta-Wonosari Rongkop (Baran) Pacitan Hadiwarno Panggul-Tenggalek-Tulung Agung Nitir Kepanjèn Talok Jembr-Glenmore-Wonorejo Jember-Glenmore-Banyuwangi</p>	Kolektor primer	<p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan <u>Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa</u></p> <p>g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p>
			<p>a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa (Yogyakarta-Wonosari Rongkop (Baran) Pacitan Hadiwarno-Panggul-Tenggalek-Tulung Agung-Blitar-Kepanjèn-Talok-Jembr-Glenmore-Wonorejo-Jember-Glenmore-Banyuwangi) untuk meningkatkan kerelaksanaan PKN Yogyakarta, PKW Pacitan, PKW Blitar, PKW Jember, dan PKW Banyuwangi serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang melayani Kawasan Andalan Yogyakarta dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Madura dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Kediri-Tulungagung-Blitar dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Malang dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, perkebunan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang dengan sektor unggulan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>pertanian, industri, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Situbondho-Bondowoso-Lember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan laut, dan Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian dan perikanan untuk mendukung daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa</p> <p>d. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan PKN Yogyakarta dengan Bandar Udara Adisutjipto</p> <p>e. meniadakan perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang menginduskasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>f. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya ditunasi</p> <p>g. menerapkan kerentanan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang mencerminkan ketuntasan ruang pengawasan jalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.	Tegalbuleud Cidaun Rancahluaya-Panneunjeureuk- Cipulujah Kelapugeneup	Strategis nasional	<p>a. memantapkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa (Tegalbuleud-Cidaun-Rancahluaya-Panneunjeureuk-Cipulujah Kelapugeneup) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya tarung lingkungan hidup; serta karaktersistik, jenis, dan potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Sukahumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya, bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciampis, serta bencana tsunami di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciampis</p> <p>b. mengendalikan perkembangan pertumbuhan di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang merambat (urban sprawl)</p> <p>c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan penyeimbangan ruangnya dibatasi</p> <p>d. menetapkan ketentuan mengenai pelatangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berhungsi lindung di sepanjang sisi Jalan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV. IV.1.	Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa Jember-Cilacap-Sarang	Aktor primer	<p>a. memantapkan jaringan jalan aktor primer pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (terdiri dari Cilacap-Sarang yang melayani PKN Cilacap serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali)</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan aktor primer pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang melayani Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perombangan, industri, dan perikanan untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa dan Jaringan Jalur kereta api lintas utara-selatan (perguruan) Pulau Jawa</p> <p>d. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menggabungkan PKN Cilacap dengan Pelabuhan Lautung Jember</p> <p>e. memantapkan perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>f. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya ruangnya dibatasi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.2.	Batas Bantén-Palabuhanratu- Bagéwan-Surade-Tegalbuléud	Kolektor primer	<p>g. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Jalinan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Dasar Bantén Palabuhanratu Bagéwan-Surade-Tegalbuléud) yang melayani PKW Palabuhanratu serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Dasar Bantén Palabuhanratu Bagéwan-Surade-Tegalbuléud) yang melayani Kawasan Audalan Sukabumi dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertanian, pariwisata, perkebunan, dan pertambangan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Batas Bantén-Palabuhanratu-Bagéwan-Surade-Tegalbuléud) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan terlinggah dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Sukabumi, rencana gempa bumi di Kabupaten Pandéglang, rencana gerakan tanah di Kabupaten Sukabumi, serta bencana tsunami di Kabupaten Sukabumi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.3.	Kelapagenep Pangandaran Kalipucang-Jeruklegi	Kolektor Primer	<p>d. mengedalikan perkembangan pertumbuhan di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Batas Banten-Palabuhanratu Baghagan Surade Tegalbulend) yang menitikberatkan terjadinya gejala perkotaan yang tidak wajar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan lingkup intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan mangrnya dibatasi</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai pelerangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan hutan lindung di sepanjang sisi Jalan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Batas Banten-Palabuhanratu-Baghagan Surade Tegalbulend)</p> <p>g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasaan jalan</p> <p>a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Kelapagenep-Pangandaran-Kalipucang-Jeruklegi) yang melayani PKW Pangandaran serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. memanfaatkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Kelapagenep-Pangandaran-Kalipucang-Jeruklegi) yang melayani kawasan Andalan Prangan Turur Pangandaran dengan aektor unggulan pertanian, industri, perkeluarga, pariwisata, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Kelapangep-Pangandaran-Kalipucang-Jeruklegi) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana alam di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Cilacap, bencana gempa bumi di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Cilacap, serta bencana tsunami di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Cilacap</p> <p>d. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Kelapangep-Pangandaran-Kalipucang-Jeruklegi) yang terpadu dengan angkutan jalur buseta api lintas selatan Pulau Jawa dan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpulan) Pulau Jawa</p> <p>e. memondalikan perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Kelapangep-Pangandaran-Kalipucang-Jeruklegi) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>f. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.1.	Rongkop (Baran) Pacitan Hadhwarno-Panggung	Kolektor primer	<p>g. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan hutan lindung di sepanjang sisi Jalan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Kelapengen-Pangandaran-Kalipucang-Jeruklegi)</p> <p>h. menetapkan zona terpadu lingkungan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Kongkop (Baran)-Pacitan-Hadhwarno-Panggung) yang melayani Kawasan memantapkan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang melayani PKW Pacitan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Kongkop (Baran) Pacitan Hadhwarno-Panggung) yang melayani Kawasan Andalas Madiun dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Kongkop (Baran)-Pacitan-Hadhwarno-Panggung) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan revitalisasi seani daya dukung dan daya tarung lingkungan hidup, serta karakteristik, cmas, dan potensi unggulan bencana/nabah longsor di Kabupaten Wonorejo dan Kabupaten</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.3.	Talak-Jagit	Kolektor Primer	<p>Pacitan, bencana banjir di Kabupaten Pacitan, bencana gempa bumi di Kabupaten Wonorejo, serta bencana gempa tanah di Kabupaten Pacitan</p> <p>d. memondialikan perkembangan perukiman di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Rongkop [Baran], Paciran [Madwaro Panggul]) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang mengalir (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan hutan lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Rongkop [Baran]-Pacitan-Madwaro-Panggul)</p> <p>g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang perijawaan jalan</p> <p>a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Talak Jagit) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Lumajang, bencana banjir di Kabupaten Burayung, serta bencana letusan gunung api di Kabupaten Lumajang</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.6.	Tegalbuleud Cidaun Karcabunya Pameungpeuk Cipatujah-Kelapaheuep	Strategis nasional	<p>b. Mengendalikan perkembangan pertumbuhan di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Saluk-Jamli) yang memindikasikan terjadinya gejala perkolatan yang menjalar (perlahan-sprawl).</p> <p>c. Memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi.</p> <p>d. Memerapkan ketentuan mengenai pelerangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan hutan lindung di sepanjang sisi Jalan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Saluk-Jamli).</p> <p>e. Menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.</p> <p>a. Memantapkan Jaringan Jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Tegalbuleud Cidaun Karcabunya Pameungpeuk-Cipatujah-Kelapaheuep) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, coas, dan potensi ancaman benuatanah longsor di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya, bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis, serta bencana tsunami di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis.</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.7.	<p>Sarang-Ayah-Jadri-Wayar-Karangungko-Congot-Bugel-Srandakan-Poncossari-Greges</p>	<p>Strategis nasional</p>	<p>b. mengedalikan perkembangan pertumbuhan di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Tegalhulud-Cidaun-Rancabuaya Pameungpeuk Cipatuyah Kelapagenepe) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban spiral</i>)</p> <p>c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengorbanan ruangnya dibatasi</p> <p>d. menampilkan kerentanan mengenai pelanggaran oleh fungsi kawasan pertanian pangan dan hutan lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Tegalhulud Cidaun Rancabuaya Pameungpeuk Cipatuyah Kelapagenepe)</p> <p>e. menetapkan partis serpadan lampunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang perizewasan jalan</p> <p>a. menampilkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau [Sarang-Ayah-Jadri-Wayar-Karangungko-Congot-Bugel-Srandakan-Poncossari-Greges] yang meliputi PKK Cilacap serta mendorong daya tarik perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. menetapkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Sarang Ayah Jadri Wayar-Karangungko-Congot-Bugel-Srandakan-Poncossari-Greges) yang melayani Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto,</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kebumen, Cilacap, dan Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan serta Kawasan Andalas Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Slarang-Ayah-Judri-Wawa-Karangongko-Congot-Bugel-Standakan-Puncusari-Greges) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan dayaampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Kulon Progo, serta bencana gempa bumi di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta</p> <p>d. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Slarang-Ayah-Judri Wawa Karangongko Congot Bugel Standakan Puncusari Greges) yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan Pelabuhan Tanjung Jatah</p> <p>e. memandirikan perkembangan permukiman di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Slarang-Ayah-Judri Wawa-Karangongko-Congot-Bugel-Standakan-Puncusari-Greges) yang mengindikasi terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.8.	Parangtritis Tugawarak Legundi Karungu-Baru-Tepus- Jerukwudel Rongkop (Baran)	Strategis nasional	<p>c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya ruangnya diluarasi</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan hutan lindung di sepanjang sisi Jalan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Parangtritis-Tugawarak-Legundi-Karungu-Baru-Tepus Jerukwudel Rongkop (Baran)) yang melayani kawasan Abdalan Yogyakarta dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Parangtritis Tugawarak Legundi Karungu-Baru-Tepus-Jerukwudel-Rongkop (Baran)) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana gempa bumi di Kabupaten Bantul dan bencana tsunami di Kabupaten Bantul</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.9.	Panggul-Pugil-Tenggalek	Strategis nasional	<p>c. mengedalikan perkembangan perumutan di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Paranggrinis-Tagawarak Legundi Kanigoro Baron Cepus Jerukwudel Rongkop [Baran]) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang memular (<i>urban sprawl</i>).</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi.</p> <p>e. menetapkan kerentanan mengenai pelanggaran alih fungsi kawasan pertanian pangan dan hutan lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Paranggrinis-Tagawarak Legundi Kanigoro Baron Cepus Jerukwudel Rongkop [Baran])</p> <p>f. menetapkan garis serpadan lapangan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang perizewasaan jalan.</p> <p>a. memantapkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Panggul-Pugil-Tenggalek) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan terlinggih dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Tenggalek, bencana banjir di Kabupaten Tenggalek, bencana gempa bumi di Kabupaten Tenggalek, dan bencana erakan tanah di Kabupaten Tenggalek</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.10.	Prigi Ngrejo Pantai Serang Wonogoro-Semandangbiru-Talok	Strategis nasional	<p>b. Mengendalikan perkembangan perumukan di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Panggul-Piggi-Tenggalek) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang monialar (<i>urban sprawl</i>).</p> <p>c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangya dibatasi.</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan hutan lindung di sepanjang sisi Jalan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Panggul-Piggi-Tenggalek).</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang mememtu ketentuan ruang pengawasan jalan.</p> <p>a. Memantapkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Piggi-Ngrejo-Pantai Serang-Wonogoro-Semandangbiru-Talok) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan dayaampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Malang, bencana letusan gunung api di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang, bencana gempa bumi di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang, serta bencana gerakan tanah di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang.</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. mengedalikan perkembangan perumutan di sepanjang Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Pripi-Ngrjo-Pantai Selang Wonngoro Sendangbiku Talok) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>turban sprawl</i>);</p> <p>c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan mangrnya dibatasi;</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai pelerangan alih fungsi kawasan pertanian pangan dan hutan lindung di sepanjang sisi Jalan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Pripi-Ngrjo-Pantai Selang-Wonngoro Sendangbiku Talok)</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p>
IV.11.	Janti-Puger-Sumberejo-Glenmore	Strategis nasional	<p>a. memanfaatkan Jaringan Jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Janti-Puger-Sumberejo-Glenmore) yang melayani Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan laut serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Janti-Puger-Sumberejo-Glenmore) untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi sesuai daya dukung dan daya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>tampung lingkungan hidup, serta karakteristik, jenis, dan potensi ancaman bencanarawan banjir di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi; rencana letusan gunung api di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember; bencana gempa bumi di Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, dan Kabupaten Banyuwangi, serta bencana gerakan tanah di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember</p> <p>c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa (Jatil-Puger-Sumhereto Glenmore) yang terpadu dengan Jaringan Jatur Kerato Api Lintas Utara-Selatan Pulau Jawa (Surabaya-Bangi-Tubolnggo-Jember-Banyuwangi)</p> <p>d. mengendalikan perkembangan perumahan di sepanjang Jaringan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Jatil-Puger-Sumhereto-Glenmore) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang marak (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. menetapkan ketentuan mengenai pelatiran alih fungsi kawasan pertanian pangan dan hutan lindung di sepanjang sisi jalan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa (Jatil-Puger-Surbereto-Glenmore)</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.	Jaringan Jalan Pengurupan Pulau Jawa		g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pernyawaan jalan
V.1.	Jaringan Jalan Pengurupan Pulau Jawa Jakarta Depok Bogor	A-tari primer	<p>a. merantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengurupan Pulau Jawa (Jakarta Depok Bogor) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>b. merantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengurupan Pulau Jawa (Jakarta-Depok-Bogor) yang melayani Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa dan Kawasan Andalan Bogor-Puncak-Cianjur (Kopunjur dan Sekelamya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>c. merantapkan jaringan jalan pengurupan Pulau Jawa (Jakarta Depok Bogor) untuk meningkatkan ketertarikan antar-kawasan di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, banjir, dan gempa bumi</p> <p>d. merantapkan jaringan jalan pengurupan Pulau Jawa (Jakarta-Depok-Bogor) yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa dan Jaringan Jalur kereta api perkotaan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.2.	Cikumppek Purwakarta Padalarang	Arteri primer	<p>e. menantapkan jaringan jalan pengurupan Pulau Jawa (Jakarta Depok Bogor) yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan Pelabuhan Tanjung Priuk,</p> <p>f. menaptakan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Jakarta-Depok-Bogor) yang mengundikan terjadinya gejala perkotaan yang menyerupai <i>urban sprawl</i>,</p> <p>h. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>i. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. menantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Cikumppek Purwakarta Padalarang) yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan PKW Cikumppek-Cikopo serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. menantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Cikumppek Purwakarta Padalarang) yang melayani kawasan Andalan Purwakarta-Subang-Karawang (Purwasuka) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan dan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan pekebumahserta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Cikarpep Purwakarta-Padalarang) untuk meningkatkan keterkaitan antar-kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana banjir di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta serta hencono gerakan tanah di Kabupaten Purwakarta</p> <p>d. merencanakan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Cikarpep-Purwakarta-Padalarang) yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawad dan jaringan jalur kereta api jalur pengumpulan Pulau Jawa (Dogur-Sukabumi-Cianjur-Padalarang)</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. mengundahkan perkembangan pertumbuhan di jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Cikarpep-Purwakarta-Padalarang) yang mengindikasikan terjalinya gejala perkotaan yang menjalar larbur <i>spreading</i></p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.3.	Cileunyi-Sumedang Kadipaten Palimanan	Arteri primer	<p>a. menantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Cileunyi-Sumedang-Kadipaten-Palimanan) yang melayani PKK Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan PKW Kadipaten serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. menantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Cileunyi-Sumedang-Kadipaten-Palimanan) melayani kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, perikanan, pariwisata, dan perkebunan serta kawasan Andalan Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciyunreja Kuning) dan Sekelarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambanganserta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>c. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Cileunyi-Sumedang-Kadipaten-Palimanan) untuk meningkatkan keterkaitan antar-kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka, kawasan rawan banjir di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka, kawasan rawan letusan gunung berapi di Kabupaten Majalengka, serta kawasan rawan gerakan tanah di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Majalengka</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.1.	Wangon Jeruklegi	Actri puter	<p>d. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Cileunyi-Sumedang-Kadipaten-Palimanan) yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpulan) Pulau Jawa (Kadipaten-Curbon dan Kiaracondong-Kancacok-Tanjungsari-Sirta-ati-Kadipaten) membentuk jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Cileunyi-Sumedang-Kadipaten-Palimanan) yang menghubungkan PKW dengan Bandara Udera Majalengka</p> <p>e. memembi ketertarikan ruang pengawasaan jalan mengendalikn perkembangan permukiman di bagian jalan pengumpulan Pulau Jawa (Cileunyi-Sumedang-Kadipaten-Palimanan) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang memalar (urban sprawl)</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan maksimal dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. melarung alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>h. memantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Wangon-Jeruklegi) yang melayani kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Juwokerto, Kebuncci, Cilacap dan Sekelamye) dengan akses unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.5.	Purwokerto-Kawalo	Arteri primer	<p>b. menantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Wangon Jeruklegi) untuk meningkatkan keterkaitan antar-kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor di kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas, bencana banjir di Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas, bencana gempa bumi di Kabupaten Cilacap, serta bencana gerakan tanah di Kabupaten Banyumas</p> <p>c. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>d. mengundutkan perkembangan pemukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Wangon Jeruklegi) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang memalar (urban sprawl)</p> <p>e. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>f. melarung alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. menantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Purwokerto-Kawalo) yang melayani PKA Purwokerto serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. menantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Purwokerto-Kawalo) yang melayani Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Tuh</p> <p>c. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Purwokerto-Kawalo) untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, bencana banjir, bencana gempa, dan bencana gerakan tanah</p> <p>d. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Purwokerto-Kawalo) yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan Pulau Jawa (Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya)</p> <p>e. menantapkan garis supradan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi kelenturan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. mengandolikan perkembangan perhubungan di jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Purwokerto-Kawalo) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>g. merbarasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat utilisitas menengah dan tinggi</p> <p>h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.6.	Semarang Ungaran Bawen	Arteri primer	<p>a. menantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Semarang-Ungaran-Bawen) yang melayani PKY Kawasan Perkotaan Kelungsepur serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. meruntuhkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Semarang Ungaran Bawen) yang melayani Kawasan Andalan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi (Kelungsepur) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>c. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Semarang-Ungaran Bawen) untuk meningkatkan keterkaitan antar-kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi, dan gempa tanah</p> <p>d. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Semarang Ungaran-Bawen) yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Selatan Pulau Jawa (Kedungori Ambarawa Magelang Yogyakarta)</p> <p>e. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Semarang-Ungaran Bawen) yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.7.	Secang-Magelang-Sleman-Yogyakarta	Arteri primer	<p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. mengundulikan perkembangan pertumbuhan di jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Semarang-Lngarang-Bawen) yang mengindikasikan terjalunya gejala perkotaan yang irregular (<i>barbar sprawl</i>)</p> <p>h. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>i. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. merencanakan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Secang Magelang Sleman Yogyakarta) yang melayani PKN Yogyakarta, PKW Sleman, dan PKW Magelang serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Tali</p> <p>b. merencanakan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Secang-Magelang-Sleman-Yogyakarta) yang melayani Kawasan Yogyakarta dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan dan kawasan Borobudur dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Tali</p> <p>c. merencanakan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Secang-Magelang-Sleman-Yogyakarta) untuk meningkatkan keterkaitan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>anta-kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Sleman, bencana letusan gunung berapi di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Sleman, serta rencana gerakan tanah di Kabupaten Magelang</p> <p>d. merencanakan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Secang-Magelang Sleman Yogyakarta) yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara-Selatan Pulau Jawa (Parakan-Secang, Kedungdi-Arbanawa Magelang Yogyakarta, dan Borobudur Yogyakarta Parangliris)</p> <p>e. merencanakan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Secang-Magelang-Sleman-Yogyakarta) yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan Bandar Udara Ali Suljpto,</p> <p>f. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang mencukupi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. mengandolikan perkembangan pertumbuhan di jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Secang Magelang Sleman Yogyakarta) yang mengindikasikan terjadinya segala perkotaan yang terdistribusi secara <i>spatial</i></p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.8.	Yogyakarta-Prambanan-Klaten-Kartasura	Arteri primer	<p>h. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>i. meluangkan alih fungsi kawasan perlintasan pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. mengantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Yogyakarta Prambanan Klaten Kartasura) yang melayani PKN Yogyakarta dan PKW Klaten serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. mengantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Yogyakarta Prambanan Klaten Kartasura) yang melayani Kawasan Andalan Yogyakarta dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan dan Kawasan Andalan Subosuko Wobosraten dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>c. mengantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Yogyakarta Prambanan Klaten Kartasura) untuk meningkatkan kelerakitan anta-kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.9.	Gempol Malang	Ateri primer	<p>d. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Yogyakarta-Prambanan-Klaten-Kartosuro) yang terdiri dengan arahan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa dan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpulan) Pulau Jawa (Pakakan-Secang, Kedungjati-Anyarbaruwa Magelang-Yogyakarta, dan Tambudur-Yogyakarta Parangtritis)</p> <p>e. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Yogyakarta-Prambanan-Klaten-Kartosuro) yang menggabungkan kawasan perkotaan nasional dengan Tandar Widara Adi Sutjipto</p> <p>f. menetapkan garis simpulan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. mengendaliklan perkembangan permukiman di bagian jalan pengumpulan Pulau Jawa (Yogyakarta-La-Prambanan-Klaten-Kartosuro) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menalar [urban sprawl]</p> <p>h. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>i. melarabg alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. menantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Gempol-Malang yang melayani PKN Malang serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. menantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Gempol-Malang yang melayani Kawasan Andalan Gresik Tangkalan Mufukerto Surabaya Sidoarjo Lamongan [Cibangkretasusila], dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata, Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Luragung dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata, dan Kawasan Andalan Malang dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, perkebunan, dan pariwisata serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>c. menantapkan jaringan jalan pengumpul Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, bencana banjir, bencana gempa bumi di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang, dan bencana gerakan tanah di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Malang</p> <p>d. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan Dandar Udara Abdulrachman Saleh;</p> <p>e. menciptakan garis simpangan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.10.	Serang Pandeglang	Kolektor primer	<p>f. mengendalikan perkembangan pertumbuhan di jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang mengindikasikan terdapatnya gejala perkotaan yang terjalur (urban sprawl)</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Serang-Pandeglang yang melayani PKN Serang dan PKW Pandeglang serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>b. merencanakan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Serang-Pandeglang yang melayani Kawasan Andalan Bojonegara Merak Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>c. memantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana banjir di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, di Kabupaten Pandeglang, serta bersama gruppe bumi di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.11.	Jakarta Ciputat, Bogor	Kolektor primer	<p>d. menciptakan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>e. mengundulikan perkembangan pertumbuhan di jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar <i>(urban sprawl)</i></p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. inelastis alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan budidaya di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. menempatkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Jakarta-Ciputat-Bogor yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>b. menempatkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Jakarta-Ciputat-Bogor yang melayani Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perdagangan, dan jasa dan Kawasan Andalan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopuncjur dan sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, dan peternakan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.12.	Ciawi-Puncak-Cianjur	Kolektor primer	<p>c. menantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antar-kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana banjir, gempa bumi, dan erukan lumpur</p> <p>d. menantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara-dan Selatan serta jalur kereta api perkotaan</p> <p>e. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. mengundalkan perkembangan pemukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menalar (urban sprawl)</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. menantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Ciawi-Puncak-Cianjur yang melayani Kawasan Andalan Bogor Puncak Cianjur (Nopunjur dan Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, dan perkotaan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.13.	Lohbener-Indramayu Cirebon	Kolektor primer	<p>b. menantapkan jaringan jalan pengumpul Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antar-kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, gempa bumi, dan erosi tanah</p> <p>c. menantapkan jaringan jalan pengumpul Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara-Selatan Pulau Jawa (Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang)</p> <p>d. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>e. mengidentifikasi perkembangan pemukiman di bagian jalan pengumpul Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menalar <i>(urban sprawl)</i></p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>h. menantapkan jaringan kolektor primer pada bagian jalan pengumpul Pulau Jawa Lohbener-Indramayu-Cirebon yang melayani PKN Cirebon dan PKW Indramayu serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>i. menantapkan jaringan jalan kolektor primer pada bagian jalan pengumpul Pulau Jawa Lohbener-Indramayu-Cirebon yang melayani</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kawasan Andalan Clayungan Kuning dan Selatarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Tuli</p> <p>c. menantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana banjir di Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon</p> <p>d. memantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jayawang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara-Selatan Pulau Jawa [Indramayu Jatibarang, Kadipaten Cirebon, dan Cirebon Priyuk Purwokerto-Kroya]</p> <p>e. memantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan/dalubahan Arjuna (Cirebon) dan Bandar Udara Cokrabuwana</p> <p>f. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. mengandalikan perkembangan pertumbuhan di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang urut-urutan (urban sprawl)</p> <p>h. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengab dan tinggi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.14.	Rajapolah-Tasikmalaya-Ancol	Kolektor Primer	<p>i. melarab alih fungsi kawasan pertanian paugan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. merantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Rajapolah-Tasikmalaya-Ancol yang melayani PKW Tasikmalaya serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Rajapolah-Tasikmalaya-Ancol yang melayani Kawasan Andalan Priangan Timur Pengendalian dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>c. memantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan gerakan tanah</p> <p>d. merantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa</p> <p>e. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasaan jalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.15.	Darat Kalipucang	Kolektor primer	<p>f. mengendalikan perkembangan pertumbuhan di lingkungan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang mengindikasikan terdapatnya gejala perkotaan yang terjalur (urban sprawl)</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. mempertahankan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Banjar-Kalipucang yang melayani kawasan Andalan Priangan Timur Pangandaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkuburan, pariwisata, dan rekreasi serta mendorong daya tarik perkembangan di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. mempertahankan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan maksimal di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan gesekan tanah</p> <p>c. mempertahankan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara-Selatan Pulau Jawa (Cijulang-Pangandaran Nanyar)</p> <p>d. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang mencukupi kebutuhan ruang pengawasan jalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
Y.16.	Tegal Slawi Pupuk Ajiharang Wangon	Kolektor primer	<p>e. mengendalikan perkembangan pertumbuhan di jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang mengindikasikan terdapatnya gejala perkotaan yang terjalur (urban sprawl)</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Tegal-Slawi-Pupuk-Ajiharang-Wangon yang melayani PKW Tegal serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Tegal Slawi Pupuk Ajiharang Wangon yang melayani Kawasan Andalan Brebes dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan dan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Surwokerto, Kebunrejo, Cilacap dan Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>c. memantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa untuk meningkatkan keretakan antar kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.17.	Ajlbarang-Purwokerto-Banyumas	Kolektor primer	<p>longsor di Kabupaten Banyumas, kawasan sawah banjir di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Banyumas dan bencana gempa tanah di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas</p> <p>d. menantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Selatan Pulau Jawa (Tegal-Pupuk dan Cirebon-Pupuk-Purwokerto-Kroyak), Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Ajibarang-Purwokerto-Banyumas), dan jalan bebas hambatan antarkota (Pekalongan-Pemalang dan Pekalongan-Culacap)</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. mengundalkan perkembangan perukiman di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengimbikasikan terjadinya gejala perkotaan yang acak-arak (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>g. memperbaiki pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. malarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. menantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Ajibarang-Purwokerto-Banyumas yang melayani PKW Purwokerto serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. menantapkan arungan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Ajarang-Purwokerto-Banyuwangi-melalui Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto-Kebumen, Cilacap dan Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perluembangan, industri, dan perkumahaerta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>c. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa untuk meningkatkan ketertarikan antar kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, banjir, dan gerakan tanah</p> <p>d. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api lintas Utara-Selatan Pulau Jawa (Cirebon-Pupuk-Purwokerto-Kroya)</p> <p>e. menantapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. mengandolikan perkembangan pemerintahan di jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar <i>(urban sprawl)</i></p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat utilisitas menengah dan tinggi</p> <p>h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.18.	Yogyakarta Bantul Greges Parangtritis	Kolektor primer	<p>a. menantapkan arungan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Yogyakarta-Bantul-Greges-Parangtritis yang melayani PKN Yogyakarta dan PKW Bantul serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. merantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Yogyakarta Bantul Grege Parangtritis yang melayani Kawasan Andalan Yogyakarta dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>c. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara</p> <p>d. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Selatan Pulau Jawa (Kedungjati Ambarawa Magelang Yogyakarta dan Borobudur Yogyakarta Parangtritis)</p> <p>e. menerapkan pola ampunan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasaan jalan</p> <p>f. mengundulikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menular (urban sprawl)</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.19.	Tuban-Sadang-Gresik	Kolektor primer	<p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. melarang alih fungsi kawasan perlakuan pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. menantapkan arungan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Tuban Sadang Gresik yang melayani PKW Tuban dan Gresik (PKW Kawasan Perkoran Gerbangkertosusila) serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Tuban Sadang Gresik yang melayani Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan dan Kawasan Andalan Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan (Gerbangkertosusila) dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>c. memantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana banjir dan gerakan tanah</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.20.	Widang-Bojonegoro-Padangan- Ngawi-Madiun-Caruban	Kolektor primer	<p>d. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jayayang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawad dan Jaringan Jalur Kereta Api Perkolatan Garbungkertosuda</p> <p>e. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan Pelabuhan Gresik,</p> <p>f. menerapkan pola sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. mengundulkan perkembangan pertumbuhan di bagian jalan pengumpulan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menyebar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>h. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>i. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. menantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Widang-Bojonegoro-Padangan-Ngawi-Madiun-Caruban yang melayani PKW Bojonegoro dan PKW Madiun serta mendorong daya tarik perkembangan di Pulau Jawa Tali</p> <p>b. menantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Widang-Bojonegoro-Padangan-Ngawi-Madiun-Caruban yang melayani Kawasan Andalan Cukuh Bojonegoro dengan aktor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan dan Kawasan Andalan Madiun dan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.21.	Kertosono-Kediri- Tulung Agung	Kolektor primer	<p>Selengkapnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>c. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana gersakan tanah di Kabupaten Bojonegara, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Madiun</p> <p>d. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>e. mengendaliklan perkembangan permukiman di bagian jalan pengumpulan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang merajal (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. menantapkan arungan jalan kolektor primer pada bagian jalan pengumpulan Pulau Jawa Kertosono-Kediri- Tulung Agung yang melayani PKW Kediri serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. menantapkan arungan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Kerinci-Kediri-Tulung Agung yang melayani Kawasan Andalan Kediri Tulungagung Blitar dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, pertambangan, dan pariwisata serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Tuli</p> <p>c. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Ngaruk dan Kabupaten Kediri, bencana banjir di Kabupaten Ngaruk, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Tulungagung, bencana gempa bumi di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung, dan bencana kekacauan tanah di Kabupaten Ngaruk, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Tulungagung</p> <p>d. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang terpadu Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Selatan Pulau Jawa (Keretaan Kediri Tulungagung-Blitar-Malang-Bangli)</p> <p>e. menerapkan peris sempurna bangunan di atas jalan nasional yang memenuhi ketertarikan ruang pengawasaan jalan</p> <p>f. mengundalkan perkembangan pemukiman di jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang mengarah <i>(urban sprawl)</i></p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.22.	Mojokerto Gempol	Kolektor primer	<p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. melarang alih fungsi kawasan perumahan pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. merantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Mojokerto-Gempol yang melayani PKA Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila serta mendukung daya saing, perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>b. mengantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Mojokerto Gempol yang melayani Kawasan Andalan Gresik Rangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan (Gerbangkertosusila) dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>c. merantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana rawan banjir</p> <p>d. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang mencermahi kebutuhan ruang pengawasaan jalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.23.	Malang-Kepanjen	Kolektor Primer	<p>e. mengendalikan perkembangan pertumbuhan di lingkungan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang mengindikasikan terdapatnya gejala perkotaan yang terjalur (urban sprawl)</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. mempertahankan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Malang Kepanjen yang melayani PKK Malang serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>b. mempertahankan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Malang Kepanjen yang melayani Kawasan Andalan Malang dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, perkebunan, dan pariwisata serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>c. mempertahankan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, gempa bumi, dan gerakan tanah</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.21.	Pembolinggo Wimaraju	Kolektor primer	<p>d. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jayayang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api lintas Utara-Selatan Pulau Jawa (Kertosono Kediri Tulungagung Blitar Malang Bangil dan Malang Dairipi)</p> <p>e. meruntuhkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan Bandar Udara Abdulrachman Saleh,</p> <p>f. menelapkan garis simpadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketertaman ruang pengawasan jalan</p> <p>g. mengendalikn perkembangan pertumbuhan di bagian jalan pengumpulan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang meajar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>h. merbasasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>i. melarabg alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>ii. meruntuhkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Probolinggo-Wonorejo yang melayani PKW Probolinggo serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. menantapkan arungan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Probolinggo-Winorejo yang melayani Kawasan Andalan Probolinggo Pusruban Lumajang dengan sektor angkutan pertanian, industri, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>c. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa untuk meningkatkan ketertarikan antar kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, bencana banjir di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, bencana gempa bumi di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, dan bencana gempa tanah di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang</p> <p>d. meruntuhkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Selatan Pulau Jawa [Surabaya-Bangi-Probolinggo-Jember-Banyuwangi]</p> <p>e. menerapkan Paris sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketertarikan ruang pengawasaan jalan</p> <p>f. mengundalkan perkembangan pemukiman di jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perbatasan yang menarik [urutan serempak]</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.25.	Srono Muncar	Kolektor primer	<p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. meruntuhkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Srono-Muncar yang melayani JKW Banyuwangi serta mendirikan daya saing perkomunitas di Pulau Jawa Bali</p> <p>b. meruntuhkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Srono Muncar yang melayani Kawasan Andalan Banyuwangi dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pertanian serta mendorong daya saing perkomunitas di Pulau Jawa Bali</p> <p>c. meruntuhkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, bencana banjir, bencana gempa bumi dan bencana erupsi gunung</p> <p>d. meruntuhkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang terpadu dengan jaringan Jabar Kereta Api Lintas Utara Selatan Pulau Jawa [Surabaya-Bangal-Probolinggo-Jember-Banyuwangi]</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V-26.	Merak Bojonegara Cillegon	Strategi nasional	<p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. mengundulikan perkembangan permukaan di jurangan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala <i>perkolatan yang menjalar (berban sprawl)</i></p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. inelarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. memantapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Merak Bojonegara Cillegon yang melayani PKV Cillegon serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Merak Bojonegara Cillegon yang melayani Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cillegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>c. memantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana gempa bumi dan tsunami</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>d. menetapkan jaringan jalan pengumpaan Pulau Jawa yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional Pelabuhan Tanjunggara, Pelabuhan Meruk</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. mengendalikan perkembangan pertumbuhan di jaringan jalan pengumpaan Pulau Jawa yang mengindikasi terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p>
V.27.	Cikande Karangasbitung	Strategis nasional	<p>a. menetapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpaan Pulau Jawa Cikande-Karangasbitung yang melayani PKW Karangasbitung serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. menetapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpaan Pulau Jawa Cikande-Karangasbitung yang melayani kawasan Andalan Bojonegara-Morak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.28.	Cipanas Cilelok Buyub	Strategis nasional	<p>c. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antar-kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara untuk meningkatkan keterkaitan antar-kawasan sesuai potensi ancaman bencana gempa bumi</p> <p>d. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa (Merak-Cilegon-Sarang-Kangkas-Buang-Jakarta)</p> <p>e. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi kebutuhan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. mengundalkan perkembangan pemukiman di jajaran jalan pengumpulan Pulau Jawa yang mengindikasikan teradanya gejala perkotaan yang menalar <i>urban sprawl</i></p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. melarang alih fungsi kawasan peruntukan pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. menantapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Cipanas-Cilelok-Bayah untuk meningkatkan keterkaitan antar-kawasan sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, gempa bumi, dan gerakan tanah</p> <p>b. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi kebutuhan ruang pengawasan jalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.29.	Canggerang Serpong Pamulang-Ciputat	Strategis nasional	<p>c. mengendalikan perkembangan pertumbuhan di lingkungan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang mengoptimalkan terdapatnya segala perkotaan yang terjalur (berbentuk sprawl)</p> <p>d. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>e. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan konservasi Taman Nasional Halimun-Salak di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. memantapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Tangerang-Serpong-Pamulang-Ciputat yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Tangerang Serpong Pamulang Ciputat yang melayani Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>c. memantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antar-kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana banjir dan gempa bumi</p> <p>d. memantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. mengundulikan perkembangan pertumbuhan di jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala <i>perkolatan yang menjalar (urban sprawl)</i></p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. memelihara alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan budidaya di sepanjang sisi jalan</p>
V.30.	Cikampek Cilamaya		<p>a. mempertahankan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Cikampek Cilamaya) yang melayani PKW Cikampek-Cikopo serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>b. mempertahankan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Cikampek-Cilamaya) yang melayani Kawasan Andalas Purwasuka dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>c. mempertahankan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Cikampek-Cilamaya) untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan di Pulau Jawa bagian utara dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, gelombang pasang, banjir, dan abrasi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.31.	Cibadak-Bagbagau	Strategis nasional	<p>d. memantapkan jaringan jalan pengurupan Pulau Jawa (Cikampek Cilamaya) yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengurupan) Pulau Jawa (Cikampek Cilamaya), Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa</p> <p>e. memantapkan jaringan jalan pengurupan Pulau Jawa (Cikampek Cilamaya) yang menghubungkan PKW Cikampek-Cikopo dengan Pelabuhan Cilamaya</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengurupan Pulau Jawa (Cikampek Cilamaya) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>h. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>i. melarang alih fungsi kawasan permukiman dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. memantapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengurupan Pulau Jawa Cibadak-Bagbagau yang melayani PKW Palabuhanratu serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.32.	Bandung-Sorang-Rancajali-Cidaun	Strategis nasional	<p>b. menantapkan bagian jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Cibadak-Nagbagan yang melayani Kawasan Andalan Sukabumi dan Selatannya dengan sektor unggulan pertanian, pertanian, pariwisata, dan perkubunan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>c. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan gerakan tanah</p> <p>d. menetapkan axis simpadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>e. mengabdikan perkembangan perukiman di jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menyebar (<i>widen spread</i>)</p> <p>f. memulisi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. melarab alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. menantapkan bagian jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Bandung-Sorang-Rancajali Cidaun yang melayani PKY Kawasan Perkotaan Bandung Raya serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. menantapkan bagian jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Bandung-Surabaya-Rancabali-Cidau yang melayani Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan serta mendorong daya tarik perkomoran di Pulau Jawa Tuli</p> <p>c. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur, bencana banjir di Kabupaten Bandung, bencana gempa bumi di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur, serta bencana gerakan tanah di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur</p> <p>d. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan Bandar Udara Internasional Susterungara</p> <p>e. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang mencukupi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. mengendalikan perkembangan pertumbuhan di jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang tidak terencana (urban sprawl)</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.33.	Cirebon-Kuningan-Ciauis	Strategis nasional	<p>h. melarabg alih fungsi kawasan pertanian paugan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. merantapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpam Pulau Jawa Cirebon Kuningan Ciauis yang melayani PKY Cirebon serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. meruntapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpam Pulau Jawa Cirebon Kuningan Ciauis yang melayani kawasan Andalan Cirebon-Indrauw-Majalengka-Kuningan (Ciyumaja Kuning; dan sekitarnya dengan aktor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan dan Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>c. merantapkan jaringan jalan pengumpam Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi unggulan bernama tanah longsor di kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciauis, bocoran banjir di Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Ciauis, serta bencana gerakan tanah di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Ciauis</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.34.	Pekalongan-Wonosobo	Strategis nasional	<p>d. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Selatan Pulau Jawa (Kudipaten Cirebon dan Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya)</p> <p>e. merantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa yang menghubungkan kawasan perkotaan nasional dengan Pelabuhan Ajuna (Cirebon) dan Bandar Udara Cakrabhuwana</p> <p>f. menetapkan garis simpadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. mengundalkan perkembangan pertumbuhan di bagian jalan pengumpulan Pulau Jawa yang mengindikasikan terdapatnya gejala perbatasan yang megal (urban sprawl)</p> <p>h. meribasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>i. melarab alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. menantapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Pekalongan-Wonosobo yang melayani PKW Pekalongan dan PKW Wonosobo serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. menantapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Pekalongan-Wonosobo yang melayani kawasan Andalan Brebas (Brebes-Tegal-Slawi) dengan sektor unggulan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>pertanian, kebencanaan, industri, dan perikanan dan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan Sekelarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perikanan, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>c. memantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai format ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo, bencana banjir di Kabupaten Pekalongan, serta bencana gerakan tanah di Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Wonosobo</p> <p>d. memantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Selatan Pulau Jawa (Wonosobo Purwokerto)</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawaan jalan</p> <p>f. mengandalikan perkembangan perhubungan di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perombaan yang menalar (<i>urban sprawl</i>)</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.35.	Rerintang Nlora Cepu Padangan	Strategis nasional	<p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. meluangkan alih fungsi kawasan perlintasan pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. memantapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Kembang-Blora-Cepu-Padangan untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali yang melayani kawasan Andalan Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora (Wanarakuti) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, dan perikanan</p> <p>c. memantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Bojonegoro, bencana banjir di Kabupaten Bojonegoro, dan bencana gerakan tanah di Kabupaten Bojonegoro</p> <p>d. memantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa yang terhubung dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, dan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Jalanan Jalur Kereta Api Lintas Utara Selatan Pulau Jawa (Cepu Blora-Purwodadi-Demak-Kudus-Luwansa-Reribang dan Reribang-Blora Cepu)</p> <ul style="list-style-type: none"> c. menaptakan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan f. mengendalikn perkembangan pertumbuhan di jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengakibatkan terjadinya gejala perkotaan yang unjalar (urban sprawl) g. membarasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. melarung alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
V.36.	Madiun Ponorogo Trenggalek	Strategis nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. menantapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Madiun-Ponorogo-Trenggalek untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali yang melayani PKW Madiun b. merantapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa Madiun-Ponorogo-Trenggalek untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali yang melayani Kawasan Andalan Madiun dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. menantapkan jaringan jalan pengunipan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antar-kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Madhu dan Kabupaten Ponorogo, bencana banjir di Kabupaten Madhu dan Kabupaten Trenggalek, bencana gempa bumi di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Trenggalek, serta bencana gerakan tanah di Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Trenggalek</p> <p>d. memantapkan jaringan jalan pengunipan Pulau Jawa untuk melayani kolaborasi arus distribusi/koleksi barang dan jasa yang terhubung dengan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Selatan Pulau Jawa (Stasiun Madhuri)</p> <p>e. menetapkan Paris Arrpadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. mengidentifikasi perkembangan pertumbuhan di jaringan jalan pengunipan Pulau Jawa yang mengindikasikan terdapatnya gejala perkotaan yang meq,alar (urban sprawl)</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. inelarang alih fungsi kawasan perikanan pangan dan kawasan budung di sepanjang sisi jalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.37.	Situbondo Garduatale Banyuwangi	Strategis nasional	<p>a. menantapkan bagian jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Situbondo-Garduatale-Banyuwangi untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali yang melayani PKW Banyuwangi</p> <p>b. merantapkan jaringan jalan strategis nasional pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa Situbondo Garduatale Banyuwangi untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali yang melayani Kawasan Adalam Situbondo-Bondowoso-Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, perikanan, dan pariwisata dan kawasan Adalam Banyuwangi dan Sekelarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pertanian</p> <p>c. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan di Pulau Jawa bagian selatan dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian tengah dan Pulau Jawa bagian utara sesuai potensi ancaman bencana bencana tanah longsor di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi, bencana banjir di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi, bencana gempa bumi di Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi, dan bencana tanah di Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI. VI.1.	Jaringan Jalan di Pulau Madura Kamal Tangkalan Sampang Pamekasan-Surabaya-Kaliangsi	Akar primer	<p>d. menantapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa yang terhubung dengan jaringan jalur kereta api lintas Utara Selatan Pulau Jawa (Surabaya-Bangi-Probolinggo-Jember-Banyuwangi dan Panarukan-Situbundu Kulihsari)</p> <p>e. menerapkan pola sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. mengundalkan perkembangan pertumbuhan di bagian jalan pengumpan Pulau Jawa yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang nyata (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>n. menantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan di Pulau Madura (Kamal-Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Surabaya-Kaliangsi yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkearsua dan PKW Pamekasan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. menantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan di Pulau Madura (Kamal-Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Sumenep-Kaliangget) yang melayani Kawasan Andalan Gerbangertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata, Kawasan Andalan Madura dan kepulauan dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, dan perikanan, serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>c. menantapkan jaringan jalan di Pulau Madura (Kamal-Bangkalan-Sampang Pamekasan Sumenep Kaliangget) untuk meningkatkan keterkaitan antarkawasan di Pulau Madura</p> <p>d. menantapkan jaringan jalan di Pulau Madura (Kamal-Dangkalan-Sampang Pamekasan Sumenep Kaliangget) yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpang) Pulau Jawa (Kamal-Bangkalan-Pamekasan-Sumenep dan Kamal-Dangkalan-Tanjung Buntar)</p> <p>e. meruntuhkan jaringan jalan di Pulau Madura (Kamal Dangkalan Sampang Pamekasan Sumenep Kaliangget) yang menghubungkan PKY Kawasan Perkotaan Gerbangertosusila dengan Pelabuhan Tanjung Bumi Canggih Duhupandan dan PKW Pamekasan dengan Pelabuhan Branta</p> <p>f. menciptakan garis sumpadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasaan jalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.2.	Bangkalan-Lanjut-Bumi	Strategis nasional	<p>g. mengendalikan perkembangan permukiman di Jaringan Jalan Pulau Madura yang mengintensifkan terjadinya pola perkotaan yang menjalar <i>(urban sprawl)</i></p> <p>h. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>i. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. menetapkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Pulau Madura Pengkolan Tanjung Bumi yang melayani Bangkalan (PKY Kawasan Perkotaan Gerbangkeparausila) serta mendorong daya saing perkotaan di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. menetapkan jaringan jalan strategis nasional pada Jaringan Jalan Pulau Madura Bangkalan-Lanjut-Bumi yang melayani Kawasan Andalan Gerbangkeparausila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata dan Kawasan Andalan Madura dan kepulauan dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, dan perikanan serta mendorong daya saing perkembangan di Pulau Jawa-Bali</p> <p>c. menetapkan Jaringan Jalan Pulau Madura untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>d. menantapkan Jaringan Jalan Pulau Madura untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/ menuju Pelabuhan Tanjung Burri, Pelabuhan Tanjung Batu Pundan, jaringan jalur kereta api lintas Utara-Selatan Pulau Jawa (Kamal-Bangkalan-Tanjung Burri)</p> <p>e. menerapkan pola sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. mengundalkan perkembangan permukiman di Jaringan Jalan Pulau Madura yang mengindikasikan terjadinya gejala parkoran yang menjalar (urban sprawl)</p> <p>g. memperbaiki pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p>
VII.	Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali		
VII.1.	Giliranuk Celik Negara Tabanan-Mengwitani-Berlingkit-Depasas-;obpati-Kusamba-Angentelu Padanghai	Arteri primer	<p>a. menantapkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Bali Selatan Giliranuk-Celik-Negara-Tabanan-Mengwitani-Berlingkit-Depasas-;obpati-Kusamba-Angentelu-Padanghai yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKW Semarapura, dan PKW Negara serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. menantapkan jaringan jalan arteri primer pada Jaringan Jalan Lintas Bali Selatan Giliranuk Celik Negara Tabanan Mengwitani Berlingkit Depasas-;obpati-Kusamba-Angentelu-Padanghai yang melayani</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
VIII.1.	Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Bali Cekak-Seririt-Singaraja- Kubulanbaban-Amlapura- Angentelu	Kolektor primer	<p>Kawasan Denpasar Ubud Kintamani (Bali Selatan) dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>c. menantapkan Jaringan Jalan Lintas Bali Selatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menjuju Pelabuhan Bena, Bandar Udara Ngurah Rai, jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Singaraja-Bedugul-Mengwitani), jalan bebas hambatan, dan jaringan transportasi penyeberangan (Banyuwangi-Gilimanuk dan Padangbai-Lembah)</p> <p>d. menetapkan serta siap-sedia bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasaan jalan</p> <p>e. mengundalkan perkembangan perukiman di Jaringan Jalan Lintas Bali Selatan yang mengindikasikan terdahnya jejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan konservasi Taman Nasional Bali Barat di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. menantapkan jaringan jalan kolektor primer pada Jaringan Jalan Lintas Bali Utara Cekak-Seririt-Singaraja-Kubulanbaban-Amlapura-Angentelu yang melayani PKW Singaraja serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. menantapkan jaringan jalan kolektor prurer pada Jaringan Jalan Lintas Bali Utara Cakle-Serih-Singaraja-Kuburubahan-Arlapura-Angentelu yang melayani Kawasan Andalas Singaraja dan Sekitarnya (Bali Utara) dengan skto: unggulan pariwisata, pertanian dan perikanan dan Kawasan Andalas Denpasar Ubud Kintamani (Bali Selatan) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perkonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>c. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Bali Utara untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Dangli, dan Kabupaten Karang Asem, bencana banjir di Kabupaten Buleleng, kawasan rawan letusan gunung berapi di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karang Asem, bencana gempa bumi di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Karang Asem, serta bencana gerakan tanah di Kabupaten Buleleng, Kabupaten Dangli, dan Kabupaten Karang Asem</p> <p>d. memantapkan Jaringan Jalan Lintas Bali Utara untuk meyakini klacaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa yang terhubung dengan jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Singaraja Pedungul Mengsitani), jalan bebas hambatan anarkota (Gilimanuk Negara dan Tohpati-Kusurba-Palangbai), dan jaringan transportasi penyeberangan (Ranyuwangi Gilimanuk dan Padangbai Lembar,</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IX. IX.1.	Jaringan Jalan Pengumpulan Pulau Bali Denpasar-Tuban	Arteri primer	<p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasaan jalan</p> <p>f. mengundulikan perkerbangun perkerbangun di jaringan Jalan Lintas Bali Utara yang mengoptimalkan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar [urban sprawl]</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. inclaring alih fungsi kawasan pertanian pangan dankawasan konservasi Taman Nasional Bali Barat di sepanjang sisi jalan</p>
			<p>a. menetapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Denpasar-Tuban) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. menetapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Denpasar-Tuban) yang melayani Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>c. menetapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Denpasar-Tuban) untuk meningkatkan keterkaitan antar-kawasan di Pulau Bali sesuai potensi ancaman bencana banjir, gempa bumi, dan tsunami</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IX.2.	Simpang Lapangan Terbang Tuwu Ngurah Rai	Asteri primer	<p>d. menantapkan jaringan jalan pengurupan Pulau Bali (Denpasar-Lubau) yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasaan jalan</p> <p>f. mengendalikan perkembangan pertumbuhan di jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Denpasar-Lubau) yang mengundikan terjadinya gejala perkotaan yang melalui <i>terbuka sprong</i></p> <p>g. membarasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>a. menantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Simpang Lapangan Terbang-Tuwu Ngurah Rai) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. menantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Simpang Lapangan Terbang-Tuwu Ngurah Rai) yang melayani Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan pertambangan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>c. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Simpang Lapangan Terbang Tuwu Ngurah Rai) untuk meningkatkan keterkaitan antar-kawasan di Pulau Bali sesuai potensi ancaman bencana banjir, gempa bumi, dan tsunami</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IX.3.	Simpang Pesanggaran-Sirpang Samur-Simpang Tohpati	Aksi primer	<p>d. menetapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Simpang Lapangan Cerlang-Tugu Ngurah Rai) yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKV Kawasan Perkotaan Serbagita</p> <p>e. menetapkan jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Simpang Lapangan Cerlang-Tugu Ngurah Rai) yang menghubungkan PKV Kawasan Perkotaan Serbagita dengan Dandar Udara Ngurah Rai</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. mengandalkan perkembangan pertumbuhan di jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Simpang Lapangan Cerlang-Tugu Ngurah Rai) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang memalar [warna spasi]</p> <p>h. memfasilitasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p>
	Simpang Pesanggaran-Sirpang Samur-Simpang Tohpati	Aksi primer	<p>a. menetapkan jaringan jalan aksi primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran-Sirpang Samur-Simpang Tohpati) yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Serbagita serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>b. menetapkan aliansi jalan aksi primer pada jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran-Sirpang Samur-Simpang Tohpati) yang melayani Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IX-4.	Simpang Pesanggaran-Gerbang Bonoa	Arteri primer	<p>c. menantapkan jaringan jalan pengumpaan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran-Simpang Samur-Simpang Tohpati) untuk meningkatkan keterkaitan antar-kawasan di Pulau Bali sesuai potensi ancaman bencana banjir, gempa bumi, dan tsunami</p> <p>d. meruntuhkan jaringan jalan pengumpaan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran Simbang Samur Simbang Tohpati) yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKA Kawasan Perkotaan Surabaya</p> <p>e. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. mengundalkan perkembangan pemukiman di jajaran jalan pengumpaan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran Simbang Samur Simbang Tohpati) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. menantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpaan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran-Gerbang Bonoa) yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Surabaya serta mendorong daya tarik perkotaan di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. menantapkan jaringan jalan arteri primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran-Gerbang Denpasar) yang melayani Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan pertambangan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>c. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran-Gerbang Benoa) untuk meningkatkan keterkaitan antar-kawasan di Pulau Bali sesuai potensi ancaman bencana banjir, gempa bumi, dan tsunami</p> <p>d. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran-Gerbang Denpasar) yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita</p> <p>e. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran-Gerbang Benoa) yang menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan Pelabuhan Benoa</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasaan jalan</p> <p>g. mengendalikan perkembangan pemukiman di jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran Gerbang Denpasar) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)</p> <p>h. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IX.3.	Batas Kota Singaraja Mengwitani	Kolektor primer	<p>a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Dahi (Batas Kota Singaraja-Mengwitani) yang melayani PKV Kawasan Perkebunan Sarbagita dan PKW Singaraja serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Dahi (Batas Kota Singaraja Mengwitani) yang melayani Kawasan Andalan Singaraja dan Sekitarnya (Bali Utara) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, dan perikanan, Kawasan Andalan Denpasar Uluwatu Kintamani (Bali Selatan) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan, serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>c. memantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Batas Kota Singaraja-Mengwitani) untuk meningkatkan ketertarikan antar kawasan di Pulau Bali bagian utara dengan kawasan perkotaan nasional di Pulau Bali bagian selatan sesuai potensi ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Tuleleng dan Kabupaten Tabanan, kawasan rawan banjir di Kabupaten Tuleleng, kawasan rawan gempa bumi di Kabupaten Bulceleng, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan, serta kawasan rawan gempa tanah di Kabupaten Tuleleng dan Kabupaten Tabanan</p> <p>d. memantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Batas Kota Singaraja Mengwitani) yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Gilimanuk Negara Tabanan Denpasar Amlapura,</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>jaringan jalur kereta api antar kota lintas Singaraja Labanan, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita</p> <p>c. menciptakan garis supradan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pakuwasan jalan</p> <p>f. mengendalikan perkembangan permukiman di jaringan jalan pengunungan Pulau Bali (Batas Kota Singaraja-Mengwatani; yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan konservasi Taman Wisata Alam Danau Buyan dan Danau Tarrubingan di sepanjang sisi jalan</p>
IX.6.	Tohpati-Gianyar-Serapapura-Kosamba	Kolektor primer	<p>a. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengunungan Pulau Bali (Tohpati-Gianyar-Serapapura-Kosamba) yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dan PKW Samarapura serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengunungan Pulau Bali (Tohpati-Gianyar-Serapapura-Kosamba) yang melayani Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IX.7.	Duku Ngurah Rai-Nusa Dua	Kolektor primer	<p>c. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Tobpati Gianyar-Semarapura-Kusamba) untuk meningkatkan ketertarikan antar-kawasan di Pulau Bali sesuai potensi anjakan bernama huni, kempa burri, dan tsunauri</p> <p>d. merantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Tobpati Gianyar-Semarapura-Kusamba) yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api lintas Ciliranule-Negara-Labanan-Denpasar-Amlapura, jaringan jalur kereta api lintas Kubutambahan-Bangi-Gianyar, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKY Kawasan Perkotaan Sarbagita</p> <p>e. menetapkan serta susunan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi kelengkapan ruang pengawasaan jalan</p> <p>f. mengendalikan perkembangan pertumbuhan di jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Tobpati-Gianyar-Semarapura-Kusamba) yang mengundilisasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)</p> <p>g. memperbaiki pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. malarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan</p> <p>a. menantapkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Duku Ngurah Rai Nusa Dua) yang melayani PKY Kawasan Perkotaan Sarbagita serta mendorong daya tarik perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. menantapkan arungan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Tali (Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua) yang melayani Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>c. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Tali (Tugu Ngurah Rai Nusa Dua) untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan di Pulau Bali sesuai potensi ancuran bencana banjir, gempa bumi, dan tsunami</p> <p>d. menantapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Tali (Tugu Ngurah Rai Nusa Dua) yang terpadu dengan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKY Kawasan Perkotaan Serbagita</p> <p>e. menantapkan arungan jalan pengumpulan Pulau Bali (Tugu Ngurah Rai Banjar Utara Ngurah Rai</p> <p>f. menantapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pelayanan jalan</p> <p>g. mengandolikan perkembangan pertumbuhan di jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Tugu Ngurah Rai-Nusa Dua) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar ke arah sprasi</p> <p>h. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IX.8.	Kuta Banjar Tawar	Kolektor primer	<p>a. menetapkan arungan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Kuta-Banjjar-Taman) yang melayani PKY Kawasan Perkotaan Serbagita serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. meruntuhkan jaringan jalan kolektor primer pada jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Kuta Banjar Taman) yang melayani Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>c. menetapkan arungan jalan pengumpulan Pulau Bali (Kuta-Banjjar Taman) untuk meningkatkan keterkaitan antar kawasan di Pulau Bali sesuai potensi ancaman bencana banjir, gempa bumi, dan tsunami</p> <p>d. menetapkan jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Kuta-Banjjar Taman) yang terjadi dengan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKY Kawasan Perkotaan Serbagita</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. mengendaliklan perkembangan pemukiman di jaringan jalan pengumpulan Pulau Bali (Kuta Banjar Taman) yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menular (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota di Pulau Jawa		h. melarang alih fungsi kawasan pertanian pangan dan kawasan lindung di sepanjang sisi jalan
X.1.	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota di Pulau Jawa Canggerang Merak	Bebas hambatan antarkota	<p>a. memanipulasi jaringan jalan bebas hambatan yang menghubungkan Canggerang Merak serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana banjir dan gempa bumi</p> <p>b. membakukan fungsi pelayanan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Serang, dan PKN Cillegon serta mendukung pengembangan Kawasan Abdalan Bojonegara Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengoptimalkan kejalinan jejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya ruangnya dibatasi</p> <p>e. mencrapkan ketentuan mengenai pelaksanaan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.2.	Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagurawi)	Bebas hambatan antarkota	<p>f. menetapkan garis serpedan bangunan di sisi arungan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menegah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. memantapkan jaringan arungan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menuju Pelabuhan Merak</p> <p>j. menetapkan ketentuan mengenai pelayanan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagurawi) serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKL Kawasan Perkotaan Jaldelatahke serta mendukung Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa dan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, perikanan, dan pertambangan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> c. mengendalikan pertambahan perulutan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang cenderung: meningkatkan pengembangan ruangnya dibatasi e. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menerapkan pola sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.3.	Jakarta-Cikampek	Bebas Tirukan Antarbota	<ul style="list-style-type: none"> a. memanfaatkan jaringan jalan bebas hambatan Jakarta-Cikampek serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. memanfaatkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek dan PKW Cikampek-Cikepu serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.4.	Cikampek-Padalarang	Bebas hambatan antarkota	<p>depan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa dan Kawasan Andalan Purwasuka dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan pertumbuhan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang terintegrasi dan terpadu</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>e. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan gaus sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. hambatan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan terpadu pertidakteraturan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. menetapkan jaringan jalan bebas hambatan Cikampek-Padalarang serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berketahanan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. memanfaatkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKW Citarumpak-Cikotopu serta mendukung pemertanian Kawasan Andalan Purwasuka dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan peternakan</p> <p>c. mengembalikan perkembangan pertumbuhan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>e. menerapkan ketertanian mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menciptakan partis serpadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. menerapkan ketertanian mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.3.	Padalarang Cileunyi	Bebas hambatan antar-kota	<p>a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Padalarang Cileunyi serta penyesuaian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Kawasan Pertoran Bandung Raya serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan pertumbuhan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dilatasi</p> <p>e. menetapkan ketentuan mengenai peraturan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan korpal peristirahatan dan pelayanan untuk mendukung pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.6.	Cilegon-Bojonegara	Bebas hambatan antar-kota	<p>1. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pemasangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan masalahnya transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Cilegon-Bojonegara serta penyesuaian perbatangaman pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Cilegon serta mendukung pengembangan Kawasan Andalas Bojonegara-Morak-Cilegon dengan aktor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, perikanan, dan pertambangan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kerendahan: pengembangan ruangannya dibatasi</p> <p>e. menciptakan peluang peluang pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.7.	Jarasisih Cikarang, Karawang	Bebas hambatan antarkota	<p>b. mengembangkan terpat peristrukturan dan pelayanan untuk kepemilikan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus disubusi/koleksi barang dan jasa dari/memuju Pelabuhan Bojonegara</p> <p>2. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Jarasisih Cikarang Karawang serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan tingkat kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKY Kawasan Pertoran Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perlagangan, dan jasa serta kawasan Andalan Purwasuka dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, perdagangan, dan perikanan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan perumahan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kerendahan: unjangan pengembangannya ruangnya dihutasi</p> <p>e. mencampurkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan perizinan pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan pola sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasaan jalan</p> <p>g. umbatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>
X.8.	Ciawi-Sukabumi	Bebas hambatan antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Ciawi-Sukabumi serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dan PKW Sukabumi serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Popunjer dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, perikanan, dan pertambangan dan Kawasan Andalan Sukabumi dan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.9.	Sukabumi-Ciranjeng	Bebas hambatan antar-kota	<p>sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertanian, pariwisata, kesehatan, dan pertambangan</p> <p>c. mengembalikannya perkembangan pertumbuhan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar <i>(urban sprawl)</i></p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>e. menerapkan kerentanan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan terpadu peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Sukabumi-Ciranjeng serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKW Sukahumi untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Topunjur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, perikanan, dan pertambangan dan Kawasan Andalan Sukahumi dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, dan pertambangan</p> <p>c. mengundulakan perkembangan perkulinan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang terwujudkasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memisahkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang cenderungungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelayanan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengembangan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. menclapkan ketentuan mengenai pelayanan persimpangan seludang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.10.	Cianjang Padalarang	Bebas hambatan antar-kota	<p>a. mengembangkan arungan jalan bebas hambatan Cianjang Padalarang serta penyelesaian permasalahan pintu masuk/pulu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Kawasan Pertoraan Bandung Raya serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya dengan pengangkutan pertanian, pariwisata, industri, perikanan, dan pertambangan dan Kawasan Andalan Cekungan Nandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan</p> <p>c. mengedukasi perkembangan perukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kondusif untuk pengembangan ruangnya dilatasi</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelatangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan pola sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.11.	Cileunyi Sumedang Dawuan	Bebas hambatan antar-kota	<p>b. mengembangkan terpat peristiwabata dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. menelaah kelayakan mengenai pelaksanaan persimpangan selidung dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Cileunyi Sumedang Dawuan serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKY Kawasan Perikanan Bandung Raya serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan</p> <p>c. mengendalikan pertambahan pertumbuhan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang mengendalikan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. menelaah ketentuan mengenai peraturan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menelaah garis stupedian bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.12.	Cileunyi Nagrek	Bebas hambatan antar kota	<p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan terpadai peristirahatan dan pelayanan untuk kepastangan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. menciptakan kelenyuan menyerasi pelayanan persimpangan selidam dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Cileunyi Nagrek serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKL Kawasan Perkotaan Bandung Raya serta mendukung pengembangan Kawasan Ancalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan perumahan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.13.	Nagrek Ciarnis	Bebas hambatan antarkota	<p>e. menerapkan ketentuan mengenai peraturan mengenai alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan terpal peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai peraturan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Nagrek Ciarnis serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKW khususnya serta mendukung pengembangan kawasan Bandara Pajangan Liris-Pangandaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.14.	Ciamis Cilacap	Bebas hambatan antarkota	<p>c. mengendalikan pertambahan perukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kesederhanaan pengembangan ruangnya dihafasi</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. umbatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Ciamis Cilacap serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKL. Citarasi serta memulainya pengangkutan Kawasan Andalan Priangan Timur Pamulang dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan peternakan serta Kawasan Andalan Jawa Tengah. Selain dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perikanan, industri, dan perikanan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan perumahan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang menggunakan <i>barbon sprawl</i></p> <p>d. memisahkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang cenderung pengembangkan ruangnya dibatasi</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelayanan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. memantapkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/kolektif barang dan jasa dari/memaju pelabuhan Tanjung Jati</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.15.	Cikopo-Paliraman	Tebas hambatan antarkota	<p>Menetapkan ketentuan mengena pelarangan pelepasan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan masalahnya transpurchasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Cikopo-Paliraman serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan industri, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Cirebon dan JAW Cikampek-Cikopo serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Purwakarta dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan dan Kawasan Andalan Claymore/Kuning dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan pertumbuhan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang menguntungkan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi, arungan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. memanfaatkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani belantaran arus diatribusi/koleksi barang dan jasa dari/memuju Kelabuan Ajuana (Cirebon) dan Bandar Udara Cakrabauwana</p> <p>j. menciptakan kelakuan mengemudi pelarangan perstripangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>
X.16.	Kanci Pejagan	Bebas hambatan antar-kota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Kanci Pejagan serta pengendalian pembangunan pinto masuk/pinto keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKL Cirebon serta mendukung, pemeliharaan Kawasan Andalan Cakrabauwana Kuning dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, peternakan, dan pertambangan</p> <p>c. mengembangkan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang majalar (urban sprawl)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.17.	Pejalan-Pemalang	Bebas hambatan antarkota	<p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. meniadakan pagar serpadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemasangan ahidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Pejalan-Pemalang serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperbaiki fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKW legal serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Berbisnis Ceko Slawi (Bregas) dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang krudenderungan pengembungan ruangnya dihulusi e. mencracapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan perizinan panjang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan pola sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan g. umbatasi perambatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.18.	Pemalang Batang	Bebas hambatan antarkota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Pemalang Batang serta pengendalian perbangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PISW lokalong dan serta mendukung pengembangan Kawasan Adalan Begas dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar <i>(urban sprawl)</i>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kerendahan: unguan pengembungan ruangnya dihutasi e. mencracapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan pola sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasaan jalan g. umbatasi perambatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan terpat peristrukturan dan pelayanan untuk kepermungan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.19.	Palaang-Semarang	Bebas hambatan antarkota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Semarang-Dalang serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan unapchabkan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKA kawasan perkotaan Kedungsepur serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bregas dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan dan kawasan Andalan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi (Kedungsepur)

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>deengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan</p> <p>c. mengembalikan perkembangan pertumbuhan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengoptimalkan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar <i>(urban sprawl)</i></p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>e. menerapkan kerennan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan terpat perstruktural dan pelayanan untuk mempertinggi pengguna jaringan jalan bebas hambatan untuk</p> <p>i. memanfaatkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/memuju Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani</p> <p>j. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan ahidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.20.	Semarang Detrak	Bebas hambatan antar-kota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Semarang Demak serta penyesuaian perimbangan pintu masuk/pulu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKY Kawasan Perkotaan Kedungsepur serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Kedungsepur dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perkebunan, industri, dan perikanan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dilatasi</p> <p>e. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasaan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan terpal peristimahan dan pelayanan untuk mempercepat penggunaan jaringan jalan bebas hambatan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.21.	Dorak-luban	Bebas hambatan antar-kota	<p>1. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelurahan arus distribusi/kolektif barang dan jasa dari/menjadi Pelabuhan Tanjung Priuk dan Bandara Udara Ahmad Yani</p> <p>2. menciptakan ketertarikan mengenai pelajaran persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan fasilitas transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Dorak-luban serta pengendalian pembangunan pinu masuk/pinut keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKY Kawasan Perkotaan Kedungsaput, PKW Kudus, dan PKW Tuban serta mendukung pengendalian Kawasan Andalan Kedungsaput dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan peternakan, Kawasan Andalan Juwana Jepara Kudus Pati Keubang Blora (Wanarakuli) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, dan peternakan, serta Kawasan Andalan luhban-Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, peternakan, peternakan, dan pertambangan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan perukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang keterunderutilisan pengembangannya ruangnya dihulusi e. mencurahkan ketertarikan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan perizinan pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan pola sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. umbatani perambatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.22.	Semarang-Solo	Bebas hambatan antarkota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Semarang-Solo serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepuh, PKN Surakarta, PKW Salatiga, dan PKW Boyolali serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Kedungsepuh dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perikanan, industri, dan perikanan dan Kawasan Andalan

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Subosuka Wonosraten dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian</p> <ol style="list-style-type: none"> c. mengembalikan perkembangan pertumbuhan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl) d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi e. menerapkan kerennan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan terpadat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. memanfaatkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/kepada Pelabuhan Tanjung Emas, Bandar Udara Ahmad Yani, dan Bandar Udara Adi Sumarmo j. menciptakan kelentuan mengemudi pelayanan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.23.	Solo Yogyakarta	Bebas hambatan antar-kota	<p>a. mengembangkan arungan jalan bebas hambatan Yogyakarta Solo serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Yogyakarta, PKV Surakarta, dan PKW Klaten serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian serta kawasan Andalan Yogyakarta dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan</p> <p>c. mengendalikn perkembangan perukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengondisikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kondusif untuk pengembangan ruangnya dilatasi</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan pola sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. menetapkan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.24.	Yogyakarta-Bawen	Bebas hambatan antarkota	<p>b. mengembangkan terpat peristiwabata dan pelayanan untuk kepemilikan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus disubusi/koleksi barang dan jasa dari/keanu Bandar Udara Adisulipio dan Bandar Udara Adi Sumarmo</p> <p>2. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan penyimpanan ahidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Yogyakarta-Bawen serta pengendalian pembangunan pinnu masuk/pinnu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKY Yogyakarta, PKW Sleman, dan PKW Magelang serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Kedungsepur dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan peternakan, Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, dan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan peternakan</p> <p>c. mengundulikan perkembangan perumukan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kerendahan: upaya pengembungan ruangnya dihulusi e. menciptakan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan perantara panjang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan pola sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan g. umbatani perantara ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. memantapkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menentu Tandar Udara Ahsuljipio j. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.25.	Solo-Mantingan	Bebas hambatan antarkota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan perantara panjang berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Surakarta serta mendukung pengembangan Kawasan Abdalan Subusuka-Wonosaten industri, pariwisata, dan pertanian

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.26.	Mantingan-Ngawi	Bebas hambatan antarkota	<p>c. mengedukasi pertambangan perbukitan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang menurunkan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menerapkan pola sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawakan jalan</p> <p>g. hambatan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. menetapkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelurahan/urus distrik/koleksi barang dan jasa dari/memujui Tande/ Udana/Adi Surarimo</p> <p>j. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan persimpangan lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Mantingan-Ngawi serta pengendalian perbangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang mendukung pengembangan Kawasan Abulalan Madun dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, peternakan, perkebunan, dan pariwisata</p> <p>c. mengembalikan perkembangan pertumbuhan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan garis serpadan tanaman di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan penyimpanan ahidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.27.	Ngawi Kertosono	Bebas hambatan antar-kota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Ngawi Kertosono serta penyesuaian pembangunan pintu masuk/pulu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani Kawasan Andalan Medium dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata dan Kawasan Andalan Kodiri-vutung Agung-Eblar dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata</p> <p>c. mengendalikn perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kerendahan-pinggai pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. menerapkan ketentuan penyempai pelurungan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengembangan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk mempercepat pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.2R.	Kertosono-Mufokerto	Tebas hambatan antarkota	<p>1. menetapkan ketentuan mengena pelarangan pelepasan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Kertosono-Mufokerto serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan industri, dan kawasan rumah baca</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Cerbangkertosuila dan Kawasan Andalan Gerbangkertosuila dengan sektor unggulan pertanian, peternakan, industri, dan pariwisata</p> <p>c. mendudukkan perkembangan perbukitan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X-29.	Mojokerto-Surabaya	Bebas hambatan antar-kota	<p>b. mengembangkan terpat peristiwabata dan pelayanan untuk mempermudah pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. menelaah kelayakan rencana pelarungan persimpangan selidung dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Mojokerto-Surabaya serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKA Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata</p> <p>c. mengendalikan perkembangan pemukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengoptimalkan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar <i>(urban spread)</i></p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya diutamakan</p> <p>e. menataapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memuat ketrutuan ruang pengawasan jalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi;</p> <p>h. mengembangkan terpadu peristirahatan dan pelayanan untuk keperluan pengguna jaringan jalan bebas hambatan;</p> <p>i. memanfaatkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani belanaran arus diatribusi/koleksi barang dan jasa dari/menepi belabuan Tanjung Perak dan Bandara Uluwu Juanda;</p> <p>j. menciptakan ketentuan mengenai peraturan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>
X-30.	Surabaya Madura	Bebas hambatan antar-kota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Surabaya Madura serta pengendalian pembangunan pinto masuk/pinto keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana;</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKL Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata;</p> <p>c. mengendalikan perkembangan pertumbuhan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang majalah (urban sprawl);</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.31.	Geropol-Pandaan	Bebas hambatan antarkota	<p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menelapkan pada serpadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/mencapai Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Duri-Tanjung Dulu Pandaan, dan Bandar Udara Juanda</p> <p>j. menelapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan selidang dengan ruas jalan lain atau dengan fasilitas transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Geropol-Pandaan serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang mendukung pengembangan kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata dan Kawasan Andalan Gerbangkertosia dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.32.	Pandaan-Malang	Bebas hambatan antar kota	<p>c. mengendalikan pertambangan perbukitan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>e. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menerapkan pola sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Pandaan-Malang serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKY Malang serta mendukung pengembangan Kawasan Abdlatu Probolinggo-Pasuruan-Lumajang dengan sektor unggulan pertanian.</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>industri, pertambangan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata serta Kawasan Ancalan Malang dan Sekelamnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, perkebunan, dan pariwisata</p> <p>c. mengendalikan perkembangan perumukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang meminimalisasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungannya pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. mencakupkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawas jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan terpal peristirahatan dan pelayanan untuk keperluan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kegiatan arus diambusi/koleksi barang dan jasa dari/menurut Danda: Udara Abdulrachman Saleh</p> <p>j. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan fasad transparansi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.33.	Gempol Pasuruan	Bebas hambatan antar-kota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Gempol Pasuruan serta penyesuaian perbandingan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang mendukung pengembangan Kawasan Andalan Probinggo Pasuruan lumajang dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata serta Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata</p> <p>c. mengendalikn perkembangan perukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengondisikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kondusif untuk pengembangan ruangnya dilatasi</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan pola sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.24.	Pasuruan Probolinggo	Bebas hambatan antar-kota	<p>b. mengembangkan terpat peristiwabata dan pelayanan untuk kepemungut pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. menelaah kelenyuan menyenai pelajaran perampungan selidung dengan ruas jalan lain atau dengan prasana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkun jaringan jalan bebas hambatan Pasuruan Probolinggo serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memecahkan fungsi kawasan pertanian pangan herkelanjuran, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkun jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKW Probolinggo serta mendukung pengembangin kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan launjang dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata</p> <p>c. mengedalikan perkembangan perumidan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengoptimalkan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar <i>berbentuk</i></p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangkun ruangnya dibatasi</p> <p>e. mengedalikan kotornan mengedalikan pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menerapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memuatnubi kotornan ruang pengembangkun jalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.35.	Probolinggo Banyuwangi	Bebas hambatan antar kota	<p>g. membatasi perantaraan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan terpadu peristirahatan dan pelayanan untuk kepastungan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. mencakupkan kelenyuan mengenai pelajaran persimpangan selidam dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Probolinggo Banyuwangi serta pengendalian pembangunan pinto masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKW Probolinggo dan PKW Banyuwangi serta mendukung pengembangan kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, perikanan, perkelurahan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan, serta Kawasan Banyuwangi dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian dan perikanan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kerendahan: unjangan pengembungan ruangnya dihutasi e. mencurahkan ketertuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan perizinan pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan para sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasaan jalan g. umbatasi perambatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepulauan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
X.36.	Gresik-Cuban	Bebas hambatan antarkota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Gresik-Tuban serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dan PKW Cuban serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Tuban Rejonegoro dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pertanian, perikanan dan pertambangan serta Kawasan Andalan

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Gerbangterbatasula dengan sektor unggulan pertanian, peternakan, industri, dan pariwisata</p> <p>c. mengembalikan perkembangan pertumbuhan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar <i>(urban sprawl)</i></p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>e. menerapkan kerennan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan terpat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. memanfaatkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/memuju Pelabuhan Gresik</p> <p>j. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan ahidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.37.	Pejagan Cilacap	Bebas hambatan untuk-koloni	<p>a. mengembangkan arungan jalan bebas hambatan Pejagan Cilacap serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Cilacap dan PKW Tegal serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan dan kawasan Andalan Dregas dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan pertumbuhan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengendalikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya ruangnya dibatasi</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengembangan jalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> g. membatasi peuraibatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi b. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kependingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. memanfaatkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/kolektif barang dan jasa dari/menjadi Pelabuhan Tanjung Hutan j. menciptakan ketertarikan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan fasilitas transportasi lainnya
X.38.	Cilacap Yogyakarta	Bebas hambatan antar kota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Cilacap Yogyakarta serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan herkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Cilacap, PKN Yogyakarta, dan PKW Kebumen serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan dan Kawasan Andalan Yogyakarta dan sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan c. mengendalikan perkembangan perumahan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang meminimalisasikan terjadinya perkotaan yang menjalar (urban sprawl)

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X.39.	Jembatan Selat Sunda	Bebas hambatan antarkota	<ul style="list-style-type: none"> d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang keterdesakan peningkatan ruangannya dihutasi e. menciptakan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan perantara panjang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan pola sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. pembatasan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. memantapkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/kearah Pelabuhan Carung Hutan dan Nambur Utara Adisutiplo j. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya <ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Jembatan Selat Sunda serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkeadilan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Ciligon serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X-40.	Cikampek-Cilamaya	Bebas hambatan antarkota	<p>Bojonegara Merak Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan</p> <p>c. mengembalikannya perkembangan pertumbuhan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengoptimalkan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar <i>(urban sprawl)</i></p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>e. menerapkan kerentanan mengenai pelanggaran alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. meniadakan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>h. umbatani pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>i. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Cikampek-Cilamaya serta pengendalian pembanguanan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berketahanan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKW Citarumpak-Cikotop serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Purwasuka dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan</p> <p>c. mengembalikn perkembangan pertumbuhan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)</p> <p>d. memaksimalkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>e. menerapkan ketertaman mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menelapkan partis serpadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. memantapkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus transportasi/kelektal barang dan jasa dari/menurut Kelabuhan Cilamaya</p> <p>j. menerapkan ketertaman mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI. XI.1.	Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota di Pulau Jawa Comang-Cogol-Pluit	Bebas hambatan dalam kota	<p>a. umantapkan jaringan jalan bebas hambatan Comang-Cogol-Pluit serta pengecilan pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan mempertahankan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKY Kawasan Perikanan Labodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perdagangan, dan jasa</p> <p>c. mengendalikan pertumbuhan perukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kerendahan pengembangan ruangnya dihatasi</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasaan jalan</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan persimpangan sebidang dengan ruas jalan atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.2.	Jakarta : angetang	Bebas hambatan dalam kota	<p>a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Jakarta : angetang serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanahan pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa.</p> <p>c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>).</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dilatasi</p> <p>e. menciptakan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan ahidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.3.	Pondok Aren Cihjajami	Bebas hambatan dalam kota	<p>a. memertakan jaringan jalan bebas hambatan Pondok Aren Cihjajami serta penyalangan perbantuanan pintu masuk/pulu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. memertakan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa</p> <p>c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dilatasi</p> <p>e. mertakan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. mertakan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan ahidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI/2	Lomang Cawang	Bebas hambatan dalam kota	<p>a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Lomang Cawang serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar Jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa.</p> <p>c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>).</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dilatasi.</p> <p>e. menciptakan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan.</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi.</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan ahidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya.</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
X1.3.	Cawang Tanjung Priok (Dr. Wiyoto Wiyono, M.Sc)	Bebas hambatan dalam kota	<p>a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Cawang Tanjung Priok (Dr. Wiyoto Wiyono, M.Sc) serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Abdalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa</p> <p>c. mengendalikn perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)</p> <p>d. memantapkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kesederunaian pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. memantapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. umbatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/keleksi barang dan jasa dari/mencatu Pelabuhan Tanjung Priok</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XL.6.	Tanjung Priok-Pluit (Harbourcoast)	Bebas hambatan dalam kota	<p>b. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pemasangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan fasilitas transportasi lainnya</p> <p>a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Tanjung Priok-Pluit (Harbourcoast) serta pengendalian pembangunan pintu masuk/puntu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan peruntukan punggul berkelanjutan, kawasan lingkungan, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKA Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangin Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa</p> <p>c. mengendalikn perkembangan perumukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengoptimalkan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar <i>harbour sprawl</i></p> <p>d. memantapkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dihilangi</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasaan jalan</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XL7.	Prof. Dr. Sedyatno	Bebas hambatan dalam kora	<p>g. memantapkan jaringan angkutan jalan bebas hambatan untuk melayani kelentaran arus distribusi/kolektif barang dan jasa dari/menjadi Pelabuhan Tanjung Priok</p> <p>h. menciptakan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Prof. Dr. Sedyatno serta pengendalian pembangunan pinu masuk/pinut keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKY Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengendalian Kawasan Anculan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa</p> <p>c. mengundulikan perkembangan pemukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang menjadi <i>urban sprawl</i></p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi aringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>e. menciptakan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. umbatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi aringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XL8.	Pondok Aren-Serpong	Bebas hambatan dalam kota	<p>g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Pondok Aren-Serpong serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalur bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan industri, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa</p> <p>c. mengencalikankan perkembangan perhubungan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengoptimalkan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>e. menetapkan pola serpadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasaan jalan</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.9.	Akses Tanjung Priok	Bebas hambatan dalam kota	<p>a. memantapkan bagian jalan bebas hambatan Akses Tanjung Priok serta penyesuaian perbantuan pintu masuk/pulu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan kelas lanjutan yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa</p> <p>c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dilatasi</p> <p>e. menciptakan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus transportasi/koleksi barang dan jasa dari/menjadi Kelabuhan Tanjung Priok</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.10.	Jakarta Outer Ring Road I: Pondok Phany-Taman Mini, Taman Mini IC-Hankam Raya, Cikunir-Cakung, Pondok Pinang-Ujung-Uji, dan Cakung, Pondok Pinang-Uji, dan Cakung	Bebas hambatan dalam kota	<p>a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Jakarta Outer Ring Road I: (Pondok Phany-Taman Mini, Taman Mini IC-Hankam Raya, Cikunir-Cakung, Pondok Pinang-Ujung-Uji) serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan permukiman pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKA Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Ancillary Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa</p> <p>c. mengendalikan pertambahan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengoptimalkan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kondusif untuk pengembangan ruangnya dilatasi</p> <p>e. menerapkan pola sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasaan jalan</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. menclapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan subdiagonal dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.11.	Jakarta Outer Ring Road I (Ulujami-Kebon Jeruk, Cakung-Cilincing, Hancam Raya Cikunir, Kebon Jeruk-Penjarangan)	Bebas hambatan dalam kota	<p>a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Jakarta Outer Ring Road I: (Ulujami-Kebon Jeruk, Cakung-Cilincing, Hancam Raya-Cikunir, Kelim Jeruk Penjarangan); serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperbaiki fungsi kawasan perlintasan pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKA Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Ancaman Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa.</p> <p>c. mengendalikan perkembangan perumahan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengoptimalkan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>).</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya ruangnya dilatasi.</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasaan jalan.</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi.</p> <p>g. menclapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan seludang dengan ruas jalan lain atau dengan prasana transportasi lainnya.</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.12.	Padalarang Cileunyi	Bebas hambatan dalam kota	<p>a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Padalarang Cileunyi serta penyelesaian permasalahan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertumbuhan pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Kawasan Pertoraan Bandung Raya serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan pertumbuhan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dilatasi</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan ahidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.13.	Palurabab Cirebon/Kanci	Bebas hambatan dalam kota	<p>a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Palimanan Cirebon/Kanci serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian, pangan, beskotan/urban, kawasan lindung, dan kawasan ruwan hancana</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Cirebon Kawasan Andalan Ciyumaja Kuning dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkotaan, dan pertambangan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dilatasi</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. memantapkan jaringan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus transportasi/koleksi barang dan jasa dari/menjuhi Kelabuhan Ajjuwa (Caruban) dan Bandar Udara Cakrabhuwana</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai pelatangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.14.	Semarang Seksi A, B, dan C	Bebas hambatan dalam kota	<p>a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Semarang Seksi A, B, dan C serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan ruang hampa</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Kedungsepur serta mendukung pengembangan Kawasan Audalan Kedungsepur dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kesemuanya pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. mencakupkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/keleksi barang dan jasa dari/kearah Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandara Udara Ahmad Yani</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.15.	Surabaya-Gempol	Bebas hambatan dalam kota	<p>b. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pelepasan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan masalah transportasi lainnya</p> <p>a. menetapkan aturan jalan bebas hambatan Surabaya-Gempol serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan perlintasan perantara bekalanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata</p> <p>c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memantapkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kerendahan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi aturan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengarsipan jalan</p> <p>f. hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/keleksi barang dan jasa dari/mencatu Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandar Udara Juanda</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.16.	Surabaya-Gresik	Tebas hambatan dalam kota	<p>b. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pelepasan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan Surabaya-Gresik serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. memantapkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Cerbangkertasula serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Gerbangkertosula dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata</p> <p>c. mengutamakan perkembangan perukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>e. menelapkan parts serpadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasaan jalan</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.17.	Dekasi Cawang, Kumpung, Melayu	Bebas hambatan dalam kota	<p>g. memantapkan jaringan angkutan jalan bebas hambatan untuk melayani kelurahan arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/kearah Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda</p> <p>h. menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan pemukiman selidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Dekasi Cawang, Kumpung, Melayu serta pengendalian pembangunan pintu masuk/punta keluar jalan bebas hambatan dengan memperbaiki fungsi kawasan pertanian pangan berkelompok, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKY Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa</p> <p>c. mengendalikan perkembangan perumahan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya diarahkan</p> <p>e. menciptakan garis supradan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.18.	Keruvoran Kampung Melayu	Debatan dalam kota	<p>f. membatasi perambatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai peraturan persimpangan selidung dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Keruvoran Kampung Melayu serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKY Kawasan Perumahan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dan Sekelarnya dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perdagangan, dan jasa</p> <p>c. mengendalikan pertumbuhan perukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. membatasi perambatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.19.	Sunter-Hawa Buaya-Baru Ceper	Bebas hambatan dalam kota	<p>g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Sunter-Rawa Buaya-Tatu Ceper serta pendahuluan pembangunan pintu masuk/pulu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan ruwan hancawa</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa</p> <p>c. mendudukkan perkembangan perukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengoptimalkan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>e. menelapkan garis serpadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.20.	Pasar Minggu Casablanca	Bebas hambatan dalam kota	<p style="text-align: center;">STRATEGI OPERASIONALISASI</p> <p>a. mengembangkan arungan jalan bebas hambatan Pasar Minggu Casablanca serta pemindahan pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan ruang hancana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Ancillary Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa</p> <p>c. mengendalikn perkembangan perkotaan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>e. melengkapi garis serpadu bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. umbatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi arungan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan penyimpanan ahidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.21.	Sunter Pulo Gebang Tambelang	Bebas hambatan dalam kota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Sunter Pulo Gebang Tambelang serta pengendalian pertumbuhan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan ruang hampa</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Abdalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa</p> <p>c. mengendalikn perkembangan perkotaan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. melengkapi sisi serpadu bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. umbatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan penyimpanan ahidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.22.	Ulujuami Tanah Abang	Bebas hambatan dalam kota	<p>a. mengembangkan aringan jalan bebas hambatan Ulujuami Tanah Abang serta penyesuaian pertumbuhan pintu masuk/pulu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertumbuhan pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKY Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa</p> <p>c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dilatasi</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan ahidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.23.	Duri Pulo Kaurpung Melayu	Bebas hambatan dalam kota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Duri Pulo Kaurpung Melayu serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian, pangan, bekolaborasi, kawasan lindung, dan kawasan ruang hancutan</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Abdalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa</p> <p>c. mengendalikn perkembangan perkotaan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. menelapkan garis serpadu bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. umbatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi aringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan penyimpanan ahidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.24.	Jakarta OuterRingRoad II: Kamal-Teluk Naga-Batu-Ceper, Cengkering Batu Ceper, Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong Cimere, Cimere Cimanggis, Cimanggis Cibitung, Cibitung-Cilincing	Bebas hambatan dalam kota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Jakarta Outer Ring Road II: Kamal-Teluk Naga-Batu-Ceper, Cengkering-Batu Ceper-Kunciran, Kunciran-Serpong, Serpong-Cimere, Cimere Cimanggis, Cimanggis-Cibitung, Cibitung-Cilincing serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan permukiman pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Ancalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa</p> <p>c. mengedukalkan pertambangan perukuman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kerenderungan pengembangannya diutamakan</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan penyimpanan sebidang dengan ruas jalan atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.25.	Depok Antasari	Bebas hambatan dalam kota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Depok Antasari serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa.</p> <p>c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>).</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dilatasi.</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan.</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi.</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan ahidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya.</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.26.	Bogor <i>Ringroad</i>	Bebas hambatan dalam kota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Bogor <i>Ring Road</i> serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar Jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana.</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa.</p> <p>c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>).</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dilatasi.</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan.</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi.</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan ahidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya.</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.27.	Perusan Pasteur Ujung Berung Cileunyi	Bebas hambatan dalam kota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Terusan Pasteur Ujung Berung-Cileunyi serta pengendalian pertumbuhan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Bandung Raya serta mendukung pengembangan Kawasan Andalas Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan</p> <p>c. mengendalikn perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kesemuanya dikembangkan ruangnya dibatasi</p> <p>e. menelupkan garis serpadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. umbatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi atingan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan ahidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.26.	Ujung Berung Gedebage Majalaya	Bebas hambatan dalam kota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Ujung Berung Gedebage-Majalaya serta penpendalihan pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Bandung Raya serta mendukung pengembangan Kawasan Andalas Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan</p> <p>c. mengendalikn perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kesemuanya pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. menetapkan garis serpadun bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. umbatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan penyimpanan ahidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.29.	Soreang Pasir Kaja	Bebas hambatan dalam kota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Soreang Pasir Kaja serta penyesuaian pertumbuhan pintu masuk/pulu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertumbuhan berkelayakan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Kawasan Pertoran Bandung Raya serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan unggul industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan pertumbuhan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dilatasi</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pergunakan jalan</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan ahidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.30.	Waru (Aloha) Wonokromo Cangjung Perak	Bebas hambatan dalam kota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Waru (Aloha) Wonokromo-Tanjung Perak serta penyesuaian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata</p> <p>c. mengundutkan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kesemuanya pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. menetapkan garis serpadun bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. umbatani pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. menetapkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/keleksi barang dan jasa dari/kecung Pelabuhan Tanjung Perak</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XL31.	Sp. Susun Waru-Bandara Juanda	Tebas hambatan dalam kota	<p>b. menetapkan ketentuan mengena pelarangan pelepasan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan SS Waru-Bandara Juanda serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan hulu, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKA Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata</p> <p>c. mengedalikan perkembangan pemukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengoptimalkan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar <i>terhadap sumber</i></p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dihilangi</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasaan jalan</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XI.32.	Bandara Juanda Tanjung Perak	Bebas hambatan dalam kota	<p>g. memantapkan jaringan angkutan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/kolektif barang dan jasa dari/menjadi Bandar Udara Juanda</p> <p>b. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Bandara Juanda Caringing Perak serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKY Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata</p> <p>c. mengundulkan perkembangan perukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengundlikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya diarahkan</p> <p>e. menclapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XII.	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota di Pulau Bali		<p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. memanfaatkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus distribusi/koleksi barang dan jasa dari/menjadi Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Udara Juanda</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan penyimpanan ahidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>
XII.1.	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota di Pulau Bali Kuta-Tanah Lot-Soka	Jalan Bebas hambatan antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Kuta-Tanah Lot-Soka serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan mempertahankan fungsi kawasan perantara pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melibatkan PKN Kawasan Perkotaan Sa'bagita serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan perukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya ruangnya dibatasi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XII.2.	Canggu Beringkir, Batuan Purnama	Jalan Bebas hambatan antar-kota	<p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menelapkan garis sempadan sempadan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemasangan ahidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Canggu Beringkir Batuan-Purnama serta pencerdialan pembangunan pintu asuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali yang melayani PKA Kawasan Perkotaan Serbaguna serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bali Selatan dengan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengoptimalkan terjadinya segala perkotaan yang menjalar <i>leaves sprawl</i></p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kerendahan-pengembangan ruangnya dihutasi e. mencarapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan perizinan pangs di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan f. menetapkan pola sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan g. umbatani perambatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya
XII.3.	Cobopati-Kusumaha-Padanglahi	Jalan Bebas hambatan antarkota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Tohpai-Kusurha-Padanglahi serta pengendalian pembangunan pintu masuk/puntu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan perizinan pangs bekelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKW Semarang serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Nali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XII.4.	Pakutatan-Soka	Jalan Bebas hambatan antarkota	<p>c. mengendalikan perkembangan pertumbuhan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang menurunkan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menerapkan pola sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan arungan jalan bebas hambatan Pakutatan-Soka serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang mendukung pengembangan Kawasan Abadalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XII.5.	Negara Pakutaban	Jalan Bebas hambatan antar kota	<p>c. mengendalikan pertambangan perbukitan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kemendataran pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan Jalan Bebas hambatan</p> <p>f. menerapkan pola sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasaan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Negara Pakutaban serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKW Negara serta mendukung pengembangan Kawasan Ancakalan Tali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan</p> <p>c. mengembalikan perkembangan pertumbuhan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (urban sprawl)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan garis serupadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan tempat peristirahatan dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XII.6.	Guliranuk Negara	Jalan Bebas hambatan antar-kota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Guliranuk Negara serta penyesuaian pembangunan pintu masuk/pulu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PRW Negara serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Tali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan</p> <p>c. mengendalikn perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya ruangnya dilatasi</p> <p>e. menetapkan ketentuan mengenai peraturan alih fungsi kawasan pertanian pangan di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>f. menetapkan pola sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasaan jalan</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>h. mengembangkan terpal peristruktan dan pelayanan untuk mendukung pengguna jaringan jalan bebas hambatan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XIII.	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota di Pulau Bali		1. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pelepasan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan fasilitas transportasi lainnya
XIII.1.	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota di Pulau Bali Srenggan-Benoa-Bandar Udara Ngurah Rai-Nusa Dua-Tanjung Benoa	Jalan Bebas hambatan dalam kota	<p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Srenggan-Benoa-Bandar Udara Ngurah Rai-Nusa Dua-Tanjung Benoa serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan untuk mendorong daya saing perekonomian di Pulau Jawa-Bali yang melibatkan PKL Kawasan Perkotaan Srenggan serta mendukung pengarahangan Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan</p> <p>c. mengendalikan pertambahan peruntukan di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya ruangnya dihutasi</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memuat bi ketertuan ruang pengawasaan jalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XIII.2.	Serangan-Tobpati	Jalan bebas hambatan dalam kota	<p>f. membatasi perantaraan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. memanfaatkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus disubusi/koleksi barang dan jasa dari/keanu Pelabuhan Benoa dan Dandar Udara Ngurah Rai</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Serangan-Tobpati serta pengendalian pembangunan pintu masuk/pintu keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKK Kawasan Perkotaan Sarbagita serta mendukung pengembangan pertanian, industri, dan perikanan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan perukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XIII.3.	Kuta Bantar Udara Ngurah Rai	Jalan bebas hambatan dalam kota	<p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi terunggan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan persimpangan selidank dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan Kuta Bantar Udara Ngurah Rai serta pengendalian pembangunan pinto masuk/pinto keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melibatkan PKN Kawasan Perkotaan Sebagita serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan perukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengondisikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (<i>urban sprawl</i>)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya diarahkan</p> <p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
XIII.4.	Kuta-Dempasar-Cobpati	Jalan Bebas hambatan dalam kota	<p>f. membatasi peرابantuan ruang di sepanjang sisi arungan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. memanfaatkan jaringan jalan bebas hambatan untuk melayani kelancaran arus disubusi/koleksi barang dan jasa dari/memuju Tambar Udara Ngurah Rai</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan persimpangan ahidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p> <p>a. mengembangkan arungan jalan bebas hambatan Kuta-Dempasar-Cobpati serta pengendalian pembangunan pinu maauk/pinru keluar jalan bebas hambatan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkeadilan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalan bebas hambatan yang melayani PKY Kawasan Perkotaan Sa-bagita serta mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bali Selatan dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan</p> <p>c. mengendalikan perkembangan permukiman di sepanjang jaringan jalan bebas hambatan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang majalar (urban sprawl)</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p>

NO.	RUAS JALAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>e. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalan bebas hambatan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan</p> <p>f. pembatasan pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalan bebas hambatan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pemasangan reklame dengan rupa jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya</p>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN V
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TANGGAL 16 MARET 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN JALUR
KERETA API NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN JALUR KERETA API NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota		
1.1.	Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa		
1.1.1.	Jakarta-Cikampek-Jatibarang-Cirebon-Tegal-Pekalongan-Semarang Kudus Rembang Bojonegoro-Surabaya	Jaringan kereta api antarkota	<p>a. menantapkan jaringan, jalur: kota api antarkota lintas Jakarta-Cikampek-Jatibarang-Cirebon-Tegal-Pekalongan-Semarang-Kudus-Rembang-Bojonegoro-Surabaya yang melayani PKY Kawasan Percolatan Jabodetabek PKW Cikampek-Cikopo-PKN Cirebon-PKW Tegal-PKW Pekalongan-PKN Kawasan Percolatan Kochungcipur-PKW Kudus-PKW Bojonegoro-PKN Kawasan Percolatan Gerbangkertosusila</p> <p>b. meningkatkan tingkat pelayanan untuk mendukung pengembangan kawasan andalan, yang meliputi Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa, Kawasan Andalan Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Clayumaja Kuning) dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan perumbungan, Kawasan Andalan Brebes Tegal Siliwangi (Bregas) dengan sektor unggulan pertanian, kebutuhan, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi (Kedungsepuh) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Juwana, Jepara,</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kudus, Pati, Rembang, Blora (Wanarakuti) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, dan perikanan, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan, serta Kawasan Andalan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosisila) dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata</p> <p>c. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Jakarta-Depok-Bogor, Cikampek-Purwakarta-Padalarang, Cikampek-Cilamaya, Lobbener-Indramayu-Cirebon, Cirebon-Kuningan-Ciamis, Tegal-Slawi-Prupuk-Ajibarang-Wangon, Pekalongan-Wonosobo, Semarang-Ungaran-Bawen, Rembang-Blora-Cepu-Padangan, Tuban-Sadang-Gresik, dan Widang-Bojonegoro-Padangan-Ngawi-Madiun-Caruban), jaringan jalan bebas hambatan, Pelabuhan Ajuna (Cirebon), dan Bandar Udara Cakrabhuwana</p> <p>d. memantapkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
		<p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang polka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa dan Jalur Lintas Utara Pulau Jawa dan Jalur Lintas Utara Pulau Jawa dengan memperbadikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemanfaatan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi pekeretaraan</p>	
1.2.	Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa		
1.2.1	Jakarta-Cikampek-Purwakarta-Bandung-Tasikmalaya-Banjar-Kroya-Kebumpe-Kutoarjo Yogyakarta Klaten Surakarta Madiun Kertosono Jombang Surabaya yang melayani PKW Sukabumi-PKN Kawasen Perkotaan Bandung Raya-PKW Tasikmalaya-PKW Kebumen-PKN Yogyakarta-PKW Klaten-PKN Surakarta PKW Madiun PKN Kawasen Perkotaan Gerbangkertosuila	<p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api antar kota lintas Jakarta-Cikampek-Purwakarta-Bandung-Tasikmalaya-Banjar-Kroya-Kebumpe-Kutoarjo Yogyakarta Klaten Surakarta Madiun Kertosono Jombang Surabaya yang melayani PKW Sukabumi-PKN Kawasen Perkotaan Bandung Raya-PKW Tasikmalaya-PKW Kebumen-PKN Yogyakarta-PKW Klaten-PKN Surakarta PKW Madiun PKN Kawasen Perkotaan Gerbangkertosuila</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan kawasan andalan, yang meliputi Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan</p>	

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>jasa, Kawasan Andalan Purwasuka dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan, Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, perikanan, Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata, serta Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata</p> <p>c. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Jakarta-Depok-Bogor, Cikampek-Purwakarta-Padalarang, Cirebon-Kuningan-Ciamis, Banjar-Kalipucang, Wangan-Jeruklegi, Secang-Magelang-Sleman-Yogyakarta, Yogyakarta-Bantul-Greges-Parangtritis, Yogyakarta-Prambanan-Klaten-Kartosuro, Widang-</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Bojonegoro-Padangan-Ngawi-Madiun-Caruban, Madiun-Ponorogo-Trenggalek, Kertosono-Kediri-Tulung Agung, dan Mojokerto-Gempol), dan jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>d. mengembangkan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemertanian jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.	Jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpan) Pulau Jawa		
I.3.1.	Merak-Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>a. menetapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Merak-Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta yang melayani PKN Cilegon, PKN Serang, PKW Rangkas Bitung, dan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan serta Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa</p> <p>c. menetapkan jaringan jalur kereta api lintas Merak-Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Merak-Bojonegara-Cilegon, Serang-Pandeglang, dan Cikande-Rangkasbitung), jaringan jalan bebas hambatan, dan Pelabuhan Merak</p> <p>d. menetapkan jaringan jalur kereta api lintas Merak-Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Merak-Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.2.	Cirebon-Purupuk-Purwokerto-Kroya	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api lintas Merak-Cilegon Serang Rangkas Bitung Jakarta</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Merak-Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Merak-Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan penyediaan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai peltangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasaan jalur kereta api yang dapat menggunakan kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>
	Cirebon-Purupuk-Purwokerto-Kroya	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Cirebon-Purupuk-Purwokerto Kroya yang melayani PKV Cirebon dan PKW Purwokerto</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Ciayuraja Kuning dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan serta Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perlombongan, industri, dan perikanan</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cirebon-Purupuk-Purwokerto-Kroya yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa,</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Lohbener-Indramayu-Cirebon, Cirebon-Kuningan-Ciamis, Tegal-Slawi-Prupuk-Ajibarang-Wangan, Purwokerto-Rawalo, dan Ajibarang-Purwokerto-Banyumas), jaringan jalan bebas hambatan, Pelabuhan Arjuna (Cirebon), dan Bandar Udara Cakrabhuwana</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Cirebon-Prupuk-Purwokerto-Kroya dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.3.	Labuan Pandeglang Rangkas Bitung	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>i. mencurapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung yang melayani PKW Pandeglang dan PKW Rangkas Bitung</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan dan pertambangan</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (<u>Serang-Pandeglang dan Cikande-Rangkasbitung</u>)</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.4.	Anyer-Kidul-Cilegon	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Labuan-Pandeglang-Rangkas Bitung dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemertapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Anyer-Kidul-Cilegon yang melayani PKN Cilegon</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Anyer-Kidul-Cilegon yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Merak-Bojonegara-Cilegon), dan jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Anyer-Kidul-Cilegon dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.5.	Rongor Sukahumi Cianjur Padalarang	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Anyer-Kidul-Cilegon dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dihorasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang paka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Anyer-Kidul-Cilegon dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Anyer-Kidul-Cilegon dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemertapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang penguasaan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi pekeretaraan</p> <p>a. memanfaatkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Rongor Sukahumi Cianjur-Padalarang yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Sukahumi, dan PKN Kawasan Perkotaan Rongor Raya</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Depanur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan; Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertanian,</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>pariwisata, dan perkebunan, serta Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Jakarta-Depok-Bogor, Jakarta-Ciputat-Bogor, Ciawi-Puncak-Cianjur, dan Cikampek-Purwakarta-Padalarang), dan jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.6.	Indramayu-Jatibarang	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>i. mencurapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Indramayu-Jatibarang yang melayani PKW Indramayu</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Clayumaja Kuning dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Indramayu-Jatibarang yang terpacu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa dan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (<u>Lohbener-Indramayu-Cirebon</u>)</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Indramayu-Jatibarang dengan memperbaiki fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Indramayu-Jatibarang dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Indramayu-Jatibarang dan jalan</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.7.	Kadipaten-Cirebon	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>b. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Indramayu-Jatibarang dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>l. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Kadipaten-Cirebon yang melayani PKN Cirebon dan PKW Kadipaten</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kadipaten-Cirebon yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cileunyi-Sumedang-Kadipaten-Palimanan, Lohbener-Indramayu-Cirebon, Cirebon-Kuningan-Ciamis), jaringan jalan bebas hambatan, Pelabuhan Arjuna-Cirebon, dan Bandar Udara Cakrabhuwana</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kadipaten-Cirebon dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.8.	Cikajang Cibatu	Jaringan jalur kereta api antar kota	<p>c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi aringan jalur kereta api I lintas Kadipton-Cirebon dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya diherasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang paka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Kadipton-Cirebon dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Kadipton-Cirebon dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemertapan arungan jalur kereta api di Pulau Jawa Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang penguasaan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi pekeretaraan</p> <p>a. memanfaatkan jaringan jalur kereta api antar kota lintas Cikajang Cibatu</p> <p>b. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cikajang-Cibatu yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa dan jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cikajang-Cibatu dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.9.	Gabunggung Tasikmalaya	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Cikajang-Cibatu dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dihormati</p> <p>e. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>f. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Cikajang-Cibatu dan jalan</p> <p>g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Cikajang-Cibatu dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemertapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa Bali</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang penguasaan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>
		Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>a. memanfaatkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Galunggung-Tasikmalaya yang melayani PKW Tasikmalaya</p> <p>b. meningkatkan lingsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Priangan Timur Pongondaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan</p> <p>c. memanfaatkan jaringan jalur kereta api lintas Galunggung-Tasikmalaya yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Lengah Pulau Jawa dan jaringan jalan bebas hambatan</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.1 D.	Cibulung Pangandaran Banjar	Jaringan Jalur kereta api antarkota	<p>d. menantapkan jaringan jalur kereta api lintas Galunggung-Tasikmalaya dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Galunggung-Tasikmalaya dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang perlu terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah pelintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Galunggung-Tasikmalaya dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Galunggung-Tasikmalaya dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemertanian jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa Bali</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat meningkatkan kepentingan operasi dan keselamatan transportasi keberataapian</p> <p>a. memanfaatkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Cibulung Pangandaran Banjar yang melayani PKW Pangandaran</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan kawasan Andalan Priangan Turus-Pangandaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, pekebunan, pariwisata, dan perikanan</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. menantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cijulang-Pangandaran-Banjar yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Banjar-Kalipucang), dan jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>d. menantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cijulang-Pangandaran-Banjar dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Cijulang-Pangandaran-Banjar dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Cijulang-Pangandaran-Banjar dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Cijulang-Pangandaran-Banjar dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.1 1.	Cilacap-Maos	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Cilacap-Maos yang melayani PKN Cilacap</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalur kereta api lintas Cilacap-Maos untuk mendukung pengembangan Kawasan Audalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cilacap-Maos yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan, dan Pelabuhan Tanjung Intan</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cilacap-Maos dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan industri, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Cilacap-Maos dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembalian ruangnya diluasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Cilacap-Maos dan jalan</p> <p>h. menelpon garis serpadun bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Cilacap-Maos dengan memperhatikan dampak lingkungan serta</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.1 2.	Tegal-Prupuk	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Tegal-Prupuk yang melayani PKW Tegal</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalur kereta api lintas Tegal-Prupuk untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bregas dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Tegal-Prupuk yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Tegal-Slawi-Prupuk-Ajibarang-Wangon), dan jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Tegal-Prupuk dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Tegal-Prupuk dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.1 3.	Wonosobo-Purwokerto	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Tegal-Prupuk dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Tegal-Prupuk dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemertapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Wonosobo-Purwokerto yang melayani PKW Purwokerto dan PKW Wonosobo</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalur kereta api lintas Wonosobo-Purwokerto untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Wonosobo-Purwokerto yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa dan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Purwokerto-Kawalo, Ajibarang-Purwokerto-Banyumas, dan Pekalongan-Wonosobo)</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Wonosobo-Purwokerto dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.1 4.	Purworejo Kutoarjo	Jaringan jalur kereta api antarbota	<p>c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Wonosobo-Purwokerto dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya diherasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang paka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah pelintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Wonosobo-Purwokerto dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Wonosobo-Purwokerto dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemertapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang penguasaan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi pekerabatan</p> <p>a. memanfaatkan jaringan jalur kereta api antar kota lintas Purworejo Kutoarjo</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalur kereta api lintas Purworejo-Kutoarjo untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor: unggulan pertanian, pariwisata, pembangunan, industri, dan perikanan</p> <p>c. memanfaatkan jaringan jalur kereta api lintas Purworejo-Kutoarjo yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.1 5	Parakan Secang	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>d. menantapkan jaringan jalur kereta api lintas Purworejo-Kutoarjo dengan memperbaiki fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Purworejo-Kutoarjo dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah polintasan sebidang antara aringan jalur kereta api lintas Purworejo-Kutoarjo dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Purworejo-Kutoarjo dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemertapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi keberataapian</p>
			<p>a. menantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Parakan Secang</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalur kereta api lintas Parakan Secang untuk mendukung pengembangan kawasan Andalan Borobudur dan Sekutarya dengan sektor unggulan pariwisata</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Parakan-Secang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpanan Pulau Jawa (Secang-Magelang-Sleman-Yogyakarta), dan jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Parakan-Secang dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Parakan-Secang dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Parakan-Secang dan jalan</p> <p>h. menciptakan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Parakan-Secang dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepenyangan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.1 6.	Wonogiri-Surakarta	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>a. menantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Wonogiri-Surakarta yang melayani PKN Surakarta</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalur kereta api lintas Wonogiri-Surakarta untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Wonogiri-Surakarta yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa dan jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Wonogiri Surakarta dengan memperbaiki fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Wonogiri Surakarta dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sbidang antara jaringan jalur kereta api lintas Wonogiri-Surakarta dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Wonogiri Surakarta dengan memperhatikan dampak lingkungan</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.1 /	Kedungjati-Gundih	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. memanfaatkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Kedungjati-Gundih yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalur kereta api lintas Kedungjati-Gundih untuk mendukung pengembangan Kawasan Abadiah Kedungsepur dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan</p> <p>c. memanfaatkan jaringan jalur kereta api lintas Kedungjati-Gundih dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Kedungjati-Gundih dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya diutamakan</p> <p>e. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>f. membatasi jumlah pehabisan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Kedungjati-Gundih dan jalan</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.1 8.	Gambir-Surakarta	Jaringan jalur- kereta api antarkota	<p>g. menciptakan garis sirip-padan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Kedungati-Gundih dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemertapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai peraturan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat menganggarkan kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Gambir-Jogja-Surakarta yang melayani PKN Surakarta</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalur kereta api lintas Gambir-Surakarta untuk mendukung pengembangan kawasan Ancalan Sulusuku Wonorejo dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Gambir-Surakarta yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa dan jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Gambir-Surakarta dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Gambir-Surakarta dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.1 9.	Cepu-Blora-Purwodadi-Demak- Kudus Juwana Rembang	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perjalanan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Garibringan-Surakarta dan jalan</p> <p>h. menetapkan gacis serpadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Garibringan-Surakarta dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan penertarikan dan pemanfaatan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang penguasaan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepeninggan operasi dan keselamatan transportasi pekerenapan</p> <p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Cepu-Blora-Purwodadi-Demak Kudus Juwana Rembang yang melayani PKV Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKW Cepu, dan PKW Kudus</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalur kereta api lintas Cepu-Blora-Purwodadi-Demak Kudus Juwana Rembang untuk mendukung pengembangan Kawasan Ancelalan Kedungsepur dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan serta Kawasan Ancelalan Wanasakti dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, dan perikanan</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cepu-Blora-Purwodadi-Demak-Kudus-Juwana-Rembang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Rembang-Blora-Cepu-Padangan), dan jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cepu-Blora-Purwodadi-Demak-Kudus-Juwana-Rembang dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Cepu-Blora-Purwodadi-Demak-Kudus-Juwana-Rembang dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Cepu-Blora-Purwodadi-Demak-Kudus-Juwana-Rembang dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Cepu-Blora-Purwodadi-Demak-Kudus-Juwana-Rembang dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.2 0.	Lasem-Jatiroto-Bojonegoro	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Lasem-Jatiroto-Bojonegoro yang melayani PKW Bojonegoro</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Lasem-Jatiroto-Bojonegoro yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Widang-Bojonegoro-Padangan-Ngawi-Madiun-Caruban), dan jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Lasem-Jatiroto-Bojonegoro dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Lasem-Jatiroto-Bojonegoro dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Lasem-Jatiroto-Bojonegoro dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Lasem-Jatiroto-Bojonegoro dengan memperhatikan dampak</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.2 1.	Slahung-Madiun	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Slahung-Madiun yang melayani PKW Madiun</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalur kereta api lintas Slahung-Madiun untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Slahung-Madiun yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, dan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Widang-Bojonegoro-Padangan-Ngawi-Madiun-Caruban dan Madiun-Ponorogo-Trenggalek)</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Slahung-Madiun dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Slahung-Madiun dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.2 2.	Kertosono Kediri Tumpangagung Blitar-Malang-Bangil	Jaringan jalur kereta api antar kota	<p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Slahung-Maduan dan Talan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Slahung Maduan dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemanfaatan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang penguasaan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi pekeretaraan</p> <p>a. memanfaatkan jaringan jalur kereta api antar kota lintas Kertosono Kediri Tumpangagung-Blitar-Malang-Bangil yang melayani PKN Malang, PKW Kediri, dan PKW Nitaa</p> <p>h. meningkatkan fungsi pelayanan jaringan jalur kereta api lintas Kertosono Kediri-Tumpangagung-Blitar-Malang-Bangil untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Kediri Tumpang Agung Blitar dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata serta Kawasan Andalan Malang dan Sekelamnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, perkebunan, dan pariwisata</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kertosono-Kediri-Tulungagung-Blitar-Malang-Bangil yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Gempol-Malang, Malang-Kepanjen, dan Kertosono-Kediri-Tulung Agung), dan jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kertosono-Kediri-Tulungagung-Blitar-Malang-Bangil dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Kertosono-Kediri-Tulungagung-Blitar-Malang-Bangil dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Kertosono-Kediri-Tulungagung-Blitar-Malang-Bangil dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Kertosono-Kediri-Tulungagung-Blitar-Malang-Bangil dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.2 3.	Panarukan-Situbondo-Kalisat	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>l. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Panarukan-Situbondo-Kalisat yang melayani PKW Jember</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan laut</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Panarukan-Situbondo-Kalisat yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Situbondo-Garduatak-Banyuwangi), dan jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Panarukan-Situbondo-Kalisat dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Panarukan-Situbondo-Kalisat dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang pelca terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.2 4.	Surabaya-Bangil-Probolinggo- Jember-Banyuwangi	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Panarukan-Situbondo-Kalisat dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Panarukan-Situbondo-Kalisat dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Surabaya-Bangil- Probolinggo-Jember-Banyuwangi yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKW Probolinggo, PKW Jember, dan PKW Banyuwangi</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan laut, serta Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pertanian</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Surabaya-Bangil-Probolinggo-Jember-Banyuwangi yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Mojokerto-Gempol, Gempol-Malang, Probolinggo-Wonorejo, dan Situbondo-Garduatak-Banyuwangi), serta jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Surabaya-Bangil-Probolinggo-Jember-Banyuwangi dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Surabaya-Bangil-Probolinggo-Jember-Banyuwangi dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Surabaya-Bangil-Probolinggo-Jember-Banyuwangi dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Surabaya-Bangil-Probolinggo-Jember-Banyuwangi dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.2 5	Malang Dampit.	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>i. mencurapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Malang-Dampit yang melayani PKN Malang</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya dengan dukungan perizinan, perikanan, industri, perkebunan dan pariwisata</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Malang-Dampit yang terpadu dengan Jaringan Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Gempol-Malang dan Malang-Kepanjen), serta jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Malang-Dampit dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Malang-Dampit dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.2 6.	Kamal-Bangkalan-Pamekasan-Sumeneh	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Malang-Dampit dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Malang-Dampit dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemertapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Kamal-Bangkalan-Pamekasan-Sumeneh yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dan PKW Pamekasan</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, dan, perikanan</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kamal-Bangkalan-Pamekasan-Sumeneh yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Madura (Kamal-Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Sumeneh-Kaliangget) dan Pelabuhan Branta</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kamal-Bangkalan-Pamekasan-Sumeneh dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.2 7.	Anyer Kidul Tahuan Pamulang	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Kamal-Bangkalan-Parekasan-Sumucup dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Kamal-Bangkalan-Parekasan-Sumucup dan Jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Kamal-Bangkalan-Parekasan-Sumucup dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemertapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. mencurahkan ketuntasan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang transit dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. memanfaatkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Anyer Kidul Labuan Pamulang</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. menetapkan jaringan jalur kereta api lintas Anyer Kidul-Labuan-Panimbang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa dan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa</p> <p>d. menetapkan jaringan jalur kereta api lintas Anyer Kidul-Labuan-Panimbang dengan memperhatikan fungsi kawasan rawan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Anyer Kidul-Labuan-Panimbang dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Anyer Kidul-Labuan-Panimbang dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Anyer Kidul-Labuan-Panimbang dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.2 8.	Cilegon-Bojonegara	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Cilegon-Bojonegara yang melayani PKN Cilegon</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cilegon-Bojonegara yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Merak-Bojonegara-Cilegon), dan jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Cilegon-Bojonegara dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Cilegon-Bojonegara dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Cilegon-Bojonegara dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Cilegon-Bojonegara dengan memperhatikan dampak lingkungan</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.2 9.	Kiaracondong-Rancaekek- Tanjungsari-Kertajati- Kadipaten	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Kiaracondong-Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan PKW Kadipaten</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan serta Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kiaracondong-Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (<u>Cileunyi-Sumedang-Kadipaten-Palimanan</u>), dan jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kiaracondong-Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati-Kadipaten dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.3 D.	Cikampek Pelabuhan Cilamaya	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Kiaracundong-Rancaekek-Anjungsari-Kertajati-Kadipaten dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Kiaracundong-Rancaekek-Anjungsari-Kertajati-Kadipaten dan Jalur</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Kiaracundong-Rancaekek-Anjungsari-Kertajati-Kadipaten dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemertapan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menertapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang transit dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. memanfaatkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Cikampek Pelabuhan Cilamaya yang melayani PKW Cikampek Citopo</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan kawasan Andalan Purwasuka dengan unggul pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. menetapkan jaringan jalur kereta api lintas Cikampek-Pelabuhan Cilamaya yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Cikampek-Purwakarta-Padalarang dan Cikampek-Cilamaya), jaringan jalan bebas hambatan, serta Pelabuhan Cilamaya</p> <p>d. menetapkan jaringan jalur kereta api lintas Cikampek-Pelabuhan Cilamaya dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Cikampek-Pelabuhan Cilamaya dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Cikampek-Pelabuhan Cilamaya dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Cikampek-Pelabuhan Cilamaya dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.3 1.	Kedungjati-Ambarawa- Magelang-Yogyakarta	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Yogyakarta, PKW Salatiga, dan PKW Magelang</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Kedungsepur dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, serta Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (<u>Semarang-Ungaran-Bawen dan Secang-Magelang-Steman-Yogyakarta</u>), serta jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.3 2.	Rerang Blora Cepu	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta dan jalan</p> <p>h. menelapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Kedungjati-Ambarawa-Magelang-Yogyakarta dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. mencrapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepenningan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Rembang-Blora-Cepu yang melayani PKW Cepu</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Wanarakuti dengan sektor unggulan pertanian, industri, perburubangan, dan perikanan</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Rembang-Blora-Cepu yang terpacu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Rembang-Blora-Cepu-Padangan), dan jaringan jalan bebas hambatan</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.3 3.	Kudus Bakalan	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>d. menantapkan aringan jalur kereta api lintas Kembang-Bloora-Cepu dengan memperbaiki fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi aringan jalur kereta api lintas Kembang-Bloora-Cepu dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah polintasan sebidang antara aringan jalur kereta api lintas Kembang-Bloora-Cepu dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Kembang-Bloora-Cepu dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemertapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi keberataapian</p> <p>a. memanfaatkan aringan jalur kereta api antar kota lintas Kudus Bakalan yang melayani PKW Kudus</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan kawasan Andalan Wanarukti dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, dan peukiman</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kudus-Bakalan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa dan jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Kudus-Bakalan dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Kudus-Bakalan dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Kudus-Bakalan dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Kudus-Bakalan dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.3 4.	Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis yang melayani PKN Yogyakarta</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri dan perikanan serta Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Yogyakarta-Bantul-Greeces-Parangtritis), dan jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis dan jalan</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.3 5.	Tuban-Babat-Jombang	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Borobudur-Yogyakarta-Parangtritis dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Tuban-Babat-Jombang yang melayani PKW Tuban</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan dan pertambangan</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Tuban-Babat-Jombang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Tuban-Sadang-Gresik dan Widang-Bojonegoro-Padangan-Ngawi-Madiun-Caruban), serta jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Tuban-Babat-Jombang dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.3 6.	Lumajang-Rambipuji	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>c. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Tuban-Babat-Jombang dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Tuban-Babat-Jombang dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Tuban-Babat-Jombang dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Lumajang-Rambipuji</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, pertanian, perkebunan, pertanian, perikanan dan pertambangan</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Lumajang-Rambipuji yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.3.3 7.	Kamal-Bangkalan-Tanjung Bumi	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>d. memantapkan jaringan jalur kereta api lintas Lumajang-Rambipuji dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Lumajang-Rambipuji dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Lumajang-Rambipuji dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Lumajang-Rambipuji dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. memantapkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Kamal-Bangkalan-Tanjung Bumi yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. menetapkan jaringan jalur kereta api lintas Kamal-Bangkalan-Tanjung Bumi yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Madura (Kamal-Bangkalan-Sampang-Pamekasan-Sumenep-Kalianget dan Bangkalan-Tanjung Bumi)</p> <p>d. menetapkan jaringan jalur kereta api lintas Kamal-Bangkalan-Tanjung Bumi dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Kamal-Bangkalan-Tanjung Bumi dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Kamal-Bangkalan-Tanjung Bumi dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Kamal-Bangkalan-Tanjung Bumi dengan memperhatikan dampak jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.3 8.	Jaringan Jalur Kereta Api di Pulau Bali pada Lintas Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura yang melayani PKW Negara, PKN Kawasan Perkoataan Sarbagita, dan PKW Semarang</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali, Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Bali, jaringan jalan pengumpan Pulau Bali, jaringan jalan bebas hambatan, serta pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Karangasem</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.3 9.	Singaraja-Tabanan	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Gilimanuk-Negara-Tabanan-Denpasar-Amlapura dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemertapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Singaraja-Tabanan yang melayani PKW Singaraja dan PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas Singaraja-Tabanan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali, Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Bali, jaringan jalan pengumpan Pulau Bali, dan jaringan jalan bebas hambatan</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.4 D.	Kuburambahan Bangli Gianyar	Jaringan jalur kereta api antarkota	<p>d. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas Singaraja-Tabanan dengan memperbaiki fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Singaraja-Tabanan dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah polintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Singaraja-Tabanan dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Singaraja-Tabanan dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemertapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api antarkota lintas Kuburambahan Bangli Gianyar yang melayani PKA Kawasan Pekerjaan Sarbagita</p> <p>b. meningkatkan fungsi pelayanan untuk mendukung pengembangan kawasan Abdalan Denpasar-Ubud-Kintamani dengan skto: angkutan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas Kubutambahan-Bangli-Gianyar yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali, Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Bali, dan jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>d. mengembangkan jaringan jalur kereta api lintas Kubutambahan-Bangli-Gianyar dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api lintas Kubutambahan-Bangli-Gianyar dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>g. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api lintas Kubutambahan-Bangli-Gianyar dan jalan</p> <p>h. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api lintas Kubutambahan-Bangli-Gianyar dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.4.	Jaringan Jalur Kereta Api Cepat Antarkota	Jaringan jalur kereta api cepat antarkota	
I.4.1.	Jaringan jalur kereta api cepat antarkota lintas Jakarta-Semarang-Surabaya	Jaringan jalur kereta api cepat antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api cepat antarkota lintas Jakarta-Semarang-Surabaya untuk meningkatkan keterkaitan antara PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, dan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, serta meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalur kereta api cepat lintas Jakarta-Semarang-Surabaya yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Jakarta-Depok-Bogor dan Semarang-Ungaran-Bawen), serta jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>c. memantapkan jaringan jalur kereta api cepat lintas Jakarta-Semarang-Surabaya dengan memperhatikan fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung, dan kawasan rawan bencana</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api cepat lintas Jakarta-Semarang-Surabaya dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>f. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api cepat lintas Jakarta-Semarang-Surabaya dan jalan</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.	Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan		<p>g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api cepat lintas Jakarta-Semarang-Surabaya dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai penggunaan prasarana untuk mengurangi polusi suara akibat lalu lintas kereta api</p>
II.1.	Jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek	Jaringan jalur kereta api perkotaan	<p>a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien</p> <p>b. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Jakarta-Depok-Bogor, Jakarta-Ciputat-Bogor, dan Tangerang-Serpong-Pamulang-Ciputat), jaringan jalan bebas hambatan, pelabuhan penyeberangan di Kota Jakarta Utara,</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Pelabuhan Tanjung Priok, dan Bandar Udara Soekarno-Hatta untuk meningkatkan daya saing perekonomian Pulau Jawa-Bali</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan memperhatikan kawasan rawan bencana</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>f. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dan jalan</p> <p>g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemertapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>h. menerapkan ketentuan pelarangan mengenai pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.	Jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya	Jaringan jalur kereta api perkotaan	<p>a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepal, aman, dan efisien</p> <p>b. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Cikampek-Purwakarta-Padalarang, Cileunyi-Sumedang-Kadipaten-Palimanan, dan Bandung-Soreang-Rancabali-Cidaun), dan jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan memperhatikan fungsi kawasan lindung dan kawasan rawan bencana</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>f. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan jalan;</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.3.	Jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta	Jaringan jalur kereta api perkotaan	<p>g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>h. menerapkan ketentuan pelarangan mengenai pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien</p> <p>b. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Secang-Magelang-Sleman-Yogyakarta, Yogyakarta-Prambanan-Klaten-Kartosuro, dan Yogyakarta-Bantul-Grege-Parangtritis), dan jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta dengan memperhatikan kawasan rawan bencana</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.4.	Jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur	Jaringan jalur kereta api perkotaan	<p>e. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>f. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan</p> <p>g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>h. menerapkan ketentuan pelarangan mengenai pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>
			<p>a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien</p> <p>b. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Semarang-Ungaran-Bawen), jaringan jalan bebas hambatan, pelabuhan penyeberangan di Kota Semarang dan Kabupaten Kendal, Pelabuhan Tanjung Emas, serta Bandar Udara Ahmad Yani</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
11.5.	Jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gebangkertosusila	Jaringan jalur kereta api perkotaan	<p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsopur dengan memperhatikan kawasan rawan bencana</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsopur dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>f. membatasi jumlah pelintasan sebidang antara aringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsopur dan jalan;</p> <p>g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsopur dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemertapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa Bali</p> <p>h. menerapkan ketentuan pelarangan pengguna pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gebangkertosusila untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. mengembangkan dan memantapkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Tuban-Sadang-Gresik dan Mojokerto-Gempol), jaringan jalan bebas hambatan, perubahan penyeberangan di Kota Surabaya dan Kabupaten Lamongan, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, serta Bandar Udara Juanda</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan memperhatikan kawasan rawan bencana</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>f. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan</p> <p>g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemantapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
11.6.	Jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Malang	Jaringan jalur kereta api perkotaan	<p>h. menciptakan ketentuan pelayanan mengenai pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawakan jalur kereta api yang dapat meningkatkan kepentingan operasi dan keselamatan transportasi pekeretaapian</p> <p>a. mengembangkan dan memanfaatkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Malang untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan efisien</p> <p>b. mengembangkan dan memanfaatkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Malang yang terpadu dengan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Gerbang Malang dan Malang Kepanjen) serta jaringan jalan bebas hambatan</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Malang dengan memperhatikan kawasan rawan bencana</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengalihan ruanganya dibatasi</p> <p>e. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>f. membatasi jumlah pelintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Malang dan jalan</p> <p>g. menciptakan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Malang dengan memperhatikan dampak lingkungan serta</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IL.7.	Jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita	Jaringan jalur kereta api perkotaan	<p>kebutuhan pengembangan dan pemertapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa-Bali</p> <p>h. menerapkan ketentuan pelayanan mengenai pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p> <p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita untuk mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, tepat, aman, dan efisien</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali, Jaringan Jalan Pengumpan Pulau Bali, Jaringan Jalan Bebas Hambatan, Pelabuhan Denoa, dan Bandara Udara Ngurah Rai</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan memperhatikan kawasan rawan bencana</p> <p>d. memanfaatkan ruang di sepanjang aksi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dilakukan dengan tingkat intensitas menengah dan tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>e. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III. III.1.	Jaringan Jalur Kereta Api Interkoneksi Jaringan Jalur Kereta Api di Jembatan Selat Sunda	Jaringan jalur- kereta api interkoneksi	<p>f. membatasi jumlah perjalanan sbidang antara jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dan akan</p> <p>g. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita dengan memperhatikan dampak lingkungan serta kebutuhan pengembangan dan pemertapan jaringan jalur kereta api di Pulau Jawa Bali</p> <p>h. menetapkan ketentuan perencanaan mengenai pemanfaatan ruang manfaat dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat meningkatkan kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>
III. III.1.	Jaringan Jalur Kereta Api Interkoneksi Jaringan Jalur Kereta Api di Jembatan Selat Sunda	Jaringan jalur- kereta api interkoneksi	<p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api interkoneksi pada jaringan jalur kereta api di Jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalur kereta api interkoneksi pada jaringan jalur kereta api di Jembatan Selat Sunda yang melayani PKN atau PKW di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api interkoneksi pada jaringan jalur kereta api di Jembatan Selat Sunda untuk mendukung pengembangan kawasan andalan di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera</p>

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>d. mengembangkan jaringan jalur kereta api interkoneksi pada jaringan jalur kereta api di Jabatan Sela Sunda dengan memperhatikan fungsi kawasan lindung dan kawasan rawan bencana</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelayaran pemanfaatan ruang transit dan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSTILO BAWRANG YUDHONOYO

LAMPIRAN VI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TANGGAL 16 MARET 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN
JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN DI PULAU JAWA-BALI

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN DI PULAU JAWA-BALI

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Pelabuhan Penyeberangan		
I.1.	Pelabuhan penyeberangan di Kota Ciligon	Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi	<p>a. mengembangkan dan mempertahankan pelatihan penyeberangan di Kota Ciligon untuk meningkatkan keterampilan ancarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan Pulau Sumatra</p> <p>b. mengembangkan dan mempertahankan pelatihan penyeberangan di Kota Ciligon yang melayani PKN Ciligon</p> <p>c. mengembangkan dan mempertahankan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan di Kota Ciligon untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang</p> <p>d. mengembangkan dan mempertahankan pelatihan penyeberangan di Kota Ciligon yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara-Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan (Langrang-Merak), dan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengurupan, Pulau Jawa (Merak Ciligon Serang Rangkas Biring Jakarta)</p> <p>e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan</p> <p>f. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.2.	Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Banyuwangi	Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi	<p>a. mengembangkan dan mempertahankan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan keterkaitan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Bali</p> <p>b. mengembangkan dan mempertahankan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Banyuwangi yang melayani PKW Banyuwangi</p> <p>c. mengembangkan dan mempertahankan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Banyuwangi untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang</p> <p>d. mengembangkan dan mempertahankan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Banyuwangi yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Darat Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Pengumpan Pulau Jawa (Situbondo-Grahuatak-Banyuwangi), Jaringan Jalan Bebas Hambatan (Probolinggo-Banyuwangi), dan Jaringan Jalur Kereta Api lintas utara selatan (pengumpan) Pulau Jawa (Surabaya-Bangi-Probolinggo-Jember-Banyuwangi)</p> <p>e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan</p> <p>f. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepeportingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.	Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Jembrana	Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi	<p>a. mengembangkan dan mempertahankan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Jembrana untuk meningkatkan ketertarikan Provinsi Bali dengan Provinsi Jawa Timur;</p> <p>b. mengembangkan dan mempertahankan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Jembrana untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang;</p> <p>c. mengembangkan dan mempertahankan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Jembrana yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali, aringan jalan bebas hambatan (Gilimanuk-Negara), dan jaringan jalur kereta api di Pulau Bali (Gilimanuk-Megara-Cabunan-Dempasar-Amlapura);</p> <p>d. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;</p> <p>e. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepelabuhan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan kerennuan peraturan perundang-undangan</p>
1.4.	Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Karangasem	Pelabuhan penyeberangan lintas	<p>a. mengembangkan dan mempertahankan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Karangasem untuk meningkatkan ketertarikan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan Pulau Lombok</p>

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.5.	Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Serang	Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi	<p>h. mengembangkan dan memanfaatkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Karangasem untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang</p> <p>c. mengembangkan dan memastikan pelaksanaan penyeberangan di Kabupaten Karangasem yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali dan Jaringan Jalan bebas hambatan (Tol)pori Kusumba Padangbai</p> <p>d. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan</p> <p>e. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkupnya Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkupnya Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>a. mengembangkan dan memastikan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Serang untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan Pulau Sumatra dan Pulau Kalimantan</p> <p>b. mengembangkan dan memastikan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Serang yang melayani PKK Cillegon</p> <p>c. mengembangkan dan memastikan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Serang untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang</p>

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.6.	Pelabuhan penyeberangan di Kota Jakarta Utara	Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi	<p>d. mengembangkan dan memanfaatkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Serang yang terpadu dengan jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Melak Kabupaten Ciligon), jaringan jalan bebas hambatan (Cilegon Tinjonegara), dan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengurupan) Pulau Jawa (Cilegon-Bayungbara);</p> <p>e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan</p> <p>f. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
			<p>a. mengembangkan dan memanfaatkan pelabuhan penyeberangan di Kota Jakarta Utara untuk meningkatkan ketepatan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Sumatra</p> <p>b. mengembangkan dan memanfaatkan pelabuhan penyeberangan di Kota Jakarta Utara yang melayani PKN kawasan Perkotaan Jakarta-Roger Depok Cangeang Bekasi (Jahderaheli)</p> <p>c. mengembangkan dan memanfaatkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan di Kota Jakarta Utara untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang</p>

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.7.	Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Kendal	Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi	<p>d. mengembangkan dan mempertahankan pelabuhan penyeberangan Kota Jakarta Utara yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpul Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan (Cawang Tanjung Priok/1a, Wiyono Wiyono, M.Sc, Tanjung Priok-Pluit/Harbour Road, dan Akses Tanjung Priok), serta jaringan jalan: kereta api perantara di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek</p> <p>e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan</p> <p>f. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>a. mengembangkan dan mempertahankan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Kendal untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan Pulau Kalimantan</p> <p>h. mengembangkan dan mempertahankan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Kendal yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedumpsepur)</p>

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.8.	Pelabuhan penyeberangan di Kota Semarang	Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi	<p>c. mengembangkan dan memanfaatkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Kendal untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang</p> <p>d. mengembangkan dan memanfaatkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Kendal yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Ujara Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan (Semarang Batang), serta jaringan jalur kereta api pertototan di PKN Kawasan Perkotaan Kelungsepuh</p> <p>e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan</p> <p>f. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>g. mengembangkan dan memanfaatkan pelabuhan penyeberangan di Kota Semarang untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Kalimantan</p> <p>h. mengembangkan dan memanfaatkan pelabuhan penyeberangan di Kota Semarang yang melayani PKM Kawasan Perkotaan Kelungsepuh</p>

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
19.	Pelabuhan penyeberangan di Kota Surabaya	Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi	<p>c. mengembangkan dan memperbaiki prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan di Kota Semarang untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang</p> <p>d. mengembangkan dan mempertahankan pelabuhan penyeberangan Kota Semarang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Ujara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Semarang-Ungaran-Bawean), jaringan jalan bebas hambatan, serta arungan jalur kereta api perkotaan di PKV Kawasan Perkolatan Kedungsepur</p> <p>e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan</p> <p>f. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peramuran perundang-undangan</p>
	Pelabuhan penyeberangan di Kota Surabaya	Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi	<p>a. mengembangkan dan mempertahankan pelabuhan penyeberangan di Kota Surabaya untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Kalimantan</p> <p>b. mengembangkan dan mempertahankan pelabuhan penyeberangan di Kota Surabaya yang meliputi PKV Kawasan Perkolatan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Cerbangkertosusila)</p>

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.10.	Pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Lamongan	Pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi	<p>c. mengembangkan dan memantapkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan di Kota Surabaya untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang</p> <p>d. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kota Surabaya yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utama Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan (Watu/Aloha Wonorejo Tanjung Perak dan Bandara Juanda Tanjung Perak), dan jaringan jalur kereta api perkeretaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhentikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pemukiman kawasan pelabuhan</p> <p>f. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>a. mengembangkan dan memantapkan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Kalimantan</p>

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>h. mengembangkan dan mempertahankan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Lamongan yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>c. mengembangkan dan memanfaatkan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Lamongan untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang</p> <p>d. mengembangkan dan mempertahankan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Lamongan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan (Gresik-Tuban), dan Jaringan Jalur Kereta Api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan</p> <p>f. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.11.	Kabupaten Badung	pelabuhan penyeberangan lintas antarprovinsi	<p>a. mengembangkan dan mempertahankan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Badung untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Lombok</p> <p>b. mengembangkan dan mempertahankan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Badung yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Denpasar Badung Gianyar Cabanon (Sarbagita)</p> <p>c. mengembangkan dan menciptakan prasarana dan sarana pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Badung untuk melayani pergerakan orang dan/atau barang</p> <p>d. mengembangkan dan mempertahankan pelabuhan penyeberangan di Kabupaten Badung yang terpadu dengan jaringan jalan pengumpan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran-Corbang Bonoa), Jembatan Jalan bebas hambatan (Scrangan-Bonoa-Bandar Udara Ngurah Rai-Nusa Dua Tanjung Benoa), dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita</p> <p>e. memanfaatkan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan</p> <p>f. memanfaatkan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II. II.1.	Lintas penyeberangan Lintas penyeberangan Banyuwangi-Giliranuk	Lintas penyeberangan antara provinsi di Pulau Jawa Bali	<p>a. mengemhankan dan mem anrapkan lintas penyeberangan Banyuwangi-Giliranuk untuk meningkatkan keterkaitan antara provinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Bali</p> <p>b. meningkatkan kapasitas pelayanan lintas penyeberangan untuk mendukung fungsi PKW Banyuwangi</p> <p>c. menerapkan ketanuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran</p> <p>d. menerapkan kelentuan mengenai pelaksanaan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberaduan lintas penyeberangan</p> <p>e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberaduan lintas penyeberangan</p>

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.	Lintas penyeberangan Merak-Bakauheni (Pulau Sumatera)	Lintas penyeberangan antar-provinsi di Pulau Jawa-Nali dengan provinsi di Pulau Sumatera	<p>a. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan Merak-Bakauheni untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Sumatera</p> <p>b. meningkatkan kapasitas pelayanan lintas penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Cileng</p> <p>c. menerapkan ketahanan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan</p> <p>e. memuliasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan</p>
II.3.	Lintas penyeberangan Padangbai Lembar (Pulau Lombok)	Lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan provinsi di Pulau Lombok	<p>a. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan Padangbai Lembar untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan Pulau Pulau Lombok</p> <p>b. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKW Samarapura</p> <p>c. menerapkan ketahanan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran</p>

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.4.	Lintas penyeberangan Bojonegara Pontianak (Pulau Kalimantan) melalui Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan (Pulau Sumatra)	Lintas penyeberangan antar-provinsi di Pulau Jawa-Bali dengan provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatra	<p>d. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaaan lintas penyeberangan</p> <p>a. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaan lintas penyeberangan</p>
			<p>a. mengembangkan dan menatautkan lintas penyeberangan Bojonegara Pontianak melalui Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Kalimantan dengan Pulau Sumatra</p> <p>b. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Cilegon</p> <p>c. menatautkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran</p> <p>d. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaaan lintas penyeberangan</p> <p>e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaan lintas penyeberangan</p>

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.5.	Lintas penyeberangan Ceraibangkertosusila-Banjarmasin (Pulau Kalimantan)	Lintas penyeberangan antar-provinsi di Pulau Jawa Bali dengan provinsi di Pulau Kalimantan	<p>a. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan Ceraibangkertosusila-Banjarmasin untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Kalimantan</p> <p>b. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Kawasan Perkotaan Ceraibangkertosusila</p> <p>c. menerapkan ketertarikan mengenai keselamatan dan keamanan pelayanan</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai peraturan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan</p> <p>e. memuliasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan</p>
II.6.	Lintas penyeberangan Tanjung Pulo-Pangkal Pinang (Pulau Sumatera)	Lintas penyeberangan antar-provinsi di Pulau Jawa-Bali dengan provinsi di Pulau Sumatera	<p>a. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan Tanjung Pulo-Pangkal Pinang untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Sumatera</p> <p>b. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek</p> <p>c. menerapkan ketertarikan mengenai keselamatan dan keamanan pelayanan</p>

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.7.	Lintas penyeberangan Semarang Banjarmasin (Pulau Kalimantan)	Lintas penyeberangan antara provinsi di Pulau Jawa-Bali dengan provinsi di Pulau Kalimantan	<p>d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaaan lintas penyeberangan</p> <p>a. membarasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaan lintas penyeberangan</p>
			<p>a. mengembangkan dan menatautkan lintas penyeberangan Semarang Banjarmasin untuk meningkatkan ketertarikan antar provinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Kalimantan</p> <p>b. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepuh</p> <p>c. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran</p> <p>d. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaaan lintas penyeberangan</p> <p>e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaan lintas penyeberangan</p>

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
11.8.	Lintas penyeberangan Samarang-Samput (Pulau Kalimantan)	Lintas penyeberangan antar-provinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Kalimantan	<p>a. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan Samarang-Samput untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Kalimantan</p> <p>b. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur</p> <p>c. menerapkan ketertarikan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai peraturan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan</p> <p>e. memuliasi pemanfaatan peraturan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan</p>
11.9.	Lintas penyeberangan Samarang-Pontianak (Pulau Kalimantan)	Lintas penyeberangan antar-provinsi di Pulau Jawa-Bali dengan provinsi di Pulau Kalimantan	<p>a. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan Samarang-Pontianak untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Kalimantan</p> <p>b. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur</p> <p>c. menerapkan ketertarikan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran</p>

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
TL.10.	Lintas penyeberangan Kendal Kumai (Pulau Kalimantan)	Lintas penyeberangan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan provinsi di Pulau Kalimantan	<p>d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaaan lintas penyeberangan</p> <p>a. membarasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaan lintas penyeberangan</p> <p>a. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan Kendal Kumai untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan Pulau Kalimantan</p> <p>b. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Kawasan Perkotaan Kotabungcup</p> <p>c. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran</p> <p>d. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaaan lintas penyeberangan</p> <p>e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaan lintas penyeberangan</p>

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.11.	Lintas penyeberangan Lautongan (Gerbangke:masusila) Balikpapan (Pulau Kalimantan)	Lintas penyeberangan antar-provinsi di Pulau Jawa Bali dengan provinsi di Pulau Kalimantan	<p>a. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan Lautongan-Balikpapan untuk meningkatkan keterkaitan antar-provinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Kalimantan</p> <p>b. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangke:masusila</p> <p>c. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai peraturan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan</p> <p>e. memuliasi pemanfaatan peraturan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan</p>
II.12.	Lintas penyeberangan Lautongan (Gerbangke:masusila) Takalar (Pulau Sulawesi)	Lintas penyeberangan antar-provinsi di Pulau Jawa-Bali dengan provinsi di Pulau Sulawesi	<p>a. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan Lautongan-Takalar untuk meningkatkan keterkaitan antar-provinsi di Pulau Jawa Bali dengan Pulau Sulawesi</p> <p>b. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Kawasan Perkotaan Gerbangke:masusila</p> <p>c. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan</p>

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.13.	Lintas penyeberangan Lamongan (Gerbangketususkaj-Bima (Pulau Sumbawa-Kupang (Pulau Timor)	Lintas penyebangan antara provinsi di Pulau Jawa-Bali dengan provinsi di kepulauan Nusa Tenggara	<p>a. membahas pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan</p> <p>a. mengembangkan dan menetapkan lintas penyeberangan Lamongan Bima Kupang untuk meningkatkan keterkaitan antarprovinsi di Pulau Jawa-Bali dengan Kepulauan Nusa Tenggara</p> <p>b. meningkatkan kapasitas pelayanan penyeberangan untuk mendukung fungsi PKN Kawasan Perikanan Gembangkemasalla</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran</p> <p>d. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan</p> <p>e. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan</p>
II.14.	Lintas penyeberangan Jepara Karangjawa (Kabupaten Jepara)	Lintas penyebangan untuk membuka kecerdasian wilayah	<p>a. mengembangkan dan menetapkan lintas penyeberangan Jepara Karangjawa untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan restinggai dan lokasi antara Pulau Jawa dengan Kepulauan Karimunjawa</p> <p>b. menetapkan kelakuan regional keselamatan dan keamanan pelayaran</p>

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.15.	Lintas penyeberangan Gresik-Pulau Bawean (Kabupaten Gresik)	Lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah	<p>c. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaaan lintas penyeberangan</p> <p>d. membarasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaan lintas penyeberangan</p>
II.16.	Lintas penyeberangan Jangkar (Kabupaten Situbondo)-Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep)	Lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah	<p>a. mengembangkan dan memanfaatkan lintas penyeberangan Gresik-Pulau Bawean untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan ringgall dan terisolasi antara Pulau Jawa dengan Pulau Bawean</p> <p>b. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaaan lintas penyeberangan</p> <p>d. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaan lintas penyeberangan</p>
II.16.	Lintas penyeberangan Jangkar (Kabupaten Situbondo)-Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep)	Lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah	<p>a. mengembangkan dan memanfaatkan lintas penyeberangan Jangkar Pulau Sapudi untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan ringgall dan terisolasi antara Pulau Jawa dengan Pulau Sapudi</p> <p>b. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran</p>

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.17.	Lintas penyeberangan Pulau Sapudi Pulau Ross (Kabupaten Sumenep)	Lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah	<p>c. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaaan lintas penyeberangan</p> <p>d. membarasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaan lintas penyeberangan</p>
II.18.	Lintas penyeberangan Jember (Kabupaten Situbondo)-Kaliangre (Kabupaten Sumenep)	Lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah	<p>a. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan Pulau Sapudi Pulau Ross untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan tertinggal dan terisolasi antara Pulau Sapudi dengan Pulau Ross</p> <p>b. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan dan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaaan lintas penyeberangan</p> <p>d. membatasi pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaaan lintas penyeberangan</p>
II.18.	Lintas penyeberangan Jember (Kabupaten Situbondo)-Kaliangre (Kabupaten Sumenep)	Lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah	<p>a. mengembangkan dan memantapkan lintas penyeberangan Jember-Kaliangre untuk meningkatkan aksesibilitas antara Pulau Jawa dengan Pulau Madura</p> <p>b. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran</p>

NO.	JARINGAN TRANSPORTASI PENYEBERANGAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
H.19.	Lintas penyeberangan Kalianggi-Kangean (Kahupaten (Sumenep)	Lintas penyeberangan untuk membuka keterisolasian wilayah	<p>c. menerapkan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan di ruang udara bebas di atas peraturan dan di bawah peraturan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan</p> <p>d. membatasi pemanfaatan peraturan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan</p> <p>a. mengembankan dan memanfaatkan lintas penyeberangan Kalianggi-Kangean untuk meningkatkan aksesibilitas kawasan peringgai dan rekolasi antara Pulau Madura dengan Pulau Kangean</p> <p>b. menerapkan ketentuan mengenai keselamatan dan keamanan pelayaran</p> <p>c. mencrapkan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan di ruang udara bebas di atas peraturan dan di bawah peraturan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan</p> <p>d. membatasi pemanfaatan peraturan yang berdampak pada keberadaan lintas penyeberangan</p>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

LAMPIRAN VII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TANGGAL 16 MARET 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN TATANAN KEPELABUHAN
DI PULAU JAWA-BALI

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN TATANAN KEPELABUHANAN DI PULAU JAWA-BALI

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Pelabuhan Utama		
I.1.	Pelabuhan Tanjung Priok dalam satu sistem dengan Pelabuhan Bujonegara dan Pelabuhan Cilamaya	Pelabuhan utama	<p>a. menetapkan Pelabuhan Tanjung Priok dalam satu sistem dengan pengembangan Pelabuhan Bujonegara dan Pelabuhan Cilamaya untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor yang mendukung perkembangan PKY Kawasan Perkotaan Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek) sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan dan jasa, Kawasan Andalan Datar Puncak Ciurjur (Bojopunjur dan sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, perikanan, dan perambangan, serta Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu dengan sektor unggulan perikanan, perambangan, dan pariwisata, PKY Serang dan PKA Cilegon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Peronegara Merak Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan perambangan serta Kawasan Andalan Laut Krakatau dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, perambangan, dan pariwisata, dan PKW Cilincing sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan</p>

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. mengembanhngikan Pelabuhan Tanjung Priok dalam satu sistem dengan penecurbaangan Pelabuhan Bojonegara dan Pelabuhan Cilamaya dengan memanfaatkan Air Laut Kepulauan Indonesia I</p> <p>c. memantapkan Pelabuhan Tanjung Priok yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Udara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan (Cawang-Tanjung Priok/Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc., Tanjung Priok Pluit/Harbour Road, dan Akses Tanjung Priok), serta jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek</p> <p>d. mengembangkan Pelabuhan Bojonegara yang terpadu dengan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Merak Tirtonegara Cilegon), jaringan jalan bebas hambatan (Cilegon Bojonegara), dan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpulan) Pulau Jawa (Cilegon-Bojonegara)</p> <p>e. mengembanhngikan Pelabuhan Cilamaya yang terpadu dengan jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Cikampek Pelabuhan Cilamaya), jaringan jalan bebas hambatan (Cikampek-Pelabuhan Cilamaya), dan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpulan) Pulau Jawa (Cikampek Pelabuhan Cilamaya)</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan Lertsama Pelabuhan Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Bojonegara, dan Pelabuhan Cilamaya untuk kepentingan pertambangan dan kearmahan negara</p>

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.2.	Pelabuhan Arjuna (Cirebon)	Pelabuhan utama	<p>g. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Tanjung Peleok, Pelabuhan Bojonegara, dan Pelabuhan Cilimaya</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</p> <p>i. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus memperhatikan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>a. memantapkan Pelabuhan Arjuna (Cirebon) untuk meningkatkan kegiatan ekspor impor yang mendukung perkembangan PKN Cirebon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan (Ciayumaja Kuning) dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan</p> <p>b. memantapkan Pelabuhan Arjuna (Cirebon) yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Pengumpulan Pulau Jawa (Cirebon Kuningan Cianjur), Jaringan Jalan Bebas Hambatan (Palimanan-Cirebon/Kanci dan Kanci-Pejagan), Jaringan Jalan Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, dan Jaringan Jalur Kereta Api Lintas utara selatan (pengumpulan) Pulau Jawa (Cirebon-Purwokerto-Kroya dan Kadipaten-Cirebon)</p>

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama Pelabuhan Açuana (Ciribon) untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>d. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Açuana (Ciribon)</p> <p>e. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berbatasan pada keberadaan jalur transportasi laut</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>
1.3.	Pelabuhan Tanjung Emas	Pelabuhan utama	<p>a. memantapkan Pelabuhan Tanjung Emas untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor yang mendukung perkembangan PDA Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Purwodadi (Kedungsepuh) sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kendal, Derrak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi (Kedungsepuh) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan serta Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, perkebunan, dan pariwisata</p> <p>b. memantapkan Pelabuhan Tanjung Emas yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, arungan jalan pengurupan Pulau Jawa</p>

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>(Semarang Ungaran Dawan), jaringan jalan bebas hambatan, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungreppur</p> <p>c. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama Pelabuhan Tanjung Emas untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>d. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Tanjung Emas</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>
1.	Pelabuhan Tanjung Incan	Pelabuhan utama	<p>a. memantapkan Pelabuhan Tanjung Incan untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor yang mendukung perkembangan PKN Cilacap sebagai pusat pengembangan kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebunren, Cilacap, dan Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan dan Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan laut, pertambangan, dan pariwisata</p>

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.5.	Pelabuhan Tanjung Perak dalam satu sistem dengan Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Bulu	Pelabuhan utama	<p>b. mempertahankan Pelabuhan Tanjung Intan yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan bebas hambatan (Pelagan Cilacap, Cilacap Yogyakarta, dan Ciaria Cilacap), dan Jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan Pulau Jawa (Cilacap-Macss)</p> <p>c. menerapkan ketubuhan mengenai pemanfaatan bersama Pelabuhan Tanjung Intan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>d. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Tanjung Intan</p> <p>e. menocrapkan ketemuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampuak pada keberadaan jalur transportasi laut</p> <p>f. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>a. memantapkan Pelabuhan Tanjung Perak dalam satu sistem dengan Pelabuhan Tanjung Bumi Tanjung Bulu Pandan untuk meningkatkan kegiatan ekspor impor yang mendukung perkembangan PKY Kawasan Perkotaan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan</p>

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Pondan		<p>(Gerbangkertosuaila) sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosuaila) dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata</p> <p>b. mengembangkan Pelabuhan Tanjung Perak dalam satu sistem dengan pengembangan Pelabuhan Tanjung Buntar-Lanjung Buth Pandan dengan memanfaatkan Air Laut Kepulauan Indonesia II</p> <p>c. memanfaatkan Pelabuhan Tanjung Perak yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan (Watu/Aoba-Wonokromo-Lanjung Perak dan Bandara Juanda-Lanjung Perak), dan jaringan jalur kereta api pekalasan di PKV Kawasan Perkotaan Gerbangkertosuaila</p> <p>d. Pelabuhan Curyung Numi dan Pelabuhan Curyung Tulu Pandan yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Madura (Bangkalan Curyung Buntar dan jaringan jalur kereta api di Pulau Madura (Karai-Datangkalan-Tanjung Numi)</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Curyung Numi, dan Pelabuhan Curyung Tulu Pandan untuk kepentingan perlambatan dan keamanan negara</p>

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Bumi, dan Pelabuhan Tanjung Batu Pandan</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara helikopter di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</p> <p>h. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>
1.6.	Pelabuhan Banoa	Pelabuhan utama	<p>a. mengembangkan Pelabuhan Banoa untuk meningkatkan kegiatan ekspor impor yang mendukung perkembangan PKK Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita) sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Denpasar Ubud Kintamani dan Sekitarnya (Bali Selatan) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan dan Kawasan Andalan Laut Tuli dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata</p> <p>b. mengembangkan Pelabuhan Banoa dengan memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia II</p>

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. mengembanhngikan Pelabuhan Benua yang terpadu dengan jaringan jalan penguunpan Pulau Bali (Simpang Pesanggaran-Cerbang Benua), jaringan jalan bebas hambatan (Serangan Benua Hander Udara Ngurah Rai Nuan Dua Carung Benua), dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Serbagila</p> <p>d. menerapkan ketubuhan mengenai pemanfaatan bersama Pelabuhan Benua untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>e. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Benua</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berbatasan pada keberadaan jalur transportasi laut</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan hanya mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku</p>

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.	Pelabuhan Pengumpul		
II.1.	Pelabuhan Merak	Pelabuhan pengumpul	<p>a. mengembangkan Pelabuhan Merak untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor yang mendukung perkembangan PKN Cillegon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bojonegara Merak Cillegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan serta Kawasan Andalan Laut Krakatau dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata</p> <p>b. mengembangkan Pelabuhan Merak dengan memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia I</p> <p>c. mengembangkan Pelabuhan Merak yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpan Pulau Jawa (Merak-Bojonegara Cillegon), jaringan jalan bebas hambatan (Tangerang Merak), dan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan Pulau Jawa (Merak-Cilegon-Serang-Rangkas Bitung-Jakarta)</p> <p>d. menerapkan kerennuan mengenai pemanfaatan harsama Pelabuhan Merak untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>e. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Merak</p> <p>f. mencurahkan ketertarikan regional pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas bulan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</p>

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.	Pelabuhan Gresik	Pelabuhan pengumpul	<p>g. membantu pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>a. memantapkan Pelabuhan Gresik untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor yang mendukung perkembangan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila dengan aektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata</p> <p>b. memantapkan Pelabuhan Gresik dengan memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia II</p> <p>c. memantapkan Pelabuhan Gresik yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Uluu Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan (Gresik-Tuban dan Surabaya-Gresik), dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>d. menerapkan kerennan mengenai pemanfaatan bersama Pelabuhan Gresik untuk kepentingan portabtuat dan keamanan negara</p> <p>e. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Gresik</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</p>

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
11.3.	Pelabuhan Branta	Pelabuhan pengumpul	<p>g. membantu pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>a. mengembangkan Pelabuhan Branta untuk meningkatkan kegiatan ekspor-impor yang mendukung perkembangan PKW Parickasan sebagai pusat perimbangan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, perikanan dan Kawasan Andalan Laut Madura dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, perambangan, pariwisata</p> <p>b. mengembangkan Pelabuhan Branta dengan memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia II</p> <p>c. mengembangkan Pelabuhan Branta yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Madura (Kaural-Bangkalan-Sairipang-Pamckasan-Surancip-Kaliangan) dan jaringan jalur kereta api di Pulau Madura (Kaural-Bangkalan-Pamckasan-Surancip)</p> <p>d. merencanakan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama Pelabuhan Branta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>e. mengembangkan fasilitas protokol, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Branta</p>

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>f. menerapkan ketentuan mengenai pelanggaran kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan Jahu transportasi laut</p> <p>g. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TANGGAL 16 MARET 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN TATANAN KEBANDARUDARAAN
DI PULAU JAWA-BALI

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN TATANAN KEBANDARUDARAAN DI PULAU JAWA-BALI

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Bandar Udara Soekarno-Hatta	Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer	<p>a. memantapkan fungsi Bandar Udara Soekarno-Hatta sebagai bagian dari prasarana pemunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Jakarta Bogor-Depok-Langrang-Bekasi (Jabodetabek) sebagai pusat pencincangan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan dan jasa, Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur (Bupun'ur Jan Sekatarnya' dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, industri, dan perikanan, serta Kawasan Andalan Pulau Seribu dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata guna mendorong perkembangan di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. memanfaatkan Bandar Udara Soekarno Hatta yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, antaran jalan bebas hambatan (Prof. Dr. Sedyatno dan Jakarta Outer Ring Road II: Kurnal Teluk Naga Baru Ceper; Cengkareng Baru Ceper Kunciran, Kunciran Serpong, Serpong-Cinere, Cince-Cimanggis, Curanggis-Gibitung, dan Cibitung-Gililing), dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek</p> <p>c. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersera Bandar Udara Soekarno Hatta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan ketibingan</p>

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
2.	Bandar Udara Juanda Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer	Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer	<p>a. mempertahankan fungsi Bandar Udara Juanda sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN kawasan Perkotaan Gresik-Tangkulan Mojokerto-Surahayu Sidoarjo Lamongan (Gerbangkertosusila) sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Gresik, Nangklan, Murokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusila) dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>b. mempertahankan Bandar Udara Juanda yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan jalan bebas hambatan (Simpang Susun Watu-Badara Juanda dan Bandara Juanda Tunjung Perak), dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>c. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan dan keamanan negara Juanda untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebijakan</p>
3.	Bandar Udara Ngurah Rai	Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan primer	<p>a. mempertahankan fungsi Bandar Udara Ngurah Rai sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung Gianyar Tabanan (Sarbajita) sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Denpasar-Dauh-Kintamani (Bali Selatan) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan</p>

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>periklanan serta Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>b. memampukan Bandar Udara Ngurah Rai yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Bali, jaringan jalan bebas hambatan (Kuta-Bandar Udara Ngurah Rai), dan jaringan jalur kereta api perkolatan di PKN Kawasan Perkotatan Saibagita</p> <p>c. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan berskala Bandar Udara Ngurah Rai untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas batas kawasan ketibangun</p>
4.	<p>Bandar Udara Adisutjipto dalam satu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo</p>	<p>Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder</p>	<p>a. memampukan fungsi Bandar Udara Adisutjipto dalam satu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Yogyakarta sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan serta PKN Surakarta sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonngi, Sragen, Klaren (Subosuko Wonnsraten), dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
3.	Bandar Udara Majalengka	Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder	<p>b. memantapkan Bandar Udara Adisugipto dalam satu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa, Jaringan Jalan Pengumpul Pulau Jawa (Secang Magelang-Sleman Yogyakarta, Yogyakarta-Prambanan-Klaten-Kartusuro, dan Yogyakarta-Bantul-Cregecs-Parangtritis), jaringan jalan bebas hambatan (Semarang-Solo, Yogyakarta-Solo, Yogyakarta Bawen, Solo Mantungan, dan Cilacap Yogyakarta), dan Jaringan Jalur kereta api perkotaan di PKN Yogyakarta-PKN Surakarta</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama Bandar Udara Adisugipto dan Bandar Udara Adi Sumarmo untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan</p> <p>a. memantapkan fungsi Bandar Udara Majalengka sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKW Kadinaren ahaggo pulau pengcirbangan kawasan Andakan Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Cayuruga Kuning) dan Sekelarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>b. memantapkan Bandar Udara Majalengka yang terpadu dengan jaringan jalan pengumpul Pulau Jawa [Cileunyi-Sumedang-Kadipaten-Paliraman]</p>

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
6.	Bandar Udara Yani	Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan sekunder	<p>dan jaringan jalur kereta api lintas utara selatan (pengumpulan) Pulau Jawa (Kia-racondong-Kancackek-Lanjungsari-Kertajati-Kadipaten).</p> <p>c. menerapkan kerentanan mengenai pemanfaatan bersama Bandar Udara Majalengka untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan</p> <p>a. memanfaatkan fungsi Bandar Udara Ahmad Yani sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Kawasan Perkotaan Kendal-Demek Ungaran Semarang Purwodadi (Kedungsrepu) sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi (Kedungsrepu) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa Bali</p> <p>b. memanfaatkan Bandar Udara Ahmad Yani yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsrepu</p> <p>c. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama Bandar Udara Ahmad Yani untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan</p>

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
7.	Bandar Udara Husein Sastranegara	Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier	<p>a. mengembangkan fungsi Bandar Udara Husein Sastranegara sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKL Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan aktor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkuluan guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. mengembangkan Bandar Udara Husein Sastranegara yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa, jaringan jalan bebas hambatan, dan jaringan jalur kereta api perkotaan di PKL Kawasan Perkotaan Bandung Raya</p> <p>c. menerapkan kelenkan mengenai pemanfaatan bersara Bandar Udara Husein Sastranegara untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas kawasan kebanggan</p>
8.	Bandar Udara Cakrabhuwana	Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier	<p>a. memanfaatkan fungsi Bandar Udara Cakrabhuwana sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKN Cirebon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ciyumaha Kuning dan Sekitarnya dengan aktor: unggulan pertanian, industri, perikanan, dan perburungan guna mendorong perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. memantapkan Bandar Udara Cakrabhuwana yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Jawa, jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Cirebon Kuningan Cimisi), Jaringan jalan bebas hambatan (Palimanan Cirebon/Kanci dan Kanci Pejagan), Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa, dan jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpulan) Pulau Jawa (Cirebon-Pupuk-Puwukertu-Kroya dan Kadipaten Cirebon)</p> <p>c. menerapkan ketentuan mengenai per-anfiteatan berskala Bandar Udara Cakrabhuwana untuk kepentingan pelatihan dan keamanan negara</p> <p>d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan luas batas kawasan ketibangan</p>
9.	Bandar Udara Abdulrachman Saleh	Bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan terbatas	<p>a. memantapkan fungsi Bandar Udara Abdulrachman Saleh sebagai bagian dari prasarana penunjang fungsi pelayanan PKA Malang sebagai pusat pengembangan kawasan Andalan Malang dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, perkebunan, dan pariwisata guna mendukung perekonomian di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. memantapkan Bandar Udara Abdulrachman Saleh yang terpadu dengan Jaringan jalan pengumpulan Pulau Jawa (Gempol Malang dan Malang Kepanjen), jaringan jalan bebas hambatan (Pandaan Malang), dan Jaringan jalur kereta api perkotaan di PKA Malang</p>

NO.	NAMA BANDAR UDARA	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersara Bandara Lidara Abdulrachman Saleh untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>d. memanfaatkan ruang dengan memperhatikan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan ketibisingan</p>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONOMO

LAMPIRAN IX
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TANGGAL 16 MARET 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI NASIONAL
DI PULAU JAWA-BALI

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN ENERGI NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Jaringan Pipa Transmisi dan Distribusi Minyak dan Gas Bumi		
I.1.	Jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Pulau Sumatera-Bijonegara-Cikande	Jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi	<p>a. mengembangkan dan merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Pulau Sumatera-Bijonegara-Cikande, Ayeer-Cikande yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKY Ciklegon dan PKN Serang dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. mengembangkan dan merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Pulau Sumatera-Bijonegara-Ciklegon-Ayeer-Cikande untuk melayani Kawasan Analalan Tajonegara Merak Ciklegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan</p> <p>c. menerapkan kerentanan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
I.2.	Pengembangan jaringan transmisi Serang-Ciklegon-Cikampok Bandung	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Serang-Ciklegon-Cikampok-Bandung yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Serang, PKN Ciklegon, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKW Cikampok-Cikopo dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.	Pemantapan jaringan transmisi Tegal Cede-Bitung	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>b. mengembangkan dan menantapkan arungan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Serang-Cilegon-Cikampek-Pandurung untuk melayani Kawasan Andalan Tegayepuru Merak Cilegon, Kawasan Purwasuka, dan Kawasan Cokungan Bandung</p> <p>c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
1.3.	Pemantapan jaringan transmisi Tegal Cede-Bitung	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Tegal Cede-Bitung yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Daerah</p> <p>b. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Tegal Cede-Bitung untuk melayani Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta</p> <p>c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
1.4.	Pemantapan jaringan transmisi Nagrak Bogor-Cumung Putri	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>d. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Nagrak Bogor-Cumung Putri yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.5.	Pemanfaatan jaringan transmisi Bogor-Cibinong	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>b. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Nagrak-Bogor-Gunung Putri untuk melayani Kawasan ambalan Bopunjur dan Sekitarnya</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
1.5.	Pemanfaatan jaringan transmisi Bogor-Cibinong	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Bogor-Cibinong yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perkotaan Jandarahak dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Bogor-Cibinong untuk melayani Kawasan Bopunjur dan Sekitarnya</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
1.6.	Pemanfaatan jaringan transmisi Cilamaya Tegul Gede	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Cilamaya Tegul Gede yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKW Cikampek-Cikopo dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa Bali</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.7.	Pemanfaatan jaringan transmisi Subang-Cikampek	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>b. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Cilamaya-Tegal Gede untuk melayani Kawasan Andalalan Purwasuka</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
1.8.	Pemanfaatan jaringan transmisi Laut Jawa Cilamaya	Jaringan transmisi gas bumi	<p>a. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Subang-Cikampek yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKW Cikampek Cikopo dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Subang-Cikampek untuk melayani Kawasan Andalalan Purwasuka</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
1.8.	Pemanfaatan jaringan transmisi Laut Jawa Cilamaya	Jaringan transmisi gas bumi	<p>a. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Laut Jawa Cilamaya yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKW Cikampek-Cikopo dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa Bali</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.9.	Pemanfaatan jaringan transmisi Cemara-Cilamaya	Jaringan transmisi gas bumi	<p>b. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Laut Jawa-Cilamaya untuk melayani Kawasan Andalan Purwasuka</p> <p>c. memantapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
1.10.	Pemanfaatan jaringan transmisi Cendrawati-Indramayu	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Cemara-Cilamaya yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKW Cikampek Cikopo dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Cemara-Cilamaya untuk melayani Kawasan Andalan Purwasuka</p> <p>c. memantapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
1.10.	Pemanfaatan jaringan transmisi Cendrawati-Indramayu	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. memantapkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Cemara-Indramayu yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKW Indramayu dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.11.	Pemantapan jaringan transmisi Jatibarang-Indramayu	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>b. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Cermah-Indramayu untuk melayani Kawasan Andalan Ciyumaja Kuning dan Sekitarnya</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
I.12.	Pemantapan jaringan transmisi Jatibarang Cirebon	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Jatibarang-Indramayu yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKW Indramayu dalam mendukung aliran paakan energi nasional di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Jatibarang Indramayu untuk melayani Kawasan Andalan Ciyumaja Kuning dan Sekitarnya</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
I.12.	Pemantapan jaringan transmisi Jatibarang Cirebon	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Jatibarang Cirebon yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Cirebon dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa Bali</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.13.	Pemantapan jaringan transmisi Jatibarang-Palimanan	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>b. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Jatibarang-Cirebon untuk melayani Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
			<p>a. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Jatibarang-Palimanan yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Cirebon dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Jatibarang-Palimanan untuk melayani Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
I.14.	Pengembangan jaringan transmisi Cirebon Muara Bekasi	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Cirebon Muara Bekasi yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Cirebon dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa Bali</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
L.15.	Pemanfaatan jaringan transmisi Kadipaten Cirebon	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>b. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Cirebon-Muara Dekasi untuk melayani Kawasan Andalan Purwasuka, dan Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning, dan Sekitarnya</p> <p>c. menciptakan ketertuban mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
L.15.	Pemanfaatan jaringan transmisi Cirebon	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. memanfaatkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Kadipaten Cirebon yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Cirebon dan PKW Kadipaten dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. memanfaatkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Kadipaten-Cirebon untuk melayani Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
L.16.	Pemanfaatan jaringan transmisi Semarang-Cirebon	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. memanfaatkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Semarang-Cirebon yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepuh, PKN Cirebon, PKW Tegal, dan PKW Pekalongan, dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.17.	Pembangunan jaringan transmisi Semarang-Gresik	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>b. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Semarang-Cirebon untuk melayani Kawasan Andalan Ciayurmeja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Peggusa, dan Kawasan Kedungsepur</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
	Pembangunan jaringan transmisi Semarang-Gresik	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Semarang-Gresik yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Kawasan Perbatasan Gerbangkertosusila, PKW Salatiga, PKW Cepu, dan PKW Bojonegoro dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Semarang-Gresik untuk melayani Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Wanarakui dan Kawasan Gerbangkertosusila</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
I.18.	Pembangunan jaringan transmisi Kalimantan Timur-Samarang	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Kalimantan Timur-Samarang yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perbatasan Kedungsepur, PKW Salatiga dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.19.	Pengembangan jaringan transmisi gas bumi Laut Jawa-Cepu	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>b. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Kalimantan Timur-Semarang untuk melayani Kawasan Andalas Kedungsepuh</p> <p>c. menciptakan kebutuhan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
1.20.	Pembangunan jaringan transmisi Pasuruan-Porong	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Laut Jawa-Cepu yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKK dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa Nali</p> <p>b. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Laut Jawa-Cepu untuk melayani Kawasan Andalas Wanasakti</p> <p>c. menciptakan kebutuhan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
1.20.	Pembangunan jaringan transmisi Pasuruan-Porong	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Pasuruan-Porong yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKK Kawasan Perkotan Gerbangke-tanahila dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.21.	Pemantapan jaringan transmisi Porong-Surabaya	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>b. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Porong-Porong untuk melayani Kawasan Andalan GerbangKertosusila</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
1.22.	Pemantapan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Porong-Surabaya yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perkotaan GerbangKertosusila dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Porong-Surabaya untuk melayani Kawasan Andalan GerbangKertosusila</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
1.22.	Pemantapan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Laut Jawa Gresik yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perkotaan GerbangKertosusila dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa Bali</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.23.	Pengembangan jaringan transmisi Tuban-Gresik	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>b. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Laut Jawa-Gresik untuk melayani Kawasan Andalan Gerbangkerluusula</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
1.24.	Pengembangan jaringan transmisi gas bumi Surabaya-Kertosono Kediri	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Tuban-Gresik yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengalihan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusula dan PKW Tuban dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. merencanakan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Tuban-Gresik untuk melayani Kawasan Andalan Tuban Bojonegoro, dan Kawasan Andalan Gerbangkertosusula</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
1.24.	Pengembangan jaringan transmisi gas bumi Surabaya-Kertosono Kediri	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Surabaya-Kertosono Kediri yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengalihan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusula dan PKW Kediri dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa Bali</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.25.	Pengembangan jaringan transmisi gas bumi Kertosono-Madhin	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>b. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Surabaya-Kertosono-Kediri untuk melayani Kawasan Ancalan Gerbangkertosusila dan Kawasan Anculan Kediri Culuang Agung-Blitar;</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
I.25.	Pengembangan jaringan transmisi gas bumi Kertosono-Madhin	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Kertosono-Madhin yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKW Madhin dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Pali</p> <p>b. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Kertosono-Madhin untuk melayani Kawasan Anculan Madhin dan Sekitarnya</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
I.26.	Pengembangan jaringan transmisi gas bumi Porong Malang	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Porong Malang yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKW Malang dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.27.	Pengembangan jaringan transmisi gas bumi Porong-Pasuruan-Probolinggo	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>b. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Porong-Malang untuk melayani Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
1.28.	Pengembangan jaringan transmisi Selat Madura Pasuruan	Jaringan transmisi gas bumi	<p>a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Porong-Pasuruan-Probolinggo yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengalihan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKW Probolinggo dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa-Bali</p> <p>b. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Porong Pasuruan Probolinggo untuk melayani Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Laureang</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
1.28.	Pengembangan jaringan transmisi Selat Madura Pasuruan	Jaringan transmisi gas bumi	<p>a. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Selat Madura Pasuruan yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengalihan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju PKW Probolinggo dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa Bali</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.29.	Pembangunan unit pemroses Gas Alam Cair (LNG) berupa <i>Floating Storage and Regasification Unit</i> (FSRU) di Laut Jawa sebelah utara Teluk Jakarta dan di Laut Jawa sebelah barat Demak	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>b. mengembangkan jaringan pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi Selat Madura-Pasuruan untuk melayani Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang</p> <p>c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
	Pembangunan unit pemroses Gas Alam Cair (LNG) berupa <i>Floating Storage and Regasification Unit</i> (FSRU) di Laut Jawa sebelah utara Teluk Jakarta dan di Laut Jawa sebelah barat Demak	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. mengembangkan unit pemroses Gas Alam Cair (LNG) berupa <i>Floating Storage and Regasification Unit</i> (FSRU) di Laut Jawa sebelah utara Teluk Jakarta dan di Laut Jawa sebelah barat Demak yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa Bali</p> <p>b. mengembangkan unit pemroses Gas Alam Cair (LNG) berupa <i>Floating Storage and Regasification Unit</i> (FSRU) di Laut Jawa sebelah utara Teluk Jakarta dan di Laut Jawa sebelah barat Demak untuk melayani Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dan Kawasan Andalan Kediri/Sepur</p> <p>c. menerapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.30.	Pengembangan prasarana dan sarana untuk peningkatan pasokan gas bumi di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat (LWG <i>Receiving Terminal</i>)	Jaringan transmisi dan distribusi gas bumi	<p>a. mengembangkan prasarana dan sarana untuk peningkatan pasokan gas bumi di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat (LWG <i>Receiving Terminal</i>) yang mengintegrasikan fasilitas produksi, pengolahan, dan/atau penyimpanan, hingga akses menuju kawasan perkotaan nasional dalam mendukung sistem pasokan energi nasional di Pulau Jawa Bali</p> <p>b. mengembangkan prasarana dan sarana untuk peningkatan pasokan gas bumi di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat (LWG <i>Receiving Terminal</i>) untuk melayani Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Purwasuka, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Cikunreja Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Gerbangketosusila, Kawasan Andalan Tuban-Bijonjoro, Kawasan Andalan Keli-Tulung Agung-Dihar, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, dan kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Jumajung</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II. II.1.	Pembangkit Tenaga Listrik Pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTG) LAG Bojonegara, PLIGU Muara Karang, PLIGU Tanjung Priuk, PLIGU Muara Tawar, PLIGU Cikarang Listrik-Indo, PLIGU Bekasi, dan PLIGU Cepu	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan	a. mengembangkan PLIGU LAG Bojonegara (Kabupaten Serang), PLIGU Muara Karang (Kota Jakarta Utara), PLIGU Tanjung Priuk (Kota Jakarta Utara), PLIGU Muara Tawar (Kabupaten Bekasi), PLIGU Cikarang Listrik-Indo (Kabupaten Bekasi), PLIGU Bekasi (Kabupaten Bekasi), dan PLIGU Cepu (Kabupaten Blora) dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup b. menerapkan ketentuan mengenai jarak aman dari kegiatan lain
II.2.	Pembangkit listrik tenaga gas (PLG) Sunyaragi	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan	a. mengembangkan PLG Sunyaragi (Kota Cirebon) dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup b. menetapkan ketentuan mengenai jarak aman dari kegiatan lain
II.3.	Pembangkit listrik tenaga uap (PLU) Caringin Jati A, B, C (Kabupaten Jepara), PLU Suralaya (Kota Cilacap), PLU Lontar (Kabupaten Tanggarang), PLU Palabuhanratu (Kabupaten Sukahumi), PLU Indramayu Baru (Kabupaten Indramayu), PLU Indramayu (Kabupaten	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan	a. mengembangkan PLU Caringin Jati A, B, C (Kabupaten Jepara), PLU Suralaya (Kota Cilacap), PLU Serang (Kabupaten Serang), PLU Lontar (Kabupaten Tanggarang), PLU Palabuhanratu (Kabupaten Sukahumi), PLU Indramayu Baru (Kabupaten Indramayu), PLU Indramayu (Kabupaten

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	<p>PLTU Labuhan (Kabupaten Pandeglang), PLTU Lantar (Kabupaten Tangerang), PLTU Palabuhanatu (Kabupaten Sukabumi), PLTU Indramayu Baru (Kabupaten Indramayu), PLTU Indramayu (Kabupaten Indramayu), PLTU Jawa Barat Baru, PLTU Cilacap (Kabupaten Cilacap), PLTU Cilacap Baru/Adipala (Kabupaten Cilacap), PLTU Jawa Tengah Baru (Kabupaten Batang), PLTU Jatiug (Kabupaten Pemalang), PLTU Tati A (Kabupaten Jepara), PLTU Grati (Kabupaten Pasuruan), PLTU Pasuruan (Kabupaten Pasuruan), PLTU Paiton (Kabupaten Probolinggo), PLTU Jawa Timur Selatan, PLTU Madura (Kabupaten Pancekesean), PLTU Tanjung Awar-awar (Kabupaten Tuban), PLTU Pacitan (Kabupaten Pacitan), PLTU Pelang, PLTU Bali Timur (Kabupaten Karangasem), dan PLTU Gelukan Bowong (Kabupaten Buleleng) dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>1. menetapkan ketentuan mengenai jarak antar dan kegiatan lain</p>	<p>sebarutakan</p>	<p>Indramayu), PLTU Jawa Barat Baru, PLTU Cilacap (Kabupaten Cilacap), PLTU Cilacap Baru/Adipala (Kabupaten Cilacap), PLTU Jawa Tengah Baru (Kabupaten Batang), PLTU Jatiug (Kabupaten Pemalang), PLTU Tati A (Kabupaten Jepara), PLTU Grati (Kabupaten Pasuruan), PLTU Pasuruan (Kabupaten Pasuruan), PLTU Paiton (Kabupaten Probolinggo), PLTU Jawa Timur Selatan, PLTU Madura (Kabupaten Pancekesean), PLTU Tanjung Awar-awar (Kabupaten Tuban), PLTU Pacitan (Kabupaten Pacitan), PLTU Pelang, PLTU Bali Timur (Kabupaten Karangasem), dan PLTU Gelukan Bowong (Kabupaten Buleleng) dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p> <p>1. menetapkan ketentuan mengenai jarak antar dan kegiatan lain</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.4.	<p>(Kabupaten Purckasan, PLTU Tanjung Awar-awar (Kabupaten Tulung), PLTU Pacitan (Kabupaten Pacitan), PLTU Pelung, PLTU Tali Timur (Kabupaten Karangasem), dan PLTU Celukan Bawang</p> <p>Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP Kawo Dano (Kabupaten Serang), PLTP Endut (Kabupaten Lebak), PLTP Batukusung (Kabupaten Pandeglang), PLTP Cisolak (Kabupaten Sukahumi), PLTP Salak (Kabupaten Sukabung), PLTP Karang 1-6 (Kabupaten Garut), PLTP Karaha 1-4 (Kabupaten Garut), PLTP Drajat 2-4 (Kabupaten Garut), PLTP Patuha 1-4 (Kabupaten Bandung), PLTP Cibuni (Kabupaten Bandung), PLTP Wayang Windu 3-4 (Kabupaten Bandung), PLTP Mangkaban Parabu 1 (Kabupaten Subang), PLTP Pajamlayan (Kabupaten Garut), PLTP Guri (Kabupaten Cigugur), PLTP Baturaden (Kabupaten Banyumas), PLTP Ungaran (Kabupaten Semarang), PLTP Dug 1-5 (Kabupaten Wonorejo), PLTP Yang Agung (Kabupaten Probolinggo), PLTP Willis/Sebel (Kabupaten Ponorogo), PLTP Ijen (Kabupaten Banyuwangi-Kabupaten Bondowoso), dan PLTP Bedugul 1-4 (Kabupaten Tabanan)dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan</p>	<p>Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan</p>	<p>a. mengembangkan PLTP Kawo Dano (Kabupaten Serang), PLTP Endut (Kabupaten Lebak), PLTP Batukusung (Kabupaten Pandeglang), PLTP Cisolak (Kabupaten Sukahumi), PLTP Salak (Kabupaten Sukabung), PLTP Karang 1-6 (Kabupaten Garut), PLTP Karaha 1-4 (Kabupaten Garut), PLTP Drajat 2-4 (Kabupaten Garut), PLTP Patuha 1-4 (Kabupaten Bandung), PLTP Cibuni (Kabupaten Bandung), PLTP Wayang Windu 3-4 (Kabupaten Bandung), PLTP Mangkaban Parabu 1 (Kabupaten Subang), PLTP Pajamlayan (Kabupaten Garut), PLTP Guri (Kabupaten Cigugur), PLTP Baturaden (Kabupaten Banyumas), PLTP Ungaran (Kabupaten Semarang), PLTP Dug 1-5 (Kabupaten Wonorejo), PLTP Yang Agung (Kabupaten Probolinggo), PLTP Willis/Sebel (Kabupaten Ponorogo), PLTP Ijen (Kabupaten Banyuwangi-Kabupaten Bondowoso), dan PLTP Bedugul 1-4 (Kabupaten Tabanan)dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	(Kabupaten Bantul), PLIP Wiyang Windu 3-4 (Kabupaten Bandung), PLTP Tangkuban Pasahu 1 (Kabupaten Subang), PLTP Papanayan (Kabupaten Garut), PLTP Guci (Kabupaten Tasik), PLTP Dataranden (Kabupaten Banyuwangi), PLTP Ungaran (Kabupaten Semarang), PLTP Dieng 1 & (Kabupaten Wonosobo), PLIP Yanti-Angapuro (Kabupaten Probolinggo), PLIP Wulis/Ngebol (Kabupaten Ponorogo), PLTP Jen (Kabupaten Banyuwangi- Kabupaten Bondowoso), dan PLTP Bedugul 1 &		andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup b. menerapkan ketentuan mengenai arah arus dari kegiatan lain

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.	Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Upper Cisokan (Kabupaten Cianjur), PLTA Jatigede (Kabupaten Sumedang), PLTA Rajamandala (Kabupaten Bandung Barat), dan PLTA Kalikonto (Kabupaten Kalikonto)	Pembangkit tenaga listrik energi baru dan terbarukan	<p>a. mengembangkan PLTA Upper Cisokan (Kabupaten Cianjur), PLTA Jatigede (Kabupaten Sumedang), PLTA Rajamandala (Kabupaten Bandung Barat), dan PLTA Kalikonto (Kabupaten Malang) dengan kapasitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di kawasan perkotaan nasional dan kawasan andalan dengan memperhatikan daya dukung dan daya rampung lingkungan hidup</p> <p>b. menetapkan ketentuan mengenai arah dan kegiatan lain</p>
III.6.	Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan/atau pembangkit listrik tenaga angin (PLTB) di Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimunjawa (Kabupaten Jepara), Pulau Bawean (Kabupaten Gresik), Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep), Pulau Raas (Kabupaten Sumanep), Pulau Kangsan (Kabupaten Sumanep), dan Pulau Nusa Penida (Kabupaten Klungkung)	Pembangkit tenaga listrik berbasis energi matahari dan energi angin	<p>a. mengembangkan pembangkit tenaga listrik berbasis energi matahari dan/atau energi angin untuk mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik di Kabupaten Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimunjawa (Kabupaten Jepara), Pulau Bawean (Kabupaten Gresik), Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep), Pulau Raas (Kabupaten Sumanep), Pulau Kangsan (Kabupaten Sumanep), dan Pulau Nusa Penida (Kabupaten Klungkung)</p> <p>b. menetapkan ketentuan mengenai arah dan kegiatan lain</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III. III.1.	Jaringan transmisi tenaga Listrik Jaringan transmisi tenaga Listrik Kalimantan		Jaringan transmisi tenaga Listrik antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera serta Pulau Kalimantan
III.1.1.	Jaringan transmisi tenaga Listrik seluruh Pulau Jawa-Bali	Jaringan transmisi tenaga Listrik	<p>a. mengembangkan dan memantapkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga Listrik seluruh Pulau Jawa-Bali yang meliputi Jaringan Transmisi Pantau Utara Jawa, Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa, Jaringan Pengumpul Selatan-Utara, dan Jaringan Transmisi Bali</p> <p>b. menetapkan ketentuan mengenai peraturan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan</p>
III.1.2.	Jaringan transmisi tenaga Listrik antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera serta Pulau Kalimantan	Interkoneksi Jaringan transmisi tenaga Listrik	<p>a. mengembangkan dan memantapkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga Listrik antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera yang meliputi interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera yang menghubungkan jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Jawa-Bali dengan jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Sumatera</p> <p>b. mengembangkan dan memantapkan interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Kalimantan yang meliputi interkoneksi jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Kalimantan yang menghubungkan jaringan</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>transmisi tenaga listrik Pulau Jawa-Bali dengan jaringan transmisi tenaga listrik Pulau Kalimantan</p> <p>c. menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan pemeliharaan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
III.2.	Jaringan Transmisi Pantaj Utara Jawa		
III.2.1.	Jaringan Transmisi Suralaya-Cilegon Cibinong Purwakarta Bandung-Kuningan-Ungaran-Surabaya-Probolinggo	Jaringan transmisi utama tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi	<p>a. merhabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani PKN Cilegon, PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKV Kawasan Perumahan Gerbangkertosusila, dan PKW Probolinggo</p> <p>b. merhabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani Kawasan Andalan Dojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Perkotanan Jakarta, Kawasan Andalan Bopunjur dan sekitarnya, Kawasan Andalan Purwasuka, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Ciyumaja Kuning dan sekitarnya, Kawasan Andalan Brebas, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Wamurakuti, Kawasan Andalan Tuban Bojonegoro, Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, dan Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lura yang</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.	Jaringan Transmisi Pantai Selatan Jawa		<p>c. mengendalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik berjangka tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan pertumbuhan tingkat kepadatan tinggi di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kediri/Seputih, dan PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>d. menerapkan kerangka mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
II.2.1.	Jaringan Transmisi Cibinong-Tasikmalaya-Banyuwangi-Klaten	Jaringan transmisi utama tenaga listrik seluruh udara tegangan ekstra tinggi	<p>a. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Deli yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKW Tasikmalaya, PKN Cilacap, PKW Kebumehen, PKN Yogyakarta, PKW Sleman, dan PKW Klaten</p> <p>b. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Deli yang melayani Kawasan Andalan Bopunjur dan sekitarnya, Kawasan Andalan Priangan Simur-Pangandaran, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Borohudur dan sekitarnya, Kawasan Andalan Yogyakarta dan sekitarnya, dan Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.2.	Jaringan transmisi Klaten-Kediri Probolinggo	Jaringan transmisi utama tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi	<p>c. mengendalikn pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan perbukitan tingkat kepadatan tinggi di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek dan PKN Cilacap</p> <p>d. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
			<p>a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani PKW Klaten, PKW Kediri, dan PKW Probolinggo</p> <p>b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani Kawasan Andalan Subosuka-Wonosaten, Kawasan Andalan Madiun dan sekitarnya, Kawasan Andalan Kediri Cidung Agung-Blitar, dan Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Luarajang</p> <p>c. mengendalikn pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan permukiman tingkat kepadatan tinggi di PKW Klaten, PKW Kediri, dan PKW Probolinggo</p> <p>d. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.3.	Jaringan Transmisi Pengumpulan Selatan-Utara Jawa		
II.3.1.	Jaringan Transmisi Suralaya-Jakarta	Jaringan transmisi utama tenaga listrik seluruh utara tegangan ekstra tinggi	<p>a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani PKN Cillegon, PKN Serang, dan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek</p> <p>b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani Kawasan Andalan Dofonegara Merak Cillegon dan Kawasan Andalan Perkoaran Jakarta</p> <p>c. mengendalikn pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan pemukiman tingkat kepadatan tinggi di PKN Cillegon, PKN Serang, dan PKN Kawasan Perkoaran Jabodetabek</p> <p>d. menerapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
II.3.2.	Jaringan Transmisi Cibinng-Bekasi	Jaringan transmisi utama tenaga listrik seluruh utara tegangan ekstra tinggi	<p>a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek</p> <p>b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani Kawasan Andalan Perkoaran Jakarta dan Kawasan Andalan Bopunjur dan sekitarnya</p> <p>c. mengendalikn pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
11.3.3.	Jaringan Transmisi Cibinong-Saguling-Bandung Selatan	Jaringan transmisi utama tenaga listrik seluruhnya tegangan ekstra tinggi	<p>kawasan pertumbuhan tingkat kepadatan tinggi di PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
			<p>a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya</p> <p>b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali yang melayani Kawasan Andalan Bopunjur dan sekitarnya dan Kawasan Andalan Cekungan Bandung</p> <p>c. mengendalikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperbaiki kawasan perkotaan dan kawasan pertumbuhan tingkat kepadatan tinggi di PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.3.4.	Jaringan Transmisi Purwakarta-Cibatu-Muara Tuwu	Jaringan transmisi utama tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi	<p>a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani PKW Cikampek</p> <p>b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani Kawasan Andalas Purwasuka</p> <p>c. mengundulikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan pertumbuhan tingkat kepadatan tinggi di PKW Cikampek</p> <p>d. menerapkan kerentanan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
II.3.5.	Jaringan Transmisi Ungaran-Klaten	Jaringan transmisi utama tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi	<p>a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani PKN Kawasan Perlecaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKW Salatiga, PKW Boyolali, dan PKW Klaten</p> <p>b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani Kawasan Andalas Kedungsepur dan Kawasan Andalas Subosuka-Wonosraten</p> <p>c. mengundulikan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan pertumbuhan tingkat kepadatan tinggi di PKN kawasan Perlecaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKW Salatiga, PKW Boyolali, dan PKW Klaten</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.3.6.	Jaringan Transmisi Gresik-Surabaya	Jaringan transmisi utama tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi	<p>d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Nali yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Nali yang melayani Kawasan Andalan Gerbangkertosusila</p> <p>c. mengendalikannya penugasan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan permukiman tingkat kepadatan tinggi di PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
II.3.7.	Jaringan Transmisi Caringin-Jati-Purwodadi-Ungaran	Jaringan transmisi utama tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi	<p>a. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Nali yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan PKN Kudus</p> <p>b. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani Kawasan Andalan Kedungsepur dan Kawasan Andalan Wamarakuli</p> <p>c. mengendalikannya pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik bertegangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II/1.	Jaringan Transmisi Bali		<p>kawasan peruntukan tingkat kedatangan tinggi di PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan PKW Kudus</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai pelaksanaan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
II/1.1.	Jaringan Transmisi Bali	Jaringan transmisi tegangan tinggi	<p>a. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa Bali yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Giaiyar-Talaman (Sarbagita), PKW Singaraja, PKW Semarapura, dan PKW Negara</p> <p>b. merehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik di Pulau Jawa-Bali yang melayani Kawasan Andalan Singaraja dan Sekitarnya (Bali Utara) dan Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kuntaran (Bali Selatan)</p> <p>c. mengundahkan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik berregangan tinggi dengan memperhatikan kawasan perkotaan dan kawasan peruntukan tingkat kedatangan tinggi di PKN Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Giaiyar-Tabanan (Sarbagita), PKW Singaraja, PKW Semarapura, dan PKW Negara</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

NO.	SISTEM JARINGAN ENERGI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.	Jaringan transmisi tenaga listrik untuk kawasan Tertinggal dan Terisolasi, Tertransuk Pulau-Pulau Kecil		
III.5.1.	Jaringan transmisi di Kepulauan Seribu, Kepulauan Kalimantan, Pulau Bawean, Pulau Kangas, dan Pulau Sapudi	Jaringan transmisi tenaga listrik untuk kawasan tertinggal dan terisolasi	<p>a. mengembangkan jaringan transmisi tenaga listrik untuk kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Seribu, Kepulauan Kalimantan (Kabupaten Jepara), Pulau Bawean (Kabupaten Gresik), Pulau Kangas (Kabupaten Sumenep), dan Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep)</p> <p>b. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN X
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TANGGAL 16 MARET 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN
TELEKOMUNIKASI NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN
TELEKOMUNIKASI NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI**

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Jaringan Terestrial		
I.1.	Jaringan Pelayanan Pusat Perumahan di Pantai Utara Jawa		
I.1.1.	Jaringan terestrial Cilegon-Serang- Laangerang-Jakarta- Karawang-Purwakarta- Suluhang Indramayu Cirebon-Brebes-Logal- Pekalongan-Kendal- Semarang Demak Kudus Pari Reimbang Tuban Lamongan-Surabaya- Sidarjo Probolinggo Situbondo-Banyuwangi	Jaringan terestrial pelayanan pusat perumahan di pantai utara Pulau Jawa	<p>a. mengembangkan serta memelihara dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial untuk menghubungkan antar-pusat perkotaan nasional di Pulau Jawa bagian utara, yang meliputi PKN Cilegon, PKN Serang, PKN Kawasan Perkotaan Jakarta-Bogor-Depok-Langerang-Bekasi (Jabodetabek), PKW Cikarpek Cikopo, PKW Indramayu, PKN Cirebon, PKW Tegai, PKW Pekalongan, PKN Kawasan Perkotaan Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedungsepuh), PKW Kudus, PKW Tuban, PKN Kawasan Perkotaan Gresik Pangkalan Mjokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan (Gelanggitertosuali), PKW Probolinggo, dan PKW Banyuwangi</p> <p>b. mengembangkan serta memelihara dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial untuk melayani Kawasan Andalan Bojonegara Merak Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan, Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa, kawasan Andalan Purwakarta-Subang-Karawang (Purwasuka) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciyumaja Kuning)</p>

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JEMIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertanian, dan pertambangan, Kawasan Andalan Becaa-Slawi (Becaa) dengan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Kendal Demak Ungaran Selatiga Semarang Purwodadi (Kodungsapu) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Juwana Jepara Kudus Pari Rembang Bora (Wanarakuti) dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, dan perikanan, Kawasan Andalan Tuban-Dojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan, Kawasan Andalan Gresik-Bangkalan-Mojokerto Surabaya Sidharjo Lamongan (Gerbangkerkesulu) dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Simbang Nondimaso Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan laut, serta Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekirannya dengan sektor unggulan perikanan dan pertanian</p> <p>u. memanfaatkan ruang untuk pencapaian rencana pemancar yang mempeributuhkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya</p>

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JEMIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>d. mengembangkan dan melakukan kegiatan pengelolaan jaringan terestrial di Pulau Jawa bagian utara dengan memperhatikan keberadaaan dan kelestarian kawasan lindung di sekitarnya</p> <p>a. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan pertukiran</p>
1.2.	Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa		
1.2.1.	Jaringan terestrial Jakarta-Bekasi-Bandung-Malangka-Cirebon-Purwokerto Wonosari Magelang-Sleman-Yogyakarta-Klaten-Surakarta-Madiun Mojokerto-Surabaya	Jaringan terestrial pelayanan pusat pertumbuhan di wilayah tengah Pulau Jawa	<p>a. mengembangkan serta merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial untuk menghubungkan antarpusat perkotaan nasional di wilayah tengah Pulau Jawa, yang meliputi PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKW Kuthipaten, PKW Purwokerto, PKW Wonosobo, PKW Magelang, PKW Sleman, PKN Yogyakarta, PKW Klaten, PKN Surakarta, PKW Madiun, dan PKN Kawasan Perkotaan Garbangkarasusila</p> <p>b. mengembangkan serta merehabilitasi dan meningkatkan fungsi jaringan terestrial untuk melayani Kawasan Andalan Bogor-Puncak-Cianjur (Bogunju: dan Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan, Kawasan Andalan Ciyumaha kunung dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap, dan</p>

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JEMIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Sekitarnya) dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Surakarta-Bojonegara-Sukoharjo-Karatungayac-Wonggi Sragen Klaten (Subosuka Wonnistraten) dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata, serta Kawasan Andalan Gerbangkertosusda dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk penempatan semua pemancar yang mempunyai aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya</p> <p>d. merehabilitasi fungsi jaringan terestrial di Pulau Jawa bagian tengah dengan memperhatikan keberadaan dan kelastarian kawasan lindung di sekitarnya</p> <p>e. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan perbukitan</p>
1.3.	Jaringan Pelayanan Pengumpulan (Feeder) di Pulau Jawa dan Pulau-pulau di Utara Jawa		
1.3.1.	Jaringan terestrial Serang-Pandeleang	Jaringan terestrial	a. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpulan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Serang-Pandeleang-Rangkasbitung-Sukabumi

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JEMIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Rangkasbitung Sukabumi-Palabuhanratu	pelayanan pengumpulan [feed] di Pulau Jawa	<p>Palabuhanratu untuk menghubungkan PKN Serang, PKW Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, PKW Sukabumi, dan PKW Palabuhanratu</p> <p>b. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpulan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Serang Pandeglang Rangkasbitung Sukabumi-Palabuhanratu untuk melayani Kawasan Bandara Bojonegara-Merak Cilegon dengan sektor unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan serta Kawasan Bandara Sukabumi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertanian, pariwisata, dan perkebunan</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk pemetaan menara pemancar yang merupakan aspek kearifan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya</p> <p>d. meningkatkan fungsi jaringan terestrial dengan memperhatikan keberadaan dan kestabilan kawasan lindung di sekitarnya</p> <p>f. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan perbukitan</p>
I.3.2.	Jaringan terestrial Jakarta Bandung Tasikmalaya-Pangandaran	Jaringan terestrial pelayanan pengumpulan [feed] di	<p>a. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpulan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Jakarta Bandung Tasikmalaya Pangandaran untuk menghubungkan PKN Kawasan Perkolahan Jabudelebak, PKN Kawasan Perkolahan Bandung Raya, PKW Tasikmalaya, dan PKW Pangandaran</p> <p>b. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpulan di Pulau Jawa pada</p>

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JEMIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
		Pulau Jawa	<p>Jaringan terrestrial Jakarta Bandung Tasikmalaya Pangandaran untuk melayani Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta dengan sektor unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa, Kawasan Andalan Cekungan Bandung dengan sektor unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan, serta Kawasan Andalan Triangguni (Iuruc-Pangandaran) dengan sektor unggulan perikanan, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk penempatan menara pemancar yang mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya</p> <p>d. merehabilitasi fungsi jaringan terrestrial dengan memperhatikan keberadaan dan kestabilan kawasan lindung di sekitarnya</p> <p>e. mengendalikan pengembangan jaringan terrestrial yang berada di kawasan perbukitan</p>
1.3.3.	Jaringan terrestrial Purwokerto-Cilacap-Kebumen	Jaringan terrestrial pelayanan pengumpan feeder di Pulau Jawa	<p>a. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada jaringan terrestrial Purwokerto-Cilacap-Kebumen untuk menghubungkan PKW Purwokerto, PKN Cilacap, dan PKW Kebumen</p> <p>b. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada jaringan terrestrial Purwokerto-Cilacap-Kebumen untuk melayani Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan</p>

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JEMIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.1.	Jaringan terrestrial Semarang-Yogyakarta	Jaringan terrestrial pelayanan pengunungan (fixed) di Pulau Jawa	<p>c. memanfaatkan ruang untuk penempatan menara pemancar yang menunjang aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya</p> <p>d. merehabilitasi fungsi jaringan terrestrial dengan memperhatikan keberadaaan dan kestabilan kawasan lindung di sekitarnya</p> <p>e. mengendalikan pengembangan jaringan terrestrial yang berada di kawasan perbukitan</p> <p>a. mengembangkan jaringan pelayanan pengunungan di Pulau Jawa pada jaringan terrestrial Semarang-Yogyakarta untuk menghubungkan PKX Kawasan Perkotaan Kodungsopur dan JKM Yogyakarta</p> <p>b. mengembangkan jaringan pelayanan pengunungan di Pulau Jawa pada jaringan terrestrial Semarang-Yogyakarta untuk melayani Kawasan Andalan Kodungsopur dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan serta Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan</p> <p>u. memanfaatkan ruang untuk penempatan menara pemancar yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya</p> <p>d. merehabilitasi fungsi jaringan terrestrial dengan memperhatikan keberadaaan dan kestabilan kawasan lindung di sekitarnya</p>

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JEMIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.6.	Jaringan terestrial Surakarta-Pacitan	Jaringan terestrial pelayanan pengumpan (berada di Pulau Jawa	<p>a. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan perbukitan</p> <p>a. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Surakarta Pacitan untuk menghubungkan PKN Surakarta dan PKW Pacitan</p> <p>b. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Surakarta Pacitan untuk melayani Kawasan Andalan Subosula Wonosraten dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian serta Kawasan Andalan Madium dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk pencapaian antara penanca yang memperhilungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya</p> <p>d. meningkatkan fungsi jaringan terestrial dengan memperhatikan keberadaan dan kelestarian kawasan lindung di sekitarnya</p> <p>e. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan perbukitan</p>
1.3.6.	Jaringan terestrial Tuban Bojonegoro	Jaringan terestrial pelayanan	<p>a. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Tuban Bojonegoro untuk menghubungkan PKW Tuban dan PKW Bojonegoro</p>

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JEMIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
		<p>pengumpulan (feeder) di Pulau Jawa</p>	<p>b. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpulan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Tuban-Bojonegoro untuk melayani kawasan Andalan Tuban Bojonegoro dengan sektor- aplikasi pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk pencapaian menara pemancar yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya</p> <p>d. merehabilitasi fungsi jaringan terestrial dengan memperbaiki keberadaan dan kestabilan kawasan lindung di sekitarnya</p> <p>e. mengendalikn pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan perbukitan</p>
1.3.7.	Jaringan terestrial Madun Kediri	<p>Jaringan terestrial pelayanan pengumpulan (feeder) di Pulau Jawa</p>	<p>a. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpulan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Madun-Kediri untuk menghubungkan PKW Madun dan PKW Kediri</p> <p>b. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpulan di Pulau Jawa pada jaringan terestrial Madun-Kediri untuk melayani kawasan Andalan Madun dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata serta Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Pilhar dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata</p>

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JEMIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.8.	Jaringan terrestrial Medium-Bitar-Malang-Jember-Banyuwangi	Jaringan terrestrial pelayanan pengumpan (federal) di Pulau Jawa	<p>c. memanfaatkan ruang untuk penempatan menara pemancar yang menunjang aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya</p> <p>d. merehabilitasi fungsi jaringan terrestrial dengan memperhatikan keberlakuan dan kestabilan kawasan lindung di sekitarnya</p> <p>e. mengendalikan pengembangan jaringan terrestrial yang berada di kawasan perbukitan</p>
			<p>a. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada jaringan terrestrial Medium Bitar Malang Jember Banyuwangi untuk menggabungkan PKW Madun, PKW Blitar, PKW Malang, PKW Jember, dan PKW Banyuwangi</p> <p>b. mengembangkan jaringan pelayanan pengumpan di Pulau Jawa pada jaringan terrestrial Madun-Bitar-Malang-Jember-Banyuwangi untuk melayani Kawasan Andalan Madun dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, Kawasan Andalan Kediri Tuhing Agung-Blitar dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, perkebunan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan laut, serta Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pertanian</p>

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JEMIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.9.	Jaringan Terrestrial Probolinggo-Jember	Jaringan Terrestrial pelayanan pengunungan (fixed) di Pulau Jawa	<p>c. memanfaatkan ruang untuk penempatan menara pemancar yang menunjang aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya</p> <p>d. merehabilitasi fungsi jaringan terrestrial dengan memperhatikan keberadaan dan kestabilan kawasan lindung di sekitarnya</p> <p>e. mengendalikan pengembangan jaringan terrestrial yang berada di kawasan perbukitan</p> <p>a. mengembangkan jaringan pelayanan pengunungan di Pulau Jawa pada jaringan Terrestrial Probolinggo-Jember untuk menghubungkan PKW Probolingo dan PKW Jember</p> <p>b. mengembangkan jaringan pelayanan pengunungan di Pulau Jawa pada jaringan Terrestrial Probolinggo-Jember untuk melayani Kawasan Andalan Probolingo-Pasuruan-Luragung dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan perikanan serta Kawasan Andalan Simbando Dondoyan Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan laut</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk pencapaian menara pemancar yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya</p> <p>d. merehabilitasi fungsi jaringan terrestrial dengan memperhatikan keberadaan dan kestabilan kawasan lindung di sekitarnya</p>

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JEMIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.3.10.	Jaringan Terestrial Kepulauan Seribu	Jaringan Terestrial pelayanan pusat pertumbuhan pulau-pulau di utara Pulau Jawa	<p>a. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan perbukitan</p> <p>a. mengembangkan jaringan terestrial Kepulauan Seribu (Kabupaten Kepulauan Seribu) untuk melayani Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata</p> <p>b. memanfaatkan ruang untuk pencapaian nyata penancah yang dapat meningkatkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya</p> <p>c. merhabilitasi lunga jaringan terestrial dengan memperhatikan keberadaan dan kelestarian Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu</p> <p>d. mengendalikan pengembangan jaringan terestrial yang berada di kawasan perbukitan</p>
1.3.11.	Jaringan Terestrial Kepulauan Karimunjawa	Jaringan Terestrial pelayanan pusat	<p>a. mengembangkan jaringan terestrial Kepulauan Karimunjawa (Kabupaten Jepara) untuk melayani Kawasan Andalan Laut Karimunjawa dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata</p>

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JEMIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
		pertumbuhan pulau-pulau di utara Pulau Jawa	<ul style="list-style-type: none"> b. memanfaatkan ruang untuk pemertaran menara pemancar yang unpuhbitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya c. merehabilitasi fungsi jaringan terrestrial dengan memperhatikan keberadaaan dan kestabilan Aman Nasional Laut Karituu Jawa d. mengendalikan pengembangan jaringan terrestrial yang berada di kawasan pertumbuhan
1.3.12.	Jaringan terrestrial Pulau Bawean	Jaringan terrestrial pelayanan pusat pertumbuhan pulau-pulau di utara Pulau Jawa	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan jaringan terrestrial Pulau Bawean [Kabupaten Gresik untuk meningkatkan keterkaitan dengan kawasan terintegrasi dan terisolasi b. memanfaatkan ruang untuk pemertaran menara pemancar yang unpuhbitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya c. merehabilitasi fungsi jaringan terrestrial dengan memperhatikan keberadaaan dan kestabilan kawasan lindung di sekitarnya d. mengendalikan pengembangan jaringan terrestrial yang berada di kawasan pertumbuhan
1.3.13.	Jaringan terrestrial Pulau Sapudi, Pulau Raas, serta Pulau Kangean dan sekitarnya	Jaringan terrestrial pelayanan pusat	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan jaringan terrestrial Pulau Sapudi, Pulau Raas, serta Pulau Kangean dan sekitarnya (Kabupaten Surenep) untuk melayani Kawasan Andalan Laut Madura dan Seliditunya dengan aektor unggulan perikanan, peternakan, dan pariwisata

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JEMIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
		<p>pertumbuhan pulau-pulau di utara Pulau Jawa</p>	<p>b. memanfaatkan ruang untuk penempatan menara pemancar yang dapat mendukung aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya</p> <p>c. merehabilitasi fungsi jaringan terrestrial dengan memperhatikan keberlakuan dan kestabilan kawasan lindung di sekitarnya</p> <p>d. mengendalikan pengembangan jaringan terrestrial yang berada di kawasan perbukitan</p>
II.	Jaringan Satelit		
II.1.	Jaringan satelit untuk melayani kawasan perkotaan nasional	Jaringan satelit	<p>a. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani PKN Serang, PKN Cilgon, PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek, PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya, PKN Cirebon, PKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur, PKN Surakarta, PKN Cilacap, PKN Yogyakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosuila, PKN Malang, PKN Kawasan Perkotaan Sarbagita, PKN Pandeglang, PKW Rangkas Bitung, PKW Sukabumi, PKW Cikampek-Cikopo, PKW Palabuhanratu, PKW Indramayu, PKW Kadipaten, PKW Tasikmalaya, PKW Panjandaran, PKW Boyolali, PKW Klaten, PKW Salatiga, PKW Tegal, PKW Pekalongan, PKW Kudus, PKW Cepu, PKW Magelang, PKW Wonosobo, PKW Kebunrejo, PKW Purwokerto, PKW Bantul, PKW Sleman, PKW Probolinggo, PKW Cibeun, PKW Kediri, PKW Madiun, PKW Danyuwangi, PKW Jember, PKW Dhuur, PKW Pamekasan, PKW</p>

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JEMIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p data-bbox="555 325 609 1218">Bojonegoro, PKW Pacitan, PKW Singgaja, PKW Semarang, dan PKW Negara</p> <p data-bbox="630 325 683 1249">b. mengendalikan kegiatan hudi daya dan pembangunan prasarana dan sarana lainnya di sekitar jaringan satelit</p> <p data-bbox="704 325 758 1249">c. mengembangkan jaringan satelit dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p>
II.2.	Jaringan satelit untuk melayani kawasan audialan	Jaringan satelit	<p data-bbox="794 325 847 1249">a. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani Kawasan Audialan Perkotaan Jakarta dengan sektor: unggulan industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa. Kawasan Audialan Laut Pulau Seribu dengan sektor: unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Kawasan Audialan Bojonegoro Merak Cilegon dengan sektor: unggulan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Kawasan Audialan Bojonegoro dan Sekitarnya dengan sektor: unggulan pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan. Kawasan Audialan Subabunri dan Sekitarnya dengan sektor: unggulan perikanan, pertanian, pariwisata, dan perkebunan. Kawasan Audialan Purwasuka dengan sektor: unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan. Kawasan Audialan Cekungan Bumdung dengan sektor: unggulan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan. Kawasan Audialan Clayunaja Kuning dan Sekitarnya dengan sektor: unggulan pertanian, industri, perikanan, dan</p>

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JEMIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>pertambangan, Kawasan Andalan Priangan Timur Pangandaran dengan sektor unggulan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Subosuko Wonorejo dengan sektor unggulan industri, pariwisata, dan pertanian, Kawasan Andalan Kedungsepur dengan sektor unggulan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Brebes dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Wabaratani dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan perikanan, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Karubudur dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, Kawasan Andalan Laut Karun Jawa dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan, Kawasan Andalan Gerbangkertosuwo dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, perkebunan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang dengan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, perkebunan, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dengan sektor unggulan pariwisata, industri, perkebunan, pertanian, perikanan, dan</p>

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JEMIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>pertambungan, Kawasan Andalan Kediri Tukung Agung Nitar dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Sirubondo Bondowoso Jember dengan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan laut, Kawasan Andalan Maduri dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan dan pertanian, Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, dan perikanan, Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan, perkebunan, dan pariwisata, Kawasan Andalan Singgara dan Sekitarnya (Bali Utara) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, dan perikanan, serta Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan) dengan sektor unggulan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan</p>
11.3.	Jaringan satelit untuk melayani kawasan	Jaringan satelit	<p>b. mengendalikan kegiatan budi daya dan pembangunan prasarana dan sarana lainnya di sekitar jaringan satelit</p> <p>c. mengembangkan jaringan satelit dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya</p> <p>a. mengembangkan jaringan satelit untuk melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil di Pulau Iunda Kabupaten</p>

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JEMIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil		<p>Serang), Pulau Naweon (Kabupaten Gresik), Pulau Sapudi (Kabupaten Sumocep), Pulau Raas (Kabupaten Sumocep), Kepulauan Masaliribu (Kabupaten Sumenepe), dan Kepulauan Kangean (Kabupaten Sumenepe);</p> <p>b. mengendalikan kegiatan bumi daya dan pembangunan prasarana dan sarana lainnya di sekitar jaringan satelit</p> <p>c. mengembangkan dan melakukan kegiatan pengolahan jaringan satelit pemancar yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya</p>
III.	Stasiun Bumi		
III.1.	Kawasan Fasilitas Pengolahan Data dan Satelit.	Stasiun bumi	<p>a. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan Fasilitas Pengolahan Data dan Satelit (Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta)</p> <p>b. memanfaatkan ruang untuk pemukiman stasiun bumi yang memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya</p>
III.2.	Kawasan Stasiun Telecommand	Stasiun bumi	<p>a. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan Stasiun Telecommand (Provinsi Jawa Barat)</p>

NO.	SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.3.	Kawasan Stasiun Bumi Pancasila Satelit Mikro	Stasiun bumi	<p>b. memanfaatkan ruang untuk pemetaan stasiun bumi yang mencakup aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya</p> <p>a. mengendalikan pemanfaatan ruang di sekitar Kawasan Stasiun Bumi Pancasila Satelit Mikro (Provinsi Jawa Barat)</p> <p>b. memanfaatkan ruang untuk pemetaan stasiun bumi yang mencakup aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya</p>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. II. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

LAMPIRAN XI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TANGGAL 16 MARET 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SISTEM JARINGAN
SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA-BALI

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN SUMBER DAYA AIR DI PULAU JAWA BALI

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Sumber Air		
I.1.	Wilayah Sungai (WS)		
I.1.1.	WS Cimamuk-Cisanggarung (Provinsi Jawa Barat)	WS strategis nasional	<p>a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS Cimamuk-Cisanggarung yang melayani PKN Cirebon, PKW Indramayu, dan PKW Kadipaten, serta Kawasan Andalan Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan (Cisayuraja Kuning) dan sekitarnya yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardaezah</p> <p>b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Cimamuk-Cisanggarung dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsiindung kawasan</p> <p>c. mengoptimalkan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat menggunakan fungsi sungai pada WS Cimamuk-Cisanggarung</p>
I.1.2.	WS Pemali-Comal (Provinsi Jawa Tengah)	WS strategis nasional	<p>a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS Pemali-Comal yang melayani PKW Tegal dan PKW Pekalongan, serta Kawasan Andalan Brebes (Brebes Tegal Slawi) yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardaezah</p> <p>b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Pemali-Comal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsiindung kawasan</p> <p>c. mengoptimalkan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat menggunakan fungsi sungai pada WS Pemali-Comal</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.1.3.	WS Jatunseluna (Provinsi Jawa Tengah)	WS strategis masimal	<p>a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS Jatunseluna yang melayani PKY Kawasan Perkolatan Kendal-Demak-Ungaran-Semarang-Purwodadi (Kedungsepur), PKW Salanga, dan PKW Kulus, serta Kawasan Andalan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi (Kedungsepur) dan Kawasan Andalan Wunurukuli yang dapat dilakukan melalui kerja sama antarderah</p> <p>b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Jatunseluna dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan</p> <p>c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi sungai pada WS Jatunseluna</p>
I.1.4.	WS Serayu- Bogowonto (Provinsi Jawa Tengah)	WS strategis masimal	<p>a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS Serayu-Bogowonto yang melayani PKW Purwokerto, PKW Kebumen, dan PKW Wonosobo, serta Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan Sekeloa) yang dapat dilakukan melalui kerja sama antarderah</p> <p>b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Serayu-Bogowonto dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan</p> <p>c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi sungai pada WS Serayu-Bogowonto</p>
I.1.5.	WS Brantas (Provinsi Jawa Timur)	WS strategis masimal	<p>a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS Brantas yang melayani PKN Kawasan Pe-koran Gresik Bangkolan Mojokerto Surabaya Sidoarjo</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.1.6.	WS Bali-Penida (Provinsi Bali)	WS strategis nasional	<p>Lamongan (Gerbangkertosusila), PKL Malang, PKW Kediri, dan PKW Blitar, serta Kawasan Andalan Gresik, Dangkalan, Mofoketo, Sucabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusila), Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, serta kawasan Andalan Kediri-Luhung Agung-Blitar yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardarah</p> <p>h. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Brantas dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan</p> <p>c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi sungai pada WS Brantas</p> <p>a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS Bali-Penida yang melayani PKN Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Guanyar-Tabanan (Seruaqta), PKW Yogo, PKW Singaraja, dan PKW Semarapura, serta Kawasan Andalan Singaraja dan Sekitarnya (Bali Utara) dan Kawasan Andalan Denpasar-Uluw-Kintamani (Bali Selatan) yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardarah</p> <p>b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Bali-Penida dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan</p> <p>c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi sungai pada WS Bali-Penida</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.1.7.	WS Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta- Provinsi Banten)	WS lintas provinsi	<p>a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS Kepulauan Seribu yang melayani Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu</p> <p>b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Kepulauan Seribu dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan</p> <p>c. mengembangkan pemanfaatan ruang pada sermpadan sungai yang dapat menggantikan fungsi sungai pada WS Kepulauan Seribu</p> <p>d. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Bali-Penida secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten yang berbatasan</p>
1.1.8.	WS Cidamau-Ciujung- Cidurian-Cisadane- Cihwang Citarum (Provinsi Banten Provinsi DKI Jakarta- Provinsi Jawa Barat)	WS lintas provinsi	<p>a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS Cidamau-Ciujung-Cidurian-Cisadane-Cihwang-Citarum yang melayani PKY Cilugan, PKY Serang, PKY Kawasan Perkotaan Jakarta Rongor Depok Tangerang Bekasi Jabodetabek, PKN Bandung Raya, PKW Pandeglang, PKW Kangas Bitung, dan PKW Cikarjtek-Cikopo, serta Kawasan Andalan Bijonggara-Merak-Cileguy, Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Bogor-Puncak-Cianjur (Bopuhur dan Sekutanya), Kawasan Andalan Purwakarta, Subang, Kuryang (Purwasuka), serta Kawasan Andalan Cekungan Bandung yang dapat dilakukan melalui kerja sama antarderah</p> <p>b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Cidamau-Ciujung-Cidurian Cidane Cihwang Citarum dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
L1.9.	WS Citaranduy (Provinsi Jawa Barat-Provinsi Jawa Tengah)	WS lintas provinsi	<p>c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi sungai pada WS Cidanau-Cujung-Cidurian-Cisadane-Cihwang-Cilarum</p> <p>d. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Cidanau-Cujung-Cidurian Cisadane Cihwang Citarumsewu seluruh dengan pemanfaatan ruang pada WS Cidanau Cujung Cidurian Cisadane Cihwang Cirundi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten yang berhbatasan</p> <p>a. mengoptimalkan sumber air terutama pada WS Citaranduy yang melayani PKN Cilacap dan PKW Tasikmalaya, serta Kawasan Andalan Priangan Curug-Pangandaran dan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan yang dapat dilakukan melalui kerja sama antardarah</p> <p>b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Citaranduy dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi hulu sungai kawasan</p> <p>c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi sungai pada WS Citaranduy</p> <p>d. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Citaranduy secara seluruh dengan pemanfaatan ruang pada WS Citaranduy di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah yang berhbatasan</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.1.10.	WS Progo Opak Serang (Provinsi DI Yogyakarta-Provinsi Jawa Tengah)	WS lintas provinsi	<p>a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS Progo Opak Serang yang melayani yang melayani PKN Yogyakarta, PKW Sleman, PKW Dantul, dan PKW Magelang, serta Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya dan Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya yang dapat dilakukan melalui kerja sama antar daerah</p> <p>b. mempertahankan ruang pada kawasan di sekitar WS Progo Opak Serang dengan tetap menjaga kestabilan lingkungan dan fungsi lindung kawasan</p> <p>c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat</p> <p>d. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Progo-Opak-Serang secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS Progo Opak Serang di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan</p>
I.1.11	WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur-Provinsi Jawa Tengah)	WS lintas provinsi	<p>a. mendayagunakan sumber air berbasis pada WS Bengawan Solo yang melayani PKN Surakarta, PKN Kawasan Perkotaan Gerbangkertosusila, PKW Boyolali, PKW Klaten, PKW Cepu, PKW Pacitan, PKW Madiun, PKW Tuban, dan PKW Bojonegara, serta Kawasan Andalan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonorejo, Sragen, Klutek (Subkota Widyadarmas), Kawasan Andalan Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Kembang, Blora (Wanaraksiti), Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Cukuharjo, serta Kawasan Andalan Gerbangkertosusila yang dapat dilakukan melalui kerja sama antar daerah</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.	Daerah Aliran Sungai (DAS)		
II.1.	DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Cijujung, DAS Cilamaya, DAS Cibancong, dan DAS Ciminyak	DAS	<p>b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Bengawan Solo dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan</p> <p>c. mengoptimalkan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang dapat mengganggu fungsi sungai pada WS Bengawan Solo</p> <p>d. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar WS Progn Opak Serung secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada WS Progn Opak Serung di Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan</p> <p>a. merehabilitasi DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Cijujung, DAS Cilamaya, DAS Ciasem, DAS Cibancong, dan DAS Ciminyak pada WS Cidabon Cijujung-Cidurian-Cisadane-Ciliwung-Citarum yang sudah kritis</p> <p>b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Cijujung, DAS Cilamaya, DAS Ciasem, DAS Cibancong, dan DAS Ciminyak dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan</p> <p>c. mengoptimalkan pemanfaatan ruang pada DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Cijujung, DAS Cilamaya, DAS Ciasem, DAS Cibancong, dan DAS Ciminyak yang dapat mengganggu fungsi sungai DAS</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.	DAS Cimamuk, DAS Cisarung, dan DAS Ciwarung	DAS	<ul style="list-style-type: none"> a. merehabilitasi DAS Cimamuk, DAS Cisarung, dan DAS Ciwarung pada WS Cimamuk-Cisarung yang sudah kritis b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar DAS Cimamuk, DAS Cisarung, dan DAS Ciwarung, dan DAS Cincinjak dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada DAS Cimamuk, DAS Cisarung, dan DAS Ciwarung yang dapat mengganggu fungsi sungai DAS
II.3.	DAS Citanduy dan DAS Segara Anakan	DAS	<ul style="list-style-type: none"> a. merehabilitasi DAS Citanduy dan DAS Segara Anakan pada WS Citanduy yang sudah kritis b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar DAS Citanduy dan DAS Segara Anakan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada DAS Citanduy dan DAS Segara Anakan yang dapat mengganggu fungsi sungai DAS
II.4.	DAS Serayu, DAS Bogowonto, DAS Padegolan, DAS Telomoyo, dan DAS Pektacangan	DAS	<ul style="list-style-type: none"> a. merehabilitasi DAS Serayu, DAS Dujuwanto, DAS Padegolan, DAS Telomoyo, dan DAS Pektacangan pada WS Serayu-Bogowonto yang sudah kritis b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar DAS Serayu, DAS Dujuwanto, DAS Padegolan, DAS Telomoyo, dan DAS Pektacangan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IL5.	DAS Progo, DAS Opak, DAS Serang, DAS Elo, dan DAS Oyo pada Wis Progo-Opak-Serang	DAS	<p>c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada DAS Serang, DAS Bogowonto, DAS Padegulan, DAS Telomoyo, dan DAS Pekalongan yang dapat mengganggu fungsi sungai DAS</p>
			<p>a. merehabilitasi DAS Progo, DAS Opak, DAS Serang, DAS Elo, dan DAS Oyo pada Wis Progo-Opak-Serang yang sudah kritis</p> <p>b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar DAS Progo, DAS Opak, DAS Serang, DAS Elo, dan DAS Oyo dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan</p> <p>c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada DAS Progo, DAS Opak, DAS Serang, DAS Elo, dan DAS Oyo yang dapat mengganggu fungsi sungai DAS</p>
IL6.	DAS Jragung, DAS Tunjung, DAS Serang, DAS Lusi, DAS Juwana, DAS Bodri, DAS Garang, DAS Randu Gumini, DAS Jambangan, DAS Pandansari, DAS Gandu, dan DAS Blitung	DAS	<p>a. merehabilitasi DAS Jragung, DAS Tunjung, DAS Serang, DAS Lusi, DAS Juwana, DAS Bodri, DAS Garang, DAS Randu Gumini, DAS Jambangan, DAS Pandansari, DAS Gandu, dan DAS Blitung pada Wis Jragung-selama yang sudah kritis</p> <p>b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar DAS Jragung, DAS Tunjung, DAS Serang, DAS Lusi, DAS Juwana, DAS Bodri, DAS Garang, DAS Randu Gumini, DAS Jambangan, DAS Pandansari, DAS Gandu, dan DAS Blitung dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.7.	DAS Glagah, DAS Perali, DAS Comal, DAS Cacaban, dan DAS Rambut pada WS Pemali Comal	DAS	<p>c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada DAS Jragung, DAS Luncang, DAS Secang, DAS Lusi, DAS Juwada, DAS Budi, DAS Garang, DAS Randu Gunung, DAS Jambangan, DAS Pandansari, DAS Gandu, dan DAS Tritung yang dapat mengganggu fungsi sungai DAS</p> <p>a. merehabilitasi DAS Glagah, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Cacaban, dan DAS Rambut pada WS Pemali Comal yang sudah kritis</p> <p>b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar DAS Glagah, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Cacaban, dan DAS Rambut dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan</p> <p>c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada DAS Glagah, DAS Perali, DAS Comal, DAS Cacaban, dan DAS Rambut yang dapat mengganggu fungsi sungai DAS</p>
II.8.	DAS Grindulu, DAS Lorog, dan DAS Damas	DAS	<p>a. merehabilitasi pada DAS Grindulu, DAS Lorog, dan DAS Damas yang sudah kritis</p> <p>b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar DAS Grindulu, DAS Lorog, dan DAS Damas dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan</p> <p>c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada DAS Grindulu, DAS Lorog, dan DAS Damas yang dapat mengganggu fungsi sungai DAS</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.9.	DAS Brantas, DAS Widas, DAS Konto, DAS Panggul, dan WS Brantas	DAS	<p>a. merehabilitasi pada DAS Brantas, DAS Widas, DAS Konto, DAS Panggul, dan DAS Pengaluran yang sudah kritis</p> <p>b. memanfaatkan ruang pada kawasan di sekitar DAS Brantas, DAS Widas, DAS Konto, DAS Panggul, dan DAS Pengaluran dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan</p> <p>c. mengendalikan pemanfaatan ruang pada DAS Brantas, DAS Widas, DAS Konto, DAS Panggul, dan DAS Pengaluran yang dapat mengganggu fungsi sungai DAS</p>
II.	Cekungan Air Tanah (CAT)		
II.1.	CAT Serang-Cangcrang	CAT Lintas Provinsi	<p>a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan iribuhan air tanah pada CAT Serang-Cangcrang</p> <p>b. mengendalikan pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah CAT Serang-Cangcrang di PKN Melayani PKN Ciligon, PKN Serang, PKW Pandelajang, PKW Rangkas Bitung, dan PKV Kawasan Perkebunan Jalinderalak, serta Kawasan Andalan Djojonegara Merak Ciligon</p>
II.2.	CAT Jakarta	CAT Lintas Provinsi	<p>a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan iribuhan air tanah pada CAT Jakarta</p> <p>b. mengendalikan pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah CAT Jakarta di PKV Kawasan Perkotaan Jabodetabek dan Kawasan Andalan Perkebunan Jakarta</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.3.	CAT Sidareja	CAT Lintas Provinsi	<p>a. mengendalikn pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah pada CAT Sidareja</p> <p>b. mengendalikn pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah CAT Sidareja di Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran dan Kawasan Andalan Juru Tengah Selatan</p>
II.4.	CAT Tegal Brebes	CAT Lintas Provinsi	<p>a. mengendalikn pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah pada CAT Tegal Brebes</p> <p>b. mengendalikn pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah CAT Tegal Brebes di PKW Tegal dan Kawasan Andalan Clayumaja Kuning dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Bregas</p>
II.5.	CAT Wonosari	CAT Lintas Provinsi	<p>a. mengendalikn pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah pada CAT Wonosari</p> <p>b. mengendalikn pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah CAT Wonosari di Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Madium dan Sekitarnya</p>
II.6.	CAT Lasem	CAT Lintas Provinsi	<p>a. mengendalikn pemanfaatan ruang pada kawasan imbuhan air tanah pada CAT Lasem</p> <p>b. mengendalikn pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah CAT Lasem di Kawasan Andalan Watarakuti dan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegara</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.7.	CAT Kandublatung	CAT Lintas Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan umbuhan air tanah pada CAT Kandublatung b. mengendalikan pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah CAT Kandublatung di PKW Cepu dan Kawasan Andalan Wanarukui
II.8.	CAT Ngawi-Ponorogo	CAT Lintas Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan umbuhan air tanah pada CAT Ngawi-Ponorogo b. mengendalikan pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah CAT Ngawi-Ponorogo di PKW Madiun dan Kawasan Andalan Madiun dan Sekelarnya
II.	Prasarana Sumber Daya Air		
II.1.	Bendungan Besar Waduknya		
II.1.1.	Waduk Juanda, Waduk Pongkor, dan Waduk Situ Kemang	Bendungan beserta waduknya	<ul style="list-style-type: none"> a. merencanakan dan mereliraha Waduk Juanda, Waduk Pongkor, dan Waduk Situ Kemang untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi PKM Kawasan Perkotaan Jabodetabek dan Kawasan Andalan Populasi dan Sekitarnya b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Juanda, Waduk Pongkor, dan Waduk Situ Kemang yang dapat mengganggu fungsi waduk

STRATEGI OPERASIONALISASI		
NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS
II.1.2.	Waduk Situ Kamojing, Waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur	Bendungan beserta waduknya
		<p>a. mengembangkan dan memperbaiki Waduk Situ Kamojing, Waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi Kawasan Andalan Purwasuka</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Situ Kamojing, Waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur yang dapat mengganggu fungsi waduk</p>
II.1.3.	Waduk Cilunca, Waduk Cipanunjang, Waduk Saguling, Waduk Situ Ciburuy, Waduk Situ Gedde, dan Waduk Situ Lembang	Bendungan beserta waduknya
		<p>a. mengembangkan dan memperbaiki Waduk Cilunca, Waduk Cipanunjang, Waduk Saguling, Waduk Situ Ciburuy, Waduk Situ Gedde, dan Waduk Situ Lembang, dan Waduk Santosa untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya dan Kawasan Andalan Cekungan Bandung</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Cilunca, Waduk Cipanunjang, Waduk Saguling, Waduk Situ Ciburuy, Waduk Situ Gedde, dan Waduk Situ Lembang, dan Waduk Santosa yang dapat mengganggu fungsi waduk</p>
II.1.4.	Waduk Cipancuh, Waduk Darma, Waduk Situ Anggrahan, Waduk Situ Balang, Waduk Situ Parok, Waduk Situ Ranca Dureum, dan Waduk Situ Siding	Bendungan beserta waduknya
		a. mengembangkan dan memperbaiki Waduk Cipancuh, Waduk Darma, Waduk Situ Anggrahan, Waduk Situ Balang, Waduk Situ Parok, Waduk Situ Ranca Dureum, dan Waduk Situ Siding untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi melayani PKN Cirebon dan PKW Indramayu, serta Kawasan Andalan Clayumaja Kuning dan Sekitarnya

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Situ Patok, Waduk Situ Patok, Waduk Beureum, dan Waduk Situ Sedong		b. mengendalikn pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Cipancuh, Waduk Darma, Waduk Situ Anggrahan, Waduk Situ Dolang, Waduk Situ Patok, Waduk Situ Ranca Beureum, dan Waduk Situ Sedong yang dapat mengganggu fungsi waduk
II.1.5.	Waduk Situ Bagendit	Bendungan beserta waduknya	a. mengembangkn dan memelihara Waduk Situ Bagendit untuk mempertahankan dayaampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi Kawasan Andalan Prianan Lunur-Pabandaran b. mengendalikn pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Situ Bagendit yang dapat mengganggu fungsi waduk
II.1.6.	Waduk Banyu Kuning, Waduk Bruk, Waduk Gembong, Waduk Godo, Waduk Grawan, Waduk Guncung, Waduk Gunung Rowi, Waduk Kd. Waru, Waduk Lodan, Waduk Pannhan, Waduk	Bendungan beserta waduknya	a. mengembangkn dan memelihara Waduk Banyu Kuning, Waduk Bruk, Waduk Gembong, Waduk Godo, Waduk Grawan, Waduk Guncung, Waduk Gunung Rowi, Waduk Kd. Waru, Waduk Lodan, Waduk Pannhan, Waduk Rindu Kuning, Waduk Rawabolodero, Waduk Tempunan, Waduk Kedung Wungu, Waduk Bangsi II, Waduk Sambong, Waduk Soku, Waduk Suruban, Waduk Tologwungu, Waduk Nglangkir, dan Waduk Blimbing untuk mempertahankan dayaampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi Kawasan Andalan Wamarakui

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Kandu Kuning, Waduk Rawabokdewo, Waduk Temparan, Waduk Kedung Wungu, Waduk Bangsri II, Waduk Sambong, Waduk Soko, Waduk Suruhan, Waduk Tologwanggu, Waduk Nglangkur, dan Waduk Blir-bing		b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Baryu Kuwung, Waduk Druk, Waduk Gemblung, Waduk Godu, Waduk Grawan, Waduk Gremeng, Waduk Gunung Rawo, Waduk Kd. Waru, Waduk Lodan, Waduk Panchan, Waduk Randa Kuning, Waduk Kawabokdewo, Waduk Ceripuran, Waduk Kedung Wungu, Waduk Bangsri II, Waduk Sambong, Waduk Soko, Waduk Suruhan, Waduk Tologwanggu, Waduk Nglangkur, dan Waduk Blir-bing yang dapat mencegah fungsi waduk
II.1.7.	Waduk Batuk, Waduk Cengklik, Waduk Dalingan, Waduk Gelijar, Waduk Kedung Ombo, Waduk Kembangan, Waduk Ketiro, Waduk Klego, Waduk Krisak,	Bendungan beserta waduknya	a. mengembangkan dan memelihara Waduk Batuk, Waduk Cengklik, Waduk Dalingan, Waduk Gelijar, Waduk Kedung Ombo, Waduk Kembangan, Waduk Ketiro, Waduk Klego, Waduk Krisak, Waduk Lalong, Waduk Mulur, Waduk Nawangun, Waduk Ngumar, Waduk Parung Joho, Waduk Pluruhun, Waduk Kawa Jombor, Waduk Song Putri, dan Waduk Wonogiri/Gajah Mungkur; untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi Kawasan Andalan Subhauka Wonosaren

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Waduk Lalong, Waduk Mulu, Waduk Nawangan, Waduk Ngancar, Waduk Perang Juhut, Waduk Plumbon, Waduk Rawa Jombor, Waduk Song Putri, dan Waduk Wunggi/Gajah Mungku.		b. mengandalkan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Barok, Waduk Cengklik, Waduk Delungu, Waduk Gebaj, Waduk Kedung Ombo, Waduk Kembang, Waduk Kelro, Waduk Klego, Waduk Krasak, Waduk Lalong, Waduk Mulu, Waduk Nawangan, Waduk Ngancar, Waduk Parang Joho, Waduk Plumbon, Waduk Rawa Jombor, Waduk Song Putri, dan Waduk Wunggi/Gajah Mungku yang dapat mengganggu fungsi waduk
T1.1.8.	Waduk Butok, Waduk Kalorbo, Waduk Kenteng, Waduk Nglangon, Waduk Rawa Pening, Waduk Sanggeh, dan Waduk Simo, Waduk Jatibarang	Bandungan beserta waduknya	a. mengembangkan dan memelihara Waduk Butok, Waduk Kalorbo, Waduk Kenteng, Waduk Nglangon, Waduk Rawa Pening, Waduk Sanggeh, dan Waduk Simo, Waduk Jatibarang untuk mempertahankan dayaampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi IKN Kawasan Perkotaan Kedungsepur dan Kawasan Andalan Kedungsepur b. mengoptimalkan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Butok, Waduk Kalorbo, Waduk Kenteng, Waduk Nglangon, Waduk Rawa Pening, Waduk Sanggeh, dan Waduk Simo, Waduk Jatibarang yang dapat mengganggu fungsi waduk

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.1.9.	Waduk Benel, Waduk Muara, Waduk Palasari, dan Waduk Telaga Tunjung	Bendungan beserta waduknya	<p>a. rengembangkan dan memelihara Waduk Benel, Waduk Muara, Waduk Palasari, dan Waduk Telaga Tunjung untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi PKM Kawasan Perkotaan Jabodetabek dan kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya PKM Kawasan Perkotaan Surabaya dan Kawasan Andalan Tali Selatan</p> <p>b. rengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Juanda, Waduk Pongkor, dan Waduk Situ Karang Waduk Benel, Waduk Muara, Waduk Palasari, dan Waduk Telaga Tunjung yang dapat menggunakan fungsi waduk</p>
II.1.10.	Waduk Paras, Waduk Romang, dan Waduk Saurpean Baru	Bendungan beserta waduknya	<p>a. rengembangkan dan memelihara Waduk Paras, Waduk Romang, dan Waduk Saurpean Baru untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi Kawasan Andalan Sribondolo Tumulowoso-Terruh</p> <p>b. rengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Paras, Waduk Romang, dan Waduk Saurpean Baru yang dapat menggunakan fungsi waduk</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.1.11.	Waduk Lahor, Waduk Lwuk Jati, Waduk Segaran, Waduk Selorejo, Waduk Sengguh, dan Waduk Karang Kates/Sutani	Bendungan beserta waduknya	<p>a. mengembangkan dan memelihara Waduk Lahor, Waduk Lwuk Jati, Waduk Segaran, Waduk Selorejo, Waduk Sengguh, dan Waduk Karang Kates/Sutani untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi kawasan PKN Malang dan Kawasan Andalan Malang dan sekitarnya</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Panas, Waduk Romang, dan Waduk Sampitan Baru yang dapat mengganggu fungsi waduk</p>
II.1.12.	Waduk Krasak, Waduk Ranu Bedali, Waduk Ranu Cibalak Lagong, Waduk Ranu Gesakan, Waduk Ranu Kurubelo, Waduk Ranu Kodawung, Waduk Ranu Klakah, Waduk Ranu Ladang, Waduk Ranu Pakis, Waduk Ranu Pane, Waduk Ranu Sukulilo, Waduk Ranu Taman Hicup, dan Waduk Selo Karibang untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi Kawasan Andalan Purbalingga-Pasturuan-Luarang	Bendungan beserta waduknya	<p>a. mengembangkan dan memelihara Waduk Krasak, Waduk Ranu Bedali, Waduk Ranu Cibalak Lagong, Waduk Ranu Gesakan, Waduk Ranu Kurubelo, Waduk Ranu Kodawung, Waduk Ranu Klakah, Waduk Ranu Ladang, Waduk Ranu Pakis, Waduk Ranu Pane, Waduk Ranu Sukulilo, Waduk Ranu Taman Hicup, dan Waduk Selo Karibang untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi Kawasan Andalan Purbalingga-Pasturuan-Luarang</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Waduk Ranu Panan Hidup, dan Waduk Selo Kambang		<p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Krajan, Waduk Ranu Dedali, Waduk Ranu Cibatak Lagong, Waduk Ranu Gesikan, Waduk Ranu Kumbulo, Waduk Ranu Kelawung, Waduk Ranu Klakah, Waduk Ranu Lading, Waduk Ranu Pakis, Waduk Ranu Panc, Waduk Ranu Sukuhlo, Waduk Ranu Carrun Hidup, dan Waduk Selo Kambang yang dapat mengganggu fungsi waduk</p>
II.1.13.	Waduk Klampis dan Waduk Nipah	Bendungan beserta waduknya	<p>a. mengembangkan dan memelihara Waduk Klampis dan Waduk Nipah untuk meningkatkan daya tampung air yang merajut penyediaan air baku bagi Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Klampis dan Waduk Nipah yang dapat mengganggu fungsi waduk</p>
II.1.14.	Waduk Gempol, Waduk Pacal, Waduk Prijetan, Waduk Tlogo Pucangan, dan Waduk Ngambang		<p>a. mengembangkan dan memelihara Waduk Gempol, Waduk Pacal, Waduk Prijetan, Waduk Tlogo Pucangan, dan Waduk Ngambang untuk meningkatkan daya tampung air yang merajut penyediaan air baku bagi PKW Tuban dan Kawasan Andalan Tuban-Bajansari</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Gempol, Waduk Pacal, Waduk Prijetan, Waduk Tlogo Pucangan, dan Waduk Ngambang yang dapat mengganggu fungsi waduk</p>

STRATEGI OPERASIONALISASI		
NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS
II.1.15.	Waduk Dawuhan, Waduk Gunung, Waduk Kedung Bendo, Waduk Kedung Trubus, Waduk Notopuro, Waduk Pondok, Waduk Sangiran, Waduk Saradan, Waduk Serpu, Waduk Tloga Ngabel, dan Waduk Telaga Pasir/Sarangau	Bendungan beserta waduknya a. rengembangkan dan memelihara Waduk Dawuhan, Waduk Gonggeng, Waduk Kedung Bendo, Waduk Kedung Brubus, Waduk Notopuro, Waduk Pondok, Waduk Sangiran, Waduk Saradan, Waduk Serpu, Waduk Tloga Ngabel, dan Waduk Telaga Pasir/Sarangau untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi PKW Madium dan Kawasan Andalan Madium dan Selirannya b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Dawuhan, Waduk Gonggeng, Waduk Kedung Bendo, Waduk Kedung Trubus, Waduk Notopuro, Waduk Pondok, Waduk Sangiran, Waduk Saradan, Waduk Serpu, Waduk Tloga Ngabel, dan Waduk Telaga Pasir/Sarangau yang dapat mengganggu fungsi waduk
II.1.16.	Waduk Bening/Widas, Waduk Blendis, Waduk Grogol, Waduk Kulak Sacang, Waduk Ngapoh, Waduk Nglenteng, Waduk Oro-oro	Bendungan beserta waduknya a. rengembangkan dan memelihara Waduk Bening/Widas, Waduk Blendis, Waduk Grogol, Waduk Kulak Sacang, Waduk Ngapoh, Waduk Nglenteng, Waduk Oro-oro Ombo, Waduk Paming, Waduk Prambon, Waduk Sumber Kepuh, Waduk Whigi, dan Waduk Wuntoro untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi Kawasan Andalan Kediri- Tulung Agung-Blitar

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Ombu, Waduk Pening, Waduk Prambon, Waduk Sumber Kepuh, Waduk Wlingi, dan Waduk Wonorejo		b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Dening/Widas, Waduk Dleudis, Waduk Grogol, Waduk Kulak Sacang, Waduk Ngapel, Waduk Nglimreng, Waduk Orimom Orlim, Waduk Permy, Waduk Prambon, Waduk Sumber Kepuh, Waduk Wlingi, dan Waduk Wonorejo yang dapat menunjang fungsi waduk
II.1.17.	Waduk Balong Ganggang, Waduk Banjaranyar, Waduk Bowo, Waduk Bowo, Waduk Bulu, Waduk Canggah, Waduk Cungklup, Waduk Gedung Kulut, Waduk German, Waduk Gondang, Waduk Grogokan, Waduk Jabung, Waduk Jatong, Waduk Jatonsmur, Waduk Kaliombo II, Waduk	Bendungan berserta waduknya	a. mengembangkan dan memelihara Waduk Balong, Waduk Ganggang, Waduk Banjaranyar, Waduk Bono, Waduk Bowo, Waduk Bulu, Waduk Canggah, Waduk Cungklup, Waduk Gedung Kulut, Waduk German, Waduk Gondang, Waduk Grogokan, Waduk Jabung, Waduk Jatong, Waduk Jatonsmur, Waduk Kaliombo II, Waduk Kwarun, Waduk Logok, Waduk Maduran, Waduk Malcam Satri, Waduk Mnyan, Waduk Palangan, Waduk Paprit, Waduk Rancang, Waduk Dhoro, Waduk Kande, Waduk Sekaran, Waduk Semono, Waduk Semir, Waduk Sentul, Waduk Sepurji, Waduk Segan, Waduk Suncungko, Waduk Lakoran, Waduk Luhung, Waduk Luwu, dan Waduk Wungu Jenggot untuk mempertabakan daya tampung air yang menunjang penyelenggaraan air baku PKN Kawasan Perkotaan Gebangkentosusila dan Kawasan Andalan Gebangkentosusila

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Kwanon, Waduk Legok, Waduk Maduran, Waduk Makam Santri, Waduk Manyar, Waduk Palonggan, Waduk Paprit, Waduk Rancang, Waduk Dhoho, Waduk Rande, Waduk Sekaran, Waduk Semondo, Waduk Sentti, Waduk Sentul, Waduk Sepanji, Waduk Sogo, Waduk Sumengko, Waduk Takeran, Waduk Tutung, Waduk Tuwiri, dan Waduk Wringin Jenggot		b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar: Waduk Balong Ganggung, Waduk Danjaranyar, Waduk Domo, Waduk Dowo, Waduk Dulu, Waduk Canggih, Waduk Cungkup, Waduk Gedung Kulub, Waduk Geriman, Waduk Gondang, Waduk Grojokan, Waduk Jabung, Waduk Jombang, Waduk Jatsaur, Waduk Kaliombo II, Waduk Kwanon, Waduk Legok, Waduk Maduran, Waduk Makam Santri, Waduk Manyar, Waduk Palonggan, Waduk Paprit, Waduk Rancang, Waduk Dhoho, Waduk Rande, Waduk Sekaran, Waduk Semondo, Waduk Sentti, Waduk Senui, Waduk Sepanji, Waduk Sogo, Waduk Sumengko, Waduk Takeran, Waduk Tutung, Waduk Tuwiri, dan Waduk Wringin Jenggot yang dapat menunjang fungsi waduk

STRATEGI OPERASIONALISASI		
NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS
II.1.18.	Waduk Serimo dan Waduk Tembak Doyo	Bendungan beserta waduknya
		<p>a. mengembangkan dan memelihara Waduk Serimo dan Waduk Tembak Doyo untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi PKW Sleman dan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya</p> <p>b. mengondisikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Serimo dan Waduk Tembak Doyo yang dapat mengoptimalkan fungsi waduk</p>
II.1.19.	Waduk Gunung, Waduk Mrica, Waduk Sempur, Waduk Wadas Lintang, Waduk Paçngkulati, dan Waduk Wanganaçi	Bendungan beserta waduknya
		<p>a. mengembangkan dan memelihara Waduk Gunung, Waduk Mrica, Waduk Sempur, Waduk Wadas Lintang, Waduk Paçngkulati, dan Waduk Wanganaçi untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan</p> <p>b. mengondisikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Gunung, Waduk Mrica, Waduk Sempur, Waduk Wadas Lintang, Waduk Paçngkulati, dan Waduk Wanganaçi yang dapat mengoptimalkan fungsi waduk</p>
II.1.20.	Waduk Cacaban, Waduk Malahayu, dan Waduk Penjalin	Bendungan beserta waduknya
		<p>a. mengembangkan dan memelihara Waduk Cacaban, Waduk Malahayu, dan Waduk Penjalin untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi PKW Tegai dan Kawasan Andalan Driyapas</p> <p>b. mengondisikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Cacaban, Waduk Malahayu, dan Waduk Penjalin yang dapat mengoptimalkan fungsi waduk</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.1.21.	Waduk Grogegak	Bendungan Desesta waduknya	<p>a. meningkatkan dan memelihara Waduk Grogegak untuk mempertahankan daya tampung air yang menjamin penyediaan air baku bagi PKW Sijawaja dan Kawasan Andalan Tjah Ujara</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Waduk Grogegak yang dapat mengganggu fungsi waduk</p>
II.2.	Daerah Irigasi (DI)	Daerah irigasi	
II.2.1.	DI Cibaliung		<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cibaliung untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Pangelegang</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cibaliung yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.2.	DI Giliman	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cilumaburuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Panleglang dan Kabupaten Tebak</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Giliman yang dapat mengganggu fungsi DI</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.3. DI Ciyung dan DI Cilasuk II	Daerah irigasi	a. b.	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Ciyung dan DI Cilasuk II untuk mempertahankan dan meningkatkan luas lahan pertanian pangan di Kabupaten Serang b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Ciyung dan DI Cilasuk II yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.4. DI Cisadane	Daerah irigasi	a. b.	a. meningkatkan fungsi, mengembankan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cisadane untuk mempertahankan dan meningkatkan luas lahan pertanian pangan di Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cisadane yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.5. DI Cidurian	Daerah irigasi	a. b.	a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cidurian untuk mempertahankan dan meningkatkan luas lahan pertanian pangan di Kabupaten Tangerang b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cidurian yang dapat mengganggu fungsi DI
II.2.6. DI Selatan Jatihuhur Bekasi	Daerah irigasi	a. b.	a. meningkatkan fungsi, mengembankan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Selatan Jatihuhur-Bekasi untuk mempertahankan dan meningkatkan luas lahan pertanian pangan di Kabupaten Bekasi b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Selatan Jatihuhur-Bekasi yang dapat mengganggu fungsi DI

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.7.	DI Ciparisinggis	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Ciparisinggis untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor</p> <p>b. mengondalakan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Ciparisinggis yang dapat menunjang fungsi DI</p>
II.2.8.	DI Cibea-Bogor	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cibea-Bogor untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Bogor</p> <p>b. mengondalakan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cibea-Bogor yang dapat menunjang fungsi DI</p>
II.2.9.	DI Cikaranggeusan, DI Cileuh, dan DI Asna-Sukabumi	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cikaranggeusan, DI Cileuh, dan DI Asna-Sukabumi untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Sukabumi</p> <p>b. mengondalakan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cikaranggeusan, DI Cileuh, dan DI Asna-Sukabumi yang dapat menunjang fungsi DI</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.10.	DI Cibea Cianjur	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cibea-Cianjur untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian di Kabupaten Cianjur</p> <p>b. mengondalakan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cibea-Cianjur yang dapat menunjang fungsi DI</p>
II.2.11.	DI Jatiluhur	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, memperhungkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Jatiluhur untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu</p> <p>b. mengondalakan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Jatiluhur yang dapat menunjang fungsi DI</p>
II.2.12.	DI Carum Utara dan DI Selatan Jatiluhur Karawang	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Carum Utara dan DI Selatan Jatiluhur Karawang untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Karawang</p> <p>b. mengondalakan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Carum Utara dan DI Selatan Jatiluhur-Karawang yang dapat menunjang fungsi DI</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.13.	DI Selatan Jatuhbur Purwakarta	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Selatan Jatuhbur-Purwakarta untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Purwakarta</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Selatan Jatuhbur Purwakarta yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.14.	DI Cileuleuy, DI Lerwi Nangka, DI Salamdarma, DI Macan, DI Gadung, dan DI Cileuleuy Huli	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cileuleuy, DI Lerwi Nangka, DI Salamdarma, DI Macan, DI Gadung, dan DI Cileuleuy Huli untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Subang</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cileuleuy, DI Lerwi Nangka, DI Salamdarma, DI Macan, DI Gadung, dan DI Cileuleuy Huli yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.15.	DI Ciranjang	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Ciranjang untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Sumelang</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Ciranjang yang dapat mengganggu fungsi DI</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.16.	DI Cipancuh, DI Cipanas I, dan DI Cipanas II	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cipancuh, DI Cipanas I, dan DI Cipanas II untuk meningkatkan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Indramayu</p> <p>b. mengendalikn pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cipancuh, DI Cipanas I, dan DI Cipanas II yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.17.	DI Rontang	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Rontang untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Cirebon</p> <p>b. mengendalikn pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Rontang yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.18.	DI Cisarungin	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cisarungin untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Cirebon</p> <p>b. mengendalikn pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cisarungin yang dapat mengganggu fungsi DI</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.19.	DI Kamun dan DI Ciwaringin Uluk	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Kamun dan DI Ciwaringin Uluk untuk mempertahankan dan meningkatkan luas lahan pertanian pangan di Kabupaten Majalengka</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Kamun dan DI Ciwaringin Uluk yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.20.	DI Cikeusik dan DI Seuscupan	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, memperluas, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cikeusik dan DI Seuscupan untuk mempertahankan dan meningkatkan luas lahan pertanian pangan di Kabupaten Cirebon</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cikeusik dan DI Seuscupan yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.21.	DI Lakbok Selatan	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Lakbok Selatan untuk mempertahankan dan meningkatkan luas lahan pertanian pangan di Kabupaten Garut</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Lakbuk Selatan yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.22.	DI Cikuntan II	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, memperluas, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cikuntan II untuk mempertahankan dan meningkatkan luas lahan pertanian pangan di Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Cialakmalaya</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.23.	DI Cikunten I	Daerah irigasi	<p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cikunten II yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.24.	DI Laktbok Utara	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, memperbaharui, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cikunten I untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Tasikmalaya</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cikunten I yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.25.	DI Asma Ciannia	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, memperbaharui, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Laktbok Utara untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Ciannia dan Kota Banjar</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Laktbok Utara yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.25.	DI Asma Ciannia	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, memperbaharui, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Asma Ciannia untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Ciannia</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Asma-Ciannia yang dapat mengganggu fungsi DI</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.26.	DI Lakbok Selatan/Manganti dan DI Rawa Onor./Panulisan	Daerah irigasi	<p>c. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Lakbok Selatan/Manganti dan DI Rawa Onor./Panulisan untuk memperbaharui dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Gramis dan Kabupaten Cilacap</p> <p>d. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Lakbok Selatan/Manganti dan DI Rawa Onor./Panulisan yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.27.	DI Seayu	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cibaliung untuk memperbaharui dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyuwana, dan Kabupaten Kebumaha</p>
II.2.28.	DI Tajur	Daerah irigasi	<p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cibaliung yang dapat mengganggu fungsi DI</p> <p>a. meningkatkan fungsi, memperbaharui, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Tajur untuk memperbaharui dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Banyuwana</p> <p>bc. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Tajur yang dapat mengganggu fungsi DI</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.29.	DI Banjarsel	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Banjarsel untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Purwokerto dan Kabupaten Banyuwangi</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Banjarsel yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.30.	DI Singomerto	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Singomerto untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Banjarnegara</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Singomerto yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.31.	DI Waduk Serrip	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Waduk Serrip untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Kebunrejo</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Waduk Serrip yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.32.	DI Waduk Wadaslimbang	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Waduk Wadaslimbang untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.33.	DI Bumi dan DI Kedung Putri	Daerah irigasi	<p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Waduk Wadalinlang yang dapat mengganggu fungsi DI</p> <p>a. meningkatkan fungsi, memperbaiki, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Boro dan DI Kedung Putri untuk mempertabahkan dan meningkatkan hasil lahan pertanian pangan di Kabupaten Purworejo</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Bumi dan DI Kedung Putri yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.34.	DI Waduk Matabaya Kabupaten Brebes	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, memperbaiki, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Waduk Matabaya untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil lahan pertanian pangan di Kabupaten Brebes</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cabang DI Waduk Matabaya yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.35.	DI Kumisik dan DI Peranti Bawah (bd. Notog)	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, memperbaiki, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Kumisik dan DI Peranti Bawah (bd. Notog) untuk memperbaiki dan meningkatkan luas lahan pertanian pangan di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Kumisik dan DI Peranti Bawah (bd. Notog) yang dapat mengganggu fungsi DI</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.36.	DI Cepero (Raurbut), DI Cacaban (bd Dukuh Jati), dan DI Gung yang	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cipeco (Raurbut), DI Cacaban (bd Dukuh Jati), dan DI Gung untuk memperbaiki luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Tegal</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Ciluhung yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.37.	DI Sungapan/Cropok	Daerah irigasi	<p>c. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Sungapan/Cropok untuk memperbaiki luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang</p> <p>d. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Sungapan/Cropok yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.38.	DI Comal/Sukawati	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Comal/Sukawati untuk memperbaiki luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Pemalang</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Comal/Sukawati yang dapat mengganggu fungsi DI</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.39.	DI Kaliwadus	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Kaliwadus untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Petalangan dan Kabupaten Pektalungan</p> <p>b. mengendalikn pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Kaliwadus yang dapat mendukung fungsi DI</p>
II.2.40.	DI Pesantren Kletak	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Pesantren Kletak untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Pektalungan dan Kota Pektalungan</p> <p>b. mengendalikn pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Pesantren Kletak yang dapat mendukung fungsi DI</p>
II.2.41.	DI Sragi	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Sragi untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Pektalungan</p> <p>b. mengendalikn pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Sragi yang dapat mendukung fungsi DI</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.42.	DI Kupang Krompeng	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Kupang Krompeng untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang</p> <p>b. mengendalikn pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Kupang Krompeng yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.43.	DI Kochung Asur	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cibalung Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal</p> <p>b. mengendalikn pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.44.	DI Bodri Trompo	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Bodri Trompo untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Kendal</p> <p>b. mengendalikn pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Bodri Trompo yang dapat mengganggu fungsi DI</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.45.	DI Progo Manggis Kalibening	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Progo Manggis-Kalibening untuk memperlebar dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Kendal</p> <p>b. mengendalikn pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Progo Manggis-Kalibening yang dapat menunjang fungsi DI</p>
II.2.46.	DI Kupang Krompeng	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Kupang Krompeng untuk memperlebar dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Batang</p> <p>b. mengendalikn pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Kupang Krompeng yang dapat menunjang fungsi DI</p>
II.2.47.	DI Kedung Asem	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Kedung Asem untuk memperlebar dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal</p> <p>b. mengendalikn pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Kedung Asem yang dapat menunjang fungsi DI</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.48.	DI Bodri Trompo	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Cibaliung DI Bodri Trompo untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Kendal</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Bodri Trompo yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.49.	DI Progo Manggis Kalibening	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Progo Manggis Kalibening untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Tembung, Kabupaten Magelang, dan Kota Magelang</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Progo Manggis Kalibening yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.50.	DI Jragung	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Jragung untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Demak</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Jragung yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.e1.	DI Gekapan dan DI Sedadi	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Gekapan dan DI Sedadi untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.52.	DI Sidorejo dan DI Bd. Dimpil	Daerah irigasi	<p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Glapan dan DI Sedadi yang dapat mengganggu fungsi DI</p> <p>a. meningkatkan fungsi, memperbaharui, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Sidorejo dan DI Bd. Dimpil untuk mempertabakan dan meningkatkan hasil lahan pertanian pangan di Kabupaten Grobogan</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Sidorejo dan DI Bd. Dimpil yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.53.	DI Klambu	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, memperbaharui, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Klambu untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil lahan pertanian pangan di Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Cibaliung yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.54.	DI Waduk Gembong dan DI Waduk Gunung Rowo	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, memperbaharui, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Waduk Gembong dan DI Waduk Gunung Rowo untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil lahan pertanian pangan di Kabupaten Pati</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Waduk Gembong dan DI Waduk Gunung Rowo yang dapat mengganggu fungsi DI</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.55.	DI Colo	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Colo untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Kliten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Yawi</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Colo yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.56.	DI Tuk Kuning	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Tuk Kuning untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Kliten dan Kabupaten Sleman</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Tuk Kuning yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.57.	DI Karangtatan {vander Wijk- Mataram}	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Karangtatan untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Karangtatan yang dapat mengganggu fungsi DI</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.58.	DI System Kalibawang	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI System Kalibawang untuk diperlebarkan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Kuluprege</p> <p>b. mengendalikn pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI System Kalibawang yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.59.	DI Semen/Krinjo	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, memperhungkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Semen/Krinjo untuk diperlebarkan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Kembang dan Kabupaten Tuban</p> <p>b. mengendalikn pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Semen/Krinjo yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.60.	DI Beron	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Beron untuk diperlebarkan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Tuban</p> <p>b. mengendalikn pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Beron yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.61.	DI Pacal	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Pacal untuk diperlebarkan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Bojonegara</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.62.	DI Waduk Pondok	Daerah irigasi	<p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Pecal yang dapat mengganggu fungsi DI</p> <p>a. meningkatkan fungsi, memperluas, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Waduk Pondok untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Ngawi</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Waduk Pondok yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.63.	DI Sim	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Sim untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magelang, Kabupaten Madiun, dan Kota Madiun</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Sim yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.64.	DI Jejeruk	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Jejeruk untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Magelang dan Kabupaten Madiun</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Jejeruk yang dapat mengganggu fungsi DI</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.65.	DI Gombal/Dupok	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Gombal/Dupok untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Madura dan Kabupaten Ponorogo</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Gombal/Dupok yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.66.	DI Sungkur	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Sungkur untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Ponorogo</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Sungkur yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.67.	DI Waduk Bening	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Waduk Bening untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Nganjuk</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Menurus yang dapat mengganggu fungsi DI</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.68.	DI Mrican Kiri/W K	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Mrican Kiri/W-K untuk diperlambatkan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Ngaruk dan Kabupaten Kediri</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Menturus yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.69.	DI Siman dan DI Mrican Kanan	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Siman dan DI Mrican Kanan untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jombang</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Menturus yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.70.	DI Lodayo	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Lodayo untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Blitar</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Menturus yang dapat mengganggu fungsi DI</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.71.	DI Bengawan Jero, DI Wd. Pijelan, dan DI Gondang	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Dengawan Jero, DI Wd. Pijelan, dan DI Gondang untuk irigasi pertanaman dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Lamongan</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Menurus yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.72.	DI Menturus	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Menturus untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Menturus yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.73.	DI Padi Porohan	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Padi Porohan untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Padi Porohan yang dapat mengganggu fungsi DI</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.74.	DI Delta Brantas	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Delta Brantas untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Sidoarjo</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Delta Brantas yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.75.	DI Is Molek	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Is Molek untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan pertanian pangan di Kabupaten Malang</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Is Molek yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.76.	DI Is Kedung Kandang	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Is Kedung Kandang untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Malang dan Kota Malang</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Pekalen dan DI Pekalen 2/Andhug Bumi yang dapat mengganggu fungsi DI</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IL.2.77.	DI Pekalen dan DI Pekalen 2/Andung Biru	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Pekalen dan DI Pekalen 2/Andung Biru untuk memperbaiki dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Probolinggo</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Pekalen dan DI Pekalen 2/Andung Biru yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
IL.2.78.	DI Jatiroto	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Jatiroto untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan pertanian pangan di Kabupaten Lumajang</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Jatiroto yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
IL.2.79.	DI Bondoyudo	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Bondoyudo untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Lalang, DI Dedadung, DI Pondok Waluh, dan DI Kemuning Barat yang dapat mengganggu fungsi DI</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IL.2.80.	DI Calang, DI Bedadung, DI Pondok Wahuh, dan DI Kenccong Barat	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Talang, DI Bedadung, DI Pondok Wahuh, dan DI Kenccong Barat untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Jember;</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Calang, DI Bedadung, DI Pondok Wahuh, dan DI Kenccong Barat yang dapat menunjang fungsi DI</p>
IL.2.81.	DI Sampuran Baru	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Sampuran Baru untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Banyuwutih dan DI Sampuran yang dapat menunjang fungsi DI</p>
IL.2.82.	DI Banyuwutih dan DI Sampuran	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Banyuwutih dan DI Sampuran untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Situbondo</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Banyuwutih dan DI Sampuran yang dapat menunjang fungsi DI</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.83.	DI Selat Teknik, DI Purulinggo, DI Baru, dan DI K (Selat)	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Selat Teknik, DI Purulinggo, DI Baru, dan DI K (Selat) untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kabupaten Banyuwangi</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Selat Teknik, DI Purulinggo, DI Baru, dan DI K (Selat) yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.84.	DI Kedewataan	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, memperbaiki, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Kedewataan untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Kedewataan yang dapat mengganggu fungsi DI</p>
II.2.85.	DI Maubal	Daerah irigasi	<p>a. meningkatkan fungsi, mengembangkan, dan memelihara jaringan irigasi teknis pada DI Maubal untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan lahan pertanian pangan di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Tabanan</p> <p>b. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar DI Maubal yang dapat mengganggu fungsi DI</p>

NO.	JARINGAN SUMBER DAYA AIR	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.3.	Prasarana dan sarana air baku di Kepulauan Seribu, Pulau Luoda, Pulau Pamitan, Pulau Deli, Pulau Sangiang, Pulau Nusakambangan, Pulau Nusa Darung, Pulau Sapudi, Pulau Kangean, dan Pulau Nusa Penida Pulau Sangiang, Pulau Kopulauan Seribu, Pulau Luoda, Pulau Pamitan, Pulau Deli, Pulau Nusakambangan, Pulau Karimunjawa, Pulau Bawean, Pulau Nusa Darung, Pulau Sapudi, Pulau Kangean, dan Pulau Nusa Penida Pulau Sangiang, Pulau Kusanthangan, Pulau Karimunjawa, Pulau Bawean, Pulau Sapudi, Pulau Kangean, dan Pulau Nusa Penida dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lingkungan kawasan	Prasarana dan sarana air baku	<p>a. mengembangkan prasarana dan sarana air baku untuk melayani kawasan terlingkai dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil berpenghuni di Kepulauan Seribu, Pulau Tunda, Pulau Pamitan, Pulau Deli, Pulau Sangiang, Pulau Nusakambangan, Pulau Karimunjawa, Pulau Bawean, Pulau Nusa Darung, Pulau Sapudi, Pulau Kangean, dan Pulau Nusa Penida</p> <p>b. memantapkan ruang untuk penyediaan prasarana dan sarana air baku di Kepulauan Seribu, Pulau Luoda, Pulau Pamitan, Pulau Deli, Pulau Sangiang, Pulau Kusanthangan, Pulau Karimunjawa, Pulau Bawean, Pulau Sapudi, Pulau Kangean, dan Pulau Nusa Penida dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lingkungan kawasan</p>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN XII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TANGGAL 16 MARET 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN PELESTARIAN
KAWASAN LINDUNG NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN PELESTARIAN KAWASAN LINDUNG NASIONAL
DI PULAU JAWA-BALI**

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Kawasan yang Merupakan Pelestarian Pelestarian Hutan Lindung	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	<p>a. mengembangkan pengelolaan, meningkatkan fungsi, dan mempertahankan luas kawasan hutan lindung di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabungah, Bandung Utara, Bandung Selatan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaran, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kota Batu, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegara, Kabupaten Dowlowson, Kabupaten</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madura, Kabupaten Malang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Jember, Kabupaten Dolek, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem</p> <p>b. memelihara jenis dan kerapatan tanaman hutan yang memiliki fungsi lindung sesuai dengan jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, intensitas hujan, dan parameter fisik lainnya di kawasan hutan lindung</p> <p>c. merehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentuk alam</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelaksanaan seluruh kegiatan yang beroperasi menjangkau luas kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan</p> <p>f. menggodalikan pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya, meliputi perikanan yang dibudidayakan hanya untuk penduduk asli, dengan luas</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.2.	Kawasan Kesapan Air	Kawasan yang berkaitan perlindungan terhadap kawasan hewahannya	<p>tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</p> <p>a. mempertahankan fungsi kawasan resapan air dan mengendalikannya alih fungsi lahan kawasan resapan air pada kawasan resapan air di CAT Serang-Tangerang (Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Rogan), CAT Jakarta (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bekasi), CAT Sundaurea (Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Cilacap), CAT Dayu Tebes (Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Segal), CAT Wonosari (Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Pacitan), CAT Lasor (Kabupaten Rembang dan Kabupaten Cukuh), CAT Roudublantung (Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Bojonegara), dan CAT Ngawi-Ponorogo (Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegara, dan Kota Madiun).</p> <p>b. rehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. memanfaatkan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan</p> <p>d. menyediakan umur resapan dan/atau wadah pada lahan terbangun yang sudah ada</p> <p>e. menerapkan prinsip zero <i>drain Q policy</i> terhadap setiap kegiatan budidaya terbangun yang diijukan izinya</p>
II.	Kawasan Perlindungan Setempat		
II.1.	Sempadan Pantai	Kawasan perlindungan setempat	<p>a. memaksimalkan pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi menggangu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai dengan menggunakan teknologi lingkungan pada sempadan pantai di Kota Cillegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Cuban, Kabupaten Larumpati, Kabupaten Gresik, Kabupaten Ponorogo, Kota Ponorogo, Kabupaten</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
II.2.	Sempadan Sungai	Kawasan perlindungan sempadan	<p>Pobolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Paurckasan, Kabupaten Sumedup, Kabupaten Paciran, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jemberana, Kabupaten Bulceleng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem</p> <p>b. menyebarkan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di sempadan pantai untuk mencegah abrasi atau daya rusak air</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk penyediaan RTT</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi pantai dan pemertanian betawana</p> <p>e. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf d</p> <p>f. melarang semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan</p> <p>a. mengoptimalkan pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai dengan menggunakan teknologi lingkungan pada sempadan sungai di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sungai-sungai di WS Kepulauan Seribu (Provinsi DKI Jakarta- Provinsi Banten)

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>2. Sungai Bojonegara, Sungai Tugel, Sungai Cakung, Sungai Candi, Sungai Caringin, Sungai Ciaseu, Sungai Ciasu, Sungai Cibadlak, Sungai Cibadar Dua, Sungai Cibako, Sungai Cihanzen, Sungai Cibanteng, Sungai Ciharu, Sungai Cibodas, Sungai Cihunar, Sungai Cicudu, Sungai Cidanau, Sungai Cilongkol, Sungai Cidunau, Sungai Cigeblak, Sungai Cigeimori, Sungai Cigajak, Sungai Cigohang, Sungai Cikaidau, Sungai Cikalabu, Sungai Cikapadilau, Sungai Cikarokruk, Sungai Cikebel, Sungai Cikebeles, Sungai Cikubang, Sungai Cilasak, Sungai Cilegok, Sungai Cileleus, Sungai Cilwung, Sungai Ciucalaya, Sungai Ciurancu, Sungai Cimauk, Sungai Ciwayku, Sungai Ciwayesi, Sungai Ciwayun, Sungai Cipeley, Sungai Cipunagara, Sungai Craginggang, Sungai Ciranggu, Sungai Cirangon, Sungai Cirangrang, Sungai Cirarab, Sungai Ciruswet, Sungai Cimurpak, Sungai Cisadana, Sungai Cisago, Sungai Citarum, Sungai Ciujung, Sungai Ciwaku, Sungai Kali Malang, Sungai Kopenrasjid, Sungai Krukul, Sungai Panjang, Sungai Rumeun Girang, Sungai Sangiang, Sungai Sedari, Sungai Sem Lor, Sungai Sewo, Sungai Subaraju, Sungai Sumur, Sungai Sunter, dan Sungai Tunda di WS Cidanau-Ciujung-Cidunau-Cisadane-Cilwung-Citarum (Provinsi Banten Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat)</p> <p>3. Sungai Branalab, Cibocoran, Cipolab, Cikonde, Cimacang, Cipambokongan Cipamerekan, Cipurayungan, Cianduy, Ciutuk.</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Gareh, Karanganyar, Kipoh, Lemhongmuring, Nirhaya, Pandan, Pancumbung di WS Citanduy (Provinsi Jawa Barat/Provinsi Jawa Tengah)</p> <p>4. Sungai Opak, Sungai Progo, dan Sungai Serang di WS Progo Opak Serang (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta/Provinsi Jawa Tengah);</p> <p>5. Sungai Albasiah, Sungai Ainan, Sungai Bancar, Sungai Banyuwiripan, Sungai Bawur, Sungai Bekharjo, Sungai Belang, Sungai Bendosuar, Sungai Dewasawan Solo, Sungai Didur, Sungai Dogoran, Sungai Boujong, Sungai Boyong, Sungai Brangkal, Sungai Brongkok, Sungai Budurang, Sungai Bumi, Sungai Candi, Sungai Cangaran, Sungai Curuh Sungai Corong, Sungai Dadap Kidul, Sungai Dadaplor, Sungai Dawung, Sungai Gajaran, Sungai Gayam, Sungai Gosing, Sungai Glagah, Sungai Grindulu, Sungai Kakap, Sungai Kalak, Sungai Kalak Kidul, Sungai Kalaren, Sungai Kalidawur, Sungai Kalipelus, Sungai Kalipelus Kidul, Sungai Kalisat, Sungai Kaluluha, Sungai Kalumu, Sungai Kaluwungu, Sungai Kamanren, Sungai Kandangsemangkon, Sungai Karangnongko, Sungai Keboangung, Sungai Keimbang, Sungai Kemplong, Sungai Kendal Kidul, Sungai Kendal Lor, Sungai Kesambi, Sungai Klepu, Sungai Klero, Sungai Klesem, Sungai Kramat, Sungai Labuhan, Sungai Lamong, Sungai Lohgung, Sungai Lorok, Sungai Menengun, Sungai Mliwang, Sungai Nkundan, Sungai</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Ngobyogan, Sungai Ngulil, Sungai Nyemone, Sungai Paciran, Sungai Pacitan, Sungai Padli, Sungai Pager, Sungai Palour, Sungai Palcin Kulon, Sungai Panyuran, Sungai Plumbungan, Sungai Plumbungan Weran, Sungai Poko, Sungai Pulosari Kulon, Sungai Pulosari Weran, Sungai Saarla, Sungai Sanggrahan, Sungai Sedayulawas, Sungai Sekono, Sungai Sendang, Sungai Sibro, Sungai Sidomukti, Sungai Sidomulyo, Sungai Stan, Sungai Surruk, Sungai Tarpekkbulupayune, Sungai Tarjung, Sungai Tenggar, Sungai Tlogo, Sungai Tlogoagung, Sungai Tlogoandang, Sungai Tumpakladan, Sungai Tumpakwatu, Sungai Tunggul, Sungai Wangun, Sungai Wolomah, Sungai Wolotengah, dan Sungai worawari di WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timur-Provinsi Jawa Tengah)</p> <p>6. Sungai Debakan, Sungai Canggal, Sungai Cibeas, Sungai Cibogo, Sungai Cihuya, Sungai Cikalapu, Sungai Cikanci, Sungai Cimanuk, Sungai Cipeger, Sungai Cisinggarung, Sungai Ciwaringin, Sungai Grenteng, Sungai Jaroke, Sungai Kabuyutan, Sungai Kalianyar, Sungai Kalibangka, Sungai Kalicilet, Sungai Kalijaga, Sungai Kaliwedi, Sungai Karanganyar, Sungai Kedungpane, Sungai Kenari, Sungai Kluwit, Sungai Pasurung, dan Sungai Tanjung di WS Cimanuk-Cisinggarung (Provinsi Jawa Barat)</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>7. Sungai Urang, Sungai Toyo, Sungai Sono, Sungai Kapang, Sungai Sengkarang, Sungai Sragi Baru, Sungai Corai, Sungai Lonlog, Sungai Rambut, Sungai Cacaban, Sungai Gung, Sungai Pemali, dan Sungai Pakjangan di WS Pemali Corai (Provinsi Jawa Tengah);</p> <p>8. Kali Serang, Kali Caci/Lampiris, Kali Cobang, Kali Lusi, Kali Kc Songo, Kali Pandan, Kali Ngampel, Kali Rowo, Kali Gangkring, Kali Wates/Juana, dan Kali Genessempa di WS Jaranasaktuna (Provinsi Jawa Tengah)</p> <p>9. Sungai Bogowonto, Sungai Colcroyaan, Sungai Donan, Sungai Jo, Sungai Jemena, Sungai Jirung, Sungai Lukulo, Sungai Mu'ingklak, Sungai Mengli, Sungai Serayu, Sungai Suwuk, Sungai Telouoyo, Sungai Lipar, Sungai Watuguruhung, dan Sungai Wawar di WS Serayu-Bogowonto (Provinsi Jawa Tengah)</p> <p>10. Sungai Deantias, Sungai Saman, Sungai Panyu, Sungai Nango, Sungai Putih, Sungai Widas, dan Sungai Kenton di WS Brantas (Provinsi Jawa Timur); dan</p> <p>11. Tukat Malaie, Tukat Ranjipox, Tukat Mendaun, Tukat Banyumala, Tukat Buwus, Tukat Sangsit, Tukat Daya, Tukat Batuniti, Tukat Batang, Tukat Sangsang, Tukat Pelanu, Tukat Sabah, Yeh Olan, Yeh Balian, Yeh Aya, Tukat Pangyaman, Tukat Pulukan, Tukat Madewi, Tukat Sumbul, Tukat Angkung Languan, Tukat Biluk Job, Yeh Nusah, Tukat Perunzik, Tukat Fo Gading, Tukat Ayu Darai.</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
11.3.	Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	Kawasan perlindungan	<p>Tukot Perangbang, Tukot Sariniming, Tukot Sangiang, Tukot Tuhi, Tukot Batol, Tukot Uda, Tukot Bubub, Tukot Ayung, Yeh Punct, Yeh Suhu, Yeh Erembang, Yeh Ahe, Tukot Laruk, Yeh Marani, Tukot Badung, dan Tukot Carung di WS Dali Penida (Provinsi Bali).</p> <p>b. mengembangkan struktur alam berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/oran struktur buatan di sempadan sungai untuk mencegah daya rusak air</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk penyediaan RTII</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang kegiatan rekreasi pantai dan pemantauan bencana</p> <p>e. meluangkan pendirian bangunan kecil bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air, dan/atau prasarana penanggulangan daya rusak air</p> <p>f. melarang semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan yang dapat menurunkan fungsi sempadan sungai</p> <p>g. menetapkan lebar sempadan sesuai karakteristik sungai dan fungsional kawasan yang diinvasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>a. mengalihkan pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau atau waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
		selempat	<p>kawasan sekitar danau atau waduk dengan menggunakan teknologi lingkungan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Danau Pangkajene (Kabupaten Bantul), Danau Rawa Dano (Kabupaten Serang), Danau Situ Nagendit (Kabupaten Garut), Danau Situ Cilunca (Kabupaten Pandeglang), Danau Situ Langkung (Kabupaten Garut), Danau Situ Lengkong (Kabupaten Cianjur), Danau Situ Sipanunjang (Kabupaten Bandung), Danau Telaga Patenggung (Kabupaten Bandung), Danau Wanayasa (Kabupaten Purwakarta), Danau Kawa Pening (Kabupaten Semarang), Danau Telaga Meryor (Kabupaten Wonosobo), Danau Kawah Ijen (Kabupaten Blora), Danau Kuwah Kelut (Kabupaten Kediri), Danau Kawa Keludangan (Kabupaten Pasuruan), Danau Telaga Sarangan (Kabupaten Magetan), Danau Rawa Pakis (Kabupaten Lumajang), Danau Rawa Klekah (Kabupaten Lumajang), Danau Rawa Bedali (Kabupaten Lumajang), Danau Rawa Gumboto (Kabupaten Lumajang), Danau Batur (Kabupaten Pangli), Danau Beratan (Kabupaten Tahanani), Danau Buyan (Kabupaten Buleleng), dan Danau Tamblingan (Kabupaten Buleleng) 2. Waduk Karian (Kabupaten Lebak), Waduk Sindangheula (Kabupaten Serang), Waduk Cidana (Kabupaten Serang), Waduk Jasir Kopo (Kabupaten Serang), Waduk Ciliman (Kabupaten Lebak dan

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kabupaten Pandeglang), Waduk Cibaling (Kabupaten Pandeglang); waduk Pamarayan (Kabupaten Serang), Waduk Ranca Saour (Kabupaten Tangerang), Waduk Cilawong (Kabupaten Tangerang); Waduk Tanjung (Kabupaten Gresik), Waduk Kencana (Kota Gleguri), Waduk I. H. Juanda-Jatiluhur (Kabupaten Purwakarta), Waduk Cihara (Kabupaten Cianjur), Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Bandung; Waduk Cileunca (Kabupaten Bandung; Waduk Cipamulang (Kabupaten Bandung); Waduk Santosa (Kabupaten Bandung), Waduk Saguling (Kabupaten Bandung Barat), Waduk Pongkor (Kabupaten Bogor), Waduk Lido (Kabupaten Bogor); Waduk Citarat (Kabupaten Bogor), Waduk Darma (Kabupaten Kuningan), Waduk Wulur (Kabupaten Kuningan), Waduk Dadap Berendang (Kabupaten Kuningan), Waduk Sedong (Kabupaten Cirebon), Waduk Situ Parok (Kabupaten Cirebon); Waduk Cipancuh (Kabupaten Indramayu), Waduk Sindang Pano (Kabupaten Majalengka), Waduk Sangyang (Kabupaten Majalengka), Waduk Jatigede (Kabupaten Sumedang), Waduk Cibeureum (Kabupaten Bekasi), Waduk Loda (Kabupaten Rembang), Waduk Loda Wetan (Kabupaten Rembang); Waduk Kedungurbo (Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Grobogan); waduk Wonorejo (Kabupaten Wonorejo), Waduk Sempor (Kabupaten Kebumen); Waduk Cacaban (Kabupaten Cegal), Waduk</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Wadastirang (Kabupaten Keburen dan Kabupaten Wonosohori, waduk Mirca (Kabupaten Banjarnegara), Waduk Malahayu (Kabupaten Trebes), Waduk Perjalin (Kabupaten Trebes), Waduk Gemahong (Kabupaten Pati), Waduk Pejengkolan (Kabupaten Kebumen), Waduk Garung (Kabupaten Wonosobo), Waduk Sung Putri (Kabupaten Wonogiri), Waduk Ketri (Kabupaten Sragen), Waduk Jatibarang (Kota Semarang), Waduk Nawangan (Kabupaten Wonogiri), Waduk Parang'uh (Kabupaten Wonogiri, Waduk Ngancar (Kabupaten Wonogiri), Waduk Klego (Kabupaten Boyolali), Waduk Pacal (Kabupaten Bojonegara), Waduk Cengklik (Kabupaten Boyolali), Waduk Delings (Kabupaten Karanganyar), Waduk Plumbon (Kabupaten Wonogiri), Waduk Gunung Koso (Kabupaten Pati), Waduk Cempuran (Kabupaten Blora), Waduk Nglangon (Kabupaten Grobogan), Waduk Gremeng (Kabupaten Blora), Waduk Krisak (Kabupaten Wonogiri), Waduk Panchan (Kabupaten Rembang), Waduk Sapu (Kabupaten Kulon Progo), Waduk Mrikan (Kabupaten Banjarnegara), Waduk Sermo (Kabupaten Kulon Progo), Waduk Kedung Erubus (Kabupaten Madiun), Waduk Pondok (Kabupaten Ngawi), Waduk Sengsuruh (Kabupaten Malang), Waduk Sarpen Baru (Kabupaten Bondowoso), Waduk Bening (Widas) (Kabupaten Madiun), Waduk Gondang (Kabupaten Larangan), Waduk Wringi (Kabupaten Pati).</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Waduk Klampis (Kabupaten Sampang), Waduk Lahor (Kabupaten Malang), Waduk Sutauri (Kabagkates), (Kabupaten Magetan), Waduk Selorejo (Kabupaten Malang), Waduk Pijeran (Kabupaten Lamongan), Waduk Tlogu Ngehel (Kabupaten Ponorogo), Waduk Woreto (Kabupaten Tulungagung), Waduk Bend (Kabupaten Jember), Waduk Grogok (Kabupaten Buleleng), Waduk Palosari (Kabupaten Jember), Waduk 'elaga Tunjung (Kabupaten Tabanan), Waduk Muara (Kabupaten Badung), dan Waduk Gilab (Kabupaten Buleleng)</p> <p>b. mengombinasikan struktur alami berupa jenis dan kepadatan tanaman dan/oran struktur buatan di kawasan sekitar danau atau waduk untuk mencegah daya rusak air</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk penyediaan RTH</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk pendirian bangunan yang menunjang fungsi lahan rekreasi</p> <p>e. melarang pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimanfaatkan untuk pengelolaan badan air, pemanfaatan air dan/atau peneruan penanggulangan daya rusak air</p> <p>f. melarang semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar danau atau waduk</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.	Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Cagar Budaya		g. menciptakan lebar sempadan sesuai karakteristik danau atau waduk dan fungsional kawasan yang dilintasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
III.1.	Suaka Margasatwa		
III.1.1	Suaka Margasatwa Citireuh	Kawasan suaka alam	<p>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan keutuhan suaka margasatwa yang merupakan habitat penyusut hijau yang merupakan jenis satwa endemik, langka, dan/atau akan punah</p> <p>b. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan keutuhan suaka margasatwa yang merupakan habitat banteng, musa, kancil, babi hutan, owa, keru, lutung, burung kangkarung, burung rangkong, bucuung udang, burung kumul karang, burung bangau putih susu, burung merak, burung elang, biawak, dan ulat kisi</p> <p>c. memanfaatkan suaka untuk penelitian (penyewatan), habitat dan keanekaragaman hayati</p> <p>d. memanfaatkan suaka untuk penelitian dan pendidikan</p> <p>e. memanfaatkan suaka untuk wisata alam berbasis suaka margasatwa</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan selain yang diuraikan pada huruf d dan e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.1.2	Suaka Margasatwa Gunung Sawal	Kawasan suaka alam	<p>g. menerapkan kerentanan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e</p> <p>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf g</p> <p>l. melarang terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</p> <p>o. mengalokasikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</p> <p>a. mengembangkan pengelolaan dan mempertahankan leluhur suaka margasatwa yang merupakan habitat Tlang Jawa yang merupakan jenis satwa endemik, langka, dan/atau akan punah</p> <p>b. memanfaatkan ruang untuk perigaan (pengawetan, habitat dan keanekaragaman hayati)</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas Karangnan (batu panyang dan kolam Sima Romangoro, Pasirmining, dan lubang timah)</p> <p>e. menciptakan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan sekam yang diarsud pada huruf c dan huruf d serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</p> <p>f. menciptakan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.1.3	Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang	Kawasan suaka alam	<p>a. melindungi lingkungan hangunan selain yang dimaksud pada huruf f</p> <p>b. melarang terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</p> <p>i. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</p> <p>ii. mengatur obyek wisata terbatas Karangsari (batu panjang dan kolam Sinas Ransingra, Pasirtariang, dan lubang rimah)</p>
		Kawasan suaka alam	<p>a. mengembangkan pengelolaan dan pemertahanan keanuhan suaka margasatwa yang merupakan habitat babi hutan, kucing hutan, macan tutul, anjing hutan, kijang, rusa, urak, ayam hutan, pergam, serau, kopondang hutan, dan kucilang gunung</p> <p>b. mengembangkan pengelolaan dan pemertahanan kutuban suaka margasatwa untuk melestarikan kekayaan alam potensi tumbuhan yang meliputi Bak-Bakan, manis ro'o, kosambi gunung, kayupeti, kurlandungan gunung, amayu, omara gunung, sumbing, odelwala, sindro aertbang, jeburan, dan coor erek</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk peyagaan (pengawetan, habitat dan keanekaragaman hayati</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas, termasuk kegiatan pendakian di terpal pendakian Gunung Ar-gupura</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.1.4	Suaka Margasatwa Pulau Bawean	Kawasan suaka alam	<p>f. menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan selain yang dilakukan pada burung d dan burung e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk keperluan kegiatan seluasnya diraksud pada burung d dan burung e</p> <p>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf g</p> <p>i. melarang terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</p> <p>j. meniadakan pemanfaatan ruang untuk zona perikanan</p>
			<p>a. mengembangkan pengelolaan dan pemertahanan kutuban suaka margasatwa yang merupakan habitat Rusa Bawean yang merupakan jenis satwa endemik, langka, dan/atau akan punah</p> <p>b. mengembangkan pengelolaan dan pemertahanan kutuban suaka margasatwa yang merupakan habitat babi hutan, musang, landak, kerbau ekor panjang, ketuang, burung perga, burung wakat, ayam hutan, buwak, dan ular sarua</p> <p>c. mengembangkan pengelolaan dan pemertahanan kutuban suaka margasatwa yang memiliki kekayaan alam potensi tumbuhan yang meliputi sapa, pangapa, Amidesma montana, <i>Psychotria sp.</i>, kumpang, dan kayu tutup</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>d. memanfaatkan ruang untuk penyiagaan (pengawetan), habitat dan keanekaragaman hayati.</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</p> <p>f. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas di suaka mangrove</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai peraturan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf e dan huruf f serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</p> <p>h. menetapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f</p> <p>i. melindung pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf h</p> <p>j. melarang terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemic kawasan</p> <p>k. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</p>
III.2.	Cagar Alam		
III.2.1.	Cagar Alam Rawa Danau	Kawasan suaka alam	<p>a. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan jawaay, gogohusan, marawa, rengas, dan kisireh.</p> <p>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan banggo tong-tong, kumol kerbau, raja udang liru, kumol putih, elang ular, ular sanca, kera, lutung, bajing tanah, kalong, biswak, dan kuru kuru</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.2.	Cagar Alam Gunung Cukung Cede	Kawasan suaka alam.	<ul style="list-style-type: none"> c. memanfaatkan ruang untuk penjaan (penyewatan), habitat dan keanekaragaman hayati. d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan a. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas c. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan g. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d b. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f l. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan h. mengalokasikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga
	Cagar Alam Gunung Cukung Cede	Kawasan suaka alam.	<ul style="list-style-type: none"> a. mengombinasikan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan jaway, gagabusan, maroma, bongas, dan kistam b. menggunakan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan bangs long-long, kumul terbau, raja udang hiru, kumul putih, alang ular, ular senca, kara, kuning, bajing tanah, kalang, biawak, dan kura-kura c. memanfaatkan ruang untuk penjaan (penyewatan), habitat dan keanekaragaman hayati

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.3.	Cagar Alam Gunung Cangkubun Parahu	Kawasan suaka alam	<p>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas</p> <p>f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</p> <p>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</p> <p>i. melarang terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</p> <p>j. meniadakan pemanfaatan ruang untuk zona perikanan</p>
			<p>a. merehabilitasi dan menetapkan fungsi cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan paku, paku, lumut, leliur, jamur, rafflesia, samudra, manarasa, dan jambu alas beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah</p> <p>b. merehabilitasi dan menetapkan fungsi cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan utasau kumbang, surili, lutung, babi hutan, kyang, trenggiling, jelarang, dan tando beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk peyagaan (pengawetan) habitat dan keanekaragaman hayati</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.4.	Cagar Alam Lingsung Sancang	Kawasan suaka alam	<p>a. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas</p> <p>b. melarang kegiatan selain yang diizinkan pada huruf c dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</p> <p>g. menertakan ketentuan mengenai pendirian bangunan hanya untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</p> <p>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</p> <p>i. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</p> <p>j. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</p>
		Kawasan suaka alam	<p>a. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan pahlalar, kaboa, warc-it, dan rumput-rumputan beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah</p> <p>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan burung dan gibbon beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah</p> <p>c. menetapkan fungsi dan/atau mengembangkan pengelolaan cagar alam untuk melindungi kawasan perair yang merupakan ekosistem migrasi burung dan pnyu laut</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penijakan (penyewihan), habitat, dan keanekaragaman hayati</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.3.	Cagar Alam Gunung Culu	Kawasan suaka alam	<p>a. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</p> <p>b. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas</p> <p>c. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</p> <p>d. menetapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagai berikut dimaksud pada huruf e</p> <p>f. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</p> <p>g. meniadakan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</p> <p>a. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan saunton, sasamala, kiputri, pasab, leureup, puspia, kumbang, dan menggureuk beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah</p> <p>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan orang utan, owa, dan kara ekor panjang beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk perijanaan (pengawetan), habitat dan keanekaragaman hayati</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.6.	Cagar Alam Gunung Papandayan	Kawasan suaka alam	<p>f. melarang kegiatan selain yang diraksud pada huruf d dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan ahagaitrno dimaksud pada huruf d</p> <p>h. melarang pendirian bangunan selain yang diraksud pada huruf f</p> <p>i. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</p> <p>j. menyediakan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</p>
			<p>a. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan suagi dan odolewis yang langka atau keberadaannya terancam punah, serta jenis tumbuhan pusa, suniler, kihujan, jarruju, pusung, manglid yang merupakan tumbuhan asli kawasan</p> <p>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan babi hutan, renggiling, kijang, lutung, dan burung walik serta kutilang beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk penagaan (pengawetan), habitat, dan keanekaragaman hayati</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.7.	Cagar Alam Gunung Buraung	Kawasan suaka alam	<p>f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</p> <p>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf i</p> <p>i. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</p> <p>j. menyediakan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</p>
			<p>a. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan suagi dan odolweis yang langka atau keberadaannya terancam punah, serta jenis tumbuhan pusa, sunteni, kihujan, jarruju, masung, manglid yang merupakan tumbuhan asli kawasan</p> <p>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan hahi buran, renggiling, kijang, lutung, dan burung walik serta kutilang beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk peragaan (pengosteran), habitat dan keanekaragaman hayati</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.8.	Cagar Alam Kawah Kamojaog	Kawasan suaka alam	<p>f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</p> <p>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf i</p> <p>i. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</p> <p>j. menyederhanakan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</p>
			<p>a. mengembangkan pengelolaan pagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan lina dan cipipbyt yang langka atau keberadaannya terancam punah</p> <p>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan babi hutan, kijang, macan tutul, musang, trenggiling, surili, lutung, ayam hutan, burung belibis, burung kuntul beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk peyagaan pengawalan, habitat dan keanekaragaman hayati</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.9.	Cagar Alam Gunung Simpang	Kawasan suaka alam	<p>f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</p> <p>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf i</p> <p>i. melarang penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</p> <p>j. penerapan ketentuan mengenai pengendalian pemanfaatan ruang untuk zona pernyangga</p> <p>a. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan lana dan cpuphyt yang langka atau kelangkaannya termasuk punah</p> <p>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan lutung, kumbang, ayam hutan, kadai, burung, tokak beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya termasuk punah</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk peyagaan pengawetan, habitat dan keanekaragaman hayati</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.10.	Cagar Alam Gunung Celering	Kawasan suaka alam	<p>f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</p> <p>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf i</p> <p>i. melarang rehadap penanaman tumbuhan dan pelepasan serwa yang bukan merupakan tumbuhan dan serwa endemik kawasan</p> <p>j. menyediakan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</p>
		Kawasan suaka alam	<p>a. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan berdaun lebar, basah, dualolo, gununggan, gurang, gondang hijau, ingas, angkat, jaranan, coggi, crikol, jrakab, kelongum, belawung, kedondong hutan, dan keloya yang langka atau keberadaannya terancam punah</p> <p>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan babi hutan, bajing tomoh, bajing terhong, ulat, elang/alap-alap, burung lilakung, kutilang, pretjak, sesap ucadu, sudang lawe, trucukan, burung, sriti, tokukur, elang ular, raja udang, planuk besi, dan ayam hutan beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk pelepasan (penyeweran) habitat dan keanekaragaman hayati</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.11.	Cagar Alam Hulan Nusu Barong	Kawasan suaka alam	<p>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas</p> <p>f. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</p> <p>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</p> <p>i. melarang terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</p> <p>j. meniadakan pemanfaatan ruang untuk zona perantara</p>
III.2.11.	Cagar Alam Hulan Nusu Barong	Kawasan suaka alam	<p>a. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan endog endogin, kelompok hutan, urang-urangan, bogor, kalak, kembang, winong, jati hutan, pulai, koturo, waru laut, nyampung, ketapang, kepuh, pandan, dan stugi yang langka atau keberadaannya semakin punah</p> <p>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam untuk melindungi dan memastikan ekosistem sumber air pada kawasan cagar alam</p> <p>c. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan babi hutan, bajing tanah, bajing terbang, ulat, elang/alap-alap, burung itayang, kutilang, prenjak, sesap trado, sundang lawe, trusukan, curprit, sriti, tokukur, clang ular, raja udang,</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.12.	Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup- Ungup	Kawasan suaka alam	<p>planuk besi, dan ayam hutan beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penyiangan ipengawetan; habitat dan keanekaragaman hayati</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</p> <p>f. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas</p> <p>g. melarang kegiatan selain yang diizinkan pada huruf e dan huruf f serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</p> <p>h. menetapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e</p> <p>i. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf g</p> <p>j. melarang terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</p> <p>k. mengendalikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</p> <p>a. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan endog-endogan, klompok hutan, urang-urangan, boger, kalak, kembang, wihong, jali hutan, pulai, ketulo, waru laut, nyamplung, ketapanig, kepuh, pandan, dan srigi yang langka atau keberadaannya terancam punah</p> <p>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis Lutung Jawa beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah serta rusa, babi hutan, kora,</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>tupai, biawak, penyu hijau, ular sanca, ular gadung, ular kerna kecil, burung walet, peccok ular, celang, bus hitam, sara laut, rangkong yang merupakan hewan asli kawasan</p> <p>c. memantapkan fungsi dan/atau mengembangkan pengelolaan nagar atau untuk menjaga ekosistem kawasan dan keberadaannya vegetasi yang mendominasi di kawasan Cagar Alam Kawah Ijen Merapi Ungup Ungup, serta anak sungai yang mengalir dalam kawasan untuk mempertahankan fungsi hidrologis terhadap kawasan Banyuwangi, Bondowoso, dan Sumbondo</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk peyagaan (pengawetan), habitat dan keanekaragaman hayati</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</p> <p>f. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas</p> <p>g. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf e dan huruf f serta kegiatan yang mengancam hancurnya kawasan</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e</p> <p>i. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf g</p> <p>j. melarang terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</p> <p>k. mengalokasikan pemanfaatan ruang untuk zona penyangga</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.13.	Cagar Alam Batukohu	Kawasan suaka alam	<p>a. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan cemara pandak dan kepulan yang langka atau keberadaannya terancam punah serta cemara geseng, hunut, sompong, serring, cemara geseng, udu, helandih, laneng, dan kedukduk yang merupakan jenis tumbuhan asli kawasan</p> <p>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam beserta seluruh keanekaragaman jenis burung walik kepala ungu, serindit Jawa, tepus pipi perak, lakur tohlor, oekakak Jawa, cimenan Jawa, dan elang Jawa beserta ekosistemnya yang langka atau keberadaannya terancam punah</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk peyagaan (pengawetan), habitat dan keanekaragaman hayati</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas</p> <p>f. melarang kegiatan selain yang dirakud pada huruf d dan huruf e serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</p> <p>h. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</p> <p>i. melarang terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan satwa yang bukan merupakan tumbuhan dan satwa endemik kawasan</p> <p>j. mengalihkan pemanfaatan ruang untuk zona pernyangga</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.2.14.	Cagar Alam Laut Leuwicubé Saucang	Kawasan suaka alam	<p>a. mengembangkan pengelolaan cagar alam laut beserta seluruh keanekaragaman jenis tumbuhan pakhalas, burabol, dan jenis tumbuhan <i>Rafflesia patma</i> yang langka atau keahluannya terancam punah</p> <p>b. mengembangkan pengelolaan cagar alam laut untuk pelestarian ekosistem tumbuhan perai yang meliputi tumbuhan ketajapong, rumput rumputan, wau laut, nyamplung, dan pandan laut</p> <p>c. memanfaatkan fungsi dan/atau mengembangkan pengelolaan cagar alam laut untuk pelestarian ekosistem hutan mangrove yang meliputi tumbuhan kaboa, tancang, bakau, dan pedada</p> <p>d. memanfaatkan fungsi dan/atau mengembangkan pengelolaan cagar alam laut beserta seluruh keanekaragaman jenis hewan Banteng, kucing hutan, kancil, owa, lutung, macan tutul, rangkong, dan kangkareng beserta ekosistemnya</p> <p>e. memantapkan fungsi dan/atau mengembangkan pengelolaan cagar alam laut untuk pelestarian ekosistem biota laut larva, rumput laut, dan atau karang</p> <p>f. memanfaatkan ruang untuk perigaan (pengawetan, habitat dan keanekaragaman hayati</p> <p>g. memanfaatkan ruang untuk penelitian dan pendidikan</p> <p>h. memanfaatkan ruang untuk wisata alam terbatas</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.	Caman Nasional		<ul style="list-style-type: none"> i. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf g dan huruf h serta kegiatan yang mengubah bentuk kawasan ii. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf g iii. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf i iv. melarang terhadap penanaman tumbuhan dan pelepasan serwa yang bukan merupakan tumbuhan dan serwa endemic kawasan v. menyediakan pemanfaatan ruang untuk zona peryangga
III.3.1.	Caman Nasional Gunung Gede-Pangrango	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none"> a. merehabilitasi dan memulihkan fungsi lahan musiman yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan rasamala, samaja, puspa, cidelweis, dan lumut merah beserta ekosistemnya b. merehabilitasi dan memulihkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan uwa, surili, lutung, kijang, macan tutul, anjing hutan, elang Jawa, dan burung hantu beserta ekosistemnya c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentuk alam d. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan hudi daya hanya dibatasi bagi penduduk asli di zona peryangga dengan luasan tetap, tidak mengganggu fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat e. melarang kegiatan hudi daya di zona inti

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.2.	Taman Nasional Halimun Salak	Kawasan pelestarian alam	<p>f. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau tumbuh-tumbuhan karang di zona penyangga</p> <p>a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan sasamala, jamuju, pisapa, dan anggrek jenis langka beserta ekosistemnya</p> <p>b. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan satwa verabeam puab, yang meliputi burung cica marabari, burung poksal kuda, ciang Jawa, serta satwa owa, kancil, surili, lutung budeng, kijang, macan tutul, dan anjing hutan beserta ekosistemnya</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentang alam</p> <p>d. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya digunakan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</p> <p>e. melarang kegiatan budi daya di zona inti</p> <p>f. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau tumbuh-tumbuhan karang di zona penyangga</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.3.	Caman Nasional Gunung Ciremai	Kawasan pelestarian alam	<p>a. merehabilitasi dan memertapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan jenis anggrek, ketawa luru, mame, mato, samiran, serah gumbang, gandasuli, Ariasira sp, dan edelweis beserta ekosistemnya</p> <p>b. merehabilitasi dan memertapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan reponca jubah, yang meliputi rancan kumbang, surili, dan elang Jawa, lutung, kijang, kera ekor panjang, ular sauci, meong unekok, elang hitam, ekek kiling, sepuh uradu, waluk, dan anis beserta ekosistemnya</p> <p>c. merehabilitasi dan memertapkan fungsi taman nasional yang memaga ekosistem kawasan dan keberaduan vegetasi yang mendominasi di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, serta anak-anak sungai yang mengalir dalam kawasan untuk mempertahankan fungsi hidrologi bagi daerah Kuningan dan Majalengka</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentang alam</p> <p>e. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan hudi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona peryangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi hudi daya kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</p> <p>f. melarang kegiatan hudi daya di zona inti</p> <p>g. melarang kegiatan hudi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terur bu karung di zona peryangga</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.4.	Caman Nasional Lutung Kulon	Kawasan pelestarian alam	<p>a. merehabilitasi dan memertapatkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan merbau, palabau, burung, celang, ku hujan, enggrek, tiara, kedondong hutan, konyere hadak, haripalaa, gebang, gading, dahu, hulhari, bayur, reureup, sempur, salam, selak, rotan seel, puspaa, liana gadet, langkap, labau, kundang, kikembang, kihurang, kicanang, kibuhayo, pulai, dan pepohonan beserta ekosistemnya</p> <p>b. merehabilitasi dan memertapatkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan terancam punah, yang meliputi banteng, ajag, suuli, lutung, rusa, macan tutul, kucing batu, owa, kima, raksasa, macan tutul, kancil, celarang, kora ekor panjang, musang, burung wili wili, burung daru bui, burung tekukur, burung kutua hutan, burung rangkong, burung elang ular, urak, ayau hujan, penyu hijau, penyusilik, buaya muara, dan biawak beserta ekosistemnya</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentang alam</p> <p>d. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan lahan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.</p> <p>e. melarang kegiatan budi daya di zona inti</p> <p>f. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terur bu karung di zona penyangga</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.5.	Caman Nasional Gunung Merapi	Kawasan pelestarian alam	<p>a. merehabilitasi dan memonopkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan <i>Vanda tricolor</i> yang hampir punah</p> <p>b. merehabilitasi dan memonopkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan sarwa rancangan punah, yang meliputi <i>Elang Jawa</i>, dan <i>Lutung Jawa Besar</i>ta eksistensinya</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentuk alam</p> <p>d. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan lahan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.</p> <p>e. melarang kegiatan budi daya di zona inti</p> <p>f. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau tumbuh karang di zona penyangga</p>
III.3.6.	Caman Nasional Gunung Merbabu	Kawasan pelestarian alam	<p>a. merehabilitasi dan memonopkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan endemik yang meliputi sawu keok, bambu manggong, ketapang, nyemplung, kepuh, koben, dan bambu beserta eksistensinya</p> <p>b. merehabilitasi dan memonopkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan lutung huleng, beneng, ajag, lutung merak, ayam buran, rusa, macan tutul, dan kucing bakau, serta satwa</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>lindungi dan dilindungi seperti penyus lelang, penyus belimbing, penyus susuk, dan penyus hijau beserta ekosistemnya</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentuk alam</p> <p>d. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan hunian tetap, tidak mengganggu fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</p> <p>e. melarang kegiatan budi daya di zona inti</p> <p>f. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga</p>
III.3.7.	Carnan Musional Alas Purwo	Kawasan pelestarian alam	<p>a. rehabilitasi dan mempertahankan fungsi larian musional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan pinus, pusa dan buntuni, akasia, pusa, setingan gunung, sova, comara gunung, pasang, tangenan, dan eidekwa beserta ekosistemnya</p> <p>b. rehabilitasi dan mempertahankan fungsi larian nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan, yang meliputi hewan kelas Jawa, elang hiram, alap alap sapi, elang ular hidu, ayam hutan, tekukur, gelatik batu, kijang, landak, musang, luwak, monyet ekor panjang, dan raiyan tutul beserta ekosistemnya</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.8.	Kawasan Nasional Bahuran	Kawasan pelestarian alam	<p>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentuk alam</p> <p>d. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan lahan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</p> <p>e. melarang kegiatan budi daya di zona inti</p> <p>f. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau tumbuh-tumbuhan karang di zona penyangga</p> <p>a. merehabilitasi dan mempertahankan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan endemik yang meliputi widoro buloh, mirisul, dan piling beserta ekosistemnya</p> <p>b. merehabilitasi dan mempertahankan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan langka, yang meliputi bewan layang-layang api, ruyuk/muwu, asu, burung merak, ayau hutan merah, kangkarong, tangkong, dan burung bang-tung, serta ekosistem satwa lainnya yang meliputi jans sawa bableng, kerbau liar, aqag, kiabag, rusa, rasan hulu, kancil, dan kucing hulu beserta ekosistemnya</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentuk alam</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.9.	Caman Nasional Darmo Tenggara- Semeru	Kawasan pelestarian alam	<p>d. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona peryangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.</p> <p>e. melarang kegiatan budi daya di zona inti</p> <p>f. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau tumbuh karang di zona peryangga.</p> <p>a. merehabilitasi dan mempertahankan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan jatuju, cemara gunung, eklelewis, anggrek, dan rumput langka beserta ekosistemnya</p> <p>b. merehabilitasi dan mempertahankan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan langka, yang meliputi buaya, rusa, kerbau panjang, kijang, ayau, buntan merah, rucan tutul, ayag, alap-alap burung, rangkong, elang ular bido, argunting bitam, elang bondol, dan heliris beserta ekosistemnya</p> <p>c. merehabilitasi dan mempertahankan fungsi taman nasional yang melastarikan kawasan laut pasir yang merupakan keunikan kawasan</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentang alam</p> <p>e. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona peryangga dengan luasan tetap.</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.10.	Taman Nasional Meru Betiri	Kawasan pelestarian alam	<p>tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</p> <p>f. melarang kegiatan budi daya di zona inti</p> <p>g. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.</p> <p>a. merehabilitasi dan memanfaatkan fungsi larian nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan rafflesia, belau, api api, wau, nyamplung, rengas, bungur, pulau, dan bendu serta ekosistemnya</p> <p>b. merehabilitasi dan memanfaatkan fungsi larian nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan langka, yang meliputi burung lecong Jawa, banteng, kera ekor panjang, macan tutul, aag, kucing hutan, rusa, banying, kerbau ekor merah, merak, peryu belimbing, peryu sisik, peryu hijau, dan peryu ridel/lekap beserta ekosistemnya</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam, tanpa mengubah bentang alam</p> <p>d. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hayati diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luas setip, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.</p> <p>e. melarang kegiatan budi daya di zona inti</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.S.11.	Caman Nasional Bali Barat	Kawasan pelestarian alam	<p>f. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau tumbuh karang di zona penyangga</p> <p>a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan hayati, ketanagi, hurbahol, candana, dan subkeling serta ekosistemnya</p> <p>b. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan langka, yang meliputi jelak bali, ibis putih kepala hitam, gangsa batu coklat, lejang, trengguling, landak, kamal, hiu, ikan hantu, dan kina raksasa beserta ekosistemnya</p> <p>c. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman nasional yang melestarikan ekosistem biota laut pada kawasan Pulau Menjangan dan Tanjung Grelap</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentang alam</p> <p>e. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya dibatasi bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luas tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.</p> <p>f. melarang kegiatan budi daya di zona inti</p> <p>g. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau tumbuh karang di zona penyangga</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.12.	Caman Nasional Laut Kepulauan Scribu	Kawasan polikultural alau	<p>a. merehabilitasi dan memertapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan nyamplung, wau, pandan, cemara laut, cangkudu, bunun, bogem, sukun, ketapang, dan kecundang serta ekosistemnya</p> <p>b. merehabilitasi dan memertapkan fungsi taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan langka, yang meliputi Penyus Sisk beserta ekosistemnya</p> <p>c. merehabilitasi dan memertapkan fungsi taman nasional guna merevitalisasi pulau pulau yang mengalami abrasi dan/atau nyaris tenggelam</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam budaya mengubah bentuk alau</p> <p>e. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengganggu fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan kelat</p> <p>f. melarang kegiatan budi daya di zona inti</p> <p>g. melarang kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi alau terumbu karang di zona penyangga</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.13.	Taman Nasional Laut Karimunjawa	Kawasan pelestarian alam	<p>a. mengembangkan pengelolaan taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan akar basah/karang hitam, karang merah, jenis tumbuhan khas dewodaru, algae hijau, algae corlar, dan alga merah serta ekosistemnya</p> <p>b. mengembangkan pengelolaan taman nasional yang memiliki keanekaragaman hayati hewan yang dilindungi meliputi kepala kumbang, triton terompet, nautilus berongga, batu laga, dan kima beserta ekosistemnya</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, wisata alam tanpa mengubah bentuk alam</p> <p>d. memanfaatkan ruang kawasan untuk kegiatan hudi daya hanya dibatasi bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat</p> <p>e. melarang kegiatan hudi daya di zona inti</p> <p>f. melarang kegiatan hudi daya yang berpotensi mengurangi rumpun vegetasi atau tumbuh karang di zona penyangga</p>
III.4.	Taman Hutan Raya		
III.4.1.	Taman Hutan Raya R. Suryo	Kawasan pelestarian alam	<p>a. mengembangkan pengelolaan taman hutan raya dengan potensi wisata potensi wisata tumbuhan dan satwa, bentang alam, tempat pemandian sumber air panas, Arboretum Cangar, Arboretum Sumber Brantas, gua, situs pelapaaan Aliyoso, padang rumput Lalijowo, Pundak Wehbrang, Puncak Welirang, dan situs pelapaaan hidroklui beserta ekosistemnya</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.1.2.	Caman Hutan Raya Ngurah Rai	Kawasan pelestarian alam	<p>b. mengembangkan pengelolaan taman hutan raya guna pelestarian ekosistem tumbuhan jenis umbara, saroti, pasang, kerrendubangan gunung, dan padi padian</p> <p>c. mengembangkan pengelolaan taman hutan raya guna pelestarian jenis hewan rusa, kijang, babi hutan, kera abu-abu, badeng, burung ekukur, dan koroda beserta ekosistemnya</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf d</p> <p>f. menetapkan ketentuan mengenai pondokan bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan selajairama dimaksud pada huruf d</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pelarangan pondokan bangunan selain yang diraksud pada huruf f</p> <p>a. mengembangkan pengelolaan taman hutan raya guna pelestarian koleksi tumbuhan mnyak bakau dan bakau karap, Soncratia Alba, Bruguera rymorrhiza, api-api, dan terang beserta ekosistemnya</p> <p>b. mengembangkan pengelolaan taman hutan raya guna pelestarian jenis hewan bangau, raja udang, kadal unalar, dan peacock ular beserta ekosistemnya</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.	Taman Wisata Alair.		<ul style="list-style-type: none"> d. menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan selain yang diraksud pada huruf d e. menetapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d f. menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan pendirian bangunan selain yang diraksud pada huruf e
III.5.1.	Taman Wisata Alair Pulau Sangiang	Kawasan pelestarian alair	<ul style="list-style-type: none"> a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi larian wisata alam untuk menunjang pelestarian turumbuhan comara laut, dadap laut, bayur, ketapang, nyamplung, api-api, wau laut, dan walikukan beserta ekosistemnya b. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman wisata alam untuk menunjang pelestarian hujung, kera, kucing butan, landak, burung walet, burung blywok, kumul karang, kumul ke-hau, kumul besi, alap-alap, dan ular sanca beserta ekosistemnya c. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman wisata alam untuk melindungi lokasi lokasi wisata yang memiliki nilai historis, meliputi bangunan dan gua-gua bersejarah yang terbanyak pada kawasan d. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentuk alair e. melarang kegiatan selain yang diraksud pada huruf d

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.2.	Caman Wisara Alam Gunung Tarruparas	Kawasan pelestarian alam	<p>f. menetapkan kerentanan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf d</p> <p>g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</p>
III.5.2.	Caman Wisara Alam Gunung Tarruparas	Kawasan pelestarian alam	<p>a. mengembangkan pengelolaan taman wisata alam untuk melestarikan vegetasi kawasan yang termasuk tipe hutan hujan pegunungan, laharan merambat dan laharan yang merambat, serta tumbuhan yang endemik inasi kawasan yang meliputi airjun, masamala, dan seminten</p> <p>b. mengembangkan pengelolaan taman wisata alam untuk menunjang pelestarian kancil, lutung, dan babi hutan serta beserta ekosistemnya</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</p> <p>d. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf f</p> <p>e. menetapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c</p> <p>f. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e</p>
III.5.3.	Caman Wisara Alam Sangah	Kawasan pelestarian alam	<p>a. mengembangkan pengelolaan taman wisata alam untuk melestarikan ekosistem hutan pala alam</p> <p>b. mengembangkan pengelolaan taman wisata alam untuk melindungi dan mengawalkan tumbuhan dan hewan langka atau penting yang meliputi pohon pala, ampas, buri, dan jenis sarwa elang, alap alap, dan kera abu</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.3.4.	Laman Wisata Alau, Danau Buyan dan Danau Lambingan	kawasan pelestarian alam	<p>c. mengembangkan pengelolaan taman wisata alam untuk melestarikan cagar budaya, yang meliputi Pura Bukit Sari dan Pura Melanting</p> <p>d. memanfaatkan secara berkelanjutan potensi wisata alam (koloni Kera Abu dan habitat Pohon Pala)</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa menguhubungkan alam</p> <p>f. merencanakan kegiatan yang dimaksud pada huruf e</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e</p> <p>h. melakukan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf g</p>
			<p>a. mengembangkan pengelolaan taman wisata alam untuk melestarikan ekosistem penting yang menunjang sistem kehidupan berupa hutan hujan tropis dataran tinggi dan ekosistem lahan basah Danau Buyan dan Danau Lambingan yang berfungsi sebagai daerah resapan, daerah tangkapan, dan daerah peredaran air serta kawasan pengatur tata air (hidro-geologis) bagi daerah di bawahnya</p> <p>b. mengembangkan pengelolaan taman wisata alam untuk melestarikan ekosistem hutan tanaman yang meliputi jenis damar, rasanmala, dan cempaka</p> <p>c. mengembangkan pengelolaan taman wisata alam untuk melindungi dan mengawetkan keanekaragaman sumber daya alam hayati penting dan langka, meliputi jenis tumbuhan khas secara pandak, cemara</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>geseng, kepel, purnajawa, serta sarwa jenis burung yang akan punah (walik kepala ungu, serundit Jawa, topus pipi perak, takur toktor, cekakak Jawa, rimenen Jawa, dan elang Jawa)</p> <p>d. mengembangkan pengelolaan taman wisata alam untuk melestarikan kawasan cagar budaya, meliputi pura dan situs purbakala prasejarah</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentuk alur</p> <p>f. merancang kegiatan selain yang diraksud pada huruf c</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana diraksud pada huruf c</p> <p>h. melarang pendirian bangunan selain yang diraksud pada huruf c</p>
III.5.3.	Taman Wisata Alam Laut Cijulang	Kawasan pelestarian alur	<p>a. merehabilitasi dan memanfaatkan fungsi taman wisata alam laut untuk tujuan penelitian dan pengembangan dalam menunjang pengawetan turumbu dan satwa</p> <p>b. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentuk alur</p> <p>c. merancang kegiatan selain yang diraksud pada huruf b</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana diraksud pada huruf b</p> <p>e. melarang pendirian bangunan selain yang diraksud pada huruf d</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.5.6.	Caman Wisara Alam Laut Daerah Pantai Ujungnegoro Roban	Kawasan pelestarian alam	<p>a. mengembangkan pengelolaan taman wisata alam laut untuk menjinjir pelestarian meliputi karang meso, karang pancer darat, karang pancer, karang angrik, karang wuluhan, karang jajoan, karang gun, karang kepuh, karang kembang, karang ipik, dan karang keratak serta ekosistem mangrove yang menunjang sistem kehidupan</p> <p>b. mengembangkan pengelolaan taman wisata alam untuk menjinjir pelestarian ikan karang, ikan pembersih, dan ikan barumbang beserta ekosistemnya</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentang alam</p> <p>d. meluangkan kegiatan selain yang diraksud pada huruf a.</p> <p>e. menetapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c</p> <p>f. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e</p>
III.5.7.	Caman Wisara Alam Laut Bulcleng	Kawasan pelestarian alam	<p>a. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman wisata alam laut untuk menunjang pelestarian meliputi karang meso, karang pancer darat, karang pancer, karang angrik, karang wuluhan, karang jajoan, karang gun, karang kepuh, karang kembang, karang ipik, dan karang keratak</p> <p>b. merehabilitasi dan memantapkan fungsi taman wisata alam untuk menjinjir pelestarian ikan karang, ikan pembersih, dan ikan barumbang beserta ekosistemnya</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
III.6.	Kawasan Pantai Bachtutan Bakau	Kawasan pelestarian alam	<ul style="list-style-type: none"> c. memanfaatkan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam tanpa mengubah bentuk alam d. melarang kegiatan selain yang dimaksud pada huruf c a. menetapkan kerentanan mengenai pendidikan lingkungan yang dibarengi biaya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c f. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
III.7.	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Kawasan cagar budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. mempertahankan kawasan pantai berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kolestarian biota laut dilakukan di Kabupaten Serang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Pati, Kabupaten Kembang, dan Kabupaten Tuban b. memanfaatkan ruang untuk kegiatan pengamatan, habitat dan keanekaragaman hayati c. memanfaatkan ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan wisata alam d. melarang pemanfaatan kayu bakau e. melarang kegiatan yang dapat mengubah, menurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem bakau
III.7.	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	Kawasan cagar budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. melestarikan dan mengembangkan pengelolaan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di kawasan Candi Borobudur dan sekitarnya [Kabupaten Magelang], kawasan Candi Prambanan [Kabupaten Sleman]

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>dan Kabupaten KlATEN; kawasan Situs Purbakala Sangiran (Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar), kawasan Kota Tua Jakarta (Kota Jakarta Utara dan Kota Jakarta Barat), Kepulauan Seribu: Pulau Onusa, Pulau Kelor, Pulau Cipir, dan Pulau Bidarati (Kabupaten Kepulauan Seribu), Kota Lama Banten (Kabupaten Serang), kawasan adat Raduy (Kabupaten Lebak), Situs Batu Jaya (Kabupaten Karawang), Situs Gunung Padang (Kabupaten Cianjur), Kota Lama Bandung (Kota Bandung), Observatorium Bosscha (Kabupaten Bandung Barat), Situs Mengasdengklok (Kabupaten Karawang), Istana Bogor (Kota Bogor), Situs Batu Tulis (Kota Bogor), Istana Cipanas (Kabupaten Cianjur), Gua Cirebon (Kota Cirebon), Keraton Kasepuhan (Kota Cirebon), Keraton Kanoman (Kota Cirebon), Keraton Kacirebonan (Kota Cirebon), Museum Linggarjati (Kabupaten Kuningas), Gunung Kunci (Kabupaten Surrendang), Candi Cangkuang (Kabupaten Garut), Gua Gudawang (Kabupaten Bogor), Chung Wanara Korang Kamulyan (Kabupaten Cianjur), Makam Sunan Gunung Jati (Kabupaten Cirebon), Komplek Naga (Kabupaten Tasikmalaya), Kota Lama Kotagede (Kota Yogyakarta), Mallem Inogiri (Kabupaten Bantul), Pura Pakualauran (Kota Yogyakarta), Keraton Yogyakarta (Kota Yogyakarta), Kawasan Malioboro (Kota Yogyakarta), Masjid Agung Demak (Kabupaten Demak), Keraton Surakarta (Kota Surakarta), Candi Gedong Songo (Kabupaten Semarang), Candi Sukuh Candi Ceto (Kabupaten Karanganyar), Candi</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Penangguhan (Kabupaten Mojokerto), Candi Dieng (Kabupaten Wonorejo), Situs Sungasari (Kabupaten Malang), Kota Lama Semarang (Kota Semarang), Situs Prasejarah Paciran (Kabupaten Paciran), Candi Jawi (Kabupaten Pasuruan), Makam Sunan Muria (Kabupaten Kudus), Makam Sunan Ampel (Kota Surabaya), Kota Lama Surabaya (Kota Surabaya), Kota Lama Malang (Kota Malang), Makam Sunan Bonang (Kabupaten Tuban), Makam Sunan Giri (Kabupaten Gresik), Makam Sunan Drajat (Kabupaten Lamongan), Makam Asta Tingi (Kabupaten Sumenep), Kawasan Tenggung Gunung Bromo (Kabupaten Probolinggo), Pura Besakih (Kabupaten Karangasem), Pura Tanah Lot (Kabupaten Tuban), Goa Gajah (Kabupaten Gianyar), Situs Gununguk (Kabupaten Negara), Situs 'Antan Ujung Karangasem (Kabupaten Karangasem), Situs Jatuhwih (Kabupaten 'abanan), Situs Gunung Kawi (Kabupaten Gianyar), Kawasan Trowulan (Kabupaten Mojokerto), Situs Purbakala Trimil (Kabupaten Ngawi), Candi Penataran dan Candi Simping (Kabupaten Blitar), Candi Singasari (Kabupaten Malang), Candi Jago (Kabupaten Malang), Candi Kidal (Kabupaten Malang), Candi Badut (Kabupaten Malang), serta pura-pura di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.	Kawasan Rawan Bencana Alam		<p>b. memanfaatkan ruang, untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata</p> <p>c. melarang kegiatan, tindakan bangunan, dan prasarana baik di kawasan maupun di sekitar kawasan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan</p>
IV.1.	Kawasan Rawan Tanah Longsor	Kawasan rawan bencana alam	<p>a. menetapkan zona-zona rawan bencana tanah longsor beserta ketentuan mengenai standar bangunan gelung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogo, Kabupaten Sukabung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciomis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningas, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kabupaten Tembung, Kabupaten</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kendal, Kabupaten Karang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Puralong, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Sluran, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegara, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Yenggalak, Kabupaten Kediri, Kabupaten Cuhungagung, Kabupaten Luwu, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madhu, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tuban, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jembrana</p> <p>b. memondalikan perkembangan kegiatan budi daya terbanan di kawasan rawan bencana tanah longsor</p> <p>c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penutupan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemanfaatan bencana</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana tanah longsor</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kokoh untuk kepentingan umum</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.2.	Kawasan Rawan Gelombang Pasang	Kawasan rawan bencana alam	<p>f. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemertanian ancaman bencana, struktur alami dan struktur buaran yang dapat mengurangi dampak bencana tanah longsor</p> <p>g. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana tanah longsor</p>
			<p>a. menetapkan zona zona rawan bencana gelombang pasang beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gelombang pasang di sepanjang wilayah pesisir Kota Ciligon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Cegal, Kota Cegal, Kabupaten Ponorog, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Natong, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Kombarng, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lirongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Shubonda, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Suroboyo,</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
IV.3.	Kawasan Rawan Banjir	Kawasan rawan bencana banjir	<p>Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Klungkang</p> <p>b. mengendalikan perkembangan kegiatan hudi daya terbangun di kawasan rawan bencana gelombang pasang</p> <p>c. menetapkan lokasi dan jalur evakuasi serta adaptasi bencana melalui penempatan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana gelombang pasang</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecil untuk kepentingan umum.</p> <p>f. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi Inkaai dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana gelombang pasang</p> <p>g. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana gelombang pasang</p>
			<p>a. menetapkan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana banjir di Kabupaten Pandelegang,</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Banjar, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Peralang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Batang, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pannul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Boyongoro, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Blitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Cuhungagung, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Malang, Kabupaten Mufkerlu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember,</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Simbonda, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, dan Kota Denpasar</p> <p>b. mengendalikan perkembangan kegiatan hudi daya rebanan di kawasan rawan bencana alam</p> <p>c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana</p> <p>d. memanfaatkan ruang pada dataran banjir untuk KTH dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk pembangunan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir</p> <p>f. melarang kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya</p> <p>g. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir</p> <p>h. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana banjir</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.	Kawasan Lindung Geologi		
V.1.	Kawasan Cagar Alam Geologi		
V.1.1.	Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil		
V.1.1.1.	Cagar Alam Geologi Karangsembung	Kawasan keunikan batuan dan fosil	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan pengelolaan gua, melestarikan kawasan keunikan batuan dan fosil di Cagar Alam Geologi Karangsembung (Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Wonosobo) b. merehabilitasi kawasan keunikan batuan dan fosil yang terdegradasi c. mengabdikan perkembangan kawasan budi daya terhangin di sekitar kawasan keunikan batuan dan fosil d. memanfaatkan ruang untuk pariwisata tanpa mengganggu keunikan batuan dan fosil e. memanfaatkan ruang untuk kegiatan penggalan dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi f. mengatur kegiatan pemanfaatan batuan
V.1.2.	Kawasan Keunikan Denilang Alam		
V.1.2.1.	Kawasan gunung pasir pantai di Pantai Parangliris	Kawasan keunikan bentang alam	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan pengelolaan gua, melestarikan kawasan keunikan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah pada kawasan gunung pasir pantai di Pantai Parangliris (Kabupaten Bantul)

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.1.2.2.	Kawasan lembah Bengawan Solo purba	Kawasan keunikan bentang alam	<ul style="list-style-type: none"> b. merehabilitasi kawasan keunikan bentang alam yang terdegradasi c. memodifikasi perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan bentang alam d. memanfaatkan ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata tanpa mengubah bentuk alam
V.1.2.3.	Kawasan karat	Kawasan keunikan bentang alam	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah pada kawasan lereng Bengawan Solo purba (Kabupaten Wonogiri) b. merehabilitasi kawasan keunikan bentang alam yang terdegradasi c. memodifikasi perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan bentang alam d. memanfaatkan ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata tanpa mengubah bentuk alam
V.1.2.3.	Kawasan karat	Kawasan keunikan bentang alam	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah pada kawasan karst di Kabupaten Pandejlang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Bandung Barat, Kabupaten Cakilemalaya, Pangandaran (Kabupaten Cilacap, Purwokerto (Kabupaten Banyuwangi), Kabupaten Cogan, Kota Sukakarta, Kota Salatiga, Kabupaten Pati, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bojonegara, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Dilit, Kabupaten Dangkeban, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Mojokerto, Desuki, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pancekasan, Pulau Bawean (Kabupaten Gresik), dan Nusa Penida (Kabupaten Klungkung)</p> <p>b. merehabilitasi kawasan keunikan bentang alam yang terdegradasi</p> <p>c. mengabdikan perkembangan kawasan budi daya turbanung di sekitar kawasan keunikan bentang alam</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata tanpa mengubah bentang alam</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.1.3. V.1.3.1.	Kawasan Keunikan Proses Cielogi Kawasan semburan lumpur di Kabupaten Grobogan	Kawasan keunikan proses geologi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan proses geologi pada daerah semburan lumpur di Kabupaten Siduacjo dan sekitarnya lumpur Fledug Kuwu di Kabupaten Grobogan b. merehabilitasi kawasan keunikan proses geologi yang terdegradasi c. meningkatkan perkembangan kawasan buadi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan proses geologi d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata
V.1.3.2.	Kawasan dengan kemunculan sumber api alami	Kawasan keunikan proses geologi	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan proses geologi pada kawasan dengan kemunculan sumber api alami Mrapen di Kabupaten Grobogan b. merehabilitasi kawasan keunikan proses geologi yang terdegradasi c. meningkatkan perkembangan kawasan buadi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan proses geologi d. memanfaatkan ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata
V.1.3.3.	Kawasan dengan kemunculan geyser	Kawasan keunikan proses geologi	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan pengelolaan guna melestarikan kawasan keunikan proses geologi pada kawasan dengan kemunculan geyser di Cisobok Palabuhanratu (Kabupaten Sukabumi)

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.2.	Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi		<ul style="list-style-type: none"> b. merehabilitasi kawasan keumihan proses geologi yang terdegradasi c. memodifikasi perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keumihan proses geologi d. memanfaatkan ruang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata
V.2.1.	Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi	Kawasan rawan bencana alam geologi	<ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan zona-zona rawan bencana letusan gunung berapi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana letusan gunung berapi di kawasan Gunung Kurang (Kabupaten Pandeglang), Gunung Pulosari (Kabupaten Pandeglang), Gunung Kibabek Gagak (Kabupaten Bogor), Gunung Salak (Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor), Gunung Gede Pangrango (Kabupaten Cianjur), Gunung Panoho (Kabupaten Bandung), Gunung Ciriand (Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningas, dan Kabupaten Majalengka), Gunung Guntur (Kabupaten Garut), Gunung Tangkubanperahu (Kabupaten Bandung), Gunung Papandayan (Kabupaten Garut), Gunung Galunggung (Kabupaten Tasikmalaya), Gunung Slamet (Kabupaten Trebes, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Peralang), Gunung Dieng (Kabupaten Wonorejo), Gunung B. Pelunggan (Kabupaten Dairi/Negeri), Gunung Sundiru (Kabupaten

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Wonoabso), Gunung Surrbing (Kabupaten Tembunggung), Gunung Merbabu (Kabupaten Boyolali), Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Semarang), Gunung Lingsari (Kabupaten Semarang), Gunung Merapi (Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Sleman), Gunung Lawu (Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Magelang), Gunung Wilis (Kabupaten Kediri, Kabupaten Tuhungagung, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madura, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Trenggalek), Gunung Kelud (Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri), Gunung Ajuwo Welirang (Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto), Gunung Bromo (Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Malang), Gunung Surolo (Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang), Gunung Lamongan (Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang), Gunung Iyang Angopuro (Kabupaten Probolinggo), Gunung Raung (Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Jember), Gunung Kawah Pan (Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Klombang, dan Kabupaten Bondowoso), Gunung Agung (Kabupaten Karangasem), dan Gunung Datar (Kabupaten Bangli).</p> <p>b. mengevaluasi perkembangan kawasan bukit daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana letusan gunung berapi</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.2.2.	Kawasan Rawan Gempa Bumi	Kawasan rawan bencana alam geologi	<p>c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penciptaan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana letusan gunung berapi</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari pemukiman penduduk dan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana letusan gunung berapi</p> <p>e. memanfaatkan ruang dengan mempercangkai karakteristik, jenis, dan ancuran bencana letusan gunung berapi</p> <p>f. memanfaatkan ruang untuk pebatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum.</p> <p>g. meluangkan kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana letusan gunung berapi</p> <p>h. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana letusan gunung berapi</p> <p>a. menetapkan zona-zona rawan bencana berupa buri beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancuran bencana gempa bumi di Kota Cilacap, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tanggarang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Ciatis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kedu, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Mlati, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Dulelele, Kabupaten Jember, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, Kota Denpasar, Kabupaten Baching, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tuban</p> <p>b. menegodalikan perkembangan kawasan budi daya torbaqun yang berpotensi toradnya bencana gempa bumi</p> <p>c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemanfaatan bencana gempa bumi</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukaan penduduk dan bangunan untuk kepentingan pemanfaatan ancaman bencana gempa bumi</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana gempa bumi</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.2.3.	Kawasan Rawan Gerakan Tanah	Kawasan rawan bencana alam geologi	<p>f. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gempa bumi</p> <p>g. memanfaatkan ruang untuk pebatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum.</p> <p>h. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan penambahan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana gempa bumi</p> <p>i. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana gempa bumi</p>
			<p>a. menetapkan zona zona rawan bencana gerakan tanah beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gerakan tanah di Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogo, Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Sukabung, Kabupaten Surodang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Pemalang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Boyunggoro, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Lamajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Aganjuk, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Surabaja, Kabupaten Bulkleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Bulclong, dan Kabupaten Jemberana</p> <p>b. mengendalikan perkembangan kawasan hudi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana gerakan tanah</p> <p>c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana gerakan tanah</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukaan penduduk dan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana gerakan tanah</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.2.4.	Kawasan Kawan Caunari	Kawasan rawan hancana alam geologi	<p>a. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana gerakan tanah</p> <p>f. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gerakan tanah</p> <p>g. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum.</p> <p>h. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur: evaluasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana gerakan tanah</p> <p>i. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana gerakan tanah</p>
			<p>a. menetapkan zona-zona rawan bencana tsunami beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tsunami di Kota Cillegi, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukahumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebunrejo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Tantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember,</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Klungkung, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan</p> <p>b. mengundulikan perkembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana tsunami</p> <p>c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana tsunami</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari pemukiman penduduk dan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana tsunami</p> <p>f. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tsunami</p> <p>g. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kemudi untuk kepentingan umum</p> <p>h. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana tsunami</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.2.c.	Kawasan Rawan Abrasi	Kawasan rawan bencana alam geologi	<p>I. malarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mungkin terjadinya bencana tsunami</p> <p>a. menetapkan zona-zona rawan bencana abrasi beserta ketentuan menggunakan standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik jenis dan ancaman bencana abrasi di sepanjang wilayah pesisir Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Jegal, Kota Jegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pelalungan, Kota Pekanbaru, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Kembang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbendo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Klungkung;</p> <p>b. mengondalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana abrasi</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.2.6.	Kawasan Rawan Bahaya Gas Beracun	Kawasan rawan bencana alih geologi	<p>c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penciptaan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana abrasi</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari pertimbangan penduduk dan bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana abrasi</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana abrasi</p> <p>f. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana abrasi</p> <p>g. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum.</p> <p>h. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana abrasi</p> <p>i. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana abrasi</p> <p>a. menetapkan zona-zona rawan bencana bahaya gas beracun beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana bahaya gas beracun pada daerah sumberan lumpur di Kabupaten Sidoarjo</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. mengondalikan perkembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana bahaya gas beracun</p> <p>c. menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penempatan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemanfaatan bencana bahaya gas beracun</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari pemukiman penduduk dan bangunan untuk kepentingan pemanfaatan ancaman bencana bahaya gas beracun</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk pengembangan struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana bahaya gas beracun</p> <p>f. memanfaatkan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana bahaya gas beracun</p> <p>g. memanfaatkan ruang untuk pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan umum.</p> <p>h. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi lokasi dan jalur evakuasi serta bangunan untuk kepentingan pemanfaatan ancaman bencana, struktur alami dan struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana bahaya gas beracun</p> <p>i. melarang kegiatan dan pendirian bangunan yang memicu terjadinya bencana bahaya gas beracun</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
V.3.	Kawasan yang Membebaskan air		
V.3.1.	Kawasan imbuhan air tanah	Kawasan yang melindungi perbedapan air tanah	<p>a. mengendalikn perkembangan kegiatan budi daya re-hangun dan merehabilitasi kawasan imbuhan air tanah pada CAT Serang-Tangerang (Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Bogor), CAT Jakarta (Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Barat, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bekasi), CAT Sidaqca (Kabupaten Ciaris, Kota Banjar, dan Kabupaten Trebes, Kabupaten Tegol, dan Kota Tegol), CAT Cirebon, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Pacitan), CAT Lasem (Kabupaten Karang dan Kabupaten Tuban), CAT Randublatung (Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Bojonegara), dan CAT Ngawi-Ponorogo (Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro, dan Kota Madiun)</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.	Kawasan Lindung Lainnya		<p>b. memanfaatkan ruang secara terencana untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk penyediaan sumber resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada</p> <p>d. menerapkan prinsip zero <i>drain Q policy</i> terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinya</p>
VI.1.	Kawasan Lindung Lainnya		
VI.1.1.	Kawasan Lindung Lainnya	Caman baru	<p>a. mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan pengelolaan Taman Buru Gunung Masigit Kareumbi (Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut)</p> <p>b. memanfaatkan ruang untuk kegiatan perburuan secara terkendali</p> <p>c. memanfaatkan ruang untuk pemangkaran dan pengembangbiakan satwa untuk perburuan</p> <p>d. memanfaatkan ruang untuk penerapan standar keselamatan bagi perburuan dan masyarakat di sekitarnya</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
VI.2.	Perumbu Karang	Perumbu karang	<p>c. melestarikan ekosistem tumbuhan, yang meliputi pasang, sanitasi, pusa, rasurda, dan hutan tanaman yang mendominasi kawasan (pinus merkusi, maemala, harahu, dan ekaata);</p> <p>f. melestarikan ekosistem satwa, yang meliputi jenis satwa babi hutan, rusa sambar, kijang, anjing hutan, macan utul, kucing hutan, dan ayam hutan</p> <p>g. melindungi pertumbuhan satwa yang tidak ditetapkan sebagai satwa lindung</p>
			<p>a. mempertahankan, melestarikan, dan mengembangkan kawasan laut yang memiliki ekosistem terumbu karang di Kabupaten Serang, Kabupaten Pondeglang, Kabupaten Kepuluan Seribu, Kabupaten Sukahumi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Japora, Kabupaten Wonogi, Kabupaten Bantui, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Bilar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tulungagung, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Karangasem;</p> <p>b. memanfaatkan ruang untuk kawasan perikanan pariwisata bahari</p> <p>c. melarang kegiatan pengalihan terumbu karang dan penangkapan ikan yang mengganggu kelestarian ekosistem terumbu karang</p>

NO.	NAMA KAWASAN LINDUNG	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			di. mclarang kegiatan selain yang diarahkan pada buruf e yang dapat menimbulkan pencemaran air

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TANGGAL 16 MARET 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN FUNGSI KAWASAN BUDI DAYA
YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN KAWASAN BUDI DAYA YANG
MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL DI PULAU JAWA-BALI**

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Kawasan perbukitan butan di Pulau Jawa Bali	Kawasan budi daya	<p>a. mengembangkan pengelolaan kawasan perbukitan butan dengan menggunakan teknologi lingkungan pada kawasan perbukitan butan di Kota Cilacap, Kabupaten Sorang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Legar, Kabupaten Purwakang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blora, Kabupaten Madun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tuban, Kabupaten Kebang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sirubondo, Kabupaten Pandawa, Kabupaten Jember, Kota Batu, Kabupaten Mlar, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pesuruban, Kabupaten Bangsalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sucrencip, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangsem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Jenbana</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan sebagai upaya untuk mewujudkan kawasan berfungsi hulu yang paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengan ekosistemnya</p> <p>c. merehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi</p> <p>d. meningkatkan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pembaruan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan secara sumber daya kelestarian</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai penghutan bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf f</p> <p>h. meningkatkan fungsi kawasan peruntukan hutan sebagai kawasan resapan air dengan jenis tanaman hutan yang dapat membantu penyerapan air ke dalam tanah dan/atau yang mengurangi lepasan air permukaan</p> <p>i. mengundulikan perkembangan kawasan peruntukan hutan yang berpotensi mengganggu fungsi kawasan konservasi dan kawasan hutan lindung</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
2.	Kawasan pertanian peyantan di Pulau Jawa-Bali	Kawasan budi daya	<p>memperhatikan dan mengembangkan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan yang didukung prasarana dan sarana sumber daya air di Kabupaten Jember, Kabupaten Lebak, Kabupaten Langrang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilacap, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Kebang, Kabupaten Padi, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Cemasung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Peralang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Pati, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Pacitan,</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Madina, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegara, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Surratap, Kabupaten Jemberana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan</p> <p>b. mengandalkan perkembangan kegiatan hudi daya yang menyehatkan atau fungsi kawasan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilacap, Kabupaten Rogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu,</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebunrejo, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten KlATEN, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Karangagung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Balan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pematang, Kabupaten Cegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorego, Kabupaten Troggaik, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bujonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik,

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jember, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan terutama di sisi kiri dan sisi kanan jalan</p> <p>e. Mengendalikan alih fungsi peruntukan lahan pertanian untuk tanaman pangan di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Bagé, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumbelang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tumpang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magelang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegara, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jemberana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Bantul, Kabupaten Cianyar, dan Kabupaten Labanan</p> <p>d. mengembangkan sentra pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pandelegang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabungri, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Cikarang, Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebunrejo, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Tembung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Dlaten, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Paiton, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorejo, Kabupaten Tegayak, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Panyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Paouan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto,</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kabupaten Jombang, Kabupaten Ngunjung, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magelang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Jember, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buldeng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian untuk ketahanan pangan nasional</p> <p>c. mengembangkan kawasan perumukan perkebunan (cib, karet, kopi, dan/atau tembakau) berbasis bisnis dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta memperhentikan daya dukung dan daya hampung lingkungan hidup di Kabupaten Serang, Kota Cilicon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukohumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Nandung Barat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianus, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kulus, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Legat, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Karanganyar, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Padiaran, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegara, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tumpang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem</p> <p>f. merehabilitasi kawasan perumukan pertanian untuk kegiatan perkebunan di Kabupaten Serang, Kota Cillegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukohumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Dandung Darat, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Brebes, Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kabupaten Paitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorego, Kabupaten Majenang, Kabupaten Ngluwi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Doleteang, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem yang telah diakui</p> <p>9. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura di Kabupaten Tanggung, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Caringi, Kabupaten Dandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta,</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Perralang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Slerra, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Blitar, Kabupaten M'okerto, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Simbando, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Nyanjuk, Kota Surabaya, Kabupaten Dampit, dan Kabupaten Klungkung</p> <p>h. memanfaatkan ruang untuk permukiman petani re-batas dengan kepadatan rendah</p> <p>L. menciptakan ketertuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
3.	Kawasan perikanan perikanan di Pulau Jawa-Bali	Kawasan budi daya	<p>meningkatkan sentra pemukiman lengkap yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabung, Kabupaten Cianjur, Kota Serang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Debes, Kabupaten Perralaung, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Simbang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sumedra, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Jember, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Duleteleg</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. mengembangkan sentra perikanan budi daya yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perikanan serta pemasaran dan sarana yang ramah lingkungan di kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lahuk, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Dagar, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Suhung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Trebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Banyas, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Duryunmas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tanggung, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kota</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten KlATEN, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Tuban, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Singgahan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Surenep, Kabupaten Bulcleng, Kabupaten Jemberana, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Bangli</p> <p>u. merhabilitasi kawasan peruntukan pemukiman budi daya untuk menjaga ekoranem sekitarnya di wilayah pelepas Kota Cillegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Trejal, Kota Logal, Kabupaten Penabang, Kabupaten Pekalongan, Kota</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumedang</p> <p>d. mengembangkan kawasan metropolitan berbasis masyarakat untuk memberikan kesempatan kerja dan nilai tambah bagi masyarakat sekitar di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukahumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Magelang, Kabupaten Trenggeng, Kabupaten Rembang, Kota Pekalongan, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kota Probolinggo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Nuleleng, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Jembrana</p> <p>a. mengandalkan kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang berpotensi menggangu kawasan berfungsi lindung di Kabupaten Panudetang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sulang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Surodang, Kabupaten Matangka, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Drebes, Kabupaten Jeparu, Kabupaten Rembang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Karangalangga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Cuhungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Suranep, Kabupaten Nuleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Bangli</p> <p>f. merevitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala tingkat penangkapan yang berlebih (<i>overfishing</i>) pada kawasan laut di</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indragayuh, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Jember, Kota Jember, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Kembang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumedang</p> <p>g. memanfaatkan ruang untuk pemukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah</p> <p>h. memanfaatkan ruang untuk kawasan pemukiman dan/atau kawasan sabbuk hijau</p> <p>i. mengembangkan alternatif kawasan permukiman pertanian dengan kawasan peruntukan pariwisata untuk keajaiberaan masyarakat sekitar yang berkelanjutan</p> <p>j. menelapakan ketentuan mengenai pelarangan pembangunan limbah langsung ke wilayah pesisir yang merupakan kawasan permukiman perikanan</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
4.	Kawasan peruntukan pertambangan di Pulau Jawa-Bali	Kawasan budi daya	<p>a. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan mineral logam di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukaharja, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kobar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Jember, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember yang didukung oleh peningkatan fungsi industri yang berbeda-saing dan ramah lingkungan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana</p> <p>b. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Blosa, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegara, dan lepas pantai utara Pulau Jawa yang didukung oleh peningkatan fungsi industri pengolahan yang berdaya-saing dan ramah lingkungan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana</p> <p>c. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan panas bumi di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Selak (Kabupaten</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Sukabumi dan Kabupaten Bogor), Cisulok-Cisukarame (Kabupaten Sukabung), Cilumi (Kabupaten Pandulung), Panyalengan (Kabupaten Bandung), Tangkuban Parahu (Kabupaten Bandung Barat), Tampomas (Kabupaten Sumedang), Karaha Cakrabuana (Kabupaten Garut Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Majalengka Kabupaten Sumedang), Karojoang-Darat (Kabupaten Bandung-Kabupaten Garut), Ciater (Kabupaten Subang), Dicog (Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonorejo), Guci Baturoden (Kabupaten Tegal Kabupaten Brebes-kabupaten Pemalang-Kabupaten Banyuwangi-Kabupaten Purbalingga), Ungaran (Kabupaten Semarang), Yang-Argopuro (Kabupaten Jember Kabupaten Bondowoso), Wilis/Ngebel (Kabupaten Pururogo-Kabupaten Madiun), Belawan Ten (Kabupaten Banyuwangi-Kabupaten Situbondo-Kabupaten Bondowoso), dan Tabanan (Kabupaten Tabanan-Kabupaten Bulcleng-kabupaten Badung-Kabupaten Gianyar-Kabupaten Bangli) yang didukung oleh peningkatan fungsi industri pengolahan yang herdaya sang dan rarah lingkungan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana</p> <p>d. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pemarrhangan mineral di Kabupaten Pandeglang Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kebunrejo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Wirogati, Kabupaten Puntonego, Kabupaten Bliar, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Luwu, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember; serta kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi di Kabupaten Neka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Blora, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegara, dan lepas pantai utara Pulau Jawa yang berpotensi merusak fungsi kawasan lindung dan mengubah bentuk alam.</p> <p>c. mengendalikannya pengembangan kawasan peruntukan pertambangan pada kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Pongkor, Kabupaten Lebak, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukohumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Keburen, Kabupaten Danyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo,</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p data-bbox="594 296 703 1157">Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bujonegoro, Kabupaten Mlar, Kabupaten Malang, Kabupaten Crenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember</p> <ol data-bbox="711 296 1122 1199" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="711 296 797 1199">f. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang undangan <li data-bbox="805 296 891 1199">g. menerapkan ketentuan mengenai penganuran kawasan pertambangan dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat <li data-bbox="899 296 985 1199">h. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan bangunan lain di sekitar instalasi dan perubahan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah <li data-bbox="993 296 1079 1199">i. menerapkan ketentuan mengenai pertambangan ranah lingkungan <i>green mining</i>; <li data-bbox="1088 296 1174 1199">j. menerapkan ketentuan mengenai pembuangan limbah pertambangan limbah padat, limbah cair, maupun limbah gas, rampa melalui instalasi pengolahan limbah terpadu

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
5.	Kawasan permukiman industri di Pulau Jawa-Bali	Kawasan budi daya	<p> 1. meningkatkan kegiatan industri di dalam kawasan permukiman industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandelegang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Purang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pemalang, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, Kabupaten Klaren, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Cegal, Kota Cegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, Kabupaten Magelang, Kota </p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Magelang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Banjarnegara, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Paouruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Surenep, Kabupaten Bulcleng, Kabupaten Jemberana, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Cabanani, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tangli, dan Kabupaten Karangasem</p> <p>b. meningkatkan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
6.	Kawasan peruntukan pariwisata di Pulau Jawa-Dali	Kawasan budi daya	<p>c. meningkatkan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri</p> <p>d. meningkatkan kegiatan industri yang benika tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri</p> <p>f. mengembangkan akses ke kawasan sentra produksi bahan baku dan ke outlet/pelabuhan dan bandar udara, serta kawasan pemasaran atau kawasan industri lanjutan/hilir</p> <p>g. mengembangkan akses industri dengan sumber atau jaringan transmisi terhadap energi dan sumber air baku atau jaringan air berdaya air</p> <p>a. rehabilitasi dan mengembangkan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di kawasan Candi Dorobudur dan sekitarnya (Kabupaten Magelang), kawasan Candi Prambanan (Kabupaten Sleman dan Kabupaten KlATEN), kawasan Situs Purbakala Sangiran (Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar), kawasan Kota Tua Jakarta (Kota Jakarta Utara dan Kota Jakarta Barat), Kepulauan Scribu: Pulau OrCUS, Pulau Kelor, Pulau Cipir, dan Pulau Bidahari</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>[Kabupaten Kepulauan Seribu], Kota Lama Banten (Kabupaten Serang), kawasan adat Baduy (Kabupaten Lebak), Situs Batu Jaya (Kabupaten Karawang), Situs Gunung Padang (Kabupaten Cianjur), Kota Lama Bandung (Kota Bandung), Observatorium Bosscha (Kabupaten Bandung Barat), Situs Rengasdengklok (Kabupaten Karawang), Istana Bogor (Kota Bogor), Situs Batu Tulis (Kota Bogor), Istana Cipanas (Kabupaten Cianjur), Gua Cirebon (Kota Cirebon), Keraton Kasepuhan (Kota Cirebon), Keraton Kanoman (Kota Cirebon), Keraton Kacirebonan (Kota Cirebon), Museum Linggarjati (Kabupaten Kuningas), Gunung Kunti (Kabupaten Sumedang), Candi Candi Kuwang (Kabupaten Garut), Gua Gudarwang (Kabupaten Bogor), Cnung Wanara-Karany Kamulyan (Kabupaten Cianjur), Makam Sunan Gunung Jati (Kabupaten Cirebon), Kampung Naga (Kabupaten Tasikmalaya), Kota Lama Kotagede (Kota Yogyakarta), Makam Inogiri (Kabupaten Tegal), Puro Pakualaman (Kota Yogyakarta), Keraton Yogyakarta (Kota Yogyakarta), Kawasan Malohom (Kota Yogyakarta), Masjid Agung Demak (Kabupaten Demak), Keraton Surakarta (Kota Surakarta), Candi Gedung Songo (Kabupaten Semarang), Candi Sukuh Candi Ceto (Kabupaten Karanganyar), Candi Dugung (Kabupaten Wonosobo), Kota Lama Semarang (Kota Semarang), Makam Sunan Muria (Kabupaten Kudus), Makam</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Sunan Giri (Kabupaten Gresik); Candi Pematunggunan (Kabupaten Mojokerto); Kawasan Crowulan (Kabupaten Mojokerto); Makam Sunan Ampel (Kota Surabaya); Kota Lama Surabaya (Kota Surabaya); Makam Sunan Drajat (Kabupaten Lamongan); Situs Singasari (Kabupaten Malang); Kota Lama Malang (Kota Malang); Candi Singosari (Kabupaten Malang); Candi Jago (Kabupaten Malang); Candi Kidal (Kabupaten Malang); Candi Badut (Kabupaten Malang); Kawasan Tengger-Gumung Promo (Kabupaten Ponorogo); Candi Jawa (Kabupaten Pasuruan); Makam Sunan Bonang (Kabupaten Tuban); Candi Pemataram dan Candi Simpang (Kabupaten Blitar); Situs Prosejarah Pacitan (Kabupaten Pacitan); Situs Purbakala Trini (Kabupaten Ngawi); Makam Asta Tinggi (Kabupaten Surabaja); Situs Giliranuk (Kabupaten Jemberana); Goa Gayah (Kabupaten Gianvari); Situs Gunung Kawi (Kabupaten Gianyar); Pura Tanah Lot (Kabupaten Kabupaten); Jethuwih (Kabupaten Tubanan); Pura Besakih (Kabupaten Karangasem); Situs Taran Ujung Karangasem (Kabupaten Karangasem); serta pura-pura di Kota Denpasar, Kabupaten Bulung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem yang didukung praasana dan sarana pariwisata</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. merehabilitasi dan meningkatkan kawasan pariwisata bahari di Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (Kabupaten Kepulauan Seribu), Taman Nasional Laut Karimunjawa (Kabupaten Jepara), Taman Wisata Alam Laut Cijulang (Kabupaten Ciamis), Taman Wisata Alam Laut Daerah Pantai Ujungragom Robon (Kabupaten Dabang), Taman Wisata Alam Laut Bulcleng (Kabupaten Bulcleng), serta kawasan pariwisata bahari lainnya di Kota Ciligon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cegal, Kota Cegal, Kabupaten Peralang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumehen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Kudus Prigo, Kabupaten Damul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Culum, Kabupaten Larung, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Sumbandu, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Yenggalak, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Bulcleng, Kabupaten Jember, Kota Denpasar, Kabupaten Padang, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem yang didukung prasarana dan sarana pariwisata</p> <p>c. diperchabilitasi dan mengembangan kawasan ekowisata di Suaka Margasatwa Cikopuh (Kabupaten Sukabumi), Suaka Margasatwa Gunung Sawal (Kabupaten Ciamis), Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Yang (Kabupaten Probolinggo), Suaka Margasatwa Pulau Bawean (Kabupaten Gresik), Taman Nasional Ujung Kulon (Kabupaten Pandeglang), Taman Nasional Alas Purwo (Kabupaten Banyuwangi), Taman Nasional Babutan (Kabupaten Situbondho), Taman Nasional Meru Betiri (Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi), Taman Nasional Bali Barat (Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Bulcleng), Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukahumi), Taman Nasional Helium-Salak (Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukahumi), Taman Nasional Gunung Ciremai (Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka), Taman Nasional Gunung Merapi (Kabupaten Klatau, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Sleman), Taman Nasional Gunung Merbabu (Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Semarang), Taman</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Nasional Bromo Tengger-Semeru (Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang), dan Kabupaten Probolinggo), dan Taman Wisata Alam Gunung Tampomas (Kabupaten Sunderland), Taman Hutan Raya R. Suryo (Kabupaten Malang), Taman Hutan Raya Ngurah Rai (Kabupaten Badung dan Kota Denpasar), Taman Wisata Alam Pulau Sangiang (Kabupaten Serang), Taman Wisata Alam Sangch (Kabupaten Badung), Taman Wisata Alam Danau Buyan dan Danau Cembringan (Kabupaten Tuleleang dan Kabupaten Cabanani), dan Taman Buru Gunung Masigit Karurubi (Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut), serta kawasan ekowisata lainnya di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Labak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sulang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cakrawala, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tegay, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kabupaten Pati, Kabupaten Widyadri, Kabupaten Keborean, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Karang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Tegal, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Lorrongan,</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kabupaten Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Cengkajalek, Kabupaten Blitar, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Paitan, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Cakranegara, dan Kabupaten Bangli yang didukung prasarana dan sarana pariwisata</p> <p>d. mengembangkan penyelenggaraan pertemuan, peralanan insentif, konferensi, dan pameran di Kota Serang, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, dan Kota Denpasar yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata yang</p> <p>e. mengembangkan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata dengan menggunakan teknologi lingkungan dan berbasis kerja sama antar daerah</p> <p>f. memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
7.	Kawasan peruntukan perbukitan di Pulau Jawa Bali	Kawasan budi daya	<p>8. memanfaatkan ruang untuk perbuduhan situs pemegalan kebudayaan masa lampau</p> <p>h. menetapkan ketentuan mengenai pembelian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan pembelian bangunan selain yang dimaksud pada huruf b</p> <p>j. mengembangakan akses transportasi yang handal untuk mempersingkat waktu tempuh, jarak tempuh, dan kenyamanan ke atau dari kawasan peruntukan pariwisata ke kawasan perkotaan nasional maupun pelabuhan dan bandar udara</p> <p>a. mengembangakan kawasan peruntukan perbukitan di kawasan metropolitan dan kawasan perkotaan besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak, vertikal, harrat energi dan sumber daya, serta memanfaatkan teknologi lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Cillegon, Kota Serang, Kota Cangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kota Surakarta, Kabupaten Cilacap, Kota Yogyakarta, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kota Malang, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan</p> <p>b. mengarahkan perkembangan kawasan peruntukan pertukaran secara horizontal dan mengelompok di kawasan perkotaan sedang dan kawasan perkotaan kecil di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kota Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kota Kediri, Kota Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kota Blitar, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Djojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Duleleleg, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Jemberana</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. mengendalikn perkembangan kawasan peruntukan permukiman di daerah penyangga serta di sepanjang jaringan jalan arteri primer dan jaringan jalan kolektor primer yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar <i>farbaw sprawl</i> di Kota Cilacap, Kota Serang, Kabupaten Pandéglang, Kabupaten Lebak, Kota Cangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon, Kota Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kota Sukabumi, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kendal, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianis, Kabupaten Kediri, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kota Surakarta, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Boyolali, Kabupaten KlATEN, Kota Salatiga, Kota Cepal, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Tluru, Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyuwang, Kota Yogyakarta, Kabupaten Banjul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gresik, Kabupaten Dngkelan, Kota M'okarto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kabupaten Tuban, Kota Kediri, Kota Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember,</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kota Bihar, Kabupaten Puncakasin, Kabupaten Bujonegoro, Kabupaten Pacitan, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Labanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Jemberana</p> <p>d. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di kawasan perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan di Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Depok, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Tegay, Kota Yogyakarta, Kota Batu, Kota Elitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, dan Kota Denpasar</p> <p>e. mengembangkan kawasan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengembangkan kawasan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gerakan tanah atau tanah longsor di Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Bandung, Basal, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Malang, Kabupaten Lembang, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Banyumas, Kota Pekalongan, Kabupaten Wirosobo, Kabupaten Kebarean, Kota Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kota Kediri, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kota Ponorogo, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jemberana</p> <p>2. mengembangkan kawasan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gelombang pasang di Kota Cirebon, Kota Jakarta Utara, Kota Cirebon, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Indramayu, Kota Legat, Kota Pekalongan, Kabupaten Tuban, dan Kabupaten Khonglong</p> <p>3. mengembangkan kawasan permukiman berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir di Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang, Kota Cirebon, Kabupaten Cilacap, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kota Malang, Kota Denpasar, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Majalengka, Kota Sukabumi, Kabupaten Banyuwangi, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Bantul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kota Madiun, Kabupaten Pacitan, Kota Kediri, Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bulcleng, dan Kabupaten Klungkung</p> <p>4. mengembangkan kawasan perbukitan berbasis litigasi dan adaptasi bencana lerasan gunung berapi di Kota Serang, Kota Nogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Surreduang, Kabupaten Kendal, Kota Yogyakarta, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Majalengka, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya,</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kabupaten Boyolali, Kota Tejal, Kabupaten KlATEN, Kota Magelang, Kabupaten Widyadarmas, Kabupaten Sleman, Kabupaten Banyuwangi, Kota Blitar, Kabupaten Jember, Kota Kediri, Kota Madiun, dan Kota Probolinggo</p> <p>5. mengembangan kawasan pertumbuhan berbasis litigasi dan adaptasi bencana gempa bumi di Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cilacap, Kota Malang, Kota Denpasar, Kabupaten Bachung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Labuan, Kabupaten Pangrehlan, Kabupaten Lelak, Kota Sukahumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kaurren, Kabupaten Bantul, Kota Kediri, Kabupaten Pectan, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, dan Kabupaten Klungking</p> <p>6. mengembangan kawasan pertumbuhan berbasis litigasi dan adaptasi gerakan tanah di Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Samarang, Kota Malang, Kabupaten Lebak, Kota Sukabumi, Kota</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Banyuwangi, Kota Pekalongan, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Kebumeh, Kota Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Pacitan, Kota Kediri, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kabupaten Buliding, dan Kabupaten Jemberana</p> <p>7. mengembangkan kawasan permukiman berbasis irigasi dan adaptasi bencana tsunami di Kota Cilegon, Kabupaten Cilacap, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Kerturong, Kabupaten Pameung, Kabupaten Jemberana, dan Kabupaten Klungkung</p> <p>8. mengembangkan kawasan permukiman berbasis irigasi dan adaptasi bencana abrasi di sepanjang wilayah pesisir Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kota Tepal, Kota Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kota Denpasar, dan Kabupaten Klungkung</p> <p>9. mengembangkan kawasan permukiman berbasis irigasi dan adaptasi bencana bahaya gas beracun di Kabupaten Sidharjo</p>

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="594 394 618 1199">l. menerapkan ketentuan mengenai penutupan Amplop Bangunan <li data-bbox="626 310 675 1199">g. menerapkan ketentuan mengenai penutupan tema arsitektur bangunan <li data-bbox="683 310 732 1199">h. menerapkan ketentuan mengenai penutupan kelengkapan bangunan dan lingkungan <li data-bbox="740 310 789 1199">l. menerapkan ketentuan mengenai penutupan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang difikirkan <li data-bbox="797 695 821 1199">j. menerapkan ketentuan mengenai RTM <li data-bbox="829 310 919 1199">k. menerapkan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial mulai dari unit lingkungan pemukiman terkecil hingga skala perkotaan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO

**LAMPIRAN XIV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TANGGAL 16 MARET 2012**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN FUNGSI KAWASAN ANDALAN
DI PULAU JAWA-BALI**

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN KAWASAN ANDALAN DI PULAU JAWA-BALI

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> • Industri • Pariwisata • Perikanan • Perdagangan • Jasa 	<p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta untuk kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta untuk kegiatan pariwisata bertaraf internasional</p> <p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta untuk kegiatan perikanan tangkap</p> <p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta untuk kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional</p> <p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta untuk kegiatan industri, kegiatan perikanan, kegiatan perdagangan, dan kegiatan jasa, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, perikanan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>f. mengembangkan Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, behera, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan wisata, pertemuan, dan pameran. kegiatan pendukung pariwisata, perikanan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>g. meningkatkan keterampilan antara mitra kegiatan sektor unggulan perikanan, pusat kawasan pariwisata dan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, serta mitra sektor unggulan industri, perdagangan, dan jasa dengan PKN Kawasan</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Perkataan Jakarta Bngor Depok Tangerang Bekasi (Jabodetabek) sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Perkolatan Jakarta, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno Hatta</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arah peraturan zonasi untuk kawasan pertukaran industri, pariwisata, perikanan, perdagangan, dan jasa</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antar-sektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antar-sektor unggulan</p> <p>j. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana pemukiman</p> <p>k. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p>
2.	Kawasan Andalan Laut Pulau Scribu	<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan - Perairan - Pariwisata 	<p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Pulau Scribu untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan hudi daya yang berorientasi ekspor dan/atau antarpulau/jantarprovinsi</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Pulau Scribu untuk kegiatan perikanan</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
3.	Kawasan Andalan Bujonegara-Merak-Cilegon	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Pariwisata - Perikanan - Perikanan 	<p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu untuk kegiatan pariwisata bertaraf internasional</p> <p>d. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan perikanan, sentra kegiatan sektor unggulan pertambangan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKY Kawasan Perkotaan Jalodecabek sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok</p> <p>e. menetapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan, pertambakan, dan pariwisata</p> <p>f. menetapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antar-sektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antar-sektor unggulan</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasana dan sarana penunjang</p> <p>h. menetapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p>
3.	Kawasan Andalan Bujonegara-Merak-Cilegon	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Pariwisata - Perikanan - Perikanan 	<p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Bujonegara Merak Cilegon untuk kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Bujonegara-Merak-Cilegon untuk kegiatan pariwisata bertaraf internasional</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
		- Perarrbangan	<p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Dojonegara Merak Cilegon untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura</p> <p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya</p> <p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Dojonegara-Merak-Cilegon untuk kegiatan perarrbangan</p> <p>f. mengembangkan Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon untuk kegiatan industri, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, dan kegiatan perarrbangan, kegiatan pennegiatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, perikanan, dan perarrbangan, perarrbangan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>g. mengembangkan Kawasan Andalan Dojonegara Merak Cilegon untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pericruan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, perarrbangan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>h. meningkatkan keterampilan antara serta kegiatan sektor unggulan perikanan, pertanian, perarrbangan, pusat kawasan pariwisata dan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, serta serta sektor unggulan industri dengan PKN Cilegon, PKA Sorang, PKW Pandeglang, dan PKW Kangkas Bitung sebagai pusat</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>pengembangan Kawasan Andalan Diomnegara Merak Cilignon, yang terhubung dengan akses ke darat dan Pelabuhan Boyungara, Pelabuhan Merak, dan Bandar Udara Soekarno-Hatta</p> <ol style="list-style-type: none"> i. menetapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peramalan zonasi untuk kawasan pertumbuhan industri, pariwisata, pertanian, perikanan, dan perikanan j. menetapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antar-sektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antar-sektor unggulan k. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana pendukung l. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
4.	Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan - Pertambangan - Pariwisata 	<ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan yang berorientasi ekspor dan/atau pariwisata/antar-provinsi b. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan c. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata bahari dan ekowisata bertaraf internasional

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>d. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan aktor unggulan perikanan, pertambangan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKN Cilegon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Merak dan Pelabuhan Du'onegara</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pertumbuhan perikanan, pertambangan, dan pariwisata</p> <p>f. menetapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana pemunjang</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p>
5.	Kawasan Andalan Bogor-Puncak Ciayur (Bopunjur dan Sekitarnya)	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Pariwisata - Industri - Perikanan 	<p>a. mengembangkan kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata berbasis interuasional</p> <p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya untuk kegiatan industri</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan budh daya</p> <p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri, dan kegiatan perikanan, kegiatan peningkatan tingkat industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dan perikanan, pemukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>f. mengembangkan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, pemukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>g. meningkatkan kelengkapan sarana sentra kegiatan sektor unggulan pertanian dan perikanan, pusat kawasan pariwisata dan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, serta sentra sektor unggulan industri dengan PKN Kawasan Perkolahan Jatidelatik sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priuk dan Bandar Udara Soekarno Hatta</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
6.	Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan - Pertanian - Pariwisata - Perketahanan - Pertambangan 	<p>h. menerapkan kerentanan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antar-sektor unggulan untuk daya saing dan mengabdikan kondisi pemanfaatan ruang antar-sektor unggulan</p> <p>j. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana pemukiman</p> <p>k. menetapkan ketentuan mengenai pengendalian ulih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p> <p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura</p> <p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata berbasis intemasional</p> <p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya untuk kegiatan perkebunan berbasis bisnis</p> <p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya untuk kegiatan pertambangan</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>f. mengembangkan Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan, kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, dan kegiatan pertambangan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, pertanian, perkebunan, dan pertambangan, perikanan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>g. mengembangkan Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata berbasis labari dan ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, perikanan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>h. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan perikanan, pertanian, perkebunan, dan pertambangan, serta pusat kawasan pariwisata dengan PKW Sukadumi dan PKW Palabuhanratu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Cilamaya, dan/atau Bandar Udara Sukarno-Hatta</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perikanan, perikanan, pertanian, pariwisata, perkebunan, dan pertambangan</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
7.	Kawasan Andalan Purwakarta, Subang, Karawang (Purwasuka)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Industri • Pariwisata • Perikanan 	<p>j. menerapkan kerentanan mengenai pengaturan sinergisitas antara sektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antar sektor unggulan</p> <p>k. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang</p> <p>l. menerapkan kebijakan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p> <p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Purwasuka untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura serta mengendalikan kegiatan pertanian pangan berkelanjutan terutama di sisi kiri dan sisi kanan jalan</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Purwasuka untuk kegiatan industri</p> <p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Purwasuka untuk kegiatan pariwisata</p> <p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Purwasuka untuk kegiatan perikanan hudi daya</p> <p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Purwasuka untuk kegiatan pertanian dan kegiatan perikanan, kegiatan pembekalan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian dan perikanan, perumkuban, serta didukung prasarana dan sarana</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>f. mengembangkan Kawasan Andalan Purwasuka untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, pemukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>g. meningkatkan keterampilan tenaga kerja kegiatan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKW Cikampek-Cikopo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Purwasuka, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Cilamaya</p> <p>h. menetapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian, industri, pariwisata, dan perikanan</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antar-sektor unggulan untuk daya tarik dan menghidari konflik pemanfaatan ruang antar-sektor unggulan</p> <p>j. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang</p> <p>k. menetapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
8.	Kawasan Andalan Cekungan Bandung	<ul style="list-style-type: none"> - Industri - Pertanian - Pariwisata - Perkebunan 	<p>a. merehabilitasi Kawasan Andalan Cekungan Bandung untuk kegiatan industri yang terdegradasi dan mengembangkan kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Cekungan Bandung untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura</p> <p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Cekungan Bandung untuk kegiatan pariwisata bertaraf internasional</p> <p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Cekungan Bandung untuk kegiatan perkebunan berbasis bisnis</p> <p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Cekungan Bandung untuk kegiatan industri, kegiatan pertanian, dan kegiatan perkebunan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian dan perkebunan, perminuman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>f. mengembangkan Kawasan Andalan Cekungan Bandung untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, pertemuan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>g. meningkatkan keterampilan untuk sentra kegiatan sektor unggulan pertanian dan perkebunan, pusat kawasan pariwisata dan</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, serta sarana sektor unggulan industri dengan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Cetusung Bandung, yang terhubung dengan akses lori dan dari Pelabuhan Cilamaya dan Dandar Udara Ilusitu Sasirangwara.</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan industri, pertanian, pariwisata, dan perkebunan</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergis antar-sektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antar-sektor unggulan</p> <p>j. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang</p> <p>k. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p>
9.	Kawasan Andalan Cirebon Indrayayu Majalengka Kuningan Cilayuraja Kuningan dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Industri - Perikanan - Perambangan 	<p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Cilayuraja Kuningan dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Cilayuraja Kuningan dan Sekitarnya untuk kegiatan industri</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan tangkap dan pertanaman budi daya</p> <p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya untuk kegiatan pertambangan</p> <p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri, kegiatan perikanan, dan kegiatan pertambangan, kegiatan peningkatan nilai industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, perikanan, dan pertambangan, pemukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>f. meningkatkan keterkaitan antara semua kegiatan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan dengan PKW Cirebon, PKW Indramayu, dan PKW Kadhayu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ciayumaja Kuning dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Arjuna (Cirebon), Nanda: Udara Cakrabhuwana, dan Bandar Udara Kerajati (Majalengka)</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai indikasi bahan peraturan zonasi untuk kawasan pertumbuhan pertanian, industri, perikanan, dan pertambangan</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
10.	Kawasan Andalan Priangan Cicurug-Pangandaran	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Industri - Perkebunan - Pariwisata - Perikanan 	<p>h. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinekdosis antar-sektor unggulan untuk daya saing dan mengabdikan kondisi pemanfaatan ruang antar-sektor unggulan</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang</p> <p>j. menetapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p>
			<p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Priangan Cicurug-Pangandaran untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Priangan Cicurug-Pangandaran untuk kegiatan industri</p> <p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Priangan Cicurug-Pangandaran untuk kegiatan perkebunan berbasis biologi</p> <p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Priangan Cicurug-Pangandaran untuk kegiatan pariwisata bertarif internasional</p> <p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Priangan Cicurug-Pangandaran untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan hulu daya</p> <p>f. mengembangkan Kawasan Andalan Priangan Cicurug-Pangandaran untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri, kegiatan perkebunan, dan</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>kegiatan perikanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, perikanan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>g. mengembangkan Kawasan Andalan Priangan Untuk Pangeandaran untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, perikanan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>h. meningkatkan keterampilan antara lain: kegiatan sektor unggulan perikanan, industri, perkebunan, perikanan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKW Tasikmalaya dan PKW Pangeandaran sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangeandaran yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Arjuno (Cirebon), Pelabuhan Tanjung Intan, dan/atau Bandar Udara Cakrabhuwana</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perikanan</p> <p>j. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antar-sektor unggulan untuk daya saing dan menghidari konflik pemanfaatan ruang antar-sektor unggulan</p> <p>k. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana peruntug</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
11.	Kawasan Andalan Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klontar (Subosuka-Wonosraten)	<ul style="list-style-type: none"> • Industri • Pariwisata • Pertanian 	<p>1. menerapkan ketantuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan memanfaatkan ruang sektor unggulan</p> <p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten untuk kegiatan industri</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten untuk kegiatan pariwisata bertaraf internasional</p> <p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura</p> <p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten untuk kegiatan industri dan kegiatan pertanian, kegiatan pemmpokan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, peternakan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>e. mengembangan Kawasan Andalan Subosuka-Wonosraten untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan wisata, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, perbukitan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>f. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan industri, pertanian, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKW Surakarta, PKW Boyolali, dan PKW Klontar sebagai pusat</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>pengembangan Kawasan Andalan Subosuka Wonorejo, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Adi Sumarmo.</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian, industri, perkebunan, pariwisata, dan perumahan</p> <p>h. menetapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antar-sektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antar-sektor unggulan</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana pendukung</p> <p>j. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p>
12.	Kawasan Andalan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi (Kedungsepur)	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Industri - Pariwisata - Perikanan 	<p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Kedungsepur untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura</p> <p>b. merahabihkan Kawasan Andalan Kedungsepur untuk kegiatan industri yang terdegradasi dan mengembangkan kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Kedungsepur untuk kegiatan pariwisata bertaraf internasional</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Kedungsepur untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya</p> <p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Kedungsepur untuk kegiatan pertanian, kegiatan pertambangan, kegiatan industri, dan kegiatan perikanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, pertambangan, dan perikanan, permutihan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>f. mengembangkan Kawasan Andalan Kedungsepur untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, permutihan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>g. meningkatkan kelengkapan sarana sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, pertambangan, industri, perikanan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKN Kawasan Perkotaan Kendal Demak Ungaran Semarang-Purwodadi (Kedungsepur) dan PKW Salatiga sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kedungsepur, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandar Udara Ahmad Yani</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
13.	Kawasan Andalan Bregas (Brebek-Logal-Slawi)	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Kertanian - Industri - Perikanan 	<p>h. menerapkan kerentanan mengenai indikasi arahan perumusan zonasi untuk kawasan perumukan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergitas antar-sektor unggulan untuk daya saing dan mengabdikan kondisi pemanfaatan ruang antar-sektor unggulan</p> <p>j. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana pemukiman</p> <p>k. menetapkan ketentuan mengenai pengendalian ulih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p> <p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Bregas untuk kegiatan pertanian hortikultura</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Bregas untuk kegiatan kehutanan</p> <p>c. merahabihkan Kawasan Andalan Bregas untuk kegiatan industri yang terdistribusi dan mengembangkan kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Bregas untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya</p> <p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Bregas untuk kegiatan pertanian, kegiatan kehutanan, kegiatan industri, dan kegiatan perikanan,</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>f. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan dengan PKW Cegal dan PKW Pekalongan sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bregas, yang terbubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandara Udara Ahmad Yani</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian, kehutanan, industri, dan perikanan</p> <p>h. menerapkan kerennan mengenai pengaturan sinergisitas antar-sektor unggulan untuk daya saing dan menghibur konflik pemanfaatan ruang antar-sektor unggulan</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang</p> <p>j. menerapkan ketentuan mengenai penendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
14.	Kawasan Andalan Jiwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Blora (Wanarakuti)	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Industri - Pertambangan - Perikanan 	<p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Wanarakuti untuk kegiatan pertanian pangan</p> <p>b. merehabilitasi Kawasan Andalan Wanarakuti untuk kegiatan industri yang terdegradasi dan mengembangkan kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Wanarakuti untuk kegiatan pertambangan</p> <p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Wanarakuti untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya</p> <p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Wanarakuti untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri, kegiatan pertambangan, dan kegiatan perikanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, pertambangan, dan perikanan, pemukiman, serta dukungan prasarana dan sarana</p> <p>f. meningkatkan keterkaitan antara semua kegiatan sektor unggulan pertanian, industri, pertambangan, dan perikanan dengan PKW Kudus dan PKW Cepu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Wanarakuti, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Prias dan Bandara Udara Ahmad Yani</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
15.	Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan Sekitarnya)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Pariwisata • Pertambangan • Industri • Perikanan 	<p>g. menerapkan ketentuan mengenai indikasi rahan peraturan zonasi untuk kawasan perumukan pertanian, industri, pertambangan, dan perikanan</p> <p>h. menetapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prosarana dan sarana penunjang</p> <p>j. menetapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p> <p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan untuk kegiatan pariwisata</p> <p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan untuk kegiatan pertambangan</p> <p>d. merehabilitasi Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan untuk kegiatan industri yang terdegradasi dan mengembangkan kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya</p> <p>f. mengembangkan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan untuk kegiatan pertanian, kegiatan pertambangan, kegiatan industri, dan kegiatan perikanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, pertambangan, dan perikanan, perikanan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>g. mengembangkan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan untuk kegiatan pariwisata bahari dan ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, perikanan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>h. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, pertambangan, industri, perikanan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKA Cilacap, PKW Purwokerto, PKW Kebunrejo, dan PKW Wonorebo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Intan</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan penuntan zonasi untuk kawasan penuntan pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, dan perikanan</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
16.	Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya	- Pariwisata	<p>j. menerapkan kerentanan mengenai pengaturan aktivitas antar sektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antar sektor unggulan</p> <p>k. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang</p> <p>l. menerapkan kebijakan mengenai pendanaan alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p> <p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata bertaraf internasional</p> <p>h. mengembangkan Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata <i>capar budaya</i> dan ilmu pengetahuan, kegiatan pendukung pariwisata, pemukiman, serta dukungan prasarana dan sarana</p> <p>c. meningkatkan keterkaitan pusat kawasan pariwisata dengan PKW Magelang sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Borobudur dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Bandar Udara Adisutirjo</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
17.	Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • Perikanan • Pariwisata • Perambangan • Pariwisata 	<p>e. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasana dan sarana pemujaan</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p> <p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan yang berorientasi antrarpulan/ antrarpromisi</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya untuk kegiatan pertambangan</p> <p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata</p> <p>d. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan perikanan, sentra kegiatan sektor unggulan pertambangan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKV Kawasan Perkotaan Kedungsepur sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan perambangan zona untuk kawasan peruntukan perikanan, pertambangan, dan pariwisata</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
18.	Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • Perikanan • Pertanian/bangunan • Pariwisata 	<p>f. menciptakan ketentuan mengenai pengakuan sinergisitas antar-sektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antar-sektor; unggulan</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana pemukiman</p> <p>h. menetapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p>
			<p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan yang berorientasi antarpulau/antarprovinsi</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya untuk kegiatan pertambangan</p> <p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata</p> <p>d. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan perikanan, sentra kegiatan sektor unggulan pertambangan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKN Cilacap sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Inan</p> <p>e. menetapkan ketentuan mengenai indikasi arah perubahan zonasi untuk kawasan perikanan, pertambangan, dan pariwisata</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
19.	Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata • Pertanian • Industri • Perikanan 	<p>f. menerapkan kerentanan mengenai pengaturan aktivitas antara sektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antar sektor unggulan</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang</p> <p>h. menerapkan kebijakan mengenai pendudukan alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p> <p>a. merehabilitasi Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata yang terdigradasi serta mengembangkan kegiatan pariwisata berbasis tagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang bertaraf internasional</p> <p>b. mengorganisasikan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura</p> <p>c. merehabilitasi Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya untuk kegiatan industri yang terdigradasi dan mengembangkan kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri, dan kegiatan perikanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian dan perikanan, perumukiran, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>f. mengembangkan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahasa, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, perumukiran, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>g. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKA Yogyakarta, PKW Sleman, dan PKW Bantul sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas dan Bandara Udaia Adisutjipto</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai regulasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antar-sektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antar-sektor unggulan</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
20.	Kawasan Andalan Gresik, Bangkalan, Molekerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusila)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Perikanan • Industri • Pariwisata 	<p>j. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana pemungjung</p> <p>k. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p> <p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya</p> <p>c. merehabilitasi Kawasan Andalan Gerbangkertosusila untuk kegiatan industri yang terdegradasi dan mengembangkan kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila untuk kegiatan pariwisata bertaraf internasional</p> <p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila untuk kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, dan kegiatan industri, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian dan perikanan, permutihan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>f. mengembangkan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari,</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, pariwisata, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>g. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pusat kawasan pariwisata dengan PIRN Kawasan Perkotaan Gresik-Bangkalan-Mukoharjo-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila) sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Gerbangkertosusila, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak dalam satu sistem dengan Pelabuhan Tanjung Bumi-Tanjung Buhapandan, Pelabuhan Gresik, dan Bandar Udara Juanda</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergitas antar-sektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antar-sektor unggulan</p> <p>j. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang</p> <p>k. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian ulih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
21.	Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Perikanan - Industri - Perkebunan - Pariwisata 	<p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan</p> <p>c. merehabilitasi Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya untuk kegiatan industri yang terdegradasi dan mengembangkan kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya untuk kegiatan perkebunan</p> <p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata</p> <p>f. mengembangkan Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan industri, dan kegiatan perkebunan, kegiatan peningkatan fungsi industri pemekabahan dan industri jasa hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan, perikanan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>g. mengembangkan Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, perikanan, serta didukung prasarana dan sarana</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
22.	Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Industri • Pertambangan • Perikanan • Perkebunan • Pariwisata 	<p>h. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan aktor unggulan pertanian, perikanan, industri, perkebunan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKN Malang sebagai pusat pengciribangan Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Uluwu Abdulrachman Saleh</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan pernuisana pertanian, perikanan, industri, perkebunan, dan pariwisata</p> <p>j. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antar-sektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antar-sektor unggulan</p> <p>k. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang</p> <p>l. menerapkan ketentuan mengenai penguadalan alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p> <p>a. mengembangkan kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura</p> <p>b. mengembangkan kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang untuk kegiatan industri</p> <p>c. mengembangkan kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang untuk kegiatan pertambangan</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya</p> <p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Probolinggo-Pasuruan-Lumajang untuk kegiatan perkebunan tebu, tombakau, dan kopi berbasis bisnis</p> <p>f. mengembangkan Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang untuk kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata</p> <p>g. mengembangkan Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri, kegiatan perikanan, kegiatan perikanan, dan kegiatan perkebunan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, perhubungan, perikanan, dan perkebunan, perukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>h. mengembangkan Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, perukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>i. meningkatkan keterkaitan antara semua kegiatan sektor unggulan pertanian, industri, perhubungan, perikanan, perkebunan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKW Probolinggo sebagai pusat</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>pengembangan Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Lumajang yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Bandar Udara Juanda, dan/atau Bandar Udara Abdulrachman Saleh</p> <p>j. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arah perubahan zonaasi untuk kawasan pertambangan, industri, perkebunan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata</p> <p>k. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antar-sektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antar-sektor unggulan</p> <p>l. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang</p> <p>m. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p>
23.	Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro	<ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata • Industri • Perkebunan • Pertanian • Perikanan 	<p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro untuk kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, budaya, serta ekowisata beraraf internasional</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro untuk kegiatan industri</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
		- Perambangan	<p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Tuban Bojonegoro untuk kegiatan perkulunan berbasis bisnis dan memobilisasi kegiatan perkebunan yang terlewat</p> <p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro untuk kegiatan pertanian pangan</p> <p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan hudi daya</p> <p>f. mengembangkan Kawasan Andalan Tuban Bojonegoro untuk kegiatan perambangan</p> <p>g. mengembangkan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro untuk kegiatan industri, kegiatan perkebunan, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, dan kegiatan perambangan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, pertanian, perikanan, dan perambangan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>h. mengembangkan Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>i. meningkatkan keterkaitan antara semua kegiatan sektor: unggulan industri, perkebunan, pertanian, perikanan, pertambangan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKW Tulen dan PKW Tojorongum sebagai pusat pengcirangan kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro, yang berhubungan dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, dan/atau Bandara Uluwu Juanda</p> <p>j. merencanakan ketentuan mengenai undiliasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perikanan pariwisata, industri, perkehunon, pertanian, perikanan, dan pertambangan</p> <p>k. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor: unggulan untuk daya saing dan menghidari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan</p> <p>l. merencanakan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana pemukiman</p> <p>m. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
24.	Kawasan Andalan Kediri Tulung Agung-Bilar	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Perkebunan - Industri - Perikanan - Pariwisata 	<p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Kediri Tulung Agung Bilar untuk kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Bilar untuk kegiatan perkebunan berbasis bisnis</p> <p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Bilar untuk kegiatan industri</p> <p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Bilar untuk kegiatan perikanan budidaya</p> <p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Kediri Tulung Agung Bilar untuk kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta ekowisata bertaraf internasional</p> <p>f. mengembangkan Kawasan Andalan Kediri Tulung Agung Bilar untuk kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, kegiatan industri, dan kegiatan perikanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, perikanan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>g. mengembangkan Kawasan Andalan Kediri-Tulung Agung-Bilar untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, perikanan, serta didukung prasarana dan sarana</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
25.	Kawasan Andalan Situbondo Bondowoso Jember	<ul style="list-style-type: none"> - Perkebunan - Pertanian - Industri - Pariwisata - Perikanan Laut 	<p>h. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan aktor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKW Kediri dan PKW Blitar sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kediri Tulung Agung Blitar, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Baidar Udara Juanda, dan/atau Bandara Udara Abdulrahman Saleh</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peramuan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pariwisata</p> <p>j. menetapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antar-sektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antar-sektor unggulan</p> <p>k. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasana dan sarana panjang</p> <p>l. menetapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p> <p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Situbondo Bondowoso Jember untuk kegiatan perkebunan berbasis bisnis dan merehabilitasi kegiatan perkebunan yang terdegradasi</p> <p>b. mengembangkan kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember untuk kegiatan pertanian pangan dan hortikultura</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. meningkatkan Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember untuk kegiatan industri yang terdegradasi dan mengembangkan kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Simbodo Bondowoso Jember untuk kegiatan pariwisata bahari dan ekowisata</p> <p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember untuk kegiatan perikanan</p> <p>f. mengembangkan Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember untuk kegiatan perkebunan, kegiatan perikanan, kegiatan industri, dan kegiatan perikanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, pertanian, dan perikanan, perikanan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>g. mengembangkan Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember untuk kegiatan pariwisata bahari dan ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, perikanan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>h. meningkatkan keterkaitan antara sektor kegiatan sektor unggulan perkebunan, pertanian, industri, perikanan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKW Jember sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Situbondo-Bondowoso-Jember, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Cayung Perak dan Bandara Udara Juanda</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
26.	Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Industri • Perikanan • Perkebunan • Pariwisata 	<p>i. merencanakan ketentuan mengenai utilitas arahan peraturan zonasi untuk kawasan perumukan, perkebunan, pertanian, industri, pariwisata, dan perkotaan</p> <p>j. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergitas antar sektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antar sektor unggulan</p> <p>k. merencanakan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang</p> <p>l. menetapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p> <p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian pangan</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya untuk kegiatan industri</p> <p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya</p> <p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya untuk kegiatan perkebunan berbasis busus</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Madium dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata eagar budaya dan ilmu pengetahuan serta ekowisata</p> <p>f. mengembangkan Kawasan Andalan Madium dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan perikanan, dan kegiatan perikanan, kegiatan perikanan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan, perikanan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>g. mengembangkan Kawasan Andalan Madium dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata berbasis eagar budaya dan ilmu pengetahuan serta ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, perikanan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>h. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKW Madium dan PKW Peciran sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Madium dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Cening, Perak dan Bandar Udara Juanda</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan perikanan, pertanian, industri, perikanan, perkebunan, dan pariwisata</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
27.	Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • Perikanan • Pertanian 	<p>j. menerapkan kerentanan mengenai pengaturan administrasi antara sektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antar sektor unggulan</p> <p>k. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang</p> <p>l. menerapkan kebijakan mengenai penendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p> <p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya untuk kegiatan pertanian pangan</p> <p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan dan kegiatan pertanian, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan dan pertanian, perumukatan, serta dukungan prasarana dan sarana</p> <p>d. meningkatkan keterkaitan antara sektor kegiatan sektor unggulan perikanan dan sektor unggulan pertanian dengan PKW Banyuwangi sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak dan/atau Bandar Udara Juanda</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
28.	Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian - Perkebunan - Industri - Pariwisata - Perikanan 	<p>e. menerapkan kerentanan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pemukiman dan pertanian</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan siburgislas antar-sektor unggulan untuk daya saing dan menghibidari konflik pemanfaatan ruang antar-sektor unggulan</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana pemukiman</p> <p>h. menetapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p> <p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan untuk kegiatan pertanian tanaman pangan</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan untuk kegiatan perkebunan berbasis lisisis</p> <p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan untuk kegiatan industri</p> <p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan untuk kegiatan partisipisara nagor budaya dan ilmu pengetahuan, behani, serta elcowsisata</p> <p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>f. mengembangkan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan untuk kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan, kegiatan industri, dan kegiatan perikanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, perikanan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>g. mengembangkan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata, kegiatan penulukung pariwisata, perikanan, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>h. meningkatkan keterkaitan antara antara kegiatan sektor unggulan pertanian, perkebunan, industri, perikanan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKW Pemeksaan sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Madura dan Kepulauan, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Branta.</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai indikasi amban peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, industri, pariwisata, dan perikanan</p> <p>j. menetapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antar-sektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antar-sektor unggulan</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
25.	Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • Perikanan • Perairan/bangunan • Pariwisata 	<p>k. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana pemuatjang</p> <p>l. menerapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p> <p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya untuk kegiatan perairan/bangunan minyak dan gas bumi</p> <p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata berlatar internasional</p> <p>d. meningkatkan keterampilan antara sektor kegiatan sektor unggulan perikanan, sentra kegiatan sektor unggulan pertambangan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKV Kawasan Perkolahan Gerbangkertosusila dan PKW Pamakoran sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Perak dalam satu sistem dengan Pelabuhan Tanjung Bumi Tanjung Rulupandan dan Pelabuhan Branta</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan, pertambangan, dan pariwisata.</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
30.	Kawasan Andalan Singaraja dan Skitaranya (Bali Utara)	<ul style="list-style-type: none"> • Pariwisata • Pertanian • Perikanan 	<p>f. menerapkan kerentanan mengenai pengaturan administrasi antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor unggulan</p> <p>g. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang</p> <p>h. menerapkan kebijakan mengenai penendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p> <p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Bali Utara untuk kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata bertaraf internasional</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Bali Utara untuk kegiatan pertanian hortikultura dan pertanian pangan berbasis subak</p> <p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Bali Utara untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya</p> <p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Bali Utara untuk kegiatan pertanian dan kegiatan perikanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian dan perikanan, pariwisata, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Bali Utara untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta dukungan prasarana dan sarana</p> <p>f. meningkatkan keterampilan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, perikanan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKW Siagaraja sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Dali Utara, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Demosa dan Bandar Udara Ngurah Rai</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arah dan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata, pertanian, dan perikanan</p> <p>h. menetapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antar-sektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antar-sektor unggulan</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang</p> <p>j. menetapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p>
31.	Kawasan Andalan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan)	<ul style="list-style-type: none"> - Pariwisata - Pertanian - Industri - Perikanan 	<p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Bali Selatan untuk kegiatan pariwisata cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, pelatihan insentif, konferensi, dan pameran bertaraf internasional</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>h. mengembangkan Kawasan Andalan Tali Selatan untuk kegiatan pertanian hortikultura dan pertanian pangan berbasis subak</p> <p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Bali Selatan untuk kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan</p> <p>d. mengembangkan Kawasan Andalan Tali Selatan untuk kegiatan pertanian tangkap dan perikanan budidaya</p> <p>e. mengembangkan Kawasan Andalan Bali Selatan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri, dan kegiatan perikanan; kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa busi pertanian dan perikanan, perumukuman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>f. mengembangkan Kawasan Andalan Tali Selatan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, perumukuman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>g. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, industri, perikanan, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKA Kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Labanan (Sarbajita), PKW Negara, dan PKW Sarasapura sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Tali Selatan, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Benoa dan Bandar Udara Ngurah Rai</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
32.	Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> - Perikanan - Pertanian - Pariwisata 	<p>h. menerapkan kerentanan mengenai indikasi arahan perumusan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata, pertanian, industri, dan perikanan</p> <p>i. menetapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergitas antar-sektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antar-sektor unggulan</p> <p>j. menetapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana pemukiman</p> <p>k. menetapkan ketentuan mengenai pengendalian ulih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p>
			<p>a. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya untuk kegiatan perikanan</p> <p>b. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya untuk kegiatan pertambangan</p> <p>c. mengembangkan Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya untuk kegiatan pariwisata bahari bertaraf internasional</p> <p>d. meningkatkan keterkaitan antara sentra kegiatan sektor unggulan perikanan, sentra kegiatan sektor unggulan pertanian, dan pusat kawasan pariwisata dengan PKN Kawasan Perikanan Sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya, yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Denpasar</p>

NO.	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>e. menerapkan kerentanan mengenai indikasi arahan penurunan zonasi untuk kawasan pertumbuhan permukiman, pertambangan, dan pariwisata.</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antar-sektor unggulan untuk daya saing dan menghibridari konflik pemanfaatan ruang antar-sektor unggulan</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama prasarana dan sarana pemukiman</p> <p>h. menetapkan ketentuan mengenai pengendalian alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p>

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**LAMPIRAN XV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2012
TANGGAL 16 MARET 2012**

**INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG PULAU JAWA-BALI**

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
I.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG NASIONAL								
A.	Sistem Perkotaan Nasional								
1.	Mendorong Pengembangan Kota-kota Sentra Produksi								
		1) EW Padeglang	Surplus III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (II.3.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Keementerian Pekerjaan Umum (Kerpu PU), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Keementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemendikbudpar), Keementerian Selatan dan Perikanan (Kemu XP), Keementerian Pertanian, (Kemran), Keementerian Perindustrian (Kerperin).				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
					Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kemendintrans), Pemerintah Daerah (Pemda), dan Swasta				
	2) P.1W Bangkas Himing		Rampasan III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkeluarga Nasional di	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
			Pulau Jawa Bali (II.1.)		Kemendikb, Kemendikminfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
3)	PCW Boyolali		Sampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (IV.4.)	APPN, APB, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kementerian, dan Kemendikb, Kominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
4)	PCW Sumsapura		Sampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa Bali (VII.3.)	APPN, APB, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendagri, Kemenhidpar, Kemen KL, dan Kemendikb, Kemendagri, Kemendikb, Kominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		c) U.S.W Negara	<p>Langkah III</p> <p>Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (VII.4.)</p>	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	<p>Pemda, dan Swasta</p> <p>seintel.PU, Kemendagri, seintelbudpar, Kemen KP, seintelau, Kemempin, seintelmb, Keminkominfo, seintelESDM, Pemda, dan Swasta</p>				
2.	Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-kota Pusat Pertumbuhan Nasional								
2.1.	Pengembangan/ Peningkatan Fungsi	c) U.S.W Sebang	<p>Langkah III</p> <p>Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (VII.4.)</p>	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	<p>seintel.PU, Kemendagri, seintelbudpar, Kemen KP, seintelau, Kemempin, seintelmb, seintelkominfo.</p>				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
					Kemendikninfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
		20) PKW Indramayu	Sampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.6.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kemendagri, Kemren KP, Kemrenan, Acmaperin, Kemrenhb, KemitraKominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
		21) PKW Tasikmalaya	Sampiran III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.6.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kemendagri, Kemrenhdpn, Kemren KP, Acmacntan, Kemrenperin, Kemrenhb, KemitraKominfo, Kemen ESDM,				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
(2) PAKWALATU			<p>Langkah III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (IV.5.)</p>	<p>APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah</p>	<p>Pemda, dan Swasta seinet PU, seinetagri, seinetbudpar, Kementerian, seinetperin, Kemenhub, seinetkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta</p>				
(3) PAKWASolariga			<p>Langkah III Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (IV.6.)</p>	<p>APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah</p>	<p>Kemen PU, Kemenagri, Kemen KP, seinetulu, Kemenperin, seinetulu, seinetkominfo, seinet ESDM, Pemda, dan Swasta</p>				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
			(IV.11.)		Kemren ESDM, Pemda, dan Swasta				
19	PKW Womasobo		Sampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa Bali (IV.12.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kemendagri, Kemendagri, Kemren KP, Kemrenan, Acmamperta, Kemrenmb, Acmakominfo, Kemren ESDM, Pemda, dan Swasta				
20	PKW Achumen		Sampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (IV.13.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kemendagri, Kemendagri, Kemren KP, Acmacutan, Kemendagri, Kemrenmb, Kemrenkominfo, Kemren ESDM,				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		27) PKW Hanyuwangi	Sampitan III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (VII.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemari PU, Kemendagri, Kemari KP, Aemantau, Kemari perin, Kemari tulu, Kemari koninilo, Kemari ESDM, Pemda, dan Swasta				
		28) PKW Singaraja	Sampitan III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa Bali (VII.2.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemari PU, Kemari dagri, Kemari budpar, Kemari KP, Kemari ran, Kemari petia, Kemari mb, Aemari koninifo, Kemari ESDM, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
			Pulau Jawa Bali (III.9.)		Kemampuan, Kementerian, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
a)	EGW Jember		Keanggotaan III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (VI.8.j)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemsetra PU, Kementerian, Kemenbudpar, Kemen KP, Kementerian, Kementerian, Kementerian, Kemerkominfo, Kemsetra ESDM, Pemda, dan Swasta				
b)	EGW Bitau		Keanggotaan III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa Bali (VI.9.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemsetra PU, Kemenkominfo, Kemenbudpar, Kemen KP, Kementerian, Kementerian				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
					Kemenduh, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemda, dan Swasta				
	6) P3W Pamekasan		Rampian III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (VI.10.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenudagri, Kemenbudpar, Kemen KP, Kemencan, Kemenperin, Kemendagri, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Pemuda, dan Swasta				
	7) P3W Bojonegara		Rampian III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional Di Pulau Jawa Bali (VI.11.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenudagri, Kemenbudpar, Kemenperin, Kemenkominfo, Kemen ESDM, Kemendagri, Kemenkominfo,				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
					Kemari ESDM, Pemda, dan Swasta				
		3) EW Pucitan	Sampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa-Bali (VI, 15.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemari PU, Kemendagri, Kemari KP, Kemari n; Kemari mb, Kemari kominfo, Kemari ESDM, Pemda, dan Swasta				
2.3.	Revitalisasi Kota-kota yang Telah Berbangsi	1) PKN kawasan Perkotaan Jabodetabek	Sampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sistem Perkotaan Nasional di Pulau Jawa Bali (1.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemari PU, Kemendagri, Kemari bupat, Kemari KP, Kemari petra, Kemendag, Kemari tub, Kemari kominfo,				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		<p>Meningi Cillegm Serang- Tangerang- Jakarta-Bekasi- Karawang- Cikampek- Pamuntukan Lolibeter- Palimanan Cirebon Lusuji Brebes Tegol Pemasiaug- Pekalongan- Baleap-Serdal- Semarang- Demak-Sudus- Pati Rembang Bulu Tuban Widang Laurongari Gresik Surabaya Waru-Sidoarjo- Pasuruan-</p>	<p>Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.]</p>						

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Probolinggo Simbondone- Krapanan- Banyuwangi 2) Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan Bogor-Ciawi- Cibadak- Sukabungit- Cianjur- Padalarang- Bandung Cilacap- Rajapolah Anrol Ciurus Dawjat Wangan	-smpiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (L. . .)	APBD, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Seneta PU, Pemda, dan Swasta				
		3) Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan Serang-Bawen-	-smpiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau	APBD, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Acmam PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Salariga Royolali Karasuro- Sura Karra- Sragan-Agawi - Candhan- Ngajuk- Kertosari Jombang- Mojokerto Kyian Watu	Jawa Bali (II.2.)						
	4) Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan Rawado Sampang-Bunin 5) Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Mekalegi Cilecup-Surong Sampang-Bunin-		-ampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jangsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (II.3.) -ampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jangsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (III.1. dan IV.1.)	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain yang sah APBN, APB D, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Pemda, dan Swasta Kemend PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kebumen Purworejo- Karangmonjo- Wabes- Yogyakarta dan Jaringau Jalan Lintas Pulau Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Jemberlegi Glasap-Sarang							
		6) Jaringan Jalan Pengumpan Pulau Jawa yang menghubungkan Jabarta Depok Bogor	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (v...)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Keuren PU, Pemda, dan Swasta				
		7) Jaringan Jalan Pengumpan Pulau Jawa yang menghubungkan	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Keuren PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Gilimpek Buwakerta- Pardalarang	Nasional Di Pulau Jawa-Bali [V.2.]						
8)	Jaringan Jalan Pengumpulan Pulau Jawa yang menghubungkan Cileunyi Sumedang- Kadipaten- Pelurusau		Ramplan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingkat Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali [V.3.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemtu PU, Pemda, dan Swasta	█			
9)	Jaringan Jalan Pengumpulan Pulau Jawa yang menghubungkan Wanong- Jeruklegi		Ramplan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingkat Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali [V.4.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan Swasta	█			
10)	Jaringan Jalan Pengumpulan Pulau Jawa yang		Ramplan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tingkat Jaringan Jalan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan Swasta	█			

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		mengembangkan Pusat Rural	Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.5.)						
1.)	Jaringan Jalan Pengumpulan Pulau Jawa yang mengembangkan in-Semarang- Ungaran-Bawen		Rampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jangsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.6.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Pemda, dan Swasta	█			
2.)	Jaringan Jalan Pengumpulan Pulau Jawa yang mengembangkan di-Susung- Manglang- Sletu- Koyakarta		Rampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jangsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.7.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Pemda, dan Swasta	█			
3.)	Jaringan Jalan Pengumpulan Pulau Jawa yang		Rampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jangsi Jaringan Jalan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Pemda, dan Swasta	█			

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		mengembangkan n Yogyakarta- Prambanan- Klaten- Kertosono	Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.8.)						
	14) Jaringan Jalan Pengunungan Pulau Jawa yang mengembangkan di Gurupol- Malang		Sampitan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.9)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	15) Jaringan Jalan Pulau Madura yang mengembangkan di Kamal- Bangkalan- Sampang- Pamekasan Sumenep Kudatunggal		Sampitan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (VI.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		16) Jaringan Jalan Lintas Bali Selatan yang menghubungkan Gilimanuk-Cukak-Negaus-Jabatana Mengwilau-Beringkit-Depasar-Tehpati-Kusamba-Anyemreh-Padangbai	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (VII.1.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				
1.1.2. Jaringan Jalan Kolektor Primer									
1.1.2.a. Pemantapan Jaringan Jalan Kolektor Primer									
		1) Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan Cilegon, Labuan Pangdajiang, Rangkas Bitung Cipanas-Rogor	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (VII.1.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	2) Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan Wongsorejo-Kawulo		Rampian IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (L.5.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				
	3) Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Jawa yang menghubungkan Buulu-Bayumas-Banjarnegara-Wonosobo-Temanggung-Serang		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (L.5.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				
	4) Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Labuan Cibirung-Simpang-Bayah-		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (L.5.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Palabuhanratu-Bachagau-Sumade- Tegalluleud dan Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Bulus Daruati Palabuhanratu-Bachagau-Sumade- Tegalluleud							
	5) Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa/Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Kelupatengay		Suratpita IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Peningkatan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (III.3.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Keinva PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Pangandaran Kalipucang- Jemberkezi							
	G) Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Yogyakarta Wonorejo- Kongsong (Baran)- Pacitan- Hadiwarno- Panggul- Trenggalek Tulung Agung Blitar- Kepanjen Talek Jati- Lamajang- Wonorejo- Jember- Glumut- Banyuwangi dan Jaringan Jalan		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tinggi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali III.4. dan IV.4.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kelemb. PU, Pemda. dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Limas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menggabungkan Komplek Karang-Pulau-Puduhurug Panggul							
	7) Jaringan Jalan Limas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Talok Jarit		-smpiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (V.5.)	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan Swasta				
	8) Jaringan Jalan Perumahan Pulau Jawa yang menghubungkan Serang-Pandeglang		-smpiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (V.6.)	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan Swasta				
	9) Jaringan Jalan Perumahan Pulau Jawa yang		-smpiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain	Kemren PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		menghubungkan Jakarta-Ciputat-Bogor	Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.1.1)	yang sah					
10)	Jaringan Jalan Pengurupan Pulau Jawa yang menghubungkan Ciawi-Puncak-Cianjur		Rampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.1.2)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemtu PU, Pemda, dan Swasta				
11)	Jaringan Jalan Pengurupan Pulau Jawa yang menghubungkan Lubetutu-Indramayu-Cirebon		Rampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.1.3)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemtu PU, Pemda, dan Swasta				
12)	Jaringan Jalan Pengurupan Pulau Jawa yang		Rampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemtu PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		mengembangkan Kajapohlah- Tasikmalaya- Puncol	Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.1.4.)						
	13) Jalinan Jalan Pengumpalan Pulau Jawa yang menghubungkan Ranjau-Kalipecutan		Sampitan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.1.5.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Seneco PU, Pemda, dan Swasta				
	14) Jalinan Jalan Pengumpalan Pulau Jawa yang menghubungkan Tripal-Slavi-Itupuk-Mibaraq-Waugou		Sampitan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.1.6.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Seneco PU, Pemda, dan Swasta				
	15) Jalinan Jalan Pengumpalan Pulau Jawa		Sampitan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	Seneco PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		yang mengembangkan di Jember, Purwokerto, Banyuwangi	Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.1.7.)	yang sah					
	16) Jaringan Jalan Pengunungan Pulau Jawa yang mengembangkan di Yogyakarta-Bantul-Gregras-Pasugitlis		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.1.8.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	17) Jaringan Jalan Pengunungan Pulau Jawa yang menghubungkan Tuban-Sudung Gresik		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.1.9.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	18) Jaringan Jalan Pengunungan Pulau Jawa		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		yang mengembangkan Wilayah-Bojonegara-Padangan-Angsat-Madiun-Caruburu	Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.20.)	yang sah					
	19) Jaringan Jalan Pengumpulan Pulau Jawa yang menghubungkan kekosong-kadiri Tulung Agung		Tamplan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.21.)	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				
	20) Jaringan Jalan Pengumpulan Pulau Jawa yang menghubungkan Mojokerto Gempol		Tamplan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.22.)	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
21)	Jaringan Jalan Pengumpulan Pulau Jawa yang membuncha ke Madag-kepulauan	Jaringan Jalan Pengumpulan Pulau Jawa yang membuncha ke Madag-kepulauan	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.23.)	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				
22)	Jaringan Jalan Pengumpulan Pulau Jawa yang membuncha ke Probolinggo-Waronejo	Jaringan Jalan Pengumpulan Pulau Jawa yang membuncha ke Probolinggo-Waronejo	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.24.)	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				
23)	Jaringan Jalan Pengumpulan Pulau Jawa yang membuncha ke Srono Muncar	Jaringan Jalan Pengumpulan Pulau Jawa yang membuncha ke Srono Muncar	Sampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (V.25.)	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				
24)	Jaringan Jalan Lintas Hali Utara yang	Jaringan Jalan Lintas Hali Utara yang	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		mengembangkan n Caklik-Sicmiri- Singaraja- Kubutambahan- Amilapama- Angutulu	Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (VII.1.1)	yang sah					
	25) Jaringan Jalan Pengmpian Pulau Bali yang mengembangkan u Bus, kota Singaraja- Mengwitau		Jempiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Augasi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (IX.1.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Keleto PU, Pmda, dan Swasta				
1.1.3.	Jaringan Jalan Strategis Nasional								
1.1.3.a	Pemantapan Jaringan Jalan Strategis Nasional	1) Jaringan Jalan Lintas Selatn Pulau Jawa/ Jaringan Jalan Lintas Pulau Selatan Pulau Jawa yang mengembangkan Tegalteul-	Jempiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Augasi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (III.3)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Keleto PU, Pmda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Cidatan Kancabhaya- Pamungbuk- Cipatujab- Kelapaenep							
	3)	Jaringan Jalan Lintas Turisti Selatan Pulau Jawa yang mencakup Sarang- Jadri-Wawar- karang- Congor Ringel Sawukku Poncosari Greyes	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali [V.7.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	3)	Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Parangtritis-	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali [V.8.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Tinggaratik Legundi- Kanjoro-Ranon- Tepas- -temukendel - Kungkop (Barat)							
4)		Jatringan Jalan Jamas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menyhubungkan Panggul-Pyigi- Tenggalek	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Anggaran Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.9.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren, PU, Pemda, dan Swasta				
5)		Jatringan Jalan Jamas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menyhubungkan Pulai-Marjo- Pantai Serang Wonogoro Setelagbitu Talak	Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Anggaran Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.10.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren, PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
6)	Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Jati-Puger-Sumberejo-Glenmore	Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Jati-Puger-Sumberejo-Glenmore	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.11.)	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan Swasta				
7)	Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Merak-Bujonegara-Cilegon	Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Merak-Bujonegara-Cilegon	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (V.26.)	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan Swasta				
8)	Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Cikande-Rangkasbitung	Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Cikande-Rangkasbitung	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (V.27.)	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
9)	Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Cipanas-Cikolek Besar	Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Tanggulang-Serpong Pamulang Ciputat	Rampian IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.28.)	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				
10)	Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Tanggulang-Serpong Pamulang Ciputat	Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Tanggulang-Serpong Pamulang Ciputat	Rampian IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.29.)	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				
11)	Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Cibadak Baghegan	Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Cibadak Baghegan	Rampian IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (V.31.)	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		12) Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Bantul-Katrabali-Cidamur	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggai Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.32.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Pemda, dan Swasta				
		13) Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Cilacap-Kuningan-Ciamis	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggai Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (V.33.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Pemda, dan Swasta				
		14) Jaringan Jalan Lintas Pantai Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggai Jaringan Jalan Nasional Di Pulau	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Pekalongan Wonorejo							
	15) Jaringan Jalan Lintas Puncak Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Rembang Blora Cepu-Padangan		Skemplan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.31.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sementra PU, Pemda, dan Swasta				
	16) Jaringan Jalan Lintas Puncak Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Madhya-Ponorejo-Trenggalek		Skemplan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.36.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sementra PU, Pemda, dan Swasta				
	17) Jaringan Jalan Lintas Puncak Selatan Pulau Jawa yang menghubungkan Situbondo-		Skemplan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (V.37.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Gardhiatank Manyawangi							
	18) Jaringan Jalan Pulau Maulura yang menghubungkan Panglengan Tanjung Bumi		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (M.2.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan Swasta				
1.1.4.	Jaringan Jalan Bebas Hambatan								
1.1.4.a.	Pemantapan Jaringan Jalan Bebas Hambatan	1) Jaringan Jalan Bebas Hambatan di kota yang menghubungkan Tanjung-Merah	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (M.1.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan Swasta				
		2) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Jakarta-Bogor-Jawa (Jagorawi)	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (K.2.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	3) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Jakarta-Cikampek		Rampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (K.3.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemari PI, Pemda, dan Swasta				
	4) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Cikampek-Padalarang		Rampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (K.4.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemari PI, Pemda, dan Swasta				
	5) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Padalarang-Cileunyi		Rampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (K.5.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemari PI, Pemda, dan Swasta				
	6) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam kota yang menghubungkan		Rampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemari PI, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Tomang Grogol Pilir	Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.1.)						
	1) Jalinan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Jabatata Tangerang		-smpiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sementra PU, Pemda, dan Swasta				
	8) Jalinan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Pondok Aren Dhijami		-smpiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.9.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sementra PU, Pemda, dan Swasta				
	9) Jalinan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Tomang Cawang		-smpiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.10.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sementra PU, Pemda, dan Swasta				
	10) Jalinan Jalan Bebas Hambatan		-smpiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.10.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sementra PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Dalam Kota yang mengembangkan kawasan Cawang- Tanjung Priuk (L. Wiyoto Wiyono, M.Sc.)	Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.11.)	yang sah					
	1.) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Terminal Tanjung Priuk (Harbor Road)	1.) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Terminal Tanjung Priuk (Harbor Road)	1.) Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.12.)	APPN, APB dan/ atau sumber lain yang sah	Kemian PI, Pemda, dan Swasta				
	12) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang mengembangkan kawasan Cawang- Tanjung Priuk (Harbor Road)	12) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang mengembangkan kawasan Cawang- Tanjung Priuk (Harbor Road)	12) Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.12.)	APDA, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemian PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Prof. Dr. Soedjatmo							
	13) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang mengembangkan Potok Arus Sampung	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Potok Arus Sampung	Sampitan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (XI.14.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Pemda, dan Swasta				
	14) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Kota-kota di Pulau Jawa	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Kota-kota di Pulau Jawa	Sampitan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.15.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Pemda, dan Swasta				
	15) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang	Sampitan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		mengembangkan n. Jakarta Timur Ring Road I; Pondok Pinang- Taman Mini, Tanjung Mui IC- Harau Raya, Cikunir- Cakung, Pondok Puang Ujung	(Jawa Bali (XI.15.)						
16)	Jalur Jarak Bebas Dalam Kota yang mengembangkan Jalur Outer Ring Road I; Ujung-aron Jermik, Cakung, Cilincing, Bekas Raya- Cikunir, Ardon		-empiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jangsi Jaringan Jalan Musiial Di Pulau Jawa Bali (XI.17.)	APBA, APB D, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Jember Perjuangan)							
	17) Jalinan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang meningkatkan Pedalarang-Cakung	Jember	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (XI.18.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Pemda, dan Swasta				
	18) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Palimanan-Cibon/Candi	Jember	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.19.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Pemda, dan Swasta				
	19) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang	Jember	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		menghimpun n Semarang, Sekel A, B, dan C	Jawa Bali (XI.20.)						
	20) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghimpun ke Surabaya-Gempol	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Surabaya-Gresik	Sampitan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.21.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan Swasta				
	21) Jaringan Jalan Bebas Hambatan yang menghubungkan Surabaya-Gresik	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Surabaya-Gresik	Sampitan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.22.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan Swasta				
1.1.4.b.	Pengembangan Jaringan Jalan Bebas Hambatan	1) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Aulakota yang	Sampitan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	Kemren PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		menghubungkan Cilacap-Bojonegara	Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.6.)	yang sah					
	2) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Ciawi Sukabumi		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tinggi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.7.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemeta PU, Pemda, dan Swasta				
	3) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antar kota yang menghubungkan Sukabumi Cianjur		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tinggi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.8.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemeta PU, Pemda, dan Swasta				
	4) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Cianjur- Padalarang		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tinggi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.9.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemeta PU, Pemda, dan Swasta				
	5) Jaringan Jalan Bebas Hambatan		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemeta PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Antarkora yang menghubungkan Cilacap-Sumedang-Dawuan	Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.1.0.)	sumber lain yang sah	Swasta				
	6) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkora yang menghubungkan Cikopo-Palimanan		Rampitan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.1.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	7) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkora yang menghubungkan Kanci-Pejastu		Rampitan III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.1.2.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemtu PU, Pemda, dan Swasta				
	8) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkora yang menghubungkan Pejagan-Pemalang		Rampitan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.1.3.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	9) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Pemalang-Harang		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.2.4)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan Swasta	■			
	10) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Semarang-Batang		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.2.5)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan Swasta	■			
	11) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Semarang-Demak		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.2.6)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan Swasta	■			
	12) Jaringan Jalan Bebas Hambatan		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan Swasta	■			

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Antarkota yang mengembangkan Semarang-Solo	Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.7.4)	yang sah					
13)	Jatigayu-Juluw Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Yogyakarta - Solo	Jatigayu-Juluw Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Yogyakarta - Solo	Sampitan III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.7.6.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Keener, PU, Pemda, dan Swasta				
14)	Jatigayu-Juluw Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Yogyakarta - Bawen	Jatigayu-Juluw Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Yogyakarta - Bawen	Sampitan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.7.7.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Keener, PU, Pemda, dan Swasta				
15)	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan	Sampitan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Keener, PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		n Solo Mantingan	Jawa Bali (X.20.1)						
16)	Jatigau Juluu Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Mantingan Ngawi	Jatigau Juluu Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Ngawi- Kertosono	Kumpulan III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Zungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (X.21.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	seineu, PU, Pemda, dan Swasta				
17)	Jatigau Juluu Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Ngawi- Kertosono	Jatigau Juluu Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Ngawi- Kertosono	Kumpulan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Zungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.22.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	seineu, PU, Pemda, dan Swasta				
18)	Jatigau Juluu Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Kertosono- Mojokerto	Jatigau Juluu Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Kertosono- Mojokerto	Kumpulan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Zungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.22.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	seineu, PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
19)	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Mojokerto-Surabaya	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Mojokerto-Surabaya	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.24.)	APBN, APB, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				
20)	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Surabaya-Madiara	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Surabaya-Madiara	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.25.)	APBN, APB, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				
21)	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Genepol-Pandaan	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Genepol-Pandaan	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (X.26.)	APBN, APB, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				
22)	Jaringan Jalan Bebas	Jaringan Jalan Bebas	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi	APBN, APB, dan/ atau	Kemien PU, Pemda, dan				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Hambatan Antarkota yang menghimpaka di Paudaan- Malang	Perwujudan Tunggi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.27.)	sumber lain yang sah	Swasta				
	23) Jaringan Jalan Bebas Antarkota yang menghimpaka di Gempol- Pasuruan		Ramplan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.28.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen P1, Pemda, dan Swasta				
	24) Jaringan Jalan Bebas Antarkota yang menghimpaka di Lasur utu- Probolinggo		Ramplan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.29.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen P1, Pemda, dan Swasta				
	25) Jaringan Jalan Bebas Antarkota yang		Ramplan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggi Jaringan Jalan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen P1, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		mengembangkan Perhubungan n Prohaltinggo- Banyuwangi	Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.30.)						
26)	Jalur Debus Lambatan Antarkota yang mengembangkan n Gresik-Yuban	Jalur Debus Lambatan Antarkota yang mengembangkan n Gresik-Yuban	Kampitan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tinggi Jalur Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.31.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Keinu, PU, Pemda, dan Swasta				
27)	Jalur Debus Lambatan Antarkota yang mengembangkan n Cilacap- Nagrek	Jalur Debus Lambatan Antarkota yang mengembangkan n Cilacap- Nagrek	Kampitan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tinggi Jalur Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.32.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Keinu, PU, Pemda, dan Swasta				
28)	Jalur Debus Lambatan Antarkota yang mengembangkan n Nagrek- Ciatris	Jalur Debus Lambatan Antarkota yang mengembangkan n Nagrek- Ciatris	Kampitan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tinggi Jalur Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.33.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Keinu, PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
29)	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Pejagsu- Cilacap	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Pejagsu- Cilacap	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.34.)	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				
30)	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Cilacap- Yogyakarta	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Cilacap- Yogyakarta	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.35.)	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				
31)	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Demak Tuban	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan Demak Tuban	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (X.36.)	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				
32)	Jaringan Jalan Bebas Hambatan	Jaringan Jalan Bebas Hambatan	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Antarkota yang menghubungkan n Ciampis- Cilacap	Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.07.1)	yang sah					
	33) Jalinan Jalan Bebas Hambatan Antarkota yang menghubungkan n, Jember, Cikarang, Karawang		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.08.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren, PU, Pemda, dan Swasta				
	34) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan ke Kemayoran, Kampong Melayu		Lampiran III: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (X.12.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren, PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
35)	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Sumber Rawa Buaya-Batu Ceper	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Sumber Rawa Buaya-Batu Ceper	Rampunan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jungsji Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.3.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan Swasta				
36)	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Pasar Minggu Casablanca	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Pasar Minggu Casablanca	Rampunan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jungsji Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (XI.4.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan Swasta				
37)	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan	Rampunan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jungsji Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.5.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		n Sumber Pulau Gehang- Tambelang							
38)	Jatuguwu Jalan Debas Hambatan Dalam Kota yang menyebabkan in Ulujiambi- Tasuti Abang	Jatuguwu Jalan Debas Hambatan Dalam Kota yang menyebabkan in Ulujiambi- Tasuti Abang	Sampitan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tinggi Jatuguwu Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali [XI.6.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemtu PU, Pemda, dan Swasta				
39)	Jatuguwu Jalan Debas Hambatan Dalam Kota yang menyebabkan in Duri Pulau- Kampung Melayu	Jatuguwu Jalan Debas Hambatan Dalam Kota yang menyebabkan in Duri Pulau- Kampung Melayu	Sampitan IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tinggi Jatuguwu Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali [XI.7.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemtu PU, Pemda, dan Swasta				
40)	Jatuguwu Jalan Debas	Jatuguwu Jalan Debas	Sampitan IV: Strategi Operasionalisasi	APBN, APB), dan/ atau	Kemtu PU, Pemda, dan				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Hambatan Dalam Kota yang menghambat-kan Berkas-ting- Kumpang- Melayu	Perwujudan Tinggi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XL.2.1.)	sumber lain yang sah	Swasta				
	4.) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghambat-kan Jabatka Outer Ring Road II: Kurnal Teluk Naga-Batu-Cepet, Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran, Kunciran		Lampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (XL.2.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Asncom PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Serpong, Serpong-Cinere, Cinere- Cimanggis, Cimanggis- Cibitung, Cibitung Cilincing							
	42) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Depok dan Antasari		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (XI.25.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan Swasta				
	43) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota Bogor Ring Road		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (XI.25.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
44)	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang meraghubungka n Terusut u Pasisir-Ujung Bening Cilenisi	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang meraghubungka n Terusut u Pasisir-Ujung Bening Cilenisi	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.27.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Pemda, dan Swasta				
45)	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang meraghubungka n Ujung Berung Gedebage- Malaya	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang meraghubungka n Ujung Berung Gedebage- Malaya	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa Bali (XI.28.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Pemda, dan Swasta				
16)	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota	Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		yang membunpka n Saurang-Pasir Kota	Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.29.j)						
	17) Jatiagung Juluu Bebas Hambatan Dalam Kota yang membunpka n Waru Jilidjal-Wonokromo-Tanjung Perak		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.30.j)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	18) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang membunpka n SS Waru Bandan Juanda		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.31.j)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
49)	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Bandung dan Bandung Utara	Tanjung Perak	Rampian IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.32.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Pemda, dan Swasta				
50)	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Kota Tanah Lot Sekeloa	Tanjung Perak	Rampian IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.33.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Pemda, dan Swasta				
51)	Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan	Tanjung Perak	Rampian IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.34.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		n Tolipadi Kusamba- Padangbai							
	52) Jalinan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Pakuratan-Soka		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tinggi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.35.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemtu PU, Pemda, dan Swasta				
	53) Jalinan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghubungkan Kecamatan Pakuratan		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tinggi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.35.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemtu PU, Pemda, dan Swasta				
	54) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota		Sampiran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tinggi Jaringan Jalan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemtu PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		yang menghimpunkan Gifinamuk-Negara.	Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.37.)						
55)	Jalur Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghimpunkan Serangan-Banca	Jalur Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghimpunkan Serangan-Banca	Sampuran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.38.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Pemda, dan Swasta				
56)	Jalur Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghimpunkan Serangan-Tolpatu	Jalur Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang menghimpunkan Serangan-Tolpatu	Sampuran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.39.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Pemda, dan Swasta				
57)	Jalur Jalan Bebas Hambatan	Jalur Jalan Bebas Hambatan	Sampuran IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	Kemend PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Dalam Kota yang membungkakan Gunung-Kerinci-Batu-Purnama	Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.40.)	yang sah					
	58) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang membungkakan Kota Bandar Udara Ngurah Rai		Pamphlet IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.41.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				
	59) Jaringan Jalan Bebas Hambatan Dalam Kota yang membungkakan Kota		Pamphlet IV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional Di Pulau Jawa-Bali (XI.42.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
Dempasar Tahpahi									
1.2.	Jaringan Jalur Kereta Api Nasional								
1.2.1.	Pemantapan jalur Kereta Api Antarkota								
1.2.1.a.	Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Utara Pulau Jawa	Jakarta- Cikarup- Jatibarang Cirebon Tegol Pekalongan Semarang- Kudus Rembang Bojonegara- Surabaya	Lampiran V Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali Bali [1.1.1.]	APDN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sektor PU, Kementerian, Penda, dan Swasta				
1.2.1.b.	Jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan Pulau Jawa	1) Merak Cilgon Serang Rangkas Bitung Jakarta 2) Cirebon Purwokerto Kroya	Lampiran V; Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.1.] 3) Cirebon Purwokerto Kroya	APDN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sektor PU, Kementerian, Penda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
3)	Labuan-Pandeglang Rangkas Bitung		Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.4.1] -smpiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali [1.3.5.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sement PU, Kementerian, Pemda, dan Swasta				
4)	Anjer-Kidul-Gilegon		-smpiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali [1.3.4.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sement PU, sementub, Pemda, dan Swasta				
5)	Bojor-Sukabungur-Changur Padalarang		-smpiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.5.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sement PU, Kementerian, Pemda, dan Swasta				
6)	Indramayu-Jatibarang		-smpiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	sement PU, sementub, Pemda, dan				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
			Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.6.]	yang sah	Swasta				
7)	Kadipaten Cirebon		Keputusan Y: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.7.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendu, dan Pemda, dan Swasta				
8)	Cikajang Cibatu		Keputusan Y: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.7.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendu, dan Pemda, dan Swasta				
9)	Gahung Tasekmalaya		Keputusan Y: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.8.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendu, dan Pemda, dan Swasta				
10)	Cijulang Pangandaran		Keputusan Y: Strategi Operasionalisasi	APBN, APBD, dan/ atau	Kemen PU, Kemendu,				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Banjir	Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.10.]	sumber lain yang sah	Pemda, dan Swasta				
		11) Cilacap Muos	Sampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.11.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Keinetu, PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
		12) Tegal Prupuk	Sampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.12.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Keinetutub, Pemda, dan Swasta				
		13) Wuwosolo Pimvolkerro	Sampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.13.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Keinetu, PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERJUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
14)	Purworejo Kudus	Purworejo Kudus	Sampitan V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.14.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kemernub, Pemda, dan Swasta				
15)	Purabaya, Secang	Purabaya, Secang	Sampitan V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.15.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kemernub, Pemda, dan Swasta				
16)	Wongiri Surakarta	Wongiri Surakarta	Sampitan V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.16.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kemernub, Pemda, dan Swasta				
17)	Kedungjati Gundih	Kedungjati Gundih	Sampitan V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.17.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kemernub, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
18)	Gamblingan-Surakarta		Jawa Bali (1.3.17.) Rampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali (1.3.18.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kementerian Pemuda, dan Swasta				
19)	Cupu-Blores- Purwodadi- Demak- Kudus- Jombang- Rembang		Rampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali (1.3.19.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kementerian Pemuda, dan Swasta				
20)	Lasem-Jatiroto- Boyonegara		Rampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali (1.3.20.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kementerian Pemuda, dan Swasta				
21)	Slatung- Madhu		Rampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kementerian Pemuda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
22)	Kertosono-Kediri Tulungagung Blitar Malang Bangli	Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.21.] Rampitan V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali [1.3.22.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sementara, PU, Kementerian, Pemda, dan Swasta					
23)	Panarukan- Situbondo Kalisar	Rampitan V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali [1.3.23.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sementara, PU, sementara, Pemda, dan Swasta					
24)	Surabaya- Bangli Probolinggo Jember Banyuwangi	Rampitan V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.24.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sementara, PU, Kementerian, Pemda, dan Swasta					
25)	Malang-Jampit	Rampitan V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	sementara, PU, sementara, Pemda, dan					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
			Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.25.]	yang sah	Swasta				
	26) Kunal Dangkalau Pamekasan Surenep		Kampitan V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.26.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemeta PU, Kemendub, Pemda, dan Swasta				
	27) Aoyer sidul Labman Puntubung		Kampitan V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.27.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemeta PU, Kemendub, Pemda, dan Swasta				
1.2.2.	Pengembangan Jalur Kereta Api Antarkota								
1.2.2.a.	Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Jawa	Jakarta - Cikampek - Purwakarta - Bandung - Tasikmalaya - Banjar Kroya Kebumen	Kampitan V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali [1.2.1.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemeta PU, Kemendub, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.2.2.b.	Jaringan jalur kereta api lintas utara-selatan (pengumpulan) Pulau Jawa	Kudusarjo Yogyakarta- Klaten- Surabaya- Madhin- Kertosono- Jombang Surabaya	Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali (1.3.28.)	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kemrenmb, Pemda, dan Swasta				
2)	Klarasifikasi- Karsakok- Tanjungasri- Kertajati- Kadipaten		Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali (1.3.29.)	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kemrenmb, Pemda, dan Swasta				
3)	Cikampek- Pelabuhan Cilamaya		Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan	APBN, APB D, dan/ atau sumber lain	Kemren PU, Kemrenmb, Pemda, dan				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
			.Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.30.]	yang sah	Swasta				
1)	Kedungjati Anburawa Magelang Yogyakarta		.Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.31.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemeta PU, Kemendub, Pemda, dan Swasta				
2)	Reumbang Blora Cepu		.Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.32.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemeta PU, Kemendub, Pemda, dan Swasta				
3)	Kudus Balaban		.Lampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.33.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemeta PU, Kemendub, Pemda, dan Swasta				
7)	Borobudur Yogyakarta		.Lampiran V: Strategi Operasionalisasi	APBN, APBD, dan/ atau	Kemeta PU, Kemendub, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Parangmitis	Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.34.]	sumber lain yang sah	Pemda, dan Swasta				
8)	Tudjuh Babat Jombang		Sampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.35.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kejnta, PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
9)	Jarmajang Rambipuji		Sampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.36.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
10)	Kauual Bangkalan Tanjung Bumi		Sampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.37.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kejnta, PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.2.2.c.	Jalur kereta api di Pulau Bali	1) Gilimanuk Negara-Tabanan-Depasars-Amlapura	Sampitan V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.38.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendub, Pemda, dan Swasta				
		2) Singaraja Tabanan	Sampitan V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.39.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendub, Pemda, dan Swasta				
		3) Kuthumamban Bangli Gianyar	Sampitan V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.40.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendub, Pemda, dan Swasta				
1.2.3.	Pengembangan dan Pemantapan Kereta Api Perkotaan	1) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di PAN Kawasan Perkolatan	Sampitan V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali [1.3.40.]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendub, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Jahodetabalc 2) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di PKN Kawasatu Perkhman Bandung Raya	Jawa Bali (II.1) Rampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali (II.2)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemenc PU, Aemencub, Pemda, dan Swasta				
		3) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di PKN Yogyakarta PKN Surakarta	Jawa Bali (II.3) Rampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali (II.3)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemenc PU, Aemencub, Pemda, dan Swasta				
		4) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di PKN Kawasatu Perkhman Keduwasepur	Jawa Bali (II.4) Rampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali (II.4)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemenc PU, Aemencub, Pemda, dan Swasta				
		5) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di PKN Kawasatu	Jawa Bali (II.5) Rampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa Bali (II.5)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemenc PU, Aemencub, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Perkembangan Growthkoneksi la	Nasional Di Pulau Jawa-Bali (II.5)						
	5) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di PKN Malang		Kampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (II.6)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemeta PU, Kementerian, Pemda, dan Swasta				
	6) Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan di PKN Kawasan Perkotaan Sarbagra		Kampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (II.7)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemeta PU, Kementerian, Pemda, dan Swasta				
1.2.5.	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Interkoneksi	1) Jaringan Jalur Kereta Api di Semburan Sela Sunda	Kampiran V: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Pulau Jawa-Bali (III.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemeta PU, Kementerian, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.3.	Jaringan Transportasi Penyeberangan								
1.3.1.	Pelabuhan Penyeberangan								
1.3.1.a.	Pemantapan dan Penguatan Pelabuhan Penyeberangan	1) Pelabuhan Penyeberangan di Kota Cilacap	Rampitan VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan II.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendikbud, dan Pemda, dan Swasta				
		2) Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Banyuwangi	Rampitan VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan II.2)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendikbud, dan Pemda, dan Swasta				
		3) Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Jember	Rampitan VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan II.3)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendikbud, dan Pemda, dan Swasta				
		4) Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Karangasem	Rampitan VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan II.4)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendikbud, dan Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
5)	Pelabuhan Pembertangan di Kabupaten Semarang		Sampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Pembertangan II.5)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendub, Pemda, dan Swasta				
6)	Pelabuhan Pembertangan di Kota Jember		Sampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Pembertangan II.6)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendub, Pemda, dan Swasta				
7)	Pelabuhan Pembertangan di Kabupaten Kendal		Sampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Pembertangan II.7)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendub, Pemda, dan Swasta				
8)	Pelabuhan Pembertangan di Kota Semarang		Sampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Pembertangan II.8)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendub, Pemda, dan Swasta				
9)	Pelabuhan Pembertangan di Kota Surabaya		Sampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Pembertangan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	Kemen PU, Kemendub, Pemda, dan				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
			Jaringan Transportasi Penyeberangan (I.9)	yang sah	Swasta				
	10) Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Lamongan		Samapta VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (I.10)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sementra PU, Kementerian, Pemda, dan Swasta				
	11) Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Badung		Samapta VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (I.11)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sementra PU, sementra, Pemda, dan Swasta				
1.3.2.	Lintas Penyeberangan								
1.3.2.a.	Pemantapan dan Pengembangan Lintas Penyeberangan								
	1) Jamsas Penyeberangan Banyuwangi-Gilusauk	Jamsas	Samapta VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (I.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Kementerian, Pemda, dan Swasta				
	2) Jamsas Penyeberangan Merak-Palabuhan	Jamsas	Samapta VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (I.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemien PU, Kementerian, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		(Pulau Sumatera)	Penyeberangan (II.2)						
3)	Luas penyeberangan Pulaugabit Jember (Pulau Lombok)		<p>Sampan VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.3)</p> <p>Sampan VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.3)</p>	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sement PU, Kemendub, Pemda, dan Swasta				
4)	Luas penyeberangan Bujuragung Pontianak (Pulau Kalimantan) melalui Pangkat Pinang dan Tanjung Paudau (Pulau Sumatra)		<p>Sampan VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.4)</p>	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sement PU, sementub, Pemda, dan Swasta				
5)	Luas penyeberangan Gerbangkertosisila-Banjarnasin		<p>Sampan VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.4)</p>	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, sementub, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		(Pulau Kalimantan)	Penyeberangan (II.5)						
6)	penyeberangan Tanjung Priok Pangkal Pinang (Pulau Sumatera)	Lintas penyeberangan Semarang Banjarnegara (Pulau Kalimantan)	-smpiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.6)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sement PU, Kementerian, Pemda, dan Swasta				
7)	Lintas penyeberangan Semarang Banjarnegara (Pulau Kalimantan)	Lintas penyeberangan Semarang Banjarnegara (Pulau Kalimantan)	-smpiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.7)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sement PU, Kementerian, Pemda, dan Swasta				
8)	Lintas penyeberangan Semarang Sampir (Pulau Kalimantan)	Lintas penyeberangan Semarang Sampir (Pulau Kalimantan)	-smpiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.8)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sement PU, Kementerian, Pemda, dan Swasta				
9)	Lintas penyeberangan Semarang Pontianak	Lintas penyeberangan Semarang Pontianak	-smpiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.9)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sement PU, Kementerian, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		(Puluhan Kalimantan)	Penyeberangan (II.9)						
10)	Lintas penyeberangan Kuala Kunud (Puluhan Kalimantan)		-smpitan VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.10)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sementra PU, Kementerian, Pemda, dan Swasta				
11)	Lintas penyeberangan Lamongan (Gerbangkepom silih) Balikpapan (Puluhan Kalimantan)		-smpitan VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.11)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sementra PU, sementra, Pemda, dan Swasta				
12)	Lintas penyeberangan Lamongan (Gerbangkepom silih) Takalar (Puluhan Sulawesi)		-smpitan VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.12)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	sementra PU, Kementerian, Pemda, dan Swasta				
13)	Lintas penyeberangan Lamongan		-smpitan VI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	sementra PU, Kementerian, Pemda, dan				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		(Gerbang Kentoso- sila)-Bima (Pulan Sumabawa)- Kupang (Pulan Titoni)	Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.13)	yang sah	S swasta				
14)	Lintas penyeberangan Jepara- Karimunjawa (Kabupaten Jepara)		Sampitan VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Aungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.14)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
15)	Lintas penyeberangan Gresik-Pulan Bawatu (Kabupaten Gresik)		Sampitan VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.14)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				
16)	Lintas penyeberangan Jangkak (Kabupaten Situbondo)-		Sampitan VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Aungsi Jaringan Transportasi Penyeberangan (II.16)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kemenhub, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep)							
17)	Lulus penyeberangan Pulau Sapudi (Kabupaten Sumenep)		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tinggi Jaringan Transportasi Penyeberangan III. 17)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemeta PU, Kemendub, Pemda, dan Swasta				
18)	Lulus penyeberangan Jangkur (Kabupaten Sambonda) Kahanzer (Kabupaten Sumenep)		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tinggi Jaringan Transportasi Penyeberangan III. 18)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemeta PU, Kemendub, Pemda, dan Swasta				
19)	Lulus penyeberangan Kahanzer-kanagan (Kabupaten Sumenep)		Lampiran VI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tinggi Jaringan Transportasi Penyeberangan III. 19)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemeta PU, Kemendub, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
2.	Sistem Transportasi Lant								
2.1.	Tatanan Keplabahanan								
2.1.1.	Pelabahan Internasional (Utama)								
2.1.1.a	Pemantapan Pelabahan Utama	1. Pelabuhan Tanjung Uruk dalam satu sistem dengan Pelabuhan Bojonegara dan Pelabuhan Cilamaya, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan Tanjung Lela, Pelabuhan Tanjung Perak dalam satu sistem dengan Pelabuhan Tanjung Bumi-Pangung Bahu Lautan	Lampiran VII Strategi Operasionalisasi Pelabuhan Tanjung Perak di Pulau Jawa Bali Bali (I, I)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Keturutub, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERJUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
2.1.1.b	Pengembangan Pelabuhan Utama	2. Pelabuhan Ajuana (Cirihari) Pelabuhan Remas	Lampiran VII: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Pelabuhan di Pulau Jawa-Bali (II.2) Lampiran VII: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Pelabuhan di Pulau Jawa-Bali (II.6)	APRN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendih, Pemda, dan Swasta.				
2.1.2.	Pelabuhan Nasional (Penggumpul)								
2.1.2.a.	Pemantapan Pelabuhan Pengumpul	Pelabuhan Gresik	Lampiran VII: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Pelabuhan di Pulau Jawa-Bali (II.1)	APRN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendih, Pemda, dan Swasta.				
2.1.2.b.	Pengembangan Pelabuhan Pengumpul	1. Pelabuhan Merak	Lampiran VII: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Pelabuhan di Pulau Jawa-Bali (II.3)	APRN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemendih, Pemda, dan Swasta.				
		5. Pelabuhan Branta	Lampiran VII: Strategi Operasionalisasi	APRN, APBD, dan/atau	Kemen PU, Kemendih,				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
3.	Sistem Transportasi Udara								
3.1.	Bandar Udara Pusat Penycebahan (Pengumpul)								
3.1.1.	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Primer	Bandar Udara Soekarno-Hatta, Bandar Udara Juanda, dan Bandar Udara Ngurah Rai	Lampiran VIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggal Bandar Udara di Pulau Jawa-Bali (1.1)	APRN, APBD, dan/atau sumber lain yang satu	Kemren PU, Kemcubuh, Pemda, dan Swasta				
3.1.1.a.	Pemantapan Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Primer								
3.1.2.	Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder	Bandar Udara Adisugipto dalam satu sistem dengan Bandar Udara Adi Sumarmo, Bandar Udara Majalengka, dan Bandar Udara Atunad Yahi	Lampiran VIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggal Bandar Udara di Pulau Jawa Bali (1.1)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang satu	Kemren PU, Kemcubuh, Pemda, dan Swasta				
3.1.2.a.	Pemantapan Bandar Udara Pengumpul dengan Skala Pelayanan Sekunder								

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		<p>Nagrak Rogor Gunung Putri, Rogor-Cibinong, Cilamaya-Jegal Gedec, Subhang- Cikampek, Isul Jawa, Cilamaya, Cemas-Cilamaya, Cemas Indragayuh, Jatiwangi Indramayu, Jatiwangi- Cirebon, Jatiwangi- Palimanan, Cirebon Muara Belahi, Kadipaten Cirebon, Seurung Cirebon, Semarang-Cresik, Kalimantan</p>	<p>114., 115., 116., 117., 118., 119., 120., 121., 122., 123., 124., 125., 126., 127., dan 128.)</p>						

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		<p>Timur, Semarang, Laut, Jawa-Cepu, Pagarunggan-Porong, Porong-Surahaya, Laut Jawa-Gresik, Tuban-Gresik, Surabaya-Kertosono Kediri, Kertosono Kediri, Kediri, Madiun, Porong-Malang, Porong-Panjinan-Probolinggo, dan Selat Madura-Pasuruan.</p>							
2.		Unit pemroses Gas Alam Cair (LNG) berupa floating Storage and Regasification Unit (FSRU) di Laut	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan -Jungsi Stasiun Jaringau Energi Nasional di Pulau Jawa Juli 1.29.	APRN, APBD, dan/ atau sumber lain yang ada	Kemend ESDM, Kemend PU, Kemend, PLN, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Jawa sebelah utara (Ciklik Jakarta dan di Laut Jawa sebelah barat, Jember serta prasastua dan sarana untuk penyangkalan pasokan gas bumi di Jawa Timur dan Jawa Barat, UAGG <i>Sambetabag</i> Temiritani)	dan I.30.)						
2.	Pembangkit Tenaga Listrik								
2.1.	Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik energi baru dan terbarukan	1. Pembangkit listrik tenaga pasang surut (PLTTS) di NGT Bujuregara, DITGUMuara Karang, DITGU Tanjung Priok, DITGU Muara Tawar, P.IGU	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan "bungsi Sistem Jarkitagau Energi Nasional" di Pulau Jawa Bali [11.1]	APRN, APBD, dan/ atau sumber lain yang satu	Kemen ESDM, Kencana PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Giliranang Lecrinindo, PLUGAU Bekasi, dan PLUGU Cepu							
	2.	Pembangkit Listrik tenaga gas (PLTG) Sunyaragi	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tungsi Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali M.2.1	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kerucut ESDM, Kemen PU, Pemda, dan Swasta				
	3.	Pembangkit Listrik tenaga uap (PLTU) Tanjung Jati A, B, C, PLTU Surabaya, PLTU Sragung, PLTU Jabonhan, PLTU Lontar, PLTU Pakabulauratu, PLTU Indramayu Baru, PLTU Indramayu, PLTU	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tungsi Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali M.3.1	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kerucut ESDM, Kemen PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Jawa Barat Baru, PTU Cilacap, PTU Cilacap Baru, Adipala, PTU Jawa Tengah Baru, PTU Jember, PTU Tjati A, PTU Ganti, PTU Pasuruan, PTU Paiton, PTU Jawa Timur Selatan, PTU Madura, PTU Tanjung Awar-awar, PTU Pacitan, PTU Delang, PTU Bali Timur, dan PTU Cahangan Dawang							
4.	Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Jawa Barat, PTU		Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sistem Jaringan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen ES-M, Kencana PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Endut, PLTP Bantekwang, PLTP Cisolek- Cibukarame, PLTP Salak, PLTP Kaunojsung 1-6, PLTP Kuraha 1-4, PLTP Drejat 2-4, PLTP Pamaha 1-4, PLTP Cibuni, PLTP Wayang Windu 3 4, PLTP Tangkuban Barabu 1, PLTP Palandayan, PLTP Guci, PLTP Bauradeta, PLTP Ungaran, PLTP Diering 1-3, PLTP Yaug Agungpuro, PLTP Willis/Ngehel, PLTP Ijen, dan PLTP Bedugul 1-4	Energi Nasional di Bidang Jawa-Hali (II.4.1)						

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
5.	Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Upper Cisokean, PLTA Jatigede, PLTA Rajasaadala, dan PLTA Kalikaula	Pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Upper Cisokean, PLTA Jatigede, PLTA Rajasaadala, dan PLTA Kalikaula	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Bungsi Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali (II.5.)	APRM, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Pemda, dan Swasta.				
6.	Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan/ atau pembangkit listrik tenaga angin (PLTB) di Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimunjawa, Pulau Bawean, Pulau Sapudi, Pulau Kaas, Pulau Kangran, dan Pulau Nusa Purida	Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan/ atau pembangkit listrik tenaga angin (PLTB) di Kepulauan Seribu, Kepulauan Karimunjawa, Pulau Bawean, Pulau Sapudi, Pulau Kaas, Pulau Kangran, dan Pulau Nusa Purida	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Bungsi Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali (II.6.)	APRM, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen ESDM, Kemen PU, Pemda, dan Swasta.				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
3.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik								
3.1.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Seluruh Pulau Jawa-Bali dan antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera serta Pulau Kalimantan	1. Jaringan transmisi tenaga listrik seluruh Pulau Jawa-Bali 2. Jaringan transmisi tenaga listrik antara Pulau Jawa-Bali dan Pulau Sumatera serta Pulau Kalimantan	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugasi Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali III.3.1.1	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen ES-M, Ketu PU, Pemda, dan Swasta				
3.2.	Rehabilitasi Jaringan Transmisi Pantai Utara Jawa	Jaringan transmisi tenaga listrik Surabaya-Cilegon Cilacap Purwokarna-Bandung Kuningan-Ututastu-	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugasi Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali III.3.1.2.1	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen ES-M, Ketu PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
3.3.	Jaringan Transmisi Pantat Selatan Jawa	Surabaya Probolinggo Jatungas Transmisi Cibinong Tasikmalaya Banyuwangi Klaren dan Klanten Kediri Probolinggo	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugasi Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Rah (II.3.1. dan III.3.2.)	APUN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Ketua ESOM, Ketua PU, Pemda, dan PLN				
3.4.	Jaringan Transmisi Pengumpun Selatan-Utara Jawa	1. Jatungas Transmisi Pengumpun Selatan-Utara Jawa yang menghubungkan Jatungas Transmisi Surabaya-Jakarta 2. Jatungas Pengumpun Selatan-Utara Jawa yang	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugasi Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Rah (II.4.1.)	APUN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Ketua ESOM, Ketua PU, Pemda, dan PLN				
		2. Jatungas Pengumpun Selatan-Utara Jawa yang	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tugasi Sistem Jaringan Energi Nasional di	APRN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Ketua ESOM, Ketua PU, Pemda, dan PLA				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		menghubungkan Jaringan Transmisi Cibinong-Bekasi	Pulan Jawa Bali (II.4.3.)						
3.	Transmisi Pengumpulan Selatan Utara Jawa yang menghubungkan Jatiningsih Transmisi Cibinong-Sugiling Bandung Sekeloa	Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.4.3.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kerucut ES-DM, Kementan PU, Perenda, dan PLN					
4.	Jatiningsih Transmisi Pengumpulan Selatan-Utara Jawa yang menghubungkan Jatiningsih Transmisi	Operasionalisasi Perwujudan Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa Bali (III.4.4.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kerucut ES-DM, Kementan PU, Perenda, dan PLA					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Purwokerto Cibatu-Munara Tawar							
5.	Jaringan Transmisi Pengumpulan Selatan-Utara Jawa yang menghubungkan Jaringan Transmisi Ungaran-Klaten	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggul Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali (II.4.3.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah		Kemend ESDM, Kemend PU, Pemda, dan PLN				
6.	Jaringan Transmisi Pengumpulan Selatan-Utara Jawa yang menghubungkan Jaringan Transmisi Gresik-Surabaya	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggul Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali (II.4.6.)	APRN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah		Kemend ESDM, Kemend PU, Pemda, dan PLN				
7.	Jaringan Transmisi	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi	APRN, APBD, dan/ atau		Kemend ESDM, Kemend PU,				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
3.5.	Jaringan Transmisi Bali	Pengumpulan Selatan-Utara Jawa yang menghubungkan Jaringan Transmisi Tanjung Jati Purwedadi Uragatan Jaringan Transmisi Bali	Perwujudan Tunggal Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali (II.4.7.)	sumber lain yang sah	Pemda, dan PLN				
3.5.	Jaringan Transmisi Bali		Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggal Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa Bali (II.5.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend ESDM, Kemend PU, Pemda, dan PLN				
3.6.	Jaringan Transmisi Tenaga Listrik untuk Kawasan Tertinggal dan Terisolasi, Termasuk Pulau-pulau Kecil	1. Tanjung Trusmi di Kepulauan Selayu, Kepulauan Kalimantan, Pulau Bawean, Pulau Kangean, dan Pulau Sepudri	Lampiran IX: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tunggal Sistem Jaringan Energi Nasional di Pulau Jawa-Bali (II.5.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemend ESDM, Kemend PU, Pemda, dan PLN				
3.6.1.	Jaringan transmisi tenaga listrik untuk kawasan tertinggal dan terisolasi								

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
D.	Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional								
1.	Jaringan Terestrial								
1.1.	Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Pantai Utara Jawa	Jaringan terrestrial Cilacap-Sarang- Tangrang-Jakarta- Karawang- Purwakarta-Sumbang- Lusi-Suwu-Cirebon- Brebes-Jegal- Lekalong-Kendal Semarang Demak Kudus Pati Kembang Tuban Lamongan Surabaya-Sidoarjo- Probolinggo- Sibohimo- Banyuwangi	Lampiran X. Strategi Operasionalisasi Perwujudan Bungsi Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (L.L.L.)	APRN, APBD, dan/ arn sumber lain yang sah	Kemkominfo dan PT. Telkom				
1.2.	Pengembangan dan Rehabilitasi Jaringan Pelayanan Pusat Pertumbuhan di Wilayah Tengah Jawa	Jaringan Terestrial Jakarta-Rokasi- Bandung- Majalengka-Cirebon- Purwokerto-	Lampiran X. Strategi Operasionalisasi Perwujudan Bungsi Sistem Jaringan Telekomunikasi	APRN, APBD, dan/ arn sumber lain yang sah	Kemkominfo dan PT. Telkom				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kebumehen	Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (I.3.3.)						
4.	Jaringan terrestrial Semarang Yogyakarta		Lampiran X Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (I.3.4.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemendikominfo dan PT. Telkom				
5.	Jaringan terrestrial Surakarta Pacitan		Lampiran X Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (I.3.5.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemendikominfo dan PT. Telkom				
6.	Jaringan terrestrial Juban-Bojonegara		Lampiran X Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (I.3.6.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemendikominfo dan PT. Telkom				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
			Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (1.3.6.)						
7.	Jaringan terestrial Madureh Kediri		Lampiran X Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (1.3.7.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemendikominfo dan PT. Telkom				
8.	Jaringan terestrial Madureh Blitar Malang-Jember-Banyuwangi		Lampiran X Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (1.3.8.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemendikominfo dan PT. Telkom				
9.	Jaringan terestrial Probolinggo-Jember		Lampiran X Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (1.3.9.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemendikominfo dan PT. Telkom				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
			Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (I.3.2.)						
	10. Jaringan Terrestrial Kepulauan Seribu		Lampiran X. Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (I.3.2.U)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kominfo dan PT. Telkom				
	11. Jaringan Terrestrial Kepulauan Kalimantan		Lampiran X. Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (I.3.2.U)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kominfo dan PT. Telkom				
	12. Jaringan Terrestrial Pulau Banyak		Lampiran X. Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	Kominfo dan PT. Telkom				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
			Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (I.3.1.2.)	yang sah					
		13. Jaringan Terrestrial Pulau Sapudi, Pulau Rans, serta Pulau kangsan dan sekitarnya	Lampiran X. Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jungs Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (I.3.1.3.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Ketecukuninfo dan PT. Telkom				
2.	Jaringan Satelit								
2.1.	Pengembangan Jaringan satelit								
		1. Jaringan satelit untuk melayani kawasan perkoran nasional	Lampiran X. Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jungs Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (II.1.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Ketecukuninfo dan PT. Telkom				
		2. Jaringan satelit untuk melayani kawasan andalan	Lampiran X. Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jungs Sistem Jaringan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Ketecukuninfo dan PT. Telkom				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		3. Jaringan seluler untuk melayani kawasan tertinggal dan terisolasi, termasuk pulau-pulau kecil	Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.2.) Lampiran X Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.3.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemendikominfo dan PT. Telkom				
3.	Stasiun Bumi								
3.1.	Pengendalian Stasiun Bumi	1. Kawasan Fasilitas Pengolahan Data dan Seluler (Provinsi DKI Jakarta) 2. Kawasan Stasiun Telekomunikasi (Provinsi Jawa Barat)	Lampiran X Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.1.) Lampiran X Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sistem Jaringan Telekomunikasi	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemendikominfo dan PT. Telkom				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN				
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027	
		3. Kawasan Stasiun Duri Perancis Satehli Mlora (Provinsi Jawa Barat)	Nasional di Pulau Jawa-Bali [III.2.] Lampiran X: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sistem Jaringan Telekomunikasi Nasional di Pulau Jawa-Bali [III.3.]	ALUN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Ketecakupan dan PT, Telkom					
E. Konservasi SDA, Pendayagunaan SDA, dan Pengendalian Daya Rusak Air										
1.	Wilayah Sungai (WS) Pengelolaan WS Strategis Nasional	1. WS Cimamuk Cisaranggaming	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali [III.4.]	ALUN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemendagri, Kemendikbud, dan/ atau Swasta					
1.1.		1. WS Pemali-Comal	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali [III.5.]	ALUN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemendagri, Kemendikbud, dan/ atau Swasta					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
3.	WS Jababachina		Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali [1.1.3]	APRN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kememan, Pemda, dan Swasta.				
4.	WS Serayu Boyowento		Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali [1.1.4]	APRN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemenu PU, Kememan, Pemda, dan Swasta				
5.	WS Brantas		Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali [1.1.5]	APRN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kememan, Pemda, dan Swasta				
6.	WS Bati Penida		Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali [1.1.6]	APRN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kememan, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
7.	WS Kepalangan Seribu	WS Kepalangan Seribu	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Bungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali [1..7]	APRN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kemrenan, Kemda, dan Swasta.				
8.	WS Cidahu Cijulang Cidurian- Cisadane- Ciwang- Citarum Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat]	WS Cidahu Cijulang Cidurian- Cisadane- Ciwang- Citarum Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat]	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Bungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali [1..8]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kemrenan, Kemda, dan Swasta				
9.	WS Cilanduy Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah]	WS Cilanduy Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah]	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Bungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa Bali [1..9]	ALUM, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kemcutan, Kemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERJUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		10. WS Pingo Opak Serang (Provinsi DI Yogyakarta- Provinsi Jawa Tengah)	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perjujukan Bungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Hali (1.1.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kemrenn, Pemda, dan Swasta.				
		11. WS Bengawan Solo (Provinsi Jawa Timut- Provinsi Jawa Tengah)	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perjujukan Bungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali (1.1.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kemrenn, Pemda, dan Swasta				
2.	Daerah Aliran Sungai (DAS)								
2.1.	Rehabilitasi DAS	1. DAS Cilirung, DAS Cilutung, DAS Cijuring, DAS Cilanuyah, DAS Glasem, DAS Cibanteng, dan DAS Ciminyak	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perjujukan Bungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa Bali (1.1.1)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Ketecuku, Pemda, dan Swasta.				
		2. DAS Cimanuk, DAS Cisanggarung,	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perjujukan Bungsi	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain	Kemren PU, Ketecuku, Pemda, dan				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		dan DAS Ciharingin	Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Hali (II.2.)	yang sah	Swaras				
	3. DAS Cilanduy dan DAS Seguru Anakan		Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Rah (II.3.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Ketua PU, Ketuaku, Pemda, dan Swasta				
	4. DAS Seayu, DAS Bagoworo, DAS Padegolan, DAS Telomoyo, dan DAS Pelancangan		Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Rah (II.4.)	APBN, APBD, dan/ aran sumber lain yang sah	Ketua PU, Kemaman, Pemda, dan Swasta				
	5. DAS Progo, DAS Opak, DAS Serang, DAS Rib, dan DAS Oyo pada WS Prago-Opak-Serang		Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Tungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Rah (II.5.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Ketua PU, Ketuaku, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
6.	DAS Jragung, MS Timbang, DAS Serang, DAS Lusi, DAS Jembrana, MS Bodri, DAS Curug, DAS Gandu Gunung, DAS Jambangan, DAS Paudonsuci, DAS Gandu, dan DAS Blitung		Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Hali II.6.1	APRN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kemrenan, Pemda, dan Swasta.				
7.	DAS Glagah, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Coceban, dan DAS Rambut pada WS Pemali-Comal		Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa Bali II.7.1	APUN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Ketua PU, Kemrenan, Pemda, dan Swasta				
8.	DAS Grinduh, DAS Sarog, dan DAS James		Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi	APRN, APBD, dan/ atau sumber lain	Kemren PU, Keturekua, Pemda, dan				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		9. DAS Bantas, DAS Widus, DAS Korta, DAS Punggul, dan DAS Penghutan pada WS Bantas	Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Hali (1.6.1) Lampiran XI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Rah (11.9.1)	yang sah	Swasta				
4. 4.1.	Prasarana Sumber Daya Air Pengembangan dan Pemeliharaan Bendungan Besar di Waduknya	Waduk Janda, Waduk Pongkor, Waduk Situ Kemas, Waduk Situ Kaungjing, Waduk Cima, Waduk Jambulur, Waduk Cihenna, Waduk Cipanunjung, Waduk Saguling, Waduk Situ Cibaur, Waduk Sim Gedé, dan Waduk Situ	Lampiran XI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Sumber Daya Air di Pulau Jawa-Bali (11.1.1 s/d IV.1.21.1)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementan, Keren PU, Kertu SS-JM, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Lembang, Waduk Sannasa, Waduk Cipancuh, Waduk Dama, Waduk Situ Anggrahan, Waduk Situ Bolsang, Waduk Situ Patok, Waduk Situ Kaurca Tenneim, Waduk Situ Sedang, Waduk Situ Bagendit, Waduk Bauvu Keruing, Waduk Bruk, Waduk Gembong, Waduk Godo, Waduk Gawau, Waduk Gruetug, Waduk Gurung, Waduk Waduk Ad. Wuru, Waduk Jordan, Waduk Pabohan, Waduk Randu							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kuning, Waduk Kawabehden, Waduk Tempuran, Waduk Sechang Wungu, Waduk Bangari II, Waduk Sambong, Waduk Soko, Waduk Sumbar, Waduk Tologwungu, Waduk Nglingiri, Waduk Blimbing, Waduk Barak, Waduk Cepaklik, Waduk Jalngan, Waduk Geljat, Waduk Kedung Ombu, Waduk Kembangan, Waduk Kelu, Waduk Klego, Waduk Arisak, Waduk Selang, Waduk Muhar.							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Waduk Nawangan, Waduk Ngancar, Waduk Parang Joho, Waduk Plumbon, Waduk Sawa Jombor, Waduk Sang Putri, Waduk Wonggati/Gajah Mungkur, Waduk Dutak, Waduk Kaliombo, Waduk Kecongo, Waduk Nglangon, Waduk Kawa Peritung, Waduk Sangreh, Waduk Simo, Waduk Jatibarang, Waduk Denel, Waduk Minora, Waduk Tulasari, Waduk Telaga Tunjung, Waduk Pasa, Waduk Romang,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Waduk Sampean Bam, Waduk Lahor, Waduk Lawak Jati, Waduk Segaran, Waduk Selorejo, Waduk Sungguruh, Waduk Kauung Kates/Sutauhi, Waduk Masale, Waduk Ramu Bedali, Waduk Ramu Cibalak Lagong, Waduk Ramu Gesikan, Waduk Ramu Simbolo, Waduk Lamu Kedawung, Waduk Ramu Klubabi, Waduk Ramu Jarding, Waduk Ramu Palis, Waduk Ramu Pane, Waduk Lamu Sukolilo, Waduk							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Ranu Tamboi Tidup, Wadhik Selo Kamhang, Wadhik Klanyis Wadhik Nipah, Wadhik Gurupol, Wadhik Pucad, Wadhik Irijelau, Wadhik Tlogo Pirangan, Wadhik Nglimbangan, Wadhik Jambuan, Wadhik Gonggang, Wadhik Gedung Bendo, Wadhik Kedung Brubus, Wadhik Kotopuro, Wadhik Poudok, Wadhik Sangiran, Wadhik Saradan, Wadhik Sempen, Wadhik Tlogo Agabel, Wadhik Telaga							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Pasir/Sarangan, Wadhik Reming/Widas, Wadhik Blendis, Wadhik Grogol, Wadhik Kulak Sacung, Wadhuk Agepeti, Wadhuk Nglenreng, Wadhik Oro oro Ombu, Wadhik Penning, Wadhuk Prasambo, Wadhik Sumber Kepulu, Wadhuk Wihiri, Wadhuk Wuorejo, Wadhuk Dalong Gungsuang, Wadhuk Baujuatayat, Wadhuk Boro, Wadhuk Dowo, Wadhuk Dulu, Wadhuk Canggeh, Wadhuk Cemplap, Wadhuk Gedhing							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kulur, Waduk Gremban, Waduk Gondang, Waduk Grojokan, Waduk Jabung, Waduk Jayung, Waduk Jossanur, Waduk Kaliombo II, Waduk Kwaron, Waduk Legok, Waduk Madiran, Waduk Makam Sambi, Waduk Mangan, Waduk Pelungau, Waduk Papat, Waduk Saucang, Waduk Duro, Waduk Zaidi, Waduk Sekaran, Waduk Semoedo, Waduk Sempir, Waduk Sempul, Waduk Sepanji.							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Waduk Sogo, Waduk Simonsen, Waduk Takeran, Waduk Yutung, Waduk Iriwini, Waduk Waduk Jenggol, Waduk Setono, Waduk Tembak Royo, Waduk Garung, Waduk Mrica, Waduk Sempur, Waduk Wadas Lintang, Waduk Pajengkolan, Waduk Wangsanaji, Waduk Cacaban, Waduk Muktayu, Waduk Perjanin, Waduk Grokongs							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
4.2.	Daerah Irigasi								
4.2.1.	Peningkatan Fungsi Daerah Irigasi	DI Cibaling, DI Ciliman, DI Cijulang, DI Cilusuk II, DI Cisarane, DI Cidurian, DI Selaran, Jatinuh-Bekasi, DI Cipamingkis, DI Cibeo-Buyer, DI Cikaranggusan, DI Cileubi, DI Asut-Sulohami, DI Cikoa-Ciajur, DI Jatihmur, DI Tarum Utara, DI Selatan Jatihmur-Karasawa, DI Selatan Jatihmur-Purwakarta, DI Cileuleuy, DI Leurwi Nangka, DI	Lampiran XI: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Fungsi Sumber Daya Air di Pulau Jawa Rah (V.2.1 s/d IV.2.85.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemencam, Ketupe PU, Kemendikbud, Kemendagri, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		<p>Salamdarma, DI Macan, DI (Madung, DI Cilacap, DI Holir, DI Ciranjang, DI Cipancuh, DI Cipanas I, DI Cipanas II, DI Kembang, DI Ciwaringin, DI Kamuu, DI Ciwaringin Udik, DI Cikeusik, DI Sempayan, DI Lakbok Selatan, DI Cikamten II, DI Cikundeu I, DI Lakbok Utara, DI Asua Ciunis, DI Lakbok Selatan/ Mangariti, DI Rawa Onom/ Pamulisan, DI Srayu, DI Tajura,</p>							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		DI Ranjarcahyana, DI Singomoro, DI Wadhuk Sempur, DI Waduk Wadaslintang, DI Boro, DI Kedung Putri, DI Waduk Maklayu, DI Kunmisik, DI Pemali Barwali (Jd. Nolog), DI Cipero, Rambahi, DI Cacasban ibd Dinkih, Jari, DI Gungwang, DI Sungapan/Gropek, DI Cimal/Sukawati, DI Kaliwadas, DI Pesuliren Kletuk, DI Sragi, DI Kupang Krompong, DI Kedung Asem, DI Bodri Irompo, DI Prong Manggite-							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kalibening, DI Kumpang, Arumpeng, DI Nodang Asam, DI Bodri Trompo, DI Pring Manggfa- Kalibening, DI Jagung, DI Gilupala, DI Sedadi, DI Sidorejo, DI Rd. Dunipi, DI Klambu, DI Waduk Gembong, DI Waduk Gunung Rowo, DI Solo, DI Luk Kuning, DI Karangraini Ivander Wijk-Mataraul, DI Syaleni Kalibawang, DI Seneri/Krujo, DI Beron, DI Pacal, DI Waduk Poudok, DI Sim, DI Jejeruk, DI Gombal/Dupok, DI Sungkur, DI Waduk							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Bening, DI Mrican Kiri, W-K, DI Siman, DI Mrican Kanan, DI Lodoyo, DI Kengawan Jero, DI WJ. Pijulan, dan DI Gandung DI Melurus, DI Padi Pomahan, DI Delta Brantas, DI Is Molek, DI Is Kedung Kandaug, DI Pekalen, DI Pekalen S/Audung Biru, DI Jantoro, DI Boudoyudo, DI Tulaug, DI Bedadung, DI Pondok Wahib, DI Kercong Daruk, DI Sampean Rani, DI Banyuputih, DI Sampean, DI Setail							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
II.	PERWUJUDAN POLA RUANG NASIONAL								
A.	Kawasan Lindung Nasional								
1.	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	Teknik, M Hornings, M Ham, DIX (Seraif), DI Kedewataan, DI Mambal	Lampiran XI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian kawasan Lindung Nasional di Tukau Jawa Bali (L.I)	APM, APRI, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendagri, Kementerian Lingkungan hidup (asmen LH), Kemen PDI, Perenda, dan Swasta				
1.1.	Pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan pemertahanan luasan kawasan hutan lindung, pemeliharaan jenis dan kerapatan tanaman hutan di kawasan hutan lindung, serta rehabilitasi kawasan hutan lindung yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan	Kawasan hutan lindung di kota Ciligon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang.							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Bandung Utara, Bandung Selatan, Kabupaten Garut, Kabupaten Lasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukelana, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Daryusregara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Karanganyar, Kebanyakan, Kebanyakan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pur bahingga, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Tembung, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Wirosono, Kabupaten Situbone, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kota Bani, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Hilir, Kabupaten Deongoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magelang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngrawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Puncaksono, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggeng, Kabupaten Sampang, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	rehabilitasi kawasan resapan air yang terdegradasi dengan menggunakan teknologi lingkungan	Wonorejo, CAT Lecan, CAT Randublatung, dan CAY Ngawi-Ponorogo	Pulau Jawa Bali f.2.1		Svasta				
2.	Kawasan Perlindungan Setempat								
2.1.	Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan pantai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan pantai dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta pengembangan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di sempadan pantai untuk mencegah daya rusak air	Sempadan pantai di Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kota Fakarum Utam, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon,	Lampiran XI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (f.1.1)	APHN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenhut, KANUN, L.A, Kemca PU, Kemca ad, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pukajene, Kabupaten Harau, Kabupaten Andal, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Kembang, Kabupaten Cilacap,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten sulou Tregg, Kabupaten Daratul, Kabupaten Cinungkirin, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tasuruan, Kota Tasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Simbonda,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Paciran, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuhungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Duryuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Buleleng,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
2.2.	Pengendalian pemanfaatan ruang pada sempadan sungai yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta pengembangan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan di	Kota Denpasar, Kabupaten Bahung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Karangasem	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelaksanaan Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (11.2.1)	APRN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemren LK, Kemendik, Kemendik, Kemendik, Kemendik, Kemendik, dan Kemendik				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
2.3.	<p>sempadan sungai untuk mencegah daya rusak air</p> <p>Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar danau yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar danau dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta pengembangan struktur alami berupa jenis dan kerapatan tanaman dan/atau struktur buatan kawasan sekitar danau untuk mencegah daya rusak air</p>	<p>WS Brantas, dan WS Bali-Pemida</p> <p>Danu Pangkalau, Danau Rawa Dano, Danau Situ Bagendit, Danau Situ Cihlencana, Danau Situ Langkung, Danau Situ Lengkorat, Danau Situ Sipatunjuang, Danau Telaga Paranggih, Danau Waduyasan, Danau Rawa Pening, Danau Telaga Menjer, Danau Kawah Ijen, Danau Kawah Kehr, Danau Kawah Kalingan, Danau Telaga Sarungau, Danau</p>	<p>Lampiran XI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (1.3.1)</p>	<p>APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah</p>	<p>Ketua PU, Ketua L1, Pemda, dan Swasta</p>				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
2.4.	Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sekitar waduk yang berpotensi mengganggu dan/atau merusak fungsi kawasan sekitar waduk dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta pengembangan jenis dan korapatan tanaman dan/atau struktur buatan di kawasan sekitar waduk	Ranu Pakis, Danau Ranu Wilakah, Danau Ranu Bedali, Danau Ranu Gumbolo, Danau Hamir, Danau Beratau, Danau Buyau, dan Danau Tambora	Lampiran XI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelaksanaan Kawasan Perbatasan Nasional di Pulau Jawa Bali II.3.1	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendagri, Kemendikbud, Kemendiknas, dan Kemendikpora				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	untuk mencegah daya rusak air	.Janda, Jatinuh, Waduk Cirata, Waduk Cilimca, Waduk Cipamungjan, Waduk Santosa, Waduk Sugiling, Waduk Pengkon, Waduk Lido, Waduk Cikaret, Waduk Dauria, Waduk Wihlont, Waduk Dadap Berendang, Waduk Sedang, Waduk Situ Patok, Waduk Cipamanti, Waduk Sindang, Tuau, Waduk Sanggug, Waduk Jarigede, Waduk Cibeurun, Waduk Loran, Waduk Loran Wetan, Waduk Kedungomban.							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Wadhuk Womoghi, Wadhuk Sampor, Wadhuk Cacahan, Wadhuk Wadessintang, Wadhuk Mrica, Wadhuk Malabayu, Wadhuk Perjalila, Wadhuk Gembong, Wadhuk Tejero-kaliu, Wadhuk Garing, Wadhuk Sooc Putri, Wadhuk Verro, Wadhuk Jatibarang, Wadhuk Narsanjan, Wadhuk Parangjoto, Wadhuk Ngawar, Wadhuk Klego, Wadhuk Pacal, Wadhuk Cengklak, Wadhuk Delingon, Wadhuk Plumbon, Wadhuk Ganning							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Rowo, Wadhuk Tempuran, Wadhuk Nglancong, Wadhuk Groceng, Wadhuk Krisak, Wadhuk Paucusan, Wadhuk Sapou, Wadhuk Miris-an, Wadhuk Sermo, Wadhuk Kedung Dru bus, Wadhuk Pondok, Wadhuk Sengguruh, Wadhuk Sampelan Baru, Wadhuk Beuing, Widasa, Wadhuk Gondang, Wadhuk Wingi, Wadhuk Klampis, Wadhuk Laher, Wadhuk Subaru Karangkatesi, Wadhuk Selorjo, Wadhuk Prijeran,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
3.	Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Cagar Budaya								
3.1.	Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Cagar Alam, Taman Nasional, Taman Nasional Laut, dan Taman Wisata Alam								
3.1.1.	Cagar Alam	Waduk Tlogo Ngebel, Waduk Womorejo, Waduk Benol, Waduk Gerolecak, Waduk Palasari, Waduk Telaga Tujujung, Waduk Mudea, dan Waduk Titab	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (III.2.3.1)	APRN dan APBD	Kemendhut, Kemendik, Kemendagri, dan Kemendikbud				
3.1.2.	Taman Nasional	Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango, Taman Nasional Halimun	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan	APBN dan APBD	Kemendhut, Kemendagri, Kemendikbud, dan Pemda				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Selak, Taman Nasional Gunung Ciremai, Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Taman Nasional Alas Purwo, Taman Nasional Bromo Janggur-Semeru, Taman Nasional Meru Betiri, dan Taman Nasional Bali Barat	Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Rali III.3.1., III.3.2., III.3.3., III.3.4., III.3.5., III.3.6., III.3.7., III.3.9., III.3.10., dan III.3.11.1						
3.1.3.	Taman Nasional	Taman Nasional Bahran	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali III.3.8.1	APBN dan APBD	Ketendahan, Kemendagri, dan Kemendagri				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
3.1.4.	Taman Nasional Laut	Taman Nasional Laut Apitlanan Sembu	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (III.3.1.2.)	APRN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendhut, Kemen LHA, Kemen PU, dan Pemda				
3.1.5.	Taman Wisata Alam	Taman Wisata Alam Pulau Sangiang	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (III.3.1.4)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendhut, Kemen LHA, Kemen PU, dan Pemda				
3.2.	Pengembangan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Kawasan Cagar Budaya								
3.2.1.	Suaka Margasatwa	Suaka Margasatwa Cikropah dan Suaka Margasatwa Gunung Sewal	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan	APRN dan APBD	Kemendhut, Kemen LHA, Kemen PU, Kemendbudpar, dan Pemda				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
3.2.2.	Susaka Margasatwa	Susaka Margasatwa Daratan Tinggi Yang dan Susaka Margasatwa Pulau Bawean	Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.1.1., dan III.1.2.) Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.1.3. dan III.1.4.)	APBN dan APBD	Ketebuh, Ketuwi III, Kemen PU, Ketebuhbudpur, dan Pemda				
3.2.3.	Cagar Alam	Cagar Alam Rawa Daman, Cagar Alam Leuserung Sarrong, Cagar Alam Gunung Yili, Cagar Alam Kawah Samojang, Cagar Alam Gunung Simpang, Cagar Alam Pulau Nusa Barong, dan Cagar Alam Kawah Jenu Merapi Dingrup-	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.1.3., dan III.1.4.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Ketebuh, Kemen PU, dan Pemda				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
3.2.4.	Cagar Alam	Dungup Cagar Alam Gunung Tukang Gede, Cagar Alam Gunung Papsudayuu, Cagar Alam Gunung Buruung, Cagar Alam Gunung Oelering, dan Cagar Alam Bantikah I,II,III	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (II.2.2, III.2.6, III.2.7, III.2.10., dan III.2.13.)	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemendagri, Kemendik- Kulturel, dan Kerem PU, dan Penda				
3.2.5.	Cagar Alam Laut	Cagar Alam Laut Lerawang Sancang	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (II.2.2.4)	APBN dan APRD	Kerucobuk, Kemendagri, Kemendik- Kulturel, dan Penda				
3.2.6.	Taman Nasional Laut	Taman Nasional Laut Astimam Jawa	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemendagri, Kemendik- Kulturel, dan Kerem PU, Kerembudpar.				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
3.2.7.	Taman Hutan Raya	Taman Hutan Raya R. Suryo dan Taman Hutan Raya Ngurah Rai	Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.3.2.3.) Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.4.2. dan III.4.2.) Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.5.2., III.5.3., dan III.5.4.)	APBN dan APBD	Permuda, dan Swasta				
3.2.8.	Taman Wisata Alam	Taman Wisata Alam Gunung Tampomas, Taman Wisata Alam Satriaji, dan Taman Wisata Alam Taman Bayu dan Jambu Tambora	Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.3.2.3.) Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.4.2. dan III.4.2.) Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (III.5.2., III.5.3., dan III.5.4.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendhut, Kemen LTI, Kemendagri, Kemendikbud, Permuda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
3.2.9.	Taman Wisata Alam Lant	Taman Wisata Alam Lant Jatih Pannai Dimpunggom-Rohan	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (III.5.6.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendhut, Kemendik, Kemendagri, Kemendikbud, dan Swasta.				
3.2.10.	Pemertahanan kawasan pantal berhutan bakau untuk perlindungan pantai dari abrasi dan kelestarian biota laut	Kabupaten Serang, Kota Fakarua (Mara, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Padi, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Tuban	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (III.6.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendhut, Kemendagri, Kemendikbud, Kemendikbud, Kemendagri, Kemendikbud, dan Swasta.				
3.2.11.	Pelestarian dan pengembangan pengelolaan kawasan sagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kawasan Candi Borobudur dan sekitarnya, kawasan Candi Prambanan, kawasan Sina	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendikbud, Kemendagri, Kemendikbud, dan Swasta.				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		<p>Purhalojo, Sangiran, Kawasaan Kota Tua, Paksiarta, Kratonan Sebu (Pulan Orus, Pulan Selor, Pulan Cijur, dan Pulau Bidaduri, Kota Lama Daulan, Kawasaan adat, Bodny, Simas, Batu Jaya, Situs Gunung Padang, Kota Lama Bandung, Ohseraminim, Bowsch, Situs Kemgadangklok, Istana Boyar, Situs Batu Tulis, Istana Cipanas, Gud, Cirebon, Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, Keraton Kacibonau, Museum Linggarjati,</p>	<p>Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (III, IV)</p>						

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Gunung Kumdi, Candi Gajahanang, Gma Gndawang, Cima Wanaa- Karang Kamulyan, Makam Sutau Gunung Jati, Kaupung Naga, wala Lama Kotagede, Makam Inegiti, Puro Palnalaman, Keraton Yogyakarta, Kawasan Malioboro, Masjid Agung, Demak, Keraton Surakarta, Candi Gedong Songo, Candi Sukuh Candi Ceto, Candi Penutugungas, Candi Dieng, Sima Singasari, Kota Lama Semarang.							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		<p>Sinis Prasejarah Haritan, Candi Jawi, Makam Suman Muria, Makam Suman Ampel, Kora Lata Sursabaya, Kota Lama Malang, Makam Suman Bonang, Malang Suman Giri, Makam Suman Drajat, Makam Asta Unggi, Kawasan Temper Gunung Bluuu, Pura Kesakih, Pura Yandu Lot, Goa Gajah, Situs Giliranuk, Situs Taman Djung Karangasem, Jarihwih, Sinis Gunung Lawi, Kawasan Trowakan,</p>							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2016-2019	2020-2024	2026-2027
		Situs Purbakala Trimil, Candi Pemanasan dan Candi Simpang, Candi Singosari, Candi Jago, Candi Kidul, Candi Budut, serta pura-pura di Kola Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
4. 4.1.	Kawasan Rawan Bencana Alam Penciptaan zona-zona rawan bencana alam beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana, penanggulangan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan sarana pemantauan bencana, dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana alam	1. kawasan rawan bencana langsung di Kabupaten Lebak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabung, Kabupaten Cisarur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelaksanaan Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (V.1.1)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Ketuchud, Ketuau SA, Ketuau ESOM, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPBB), Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), Pemda, dan Swasta.				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Muninggal, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebunten, Kabupaten Purworejo, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Wonosobo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Kudus, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Semarang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		<p>Temanggung, Kabupaten Kendal, Kabupaten Bastara, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Slendro, Kabupaten Rannil, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupaten, Kabupaten, Pacitan, Kabupaten</p>							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		<p>Trenggalek, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Hilir, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk.</p>							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tuban, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Jember							
		2. Kawasan kawasan pelombahang pasang di sepanjang wilayah pasang Nola Ciligugui, Kabupaten Serung, Kola	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelustasan Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (V.2.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Ketua PU, Kemendagri, Kemendikbud, BNN, BNPB, BMT, Permda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Serang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Apuhauan Seribu, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pematang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan.							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Harang, Kabupaten Acidul, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lanugati, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidhorojo, Kabupaten Pasuruan, Kota							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Posanjan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampung, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Suroboyo, Kota Jember, Kabupaten Daulung, Kabupaten Giyanti, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Khunti.							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		5. Kawasan rawan banjir di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Jakarta Barat, Kota InDRAMa PUSAB, Kota InDRAMa Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kota LUGOI, Kabupaten Tangerang- Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelaksanaan sawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (N.3.)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, KLH, Kemendagri, BNPB, BMG, Pemda, dan Swasta.				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Bekasi, Kabupaten Handung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Handung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Sumedang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekingin, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Bawang, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Acandal, Kabupaten Tembak.							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Kebunreus, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Mudi, Kabupaten Kabupaten Magetan, Kabupaten Budiurejo, Kabupaten Ngajuk, Kabupaten Tuban, Kabupaten Cresik, Kabupaten Blitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Bungailik, Kabupaten Tulangagung, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Kediri, Kabupaten Jombang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Surabaya, Kabupaten Pamongan, Kabupaten Pohjolingan, Kabupaten Tanjungsari,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
5.	Kawasan Lindung Geologi	Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkulu, Kabupaten Sampang, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Mungklung, dan Kota Denpasar							
5.1.	Kawasan Cagar Alam Geologi								
5.1.1.	Pengembangan pengelolaan guna mencristakan kawasan kenitikan batuan dan	1. Kawasan kaminikan batuan dan fosil di Cagar Alam Geologi	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan	APBN dan APBD	Kemen PU, Kemea ES, DJ, Kementbudpar, dan Pemuda				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
	fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi, rehabilitasi kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi yang terdegradasi, serta pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun di sekitar kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam, dan kawasan keunikan proses geologi	Karangasembing	Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali (N.L.L.L.)			I 2011- 2014	II 2016- 2019	III 2020- 2024	IV 2026- 2027

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		2. Kawasan kermilikan hampang alam gunung pasir pantai di Pantai Panangirnis	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelastarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (V.1.2.1.1)	APBN dan APBD	Kemen PU, Kemen SSOM, Kemendbudpar, dan Pemda				
		3. Kawasan kermilikan hampang alam kembang bewaswu Solo purba	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelastarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (V.1.2.2.)	APBN dan APBD	Kemen PU, Kemen SSOM, Kemendbudpar, dan Pemda				
		4. kawasan kermilikan bewaswu alam keast di Kabupatw Kabupatw Pandeglang, Kabupatw Lebuh, Kabupaten Bogor,	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelastarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali	APBN dan APBD	Kemen PU, Kemen SSOM, Kemendbudpar, dan Pemda				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kota Sukoharjo, Kabupaten Kota Salatiga, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Wongsorejo,	(3.1.2.3.)						

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Bangmas, Kabupaten Acibuncu, Kabupaten Purwoarjo, Kabupaten Batangmangata, Kabupaten Kendubang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Gumilangkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Dejengoro, Kota Surabaya, Kabupaten Pamongan, Kabupaten Blitar, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Bangkalan, Kabupaten Tribungging, Kabupaten Ternggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Wolterrejo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jember, Kabupaten Pangajene, Kabupaten Sampang.							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Mungkid							
		5. Kawasan kranikan procyologi pada daerah suburau lumpur di Kabupaten Sidoarjo, semhnan hmpur Bledug Kawa di Kabupaten Grobozan, sumber api alami Mrapon di Kabupaten Grobozan, dan geyser di Cisolok	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Pantan Jawa Bali (V.1.3.1, V.1.3.2, V.1.3.3)	APBN dan APBD	Kemren PU, Kemren ZSJM, Kemcubudpat, dan Pemuda				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
5.2. 5.2.1.	Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi Pencetakan zona-zona rawan bencana alam geologi beserta ketentuan mengenai standar bangunan gedung yang sesuai dengan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana, pengendalian perkembangan kawasan budi daya terbangun yang berpotensi terjadinya bencana, dan penyelenggaraan upaya mitigasi dan adaptasi bencana melalui penetapan lokasi dan jalur evakuasi bencana serta pembangunan.	Polahuhamban Kebanpaten Sukabami	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (W.2.1.1)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemren PU, Kemendagri, BNPB, BMT, Pemda, dan Swasta.				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	sarana pemantauan bencana	Gunung Dieng, Gunung H. Petarungan, Gunung Sudooro, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, Gunung Ungaran, Gunung Lawu, Gunung Wilis, Gunung Kelud, Gunung Ajuno Welisang, Gunung Bromo, Gunung Semeru, Gunung Lamongan, Gunung Iyang Agung, Gunung Zuing, Gunung Kawah Ijen, Gunung Agung, dan Gunung Ramit							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		2. Kawasan rawan gempa bumi di Kota Cilacap, Kabupaten Lebak, Kabupaten Patidjulang, Kabupaten Setawang, Kota Serang, Kabupaten Tangtawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Ciunir, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kota	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelaksanaan sawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (V.2.2.1)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemen LHK, Kemen ESTM, BNPB, BMG, Pemda, dan Swasta.				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2016- 2019	III 2020- 2024	IV 2026- 2027
		Sulawesi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebunreus, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kluteu, Kabupaten Wonggiri, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Hiftar, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Sourujung, Kabupaten Malang, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Padiran, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tanggulkec, Kabupaten Tuhunggalang, Kabupaten Haleleng, Kabupaten Jember, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Mungkid, Kota Denpasar, Kabupaten Banyuwangi.							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan							
		3. Kawasan khusus gerakan tanah di Kabupaten Lebuh, Kabupaten Rogor, Kota Bogor, Kabupaten Sukabungsi, Kabupaten Ciayur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat,	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelaksanaan sawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Bali [V.2.3.]	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kerucil PU, Kementan, Kerucil ESDM, BNPB, PMG, Kemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sukabungah, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Pematang, Kabupaten Kuningan,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegara, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Kediri, Kabupaten Tromolung, Kabupaten Jember, Kabupaten Jember, Kabupaten Pondorejo, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Simbunjo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sumedep, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Pulehng, dan Kabupaten Jember							
		4. Kawasan rawan tsunami di kawasan Kawan Tawakul di Kota Cilegon, Kabupaten Serang.	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelaksanaan Kawasan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah.	Kemren PII, Kemren ESJM, Kemren KP, Kemren LK, BNPB, BMG, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Kota Serang, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Ciasur, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Banyuwangi,	Pulau Jawa Bali (V.2.4)						

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Jember, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tromolung, Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pamekajan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kabupaten Donggala, Kabupaten Ganyur, dan Kabupaten Tabanan							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		5. Kawasan rawan abrasi di sepanjang wilayah pesisir Kota Cilong, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pondreghing, Kabupaten Lebuk, Kota Intama Utara, Kabupaten Kmpilman Seribu, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelaksanaan Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (V.2.5)	APBN, APB D, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen PU, Kemen KP, Kemen LH, BPNP, BMG, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tegal, Kota Tagal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bataug, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Rembang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Amongasari, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bangkulu, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Sumenep, Kota Jember, Kabupaten Badung, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tabanan, dan Kabupaten Muncang							
		6. Kawasan kawasan berbasis gas betonis pada daerah semburan lumpur di Kabupaten Sidoarjo	Lampiran XI Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (2011).	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Kemend LH, Kemend ESDM, BNPB, BMG, Pemda, dan Stasiun				
5.2.2.	Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya terbangun dan rehabilitasi kawasan imbuhan air	CAT Serang-Tangerung, CAT Jakarta, CAT Sukareja, CAT Tegul Berbes, CAT	Lampiran XI Strategi Perwujudan Pelestarian Kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa-Rah	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemend PU, Kemend ESDM, Kemend LH, Pemda, dan Stasiun				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	tanah	Wonosari, CAT Lasem, CAY Randublatung, dan CAY Ngawi-Ponorogo	W.3.1.1						
6.	Kawasan Lindung Lainnya								
6.1.	Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan pengelolaan taman buru	Jaman Buru Gunung Masigit, Karvunubi	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (W.1.1.1)	APBN dan APBN	Kemcuhut, Kemenbudpar, dan Pusda.				
6.2.	Pemertahanan, pelestarian, dan pengembangan kawasan laut yang memiliki ekosistem tetumbu karang	Kabupaten Serang, Kabupaten Lampung, Lampung, Kabupaten, Kepulauan Seibu, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Jepara, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Bantul,	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Pelestarian kawasan Lindung Nasional di Pulau Jawa Bali (W.2.1)	APBN, APBN, dan/atau sumber lain yang sah	Kemlu, PU, Kemren AP, Kemlu L.L, Kemenbudpar, Penda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Gimlingkidul, Kabupaten Yongggalek, Kabupaten Hilir, Kabupaten Madang, Kabupaten Lunigjag, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkayu, Kabupaten Sampang, Kabupaten Tuwakusu, Kabupaten Surenep, Kabupaten Puleleng, Kota Jempasir, Kabupaten Radung,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
B. Kawasan Budi Daya									
1. Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional									
1.1. Kawasan Peruntukan Hutan									
1.1.1.	Pengembangan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan menggunakan teknologi lingkungan, pengendalian perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan sebagai upaya untuk mewujudkan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh	dan Kabupaten Karangasem	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa Bali (1)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemementrian, Pemda, dan Swasta.				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	persen) dari luas Pulau Jawa-Bali sesuai dengan ekosistemnya, rehabilitasi kawasan peruntukan hutan yang mengalami deforestasi dan degradasi, serta peningkatan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan	Katujonatan Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tasik, Kabupaten Purulung, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Grobogan, Katujonatan Bojonegara, Kabupaten Blora, Kabupaten Masidu, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Treggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tuban, Kabupaten Rembang,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Bangorejo, Kabupaten Blora, Situ Bendo, Kabupaten Boyolowo, Kabupaten Jember, Kota Batu, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pacitan, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumawe, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karagasem, Kabupaten Duleleug, Kabupaten Kluangkang, dan Kabupaten Jembrana							
1.2.	Kawasan Peruntukan Pertanian								
1.2.1.	Pemertahanan luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan terutama di sisi kiri dan sisi	Kawasan peruntukan pertanian untuk tanaman pangan di Kabupaten Tanggulang, Kabupaten Jember, Kabupaten Tanggerang.	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa Bali (?)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemantan, Kertu PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	<p>kanan jalan, pengendalian alih fungsi peruntukan lahan pertanian untuk tanaman pangan, dan pengembangan sentra pertanian tanaman pangan yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian untuk ketahanan pangan nasional</p>	<p>Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukahumi, Kabupaten Ciaujur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Nandung Darut, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang.</p>							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kahuparen Purwakarta, Kahuparen Karawang, Kahuparen Hekasi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyuwangi, Kahuparen Tukaliungga, Kahuparen Banjarenggana, Kahuparen Kebunutu, Kahuparen Purworejo, Kabupaten Wongasobo, Kahuparen Mogelang, Kahuparen Boyolali, Kabupaten Alatou, Kahuparen							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2016- 2019	III 2020- 2024	IV 2026- 2027
		Sulawesi, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Jenak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Srenged, Kabupaten Karang, Kabupaten Pekalongan,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kahuparen Pemalang, Kahuparen Tengah, Kabupaten Brebes, Kahuparen Anjón Purgo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kahuparen Sleman, Kabupaten Pacitan, Kahuparen Ponorogo, Kahuparen Uluwatu, Kahuparen Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kahuparen Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kahuparen							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Simpdono, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pamiman, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jember, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magelang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Dejenguro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Gresik; Kabupaten Bangkalan; Kabupaten Sampang; Kabupaten Tutuwuhan; Kabupaten Sumanap; Kabupaten Jemberna; Kabupaten Klimokim; Kabupaten Bangli; Kabupaten Karangasem; Kabupaten Duleleg- Kotu Derupusur; Kabupaten Padang; Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasuban							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.2.2.	Pengembangan sentra perkebunan berbasis bisnis yang didukung prasarana dan sarana dengan menggunakan teknologi lingkungan, serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan rehabilitasi kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan perkebunan yang terdegradasi	Kawasan pertanian untuk perkebunan di Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lampung, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukarumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung.	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa Bali (2)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian, Kemmen PV, Pemda, dan Swasta.				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Bant, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningas, Kabupaten Garut, Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kndhis, Kabupaten Kembang, Kabupaten Siaga, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten seudal, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Semarang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Yogyakarta, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ngunjir, Kabupaten Jombang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Trobolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Lumajang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegara, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Suroboyo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Jember, Kabupaten Bluluk, Kabupaten Tahanan,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.2.3.	Pengembangan kawasan peruntukan pertanian untuk kegiatan hortikultura guna meningkatkan daya saing pertanian hortikultura	Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Kabupaten Karangasem Kawasan pertanian untuk pertanian milik hortikultura di Kabupaten Tanggarang, Kabupaten Tundjung, Kabupaten Serang, Kabupaten Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa Bali (2)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian, Kementan PU, Prmda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Ganur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirihon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwokerto, Kabupaten Subang, Kabupaten Surodadi, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Heger, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Banjaregara, Kabupaten Wosobo, Kabupaten Hoyolali, Kabupaten Kurungayur, Kabupaten Sagetu, Kabupaten Genuaug, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemak, Kabupaten Tegalung, Kabupaten Serdad, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gumrahkidri,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Hilir, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Dongrayosa, Kabupaten Sintondjo, Kabupaten Jember, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Gresik, Kabupaten Dongkulu, Kabupaten Ngajuk, Kota Surabaya, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Klungkung							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.3. 1.3.1.	Kawasan Peruntukan Perikanan Pengembangan sentra perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang didukung peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perikanan serta prasarana dan sarana yang ramah lingkungan	1) kawasan perikanan tangkap di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kabupaten Serang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Ciunir, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara,	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (3)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemren (P, Perda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Birens, Kabupaten Pamalang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Bassas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Selurau, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Gunungkidul, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Jember, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lasem, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Posannan, Kabupaten Jemberana, Kota Jempasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tuban, Kabupaten Muncung, Kabupaten Sasregasari, dan Kabupaten Buleleng							
		21 kawasan pemukiman perikanan budi daya di kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang.	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di	APDN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah yang sah	Ketua KP, Pmda, dan Swasta.				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Pangajene, Kabupaten Jember, Kabupaten Kupulanam Seribu, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Solatan, Kabupaten Rokasi, Kota Bekasi, Kabupaten Batavatu, Kabupaten Subang, Kabupaten Lubuklayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon,	Puluhan, Jawa Bali (3)						

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedura, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Banjar, Kabupaten Gou ul, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Sragen, Kabupaten Blora,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Kabupaten Bangmas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Tumasugung, Kabupaten Batangmangata, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Crobogan, Kabupaten Sisuci, Kabupaten Sataragung, Kota Suralaba, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Suloharjo, Kabupaten Wonorejo,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Klanten, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Achmeah, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kulon Progn, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Situbondo, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Banyuwangi; Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Suruwesi, Kabupaten Paitani, Kabupaten Jemberna, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tuban, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten Bangli							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.3.2.	Rehabilitasi kawasan peruntukan perikanan budi daya untuk menjaga ekosistem sekitarnya	Kawasan peruntukan perikanan budi daya di wilayah pesisir Kota Ciligon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Tegul, Kota Tegul, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Perkalangan, Kota	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali 131	APRN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen KP, Kemen LHK, Pemda, dan Swasta.				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2016-2019	2020-2024	2026-2027
		Pekalongan, Kabupaten Harau, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Temak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Surobaa, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumonep							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.3.3.	Pengembangan kawasan metropolitan berbasis masyarakat	Kawasan peruntukan perumahan untuk minapolitan di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sunda Agung, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang,	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa Bali (3)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen XP, Kemen PU, Pemda, dan Swasta.				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Sukaharjo, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bayuwatana, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Jegal, Kota Tegal, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purwodadi, Kabupaten Magelang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Rembang, Kota Pekalongan, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sleman, Kabupaten sulou Progo, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Tuban, Kabupaten Mitar, Kabupaten Trompsalek, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sumadup, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kabupaten Banyuwangi, Kota Probolinggo, Kabupaten Paitan, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Denpasar, Kabupaten Badung- dan Kabupaten Jember							
1.3.4.	Pengendalian kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budi daya	Kawasan perumtukan perikanan di	Lampiran XII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain	Kerucut AP, A-H, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	yang berpotensi menggauggu kawasan berfungsi linduug	Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Cebak, Kabupaten Cibeles, Kabupaten Serang, Kabupaten Sukabungsi, Kabupaten Pangar, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sribang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Garut, Kabupaten	Budi Jaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (3)	yang sah					

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Purbes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kerubang, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Turkalingga, Kabupaten Wongobo, Kabupaten Ternate, Kabupaten Wonggini, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Simbonda, Kabupaten Ranauwangi, Kabupaten Sumba, Kabupaten Butelung, Kabupaten Jenitana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Bangli							
1.3.5.	Revitalisasi wilayah penangkapan ikan yang mengalami gejala tingkat penangkapan yang berlebih (<i>overfishing</i>)	Kawasan peruntukan perikanan pada kawasan laut di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Kepulauan Sribu, Kabupaten Bekasi.	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Duri Dury yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (3)	APDA, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Ketua AP, AD, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Kabupaten Karangasem, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pukajene, Kabupaten Harau, Kabupaten asetel, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Kembang, Kabupaten Tuban,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.4.	Kawasan Peruntukan Pertambangan								
1.4.1.	Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang didukung oleh peningkatan fungsi industri pengolahan yang berdaya saing dan ramah lingkungan berbasis mitigasi dan adaptasi bencana serta	Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (4)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kerucut ESDM, Kementerian, Kementan RI, Kemen LRT, Pemuda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
	pengendalian perkembangan kawasan peruntakan pertambangan mineral, minyak dan gas bumi, serta panas bumi yang berpotensi merusak fungsi kawasan lindung dan mengubah bentang alam	Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Bandung, Kabupaten Kuning, Kabupaten Ronggeng, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Jepar, Kabupaten Rembang, Kabupatenulon Progo, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Wonorejo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Madiun, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember							
		Z. Kawasan permukiman perlanjutan minyak dan gas bumi di Kabupaten Baksasi, Kabupaten Sukorejo,	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Bumi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (4)	APDN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Ketua ESDM, Menteri, Ketua PU, Menteri, dan Pemda, dan Bina				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Suhung, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegara, dan lepas pantai utara Pulau Jawa							
		3. Kawasan pertumbuhan perusahaan pusat bumi di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Sukabumi dan Sukabungur dan	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Bumi Dury yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (4)	APRN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen TSDM, Keturukul, Kemen PU, Ketuud L.I, Prmda, dan Swasta.				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Bogor, Cianjur, Cisarame, Kabupaten Sukahmaji, Cibuni, Kabupaten Bandung, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Tangkuban Parahi, Kabupaten Bandung Barat, Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya-							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Majalengka- Kabupaten Sumedang, Sambojati-Varajar, Kabupaten Bandung Kabupaten Garut, Cianjur Kabupaten Sukabumi, Dieng Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonorejo), Guci- Baturaden Kabupaten Tegal Kabupaten Brebes Kabupaten Pemalang Kabupaten Banyumas-							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Pembalinggar, Tingaran Kabupaten Semarang), Yang- Argopuro Kabupaten Jember - Kabupaten Dondowoso), Walis/Kegbel Kabupaten Ponorogo - Kabupaten Madani, Belawan Jeri Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Simbardo Kabupaten Bondowoso), dan Tabanan Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.4.2.	Pengendalian perkembangan kawasan peruntukan pertanian pada kawasan peruntukan permukiman.	Tabanan Kabupaten Buleleng- Kabupaten Madura- Kabupaten Cianjur Kabupaten Bangli Kawasan peruntukan pertambangan mineral serta minyak dan gas baru pada kawasan peruntukan di Kabupaten Pandejara, Kabupaten Jember, Kabupaten Boyer, Kabupaten Bekasi, Kabupaten	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Tulau Jawa Bali (1)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kem. PSDM, Kem. PU, Kem. LH, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Karawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indragunung, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukahmri, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarbaru, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Purwokerto, Kabupaten Jepara, Kabupaten Blora, Kabupaten Wongorejo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegara, Kabupaten Blitar, Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Diyuwangi, dan Kabupaten Jember							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.5.	Kawasan Peruntukan Industri								
1.5.1.	Pengembangan kegiatan industri di dalam kawasan peruntukan industri dan mendorong relokasi kegiatan industri menuju kawasan industri, peningkatan kualitas prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri, peningkatan penataan lokasi kegiatan industri di dalam kawasan industri, serta peningkatan kegiatan industri yang bernilai tambah tinggi dengan penggunaan teknologi tinggi dan ramah lingkungan	Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Sebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota, Kota Jabar Timur, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Bumi Jaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (3)	APHN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemempirin, Ketuuh PU, Kemendagri, Penda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cichon, Kota Cirebon, Kabupaten Lulutanayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Babang, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Banyuwangi, Kabupaten Pemalang, Kota Surabaya, Kabupaten Hojolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wongorejo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Blora, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kota Solo, Kabupaten Gilaar, Kabupaten Duryudus, Kabupaten Wongorejo, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Banyuwangi, Kabupaten Purhalingga, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Lekalongau, Kota Tegalrejo, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendis, Kabupaten Bad, Kabupaten Kerubau, Kabupaten Hima, Kabupaten Mogelang, Kota Mogelang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Bangunggana, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Klaten Togo, Kabupaten Gunningkirih, Kabupaten Gresik, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kota Malang.							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegara, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lasutau, Kota Tamanan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sibondone, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Madung, Kota Madiun, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Surabaya, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Jember, Kota Diponegoro, Kabupaten Karang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Tuban, Kabupaten Kediri, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten Karangasem							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.5. 1.5.1.	Kawasan Perantukan Partiwisata Rehabilitasi dan pengembangan kawasan agar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, serta ekowisata yang didukung prasarana dan sarana pariwisata, serta pengembangan pengelolaan kawasan perantukan pariwisata dengan menggunakan teknologi lingkungan dan berbasis kerja sama antardaerah	1. Kawasan pegar budaya dan ilmu pengetahuan di kawasan Candi Borobudur dan sekitarnya (Kabupaten Magelang, kawasan Candi Prambanan (Kabupaten Sleman dan Kabupaten Klute), kawasan Sima Purbalan Sugitoh (Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar), kawasan Aota Tula Jalukarta (Kota	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Bumi Jaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (6)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendikpar, Ketu PU, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Jakarta Utara dan Kota Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Pulau Ormas, Pulau Alet, Pulau Cipir, dan Pulau Bidakari Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Sama Besar Kabupaten Sukau, Kawasan adat Baduy Kabupaten Lebaki, Situs Batu Jaya Kabupaten Karawang, Situs Gunung Padang, Kabupaten Cianjur, Kota							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		<p>Comau Randang (Kota Handung), Observatorium Bosscha (Kahapatan Bandung Barat), Situs Kerugasingklok (Kahapatan Karawang), Istana Rong (Kota Bocar), Situs Batu Tulis (Kota Bogor), Batas Cipanas (Kabupaten Cianjur), Gua Cirebon (Kota Cirebon), Keraton Kasepuhan (Kota Cirebon), Keraton Sultanman (Kota Cirebon), Keraton</p>							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kecirebonan (Kota Cirebon), Museum Linggajati (Kabupaten Sumedang), Gunung Kawi (Kabupaten Sumedang), Candi Cangkung (Kabupaten Garut), Gua Endawang (Kabupaten Bogor), Ciring Wanara-Karatig Karullyan (Kabupaten Ciamis), Makam Sunan Gunung Jati (Kabupaten Cirebon), Nampang, Naga							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		(Kabupaten Pasikmalaya), Masjid Agung Demak (Kabupaten Demak), Candi Gedong Songo (Kabupaten Semarang), Kota Lama Semarang (Kota Semarang), Seratou (Surakarta (Kota Sukoharjo), Candi Sukuh-Candi Ceto (Kabupaten Karanganyar), Candi Djeneng (Kabupaten Wonosobo), Malcom Sunan Muria (Kabupaten Kudus), Kota							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		<p>Coma Kotagede (Kota Yogyakarta), Puro Pakualaman (Kota Yogyakarta), Seraton (Yogyakarta) (Kota Yogyakarta), Yogyakarta (Kota Yogyakarta), Kawasatu (Maliboro Kota Yogyakarta), Malcom Imogiri (Kabupaten Banjul, Meksam Suau Gili (Kabupaten Gresik), Candi Peninggungan (Kabupaten Mojokerto), Kawasatu (Trenggani (Kabupaten Mojokerto).</p>							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Malcom Sunan Ampel (Kota Surabaya), Kota Lama Surabaya (Kota Surabaya), Maksud Susu Drujud (Kabupaten Lamongan), Sima Singsari (Kabupaten Malang), Jora (Kota Malang), Candi Singosari (Kabupaten Malang), Candi Jago (Kabupaten Malang), Candi Kidul (Kabupaten Malang), Candi Badut (Kabupaten Malang), Nawasan							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2016-2019	2020-2024	2026-2027
		Tenger, Gunung Hirano (Kabupaten Probolinggo), Candi Jawi (Kabupaten Pasuruan), Makam Sultan Bonang (Kabupaten Tuban), Candi Penataran dan Candi Simping (Kabupaten Blitar), Sima Pasejuran Pacilan (Kabupaten Pacitan), Sima Purbakala Trinit (Kabupaten Ngawi), Makam Astra Tinggi							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		(Kabupaten Sumenep); Simus Gilimantik (Kabupaten Jemberana); Gna Gajeh; (Kabupaten Giayuri); Situs Gunung Kawi (Kabupaten Giayuri); Pura Tanah Lot (Kabupaten Tabanan); Jatiluwih (Kabupaten Tabanan); Pura Besakih (Kabupaten Karangasem); Situs Tirta Ujung (Kabupaten Karangasem)							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Karangasem), serta para-para di Kota Denpasar, kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Singkang, Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem							
9.	Kawasan pariwisata bahari di Tanao Nusienuo Laut		Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang	APHA, APB), dan/ atau sumber lain yang sah	Kemendipar, Kerucu AP, Kemcuhut, Kerucu L.L.				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
		Kepulauan Seribu Kahupatèn Kepulauan Seribu, Tanaan Nasional Laut Asutunuu Jawa [Kabupatèn Jepara], Tanaan Wisara Alam Lant. Cijulang [Kahupatèn Ciamis], Tanaan Wisara Alam Lant. Dacudu, Pacuai Ujungmerto- Sobau [Kabupatèn Buluang], Tanaan Wisara Alam Lant. Bulebung [Kahupatèn Bulicocog], serta kawasan	Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (0)		Kemen PU, Kemda, dan Bisaara	2011- 2014	2016- 2019	2020- 2024	2026- 2027

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		partisipasi harian lainnya di kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Pangrehleng, Kabupaten Mahak, Kabupaten Tangerang, Kota Jakarta Utara, Kabupaten Indragayuh, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Ciamis, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pamalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Sembang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Selumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten (Mumpukidul, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kota Surabaya, Kabupaten Cemongan, Kabupaten Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Probolinggo, Kota Pabelan, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Trenggalek, Kabupaten Simbonda, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Huilera, Kabupaten Jemberana, Kota Dempasut, Kabupaten Baliung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		<p>Khonglong, dan Kabupaten Karangasem</p> <p>3. Kawasan ekowisata di Suka Margasatwa Cilacap (Kabupaten Sukahumi), Suka Matrasawa Gunung Sawal (Kabupaten Cilacap), Suka Mangsaran Dataran Tinggi Yang (Kabupaten Probolinggo), Suka Matrasawa Pulau Bawean (Kabupaten</p>	<p>Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Bumi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (0)</p>	<p>APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah</p>	<p>Ketendbudpar, Ketendhut, Kemen P2L, Ketentu PU, Pemda, dan Swasta</p>				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Gresiki, Taman Nasional Ujung Kulon (Kabupaten Pandeglang), Taman Nasional Alas Purwo (Kabupaten Banyuwangi, Taman Nasional Baluran (Kabupaten Situbondo), Taman Nasional Meru Betiri (Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi, Taman Nasional Bali Barat (Kabupaten Jember dan Kabupaten							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		<p>Buleleng), Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango (Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabungah), Taman Nasional Malinau Salak (Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Sukabungah), Taman Nasional Gunung Ciremai (Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka), Taman Nasional Gunung Merapi</p>							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		(Kabupaten Klaten, Kabupaten Bojoleali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Sleman). Tama Nasional Gunung Merbabu (Kabupaten Bojoleali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Sleman), Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Probolinggo), dan Taman Wisata Alun Gunung Tumpang Kabupaten Semedang, Taman Wisata Raya R. Sinyo Kabupaten Malang), Taman Hulu Kaya Ngarah, dan Kabupaten Badung dan Kota Depasari, Taman Wisata Alun Pulau Sangiang Kabupaten Serang), Taman							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Wisara Alam Bangch Kahupaten Bedung, Jamian Wisara Alam Daruau Bayau dan Daruau Jambingau Kahupaten Duleleug dan Kahupaten Jabanani, dan Taman Rumi Guunung Masipal Sarambi Kahupaten Daruang, Kahupaten Sumedang, dan Kahupaten Ganti, serta kawasan ekowisata lainnya							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Cichak, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabungur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Tegal,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kota Sukakarta, Kota Salatiga, Kabupaten Pati, Kabupaten Wonorejo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rajamanggala, Kabupaten Rembang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Batul, Kabupaten Klaten Puguh, Kabupaten Gumilang, Kabupaten Sleman.							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegara, Kabupaten Tuluagung- Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Paltan, Kabupaten Simbonda,							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Madura, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Jember, Kabupaten Ranyunranggi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Puleleng, Kabupaten Gianyar.							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.5.2.	Pengembangan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana partisipasi	Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Jabon, dan Kabupaten Karanganyar	Lampiran XIII Simpati Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa Bali (6)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendagri, Kemendagri, Kemendagri, dan Kemendagri				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
1.7. 1.7.1.	Kawasan Peruntukan Perumahan Pengembangan Kawasan Peruntukan Perumahan dengan Mengoptimalkan Pemantauan Ruang secara Kompak, Vertikal, Hemat Energi dan Sumber Daya, serta Memanfaatkan Teknologi Lingkungan	Kawasan Perumahan Peruntukan di Pulau Jawa-Bali	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (%)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemencu, PU, Pemda, dan Swasta				
1.7.2.	Pengendalian Perkembangan Kawasan Peruntukan Perumahan yang Mengindikasikan Perkotaan yang Menjalar (<i>Urban Sprawl</i>)	Kawasan Perumahan Peruntukan di Pulau Jawa-Bali	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Budi Daya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (%)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemencu, PU, Kemempere, Pemda, dan Swasta				
1.7.3.	Pengembangan Kawasan Peruntukan Perumahan di	Kawasan Perumahan Peruntukan di	Lampiran XIII Strategi Operasionalisasi	APBN, APBD, dan/atau sumber lain	Kemencu, PU, Kemempere, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
	Kawasan Perkotaan yang Didukung Prasarana dan Sarana Perkotaan	Pulau Jawa Bali	Perwujudan Kawasan Bani Jaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional di Pulau Jawa-Bali (1)	yang sah	Sarana				
2.	Kawasan Andalan								
2.1.	Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Kehutanan	Kawasan Andalan	Lampiran XIV	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemahkut, Kemendagri, Pemda, dan Swasta				
2.1.1.	Pengembangan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan peningkatan fungsi industri jasa hasil hutan, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana	Dregas (Brebes Tegal-Slawi)	Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali (1-3)						
2.2.	Perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan pertanian								
2.2.1.	Pengembangan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil	1. Kawasan Andalan Bojonegara Merak Cillegon, Kawasan Andalan Rongor-Puntrak- Cianjur, Bopunjur	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa Bali (3, 5, 8, 9,	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendesa, Kerespetan, Kemen. PFI, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
	pertanian, permukiman, serta jaringan prasarana dan sarana	dan sekitarnya); Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Cirebon- Indramayu Majalengka- Kuning Ciyurutaja Kuning dan Sekeloa, Kawasan Andalan Panasu Tiuu- Pangandaran, Kawasan Andalan Sulawesi, Boyolali, Sukoharjo, Karungayut, Wonggi, Sragen, slaten (Suhoanika-	10, 11, dan 12)			I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Wondoloren), Kawasan Andalan Keduningsopur Ikondal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi, Kawasan Piregar IDrebes Tegal Slawi, Kawasan Juwana, Jepara, Mudus, Pati, Kembung, Blora Wanarakriti), Kawasan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Keduman, Cilacap, dan Sekiranyol, Kawasan Yogyakarta dan							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Sekitarnya, Kawasaan (Gresik), Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkertosusasi), Kawasaan Malang dan Sekitarnya, Kawasaan Simbondo-Bondowoso, Jember, Kawasaan Situgatja dan Sekitarnya (Bali Utara), Kawasaan Denpasar Ubud, Kintamani (Bali Selatan)							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		2. Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Prohlinggo-Pasurusu-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban Dejarekoro, Kawasan Andalan Sediri-Tuhingagung-Blitar, Kawasan Andalan Madim dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Banyuwangi dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Madura dan sekitarnya	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali (b. 22, 23, 24, 25, 27, dan 28)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian, Kemmen PU, Pemda, dan Swasta.				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
2.2.2.	Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya pada kawasan pertanian pangan berkelanjutan, terutama di sisi kirt dan sisi lahan jalan	Kawasan Andalan Hirwasangka	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali (7)	APBN, APB D, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian, Kementan PV, Pemda, dan Swasta.				
2.3.	Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Perkebunan								
2.3.1.	Pengembangan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan hasil perkebunan, kegiatan permukiman, serta didukung prasarana dan sarana	1. Kawasan Andalan Cebugung Rambung, Kawasan Andalan Priangan Timur Pangandaran, Kawasan Andalan Matang dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Sediri-Tulungagung Blitar	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa Bali (8, 10, 21, dan 24)	APBN, APB D, dan/atau sumber lain yang sah	Kecamatan, Ketua PU, Pemda, dan Swasta.				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		2. Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Prohilinggo-Pasurusu-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban Dejelegoro, Kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Madura dan Sepuluhduku	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali (8.10, 21, dan 24)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian, Kemendagri, Kemendagri, dan Srasa.				
2.3.2.	Rehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan perkebunan yang terdegradasi	Kawasan Andalan Tuban-Bojonegoro dan Kawasan Andalan Sribandono-Bondowoso-Jember	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali (25)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Ketutuhan, Kemendagri, Kemendagri, dan Srasa				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
2.4. 2.4.1.	Perwujudan kawasan andalan dengan sektor unggulan perikanan untuk kegiatan pengembangan kawasan perikanan, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, kegiatan pemukiman, serta jaringan prasarana dan sarana	1. Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu, Kawasan Andalan Clayungjo Kuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Medungsepur, Kawasan Andalan Brogas (Brebes-Jegal-Slawi), Kawasan Andalan Juwata, Jepara, Kudus, Pati, Retulung, Dloro (Nanarakanti), Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Maulana dan	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa Bali [2, 9, 12, 13, 14, 19, 23, dan 32]	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemren (P, Ketuac PU, Ketanduh), Penda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kepulauan, serta kawasan Andalan Laut Bali dan sekitarnya							
		2. Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekelanya, Kawasan Andalan Sukabungur dan sekitarnya, Kawasan Andalan Puncasuka, Kawasan Andalan Prianjan Timor-Pangsandaru, Kawasan Andalan Jawa Tengah	<p>Lampiran XIV, Strategi APBN, APBD, Operasionalisasi dan/atau Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali [1, 2, 3, 6, 7, 10, 13, 17, 20, 22, 23, 27, 29, 30, dan 31]</p>		Kerucil AP, Keman PU, Kementerian, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I	II	III	IV
						2011-2014	2015-2019	2020-2024	2025-2027
		Selatan (Purwokerto, Nehman, Cilacap dan Sekeloa), Sawasan Andalan -sul, Karangjaya dan Sekeloa, Kawasan Andalan Gresik, Rongkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan (Gerbangkentusi lul, Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan, Lamajang, Sawasan Andalan Tuban-							

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		<p>Bojonegara, Kawasan Andalan Ranyuwangi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Madura dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Singorojo dan Sekitarnya (Bali Utara), serta Kawasan Andalan Denpasar-Sitakawati (Bali Selatan)</p> <p>3. Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan</p>	<p>Lampiran XIV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali (4.21, 24, dan 26)</p>	<p>APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah</p>	<p>Kemen KP, Ketupe PU, Kemenduh, Pemda, dan Swasta</p>				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Tuhingagung Hilir, serta Kawasan Andalan Madhu dan Sekitarnya							
2.5. 2.5.1.	Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Pertambangan Pengembangan kawasan untuk kegiatan eksploitasi tambang, kegiatan peningkatan fungsi industri pengolahan dan industri jasa besi tambang, lokasi pembangunan hulu dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta didukung prasarana dan sarana	Kawasan Andalan Laut Pulus Sribu, Kawasan Andalan Bojonegara Merak Cilegon, Kawasan Andalan Cioyomaja Kuning dan Sekitarinya, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan (Purwokerto, Kebumen, Cilacap, dan Sekitarnya), serta	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa Bali (2.3.9, 15, dan 18)	APPN, APB-L, dan/atau sumber lain yang sah	Kemen-ES/MI, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya							
		2. Kawasan Andalan Laut Krakatau dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Jiwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Rora (Wauwaskuti), Kawasan Andalan Laut Karimunjawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Diabologgo Pasuruan-Lumajang, Kawasan Andalan Tuban-Bojonegara, Kawasan Andalan	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali (4, 14, 17, 22, 23, 29, dan 30)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Ketua ESDM, Penda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
2.6. 2.6.1.	Perwujudan Kawasan Andalan dengan Unggulan Industri untuk kegiatan industri kreatif yang berdaya saing dan ramah lingkungan, serta peningkatan fungsi kawasan industri yang berteknologi tinggi, padat modal, bernilai tambah tinggi, dan ramah lingkungan, permakiman, serta didukung prasarana dan sarana	Surabaya dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Bojonegara Merak Cilegon. Kawasan Andalan Purwasuka, Kawasan Andalan Cekurusu Handung. Kawasan Andalan Subosuka-Wonosari, Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa Bali (3, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24, dan 31)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian, Kantor PU, Kemendagri, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Wanarakuri, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Gurubangkertoesulit a. Kawasan Andalan Probolinggo Pasuruan Pamjang, Kawasan Andalan Tuban- Bojonegara, Kawasan Andalan Ardjaja-Pulung Agung Blitar, serta kawasan Andalan Bali Seluruh.							
	2. Kawasan Andalan Bopunjur dan Sekeloa,et,		Lampiran XIV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain	Keruciptan, Kemca, PU, Kerucut dll.				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Kawasan Andalan Ciapinmaja Nuning dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Brebes, Kawasan Andalan Yogyakarta dan sekitarnya, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Situbondo-Hondoworo-Jetuban, kawasan Andalan Madiun dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Madiun dan Kepulaman	Andalan di Pulau Jawa-Hali (1, 9, 13, 19, 21, 25, 26, dan 28)	yang sah	Pemda, dan swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
2.6.2.	Rehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan industri yang terdegradasi	3. Kawasan Andalan Priangan Timur-Pangandaran	Lampiran XIV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Hali (14)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemampuan, Pemda, dan Swasta				
		Kawasan Andalan Kedungsepur, Kawasan Andalan Wanasakti, Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, Kawasan Andalan Gerbangketosusila, Kawasan Andalan Cekungan Bandung, Kawasan Andalan Bincau, kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan	Lampiran XIV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali (12, 14, 15, 20)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemampuan, Ketentu L1, Pemda, dan Swasta				
		Kawasan Andalan Cokomeng Bandung, Kawasan Andalan Bincau, kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan	Lampiran XIV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali (18, 19, 21, 25)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemampuan, Kemda, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
2.7.		Sindhongo Bondowoso-Jember							
2.7.1.	Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Pariwisata untuk kegiatan pengembangan kawasan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana	1. Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta, Kawasan Andalan Bojonegara-Merak-Cilegon, Kawasan Andalan Lam Krakatau dan Sekeloa, Kawasan Andalan Popunjur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sukabumi dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Celungau Bandung, Kawasan Andalan Sthosuka-	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali (1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 16, 19, 21, 30, 31, dan 32)	APBN, APB L, dan/atau sumber lain yang sah	Kementerian, Kemen KP, Kemcuhut, Kemen PU, Punda, dan Srasata				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Wondoloren, Kawasan Andalan Medungsempur, Kawasan Andalan Hemohudur dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Yogyakarta dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Malang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bali Utara, Kawasan Andalan Bali Selatan, serta Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya							
9.	Kawasan Andalan Laut Pulau Sribu, Kawasan Andalan		Lampiran XIV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemendagri, Kercua AP, Kemcubuk, Kercua PU.				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Puncak, Kawasan Andalan Priangan Timor-Pangandaran, Kawasan Andalan Garut, kawasan Andalan Madura dan Kepulauan	Andalan di Pulau Jawa-Bali (3, 7, 11, 20, 28)		Pemda, dan swasta				
		3. Kawasan Andalan Jawa Tengah Selatan, kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Cilacap dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Hiban-Bijau-goro, kawasan Andalan Aedui Tutung	Lampiran XIV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan kawasan Andalan di Pulau Jawa Bali (5, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 29)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kemenbudpar, Kemendik, Kemendikbud, Kemendikbud, Kemendikbud, Kemendikbud, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
		Agung Riliat, kawasan Andalan Simbondo-Bondowoso-Jember, kawasan Andalan Madium dan Selaluru, serta kawasan Andalan Lam. Madura dan Sekitarnya	Lampiran XIV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa Bali (23)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kecububudpat, Ketuau ap, Kemanhan, Ketuau PU, Pemda, dan Swasta				
2.7.2.	Rehabilitasi kawasan andalan dengan sektor unggulan pariwisata yang terdegradasi	Kawasan Andalan Yogyakarta dan Selaluru	Lampiran XIV: Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa-Bali (19)	APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah	Kecububudpat, Ketuau ap, Pemda, dan Swasta				

NO.	INDIKASI PROGRAM UTAMA	LOKASI	STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN			
						I 2011- 2014	II 2015- 2019	III 2020- 2024	IV 2025- 2027
2.8. 2.8.1.	Perwujudan Kawasan Andalan dengan Sektor Unggulan Perdagangan dan Jasa Pengembangan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan perdagangan dan jasa, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana	Kawasan Andalan Perkotaan Jakarta	Lampiran XIV Strategi Operasionalisasi Perwujudan Kawasan Andalan di Pulau Jawa Bali [1]	APBN, APBD, dan/ atau sumber lain yang sah	Kemampuan, Ketekunab, Ketekadikbud, Ketekadukominfo, Pemuda, dan Swasta				

PRESIDEN RI TUNJUK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHONYONO